Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

Buku I
Ringkasan Eksekutif

(Buku ke-1 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GRAFIK		iii
KATA PENGANTAR		v
Hasil Utama Pemeriksaan BPK Selama Semester I Tahun 2012		1
BAB 1	Pelaksanaan Pemeriksaan BPK	3
BAB 2	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012	5
BAB 3	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	33
BAB 4	Hasil Pemeriksaan yang Signifikan	37

DAFTAR TABEL

2.1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2012

2.2 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 s.d. 2011

2.3 Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Provinsi

2.4 Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Kabupaten

2.5 Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Kota

2.6 Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya

2.7 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

2.8 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan

2.9 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Pusat

2.10 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Provinsi

2.11 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten/Kota

2.12 Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada BUMN dan Badan Lainnya

2.13 Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK Semester I Tahun 2012

2.14 Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

2.15 Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK Semester I Tahun 2012

2.16 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat

2.17 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah

2.18 Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan BUMD

3.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.2 Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2012 atas Data TLRHP Sejak Tahun 2008

3.3 Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012

3.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2012

4 Temuan Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2012

DAFTAR GRAFIK

1 Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012 kepada lembaga perwakilan secara tepat waktu. IHPS merupakan dokumen yang memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam satu semester. IHPS I Tahun 2012 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18 yang mewajibkan BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pada Semester I Tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai agenda utama pemeriksaan. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang wajib dilaksanakan. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

IHPS I Tahun 2012 ini merupakan ikhtisar dari 622 laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan telah mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari semakin baiknya opini atas laporan keuangan entitas. BPK memberikan penghargaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD/ lembaga atau badan lainnya yang telah bekerja keras memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan. Perbaikan tersebut hendaknya terus ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian, pada Semester I Tahun 2012, BPK juga mencatat sejumlah temuan yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Temuan tersebut antara lain adalah temuan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; temuan pengelolaan aset negara/daerah berupa aset dikuasai pihak lain dan aset tidak diketahui keberadaannya; serta temuan kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan temuan berulang yang menjadi perhatian publik seperti perjalanan dinas, khususnya perjalanan dinas fiktif dan ganda.

BPK mengharapkan perhatian dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar permasalahan temuan berulang tersebut segera memperoleh solusi komprehensif. Temuan yang selalu berulang ini menunjukkan masih belum optimalnya pengendalian dan pengawasan internal entitas serta komitmen entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara menyeluruh.

Selama Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan BPK tersebut antara lain sebagai berikut.

a. BPK telah melaksanakan mandat undang-undang dengan telah memeriksa 527 laporan keuangan entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta badan lainnya.

b. Selama proses pemeriksaan, BPK telah menyelamatkan uang/aset negara/daerah/perusahaan senilai Rp311.340,81 juta yang berasal dari penyetoran uang/aset ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset.

c. BPK telah mendorong upaya pengamanan aset negara/daerah dengan merekomendasikan antara lain pencatatan aset di laporan keuangan termasuk melakukan inventarisasi dan penilaian (IP) serta verifikasi dan validasi penambahan aset tetap hasil IP; dan sertifikasi kepemilikan aset negara/daerah.

IHPS I Tahun 2012 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. IHPS I Tahun 2012 ini tidak lagi menjadi satu buku sebagaimana tahun sebelumnya tetapi dibagi menjadi lima buku. Buku ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut: Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDTT; serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Akhir kata, IHPS ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. Dengan demikian, informasi yang disampaikan melalui IHPS I Tahun 2012 ini dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Informasi rinci dan lengkap dari hasil pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2012 dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan atas tiap-tiap entitas yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat/*digital video disc* (dvd), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Jakarta, September 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Hasil Utama Pemeriksaan BPK Selama Semester I Tahun 2012

Pokok-pokok pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

- **Pelaksanaan Mandat Undang-undang.** Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa laporan keuangan entitas sebanyak 527 laporan keuangan yang terdiri atas 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat (termasuk 4 LHP dukungan atas LK Bagian Anggaran (BA) 999), 430 LKPD (termasuk 4 LKPD TA 2010), serta 6 LK badan lainnya termasuk BUMN.

- **Meningkatkan Akuntabilitas**. Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding Semester I Tahun 2011. Jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat dari 52 menjadi 66. Jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP juga meningkat dari 32 menjadi 67. Perbaikan opini tersebut antara lain disebabkan entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

- **Penyelamatan Uang/Aset**. Hasil pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2012 mengungkapkan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp12.480.024,26 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.976 kasus senilai Rp8.928.757,65 juta merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

  Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp311.340,81 juta.

- **Penegakan Hukum**. Pada periode Tahun 2003 s.d. 2012 (Semester I), BPK telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang mengandung unsur pidana kepada aparat penegak hukum (APH) sebanyak 319 temuan senilai Rp34.066,86 miliar. LHP BPK yang mengandung unsur pidana tersebut menjadi masukan penting bagi APH untuk menindaklanjutinya.

Dengan semua hasil pemeriksaan termasuk pokok-pokok pemeriksaan di atas, BPK berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, untuk keperluan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. BPK juga memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Selain itu, untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19, BPK juga menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk disampaikan kepada lembaga perwakilan, presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi, yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparat penegak hukum).

IHPS I Tahun 2012 merupakan ikhtisar dari 622 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada Semester I Tahun 2012, BPK memprioritaskan pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKPD sebagai agenda utama pemeriksaan. Hal tersebut disebabkan pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang wajib dilaksanakan. Pemeriksaan laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, BPK menyampaikan LHP atas pemeriksaan laporan keuangan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPD/DPRD) selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

BPK tidak hanya memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan, tetapi memiliki mandat untuk menilai aspek pengelolaan keuangan negara dari segi ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu program/kegiatan. Selain itu, BPK juga berwenang melakukan PDTT yang dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal

yang diperiksa. PDTT tidak memberikan opini ataupun untuk memberikan penilaian kinerja. PDTT dapat bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati. Hal-hal yang termasuk dalam PDTT ini antara lain pemeriksaan investigatif yang di antaranya bertujuan untuk mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau korupsi, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain. Pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat dilaksanakan sebagai pendukung atau tindak lanjut atau pendalaman dari pemeriksaan keuangan. BPK dapat melakukan pemeriksaan atas akun-akun tertentu dalam laporan keuangan melalui PDTT untuk mendukung pemberian opini atas laporan keuangan. Jika dalam pemeriksaan keuangan ditemukan dugaan penyimpangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara atau pelaksanaan kegiatan/ program, BPK dapat melakukan pendalaman atas permasalahan tersebut dengan PDTT, setelah pemeriksaan keuangan selesai dilaksanakan.

IHPS juga memberikan gambaran hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan penyelesaian kerugian negara. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) dan petunjuk teknisnya. Pejabat entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya setiap semester BPK harus melaporkan hasil PTLRHP di dalam IHPS setelah melakukan penelaahan atas dokumentasi tindak lanjut, pembahasan dengan entitas dan/atau pemeriksaan tindak lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012, BPK telah memberikan 183.862 rekomendasi senilai Rp80,97 triliun. Terkait dengan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 sebanyak 16.883 kasus senilai Rp4.640,68 miliar. Pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian kerugian negara ini merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Semakin baik tindak lanjut yang dilakukan oleh entitas atas rekomendasi BPK, akan meminimalisasi terjadinya temuan berulang dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan entitas. Demikian pula dengan penyelesaian kerugian negara, selain akan berdampak kepada peningkatan pendapatan negara juga akan semakin meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan negara yaitu semakin tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara.

BAB 2

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

IHPS I Tahun 2012 menyajikan ikhtisar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2012, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah. Pemantauan tindak lanjut dan penyelesaian kerugian negara/daerah yang disajikan adalah posisi per akhir Juni 2012.

Selama Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa 622 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan badan lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 2.1. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 527 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 objek PDTT.

Tabel 2.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2012

Entitas Yang Diperiksa	Jenis Pemeriksaan			Jumlah
	Keuangan	Kinerja	PDTT	
Pemerintah Pusat	**91**	**9**	**37**	**137**
Pemerintah Daerah	**430*)**	**1**	**24**	**455**
- Provinsi	28	-	5	33
- Kabupaten/Kota	402	1	19	422
BUMN	**1**	**3**	**18**	**22**
BUMD	**-**	**1**	**2**	**3**
Badan Lainnya	**5**	**-**	**-**	**5**
Jumlah	**527**	**14**	**81**	**622**

Catatan:
*) Termasuk 4 LKPD TA 2010

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2012 mengungkapkan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp12.480.024,26 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.976 kasus senilai Rp8.928.757,65 juta merupakan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Rekomendasi

BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset. Adapun sisanya sebanyak 9.129 kasus senilai Rp3.551.266,61 juta merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan serta kelemahan SPI. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp311.340,81 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp150.405,08 juta, potensi kerugian senilai Rp14.514,36 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp146.421,37 juta.

Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2012 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan TA 2011 atas LKPP, LK Bendahara Umum Negara (BUN), 89 LKKL (termasuk 4 LHP dukungan atas LK BA 999), 430 LKPD (termasuk 4 LKPD TA 2010), dan 6 LK badan lainnya termasuk BUMN.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK). Cakupan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL termasuk LK BUN, LKPD, dan LK badan lainnya termasuk BUMN meliputi aset senilai Rp6.047,97 triliun, kewajiban senilai Rp3.400,29 triliun, ekuitas senilai Rp2.647,68 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.717,12 triliun, belanja senilai Rp1.798,21 triliun, dan pembiayaan neto/laba/rugi senilai Rp154,68 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan keuangan.

Opini Pemeriksaan

Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah sebagai berikut.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2011. Opini tersebut sama dengan opini LKPP Tahun 2010. Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2011 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan antara lain (a) permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap pemerintah.

Masalah-masalah tersebut antara lain aset tetap belum dilakukan IP; aset tetap belum selesai dilakukan IP; aset tetap hasil IP dicatat ganda; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; dan pelaksanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat aset tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan aset tetap. (b) pemerintah telah melaksanakan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), namun masih terdapat kelemahan antara lain pemerintah belum menemukan dokumen *cessie* atas aset eks BPPN berupa aset kredit; aset yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak didukung dokumen sumber yang valid; aset properti sebanyak 917 item belum dinilai. Jika dibandingkan dengan LKPP Tahun 2010, jumlah akun yang dikecualikan pada LKPP Tahun 2011 lebih sedikit.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian negara, lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta LK BUN. Jumlah LKKL termasuk LK BUN Tahun 2011 yang diperiksa BPK adalah sebanyak 86 LKKL atau lebih banyak 3 LKKL dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2010. Hal ini disebabkan adanya penambahan bagian anggaran yang diperiksa yaitu Ombudsman Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).

Terhadap 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2011, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 66 LKKL, opini WDP atas 18 LKKL termasuk LK BUN, serta opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 2 LKKL.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKKL termasuk LK BUN pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding Semester I Tahun 2011. Jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP meningkat dari 52 menjadi 66. Perbaikan opini tersebut antara lain karena entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2006 s.d. Tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 s.d. 2011

Tahun LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	LKKL/BUN
2006	7	8%	36	46%	0	0%	36	46%	79
2007	15	19%	31	39%	1	1%	33	41%	80
2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
2011	66	77%	18	21%	0	0%	2	2%	86

Berdasarkan Tabel 2.2., pada periode Tahun 2006 s.d. 2011, kualitas penyajian LKKL mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan peningkatan persentase LKKL yang memperoleh opini WTP (jumlah opini WTP dibandingkan dengan total LKKL pada tahun yang sama) yaitu dari 8% pada Tahun 2006 menjadi

77% pada Tahun 2011 atau meningkat sebanyak 69%. Di samping peningkatan persentase opini WTP, perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan juga terlihat dari penurunan jumlah persentase opini WDP, TW, dan TMP pada periode tahun yang sama. Kecenderungan peningkatan persentase opini WTP dan penurunan persentase opini selain WTP ini menggambarkan peningkatan keandalan data dan informasi yang disajikan di LKKL dan upaya optimal yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (KL) dalam memperbaiki penyajian laporan keuangan termasuk melaksanakan rekomendasi BPK.

Permasalahan dan Rekomendasi

Secara garis besar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KL yang tidak memperoleh opini WTP pada Tahun Anggaran 2011 antara lain adalah permasalahan pengelolaan akun kas, piutang, persediaan, dan aset tetap.

KL diharapkan dapat melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK di tiap-tiap LHP antara lain menatausahakan pertanggungjawaban uang kas sesuai ketentuan; mengoptimalkan upaya validasi dan pencatatan atas pembayaran PNBP yang belum bisa divalidasi; melakukan pengendalian dan pengawasan persediaan; serta melakukan validasi koreksi inventarisasi dan penilaian aset tetap.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa 426 LKPD Tahun 2011 (sekitar 81,30%) dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan 4 LKPD Tahun 2010 yaitu LKPD Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku) yang baru dapat diselesaikan pada Semester I 2012, serta Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua) yang baru diterima BPK pada awal Tahun 2012.

Terhadap 426 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP atas 67 entitas (termasuk 33 entitas dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP)), opini WDP atas 316 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 5 entitas, dan opini TMP atas 38 entitas.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan dibanding LKPD Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011. Jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP meningkat dari 32 menjadi 67. Perbaikan opini tersebut antara lain karena entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Adapun opini LKPD Tahun 2011 berdasarkan tingkatan pemerintah digambarkan pada grafik berikut.

Grafik 1. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

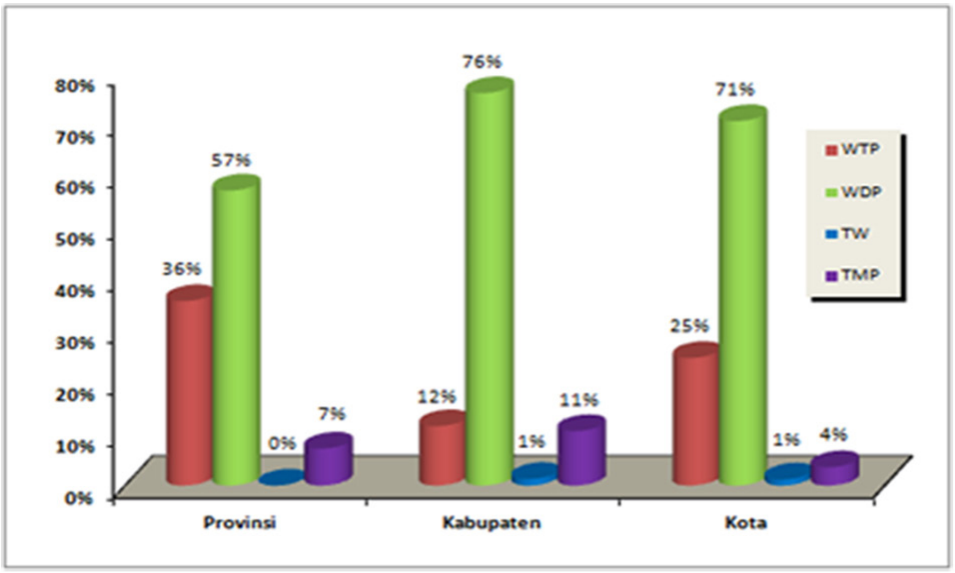

Dari Grafik 1., terlihat bahwa pada Tahun 2011 persentase opini WDP (jumlah opini WDP dibandingkan dengan total LK per tingkat pemerintahan) masih tinggi di semua tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas penyajian LKPD sehingga dapat memperoleh opini yang lebih baik di masa yang akan datang. Perbandingan opini antar pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah provinsi relatif lebih banyak yang telah memperoleh opini WTP kemudian diikuti secara berurutan oleh pemerintah kota dan kabupaten.

Gambaran penyajian LKPD berdasarkan tingkat pemerintahan dijelaskan sebagai berikut.

LKPD Provinsi

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa 28 LKPD provinsi Tahun 2011 yang diserahkan pemerintah provinsi kepada BPK. Terhadap 28 LKPD provinsi Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 10 entitas (termasuk 4 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 16 entitas, dan opini TMP atas 2 entitas.

Perkembangan opini periode Tahun 2006 s.d. 2011 pada pemerintah provinsi disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Provinsi

Tahun LK	Opini								Jumlah	
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%		
2006	0	0%	25	76%	4	12%	4	12%	33	100%
2007	1	3%	21	64%	3	9%	8	24%	33	100%
2008	0	0%	24	73%	1	3%	8	24%	33	100%
2009	1	3%	24	73%	3	9%	5	15%	33	100%
2010 (Sem I) *)	6	22%	20	71%	0	0%	2	7%	28	100%
2010**)	6	18%	22	67%	0	0%	5	15%	33	100%
2011 (Sem I)***)	10	36%	16	57%	0	0%	2	7%	28	100%

*) LK pemerintah provinsi Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011
**) LK pemerintah provinsi Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I dan II Tahun 2011
***) LK pemerintah provinsi Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 2.3., diketahui bahwa penyajian LK provinsi relatif mengalami peningkatan sejak LK Tahun 2006. Perkembangan persentase opini WTP dibandingkan dengan total LK yang diperiksa mengalami peningkatan 18% dari Tahun 2006 ke Tahun 2010. Hasil pemeriksaan atas LK pada Semester I Tahun 2011 jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2012 diketahui bahwa presentase opini LK provinsi yang memperoleh opini WTP meningkat dari 22% menjadi 36%. Namun demikian, secara keseluruhan opini LK provinsi masih didominasi LK yang memperoleh opini WDP. Peningkatan opini menjadi WTP atau ke opini yang lebih baik menggambarkan semakin andalnya data dan informasi keuangan yang disajikan dalam LK pemerintah provinsi.

LKPD Kabupaten

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa 313 LKPD kabupaten Tahun 2011 yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada BPK. Terhadap 313 LKPD kabupaten Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 36 entitas (termasuk entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 240 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 33 entitas.

Perkembangan opini periode Tahun 2006 s.d. 2011 pada pemerintah kabupaten disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Kabupaten

Tahun LK	Opini								Jumlah	
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%		
2006	2	1%	236	68%	21	6%	85	25%	344	100%
2007	1	1%	201	57%	45	13%	103	29%	350	100%
2008	6	2%	235	65%	26	7%	96	26%	363	100%
2009	7	2%	240	63%	37	10%	95	25%	379	100%
2010 (Sem I) *)	15	6%	200	77%	10	4%	35	13%	260	100%
2010**)	16	4%	252	64%	23	6%	103	26%	394	100%
2011 (Sem I)***)	36	12%	240	76%	4	1%	33	11%	313	100%

*) LK pemerintah kabupaten Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011
**) LK pemerintah kabupaten Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I dan II Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012
***) LK pemerintah kabupaten Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012

Pemerintah kabupaten masih mempunyai ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangannya. Berdasarkan Tabel 2.4. terlihat bahwa sejak Tahun 2006, lebih dari 50% LK pemerintah kabupaten belum memperoleh opini WTP. Pemerintah kabupaten memang terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya dari tahun ke tahun. Hasilnya antara lain terlihat dari semakin bertambahnya persentase LK yang memperoleh opini WTP. Namun demikian perbaikan kualitas opini pemeriksaan tersebut masih belum optimal karena persentase LK yang memperoleh opini selain WTP masih relatif sama dari tahun ke tahun. Untuk itu, pemerintah kabupaten perlu lebih mengoptimalkan upaya peningkatan keandalan dan kualitas penyajian LK antara lain dengan mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi BPK.

LKPD Kota

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa 85 LKPD kota Tahun 2011 yang diserahkan pemerintah kota kepada BPK. Terhadap 85 LKPD kota Tahun 2011 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 21 entitas (termasuk entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 60 entitas, opini TW atas 1 entitas, dan opini TMP atas 3 entitas.

Perkembangan opini atas LK pemerintah kota periode Tahun 2006 s.d. 2011 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 pada Pemerintah Kota

Tahun LK	Opini								Jumlah	
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%		
2006	1	1%	66	77%	3	3%	16	19%	86	100%
2007	2	2%	61	71%	11	13%	12	14%	86	100%
2008	7	8%	64	72%	4	4%	14	16%	89	100%
2009	7	7%	66	72%	8	9%	11	12%	92	100%
2010 (Sem I) *)	11	16%	51	73%	2	3%	6	8%	70	100%
2010**)	12	13%	67	72%	3	3%	11	12%	93	100%
2011 (Sem I)***)	21	25%	60	71%	1	1%	3	4%	85	100%

*) LK pemerintah kota Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2011
**) LK pemerintah kota Tahun 2010 yang diperiksa pada Semester I dan II Tahun 2011
***) LK pemerintah kota Tahun 2011 yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012

Tabel 2.5. menunjukkan bahwa kualitas opini atas laporan keuangan pemerintah kota cenderung meningkat sejak Tahun 2006. Pada Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah kota yang memperoleh opini WTP masih 1% dari total LK yang diperiksa. Pada Tahun 2010 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 13%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2011 atas LK Tahun 2010 dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2012 atas LK Tahun 2011, jumlah persentase laporan keuangan pemerintah kota yang memperoleh opini WTP juga meningkat 9%. Di sisi lain, persentase laporan keuangan pemerintah kota yang memperoleh opini selain WTP masih relatif besar yaitu lebih dari 70%. Tingginya persentase ini menunjukkan perlunya pemerintah kota terkait untuk lebih mengoptimalkan upaya penyajian LK menjadi lebih andal dan berkualitas antara lain dengan lebih mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi BPK.

Permasalahan dan Rekomendasi

Secara garis besar penyebab LKPD (provinsi/kabupaten/kota) tidak memperoleh opini WTP pada Tahun 2011 (hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2012) antara lain permasalahan pengelolaan akun kas, persediaan, investasi permanen dan non permanen, serta aset tetap.

Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK di tiap-tiap LHP antara lain berkoordinasi dengan bank dalam mengelola rekening bendahara pengeluaran; meningkatkan pengelolaan, penatausahaan, pengendalian, dan pengawasan persediaan; menetapkan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk menyajikan investasi non permanen dana bergulir berdasarkan *net realizable value*; serta menyusun kebijakan kapitalisasi aset tetap dan pengamanan aset melalui bukti kepemilikan.

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 laporan keuangan BUMN dan badan lainnya Tahun 2011. BPK memberikan opini WTP untuk LK BI, LK *Loan* ADB No. 2575-INO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan LK *Loan* ADB No. 2654-INO *Metropolitan Sanitation Management and*

Health Project (MSMHP), serta opini WTP-DPP untuk LK PT Jamsostek. BPK juga telah memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 2011 M/1432 H dan opini TMP untuk LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perkembangan opini enam entitas tersebut untuk Tahun 2009 s.d. 2011 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini		
		2009	2010	2011
1	PT Jamsostek*)	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
2	Bank Indonesia (BI)	WTP	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	TMP	TMP	TMP
4	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)	TMP	TMP	WDP
5	*Loan* ADB 2575-INO PNPM Mandiri	--	WTP	WTP
6	*Loan* ADB 2654-INO MSMHP	--	--	WTP

Keterangan: *) Pada Tahun 2009, PT Jamsostek mendapat opini WTP-DPP dari KAP Dolly, Bambang, Sudarmaji, dan Rekan. Adapun di Tahun 2010, PT Jamsostek mendapat opini WTP dari KAP Hertanto, Sidik, dan Rekan

Temuan Pemeriksaan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pada bagian ini disajikan hasil pemeriksaan yang terkait dengan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengendalian intern pada pemerintah termasuk KL dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain memberikan opini, pelaksanaan pemeriksaan keuangan oleh BPK juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan SPI.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya 5.036 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.050
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.964
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.022
	Jumlah	**5.036**

Dari total temuan kelemahan SPI sebanyak 5.036 kasus, sebanyak 616 kasus merupakan kelemahan SPI di pemerintah pusat, sebanyak 378 kasus di pemerintah provinsi, sebanyak 3.991 kasus di pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 5 kasus di BUMN, dan sebanyak 46 kasus di lingkungan badan lainnya.

Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Tabel 2.8. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	2.004	1.159.769,42
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	426	3.205.164,77
3	Kekurangan Penerimaan	1.113	849.463,19
	Sub Total 1	**3.543**	**5.214.397,38**
4	Administrasi	2.702	-
5	Ketidakhematan	277	281.232,51
6	Ketidakefisienan	2	537,50
7	Ketidakefektifan	380	1.505.408,67
	Sub Total 2	**3.361**	**1.787.178,68**
	Total	**6.904**	**7.001.576,06**

Berdasarkan Tabel 2.8., hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.904 kasus senilai Rp7.001.576,06 juta. Sub Total 1 menunjukkan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.543 kasus senilai Rp5.214.397,38 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset.

Sub Total 2 menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 3.361 kasus senilai Rp1.787.178,68 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif.

Adapun rincian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan selama Semester I Tahun 2012 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN dan badan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil pemeriksaan atas LKKL mengungkapkan 1.072 kasus senilai Rp3.080.474,00 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKKL, sebanyak 618 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp2.197.965,87 juta. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 454 kasus senilai Rp882.508,13 juta. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Pusat

No.	Kelompok Temuan	Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	387	269.176,78
2	Potensi Kerugian Negara	71	1.601.231,02
3	Kekurangan Penerimaan	160	327.558,07
	Sub Total 1	**618**	**2.197.965,87**
4	Administrasi	359	-
5	Ketidakhematan	40	95.181,00
6	Ketidakefektifan	55	787.327,13
	Sub Total 2	**454**	**882.508,13**
	Total	**1.072**	**3.080.474,00**

Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL selama Semester I Tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain adalah kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan penerimaan; serta pengelolaan aset negara.

- Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 104 kasus senilai Rp114.886,77 juta. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; pengawas lapangan dan panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

  Rekomendasi

  Terhadap kasus-kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain memerintahkan pejabat terkait untuk menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; dan memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

- Permasalahan kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 75 kasus senilai Rp48.208,52 juta. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa; tidak membuat berita acara serah terima sesuai kondisi sebenarnya; pengawasan pelaksanaan pekerjaan kurang optimal; dan lalai mengenakan denda atas pekerjaan yang tidak selesai.

  Rekomendasi

  Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar meningkatkan

pengawasan pelaksanaan pekerjaan; memberikan sanksi kepada pejabat terkait dan pihak rekanan; serta mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan menyetorkannya ke kas negara.

- Permasalahan pengelolaan aset negara di pemerintah pusat antara lain aset negara dikuasai pihak lain yang berpotensi merugikan negara sebanyak 26 kasus senilai Rp855.043,03 juta. Hal ini mengakibatkan sejumlah aset tetap milik negara dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak berhak serta dikuasai pihak lain yang tidak sah. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan yang berlaku; serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus aset negara yang dikuasai pihak lain tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk melakukan pengamanan aset; mengupayakan penagihan atas aset yang dikuasai pihak lain; serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

2. Pemerintah provinsi

Hasil pemeriksaan atas LKPD provinsi mengungkapkan 621 kasus senilai Rp1.002.822,49 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD provinsi, sebanyak 343 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp780.557,06 juta. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan sebanyak 278 kasus senilai Rp222.265,43 juta. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.10. berikut.

Tabel 2.10. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Provinsi

No.	Kelompok Temuan	Provinsi	
		Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	216	402.190,73
2	Potensi Kerugian Daerah	40	325.894,83
3	Kekurangan Penerimaan	87	52.471,50
	Sub Total 1	**343**	**780.557,06**
4	Administrasi	218	-
5	Ketidakhematan	24	74.514,75
6	Ketidakefektifan	36	147.750,68
	Sub Total 2	**278**	**222.265,43**
	Total	**621**	**1.002.822,49**

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD provinsi selama Semester I Tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain permasalahan pengadaan barang/jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan; serta pengelolaan aset daerah.

- Permasalahan pengadaan barang dan jasa di pemerintah provinsi antara lain ditunjukkan dengan kasus-kasus kerugian daerah akibat kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 61 kasus senilai Rp21.443,27 juta. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; lalai melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai kondisi di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

  Rekomendasi

  Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain untuk memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai melaksanakan tugas.

- Permasalahan kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 39 kasus senilai Rp9.094,67 juta. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa; tidak optimal dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan; tidak tegas mengenakan denda atas pekerjaan yang terlambat; dan rekanan lalai menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

  Rekomendasi

  Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan menyetorkannya ke kas daerah.

- Permasalahan pengelolaan aset daerah di pemerintah provinsi antara lain potensi kerugian daerah sebagai akibat aset negara yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp108.082,01 juta. Kasus-kasus pengelolaan aset daerah tersebut disebabkan antara lain pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset. Hal ini mengakibatkan sejumlah aset tetap milik daerah dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak berhak serta dikuasai pihak lain yang tidak sah.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus aset daerah yang dikuasai pihak lain tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk segera menyelesaikan inventarisasi aset tetap; melakukan pengamanan aset dengan meninjau kembali perjanjian pinjam pakai aset; serta segera membuat sertifikat tanah guna menetapkan status aset yang dikuasai pihak lain.

3. Pemerintah kabupaten/kota

Hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota mengungkapkan 5.155 kasus senilai Rp2.781.039,09 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota, sebanyak 2.565 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp2.100.727,68 juta. Adapun sisanya merupakan temuan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 2.590 kasus senilai Rp680.311,41 juta. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Kelompok Temuan	Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	1.393	463.186,10
2	Potensi Kerugian Daerah	314	1.278.027,31
3	Kekurangan Penerimaan	858	359.514,27
	Sub Total 1	**2.565**	**2.100.727,68**
4	Administrasi	2.100	-
5	Ketidakhematan	207	109.444,30
6	Ketidakefisienan	2	537,50
7	Ketidakefektifan	281	570.329,61
	Sub Total 2	**2.590**	**680.311,41**
	Total	**5.155**	**2.781.039,09**

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD kabupaten/kota selama Semester I Tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan daerah yang belum/tidak dipungut atau ditetapkan; pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; serta potensi kerugian daerah akibat piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

- Kekurangan penerimaan berasal dari penerimaan (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp230.559,70 juta. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan

pengelolaan keuangan daerah; penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak; dan rekanan tidak memenuhi kewajiban perjanjian sewa menyewa.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada bupati/walikota antara lain meninjau kembali perjanjian dengan rekanan/investor dan mengenakan sanksi kepada pejabat terkait yang tidak optimal mengelola keuangan daerah.

- Permasalahan pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten/kota antara lain ditunjukkan dengan kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 323 kasus senilai Rp72.826,17 juta. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; pengawas lapangan dan panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan penilaian kembali volume pekerjaan di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

  Rekomendasi

  Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; serta memberi sanksi kepada pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas.

- Potensi kerugian daerah akibat piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 80 kasus senilai Rp119.564,16 juta. Kasus-kasus tersebut disebabkan antara lain entitas belum memiliki kebijakan akuntansi tentang penyisihan piutang termasuk tagihan dana bergulir, entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) batas waktu pengembalian dana dan penanganan kredit macet, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana bergulir.

  Rekomendasi

  Terhadap kasus-kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk menetapkan kebijakan akuntansi tentang penyisihan piutang termasuk tagihan dana bergulir; pejabat terkait agar lebih cermat melakukan penatausahaan dana bergulir dan mempedomani peraturan yang telah ditetapkan; segera membuat SOP pengelolaan piutang tidak tertagih; memberi sanksi kepada pejabat yang tidak mampu mengelola dana bergulir; mengupayakan pengembalian/penagihan dana bergulir dari yang menunggak; serta menyetorkan pengembalian pokok pinjaman ke kas daerah.

4. BUMN dan Badan Lainnya

Hasil pemeriksaan atas LK BUMN mengungkapkan 5 kasus senilai Rp642,26 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sedangkan hasil pemeriksaan atas LK badan lainnya mengungkapkan 51 kasus senilai Rp136.598,38 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dari total temuan pemeriksan atas LK BUMN dan badan lainnya, sebanyak 17 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp135.146,90 juta. Rincian temuan pemeriksaan keuangan pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Temuan Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012 pada BUMN dan Badan Lainnya

No.	Kelompok Temuan	BUMN		Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Negara/Perusahaan	-		8	25.215,86
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	-		1	11,67
3	Kekurangan Penerimaan	1	642,26	7	109.277,11
Sub Total 1		**1**	**642,26**	**16**	**134.504,64**
4	Administrasi	4		21	-
5	Ketidakhematan	-		6	2.092,47
6	Ketidakefektifan	-		8	1,27
Sub Total 2		**4**		**35**	**2.093,74**
Total		**5**	**642,26**	**51**	**136.598,38**

Hasil pemeriksaan BPK atas LK BUMN dan badan lainnya selama Semester I Tahun 2012 menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan.

- Kekurangan penerimaan (selain denda keterlambatan) yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan yang terjadi di BUMN dan badan lainnya sebanyak 6 kasus senilai Rp105.427,90 juta. Kasus-kasus tersebut antara lain disebabkan belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci penghitungan penerimaan perusahaan; serta belum melaksanakan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain agar melakukan revisi ketentuan pedoman perhitungan penerimaan perusahaan secara jelas dan rinci, dan melaksanakan kewajiban sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.

Respon Entitas

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp253.192,82 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp108.646,70 juta, potensi kerugian senilai Rp929,23 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp143.616,89 juta.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan, terdiri atas 9 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD.

Temuan Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja selama Semester I Tahun 2012 mengungkapkan 80 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp125.437,39 juta. Di samping kasus-kasus tersebut, hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan 104 kasus kelemahan SPI dan 11 kasus yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan indikasi kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp86.472,67 juta, dan 16 kasus penyimpangan administrasi.

Tabel 2.13. Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK Semester I Tahun 2012

No.	Kelompok Temuan	Pusat		Kabupaten/Kota		BUMN		BUMD		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan											
1	Ketidakhematan	5	5.767,02	-	-	7	70.284,85	-	-	12	76.051,87
2	Ketidakefisienan	-	-	-	-	2	29.766,27	-	-	2	29.766,27
3	Ketidakefektifan	42	13.266,07	6	-	18	6.353,18	-	-	66	19.619,25
	Sub Total 1	**47**	**19.033,09**	**6**	**-**	**27**	**106.404,30**	-	-	**80**	**125.437,39**
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
4	Indikasi Kerugian	5	36.410,49	-	-	-	-	-	-	5	36.410,49
5	Potensi Kerugian	3	28.906,16	-	-	1	484,08	-	-	4	29.390,24
6	Kekurangan Penerimaan	-	-	-	-	2	20.671,94	-	-	2	20.671,94
7	Administrasi	10	-	3	-	3	-	-	-	16	-
	Sub Total 2	**18**	**65.316,65**	**3**	**-**	**6**	**21.156,02**	**-**	**-**	**27**	**86.472,67**
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern											
8	SPI	68	-	8	-	23	-	5	-	104	-
	Total	**133**	**84.349,74**	**17**	**-**	**56**	**127.560,32**	**5**	**-**	**211**	**211.910,06**

Hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilaksanakan selama Semester I Tahun 2012 yaitu

- Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 belum efektif serta pelaksanaan pengadaan KTP elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

  Kesimpulan tersebut diperoleh karena masih ditemukan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp6.037,50 juta, sebanyak 3 kasus ketidakhematan senilai Rp605,84 juta, sebanyak 24 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, dan permasalahan lainnya seperti ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36.410,49 juta, potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28.906,16 juta, penyimpangan administrasi sebanyak 4 kasus.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan belum sepenuhnya efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik, transparan dan akuntabel, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam hal ini, masih ditemukan kelemahan sistem pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan Kemhan dan TNI.

- Pemeriksaan kinerja lainnya.

  Pemeriksaan kinerja lainnya dilaksanakan pada 8 objek pemeriksaan yang terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 objek pemeriksaan BUMN, dan 1 objek pemeriksaan BUMD.

  Objek pemeriksaan kinerja lainnya terbagi atas pemeriksaan terhadap jasa pelayanan barang pada dua objek pemeriksaan dan pada enam objek kinerja lainnya.

  Terhadap pemeriksaan kinerja jasa pelayanan barang, BPK menyimpulkan bahwa jasa pelayanan barang pada PT Pelindo I Kantor Pusat, Kantor Cabang Belawan, dan *Belawan International Container Terminal* (BICT) di Medan, serta PT Pelindo III Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tanjung Perak di Surabaya belum sepenuhnya efektif, efisien, dan ekonomis. Kesimpulan tersebut diperoleh karena masih ditemukan permasalahan atas jasa pelayanan barang yaitu 12 kasus yang mempengaruhi efektivitas, 2 kasus yang mempengaruhi efisiensi, dan 5 kasus ketidakhematan, serta 23 kasus lainnya.

  Terhadap pemeriksaan kinerja lainnya atas 6 objek pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang terdiri atas 31 kasus yang mempengaruhi efektivitas dan 4 kasus ketidakhematan, serta 35 kasus lainnya.

Respon Entitas

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian dan potensi kerugian dengan penyetoran uang ke kas negara dan/atau penyerahan aset senilai Rp50.987,19 juta dengan rincian temuan indikasi kerugian senilai Rp37.402,06 juta, dan potensi kerugian senilai Rp13.585,13 juta.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas 81 objek pemeriksaan pada 62 entitas. Entitas tersebut terdiri atas 37 objek pemeriksaan pada 23 entitas di lingkungan pemerintah pusat, 24 objek pemeriksaan pada 20 entitas di lingkungan pemerintah daerah, 18 objek pemeriksaan pada 17 entitas di lingkungan BUMN, dan 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas di lingkungan BUMD. Cakupan pemeriksaan atas 62 entitas tersebut adalah senilai Rp405.480.653,96 juta atau sekitar 66,6% dari realisasi anggaran. Rincian cakupan PDTT di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan
Pusat	39.565.567,02	31.343.830,63	34.505.698,89
Provinsi	3.775.002,89	2.877.092,39	1.820.851,58
Kabupaten/Kota	13.528.989,99	8.973.212,06	4.902.392,83
BUMN	513.525.522,82	564.636.832,32	363.509.532,30
BUMD	295.251,88	224.513,73	742.178,36
Total	**570.690.334,60**	**608.055.481,13**	**405.480.653,96**

Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDTT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2012 dapat dikelompokkan dalam enam tema yaitu pengelolaan pendapatan; pelaksanaan belanja; pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi; pelaksanaan subsidi pemerintah/kewajiban pelayanan umum; operasional BUMN; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Tabel 2.15. Temuan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu BPK Semester I Tahun 2012

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	210	821.923,44
2	Potensi Kerugian Negara	55	1.527.976,33
3	Kekurangan Penerimaan	157	1.277.987,83
	Sub Total 1	**422**	**3.627.887,60**
4	Administrasi	201	-
5	Ketidakhematan	34	705.951,49
6	Ketidakefisienan	3	325.241,05
7	Ketidakefektifan	42	607.458,00
	Sub Total 2	**280**	**1.638.650,54**
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
8	SPI	252	-
	Total	**954**	**5.266.538,14**

Berdasarkan Tabel 2.15., hasil PDTT yang dilaporkan pada IHPS I Tahun 2012 mengungkapkan adanya 252 kasus kelemahan SPI dan 702 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp5.266.538,14 juta. Dari total kasus hasil temuan PDTT tersebut, sebanyak 422 kasus merupakan temuan berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3.627.887,60 juta. Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset. Selain temuan tersebut, terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI, dan penyimpangan administrasi yang tidak memiliki dampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Adapun rincian hasil PDTT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2012 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 37 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan 88 kasus kelemahan SPI dan 265 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp1.770.695,38 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan pemerintah pusat, sebanyak 150 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp925.558,36 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat

No.	Kelompok Temuan	Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	86	423.041,38
2	Potensi Kerugian Negara	17	404.254,12
3	Kekurangan Penerimaan	47	98.262,86
	Sub Total 1	**150**	**925.558,36**
4	Administrasi	74	-
5	Ketidakhematan	22	661.107,57
6	Ketidakefisienan	1	4.753,18
7	Ketidakefektifan	18	179.276,27
	Sub Total 2	**115**	**845.137,02**
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
8	SPI	88	-
	Total	**353**	**1.770.695,38**

Hasil pemeriksaan atas PDTT di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan bahwa kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan.

- Hasil PDTT di lingkungan pemerintah pusat antara lain mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 28 kasus senilai Rp33.241,83 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema belanja pemerintah pusat yang disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; pengawas lapangan dan panitia penerima hasil pekerjaan tidak melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai dengan hasil di lapangan; serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait, pengawas lapangan, dan panitia penerima yang lalai menjalankan tugas.

- Hasil PDTT di lingkungan pemerintah pusat antara lain juga mengungkapkan adanya kekurangan penerimaan (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 25 kasus senilai Rp49.531,42 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada tema pendapatan pemerintah pusat yang antara lain disebabkan pejabat terkait tidak mematuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara; penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak; dan rekanan tidak memenuhi kewajiban perjanjian sewa menyewa.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan hasil penerimaan atas pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas yang dilakukan.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi mengungkapkan 19 kasus kelemahan SPI dan 26 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp20.479,51 juta. Dari total temuan PDTT di pemerintah provinsi, sebanyak 22 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp20.479,51 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 19 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota mengungkapkan 36 kasus kelemahan SPI dan 229 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp252.191,41 juta. Dari total temuan PDTT di kabupaten/kota, sebanyak 165 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berdampak finansial senilai Rp97.763,90 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah

No.	Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	10	1.362,75	95	58.324,86
2	Potensi Kerugian Daerah	-	-	16	22.737,21
3	Kekurangan Penerimaan	12	19.116,76	54	16.701,83
	Sub Total 1	**22**	**20.479,51**	**165**	**97.763,90**
4	Administrasi	4	-	49	-
5	Ketidakhematan	-	-	6	1.507,26
6	Ketidakefektifan	-	-	9	152.920,25
	Sub Total 2	**4**		**64**	**154.427,51**
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
7	SPI	19	-	36	-
	Total	**45**	**20.479,51**	**265**	**252.191,41**

PDTT di lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain permasalahan pengadaan barang dan jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; serta kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan.

- Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan kerugian daerah karena adanya kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 52 kasus senilai Rp32.563,22 juta. Kasus-kasus yang sering terjadi pada tema belanja pemerintah daerah tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait kurang optimal melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan; pengawas lapangan dan panitia penerima barang/pekerjaan tidak melakukan penilaian kembali volume pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan, serta rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain memerintahkan pejabat terkait menarik kelebihan pembayaran dari rekanan; serta memberi sanksi pejabat terkait, pengawas lapangan, dan panitia penerima barang/pekerjaan yang telah lalai melaksanakan tugas.

- Hasil PDTT di lingkungan pemerintah daerah antara lain juga mengungkapkan adanya kekurangan penerimaan akibat denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah sebanyak 34 kasus senilai Rp2.462,95 juta. Kasus-kasus yang sering terjadi di tema belanja pemerintah daerah tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait dan rekanan tidak cermat melaksanakan pekerjaannya; pengawasan pelaksanaan pekerjaan kurang optimal; dan pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas antara lain memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan; meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; serta mengenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan menyetorkannya ke kas daerah.

3. BUMN dan BUMD

Hasil PDTT pada 18 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN mengungkapkan 101 kasus kelemahan SPI dan 154 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp3.147.609,29 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BUMN, sebanyak 63 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.508.549,80 juta.

Hasil pemeriksaan PDTT pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD mengungkapkan 8 kasus kelemahan SPI dan 28 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp75.562,55 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BUMD, sebanyak 22 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp75.536,03 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN dan BUMD dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan BUMD

No.	Kelompok Temuan	BUMN		BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	10	296.078,88	9	43.115,57
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan	16	1.072.988,57	6	27.996,43
3	Kekurangan Penerimaan	37	1.139.482,35	7	4.424,03
	Sub Total 1	**63**	**2.508.549,80**	**22**	**75.536,03**
4	Administrasi	69	-	5	-
5	Ketidakhematan	5	43.310,14	1	26,52
6	Ketidakefisienan	2	320.487,87	-	-
7	Ketidakefektifan	15	275.261,48	-	-
	Sub Total 2	**91**	**639.059,49**	**6**	**26,52**
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
8	SPI	101	-	8	-
	Total	**255**	**3.147.609,29**	**36**	**75.562,55**

Hasil PDTT di lingkungan BUMN dan BUMD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain kekurangan penerimaan dari koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS; dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

- Hasil PDTT di lingkungan BUMN dan BUMD antara lain mengungkapkan adanya kasus kekurangan penerimaan yang berasal koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 24 kasus senilai Rp487.939,87 juta. Kasus-kasus yang sering terjadi di tema pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi tersebut disebabkan antara lain ketidakcermatan perhitungan klaim *cost recovery* oleh KKKS; dan adanya ketidakpatuhan terhadap klausul KKS, pedoman-pedoman tata kerja, serta ketentuan yang berlaku.

  Rekomendasi

  Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas antara lain mengoreksi perhitungan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

- Hasil PDTT di lingkungan BUMN dan BUMD juga mengungkapkan adanya kerugian perusahaan akibat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 4 kasus senilai Rp6.082,46 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi di tema operasional BUMN yang disebabkan antara lain pejabat terkait membuat kuitansi tagihan yang tidak sesuai

dengan *invoice;* dan tidak memberlakukan secara tegas ketentuan yang telah ditetapkan seperti pemberian sanksi kepada pegawai yang menyelewengkan uang perusahaan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain memerintahkan pejabat terkait untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara/perusahaan serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait.

Respon Entitas

Selama proses pemeriksaan dengan tujuan tertentu, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp7.160,80 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp4.356,32 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.804,48 juta.

BAB 3

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012, BPK telah memberikan 183.862 rekomendasi senilai Rp80,97 triliun. Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa antara lain dengan melakukan perbaikan SPI, tindakan administratif, dan/atau penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
Pemerintah Pusat	22.163	38.332.752,53	11.890	9.690.723,10	4.784	11.876.427,35	5.456	16.629.624,97	33	135.977,11	7.650.568,40
Pemerintah Daerah	157.439	16.659.174,77	80.617	3.976.299,05	37.584	7.986.531,78	39.150	4.500.365,70	88	195.978,24	3.981.543,92
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	3.930	11.684.909,28	2.045	9.138.550,85	877	1.655.714,89	968	884.746,38	40	5.897,17	5.269.346,89
BHMN, KKKS, Badan Usaha Lainnya, dan Saham Pemerintah 50%	330	14.293.387,40	137	8.721.795,73	52	4.776.663,31	141	794.928,37	-	-	-
TOTAL	**183.862**	**80.970.223,98**	**94.689**	**31.527.368,72**	**43.297**	**26.295.337,32**	**45.715**	**22.809.665,42**	**161**	**337.852,52**	**16.901.459,21**

Berdasarkan Tabel 3.1. dapat dijelaskan bahwa sebanyak 94.689 rekomendasi (51,50%) senilai Rp31,52 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 43.297 rekomendasi (23,55%) senilai Rp26,29 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 45.715 rekomendasi (24,86%) senilai Rp22,80 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 161 rekomendasi (0,09%) senilai Rp337,85 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. 2007 yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 10.055 rekomendasi senilai Rp9,45 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 5.475 rekomendasi senilai Rp1,04 triliun. Rekomendasi ini meliputi 23,57% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2007.

Secara kumulatif rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 adalah senilai Rp16,90 triliun. Untuk mengetahui

perkembangan data TLRHP selama semester I Tahun 2012 dibawah ini disajikan data TLRHP Semester I Tahun 2012 dibandingkan data TLRHP Semester II Tahun 2011 atas data sejak Tahun 2008.

Tabel 3.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2012 atas Data TLRHP Sejak Tahun 2008

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
Semester I Tahun 2012	183.862	80.970.223,98	94.689	31.527.368,72	43.297	26.295.337,32	45.715	22.809.665,42	161	337.852,52	16.901.459,21
Semester II Tahun 2011	162.387	75.547.134,65	91.450	31.371.445,41	39.820	24.276.050,53	30.963	19.561.786,19	154	337.852,52	16.662.816,56
Perkembangan	21.475	5.423.089,33	3.239	155.923,31	3.477	2.019.286,79	14.752	3.247.879,23	7	-	238.642,65

Selama Semester I Tahun 2012, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp238,64 miliar.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada periode 2008 s.d. 2012 (Semester I), yaitu 94.689 dari 183.862 (51,50%) terlihat lebih besar dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa BPK telah memperhatikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2012 memuat data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah ”telah ditetapkan” dan ”dalam proses penetapan”. Data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 merupakan data kerugian yang dimuat dalam IHPS Semester I Tahun 2012.

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada instansi pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, dengan cakupan sebesar 28,47% atau sejumlah 574 entitas dari 2.016 total entitas yang seharusnya dipantau.

Data kerugian negara/daerah mulai akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 sebanyak 16.883 kasus senilai Rp4.640,68 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.419 kasus senilai Rp564,80 miliar, pelunasan sebanyak 6.812 kasus senilai Rp735,60 miliar serta penghapusan sebanyak 125 kasus senilai Rp12,44 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir Semester I Tahun 2012 sebanyak 9.946 kasus senilai Rp3.327,84 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	3.128	441,19	942	21,75	1.178	36,30	78	2,98	1.872	380,16
	USD	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00	-	-
	KSHS	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-
TGR Non Bendahara	IDR	9.788	820,90	2.550	177,67	3.673	100,02	33	1,52	6.082	541,69
	USD	-	3,023.74	-	6.97	-	-	-	-	-	3,016.77
	AUD	-	2,111.93	-	-	-	-	-	-	-	2,111.93
	GBP	-	199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15
	CAD	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60
	JPY	-	523,747.20	-	-	-	-	-	-	-	523,747.20
	EUR	-	33,231.17	-	-	-	-	-	-	-	33,231.17
	DEM	-	373.87	-	-	-	-	-	-	-	373.87
Pihak Ketiga	IDR	3.909	1.487,31	888	227,14	1.949	98,34	4	1,25	1.956	1.160,58
	USD		141,054.76		14,319.83	-	52,835.80	-	-		73,899.13
Pengelola Keuangan	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0,11	10	5,91	36	35,69
Total	**IDR**	**16.883**	**2.793,54**	**4.419**	**428,99**	**6.812**	**234,77**	**125**	**11,66**	**9.946**	**2.118,12**
	USD	**-**	**144,138.50**	**-**	**14,326.80**	**-**	**52,835.80**	**-**	**60.00**	**-**	**76,915.90**
	AUD	**-**	**2,111.93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,111.93**
	GBP	**-**	**199.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199.15**
	CAD	**-**	**39.60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39.60**
	JPY	**-**	**523,747.20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**523,747.20**
	EUR	**-**	**33,231.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,231.17**
	DEM	**-**	**373.87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**373.87**
	KSHS	**-**	**2,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,000.00**	**-**	**-**
Total Valas Equivalen	**IDR**		**1.847,14**		**135,81**		**500,83**		**0,78**		**1.209,72**
Total Kerugian Negara	**IDR**	**16.883**	**4.640,68**	**4.419**	**564,80**	**6.812**	**735,60**	**125**	**12,44**	**9.946**	**3.327,84**

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode Semester I Tahun 2012 terdapat 105 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp253,28 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18 kasus senilai Rp8,90 miliar, dan pelunasan sebanyak 18 kasus senilai Rp1,05 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah akhir Semester I Tahun 2012 yaitu sebanyak 87 kasus senilai Rp243,33 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2012 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2012

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	3	0,31	-	-	2	0,00	-	-	1	0,31
TGR Non Bendahara	IDR	81	6,50	14	1,77	5	0,65	-	-	76	4,08
Pihak III	IDR	21	246,47	4	7,13	11	0,40	-	-	10	238,94
Pengelola Keuangan	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**IDR**	**105**	**253,28**	**18**	**8,90**	**18**	**1,05**	**-**	**-**	**87**	**243,33**

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

Pemantauan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Tindak Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang (Aparat Penegak Hukum)

LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 sebanyak 319 temuan senilai Rp34.066,86 miliar. Dari 319 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 37 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 174 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 108 temuan. Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 186 temuan atau 58,31% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 37 temuan, penyelidikan sebanyak 47 temuan, penyidikan sebanyak 8 temuan, penuntutan/proses peradilan sebanyak 13 temuan, vonis/banding/kasasi sebanyak 70 temuan, dan penghentian penyidikan sebanyak 11 temuan. Adapun sebanyak 133 temuan atau 41,69% belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

BAB 4

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

Selama Semester I Tahun 2012, BPK telah mencatat sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian baik pemerintah, lembaga perwakilan, maupun seluruh pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK tersebut perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain karena memuat hal-hal sebagai berikut: temuan pemeriksaan terjadi secara berulang di setiap LHP; temuan pemeriksaan tersebut terjadi di banyak entitas; serta hasil pemeriksaan BPK yang diperkirakan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat *(nationwide impact)* baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2012 yang perlu mendapatkan perhatian pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut.

Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh aparatur negara/pemerintah ke luar tempat kedudukan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan organisasi satuan kerja. Di lingkungan pemerintah pusat, perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan sistem *at cost* yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2007. Sementara itu, di lingkungan pemerintah daerah, perjalanan dinas secara umum masih menggunakan sistem lumsum meskipun di sejumlah daerah telah menggunakan sistem *at cost*. Pengaturan perjalanan dinas di daerah dilakukan melalui keputusan kepala daerah di setiap provinsi/kabupaten/kota.

Penyimpangan belanja perjalanan dinas memiliki dua implikasi yakni mengakibatkan kerugian negara/daerah dan administratif. Data historis hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa temuan terkait perjalanan dinas terjadi secara berulang dari tahun ke tahun serta terjadi di entitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Temuan penyimpangan perjalanan dinas selama Semester I Tahun 2012 bukan merupakan pemeriksaan khusus BPK terhadap akun belanja perjalanan dinas. Pemeriksaan atas belanja perjalanan dinas tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan laporan keuangan dan PDTT. Dengan demikian, belum tentu kementerian lembaga atau pemerintah daerah yang tidak memiliki temuan penyimpangan perjalanan dinas, tidak ada penyimpangan.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK selama Semester I Tahun 2012 mengungkapkan adanya kerugian negara/daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sebanyak 259 kasus senilai Rp77.005,07 juta. Dari total kerugian negara/daerah tersebut, sebanyak 86 kasus senilai Rp40.131,50 juta merupakan perjalanan dinas fiktif dan sebanyak 173 kasus senilai Rp36.873,57 juta merupakan perjalanan dinas ganda dan/atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan lokus kejadiannya, penyimpangan perjalanan dinas lebih banyak terjadi di pemerintah daerah dibanding pemerintah pusat. Total kerugian daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas sebanyak 193 kasus senilai Rp56.288,51 juta sedangkan kerugian negara sebanyak 66 kasus senilai Rp20.716,56 juta.

Tabel 4. Temuan Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Kerugian Negara/Daerah						Administrasi	Penyetoran
	Total Kerugian Negara/Daerah Perjalanan Dinas		Belanja Perjalanan Dinas Fiktif		Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan Atau Melebihi Standar Yang Ditetapkan			
	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai	Kasus	Nilai
Total Pusat	**66**	**20.716,56**	**24**	**9.278,46**	**42**	**11.438,10**	**26**	**5.785,17**
Daerah								
Provinsi	18	8.016,82	6	6.011,20	12	2.005,62	4	4.555,97
Kabupaten	138	39.050,04	48	21.374,65	90	17.675,39	58	8.675,58
Kota	37	9.221,65	8	3.467,19	29	5.754,46	16	3.526,68
Total Daerah *)	**193**	**56.288,51**	**62**	**30.853,04**	**131**	**25.435,47**	**78**	**16,758.23**
Total Pusat dan Daerah	**259**	**77.005,07**	**86**	**40.131,50**	**173**	**36.873,57**	**104**	**22.543,40**

Keterangan:
*) Total nilai temuan di daerah termasuk temuan dari LK TA 2010 di empat kabupaten yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012.

Dari total kerugian negara belanja perjalanan dinas di pemerintah pusat, sebanyak 24 kasus senilai Rp9.278,46 juta merupakan perjalanan dinas fiktif. Adapun sebanyak 42 kasus senilai Rp11.438,10 juta merupakan perjalanan dinas ganda dan/atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan. Sementara itu, dari total kerugian daerah belanja perjalanan dinas di pemerintah daerah, sebanyak 62 kasus senilai Rp30.853,04 juta merupakan perjalanan dinas fiktif dan sebanyak 131 kasus senilai Rp25.435,47 juta merupakan perjalanan dinas ganda dan/atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan.

Selain temuan kerugian negara/daerah, BPK juga mengungkapkan penyimpangan ketentuan perjalanan dinas yang bersifat administratif seperti penyertaan bukti perjalanan dinas yang tidak lengkap/tidak valid dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Selama Semester I Tahun 2012, penyimpangan administrasi belanja perjalanan dinas sebanyak 104 kasus dengan rincian terjadi di pemerintah daerah sebanyak 78 kasus dan di pemerintah pusat sebanyak 26 kasus.

BPK telah mengidentifikasi modus penyimpangan perjalanan dinas yang sering dilakukan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bentuk-bentuk penyimpangan belanja perjalanan dinas yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

a. Perjalanan dinas tidak dilaksanakan namun tetap dipertanggungjawabkan dan dananya tetap dicairkan (fiktif);

b. Perjalanan dinas rangkap;

   Pegawai melaksanakan perjalanan dinas rangkap (lebih dari satu perjalanan dinas yang dilaksanakan pada tanggal dan hari yang sama).

c. Perjalanan dinas dilakukan namun harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

   Pegawai melaksanakan perjalanan dinas dengan tiket harga promo, namun mereka mencatat ulang tiket dengan harga yang dimaksimalkan sesuai pagu di SPPD.

d. Perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan maskapai penerbangan X, namun dipertanggungjawabkan menggunakan tiket maskapai Y yang lebih mahal;

e. Perjalanan dinas dilaksanakan menggunakan maskapai tertentu, namun nilai tarif pesawat dan/atau hari, tanggal keberangkatan berbeda dengan bukti pertanggungjawaban; dan

f. Tiket yang dijadikan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan manifes.

Penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang selalu berulang antara lain disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas; pengendalian pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas oleh atasan langsung lemah; pejabat terkait tidak memverifikasi bukti pertanggungjawaban secara memadai; serta terdapat biro perjalanan yang menyediakan tiket palsu, *boarding pass* palsu, dan *bill* hotel palsu.

Rekomendasi

Terhadap penyimpangan pelaksanaan belanja perjalanan dinas tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas antara lain mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas serta menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara/daerah. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan pemberian sanksi kepada pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas.

Selama proses pemeriksaan BPK di Semester I Tahun 2012, instansi pemerintah pusat dan daerah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyetor uang ke kas negara/daerah senilai Rp22.543,40 juta (sekitar 29,27% dari total kerugian negara/daerah dari perjalanan dinas) dengan rincian penyetoran oleh pemerintah pusat Rp5.785,17 juta dan pemerintah daerah Rp16.758,23 juta.

Program KTP Elektronik

Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan KTP elektronik berbasis NIK Nasional merupakan program strategis nasional bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan program penerbitan NIK dan penerapan KTP elektronik merupakan implementasi amanat UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta penjabaran visi untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan program bidang kependudukan dan catatan sipil tersebut. Realisasi APBN untuk kegiatan penerbitan NIK Nasional pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dari Tahun 2003 s.d. 2010 senilai Rp637.965,23 juta. Adapun realisasi APBD Tahun 2010 yang terkait langsung dengan Program Penerbitan NIK Nasional pada 6 provinsi dan 12 kabupaten/kota yang diuji petik, hanya Provinsi Jawa Tengah yang menganggarkan bantuan keuangan senilai Rp4.367,25 juta.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap dua program kependudukan dan catatan sipil tersebut mengungkapkan permasalahan efektivitas dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa

- Pelaksanaan Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP elektronik Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 belum efektif; dan
- Pelaksanaan pengadaan KTP elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Temuan ketidakefektifan tersebut terdapat pada setiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan.

Secara umum hasil pemeriksaan BPK terhadap kedua program kependudukan dan catatan sipil tersebut mengungkapkan temuan ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp6.037,50 juta, sebanyak 3 kasus ketidakhematan senilai Rp605,84 juta, sebanyak 24 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, dan ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36.410,49 juta, potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28.906,16 juta, penyimpangan administrasi sebanyak 4 kasus.

Atas indikasi kerugian negara dan potensi kerugian negara tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp50.987,19 juta.

Temuan hasil pemeriksaan kinerja Program Penerbitan NIK Nasional antara lain:

- *Standard operating procedure* (SOP) Pemutakhiran dan Konsolidasi Database Kependudukan tidak lengkap dan SOP Kegiatan Penerbitan Surat Pemberitahuan NIK Nasional tidak disusun;

- Sumber daya manusia pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) belum sesuai standar kebutuhan jumlah dan standar kompetensi yang ditetapkan; dan

- Laporan hasil kegiatan monev pada Program Penerbitan NIK Nasional belum ditindaklanjuti.

Temuan tersebut mengakibatkan antara lain tujuan kegiatan penerbitan NIK Nasional tidak tercapai; pengelolaan pelayanan data kependudukan kurang optimal; dan tidak dapat memonitor pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan antara lain pejabat terkait belum optimal dalam menyusun regulasi dan kebijakan terkait administrasi kependudukan; penetapan administrator dan operator database tidak berdasarkan standar kualifikasi yang telah ditetapkan; dan belum menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal dalam melaksanakan monev.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri antara lain agar memerintahkan pejabat terkait diantaranya untuk menyusun dan menetapkan SOP Penerbitan NIK Nasional; menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan; dan melakukan evaluasi atas kinerja tim monev pada tingkat pusat dan provinsi/kab/kota.

Sementara itu, temuan hasil pemeriksaan kinerja Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional antara lain pekerjaan personalisasi tidak mencapai target yang ditetapkan dalam kontrak. Konsorsium rekanan yang ditunjuk tidak dapat memenuhi jumlah pencapaian KTP Elektronik Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak. Target yang telah ditetapkan dalam kontrak Tahun 2011 adalah sebanyak 67.015.400 KTP Elektronik diterbitkan dan didistribusikan ke kecamatan. Namun demikian, sampai dengan 31 Desember 2011 terealisasi sebanyak 1.453.757 KTP Elektronik atau 2,17% yang sudah selesai dipersonalisasi dan sebanyak 48.404 KTP Elektronik atau 0,07% yang sudah dikirimkan ke kecamatan.

Akibatnya konsorsium tidak dapat memenuhi jumlah pencapaian KTP Elektronik Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal tersebut terjadi karena Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) kurang berupaya dalam pemenuhan jumlah penerbitan KTP Elektronik Tahun 2011 sesuai dengan kontrak.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri memberikan teguran kepada konsorsium agar menyelesaikan permasalahan perangkat dan masalah yang terkait dengan pekerjaan jaringan komunikasi data (jarkomdat) yang ada di pusat dan daerah; menetapkan ketentuan yang seragam dan baku terkait perbaikan data penduduk pada saat perekaman; serta menyempurnakan SOP Pendistribusian KTP Elektronik.

Jakarta, September 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

Buku II
Pemeriksaan Laporan Keuangan

(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GRAFIK		iii
DAFTAR LAMPIRAN		iv
BAB 1	Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2	Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012	5
BAB 3	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)	13
BAB 4	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	37
BAB 5	Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya	63
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM		69
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012
2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan
2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan
3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 s.d. 2011
3.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2011
3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2011
4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011
4.2. Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
4.3. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2011
4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2011
5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMN dan Badan Lainnya
5.2. Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya
5.3. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK BUMN dan Badan Lainnya
5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan LK BUMN dan Badan Lainnya

DAFTAR GRAFIK

2.1. Persentase Kasus Kerugian

2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian

2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011

4.2. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012
4. Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2006 s.d. 2011
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011
7. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2011
8. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006 s.d. 2011
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
11. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011
14. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011
15. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) Semester I Tahun 2012

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures)*, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena

keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.

- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini** atau **Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.

- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.

- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan kepatuhan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

- Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

- Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

- Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, tidak mengurangi hak negara/daerah/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

- Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

- Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam LK dan kesesuaian LK dengan SAP sebagai dasar pemberian opini atas LK.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah dan badan lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester I Tahun 2012 BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL), dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tingkat provinsi/kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, baik pemerintah maupun BPK telah dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut dengan tepat waktu, dan BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 kepada DPR pada tanggal 28 Mei 2012. Namun, pada tingkat daerah, BPK baru menyelesaikan 426 hasil pemeriksaan atas LKPD dari 524 Pemerintah Daerah karena masih cukup banyak daerah yang belum dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan LKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya yang pemeriksaannya diatur secara khusus berdasarkan peraturan tersendiri.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester I Tahun 2012

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan keuangan atas LKPP, LKKL, LKPD tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta LK badan lainnya termasuk badan usaha milik negara (BUMN).

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan TA 2011 atas LKPP, LK Bendahara Umum Negara (BUN), 89 LKKL (termasuk 4 LHP dukungan atas LK Bagian Anggaran (BA) 999), 426 LKPD, serta 6 LK badan lainnya termasuk BUMN. Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 4 LKPD TA 2010.

Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta LAK. Rincian neraca adalah aset senilai Rp6.047,97 triliun, kewajiban senilai Rp3.400,29 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.647,68 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp1.717,12 triliun, belanja senilai Rp1.798,21 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp154,68 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

Atas LKPP, BPK memberikan opini WDP, sedangkan terhadap 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP atas 66 LKKL, opini WDP atas 18 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL. Adapun terhadap 426 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP atas 67 pemerintah daerah, opini WDP atas 316 pemerintah daerah, opini TW atas 5 pemerintah daerah, dan opini TMP atas 38 pemerintah daerah.

Adapun terhadap LK BUMN dan badan lainnya Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP untuk LK Bank Indonesia (BI), LK *Loan Asian Development Bank* (ADB) 2575-INO pada *Rural Infrastructure Support* (RIS) *Program to the* Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri *Project* II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), LK *Loan* ADB 2654-INO pada *Metropolitan Sanitation Management and Health Project* (MSMHP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, dan LK PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). BPK

juga telah memberikan opini WDP untuk LK Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) Tahun 2011M/1432H dan TMP untuk LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun 2011. Rincian opini pemeriksaan keuangan dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPP	-	0%	1	100%	-	0%	-	0%	1
LKKL	66	77%	18	21%	-	0%	2	2%	86
LKPD	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426
LK BUMN dan badan lainnya	4	66%	1	17%	0	0%	1	17%	6

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya 5.036 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Keuangan

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.050
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.964
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.022
	Jumlah	**5.036**

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.904 kasus senilai Rp7.001.576,06 juta. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Keuangan

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan		
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	2.004	1.159.769,42
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	426	3.205.164,77
3	Kekurangan Penerimaan	1.113	849.463,19
	Sub Total 1	**3.543**	**5.214.397,38**
4	Administrasi	2.702	-
5	Ketidakhematan	277	281.232,51
6	Ketidakefisienan	2	537,50
7	Ketidakefektifan	380	1.505.408,67
	Sub Total 2	**3.361**	**1.787.178,68**
	Jumlah	**6.904**	**7.001.576,06**

Berdasarkan Tabel 2.3., hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2012 menemukan sebanyak 6.904 kasus senilai Rp7.001.576,06 juta. Sub Total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.543 kasus senilai Rp5.214.397,38 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset. Sub Total 2 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 3.361 kasus senilai Rp1.787.178,68 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Rincian kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 2.004 kasus senilai Rp1.159.769,42 juta disajikan pada Lampiran 1. Kerugian negara/daerah/perusahaan antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, belanja perjalanan dinas fiktif, dan belanja atau pengadaan fiktif lainnya. Persentase kasus kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian

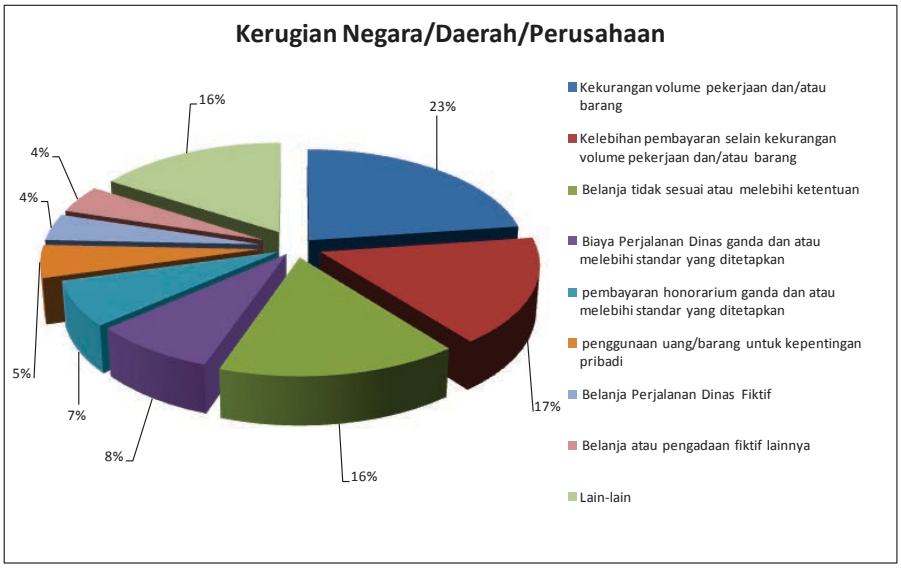

Grafik 2.1. menyajikan kasus-kasus kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 459 kasus (23% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp131.782,36 juta;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 335 kasus (17% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp168.221,30 juta;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 310 kasus (16% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp103.863,48 juta;
- kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 166 kasus (8% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.598,05 juta;
- kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 142 kasus (7% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp41.160,34 juta;
- kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi sebanyak 102 kasus (5% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp62.638,96 juta;
- kasus belanja perjalanan dinas fiktif sebanyak 83 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.912,08 juta;
- kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 87 kasus (4% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp34.420,54 juta; dan
- kasus kerugian lainnya, di antaranya pemahalan harga (*mark up*), spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan.

Rincian kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 426 kasus senilai Rp3.205.164,77 juta disajikan dalam Lampiran 2. Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan di antaranya terjadi karena aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian

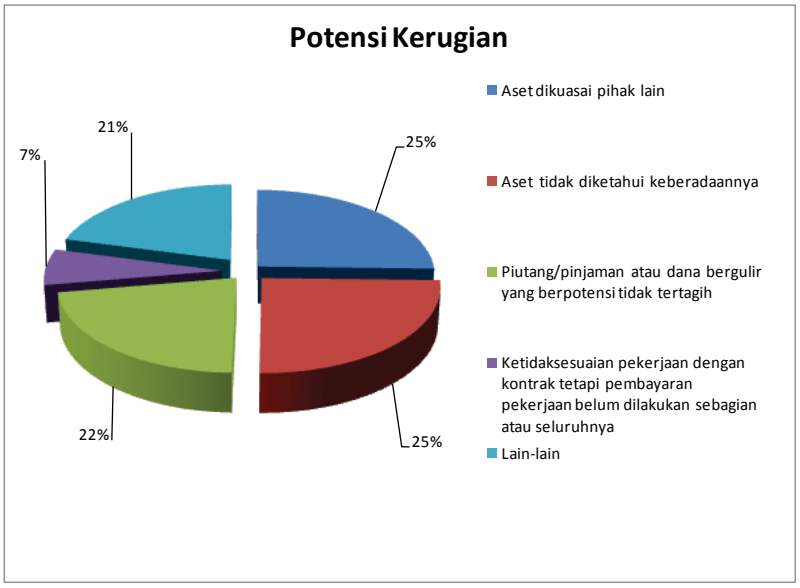

Grafik 2.2. menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus aset dikuasai pihak lain sebanyak 108 kasus (25% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.045.562,22 juta;
- kasus aset tidak diketahui keberadaannya sebanyak 106 kasus (25% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp1.297.222,24 juta;
- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 92 kasus (22% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp468.150,19 juta;
- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 29 kasus (7% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp92.110,16 juta; dan
- Kasus potensi kerugian lainnya, di antaranya rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan pembelian aset yang berstatus sengketa.

Rincian kasus kekurangan penerimaan sebanyak 1.113 kasus senilai Rp849.463,19 juta disajikan dalam Lampiran 3. Kekurangan penerimaan di antaranya terjadi karena penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

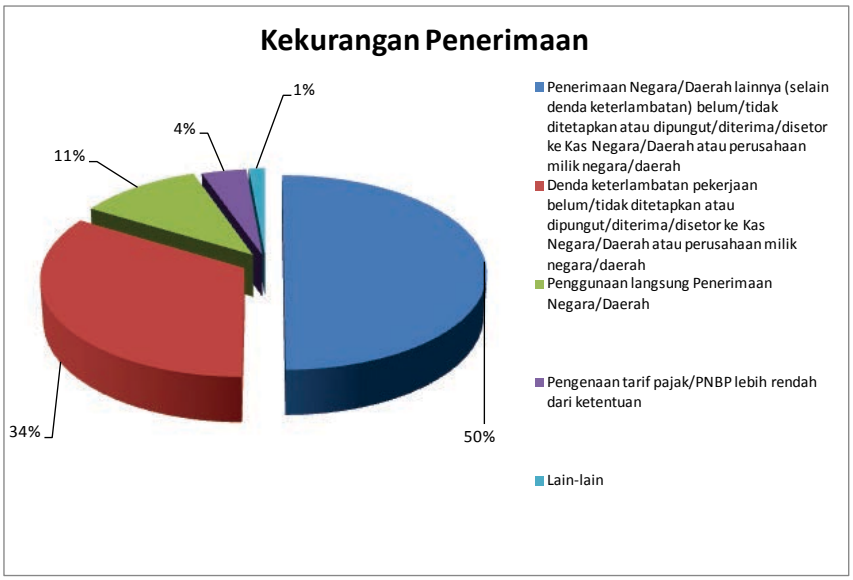

Grafik 2.3. menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 560 kasus (50% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp474.813,04 juta;

- kasus denda keterlambatan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 376 kasus (34% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp107.803,70 juta;

- kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah sebanyak 123 kasus (11% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp256.055,42 juta;

- kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 38 kasus (4% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp5.609,92 juta; dan

- Kasus kekurangan penerimaan lainnya, di antaranya penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

Pengembalian ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan

Dari 3.543 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp5.214.397,38 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp253.192,82 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp108.646,70 juta, potensi kerugian senilai Rp929,23 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp143.616,89 juta.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

3.1 Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 dan 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2011. Pemeriksaan keuangan ini merupakan pemeriksaan yang kedelapan atas LKPP yang disusun pemerintah yaitu sejak LKPP Tahun 2004.

3.2 Untuk Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) "Wisnu B. Soewito dan Rekan" sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32. Persetujuan penggunaan KAP "Wisnu B. Soewito dan Rekan" ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/DPR RI/III/2011-2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penunjukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI Tahun 2011.

3.3 LKPP merupakan laporan konsolidasi dari LKKL dan LK BUN.

3.4 Tujuan pemeriksaan LKPP dan LKKL termasuk LK BUN adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu (a) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan SAP; (b) entitas yang diperiksa telah memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu; (c) SPI instansi tersebut baik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya, telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan (d) pengungkapan yang memadai atas informasi laporan keuangan.

3.5 Cakupan pemeriksaan LKPP meliputi neraca, LRA, LAK, dan CaLK. Rincian nilai neraca adalah aset senilai Rp3.023,44 triliun, kewajiban senilai Rp1.947,37 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.076,07 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.210,59 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.294,99 triliun, pembiayaan neto senilai Rp130,94 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp84,39 triliun.

3.6 Cakupan pemeriksaan atas 85 LKKL meliputi neraca, LRA, dan CaLK. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas 1 LK BUN meliputi neraca, LRA, LAK, dan CaLK. Rekapitulasi nilai neraca dengan rincian aset senilai Rp3.027,05 triliun, kewajiban senilai Rp1.945,37 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.081,68 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan negara dan hibah senilai Rp1.209,40 triliun, realisasi belanja negara senilai Rp1.292,92 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp130,94 triliun.

Hasil Pemeriksaan LKPP

3.7 BPK memberikan opini **WDP** atas LKPP Tahun 2011 atau sama dengan opini Tahun 2010 dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP.

3.8 Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2011 karena BPK masih menemukan permasalahan-permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

- Adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap pemerintah, yaitu 1) aset tetap pada 10 KL dengan nilai Rp4,13 triliun belum dilakukan IP; 2) aset tanah jalan nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum selesai dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai; 3) aset tetap hasil IP pada 3 KL senilai Rp3,88 triliun dicatat ganda; 4) pencatatan hasil IP pada 40 KL masih selisih senilai Rp1,54 triliun dengan nilai koreksi hasil IP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); 5) aset tetap pada 14 KL senilai Rp6,89 triliun tidak diketahui keberadaannya; dan 6) pelaksanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat aset tetap sehingga pemerintah belum dapat melakukan penyusutan aset tetap. Permasalahan ini merupakan gabungan permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL.

- Pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleh pemerintah masih mengandung kelemahan yaitu: 1) pemerintah belum menemukan dokumen *cessie* atas aset eks BPPN berupa aset kredit senilai Rp18,25 triliun; 2) aset eks BPPN yang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara (PUPN) senilai Rp11,18 triliun tidak didukung oleh dokumen sumber yang valid; 3) aset eks BPPN berupa tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) senilai Rp8,68 triliun belum didukung kesepakatan dengan pemegang saham; 4) aset eks BPPN berupa aset properti sebanyak 917 item belum dinilai, dan 5) pemerintah belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas aset eks BPPN yang berupa Piutang.

3.9 Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP antara lain sebagai berikut.

3.10 Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan perhitungan bagi hasil migas sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp2,35 triliun.

3.11 Pelaksanaan IP atas aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum memperhitungkan kelayakan kapitalisasi *subsequent expenditure* dan kewajaran penilaian aset *scrap* serta pengelolaannya belum sesuai aturan.

3.12 Penetapan PP Penyertaan Modal Negara (PMN) atas bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) berlarut-larut dan metode penetapan nilainya dalam PP PMN dapat berbeda dengan nilai penyerahan awal.

3.13 Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan keuangan atas 7 perguruan tinggi yang status Badan Hukum Pendidikan (BHP)-nya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

3.14 Penyelesaian kesepakatan antara pemerintah, BI, dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) atas *Risk Sharing* tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan 1998/1999 pola *channelling* sebesar Rp5,71 triliun berlarut-larut.

Rekomendasi

3.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar

- mengupayakan amandemen *production sharing contract* (PSC) dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*;
- menetapkan aturan mengenai pembagian kewenangan antar instansi dan mekanisme pemantauan serta penagihan PPh Migas yang lebih memadai;
- memetakan seluruh aset tetap yang belum di-IP, menyelesaikan IP atas aset tersebut, memverifikasi hasil IP dan merekonsiliasi pencatatannya, serta mempercepat pengukuran masa manfaat sehingga dapat menerapkan penyusutan;
- memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS serta pelaksanaan inventarisasi dan perhitungan aset eks BPPN;
- memperbaiki kebijakan perencanaan, penganggaran, dan penetapan BPYBDS sebagai PMN serta menetapkan perlakuan selisih nilai BPYBDS dan PMN yang ditetapkan;
- segera menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas 7 perguruan tinggi eks badan hukum milik negara (BHMN); dan
- membahas dengan pihak BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati *risk sharing* atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan memperhitungkan rasa keadilan.

3.16 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2011 kepada DPR, DPD, dan Presiden/pemerintah pada tanggal 28 Mei 2012.

Hasil Pemeriksaan LKKL

3.17 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKKL disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sesuai dengan laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan.

3.18 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan dan SPI. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus".** Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

3.19 Terhadap 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP atas 66 LKKL, opini WDP atas 18 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 2 LKKL.

3.20 Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2006 s.d. Tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 3.1. berikut ini. Rincian opini tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 4.

LKKL	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2006	7	8%	36	46%	0	0%	36	46%	79
Tahun 2007	15	19%	31	39%	1	1%	33	41%	80
Tahun 2008	34	41%	31	37%	0	0%	18	22%	83
Tahun 2009	44	57%	26	33%	0	0%	8	10%	78
Tahun 2010	52	63%	29	35%	0	0%	2	2%	83
Tahun 2011	66	77%	18	21%	0	0%	2	2%	86

Tabel 3.1. Perkembangan Opini LKKL Tahun 2006 s.d. 2011

3.21 Jumlah LKKL Tahun 2011 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL Tahun 2010 disebabkan adanya penambahan pemeriksaan bagian anggaran yang diperiksa yaitu Ombudsman Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, serta Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).

3.22 Dari Tabel 3.1. terlihat bahwa secara bertahap jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat, dari 8% di Tahun 2006 menjadi 77% di Tahun 2011. Peningkatan kualitas opini LKKL juga terlihat dari penurunan persentase WDP menjadi 21% di Tahun 2011 dari persentase opini WDP

Tahun 2010 sebesar 35%. Penurunan persentase opini WDP ini karena adanya peningkatan opini KL menjadi WTP, meskipun terdapat juga penurunan opini dua LKKL dari WTP menjadi WDP.

3.23 Kenaikan persentase opini WTP serta penurunan persentase opini WDP menggambarkan bahwa dari tahun ke tahun kualitas laporan keuangan KL semakin meningkat. Peningkatan kualitas tersebut meningkatkan keandalan informasi yang disajian dalam laporan keuangan. Kondisi ini juga menggambarkan usaha KL untuk melakukan perbaikan dalam menyusun laporan keuangannya.

3.24 Di Tahun 2011 masih terdapat 18 KL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 2 KL dengan opini TMP. Atas KL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2011 umumnya disebabkan oleh kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan PNBP, pengelolaan belanja hibah, belanja barang dan bantuan sosial (bansos), kas, piutang, aset tetap, dan persediaan. Atas dua LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, belanja barang, piutang bukan pajak, dan PNBP.

Sistem Pengendalian Intern (616 kasus)

3.25 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatannya. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan KL dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

3.26 SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3.27 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

3.28 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada KL.

3.29 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI KL dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

3.30 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKKL yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKKL yang memperoleh opini TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal pencatatan dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3.31 Sesuai dengan hasil pemeriksaan atas LKKL Tahun 2011, 66 dari 86 LKKL termasuk LK BUN atau 77% memperoleh opini WTP. Terdapat peningkatan sebesar 14% dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya tindakan perbaikan dan kegiatan baik oleh pimpinan maupun seluruh pegawai KL untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Adapun LKKL yang opininya menurun dari WTP menjadi WDP, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus-kasus SPI.

3.32 Kelemahan atas kegiatan pengendalian yang memerlukan perbaikan di antaranya belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang belum memadai, dan pendokumentasian atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting yang belum tertib.

3.33 Secara umum, unsur pemantauan pada 66 KL yang mendapat opini WTP telah memadai, yaitu telah dilakukan upaya pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah, namun pemantauan yang dilakukan belum maksimal sehingga mutu kinerja sistem pengendalian belum sepenuhnya dapat dinilai.

3.34 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Masing-masing kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

3.35 Hasil evaluasi SPI atas 86 LKKL termasuk LK BUN menunjukkan terdapat 616 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas 250 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 211 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 155 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2., rincian jenis temuan disajikan pada Lampiran 5, dan rincian kelompok temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2011

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	
1	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	250
2	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	211
3	Struktur Pengendalian Intern	155
	Jumlah	**616**

3.36 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

3.37 Sebanyak 250 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas

- sebanyak 135 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak 86 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
- sebanyak 17 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
- sebanyak 11 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

3.38 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 65 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.39 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Perhubungan, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian pada Ditjen Perkeretaapian belum mempertimbangkan nilai perolehan peningkatan dan pengembangan aset yang telah dilakukan.
- Di Kementerian Kesehatan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, hasil IP aktiva tetap belum seluruhnya diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, pengakuan aset tetap ekstrakomptabel pada 17 satker di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp230.708,61 juta tidak tepat. Beberapa barang telah mengalami penambahan nilai hasil koreksi tim penilai aset sehingga nilainya menjadi lebih besar dari nilai minimum kapitalisasi namun masih tercatat sebagai barang ekstrakomptabel.

3.40 Sebanyak 211 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 70 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 32 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan;
- sebanyak 48 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 6 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
- sebanyak 44 kasus atas penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 10 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, yaitu adanya realisasi yang melebihi pagu anggaran.

3.41 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 73 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.42 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kehutanan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, terdapat 31 satker yang melaksanakan kegiatan sebelum anggaran tersedia, senilai Rp12.282,12 juta. Kegiatan tersebut di antaranya dibiayai dari pinjaman Koperasi Karyawan Departemen Kehutanan dengan jasa pinjaman (bunga) senilai Rp318,57 juta dan terdapat 1 satker yang melaksanakan kegiatan pada saat anggaran masih belum mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) senilai Rp283,00 juta.

- Di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, kewajiban KPDT kepada pihak ketiga atas pelaksanaan 10 paket bantuan sosial TA 2011 pada satker Peningkatan Infrastruktur minimal senilai Rp9.321,83 juta belum diverifikasi dan dianggarkan dalam DIPA TA 2012 mengakibatkan rawan gugatan dari pihak-pihak yang belum menerima pembayaran atas realisasi pekerjaan yang telah diperjanjikan.

- Di Mahkamah Agung (MA), perencanaan kegiatan tidak memadai, pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan senilai Rp1.137,10 juta.

3.43 Sebanyak 155 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 90 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;

- sebanyak 45 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;

- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;

- sebanyak 10 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan

- sebanyak 9 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

3.44 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 63 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.45 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat kehilangan barang milik negara (BMN) yang belum diproses penyelesaiannya oleh Tim Penghapusan BMN, hal ini disebabkan SOP tuntutan ganti rugi (TGR) yang disusun belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yaitu SOP tidak menjelaskan mengenai peran dan tugas Tim Penghapusan BMN.

- Di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, sistem pencatatan dan pembukuan PNBP tidak memadai untuk mendukung pelaporan piutang PNBP secara valid. Hal ini disebabkan belum terdapat SOP mengenai perlakuan, pencatatan, dan penagihan piutang PNBP di lingkungan Bapeten.

- Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, pencatatan dan pelaporan piutang pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) kurang memadai. Hal ini terlihat dari PPPTMGB Lemigas belum mempunyai sistem pengelolaan dan penatusahaan PNBP yang terintegrasi antara Kelompok Pelaksana Penelitian dan Pengembangan (KPPP) sebagai pelaksana penerimaan pelayanan jasa dengan Bagian Tata Usaha sebagai pengelola PNBP.

Penyebab

3.46 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.

3.47 Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, serta belum menetapkan prosedur kegiatan.

Rekomendasi

3.48 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

3.49 Selain opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 3.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 6 dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 7.

Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan LKKL Tahun 2011

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	387	269.176,78
2	Potensi Kerugian Negara	71	1.601.231,02
3	Kekurangan Penerimaan	160	327.558,07
4	Administrasi	359	-
5	Ketidakhematan	40	95.181,00
6	Ketidakefektifan	55	787.327,13
	Jumlah	**1.072**	**3.080.474,00**

3.50 Berdasarkan Tabel 3.3., hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.072 kasus senilai Rp3.080.474,00 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 81 entitas.

Kerugian Negara (387 kasus senilai Rp269.176,78 juta)

3.51 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

3.52 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara yaitu adanya belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*).

3.53 Kasus kerugian negara juga meliputi penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara, serta lain-lain kasus kerugian negara.

3.54 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 387 kasus senilai Rp269.176,78 juta terdiri atas

- sebanyak 24 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp9.278,46 juta;
- sebanyak 15 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp7.641,80 juta;
- sebanyak 6 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp3.459,46 juta;

- sebanyak 74 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp37.404,47 juta;
- sebanyak 104 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp114.886,77 juta;
- sebanyak 17 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp27.775,85 juta;
- sebanyak 2 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp101,29 juta;
- sebanyak 39 kasus belanja perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp11.189,32 juta;
- sebanyak 24 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp10.642,56 juta;
- sebanyak 24 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp10.123,41 juta;
- sebanyak 41 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp26.716,03 juta;
- sebanyak 4 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp1.656,57 juta;
- sebanyak 1 kasus penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp6,13 juta; dan
- sebanyak 12 kasus kerugian negara lainnya senilai Rp8.294,66 juta di antaranya pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

3.55 Kasus-kasus kerugian negara tersebut terjadi di 67 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.56 Kasus-kasus kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Kesehatan, terdapat pembayaran yang melebihi prestasi fisik pekerjaan senilai Rp92,08 juta pada kontrak kerja konsultan perencana pekerjaan pembangunan gedung parkir Kementerian Kesehatan, dan senilai Rp68.576,69 juta pada pengadaan rumah sakit bergerak pada Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Atas kedua pengadaan tersebut telah dilakukan serah terima 100%.
- Di Kementerian Kesehatan, terdapat indikasi kemahalan harga (*mark up)* senilai Rp16.546,04 juta pada perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) atas pengadaan alat kesehatan TA 2011 di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 8 satker senilai Rp8.323,02 juta, serta kelebihan pembayaran atas 4 paket pekerjaan senilai Rp84,05 juta.

- Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, biaya langsung personel pada beberapa pekerjaan tidak didasarkan pada bukti setor pajak atau *audit payroll* minimal senilai Rp8.397,48 juta.

- Di Kepolisian Negara RI, terdapat kelebihan pembayaran kegiatan/operasi dan pengadaan barang/jasa Tahun 2011 senilai Rp8.126,97 juta di antaranya karena jangka waktu pelaksanaan yang lebih pendek dari yang dipertanggungjawabkan, dasar perhitungan yang lebih tinggi dari indeks yang seharusnya serta pembayaran ganti rugi tanah lebih tinggi dari riilnya.

3.57 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp269.176,78 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp39.793,33 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran di antaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp6.001,23 juta; Kepolisian Negara RI senilai Rp6.277,04 juta; dan KPDT senilai Rp6.631,69 juta seperti disajikan pada Lampiran 7.

Penyebab

3.58 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

3.59 Selain itu, kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

3.60 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

3.61 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian negara dengan menyetor ke kas negara.

Potensi Kerugian Negara (71 kasus senilai Rp1.601.231,02 juta)

3.62 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.

3.63 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, serta aset tidak diketahui keberadaannya.

3.64 Selain itu, kasus potensi kerugian negara juga dapat disebabkan adanya pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dicairkan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian negara.

3.65 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 71 kasus senilai Rp1.601.231,02 juta, yang terdiri atas

- sebanyak 2 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp80.564,96 juta;
- sebanyak 3 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp68.533,13 juta;
- sebanyak 26 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp855.043,03 juta;
- sebanyak 3 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp16.803,61 juta;
- sebanyak 19 kasus aset di antaranya berupa peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya senilai Rp299.737,28 juta;
- sebanyak 3 kasus pemberian jaminan dalam pelaksaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp858,38 juta;
- sebanyak 3 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara senilai Rp793,20 juta;
- sebanyak 3 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp178.440,69 juta; dan
- sebanyak 9 kasus potensi kerugian negara lainnya senilai Rp100.456,74 juta di antaranya aset milik pemerintah dalam proses pengadilan dan gedung milik pemerintah pusat yang dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah.

3.66 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi di 37 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.67 Kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat beberapa aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak berhak senilai Rp646.807,31 juta. Selain itu terdapat aset gedung dan bangunan senilai Rp1.465,00 juta yang berada di tanah milik pihak lain, serta terdapat aset tetap yang berstatus sengketa dan sedang dalam proses peradilan senilai Rp83.188,17 juta.

- Di Kementerian Kesehatan, terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, adanya pembayaran yang melebihi prestasi fisik pekerjaan pada kontrak *multi years* pembangunan RS *National Brain Center,* pekerjaan pembangunan gedung layanan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta pembangunan gedung parkir senilai Rp80.546,96 juta.

- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pinjaman yang telah diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Riau kepada fakultas/unit kerja/perorangan sejak Tahun 2009 s.d. 7 Maret 2012 mengakibatkan kekurangan kas senilai Rp12.269,76 juta.

3.68 Dari kasus-kasus potensi kerugian negara senilai Rp1.601.231,02 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp423,61 juta di antaranya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp159,46 juta, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp36,45 juta, serta KPDT Rp227,70 juta seperti disajikan pada Lampiran 7.

Penyebab

3.69 Kasus-kasus potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

3.70 Selain itu, kasus-kasus potensi kerugian negara terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

3.71 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

3.72 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mengupayakan penagihan atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan (160 kasus senilai Rp327.558,07 juta)

3.73 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

3.74 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi adanya denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penerimaan negara (selain denda keterlambatan pekerjaan) belum/tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara, penggunaan langsung penerimaan negara, serta pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

3.75 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 160 kasus senilai Rp327.558,07 juta terdiri atas

- sebanyak 75 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp48.208,52 juta;
- sebanyak 62 kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp128.235,78 juta;
- sebanyak 9 kasus penggunaan langsung penerimaan negara senilai Rp148.826,77 juta; dan
- sebanyak 14 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp2.287,00 juta.

3.76 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 61 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.77 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kepolisian Negara RI, keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas 17 pekerjaan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp3.831,47 juta dan USD7.83 ribu ekuivalen Rp74,31 juta.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengelolaan PNBP TA 2011 pada beberapa satker di wilayah Provinsi DKI Jakarta, DI Aceh, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN senilai Rp23.835,68 juta serta belum disetorkan senilai Rp8.108,82 juta.
- Di Kementerian Kesehatan, perhitungan selisih penarikan PNBP dari rekening bendahara penerima dengan penyetoran PNBP ke kas negara TA 2006-2011 pada satker Konsil Kedokteran Indonesia menunjukkan adanya kekurangan penyetoran ke kas negara senilai Rp9.596,05 juta.

- Di Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa pelaksanaan pekerjaan pada Tahun 2011 yang mengalami keterlambatan belum dikenakan denda keterlambatan di antaranya, pekerjaan sistem dan teknologi informasi senilai Rp7.903,40 juta, pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp394,72 juta, pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan senilai Rp118,40 juta serta pekerjaan pengadaan barang persediaan senilai Rp59,84 juta.

- Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp327.558,07 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp35.194,43 juta di antaranya adalah Kementerian Hukum dan HAM senilai Rp6.202,45 juta; Kepolisian Negara RI senilai Rp4.221,65 juta; Kementerian Agama senilai Rp2.712,86 juta; dan Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.729,73 juta seperti disajikan pada Lampiran 7.

Penyebab

3.78 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

3.79 Selain itu, kasus-kasus kekurangan penerimaan terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mempedomani ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

3.80 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab dan menyetorkan kekurangan penerimaan serta menyampaikan bukti setor ke BPK.

Administrasi (359 kasus)

3.81 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara atau potensi kerugian negara, tidak mengurangi hak negara (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

3.82 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) baik untuk perjalanan dinas maupun lainnya selain perjalanan dinas, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, penyimpangan

terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar mata anggaran kegiatan (MAK) tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.

3.83 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 359 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 20 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 74 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 3 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;
- sebanyak 27 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- sebanyak 9 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari ketentuan pelelangan;
- sebanyak 2 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 109 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
- sebanyak 27 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 27 kasus penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 11 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 10 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara;
- sebanyak 38 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;

- sebanyak 1 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 1 kasus penyimpangan administrasi lainnya yaitu TGR ikatan dinas belum diserahkan ke DJKN.

3.84 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 76 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.85 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, aset tanah seluas 693.617.974,83m^2 senilai Rp77.874.365,74 juta belum dilengkapi bukti kepemilikan berupa sertifikat sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak.
- Di Kementerian Pekerjaan Umum, pengelolaan BMN rusunawa pada satker Bangkim Strategis Ditjen Cipta Karya belum optimal, di antaranya penyerahan kelolaan sementara BMN rusunawa senilai Rp1.328.294,94 juta kepada pemerintah daerah/perguruan tinggi dilakukan tanpa seijin Menteri Keuangan serta BMN rusunawa senilai Rp1.116.083,48 juta belum dihibahkan kepada pemerintah daerah dan tidak ada alokasi APBN untuk biaya perawatannya sehingga berpotensi rusak, dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan, serta perlengkapan bangunannya berpotensi hilang.
- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, realisasi belanja barang Tahun 2011 untuk pemberian dana bantuan (*block grant*) belum dilaporkan realisasi penggunaannya oleh 1.857 dari 2.829 penerima bantuan senilai Rp1.883.094,34 juta.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, minimal 19.463 penerima dana bansos pada beberapa satker pusat maupun daerah di wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua belum menyampaikan laporan penggunaan dana senilai Rp1.644.772,05 juta.
- Di Kementerian Perhubungan, aset yang diserahkan ke pemerintah daerah/pihak ketiga masih tercatat dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat senilai Rp1.554.223,98 juta. Atas aset tersebut sudah ada berita acara serah terima ke pihak pemerintah daerah, tetapi Kementerian Perhubungan belum melakukan proses pengusulan penetapan hibah ke Kementerian Keuangan.

Penyebab

3.86 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat/petugas yang bertanggung jawab lalai dalam melakukan tanggung jawabnya, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

3.87 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas agar memerintahkan kepala entitas yang diperiksa mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum valid serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset.

3.88 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang diperiksa agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas aset, serta memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Ketidakhematan (40 kasus senilai Rp95.181,00 juta)

3.89 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

3.90 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 40 kasus senilai Rp95.181,00 juta yang merupakan kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga.

3.91 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut terjadi di 27 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.92 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di Kementerian Pekerjaan Umum, belum selesainya pembebasan tanah proyek pembangunan jalan akses Tanjung Priok mengakibatkan adanya tambahan biaya yang terjadi karena produktivitas yang berkurang, perubahan metode pekerjaan, serta biaya tidak langsung (*overhead)* kontraktor yang bertambah. Hal ini menimbulkan potensi pemborosan dari klaim kontraktor atas tambahan biaya yang terjadi senilai Rp51.893,81 juta.

- Di Kementerian Agama, terdapat pemberian bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa/uang pendidikan dan bantuan penyusunan disertasi kepada pegawai negeri sipil dengan status izin belajar yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp14.736,31 juta.

- Di Kementerian Agama, pengeluaran senilai Rp4.512,04 juta untuk pembayaran insentif unsur pendidik, unsur pimpinan kelembagaan, unsur penunjang akademis, tim pengelola reguler, dan tenaga reguler untuk dosen, karyawan, dan pejabat di perguruan tinggi senilai Rp4.512,04 juta memboroskan keuangan negara karena tidak menghasilkan output yang jelas.

- Di Kementerian Kesehatan, proses pengadaan barang/jasa pada satker-satker di lingkungan Kementerian Kesehatan memboroskan keuangan negara senilai Rp2.882,05 juta, di antaranya karena perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak cermat, perbedaan antara penggunaan koefisien perhitungan, dan kelebihan perhitungan terhadap harga satuan pada HPS/*Engineer Estimate* (*EE*).

- Di Badan SAR Nasional, terdapat pemborosan atas realisasi honorarium pelaksana kegiatan pada kantor pusat senilai Rp1.875,51 juta. Belanja honorarium dipergunakan untuk membayar honor tim pokja yang sebenarnya merupakan tugas pokok sehari-hari personel yang bersangkutan dalam unit kerjanya.

Penyebab

3.93 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mematuhi ketentuan dan kurang cermat dalam melaksanakan tugas.

Rekomendasi

3.94 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, menetapkan standar harga yang wajar, ekonomis dan menguntungkan negara serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperjelas status bantuan bagi PNS dengan status izin belajar.

Ketidakefektifan (55 kasus senilai Rp787.327,13 juta)

3.95 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

3.96 Kasus-kasus ketidakefektifan yaitu adanya penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

3.97 Hasil pemeriksaan atas LKKL menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 55 kasus senilai Rp787.327,13 juta yang terdiri atas

- sebanyak 6 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp3.968,74 juta;

- sebanyak 5 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp11.411,67 juta;
- sebanyak 36 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp419.792,80 juta;
- sebanyak 7 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp352.153,92 juta; dan
- sebanyak 1 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

3.98 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut terjadi di 37 entitas, seperti disajikan pada Lampiran 7.

3.99 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Di Kementerian Hukum dan HAM, realisasi belanja modal senilai Rp246.969,59 juta berupa pembangunan Kanim, Lapas, Rupbasan, Rutan, dan Kantor Pelayanan Hukum yang telah selesai pada tahun 2007 s.d. 2011 belum dimanfaatkan secara optimal.
- Di Kementerian Kesehatan, BMN dari realisasi belanja modal TA 2011 senilai Rp39.093,71 juta pada sembilan satker belum memberikan manfaat untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk mendukung tujuan pengadaan atau program yang direncanakan. Hal ini disebabkan pengadaan kurang didukung dengan perencanaan kebutuhan, kesiapan sumber daya, dan kesiapan sarana pendukung lainnya.
- Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, aset tetap hasil pengadaan Tahun 2011 belum dimanfaatkan senilai Rp20.867,89 juta di antaranya pada Universitas Malikussaleh senilai Rp17.266,24 juta, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta senilai Rp181,41 juta, Universitas Terbuka senilai Rp2.308,07 juta, Pusat Data dan Statistik Pendidikan senilai Rp114,55 juta, Direktorat PPK-LK Dikmen senilai Rp223,98 juta dan sekretariat direktorat jenderal pendidikan menengah (Setditjen Dikmen) senilai Rp773,62 juta.
- Di Badan SAR Nasional, pengadaan 28 kendaraan bermotor roda empat senilai Rp8.120,51 juta yang bertujuan sebagai kendaraan supervisi maupun pengangkutan peralatan dan personel untuk mendukung kegiatan operasi SAR tidak tercapai karena dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk kendaraan dinas jabatan kepada beberapa pegawai yang tidak berhak, serta tidak terkait langsung dengan operasi SAR.

Penyebab

3.100 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan tugas, serta kurang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan pemanfaatan barang yang sudah ada secara optimal.

Rekomendasi

3.101 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta lebih cermat dalam perencanaan kegiatan, dan mengoptimalkan penggunaan barang yang sudah ada sesuai dengan tujuan pengadaannya.

3.102 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

4.1 Pada Semester I Tahun 2012 BPK telah memeriksa 426 LKPD Tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

4.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.

4.3 Cakupan pemeriksaan atas 426 LKPD tersebut meliputi neraca dan LRA. Rekapitulasi nilai neraca LKPD dengan rincian aset senilai Rp1.464,60 triliun, kewajiban senilai Rp10,92 triliun, dan ekuitas senilai Rp1.453,68 triliun. Pada LRA, rincian pendapatan senilai Rp459,56 triliun, belanja senilai Rp439,62 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp41,26 triliun.

4.4 Selain itu, pada Semester I 2012 BPK juga telah menyelesaikan LHP atas 4 LKPD Tahun 2010, yaitu LKPD Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku) yang baru dapat diselesaikan pada Semester I 2012, serta Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen (Provinsi Papua) yang baru diterima BPK pada awal Tahun 2012.

Hasil Pemeriksaan

4.5 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

4.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus".** Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

4.7 Terhadap 426 LKPD Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP atas 67 entitas (termasuk 33 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 316 entitas, opini TW atas 5 entitas, dan opini TMP atas 38 entitas.

4.8 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011 dapat dilihat dalam Tabel 4.1. Rincian opini untuk tiap-tiap entitas dapat dilihat pada Lampiran 8.

Tabel 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	6%	341	66%	26	5%	119*)	23%	520
2011	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426**)

*) Termasuk 4 LKPD Tahun 2010, yang baru selesai diperiksa di Semester I Tahun 2012

**) Jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2012

4.9 Dari Tabel 4.1., opini LKPD Tahun 2006 telah diberikan kepada 463 LKPD, Tahun 2007 kepada 469 LKPD, Tahun 2008 kepada 485 LKPD, Tahun 2009 kepada 504 LKPD, dan Tahun 2010 kepada 520 LKPD. Adapun Tahun 2011 belum seluruh pemerintah daerah dapat diberikan opini atas LKPD-nya. Sampai dengan Semester I Tahun 2012, opini baru diberikan kepada 426 LKPD Tahun 2011. Grafik 4.1. menyajikan perkembangan tiap-tiap jenis opini disajikan dalam persentase.

Grafik 4.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2006 s.d. 2011

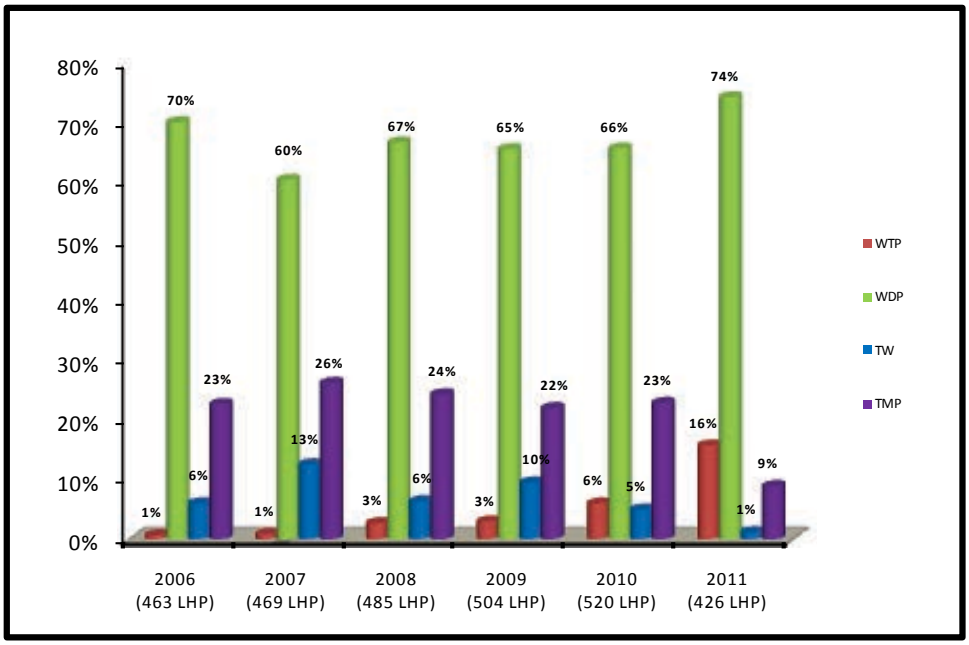

4.10 Dari Grafik 4.1., diketahui bahwa

- Persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 16%, meningkat 10% dari Tahun 2010 sebanyak 6%.
- Persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 74%, meningkat 8% dari Tahun 2010 sebanyak 66%.
- Persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2011 adalah sebanyak 1%, turun 4% dari Tahun 2010 sebanyak 5%.
- Persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 9%, turun 14% dari Tahun 2010 sebanyak 23%.

4.11 Adanya kenaikan persentase opini WTP dan WDP, serta penurunan persentase opini TW dan TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan.

4.12 Atas 316 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan penatausahaan persediaan tidak memadai.

4.13 Atas lima LKPD yang memperoleh opini TW pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun kas, persediaan, aset tetap, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, serta belanja modal.

4.14 Atas 38 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset tetap, aset lainnya, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

4.15 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester I Tahun 2012 terdiri atas 28 LKPD provinsi, 313 LKPD kabupaten, dan 85 LKPD kota. Opini LKPD Tahun 2011 untuk tiap-tiap tingkat pemerintahan dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Opini LKPD Tahun 2006 s.d 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml
2006	-	25	4	4	33	2	236	21	85	344	1	66	3	16	86
	0%	76%	12%	12%	100%	1%	68%	6%	25%	100%	1%	77%	3%	19%	100%
2007	1	21	3	8	33	1	201	45	103	350	2	61	11	12	86
	3%	64%	9%	24%	100%	1%	57%	13%	29%	100%	2%	71%	13%	14%	100%
2008	-	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	-	5	33	16	252	23	103	394	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	16	-	2	28	36	240	4	33	313	21	60	1	3	85
	36%	57%	0%	7%	100%	12%	76%	1%	11%	100%	25%	71%	1%	4%	100%

4.16 Grafik 4.2. menyajikan perbandingan opini LKPD Tahun 2011 berdasarkan tingkat pemerintahan yang disajikan dalam persentase.

Grafik 4.2. Opini LKPD Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

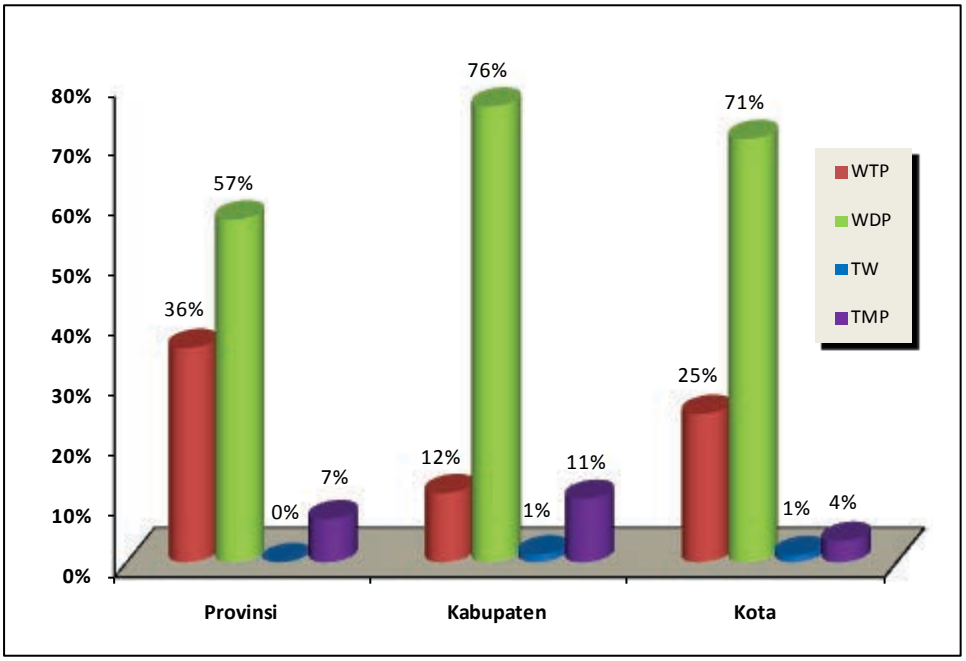

4.17 Dari Grafik 4.2. terlihat bahwa pada Tahun 2011 opini yang diperoleh pada pemerintahan tingkat kota dan provinsi lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan tingkat kabupaten. Pemerintah kota memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 96% dari keseluruhan entitas kota, pemerintah provinsi memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 93% dari keseluruhan entitas provinsi, dan pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 88% dari keseluruhan entitas kabupaten.

Sistem Pengendalian Intern (4.369 kasus)

4.18 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

4.19 SPI memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.20 SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

4.21 Unsur-unsur pengendalian intern dalam SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada LKPD.

4.22 Sesuai ketentuan dalam SPKN, selain menerbitkan LHP keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

4.23 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan pengendalian intern dalam hal penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

4.24 Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Masih terdapatnya kelemahan dalam penilaian risiko instansi, disebabkan kurang pahamnya pimpinan instansi terhadap faktor-faktor dari dalam maupun dari luar yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan instansi.

4.25 Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kelemahan atas kegiatan pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang belum akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang masih lemah, serta pendokumentasian yang kurang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.

4.26 Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Kelemahan dalam pemantauan SPI karena tidak dilaksanakannya pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, evaluasi terpisah juga tidak diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau pihak eksternal dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya tidak segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lain yang ditetapkan.

4.27 Hasil evaluasi atas 426 LKPD terdapat 4.369 kasus kelemahan SPI sebagaimana tercantum pada Tabel 4.3., rincian jenis temuan pada Lampiran 9, dan rincian temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2011

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.791
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1.739
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	839
	Jumlah	**4.369**

4.28 Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Tiap-tiap kelompok temuan beserta kasusnya diuraikan sebagai berikut.

4.29 Sebanyak 1.791 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas

- sebanyak 1.005 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak 603 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 13 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
- sebanyak 147 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
- sebanyak 23 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

4.30 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut terjadi di 410 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.31 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kartu inventaris barang (KIB) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum disusun sehingga nilai aset tetap di 35 SKPD yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat dirinci lokasi, jenis/merk tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, dan keadaan barang secara andal.

- Di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, aset tetap yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2011 tidak berdasarkan pencatatan yang memadai dan beberapa aset tanah belum dicatat sehingga nilai aset tetap tidak akurat dan belum mencerminkan keseluruhan aset tetap yang dimiliki.

- Di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, aset tetap di beberapa SKPD belum seluruhnya dilakukan pencatatan dan hasil pengadaan TA 2004 s.d. 2011 belum seluruhnya dicek fisik baik keberadaan maupun kelengkapannya sehingga saldo aset tetap senilai Rp702.734,79 juta pada neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saldo aset tetap senilai Rp402.024,72 juta tidak didukung dengan rincian dan aset tanah untuk konstruksi jalan, irigasi, dan jaringan belum dilakukan inventarisasi sehingga nilai aset tetap pada neraca per 31 Desember 2011 tidak diyakini kewajarannya.

- Di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, saldo dana bergulir pada neraca per 31 Desember 2011 senilai Rp54.942,95 juta belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan sehingga saldo investasi non permanen tidak mencerminkan nilai yang wajar.

- Di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, penyertaan modal senilai Rp31.142,56 juta tidak disajikan berdasarkan metode ekuitas, dan terdapat perbedaan pengakuan antara Pemerintah Kota Binjai dengan PD Pembangunan sehingga saldo penyertaan modal pada neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya.

4.32 Sebanyak 1.739 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 577 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

- sebanyak 249 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;

- sebanyak 494 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;

- sebanyak 97 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD;
- sebanyak 237 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan;
- sebanyak 80 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 5 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya, di antaranya pengelolaan dan pengamanan fisik aset yang tidak memadai.

4.33 Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut terjadi di 411 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.34 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Bali, pembentukan dana cadangan senilai Rp125.963,07 juta untuk membiayai kegiatan pembangunan Jembatan Cau Blayu/ Jembatan Tukad Peret, penyertaan modal jalan tol di atas perairan (JDP) pada Pengelola Jalan Tol Wilayah Bali, dan kegiatan pemilihan kepala daerah tidak tepat dan bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- Di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, kesalahan penganggaran belanja modal TA 2011 senilai Rp70.478,96 juta mengakibatkan kesalahan penyajian klasifikasi realisasi belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja modal.
- Di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dana untuk pekerjaan pembangunan Pasar Plered Citeko dalam tahun jamak senilai Rp26.659,00 juta TA 2011 belum dicadangkan dan belum dibuatkan peraturan daerahnya sehingga berpotensi tidak dapat diselesaikan karena ketidaktersediaan anggaran.
- Di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, penerimaan pinjaman daerah atas penerusan pinjaman luar negeri dan pembayaran kegiatan pembangunan gedung pertokoan Pasar Kahayan kepada rekanan senilai Rp10.279,67 juta dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD TA 2011.
- Di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, penerimaan klaim dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), jaminan persalinan (Jampersal), asuransi kesejahteraan sosial (Askessos), dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) TA 2011 senilai Rp6.353,61 juta digunakan secara langsung untuk operasional RSUD Sidikalang dan Dinas Kesehatan serta penatausahaan dana oleh bendahara pengelola pada RSUD Sidikalang tidak memadai.

4.35 Sebanyak 839 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 509 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 247 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern;
- sebanyak 55 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal;
- sebanyak 25 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
- sebanyak 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern lainnya, di antaranya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan atas pengelolaan kas daerah.

4.36 Kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut terjadi di 323 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.37 Kasus-kasus kelemahan struktur pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Riau, penyerahan hasil pengadaan belanja modal TA 2011 kepada masyarakat senilai Rp10.557,68 juta tanpa disertai persetujuan kepala daerah dan tidak dicatat dalam KIB.
- Di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang mengakibatkan saldo piutang lainnya pada neraca per 31 Desember 2011 senilai Rp4.081,41 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Provinsi Bali, tidak terdapat sistem dan prosedur pengelolaan persediaan barang pakai habis sehingga saldo pada neraca per 31 Desember 2011 senilai Rp2.282,09 juta tidak dapat diyakini kewajarannya serta terdapat SKPD yang tidak melaporkan nilai persediaan pada akhir tahun.
- Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, SOP yang mengatur tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah belum disusun sehingga bantuan hibah yang diberikan berpotensi disalahgunakan.
- Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah belum menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sehingga penatausahaan pendapatan daerah tidak dilakukan dengan tertib.

Penyebab

4.38 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

4.39 Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

4.40 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

4.41 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

4.42 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 4.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 10 dan rincian temuan menurut entias disajikan dalam Lampiran 11.

Tabel 4.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2011

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	1.609	865.376,78
2	Potensi Kerugian Daerah	354	1.603.922,08
3	Kekurangan Penerimaan	945	411.985,75
4	Administrasi	2.318	-
5	Ketidakhematan	231	183.959,04
6	Ketidakefisienan	2	537,50
7	Ketidakefektifan	317	718.080,27
Jumlah		**5.776**	**3.783.861,42**

4.43 Berdasarkan Tabel 4.4., hasil pemeriksaan mengungkapkan 5.776 kasus senilai Rp3.783.861,42 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 426 entitas.

Kerugian Daerah (1.609 kasus senilai Rp865.376,78 juta)

4.44 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4.45 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, belanja atau pengadaan fiktif lainnya, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pemahalan harga *(mark up),* penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian, penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus kerugian daerah.

4.46 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 1.609 kasus senilai Rp865.376,78 juta terdiri atas

- sebanyak 59 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp25.633,62 juta;
- sebanyak 72 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya senilai Rp26.778,74 juta;
- sebanyak 13 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp6.505,44 juta;
- sebanyak 384 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp94.270,67 juta;
- sebanyak 228 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp53.032,68 juta;
- sebanyak 38 kasus pemahalan harga *(mark up)* senilai Rp21.322,66 juta;
- sebanyak 100 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp62.537,67 juta;
- sebanyak 127 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp23.408,73 juta;

- sebanyak 118 kasus pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp30.517,78 juta;
- sebanyak 59 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp11.489,98 juta;
- sebanyak 268 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp76.701,52 juta;
- sebanyak 13 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp29.048,67 juta;
- sebanyak 1 kasus kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian senilai Rp26,20 juta;
- sebanyak 1 kasus penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan senilai Rp79,35 juta; dan
- sebanyak 128 kasus kerugian daerah lainnya senilai Rp404.023,07 juta di antaranya terdapat ketekoran kas dan pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

4.47 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut terjadi di 386 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.48 Kasus-kasus kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, terdapat ketekoran kas pada bendahara umum daerah senilai Rp39.199,02 juta yang disebabkan adanya penggunaan kas daerah di luar mekanisme APBD dan dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kas daerah.
- Di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, terdapat ketekoran kas senilai Rp11.216,04 juta yang disebabkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melakukan akad kredit yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sragen ke PD BPR Djoko Tingkir dengan jaminan deposito tanpa melalui persetujuan DPRD dan hasilnya tidak masuk ke kas daerah serta penggunaannya tidak melalui mekanisme APBD.
- Di Kabupaten Kapuas, Povinsi Kalimantan Tengah, terdapat kelebihan pembayaran dari sisa uang muka senilai Rp10.878,68 juta atas kontrak pekerjaan peningkatan jalan kabupaten ruas jalan Anjir Serapat-Palampai yang diputus kontrak.
- Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat ketekoran kas senilai Rp9.029,57 juta pada bendahara pengeluaran pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah serta belanja hibah dan bantuan sosial Pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkesos) dan Biro Perekonomian berindikasi merugikan

keuangan daerah senilai Rp6.597,37 juta, di antaranya senilai Rp6.176,97 juta merupakan belanja fiktif.

- Di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dana bergulir TA 2011 yang macet senilai Rp5.380,11 juta pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dihapuskan sebelum adanya proses evaluasi dan pengkajian yang mendalam.

4.49 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp865.376,78 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp68.852,83 juta di antaranya adalah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp10.929,34 juta; Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara senilai Rp4.548,49 juta; dan Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp3.151,77 juta seperti disajikan pada Lampiran 11.

Penyebab

4.50 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.51 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan, melakukan upaya penagihan terhadap piutang yang macet, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (354 kasus senilai Rp1.603.922,08 juta)

4.52 Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

4.53 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa, aset tidak diketahui keberadaannya, pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, pihak ketiga belum

melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

4.54 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 354 kasus senilai Rp1.603.922,08 juta yang terdiri atas

- sebanyak 27 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp11.545,20 juta;
- sebanyak 23 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp2.752,26 juta;
- sebanyak 82 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp190.519,19 juta;
- sebanyak 4 kasus pembelian aset yang berstatus sengketa senilai Rp2.562,48 juta;
- sebanyak 87 kasus aset di antaranya berupa kendaraan dinas serta peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya senilai Rp997.484,96 juta;
- sebanyak 10 kasus pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan senilai Rp12.331,10 juta;
- sebanyak 6 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp33.966,42 juta;
- sebanyak 89 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp289.709,50 juta;
- sebanyak 4 kasus penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp13.265,72 juta; dan
- sebanyak 22 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp49.785,25 juta di antaranya penggunaan uang muka yang belum dapat dijelaskan peruntukannya dan aset hilang yang belum diproses TP/TGR.

4.55 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut terjadi di 219 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.56 Kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Riau, investasi non permanen dana bergulir senilai Rp137.296,01 juta berpotensi tidak tertagih yang disebabkan penatausahaan tidak didukung dengan pemantauan yang memadai, dan pembayaran atas kontrak pengadaan peralatan *venues* dan peralatan

tanding 39 cabang olahraga PON XVIII senilai Rp16.741,71 juta berpotensi merugikan keuangan daerah disebabkan rekanan belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada pemerintah daerah.

- Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, aset tetap peralatan dan mesin sejumlah minimal 6.255 unit yang tercatat dalam daftar aset pada akhir Tahun 2011 di beberapa SKPD senilai Rp42.257,22 juta tidak diketahui keberadaannya.

- Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejumlah 319 unit kendaraan dinas milik pemerintah daerah senilai Rp14.009,82 juta tidak dapat dipantau kondisi dan kepemilikannya, serta berpeluang disalahgunakan.

- Di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, proses pencairan anggaran belanja modal untuk pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran minimal 52 meter senilai Rp13.999,89 juta tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang valid dan hasil pengadaan tersebut tidak diyakini asersi keberadaan dan haknya.

- Di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, angsuran sewa ruko, kios, dan *losd* Pasar Baru Panyabungan senilai Rp11.276,52 juta berpotensi tidak tertagih yang disebabkan pengadministrasian tagihan tidak memadai serta tidak disertai bukti perjanjian tertulis.

4.57 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp1.603.922,08 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp505,62 juta di antaranya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung senilai Rp173,09 juta dan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat senilai Rp94,37 juta seperti disajikan pada Lampiran 11.

Penyebab

4.58 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.59 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, serta meningkatkan koordinasi.

4.60 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mengupayakan penagihan dan

mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan bila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah atau melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.

Kekurangan Penerimaan (945 kasus senilai Rp411.985,75 juta)

4.61 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

4.62 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah, dan lain-lain kasus kekurangan penerimaan.

4.63 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 945 kasus senilai Rp411.985,75 juta terdiri atas

- sebanyak 299 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp55.103,72 juta;
- sebanyak 492 kasus penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp241.149,35 juta;
- sebanyak 114 kasus penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp107.228,65 juta;
- sebanyak 2 kasus penerimaan daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak senilai Rp208,83 juta;
- sebanyak 24 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp3.322,92 juta;
- sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp54,72 juta; dan
- sebanyak 12 kasus kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp4.917,56 juta, di antaranya sisa dana proyek belum dikembalikan ke kas daerah dan pemotongan pajak atas jasa giro terhadap rekening pemerintah daerah.

4.64 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut terjadi di 357 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.65 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, denda keterlambatan senilai Rp4.506,71 juta atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pengadaan Bus Transjakarta TA 2011 belum ditetapkan.

- Di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, jaminan pelaksanaan senilai Rp4.262,80 juta atas pemutusan kontrak pekerjaan peningkatan jalan kabupaten ruas jalan Anjir Serapat-Palampai TA 2011 yang tidak diselesaikan rekanan belum dicairkan.

- Di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, denda keterlambatan senilai Rp1.270,81 juta dan jaminan pelaksanaan senilai Rp1.340,71 juta atas 92 paket pekerjaan pada Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga dan Pengairan TA 2011 yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, belum ditarik dan disetorkan ke kas daerah.

- Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2011 sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan PD Gunung Karang tidak berjalan sehingga terdapat kekurangan penerimaan dari yang diperjanjikan senilai Rp1.983,60 juta.

- Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, jaminan pelaksanaan 22 paket pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan senilai Rp1.790,63 juta pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi belum dicairkan.

4.66 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp411.985,75 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp24.293,10 juta di antaranya adalah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah senilai Rp2.405,08 juta; Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp2.137,81 juta; dan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur senilai Rp1.458,46 juta seperti disajikan pada Lampiran 11.

Penyebab

4.67 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.68 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, meningkatkan koordinasi, dan menagih serta menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan.

Administrasi (2.318 kasus)

4.69 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

4.70 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), baik untuk perjalanan dinas maupun lainnya (selain perjalanan dinas), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah), pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, dan pelaksanaan lelang secara proforma.

4.71 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain, pembentukan cadangan piutang dan perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah, pengalihan anggaran antar MAK tidak sah, dan lain-lain kasus penyimpangan administrasi.

4.72 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 2.318 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 74 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 621 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 15 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;

- sebanyak 94 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah);
- sebanyak 13 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 7 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 439 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah;
- sebanyak 258 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 1 kasus pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 220 kasus penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 132 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan;
- sebanyak 128 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah;
- sebanyak 80 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah;
- sebanyak 196 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah;
- sebanyak 16 kasus pengalihan anggaran antar MAK tidak sah; dan
- sebanyak 24 kasus penyimpangan administrasi lainnya, di antaranya realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran.

4.73 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di 418 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.74 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, 767 bidang tanah pemerintah daerah senilai Rp964.328,89 juta sampai dengan akhir TA 2011 belum bersertifikat sehingga status hukum atas kepemilikannya lemah.
- Di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebanyak 422 penerima bantuan sosial dan bantuan keuangan TA 2011 belum menyampaikan laporan

pertanggungjawaban masing-masing senilai Rp7.650,00 juta dan Rp218.569,00 juta sehingga berpeluang timbulnya penyalahgunaan bantuan.

- Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, realisasi belanja daerah pada Badan Rumah Sakit Umum (BRSU) Kabupaten Tabanan TA 2011 senilai Rp12.663,41 juta melampaui anggaran dan melebihi batas fleksibilitas penggunaan anggaran.

- Di Provinsi Maluku Utara, belanja perjalanan dinas luar daerah DPRD TA 2011 senilai Rp2.508,85 juta tidak memiliki bukti pertanggungjawaban dan senilai Rp8.998,55 juta tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.

- Di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) senilai Rp8.859,71 juta s.d. akhir TA 2011 belum didukung peraturan daerah.

Penyebab

4.75 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.76 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan membuat peraturan daerah terkait penyertaan modal pemerintah, serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan secara administratif atas bukti pertanggungjawaban yang belum memadai dan segera melengkapi dokumen kepemilikan aset.

Ketidakhematan (231 kasus senilai Rp183.959,04 juta)

4.77 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

4.78 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

4.79 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 231 kasus senilai Rp183.959,04 juta terdiri atas

- sebanyak 4 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp1.511,08 juta;
- sebanyak 3 kasus penetapan kualitas dan kuatitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp954,18 juta; dan
- sebanyak 224 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp181.493,78 juta.

4.80 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut terjadi di 147 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.81 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat pembayaran honor kepada 362 pegawai honorer TA 2011 yang diangkat setelah keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2005 senilai Rp4.344,00 juta yang memboroskan keuangan daerah.
- Di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, nilai kontrak pekerjaan pembangunan Pasar Besar Caruban TA 2011 ditetapkan lebih tinggi dari HPS senilai Rp4.011,59 juta yang disebabkan perhitungan perkiraan volume item pekerjaan belum memperhitungkan faktor pengurang sehingga mengakibatkan pemborosan.
- Di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, realisasi belanja bantuan sosial TA 2011 senilai Rp2.461,45 juta diberikan tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.
- Di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, perubahan anggaran belanja perjalanan dinas untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD pada November 2011 yang dilakukan untuk mengakomodasi kelebihan realisasi mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp1.742,39 juta.
- Di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdapat kemahalan harga pada empat pekerjaan tiang pancang, *joint plate*, pemancangan tiang pancang, serta mobilisasi dan demobilisasi TA 2011 senilai Rp1.493,49 juta yang memboroskan keuangan daerah.

Penyebab

4.82 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kurang cermat dalam merencanakan kegiatan, tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.83 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan (2 kasus senilai Rp537,50 juta)

4.84 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

4.85 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya dua kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp537,50 juta.

4.86 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.87 Kasus ketidakefisienan tersebut di antaranya terjadi di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, terdapat inefisiensi penggunaan anggaran TA 2011 senilai Rp87,67 juta untuk pembayaran bahan bakar minyak (BBM) perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.

Penyebab

4.88 Kasus-kasus ketidakefisienan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dan tidak memahami prinsip efisiensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Rekomendasi

4.89 Terhadap kasus-kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan dan mengeluarkan surat keputusan yang mengatur besarnya bantuan BBM yang diberikan untuk perjalanan dinas.

Ketidakefektifan (317 kasus senilai Rp718.080,27 juta)

4.90 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

4.91 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak

terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

4.92 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 317 kasus senilai Rp718.080,27 juta yang terdiri atas

- sebanyak 185 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp383.332,93 juta;
- sebanyak 9 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp5.061,43 juta;
- sebanyak 56 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp189.317,34 juta;
- sebanyak 7 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp11.679,27 juta;
- sebanyak 36 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp102.059,36 juta;
- sebanyak 13 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp1.547,14 juta; dan
- sebanyak 11 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp25.082,80 juta.

4.93 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut terjadi di 211 pemerintah daerah, seperti disajikan pada Lampiran 11.

4.94 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, hasil pengadaan motor pompa *portable* dan kelengkapannya TA 2011 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana senilai Rp28.640,70 juta tidak dapat segera dimanfaatkan tepat waktu oleh masyarakat.
- Di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, infrastruktur hasil kegiatan belanja modal TA 2011 senilai Rp21.526,40 juta tidak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai tujuan awal pembangunannya.
- Di Kota Denpasar, Provinsi Bali, biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan TA 2011 senilai Rp4.847,98 juta diberikan secara tunai kepada pegawai sebagai penambahan penghasilan, biaya hari raya dan bantuan

sosial kepada masyarakat yang tidak sesuai Peraturan Walikota Denpasar sehingga tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi asas kepatutan.

- Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pekerjaan lanjutan pembangunan Puskesmas Tapung TA 2011 senilai Rp3.430,01 juta tidak dapat diselesaikan sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

- Di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, belanja hibah dan belanja bantuan sosial TA 2011 masing-masing senilai Rp34,64 juta dan Rp2.960,20 juta diberikan kepada SKPD di lingkungan pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai operasional SKPD yang tidak dianggarkan sebelumnya sehingga pengeluaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan.

Penyebab

4.95 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak mempedomani ketentuan yang berlaku, tidak optimal dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan tugas, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan**.**

Rekomendasi

4.96 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab, mempedomani ketentuan yang berlaku, dan lebih optimal dalam melakukan perencanaan kegiatan.

LKPD Tahun 2010

4.97 Dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2010 terdapat kasus kerugian daerah di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sisa kas di bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2010 digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dan belum disetorkan kembali ke kas daerah senilai Rp26.101,78 juta yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah.

- Di Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, belanja bantuan sosial TA 2010 senilai Rp17.011,70 juta tidak didukung dengan bukti yang memadai sehingga berpotensi disalahgunakan.

- Di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas fiktif TA 2010 senilai Rp3.528,89 juta yang berindikasi merugikan keuangan daerah.

- Di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, terdapat kelebihan bayar senilai Rp1.762,75 juta atas barang hasil pengadaan peralatan dan mesin TA 2010 pada tiga SKPD yang belum diterima.

4.98 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya

5.1 Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 6 LK BUMN dan badan lainnya Tahun 2011, yang meliputi LK PT Jamsostek, LK BI, LK LPS, LK PIH Tahun 2011 M/1432 H, LK *Loan* ADB No. 2575-INO pada RIS *Program to the* PNPM Mandiri *Project* II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, serta LK *Loan* ADB No. 2654-INO pada MSMHP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

5.2 Pemeriksaan keuangan atas BUMN dan badan lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan SAP dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.

5.3 Cakupan pemeriksaan atas LK BUMN dan badan lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan untuk LK BUMN dan badan lainnya tersebut disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Cakupan Pemeriksaan atas LK BUMN dan Badan Lainnya

(dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Neraca			Laporan Laba Rugi/ Laporan Surplus (Defisit)/Laporan Aktivitas/ Laporan Realisasi Anggaran		
		Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Biaya	Laba (rugi) Surplus (defisit)
1	PT Jamsostek	116.627.200,88	111.801.562,14	4.825.638,74	16.132.623,02	14.112.532,15	2.020.090,87
2	Bank Indonesia	1.371.841.819,00	1.282.269.544,00	89.572.275,00	17.413.436,00	42.562.149,00	(25.148.713,00)
3	Lembaga Penjamin Simpanan	27.565.868,07	10.839.379,22	16.726.488,85	6.472.909,40	1.045.154,96	5.427.754,44
4	Penyelenggara Ibadah Haji	40.266.798,17	39.088.591,05	1.178.207,12	7.789.111,35	7.618.588,67	170.522,68
5	*Loan* ADB 2575-INO PNPM Mandiri	-	-	-	333.055,96	333.055,96	-
6	*Loan* ADB 2654-INO MSMHP	-	-	-	5.254,20	5.254,20	-

Hasil Pemeriksaan

5.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LK BUMN dan badan lainnya disajikan dalam tiga kategori, yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

5.5 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus".** Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini

5.6 Terhadap LK Tahun 2011, BPK memberikan opini WTP atas LK BI, LK *Loan* ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, dan LK *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, serta opini WTP-DPP untuk LK PT Jamsostek. BPK juga telah memberikan opini WDP untuk LK PIH Tahun 2011 M/1432 H dan TMP untuk LK LPS Tahun 2011. Perkembangan opini enam entitas tersebut untuk Tahun 2009 s.d. 2011 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2. Opini atas LK BUMN dan Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini		
		2009	2010	2011
1	PT Jamsostek*)	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
2	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP
4	Penyelenggara Ibadah Haji	TMP	TMP	WDP
5	*Loan* ADB 2575-INO PNPM Mandiri	--	WTP	WTP
6	*Loan* ADB 2654-INO MSMHP	--	--	WTP

Keterangan: *) Pada Tahun 2009, PT Jamsostek mendapat opini WTP-DPP dari KAP Dolly, Bambang, Sudarmaji, dan Rekan. Adapun pada Tahun 2010, PT Jamsostek mendapat opini WTP dari KAP Hertanto, Sidik, dan Rekan

Sistem Pengendalian Intern

5.7 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatannya. SPKN mengharuskan pemeriksa untuk mengungkapkan kelemahan atas pengendalian intern entitas.

5.8 Selain menerbitkan LHP keuangan yang berupa opini, BPK juga menerbitkan LHP atas SPI pada setiap entitas yang diperiksa. Hasil evaluasi atas SPI LK BUMN dan badan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Hasil Evaluasi SPI

5.9 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN dan badan lainnya menunjukkan adanya 51 kasus kelemahan SPI sebagaimana tercantum

pada Tabel 5.3. Rincian jenis temuan pada Lampiran 12, dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 14.

Tabel 5.3. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LK BUMN dan Badan Lainnya

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang Mengakibatkan	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	9
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	14
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	28
	Jumlah	**51**

5.10 Kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Jamsostek, penerapan tarif Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan perusahaan Tahun 2011 minimal senilai Rp36.504,37 juta.

- Di BI, penerimaan dan penggunaan dana hibah luar negeri TA 2011 senilai Rp9.068,00 juta tidak melalui mekanisme anggaran tahunan BI dan tidak diadministrasikan secara memadai yang disebabkan tidak adanya ketentuan internal yang mengatur pengelolaan hibah.

- Di LPS, terdapat pengakuan hutang klaim penjaminan kepada nasabah yang telah habis jangka waktu pembayarannya dan rekonsiliasi antara data rekening *escrow* LPS untuk pembayaran klaim nasabah dengan data *general ledger* pada sistem SAP tidak dilakukan secara periodik.

- Di PIH, aset tetap belum seluruhnya didukung daftar rincian aset, diinventarisasi dan direkonsiliasi, serta belum dicatat dengan aplikasi pencatatan yang seragam mengakibatkan saldo aset tetap pada neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Di *Loan* ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, penyusunan LK tidak melalui proses rekonsiliasi sehingga terdapat selisih antara pencairan SP2D TA 2011 dengan rekening khusus dan talangan senilai Rp10.800,00 juta.

- Di *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, biaya *contigencies* porsi dolar Amerika pada kelompok biaya langsung non personil senilai USD409.00 ribu ekuivalen Rp3.877,32 juta tidak memiliki analisis biaya ataupun rincian dan tidak dapat diperhitungkan dalam HPS maupun kontrak yang berpotensi menimbulkan pemborosan.

Penyebab

5.11 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

5.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan BUMN dan badan lainnya agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

5.13 Selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan seperti disajikan dalam Tabel 5.4. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 13 dan rincian temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 14.

Tabel 5.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan LK BUMN dan Badan Lainnya

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	8	25.215,86
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	1	11,67
3	Kekurangan Penerimaan	8	109.919,37
4	Administrasi	25	-
5	Ketidakhematan	6	2.092,47
6	Ketidakefektifan	8	1,27
Jumlah		**56**	**137.240,64**

5.14 Berdasarkan Tabel 5.4., hasil pemeriksaan mengungkapkan 56 kasus senilai Rp137.240,64 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada 6 entitas.

5.15 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PIH, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan, yaitu sanksi denda TA 2011 minimal senilai Rp3.264,98 juta dan USD128.57 ribu ekuivalen Rp1.218,84 juta yang belum dikenakan kepada tiga bank penerima setoran (BPS) karena terlambat memindahbukukan dana setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler dan BPIH khusus.

- Di *Loan* ADB No. 2654-INO MSMHP, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan/pemborosan, yaitu biaya langsung non personil porsi *foreign currency* pada kontrak ditetapkan lebih tinggi senilai USD154.27 ribu ekuivalen Rp1.462,47 juta sehingga mengakibatkan pemborosan Loan ADB No. 2654-INO.

- Di *Loan* ADB No. 2575-INO PNPM Mandiri, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, yaitu pemanfaatan infrastruktur RIS PNPM 2011 pada empat desa di Provinsi Jambi dan Lampung tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan prosedur pengadaan barang yang dilaksanakan oleh 29 organisasi masyarakat setempat di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan RIS PNPM.

- Di LPS, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan, yaitu kesalahan perhitungan premi penjaminan dalam TA 2011 yang dilakukan oleh sembilan bank peserta penjaminan sehingga terdapat kekurangan premi penjaminan senilai Rp83.812,03 juta. Selain itu juga terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, yaitu pembayaran uang lembur kepada pegawai kontrak (pengemudi) senilai Rp445,93 juta melebihi jam lembur menurut ketentuan ketenagakerjaan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

- Di PT Jamsostek, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, yaitu pembentukan Dana Pengembangan Dana Program Jaminan Hari Tua (JHT) senilai Rp7.244.073,05 juta tidak sesuai PP Nomor 22 Tahun 2004 yang mengakibatkan manfaat bagi peserta atas hasil pengembangan iuran JHT tidak optimal.

- Di BI, terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, yaitu rekanan yang melakukan wanprestasi sehingga BI menanggung biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin sortasi uang kertas senilai Rp24.256,13 juta. Selain itu juga terdapat ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan, yaitu BI belum melaksanakan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak sejak 1 Desember 2006 s.d. 31 Desember 2011 sehingga terdapat utang PPN Tahun 2010 senilai Rp20.452,52 juta yang belum disetorkan ke kas negara.

5.16 Dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp137.240,64 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp84.128,94 juta di

antaranya adalah LPS senilai Rp83.812,03 juta dan PIH senilai Rp316,91 juta seperti disajikan pada Lampiran 14.

Penyebab

5.17 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rekomendasi

5.18 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan BUMN dan badan lainnya agar merevisi kebijakan dan ketentuan, melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan milik negara dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan milik negara sesuai dengan ketentuan.

5.19 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

Bapeten	:	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bansos	:	Bantuan Sosial
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BI	:	Bank Indonesia
BMN	:	Barang Milik Negara
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan

D

DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

H

HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri

I

IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IP	:	Inventarisasi dan Penilaian

J

JHT	:	Jaminan Hari Tua

K

KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	:	Kementerian Negara/Lembaga
KPDT	:	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
M		
MAK	:	Mata Anggaran Kegiatan
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MSMHP	:	*Metropolitan Sanitation Management and Health Project*
P		
PIH	:	Penyelenggara Ibadah Haji
PKPS	:	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPhMigas	:	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi
PPPTMGB	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
PT Jamsostek	:	PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
R		
RIS	:	*Rural Infrastucture Support*
S		
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	:	*Standard Operating Procedure*
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
T		
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TW	:	Tidak Wajar
W		
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan																														Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
				Belanja atau Pengadaan Barang/ Jasa Fiktif				Rekanan Pengadaan Barang/ Jasa tidak Menyelesaikan Pekerjaan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pembayaran selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Pemahalan Harga (Mark up)		Penggunaan Uang/ Barang untuk Kepentingan Pribadi		Pembayaran Honorarium dan/ atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan atau Melebihi Standar yang Ditetapkan				Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Kontrak		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Pengembalian Pinjaman/ Piutang atau Dana Bergulir Macet		Kelebihan Penetapan dan Pembayaran Restitusi Pajak atau Penetapan Kompensasi Kerugian		Penjualan/ Pertukaran/ Penghapusan Aset Negara/ Daerah Tidak Sesuai Ketentuan dan Merugikan Negara/ Daerah/ Perusahaan		Penghapusan Hak Tagih Tidak Sesuai Ketentuan		Lain-Lain			
				Belanja Perjalanan Dinas Fiktif		Belanja atau Pengadaan Fiktif Lainnya												Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan atau Melebihi Standar yang Ditetapkan		Pembayaran Honorarium Ganda dan atau Melebihi Standar yang Ditetapkan																Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan untuk Temuan Perjalanan Dinas	Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan untuk Temuan Lainnya (Selain Perjalanan Dinas)
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	LKKL	387	269.090,63	24	9.278,46	15	7.641,80	6	3.459,46	74	37.404,47	104	114.886,77	17	27.775,85	2	101,29	39	11.103,17	24	10.642,56	24	10.123,41	41	26.716,03	-	-	4	1.656,57	1	6,13	-	-	12	8.294,66	5.646,48	34.146,84
			USD 8.90																USD 8.90																		
			SGD 0.24																SGD 0.24																		
			269.176,78																11.189,32																		
2	LKPD	1.609	865.376,78	59	25.633,62	72	26.778,74	13	6.505,44	384	94.270,67	228	53.032,68	38	21.322,66	100	62.537,67	127	23.408,73	118	30.517,78	59	11.489,98	268	76.701,52	13	29.048,67	1	26,20	-	-	1	79,35	128	404.023,07	16.739,04	52.114,34
3	LK BUMN dan Badan Lainnya	8	25.215,86	-	-	-	-	1	24.256,13	1	107,22	3	301,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	445,93	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104,73	-	-
Total		**2.004**	**1.159.683,27**	**83**	**34.912,08**	**87**	**34.420,54**	**20**	**34.221,03**	**459**	**131.782,36**	**335**	**168.221,30**	**55**	**49.098,51**	**102**	**62.638,96**	**166**	**34.511,90**	**142**	**41.160,34**	**84**	**21.613,39**	**310**	**103.863,48**	**13**	**29.048,67**	**5**	**1.682,77**	**1**	**6,13**	**1**	**79,35**	**141**	**412.422,46**	**22.385,52**	**86.261,18**
			USD 8.90																**USD 8.90**																		
			SGD 0.24																**SGD 0.24**																		
Total Setelah Konversi		**2.004**	**1.159.769,42**	**83**	**34.912,08**	**87**	**34.420,54**	**20**	**34.221,03**	**459**	**131.782,36**	**335**	**168.221,30**	**55**	**49.098,51**	**102**	**62.638,96**	**166**	**34.598,05**	**142**	**41.160,34**	**84**	**21.613,39**	**310**	**103.863,48**	**13**	**29.048,67**	**5**	**1.682,77**	**1**	**6,13**	**1**	**79,35**	**141**	**412.422,46**	**22.385,52**	**86.261,18**

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 2

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan																				Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan
				Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Kontrak tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya		Rekanan Belum Melaksanakan Kewajiban Pemeliharaan Barang Hasil Pengadaan yang Telah Rusak Selama Masa Pemeliharaan		Aset Dikuasai Pihak Lain		Pembelian Aset yang Berstatus Sengketa		Aset Tidak Diketahui Keberadaannya		Pemberian Jaminan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan, Pemanfaatan Barang dan Pemberian Fasilitas Tidak Sesuai Ketentuan		Pihak Ketiga Belum Melaksanakan Kewajiban untuk Menyerahkan Aset kepada Negara/ Daerah		Piutang/Pinjaman atau Dana Bergulir yang Berpotensi Tidak Tertagih		Penghapusan Piutang Tidak Sesuai Ketentuan		Lain-Lain		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	LKKL	71	1.601.231,02	2	80.564,96	3	68.533,13	26	855.043,03	3	16.803,61	19	299.737,28	3	858,38	3	793,20	3	178.440,69	-	-	9	100.456,74	423,61
2	LKPD	354	1.603.922,08	27	11.545,20	23	2.752,26	82	190.519,19	4	2.562,48	87	997.484,96	10	12.331,10	6	33.966,42	89	289.709,50	4	13.265,72	22	49.785,25	505,62
3	LK BUMN dan Badan Lainnya	1	11,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11,67	-
Total		**426**	**3.205.164,77**	**29**	**92.110,16**	**26**	**71.285,39**	**108**	**1.045.562,22**	**7**	**19.366,09**	**106**	**1.297.222,24**	**13**	**13.189,48**	**9**	**34.759,62**	**92**	**468.150,19**	**4**	**13.265,72**	**32**	**150.253,66**	**929,23**

Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Kekurangan Penerimaan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan																		Nilai Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
				Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak Ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah				Penggunaan Langsung Penerimaan Negara/ Daerah		Dana Perimbangan yang Telah Ditetapkan Belum Masuk ke Kas Daerah		Penerimaan Negara/ Daerah Diterima atau Digunakan oleh Instansi yang Tidak Berhak		Pengenaan Tarif Pajak/ PNBP Lebih Rendah dari Ketentuan		Koreksi Perhitungan Bagi Hasil dengan KKKS		Kelebihan Pembayaran Subsidi oleh Pemerintah		Lain-lain		Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan untuk Temuan Denda Keterlambatan Pekerjaan	Penyetoran ke Kas Negara/ Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Dalam Proses Pemeriksaan untuk Temuan Lainnya (Selain Denda Keterlambatan)
				Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak Ditetapkan atau Dipungut/ Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/ Daerah		Penerimaan Negara/ Daerah lainnya (selain Denda Keterlambatan) Belum/Tidak Ditetapkan atau Dipungut/Diterima/ Disetor ke Kas Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah																	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	LKKL	160	318.003,84	75	48.134,29	62	118.755,78	9	148.826,77	-	-	-	-	14	2.287,00	-	-	-	-	-	-	19.139,13	6.501,07
			USD 1,007.83		USD 7.83		USD 1,000.00															USD 7.83	USD 1,000.00
			327.558,07		48.208,52		128.235,78															19.213,36	15.981,07
2	LKPD	945	411.959,22	299	55.103,72	492	241.122,82	114	107.228,65	-	-	2	208,83	24	3.322,92	-	-	2	54,72	12	4.917,56	3.203,01	21.090,52
			SGD 3.57				SGD 3.57																
			411.985,75				241.149,35																
3	LK BUMN dan Badan Lainnya	8	108.700,53	2	3.272,62	6	105.427,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	84.125,70
			USD 128.57		USD 128.57																		
			109.919,37		4.491,46																		
Total		**1.113**	**838.663,59**	**376**	**106.510,63**	**560**	**465.306,51**	**123**	**256.055,42**	**0**	**-**	**2**	**208,83**	**38**	**5.609,92**	**0**	**-**	**2**	**54,72**	**12**	**4.917,56**	**22.345,37**	**111.717,29**
			USD 1,136.40		**USD 136.40**		**USD 1,000.00**															**USD 7.83**	**USD 1,000.00**
			SGD 3.57				**SGD 3.57**																
Total Setelah Konversi		**1.113**	**849.463,19**	**376**	**107.803,70**	**560**	**474.813,04**	**123**	**256.055,42**	**0**	**-**	**2**	**208,83**	**38**	**5.609,92**	**0**	**-**	**2**	**54,72**	**12**	**4.917,56**	**22.419,60**	**121.197,29**

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Halaman 1 - Lampiran 4

Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya Tahun 2006 s.d. 2011

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011
Kementerian/Lembaga							
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Badan Pemeriksa Keuangan	WDP	WTP - DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Mahkamah Agung	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
5	Kejaksaan Republik Indonesia	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
6	Sekretariat Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
7	Kementerian Dalam Negeri	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
8	Kementerian Luar Negeri	TMP	TMP	WDP	TMP	WDP	WTP-DPP
9	Kementerian Pertahanan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	TMP	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
11	Kementerian Keuangan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
12	Kementerian Pertanian	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kementerian Perindustrian	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
15	Kementerian Perhubungan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	TMP	TMP	WDP	WDP	TMP	TMP
17	Kementerian Kesehatan	TMP	TMP	WDP	TMP	TMP	WDP
18	Kementerian Agama	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kementerian Sosial	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
21	Kementerian Kehutanan	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
23	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
28	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Kementerian Riset dan Teknologi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Kementerian Lingkungan Hidup	WDP	TMP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
31	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
32	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Badan Intelijen Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
36	Dewan Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37	Badan Pusat Statistik	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
38	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
39	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
40	Perpustakaan Nasional	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	TMP	TMP	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP
44	Lembaga Ketahanan Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
46	Badan Narkotika Nasional	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
47	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP-DPP
49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
50	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
51	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
52	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Halaman 2 - Lampiran 4

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011
57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
58	Badan Informasi Geospasial	TMP	TMP	WTP	WTP	WDP	WTP
59	Badan Standarisasi Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP
61	Lembaga Administrasi Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	Badan Kepegawaian Negara	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
65	Kementerian Perdagangan	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
66	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP - DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
69	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Komisi Yudisial	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana		TMP	TMP	TMP	WDP	WTP
72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia			WTP	WTP	WTP	WTP
73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo			WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					WTP	WTP
75	Badan SAR Nasional					WDP	WTP-DPP
76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha					WTP	WDP
77	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura						WDP
78	Ombudsman RI						WTP
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan						TMP
80	APP 61 (Pembayaran Bunga Utang)	TMP	WTP	WTP	*	*	*
81	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	TMP	TMP	WTP-DPP	*	*	*
82	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	TMP	TMP	TMP	*	*	*
83	APP 70 (Dana Perimbangan)	WDP	TMP	WDP	*	*	*
84	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	WTP	TMP	WTP	*	*	*
85	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	TMP	TMP	WTP-DPP	*	*	*
86	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	TMP	WTP	WTP	*	*	*
87	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	TMP	TMP	TMP	*	*	*
88	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	WTP	WTP	WDP	*	*	*
89	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	**	**	**	WTP	WTP	WTP
90	BA 999.02 - Hibah	**	**	TMP	WDP	WDP	WDP
91	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	**	**	**	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP
92	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	**	**	**	TMP	WDP	WTP
93	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	**	**	**	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
94	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	**	**	**	WDP	*	*
95	BA 999.07 - Belanja Subsidi	**	**	**	**	WDP	WTP
96	BA 999.08 - Belanja Lain-lain	**	**	**	**	WDP	WTP-DPP
97	Bendahara Umum Negara			***	***	WDP	WDP
98	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias	TMP	WTP	WDP	****	****	****
Badan Lainnya							
99	Lembaga Penjamin Simpanan		WTP	WTP	TMP	TMP	TMP
100	Bank Indonesia		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
101	Pusat Investasi Pemerintah			WTP	WTP	WTP	******
102	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara			Satker Kemenkeu	WDP	WTP	******
103	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH)			TMP	TMP	TMP	WDP
104	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada Project Management Office Asian Development Bank Earthquake And Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Di Jakarta					WTP	
105	Laporan Keuangan Loan ADB 2575-INO Pada Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project 2 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum					WTP	WTP
106	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2008			WTP	*****	*****	

Halaman 3 - Lampiran 4

No.	Entitas Kementerian/Lembaga dan Badan Lainnya	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011
107	Laporan Keuangan Loan ADB No. 2654-INO Pada *Metropolitan Sanitation Management And Health Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011						WTP
108	PT. Jamsostek (Persero)						WTP-DPP

Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
* : Perubahan nomor BA
** : BA baru
*** : Tidak diberikan opini
**** : Dibubarkan Tahun 2009
***** : Belum diperiksa
****** : Tidak diperiksa
BPK diperiksa oleh KAP sehingga tidak dihitung dalam penjumlahan opini

Lampiran 5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**250**	**40,59**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	135	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	86	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	17	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	11	
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**	**211**	**34,25**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	70	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	32	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	48	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	6	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	44	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	10	
7	Lain-lain	1	
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**155**	**25,16**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	90	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	45	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	10	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	9	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**616**	**100**

Halaman 1 - Lampiran 6

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Negara**	**387**	**36,10**	**269.090,63**	**8,74**
				USD 8.90	
				SGD 0.24	
	Jumlah Rupiah			**269.176,78**	
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	24		9.278,46	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	15		7.641,80	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	6		3.459,46	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	74		37.404,47	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	104		114.886,77	
6	Pemahalan harga (Mark up)	17		27.775,85	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2		101,29	
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	39		11.103,17	
				USD 8.90	
				SGD 0.24	
	Jumlah Rupiah			11.189,32	
9	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	24		10.642,56	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	24		10.123,41	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	41		26.716,03	
12	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	4		1.656,57	
13	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	1		6,13	
14	Lain-lain	12		8.294,66	
II	**Potensi Kerugian Negara**	**71**	**6,62**	**1.601.231,02**	**51,98**
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2		80.564,96	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	3		68.533,13	
3	Aset dikuasai pihak lain	26		855.043,03	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	3		16.803,61	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	19		299.737,28	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	3		858,38	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	3		793,20	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3		178.440,69	
9	Lain-lain	9		100.456,74	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**160**	**14,93**	**318.003,84**	**10,63**
				USD 1,007.83	
	Jumlah Rupiah			**327.558,07**	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	75		48.134,29	
				USD 7.83	
	Jumlah Rupiah			48.208,52	

Halaman 2 - Lampiran 6

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	62		118.755,78	
				USD 1,000.00	
	Jumlah Rupiah			128.235,78	
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	9		148.826,77	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	14		2.287,00	
IV	**Administrasi**	**359**	**33,49**	**-**	**-**
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	20			
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	74			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	27			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	9			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	2			
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	109			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	27			
9	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	27			
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	11			
11	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara	10			
12	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	38			
13	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1			
14	Lain-lain	1			
V	**Ketidakhematan**	**40**	**3,73**	**95.181,00**	**3,09**
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	40		95.181,00	
VI	**Ketidakefektifan**	**55**	**5,13**	**787.327,13**	**25,56**
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		3.968,74	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	5		11.411,67	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	36		419.792,80	
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	7		352.153,92	
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		**1.072**	**100**	**3.070.833,62** **USD 1,016.73** **SGD 0.24**	**100**
Jumlah Rupiah				**3.080.474,00**	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Halaman 1 - Lampiran 7

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	1	-	-	2	29,01	1	9,76	-	-	1	19,25	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dewan Perwakilan Rakyat	4	-	3	1	29	4.311,29	18	2.850,90	-	-	5	495,49	4	2	964,90	-	-	7,85	-	0,90
3	Mahkamah Agung	17	9	5	3	19	1.950,66	4	717,05	-	-	3	516,19	9	1	303,34	2	414,08	-	-	-
4	Kejaksaan Republik Indonesia	27	15	4	8	12	2.560,41	2	701,98	1	-	2	102,49	5	2	1.755,94	-	-	-	-	85,23
5	Sekretariat Negara	9	2	7	-	11	8.679,07	2	99,98	2	1.439,17	-	-	4	3	7.139,92	-	-	-	-	-
6	Kementerian Dalam Negeri	8	3	3	2	24	93.704,23	12	5.325,70	1	71.795,21	2	2.083,87	7	1	266,68	1	14.232,77	356,64	-	-
7	Kementerian Luar Negeri	11	4	3	4	9	674,27	2	61,15	1	-	3	183,99	2	1	429,13	-	-	26,45	-	94,07
8	Kementerian Pertahanan	9	3	3	3	11	89.578,88	-	-	1	83.420,45	4	6.158,43	6	-	-	-	-	-	-	155,58
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	13	5	2	6	15	262.551,96	6	7.065,19	1	-	3	8.517,18	4	-	-	1	246.969,59	6.001,23	-	6.202,45
10	Kementerian Keuangan	18	6	7	5	24	7.045,42	5	2.162,65	2	579,00	3	3.223,88	12	-	-	2	1.079,89	-	-	649,47
							USD 0.24		USD 0.24												
11	Kementerian Pertanian	21	9	8	4	20	284.654,71	5	1.136,38	3	283.173,58	3	344,75	9	-	-	-	-	16,19	-	103,05
12	Kementerian Perindustrian	5	2	-	3	10	374,97	6	360,80	-	-	2	14,17	1	-	-	1	-	307,16	-	14,17
13	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4	3	-	1	9	3.414,58	4	2.470,33	1	-	2	944,25	2	-	-	-	-	2.470,33	-	944,25
							USD 1,000.00						USD 1,000.00								USD 1,000.00
14	Kementerian Perhubungan	11	6	3	2	15	396.697,14	2	1.215,59	5	118.651,00	2	50.447,01	4	-	-	2	226.383,54	-	-	-
15	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	27	14	10	3	36	89.092,39	13	8.717,55	5	17.039,63	8	41.178,93	7	2	1.288,39	1	20.867,89	640,02	-	336,95
16	Kementerian Kesehatan	14	5	8	1	24	227.766,31	7	91.707,95	3	80.623,62	3	13.458,98	9	1	2.882,05	1	39.093,71	1.362,99	-	733,92
17	Kementerian Agama	22	7	9	6	64	38.955,92	23	5.158,17	3	1.467,08	7	7.686,53	22	5	20.578,72	4	4.065,42	511,95	-	2.712,86
18	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	4	6	2	41	31.168,33	16	16.454,38	6	3.634,57	4	256,61	12	-	-	3	10.822,77	510,85	159,46	86,03
19	Kementerian Sosial	11	-	9	2	25	36.394,30	5	1.514,16	1	42,90	7	1.490,23	9	1	459,93	2	32.887,08	12,49	-	25,22
20	Kementerian Kehutanan	15	4	7	4	22	7.882,25	11	6.562,27	1	56,60	2	665,47	7	1	597,91	-	-	4.112,82	-	400,65

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7	3	2	2	14	16.087,91	4	5.372,70	4	7.254,55	2	3.460,66	4	-	-	-	-	483,66	-	1.729,73
22	Kementerian Pekerjaan Umum	14	11	1	2	18	804.697,21	4	9.455,83	5	741.745,08	2	1.602,49	6	1	51.893,81	-	-	2.214,18	-	777,26
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	6	2	1	3	6	892,38	3	330,27	-	-	2	562,11	1	-	-	-	-	169,05	-	562,11
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	-	1	1	4	933,71	1	126,00	-	-	1	37,19	1	1	770,52	-	-	-	-	-
25	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	6	4	2	-	13	659,97	5	531,86	-	-	2	106,82	5	-	-	1	21,29	-	-	-
							USD 0.05		USD 0.05												
26	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8	4	3	1	51	17.729,52	21	13.990,04	-	-	13	3.707,18	16	-	-	1	32,30	-	-	-
27	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	10	3	4	3	3	96,57	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	96,57	-	-	-
28	Kementerian Riset dan Teknologi	9	2	4	3	20	711,89	8	308,90	-	-	-	-	9	2	50,99	1	352,00	9,26	-	-
29	Kementerian Lingkungan Hidup	2	-	1	1	14	4.239,36	5	216,67	-	-	2	129,69	6	-	-	1	3.893,00	26,73	-	108,09
30	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	1	-	3	10	869,60	7	833,15	1	36,45	-	-	1	-	-	1	-	833,15	36,45	-
31	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	4	1	-	6	134,52	3	118,17	-	-	1	6,13	1	1	10,22	-	-	1,85	-	-
32	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	5	2	2	1	4	1.036,02	2	85,93	-	-	-	-	1	1	950,09	-	-	85,93	-	-
33	Badan Intelijen Negara	4	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
34	Lembaga Sandi Negara	3	-	1	2	7	2.673,16	4	1.101,89	-	-	1	1.571,27	2	-	-	-	-	1.101,89	-	1.571,27
35	Dewan Ketahanan Nasional	3	-	2	1	7	29,18	-	-	-	-	1	5,18	4	-	-	2	24,00	-	-	-
36	Badan Pusat Statistik	4	-	3	1	14	1.711,20	5	103,76	1	109,12	2	1.498,32	6	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	3	1	2	-	9	1.348,69	1	5,80	2	372,36	1	7,06	4	-	-	1	963,47	-	-	7,06
38	Badan Pertanahan Nasional	6	5	1	-	8	2.176,01	3	333,91	1	708,30	2	1.133,80	2	-	-	-	-	327,78	-	6,77
39	Perpustakaan Nasional	3	1	1	1	3	112,84	2	82,81	-	-	-	-	-	1	30,03	-	-	82,81	-	-

Halaman 3 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
40	Kementerian Komunikasi dan Informatika	17	9	2	6	24	74.822,98	9	11.695,03	-	-	6	63.107,95	7	1	20,00	1	-	871,37	-	87,41
							USD 7.12		USD 7.12												
							SGD 0.24		SGD 0.24												
41	Kepolisian Negara Republik Indonesia	20	8	6	6	25	102.904,00	15	15.015,99	-	-	6	87.444,38	3	1	443,63	-	-	6.277,04	-	4.221,65
							USD 7.83						USD 7.83								USD 7.83
42	Badan Pengawas Obat dan Makanan	6	2	3	1	15	1.667,48	10	1.090,92	-	-	1	576,56	4	-	-	-	-	406,70	-	-
43	Lembaga Ketahanan Nasional	2	-	2	-	5	4.695,75	2	165,69	-	-	-	-	1	-	-	2	4.530,06	-	-	-
44	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	-	1	-	2	79,62	-	-	1	79,62	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Narkotika Nasional	12	3	5	4	10	3.514,78	7	2.265,64	-	-	1	1.249,14	2	-	-	-	-	2.274,30	-	1.249,14
							USD 0.95		USD 0.95												
46	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	3	2	1	-	23	9.791,93	12	7.977,48	2	255,99	2	1.078,31	6	-	-	1	480,15	6.631,69	227,70	478,70
47	Badan Koordinasi Kependudukan Berencana Nasional	11	9	2	-	21	10.244,89	8	343,95	3	9.649,66	3	251,28	7	-	-	-	-	11,03	-	78,31
48	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	6	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
49	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	5	1	2	2	4	490,43	3	146,53	-	-	1	343,90	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Komisi Pemilihan Umum	10	5	2	3	6	1.134,84	2	146,71	2	988,13	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
51	Mahkamah Konstitusi	3	-	3	-	8	230,64	3	50,50	-	-	2	123,17	2	1	56,97	-	-	7,60	-	34,17
52	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1	-	-	3	235,47	-	-	-	-	-	-	2	1	235,47	-	-	-	-	-
53	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	5	-	3	2	9	449,89	4	251,01	-	-	2	198,88	3	-	-	-	-	16,62	-	104,17
54	Badan Tenaga Nuklir Nasional	6	4	1	1	12	2.448,78	4	894,51	-	-	1	0,52	6	-	-	1	1.553,75	3,42	-	0,52
55	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	8	2	4	2	15	1.140,29	4	89,43	1	55,92	2	892,58	6	1	102,36	1	-	-	-	-
56	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2	1	1	-	12	20.615,52	6	1.449,45	-	-	2	482,57	3	-	-	1	18.683,50	-	-	-
57	Badan Informasi Geospasial	3	2	1	-	11	3.031,48	5	2.757,71	-	-	2	101,29	1	2	116,24	1	56,24	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
58	Badan Standardisasi Nasional	2	-	-	2	4	238,46	2	238,46	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
59	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	6	2	1	3	8	304,09	2	70,64	-	-	2	33,39	3	-	-	1	200,06	-	-	-
60	Lembaga Administrasi Negara	5	3	1	1	7	1.817,53	4	1.808,93	-	-	1	8,60	2	-	-	-	-	269,73	-	-
							USD 0.52		USD 0.52												
61	Arsip Nasional Republik Indonesia	3	1	2	-	8	86,86	2	80,06	-	-	2	6,80	4	-	-	-	-	80,06	-	6,58
62	Badan Kepegawaian Negara	5	2	-	3	13	2.098,47	1	77,04	1	1.641,96	2	379,47	7	-	-	2	-	-	-	54,27
63	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4	-	3	1	10	36,65	1	23,32	1	-	1	13,33	7	-	-	-	-	23,32	-	13,48
64	Kementerian Perdagangan	7	3	3	1	18	1.016,05	10	875,80	1	4,19	1	5,81	5	-	-	1	130,25	393,00	-	5,81
65	Kementerian Perumahan Rakyat	2	-	2	-	13	10.044,15	9	10.030,22	-	-	1	13,93	3	-	-	-	-	-	-	-
66	Kementerian Pemuda dan Olahraga	8	3	4	1	33	17.873,16	10	9.692,78	-	-	7	3.972,66	14	1	313,65	1	3.894,07	-	-	1,09
67	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Dewan Perwakilan Daerah	-	-	-	-	5	126,40	2	87,35	-	-	3	39,05	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Komisi Yudisial	1	1	-	-	4	55,28	2	55,28	-	-	-	-	2	-	-	-	-	55,28	-	-
70	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	3	1	-	12	146.692,81	3	471,77	-	-	1	0,05	3	2	1.620,11	3	144.600,88	-	-	-
71	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	5	2	2	1	20	3.606,88	5	819,16	2	1.954,55	2	250,77	9	-	-	2	582,40	-	-	-
72	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	3	1	1	1	4	17,99	-	-	1	17,99	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
73	Badan SAR Nasional	9	5	2	2	9	14.797,91	1	56,45	1	3.682,96	1	1.062,48	4	1	1.875,51	1	8.120,51	56,45	-	-
74	Bendahara Umum Negara (BUN)	13	7	3	3	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
75	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	BA 999.02 - Penerimaan Hibah	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	5	-	3	2	2	1.912,97	-	-	-	-	1	1.912,97	1	-	-	-	-	-	-	-
78	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	7	4	1	2	2	169.451,92	-	-	1	169.451,92	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
79	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	8	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	BA 999.07 - Belanja Subsidi	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	BA 999.08 - Belanja Lainnya	1	-	1	-	2	72,24	2	72,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,43	-	-
82	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	-	1	4	5	63,80	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	63,80	-	-	-
83	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2	-	-	2	7	1.073,18	-	-	1	1.058,38	2	14,80	4	-	-	-	-	-	-	-
84	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	9	4	4	1	22	16.140,99	8	11.447,14	-	-	2	2.787,34	8	-	-	4	1.906,51	639,91	-	1.990,01
85	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
86	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)	4	3	-	1	18	2.180,44	7	1.553,56	1	241,00	2	35,96	5	2	24,41	1	325,51	87,91	-	7,64
Total		**616**	**250**	**211**	**155**	**1.072**	**3.070.832,84**	**387**	**269.090,68**	**71**	**1.601.231,05**	**160**	**318.003,85**	**359**	**40**	**95.181,00**	**55**	**787.327,15**	**39.793,33**	**423,61**	**25.640,20**
							USD 1,016.71		**USD 8.88**				**USD 1,007.83**								**USD 1,007.83**
							SGD 0.24		**SGD 0.24**												
		Jumlah Rupiah					**3.080.473,03**		**269.176,64**		**1.601.231,05**		**327.558,08**			**95.181,00**		**787.327,15**	**39.793,33**	**423,61**	**35.194,43**

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs nilai tengah BI per 29 Juni 2012

Halaman 1 - Lampiran 8

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006 s.d. 2011

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
1	Prov. Aceh														
	LKPD			22		22		24		24		24		19	
	1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP		
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	18	18	Kab. Pidie Jaya					1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW		
	20	20	Kota Banda Aceh	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	23	23	Kota Sabang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	24	24	Kota Subulussalam					1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	Prov. Sumatera Utara														
	LKPD			26		27		27		29		34		24	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	27	Kab. Batubara			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	4	28	Kab. Dairi	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan									1	WDP	1	WDP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara									1	TMP	1	TMP
	11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	14	38	Kab. Nias Barat									1	TMP		
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	16	40	Kab. Nias Utara									1	TMP		
	17	41	Kab. Padang Lawas							1	TMP	1	TMP		
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara							1	TMP	1	TMP		
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	51	Kota Binjai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	28	52	Kota Gunung Sitoli									1	WDP		
	29	53	Kota Medan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

Halaman 2 - Lampiran 8

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	32	56	Kota Sibolga	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	**Prov. Sumatera Barat**														
	LKPD			**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		**19**	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	65	Kab. Pasaman	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	**Prov. Riau**														
	LKPD			**12**		**12**		**12**		**12**		**13**		**11**	
	1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti									1	WDP		
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	**Prov. Jambi**														
	LKPD			**11**		**11**		**11**		**12**		**12**		**11**	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh							1	WTP	1	WDP	1	WDP
6	**Prov. Sumatera Selatan**														
	LKPD			**15**		**15**		**16**		**16**		**16**		**16**	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	3	106	kab. Empat Lawang					1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	118	Kota Palembang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	**Prov. Bengkulu**														
	LKPD			**10**		**10**		**10**		**11**		**11**		**11**	
	1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	122	Kab. Bengkulu Tengah							1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	124	Kab. Kaur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	125	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	126	Kab. Lebong	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	127	Kab. Mukomuko	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	129	Kab. Seluma	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
8	**Prov. Lampung**														
	LKPD			**11**		**11**		**11**		**12**		**15**		**15**	
	1	131	Prov. Lampung	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	4	134	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	135	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	137	Kab. Mesuji									1	WDP	1	TMP
	8	138	Kab. Pesawaran							1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	139	Kab. Pringsewu									1	TMP	1	WDP
	10	140	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	141	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	142	Kab. Tulang Bawang Barat									1	WDP	1	WTP
	13	143	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	144	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	15	145	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
9	**Prov. Kepulauan Bangka Belitung**														
	LKPD			**8**		**8**		**8**		**8**		**8**		**8**	
	1	146	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	147	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	148	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	149	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	150	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	151	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	152	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	153	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	**Prov. Kepulauan Riau**														
	LKPD			**7**		**7**		**7**		**8**		**8**		**8**	
	1	154	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	155	Kab. Bintan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

Halaman 4 - Lampiran 8

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	3	156	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	157	Kab. Kepulauan Anambas							1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	158	Kab. Lingga	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	159	Kab. Natuna	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	160	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	161	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	**Prov. DKI Jakarta**														
	LKPD			**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**	
	1	162	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
12	**Prov. Jawa Barat**														
	LKPD			**26**		**26**		**27**		**27**		**27**		**27**	
	1	163	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	164	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	165	Kab. Bandung Barat					1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	166	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	167	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	168	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	169	Kab. Cianjur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	170	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	171	Kab. Garut	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	172	Kab. Indramayu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	173	Kab. Karawang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	174	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	175	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	176	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	177	Kab. Subang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	178	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	179	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	180	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	181	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	20	182	Kota Banjar	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	183	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	22	184	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	185	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	186	Kota Cirebon	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	187	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	26	188	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	189	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	**Prov. Jawa Tengah**														
	LKPD			**36**		**36**		**36**		**36**		**36**		**36**	
	1	190	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	191	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	192	Kab. Banyumas	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	193	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	194	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	195	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	196	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	197	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	198	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	10	199	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	200	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	201	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	202	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	203	Kab. Kendal	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	204	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	205	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	206	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	207	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	208	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	20	209	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	210	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	211	Kab. Purworejo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	212	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	213	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	25	214	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	215	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	216	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	217	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	218	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	219	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	220	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	221	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	33	222	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	223	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	224	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	36	225	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
14	**Prov. D.I. Yogyakarta**														
	LKPD			**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		**6**	
	1	226	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	2	227	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	228	Kab. Gunung Kidul	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	229	Kab. Kulon Progo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	230	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	231	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
15	**Prov. Jawa Timur**														
	LKPD			**39**		**39**		**39**		**39**		**39**		**39**	
	1	232	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	2	233	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	234	Kab. Banyuwangi	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	235	Kab. Blitar	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	236	Kab. Bojonegoro	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	237	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	238	Kab. Gresik	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	239	Kab. Jember	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	240	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	241	Kab. Kediri	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	242	Kab. Lamongan	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	243	Kab. Lumajang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	244	Kab. Madiun	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	245	Kab. Magetan	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	246	Kab. Malang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	247	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	17	248	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	249	Kab. Ngawi	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	250	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	20	251	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	21	252	Kab. Pasuruan	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	253	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	254	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	255	Kab. Sampang	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	256	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	26	257	Kab. Situbondo	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	258	Kab. Sumenep	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	259	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	260	Kab. Tuban	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	30	261	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	31	262	Kota Batu	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	32	263	Kota Blitar	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	33	264	Kota Kediri	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 6 - Lampiran 8

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	34	265	Kota Madiun	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	35	266	Kota Malang	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	36	267	Kota Mojokerto	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
	37	268	Kota Pasuruan	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	38	269	Kota Probolinggo	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	39	270	Kota Surabaya	1	WTP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
16	**Prov. Banten**														
	LKPD			**7**		**7**		**8**		**9**		**9**		**9**	
	1	271	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	272	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	273	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	274	Kab. Serang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	5	275	Kab. Tangerang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	276	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	277	Kota Serang					1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	278	Kota Tangerang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	279	Kota Tangerang Selatan							1	WDP	1	WTP	1	WTP
17	**Prov. Bali**														
	LKPD			**10**		**10**		**10**		**10**		**10**		**10**	
	1	280	Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	281	Kab. Badung	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	282	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	283	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	5	284	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	285	Kab. Jembrana	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
	7	286	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	287	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	288	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	289	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	**Prov. Nusa Tenggara Barat**														
	LKPD			**10**		**10**		**10**		**11**		**11**		**10**	
	1	290	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WTP
	2	291	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	3	292	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	293	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	294	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	295	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	296	Kab. Lombok Utara							1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	297	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	298	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	299	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	300	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	**Prov. Nusa Tenggara Timur**														
	LKPD			**17**		**17**		**20**		**21**		**22**		**9**	
	1	301	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	302	Kab. Alor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	303	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	304	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	5	305	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	306	Kab. Kupang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	7	307	Kab. Lembata	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	8	308	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP		
	9	309	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	10	310	Kab. Manggarai Timur							1	TMP	1	TMP		
	11	311	Kab. Nagekeo					1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	12	312	Kab. Ngada	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	13	313	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	14	314	Kab. Sabu Raijua									1	WDP		

Halaman 7 - Lampiran 8

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	15	315	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	16	316	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	17	317	Kab. Sumba Barat Daya					1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	18	318	Kab. Sumba Tengah					1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	19	319	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	20	320	Kab. Timor Tengah Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	21	321	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	22	322	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	**Prov. Kalimantan Barat**														
	LKPD			**13**		**13**		**14**		**15**		**15**		**15**	
	1	323	Prov. Kalimantan Barat	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	324	Kab. Bengkayang	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	325	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	326	Kab. Kayong Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	327	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	328	Kab. Kubu Raya							1	TW	1	TW	1	WDP
	7	329	Kab. Landak	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	330	Kab. Melawi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW
	9	331	Kab. Pontianak	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	332	Kab. Sambas	1	WTP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	333	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	334	Kab. Sekadau	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	13	335	Kab. Sintang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	336	Kota Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	15	337	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
21	**Prov. Kalimantan Tengah**														
	LKPD			**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		**9**	
	1	338	Prov. Kalimantan Tengah	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP		
	2	339	Kab. Barito Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP
	3	340	Kab. Barito Timur	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP		
	4	341	Kab. Barito Utara	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP		
	5	342	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	6	343	Kab. Kapuas	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	344	Kab. Katingan	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
	8	345	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	9	346	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
	10	347	Kab. Lamandau	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	348	Kab. Murung Raya	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
	12	349	Kab. Pulang Pisau	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW
	13	350	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	14	351	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP		
	15	352	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
22	**Prov. Kalimantan Selatan**														
	LKPD			**14**		**14**		**14**		**14**		**14**		**10**	
	1	353	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	354	Kab. Balangan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	355	Kab. Banjar	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW		
	4	356	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	5	357	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	358	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	359	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	360	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	9	361	Kab. Tabalong	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	10	362	Kab. Tanah Bumbu	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	363	Kab. Tanah Laut	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	364	Kab. Tapin	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	365	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
	14	366	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

Halaman 8 - Lampiran 8

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
23	Prov. Kalimantan Timur														
	LKPD			14		14		14		15		15		8	
	1	367	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP		
	2	368	Kab. Berau	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	3	369	Kab. Bulungan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW		
	4	370	Kab. Kutai Barat	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
	5	371	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	6	372	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW		
	7	373	Kab. Malinau	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	TW		
	8	374	Kab. Nunukan	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	9	375	Kab. Paser	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP
	10	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	11	377	Kab. Tana Tidung							1	TMP	1	TMP		
	12	378	Kota Balikpapan	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	379	Kota Bontang	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	380	Kota Samarinda	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP		
	15	381	Kota Tarakan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	Prov. Sulawesi Utara														
	LKPD			10		10		14		16		16		13	
	1	382	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	2	383	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
	3	384	Kab. Bolaang Mongondow Selatan							1	WDP	1	TMP	1	TMP
	4	385	Kab. Bolaang Mongondow Timur							1	WDP	1	TMP	1	TMP
	5	386	Kab. Bolaang Mongondow Utara					1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
	6	387	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP
	7	388	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro					1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	8	389	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP
	9	390	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	391	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
	11	392	Kab. Minahasa Tenggara					1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	12	393	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
	13	394	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	14	395	Kota Kotamobagu					1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW
	15	396	Kota Manado	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TMP		
	16	397	Kota Tomohon	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
25	Prov. Sulawesi Tengah														
	LKPD			11		11		11		12		12		12	
	1	398	Prov. Sulawesi Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	399	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	400	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	4	401	Kab. Buol	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	402	Kab. Donggala	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	403	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	404	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	405	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	406	Kab. Sigi							1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	10	407	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	408	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	12	409	Kota Palu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
26	Prov. Sulawesi Selatan														
	LKPD			24		24		24		25		25		23	
	1	410	Prov. Sulawesi Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	411	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	412	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	413	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	414	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	415	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	416	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	417	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	9	418	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	10	419	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	420	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	421	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	13	422	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	14	423	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	424	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	425	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	426	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	427	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	428	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP		
	20	429	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	21	430	Kab. Toraja Utara							1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	431	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	432	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	433	Kota Palopo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	25	434	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
27	**Prov. Sulawesi Tenggara**														
	LKPD			**11**		**11**		**13**		**13**		**13**		**12**	
	1	435	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	436	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	3	437	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	4	438	Kab. Buton Utara					1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	439	Kab. Kolaka	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	6	440	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	441	Kab. Konawe	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	442	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	443	Kab. Konawe Utara					1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	10	444	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	445	Kab. Wakatobi	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	12	446	Kota Bau-Bau	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	13	447	Kota Kendari	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	**Prov. Gorontalo**														
	LKPD			**6**		**7**		**7**		**7**		**7**		**7**	
	1	448	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	449	Kab. Boalemo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	450	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	451	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	452	Kab. Gorontalo Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	453	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	454	Kota Gorontalo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	**Prov. Sulawesi Barat**														
	LKPD			**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		**4**	
	1	455	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	456	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	457	Kab. Mamasa	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP		
	4	458	Kab. Mamuju	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	459	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	460	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP		
30	**Prov. Maluku**														
	LKPD			**9**		**9**		**9**		**12**		**12**		**1**	
	1	461	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	2	462	Kab. Buru	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	3	463	Kab. Buru Selatan							1	TMP	1	TMP*		
	4	464	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*		
	5	465	Kab. Maluku Barat Daya							1	TMP	1	TMP		
	6	466	Kab. Maluku Tengah	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	7	467	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	8	468	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	9	469	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	10	470	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	11	471	Kota Ambon	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	12	472	Kota Tual							1	TMP	1	TMP		
31	**Prov. Maluku Utara**														
	LKPD			**9**		**9**		**9**		**9**		**10**		**6**	
	1	473	Prov. Maluku Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	2	474	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	3	475	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP
	4	476	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	5	477	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP		
	6	478	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	7	479	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP		
	8	480	Kab. Pulau Morotai									1	TMP		
	9	481	Kota Ternate	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	TMP		
	10	482	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	**Prov. Papua**														
	LKPD			**18**		**21**		**22**		**23**		**26**		**12**	
	1	483	Prov. Papua	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	2	484	Kab. Asmat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	485	Kab. Biak Numfor	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	4	486	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	5	487	Kab. Deiyai										**		
	6	488	Kab. Dogiyai					1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	7	489	Kab. Intan Jaya										**		
	8	490	Kab. Jayapura	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	491	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	10	492	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	11	493	Kab. Kepulauan Yapen			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	12	494	Kab. Lanny Jaya									1	TMP		
	13	495	Kab. Mamberamo Raya							1	TMP	1	TMP*		
	14	496	Kab. Mamberamo Tengah										**		
	15	497	Kab. Mappi			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	498	Kab. Merauke	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	17	499	Kab. Mimika	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	500	Kab. Nabire	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	19	501	Kab. Nduga									1	TMP		
	20	502	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	21	503	Kab. Pegunungan Bintang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW
	22	504	Kab. Puncak										**		
	23	505	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	24	506	Kab. Sarmi	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	25	507	Kab. Supiori	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	26	508	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	27	509	Kab. Waropen			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*		
	28	510	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	29	511	Kab. Yalimo									1	TMP		
	30	512	Kota Jayapura	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
33	**Prov. Papua Barat**														
	LKPD			**9**		**10**		**10**		**10**		**12**		**5**	
	1	513	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	2	514	Kab. Fakfak	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP		
	3	515	Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	4	516	Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP		
	5	517	Kab. Maybrat									1	TMP		

Halaman 11 - Lampiran 8

No.			Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006		Opini Tahun 2007		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011	
	6	518	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	7	519	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	8	520	Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	521	Kab. Tambrauw									1	TMP		
	10	522	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	11	523	Kab. Teluk Wondama			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		
	12	524	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
			Jumlah	**463**		**469**		**485**		**504**		**520**		**426**	

Keterangan
WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified Opinion)
TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer of opinion)
* : LKPD Tahun 2010 untuk Kab. Buru Selatan, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Waropen yang baru diperiksa pada Semester I Tahun 2012
** : Daerah pemekaran baru (belum wajib menyusun dan melaporkan LKPD)

Lampiran 9

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**1.791**	**41,00**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1.005	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	603	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	13	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	147	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	23	
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**	**1.739**	**39,80**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	577	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	249	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	494	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	97	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	237	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	80	
7	Lain-lain	5	
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**839**	**19,20**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	509	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	247	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	55	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	25	
6	Lain-Lain	2	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**4.369**	**100**

Halaman 1 - Lampiran 10

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Daerah**	**1.609**	**27,86**	**865.376,78**	**22,87**
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	59		25.633,62	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	72		26.778,74	
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	13		6.505,44	
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	384		94.270,67	
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	228		53.032,68	
6	Pemahalan harga (Mark up)	38		21.322,66	
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	100		62.537,67	
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	127		23.408,73	
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	118		30.517,78	
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	59		11.489,98	
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	268		76.701,52	
12	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	13		29.048,67	
13	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1		26,20	
14	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1		79,35	
15	Lain-lain	128		404.023,07	
II	**Potensi Kerugian Daerah**	**354**	**6,13**	**1.603.922,08**	**42,39**
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	27		11.545,20	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	23		2.752,26	
3	Aset dikuasai pihak lain	82		190.519,19	
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	4		2.562,48	
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	87		997.484,96	
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	10		12.331,10	
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	6		33.966,42	
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	89		289.709,50	
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	4		13.265,72	
10	Lain-lain	22		49.785,25	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**945**	**16,36**	**411.959,22**	
				SGD 3.57	
				411.985,75	**10,89**
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	299		55.103,72	

Halaman 2 - Lampiran 10

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik daerah	492		241.122,82	
				SGD 3.57	
	Jumlah Rupiah			241.149,35	
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	114		107.228,65	
4	Penerimaan Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	2		208,83	
5	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	24		3.322,92	
6	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2		54,72	
7	Lain-lain	12		4.917,56	
IV	**Administrasi**	**2.318**	**40,13**		
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	74			
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	621			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	15			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	94			
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	13			
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	7			
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/ Perusahaan	439			
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	258			
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1			
10	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	220			
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	132			
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	128			
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	80			
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	196			
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	16			
16	Lain-lain	24			
V	**Ketidakhematan**	**231**	**4,00**	**183.959,04**	**4,86**
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	4		1.511,08	
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	3		954,18	
3	Pemborosan keuangan daerah/ perusahaan atau kemahalan harga	224		181.493,78	

Halaman 3 - Lampiran 10

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
VI	**Ketidakefisienan**	**2**	**0,03**	**537,50**	**0,01**
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	2		537,50	
VII	**Ketidakefektifan**	**317**	**5,49**	**718.080,27**	**18,98**
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	185		383.332,93	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	9		5.061,43	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	56		189.317,34	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	7		11.679,27	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	36		102.059,36	
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	13		1.547,14	
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	11		25.082,80	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		**5.776**	**100**	**3.783.834,89**	**100**
				SGD 3.57	
Jumlah Rupiah				**3.783.861,42**	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011

(nila dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**Prov. Aceh**		**199**	**67**	**92**	**40**	**202**	**71.362,39**	**50**	**19.026,64**	**13**	**32.982,17**	**38**	**7.004,69**	**87**	**5**	**862,29**	**-**	**-**	**9**	**11.486,60**	**381,06**	**-**	**1.453,38**
							-	**SGD 3.57**	-	-	-	-	-	**SGD 3.57**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	Kab. Aceh Barat	13	3	8	2	10	4.852,37	1	3.715,18	1	226,02	4	911,17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Kab. Aceh Besar	10	4	3	3	19	10.634,97	3	152,15	1	9.161,32	3	673,93	10	1	343,07	-	-	1	304,50	-	-	-
3	3	Kab. Aceh Jaya	6	1	2	3	14	2.010,45	4	1.205,94	-	-	5	513,65	4	1	290,86	-	-	-	-	-	-	-
4	4	Kab. Aceh Selatan	13	7	4	2	5	58,01	-	-	-	-	2	58,01	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	Kab. Aceh Singkil	11	4	5	2	8	235,40	1	81,02	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	154,38	81,02	-	-
6	6	Kab. Aceh Tamiang	20	7	5	8	10	2.200,02	4	2.200,02	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	7	Kab. Aceh Tengah	9	3	6	-	19	2.333,82	7	659,30	-	-	3	1.674,52	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	Kab. Aceh Tenggara	18	6	9	3	22	8.731,80	5	4.926,20	1	1.418,05	5	657,00	8	2	196,48	-	-	1	1.534,07	-	-	-
9	9	Kab. Aceh Timur	8	2	5	1	7	632,99	1	632,99	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	10	Kab. Aceh Utara	7	2	4	1	7	16.721,01	1	204,75	2	10.948,66	-	-	3	-	-	-	-	1	5.567,60	-	-	-
11	11	Kab. Bener Meriah	7	4	1	2	11	683,63	1	101,21	3	573,82	2	8,60	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	Kab. Gayo Lues	8	3	4	1	7	2.925,39	6	1.541,80	-	-	1	1.383,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.383,59
13	13	Kab. Nagan Raya	4	-	4	-	9	4.027,08	3	77,62	-	-	2	23,41	3	-	-	-	-	1	3.926,05	-	-	-
14	14	Kab. Pidie Jaya	18	5	10	3	9	1.020,49	3	184,50	1	776,99	1	59,00	4	-	-	-	-	-	-	38,05	-	-
15	15	Kota Banda Aceh	7	1	5	1	7	41,85	2	34,70	-	-	1	7,15	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
16	16	Kota Langsa	12	3	5	4	7	93,98	1	12,29	1	59,68	1	22,01	3	-	-	-	-	1	-	-	-	22,01
17	17	Kota Lhokseumawe	7	5	2	-	9	12.840,32	2	2.958,79	1	9.558,45	2	291,20	3	1	31,88	-	-	-	-	31,00	-	47,78
18	18	Kota Sabang	10	4	4	2	9	366,23	2	233,45	-	-	3	132,78	4	-	-	-	-	-	-	230,99	-	-
								SGD 3.57						SGD 3.57										
19	19	Kota Subulussalam	11	3	6	2	13	952,58	3	104,73	2	259,18	3	588,67	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2		**Prov. Sumatera Utara**	**216**	**100**	**73**	**43**	**321**	**225.542,72**	**99**	**42.600,67**	**28**	**118.874,29**	**77**	**27.226,89**	**94**	**8**	**3.787,33**	**-**	**-**	**15**	**33.053,54**	**5.025,62**	**-**	**647,74**
1	20	Prov. Sumatera Utara	12	3	7	2	32	77.754,58	14	25.616,44	1	19.623,33	8	5.050,24	8	-	-	-	-	1	27.464,57	-	-	-
2	21	Kab. Asahan	11	2	4	5	20	4.974,00	5	634,66	1	2.476,55	4	337,56	6	3	695,48	-	-	1	829,75	-	-	318,80
3	22	Kab. Dairi	9	4	4	1	13	638,40	6	225,32	1	3,75	2	409,33	4	-	-	-	-	-	-	14,60	-	-
4	23	Kab. Deli Serdang	14	9	4	1	9	58,18	1	47,78	1	-	1	10,40	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	24	Kab. Humbang Hasundutan	4	3	1	-	12	3.453,03	4	181,88	-	-	5	3.271,15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	25	Kab. Labuhan Batu	5	2	1	2	14	68.615,84	1	12,90	2	66.067,22	5	1.687,67	5	-	-	-	-	1	848,05	-	-	-
7	26	Kab. Labuhan Batu Selatan	8	4	1	3	10	5.041,14	5	2.589,52	-	-	1	1.790,63	3	-	-	-	-	1	660,99	-	-	-
8	27	Kab. Labuhan Batu Utara	9	5	2	2	19	2.007,77	7	1.365,16	3	510,86	3	131,75	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	28	Kab. Mandailing Natal	9	5	3	1	7	14.713,74	2	108,24	2	11.435,47	2	2.763,45	-	1	406,58	-	-	-	-	-	-	-
10	29	Kab. Pakpak Bharat	7	4	1	2	7	281,80	-	-	-	-	6	281,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	30	Kab. Samosir	5	2	3	-	10	380,24	3	374,39	-	-	1	5,85	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	31	Kab. Serdang Bedagai	7	3	2	2	10	478,42	2	20,41	-	-	3	72,51	4	-	-	-	-	1	385,50	-	-	-
13	32	Kab. Simalungun	5	4	1	-	12	2.532,21	5	408,69	1	1.597,54	2	228,97	3	-	-	-	-	1	297,01	92,43	-	215,32
14	33	Kab. Tapanuli Selatan	15	7	4	4	11	4.881,98	4	371,77	1	1.271,44	4	2.642,52	1	-	-	-	-	1	596,25	-	-	-
15	34	Kab. Tapanuli Tengah	14	8	3	3	11	5.126,93	2	1.103,83	-	-	5	1.561,65	3	1	2.461,45	-	-	-	-	-	-	-
16	35	Kab. Tapanuli Utara	7	1	3	3	17	1.525,84	4	1.025,97	1	15,48	3	58,87	7	-	-	-	-	2	425,52	368,20	-	-
17	36	Kab. Toba Samosir	9	3	5	1	17	1.794,28	5	243,55	-	-	4	608,98	6	1	195,75	-	-	1	746,00	-	-	-
18	37	Kota Binjai	11	5	6	-	17	11.568,56	3	74,51	2	6.788,75	4	4.380,16	6	-	-	-	-	2	325,14	-	-	-
19	38	Kota Medan	7	4	1	2	10	6.472,43	4	5.284,33	2	821,03	3	367,07	1	-	-	-	-	-	-	4.548,49	-	51,24
20	39	Kota Padangsidimpuan	13	7	6	-	16	2.195,79	9	1.074,17	2	803,70	2	317,92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	40	Kota Pematangsiantar	6	2	1	3	14	1.549,79	4	426,21	2	154,86	4	959,80	3	1	8,92	-	-	-	-	-	-	-
22	41	Kota Sibolga	2	-	1	1	5	936,12	1	176,80	1	655,77	2	103,55	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20,31
23	42	Kota Tanjung Balai	14	6	5	3	11	4.130,97	3	208,08	2	3.804,22	-	-	4	-	-	-	-	2	118,67	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24	43	Kota Tebing Tinggi	13	7	4	2	17	4.430,68	5	1.026,06	3	2.844,32	3	185,06	4	1	19,15	-	-	1	356,09	1,90	-	42,07
3	**Prov. Sumatera Barat**		**252**	**112**	**109**	**31**	**346**	**119.074,08**	**76**	**12.566,38**	**20**	**27.843,45**	**54**	**17.794,77**	**144**	**26**	**17.247,57**	**-**	**-**	**26**	**43.621,91**	**594,20**	**94,37**	**2.627,03**
1	44	Prov. Sumatera Barat	24	8	11	5	37	34.649,28	9	1.538,32	1	7.904,75	6	154,63	14	2	3.426,48	-	-	5	21.625,10	440,59	-	21,05
2	45	Kab. Agam	8	5	2	1	14	9.137,18	2	713,53	2	5.504,72	2	96,43	7	-	-	-	-	1	2.822,50	-	-	-
3	46	Kab. Dharmasraya	14	5	8	1	12	2.481,64	2	80,22	-	-	8	2.401,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.139,36
4	47	Kab. Lima Puluh Kota	10	4	5	1	20	2.564,27	5	811,78	1	448,75	3	124,43	8	2	559,40	-	-	1	619,91	-	-	18,23
5	48	Kab. Kep. Mentawai	12	5	5	2	13	4.896,92	3	1.429,17	3	532,37	3	2.894,08	3	-	-	-	-	1	41,30	-	-	-
6	49	Kab. Padang Pariaman	10	4	4	2	17	2.815,74	1	31,55	-	-	3	1.493,50	8	3	309,14	-	-	2	981,55	-	-	15,16
7	50	Kab. Pasaman	10	7	3	-	15	5.070,53	4	166,81	2	3.255,45	1	253,31	7	1	1.394,96	-	-	-	-	-	94,37	-
8	51	Kab. Pasaman Barat	11	4	6	1	21	11.299,78	8	743,52	2	4.221,97	3	1.176,79	5	2	118,95	-	-	1	5.038,55	43,30	-	19,10
9	52	Kab. Pesisir Selatan	7	2	4	1	20	9.562,31	5	3.054,18	-	-	4	4.257,23	9	-	-	-	-	2	2.250,90	15,22	-	5,30
10	53	Kab. Sijunjung	13	5	6	2	16	2.604,36	2	573,18	-	-	2	133,09	7	2	391,78	-	-	3	1.506,31	-	-	62,72
11	54	Kab. Solok	8	4	4	-	16	636,05	1	305,30	2	193,67	3	101,86	9	1	35,22	-	-	-	-	-	-	-
12	55	Kab. Tanah Datar	26	10	11	5	23	5.303,83	4	704,88	1	1.012,73	2	346,50	11	3	2.496,78	-	-	2	742,94	-	-	-
13	56	Kota Bukittinggi	14	8	4	2	16	3.048,57	2	18,76	2	281,13	4	790,82	7	-	-	-	-	1	1.957,86	-	-	-
14	57	Kota Padang	9	2	6	1	25	11.129,37	6	377,62	1	2.334,83	6	2.220,65	8	4	6.196,27	-	-	-	-	-	-	51,92
15	58	Kota Padang Panjang	21	10	9	2	13	2.649,24	3	118,13	-	-	1	551,61	6	1	970,00	-	-	2	1.009,50	51,63	-	555,01
16	59	Kota Pariaman	5	1	4	-	13	533,84	4	304,43	-	-	-	-	7	1	29,41	-	-	1	200,00	-	-	-
17	60	Kota Payakumbuh	15	7	7	1	13	4.711,08	4	864,25	2	146,01	-	-	6	-	-	-	-	1	3.700,82	43,46	-	-
18	61	Kota Sawahlunto	22	14	5	3	19	3.490,70	4	382,93	1	2.007,07	1	739,18	10	2	361,52	-	-	1	-	-	-	739,18
19	62	Kota Solok	13	7	5	1	23	2.489,39	7	347,82	-	-	2	59,24	10	2	957,66	-	-	2	1.124,67	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	**Prov. Riau**		**144**	**51**	**38**	**55**	**258**	**474.982,29**	**101**	**261.349,96**	**17**	**166.551,67**	**33**	**19.382,15**	**80**	**16**	**11.975,74**	**-**	**-**	**11**	**15.722,77**	**1.090,70**	**-**	**862,66**
1	63	Prov. Riau	14	3	6	5	54	380.283,92	30	220.056,47	2	154.037,72	2	58,19	13	4	5.039,71	-	-	3	1.091,83	483,27	-	-
2	64	Kab. Bengkalis	11	4	2	5	18	16.983,79	6	14.738,64	2	-	2	2.245,15	8	-	-	-	-	-	-	19,81	-	-
3	65	Kab. Indragiri Hulu	15	4	6	5	29	18.198,69	13	8.490,83	2	195,98	3	4.905,98	6	4	2.727,20	-	-	1	1.878,70	-	-	-
4	66	Kab. Kampar	14	8	3	3	26	4.357,76	3	212,66	3	198,60	4	420,99	13	1	95,50	-	-	2	3.430,01	-	-	-
5	67	Kab. Kuantan Singingi	6	2	2	2	29	8.741,46	22	965,29	-	-	3	300,82	2	1	344,40	-	-	1	7.130,95	-	-	-
6	68	Kab. Pelalawan	11	5	3	3	22	9.487,31	5	4.709,84	2	-	4	4.130,97	10	1	646,50	-	-	-	-	587,62	-	-
7	69	Kab. Rokan Hilir	12	4	2	6	18	6.003,16	10	2.076,51	1	153,47	3	1.961,68	2	1	1.594,40	-	-	1	217,10	-	-	-
8	70	Kab. Rokan Hulu	16	5	3	8	15	11.574,32	2	8.615,22	-	-	6	2.959,10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	80,04
9	71	Kab. Siak	18	7	5	6	20	8.126,18	6	945,24	2	4.436,23	3	1.024,47	7	-	-	-	-	2	1.720,24	-	-	782,62
10	72	Kota Dumai	14	6	4	4	10	7.104,91	-	-	1	6.576,76	-	-	6	2	274,21	-	-	1	253,94	-	-	-
11	73	Kota Pekanbaru	13	3	2	8	17	4.120,79	4	539,26	2	952,91	3	1.374,80	6	2	1.253,82	-	-	-	-	-	-	-
5	**Prov. Jambi**		**121**	**76**	**30**	**15**	**158**	**131.651,47**	**27**	**5.743,15**	**24**	**111.999,48**	**21**	**12.785,68**	**77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9**	**1.123,16**	**568,66**	**4,47**	**306,85**
1	74	Prov. Jambi	13	11	2	-	26	26.782,83	6	1.849,45	3	20.276,23	4	4.077,19	10	-	-	-	-	3	579,96	487,66	-	-
2	75	Kab. Batang Hari	14	7	4	3	11	2.260,51	2	164,73	2	1.737,78	1	130,50	5	-	-	-	-	1	227,50	-	-	-
3	76	Kab. Bungo	13	9	3	1	26	3.379,60	3	498,39	7	2.079,09	2	802,12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	77	Kab. Kerinci	15	10	4	1	15	27.597,24	2	211,66	1	26.194,18	3	1.191,40	8	-	-	-	-	1	-	-	-	278,93
5	78	Kab. Merangin	11	7	4	-	13	2.200,48	1	65,22	1	110,05	1	1.709,51	9	-	-	-	-	1	315,70	65,22	-	-
6	79	Kab. Muaro Jambi	12	7	3	2	9	688,57	2	270,80	-	-	2	417,77	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	80	Kab. Sarolangun	11	9	1	1	14	47.178,95	3	1.587,59	2	43.952,98	3	1.638,38	5	-	-	-	-	1	-	-	-	27,92
8	81	Kab. Tanjung Jabung Timur	7	3	3	1	12	8.245,65	3	249,69	3	7.877,35	1	118,61	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	82	Kab. Tebo	9	6	1	2	9	766,69	2	480,63	1	-	2	286,06	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	83	Kota Jambi	9	6	2	1	10	9.710,06	1	16,49	3	9.685,47	1	8,10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	84	Kota Sungai Penuh	7	1	3	3	13	2.840,89	2	348,50	1	86,35	1	2.406,04	8	-	-	-	-	1	-	15,78	4,47	-
6	**Prov. Sumatera Selatan**		**142**	**66**	**65**	**11**	**293**	**67.666,96**	**69**	**29.101,36**	**8**	**4.453,93**	**42**	**8.806,97**	**147**	**11**	**2.430,91**	**-**	**-**	**16**	**22.873,79**	**2.580,72**	**-**	**827,90**
1	85	Prov. Sumatera Selatan	12	7	5	-	15	6.770,74	4	2.259,51	1	2.552,38	-	-	8	1	200,25	-	-	1	1.758,60	-	-	-
2	86	Kab. Banyuasin	9	3	5	1	18	1.185,10	5	481,01	1	450,81	1	17,78	10	1	235,50	-	-	-	-	-	-	-
3	87	Kab. Empat Lawang	8	4	4	-	29	4.841,61	9	4.453,22	1	-	3	171,64	14	1	162,00	-	-	1	54,75	-	-	-
4	88	Kab. Lahat	6	4	2	-	23	4.597,53	5	1.686,92	1	1.210,68	3	94,42	13	-	-	-	-	1	1.605,51	107,11	-	7,42
5	89	Kab. Muara Enim	6	4	2	-	14	2.466,84	2	525,81	-	-	3	66,14	8	-	-	-	-	1	1.874,89	466,24	-	5,00
6	90	Kab. Musi Banyuasin	7	3	4	-	18	10.005,18	5	3.116,59	-	-	1	281,72	10	1	885,37	-	-	1	5.721,50	114,65	-	-
7	91	Kab. Musi Rawas	12	6	6	-	12	563,55	3	370,87	-	-	3	192,68	6	-	-	-	-	-	-	359,77	-	76,94
8	92	Kab. Ogan Ilir	11	4	7	-	14	1.763,66	5	997,16	2	204,06	2	160,64	4	1	401,80	-	-	-	-	-	-	-
9	93	Kab. Ogan Komering Ilir	7	3	4	-	18	1.424,30	2	880,79	-	-	3	197,10	11	1	72,30	-	-	1	274,11	-	-	-
10	94	Kab. Ogan Komering Ulu	6	3	3	-	21	7.612,77	5	2.073,17	-	-	4	642,35	8	1	135,00	-	-	3	4.762,25	-	-	-
11	95	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	5	3	2	-	19	4.476,78	7	3.363,26	-	-	5	973,52	6	1	140,00	-	-	-	-	548,79	-	-
12	96	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8	3	5	-	17	6.553,49	3	800,96	-	-	4	1.768,78	7	1	159,00	-	-	2	3.824,75	-	-	-
13	97	Kota Lubuklinggau	10	3	4	3	9	604,31	1	219,57	-	-	1	95,85	5	1	12,39	-	-	1	276,50	-	-	-
14	98	Kota Pagar Alam	10	7	3	-	21	7.249,59	4	4.264,47	1	36,00	3	2.243,86	11	-	-	-	-	2	705,26	7,70	-	83,27
15	99	Kota Palembang	18	6	6	6	26	5.021,10	5	1.735,71	-	-	3	1.269,72	16	-	-	-	-	2	2.015,67	949,48	-	655,27
16	100	Kota Prabumulih	7	3	3	1	19	2.530,41	4	1.872,34	1	-	3	630,77	10	1	27,30	-	-	-	-	26,98	-	-
7	**Prov. Bengkulu**		**93**	**29**	**44**	**20**	**105**	**115.272,44**	**32**	**7.641,45**	**11**	**95.304,28**	**11**	**1.465,17**	**41**	**2**	**429,16**	**-**	**-**	**8**	**10.432,38**	**601,85**	**-**	**2,66**
1	101	Prov. Bengkulu	12	2	7	3	13	13.714,97	2	96,81	2	13.085,44	2	192,46	6	1	340,26	-	-	-	-	-	-	-
2	102	Kab. Bengkulu Selatan	8	3	4	1	7	1.007,83	3	943,23	-	-	1	64,60	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	103	Kab. Bengkulu Tengah	10	2	6	2	9	413,11	4	413,11	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	369,20	-	-

Halaman 6 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	104	Kab. Bengkulu Utara	5	3	1	1	9	8.185,11	3	2.023,40	2	6.159,05	1	2,66	3	-	-	-	-	-	-	144,18	-	2,66
5	105	Kab. Kaur	9	2	4	3	12	4.472,59	2	463,49	2	2.086,09	1	49,24	5	1	88,90	-	-	1	1.784,87	34,47	-	-
6	106	Kab. Kepahiang	11	5	2	4	5	6.819,17	-	-	1	6.819,17	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	107	Kab. Lebong	9	4	4	1	12	4.405,30	3	95,95	1	228,04	-	-	6	-	-	-	-	2	4.081,31	54,00	-	-
8	108	Kab. Mukomuko	3	1	2	-	5	63.861,01	1	1.479,37	1	62.381,64	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	109	Kab. Rejang Lebong	9	3	5	1	7	9.034,27	1	20,22	2	4.544,85	-	-	2	-	-	-	-	2	4.469,20	-	-	-
10	110	Kab. Seluma	10	2	6	2	12	2.631,01	7	1.545,52	-	-	3	1.085,49	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	111	Kota Bengkulu	7	2	3	2	14	728,07	6	560,35	-	-	3	70,72	4	-	-	-	-	1	97,00	-	-	-
8	**Prov. Lampung**		**202**	**68**	**68**	**66**	**164**	**110.872,83**	**44**	**7.506,49**	**11**	**2.393,82**	**13**	**67.355,90**	**70**	**4**	**3.707,41**	**1**	**87,67**	**21**	**29.821,54**	**1.298,50**	**260,38**	**-**
1	112	Prov. Lampung	23	11	5	7	4	9,28	1	9,28	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	113	Kab. Lampung Barat	6	1	2	3	7	264,52	3	264,52	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	114	Kab. Lampung Selatan	12	4	4	4	17	3.907,67	5	623,21	2	710,73	1	98,77	7	-	-	-	-	2	2.474,96	37,17	-	-
4	115	Kab. Lampung Tengah	15	6	4	5	12	10.073,93	2	177,09	2	189,06	-	-	5	-	-	-	-	3	9.707,78	-	-	-
5	116	Kab. Lampung Timur	8	2	4	2	10	1.363,76	3	282,03	1	576,50	3	361,47	2	-	-	-	-	1	143,76	105,54	-	-
6	117	Kab. Lampung Utara	15	7	3	5	11	71.169,89	2	550,09	-	-	2	65.660,88	5	-	-	-	-	2	4.958,92	65,00	-	-
7	118	Kab. Mesuji	11	7	2	2	9	1.232,07	3	1.185,28	-	-	2	46,79	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	119	Kab. Pesawaran	16	4	6	6	11	4.106,52	2	395,28	2	399,39	-	-	3	2	2.656,95	-	-	2	654,90	-	-	-
9	120	Kab. Pringsewu	25	7	12	6	10	1.038,84	2	735,10	-	-	1	277,22	6	-	-	-	-	1	26,52	-	-	-
10	121	Kab. Tanggamus	19	8	5	6	13	1.205,40	4	870,94	-	-	1	334,46	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	122	Kab. Tulang Bawang	8	3	4	1	8	1.108,13	4	864,73	1	243,40	-	-	3	-	-	-	-	-	-	835,08	87,29	-
12	123	Kab. Tulang Bawang Barat	8	1	5	2	8	414,69	4	241,60	1	173,09	-	-	3	-	-	-	-	-	-	241,60	173,09	-
13	124	Kab. Way Kanan	9	5	1	3	20	10.935,29	3	515,06	2	101,65	2	526,14	5	1	298,00	1	87,67	6	9.406,77	-	-	-
14	125	Kota Bandar Lampung	23	2	10	11	20	3.215,13	5	742,58	-	-	1	50,17	10	1	752,46	-	-	3	1.669,92	14,11	-	-

Halaman 7 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
15	126	Kota Metro	4	-	1	3	4	827,71	1	49,70	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	778,01	-	-	-
9	**Prov. Kepulauan Bangka Belitung**		**58**	**30**	**20**	**8**	**68**	**2.254,69**	**11**	**718,04**	**1**	**-**	**15**	**1.129,20**	**36**	**1**	**17,70**	**-**	**-**	**4**	**389,75**	**-**	**-**	**-**
1	127	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	10	4	3	3	12	497,47	3	307,39	-	-	3	190,08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	128	Kab. Bangka	6	3	2	1	10	186,41	2	9,75	-	-	3	86,66	4	-	-	-	-	1	90,00	-	-	-
3	129	Kab. Bangka Barat	10	6	4	-	4	24,24	1	24,24	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	130	Kab. Bangka Selatan	8	6	1	1	3	60,52	1	28,90	-	-	1	31,62	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	131	Kab. Bangka Tengah	4	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	132	Kab. Belitung	6	2	2	2	10	473,71	1	70,16	-	-	2	403,55	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	133	Kab. Belitung Timur	8	4	4	-	12	563,45	2	262,30	1	-	1	31,40	6	1	17,70	-	-	1	252,05	-	-	-
8	134	Kota Pangkal Pinang	6	5	1	-	15	448,89	1	15,30	-	-	5	385,89	8	-	-	-	-	1	47,70	-	-	-
10	**Prov. Kepulauan Riau**		**72**	**31**	**31**	**10**	**78**	**60.311,13**	**12**	**2.305,54**	**1**	**7.909,15**	**13**	**12.163,89**	**43**	**4**	**2.575,72**	**-**	**-**	**5**	**35.356,83**	**28,78**	**-**	**-**
1	135	Prov. Kepulauan Riau	3	1	1	1	11	918,92	4	820,69	-	-	2	98,23	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	136	Kab. Bintan	10	4	5	1	6	1,82	-	-	-	-	1	1,82	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	137	Kab. Karimun	1	1	-	-	9	268,39	1	115,42	-	-	-	-	6	2	152,97	-	-	-	-	-	-	-
4	138	Kab. Kep. Anambas	10	7	2	1	11	4.998,39	5	1.200,87	-	-	3	2.041,22	2	-	-	-	-	1	1.756,30	28,78	-	-
5	139	Kab. Lingga	6	2	3	1	10	436,66	1	70,94	-	-	2	365,72	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	140	Kab. Natuna	7	4	3	-	14	31.566,43	1	97,62	1	7.909,15	-	-	10	1	2.228,00	-	-	1	21.331,66	-	-	-
7	141	Kota Batam	23	9	9	5	5	9.418,40	-	-	-	-	2	9.418,40	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	142	Kota Tanjungpinang	12	3	8	1	12	12.702,12	-	-	-	-	3	238,50	6	1	194,75	-	-	2	12.268,87	-	-	-
11	**Prov. DKI Jakarta**		**56**	**25**	**12**	**19**	**79**	**76.235,06**	**29**	**4.861,60**	**8**	**2.427,30**	**11**	**9.626,18**	**24**	**2**	**1.499,33**	**-**	**-**	**5**	**57.820,65**	**2.243,08**	**68,07**	**535,27**
1	143	Prov. DKI Jakarta	56	25	12	19	79	76.235,06	29	4.861,60	8	2.427,30	11	9.626,18	24	2	1.499,33	-	-	5	57.820,65	2.243,08	68,07	535,27

Halaman 8 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12	**Prov. Jawa Barat**		**197**	**98**	**77**	**22**	**355**	**194.137,54**	**131**	**32.596,88**	**18**	**85.738,33**	**60**	**19.915,61**	**109**	**17**	**3.642,52**	**-**	**-**	**20**	**52.244,20**	**4.035,79**	**49,78**	**1.070,27**
1	144	Prov. Jawa Barat	5	1	2	2	18	5.452,99	7	2.645,08	1	49,78	4	91,45	2	3	241,13	-	-	1	2.425,55	-	49,78	-
2	145	Kab. Bandung	7	3	4	-	14	8.740,91	5	6.006,40	1	2.063,43	2	671,08	6	-	-	-	-	-	-	2.234,40	-	-
3	146	Kab. Bandung Barat	9	6	1	2	14	274,41	5	206,05	-	-	4	68,36	5	-	-	-	-	-	-	84,25	-	-
4	147	Kab. Bekasi	7	3	4	-	9	14.336,05	4	380,44	2	4.829,96	1	9.031,65	1	1	94,00	-	-	-	-	4,00	-	-
5	148	Kab. Bogor	6	5	-	1	7	3.064,28	2	1.365,72	-	-	1	1.664,40	3	1	34,16	-	-	-	-	11,87	-	-
6	149	Kab. Ciamis	10	4	3	3	15	4.227,53	2	295,54	2	3.653,10	2	55,30	6	2	219,70	-	-	1	3,89	-	-	-
7	150	Kab. Cianjur	7	3	4	-	16	1.489,42	7	748,31	2	182,46	3	455,91	2	-	-	-	-	2	102,74	69,13	-	441,39
8	151	Kab. Cirebon	6	3	3	-	17	3.530,56	7	2.913,20	-	-	2	577,36	6	-	-	-	-	2	40,00	-	-	-
9	152	Kab. Garut	5	5	-	-	10	355,77	3	300,48	1	11,03	3	44,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
10	153	Kab. Indramayu	8	5	3	-	15	74.127,10	6	657,59	4	72.869,54	4	599,97	1	-	-	-	-	-	-	42,52	-	462,30
11	154	Kab. Karawang	8	4	3	1	17	4.019,75	4	817,56	-	-	6	3.202,19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	155	Kab. Kuningan	10	2	7	1	18	23.077,88	4	343,26	1	1.609,75	3	751,46	6	-	-	-	-	4	20.373,41	5,50	-	-
13	156	Kab. Majalengka	7	2	1	4	4	219,06	2	121,99	-	-	1	97,07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	157	Kab. Purwakarta	7	4	3	-	15	4.477,98	8	4.211,07	-	-	1	250,53	5	1	16,38	-	-	-	-	174,43	-	-
15	158	Kab. Subang	5	3	2	-	9	202,55	7	202,55	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	159	Kab. Sukabumi	4	2	1	1	14	1.699,03	6	1.357,59	1	178,40	2	163,04	4	-	-	-	-	1	-	30,00	-	-
17	160	Kab. Sumedang	8	6	2	-	21	3.966,69	6	386,97	-	-	1	1,23	9	3	766,49	-	-	2	2.812,00	9,99	-	-
18	161	Kab. Tasikmalaya	4	2	2	-	8	1.471,72	2	596,72	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	875,00	-	-	-
19	162	Kota Bandung	6	2	3	1	18	29.073,34	8	3.367,88	-	-	1	507,10	6	-	-	-	-	3	25.198,36	-	-	-
20	163	Kota Banjar	7	1	5	1	7	893,99	1	841,13	-	-	1	52,86	5	-	-	-	-	-	-	841,13	-	52,68
21	164	Kota Bekasi	12	6	5	1	15	2.096,36	6	437,19	-	-	3	165,68	5	1	1.493,49	-	-	-	-	-	-	37,29
22	165	Kota Bogor	4	2	1	1	9	1.117,65	1	39,40	1	235,73	3	429,27	3	-	-	-	-	1	413,25	-	-	-
23	166	Kota Cimahi	15	7	7	1	25	3.305,88	11	2.919,58	-	-	3	206,40	8	2	179,90	-	-	1	-	-	-	40,48

Halaman 9 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24	167	Kota Cirebon	7	5	-	2	10	852,08	3	185,80	1	41,18	3	126,67	1	2	498,43	-	-	-	-	-	-	-
25	168	Kota Depok	5	2	3	-	8	775,95	2	96,88	1	13,97	3	665,10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	169	Kota Sukabumi	10	7	3	-	10	729,09	5	623,93	-	-	2	6,32	2	1	98,84	-	-	-	-	-	-	2,76
27	170	Kota Tasikmalaya	8	3	5	-	12	559,52	7	528,57	-	-	1	30,95	4	-	-	-	-	-	-	528,57	-	30,95
13	**Prov. Jawa Tengah**		**379**	**134**	**175**	**70**	**363**	**124.097,88**	**49**	**19.553,18**	**25**	**52.815,36**	**72**	**24.601,84**	**182**	**7**	**289,95**	**-**	**-**	**28**	**26.837,55**	**1.326,36**	**18,55**	**2.983,02**
1	171	Prov. Jawa Tengah	11	3	4	4	20	18.516,30	4	2.133,99	4	14.281,00	2	201,15	7	-	-	-	-	3	1.900,16	-	-	4,25
2	172	Kab. Banjarnegara	11	1	7	3	12	1.453,67	4	175,68	-	-	1	30,27	6	-	-	-	-	1	1.247,72	101,96	-	-
3	173	Kab. Banyumas	3	-	3	-	5	287,77	2	51,78	1	235,99	-	-	2	-	-	-	-	-	-	51,78	18,55	-
4	174	Kab. Batang	9	3	5	1	6	90,63	-	-	-	-	2	90,63	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,91
5	175	Kab. Blora	12	5	5	2	15	13.183,03	-	-	1	12.530,55	2	652,48	11	-	-	-	-	1	-	-	-	4,51
6	176	Kab. Boyolali	5	-	5	-	13	261,08	1	62,44	-	-	1	5,40	9	-	-	-	-	2	193,24	62,44	-	-
7	177	Kab. Brebes	13	6	5	2	12	9.869,94	2	263,50	3	5.364,71	3	4.085,72	3	-	-	-	-	1	156,01	59,23	-	82,59
8	178	Kab. Cilacap	10	3	6	1	17	2.206,64	3	293,51	2	810,95	4	1.102,18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	179	Kab. Demak	11	2	6	3	13	1.729,02	1	21,84	-	-	5	1.707,18	6	-	-	-	-	1	-	-	-	52,49
10	180	Kab. Grobogan	15	7	5	3	9	348,70	-	-	-	-	-	-	6	1	33,70	-	-	2	315,00	-	-	-
11	181	Kab. Jepara	8	5	2	1	4	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12	182	Kab. Karanganyar	10	5	4	1	9	3.831,12	1	2,00	-	-	1	3.645,54	6	-	-	-	-	1	183,58	-	-	-
13	183	Kab. Kebumen	19	4	12	3	7	722,05	4	688,84	-	-	1	33,21	2	-	-	-	-	-	-	25,56	-	-
14	184	Kab. Kendal	14	7	7	-	11	2.415,33	-	-	-	-	2	2.415,33	8	-	-	-	-	1	-	-	-	2.405,08
15	185	Kab. Klaten	10	2	5	3	8	6.598,59	-	-	1	1.740,47	5	4.839,60	1	1	18,52	-	-	-	-	-	-	-
16	186	Kab. Kudus	9	3	2	4	7	2.141,96	-	-	1	1.636,67	2	505,29	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	187	Kab. Magelang	18	6	7	5	19	10.938,36	-	-	-	-	1	91,80	16	1	59,33	-	-	1	10.787,23	-	-	-
18	188	Kab. Pati	8	3	4	1	7	133,91	-	-	-	-	1	133,91	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
19	189	Kab. Pekalongan	10	4	4	2	8	388,76	3	378,55	-	-	1	10,21	4	-	-	-	-	-	-	378,55	-	10,21

Halaman 10 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20	190	Kab. Pemalang	6	1	3	2	5	560,12	1	138,10	-	-	1	401,23	2	1	20,79	-	-	-	-	138,10	-	-
21	191	Kab. Purbalingga	10	3	5	2	6	9.743,82	-	-	1	8.501,44	2	963,40	2	-	-	-	-	1	278,98	-	-	-
22	192	Kab. Purworejo	9	2	5	2	6	754,01	3	149,08	-	-	2	604,93	1	-	-	-	-	-	-	149,08	-	10,39
23	193	Kab. Rembang	19	3	8	8	17	353,80	2	98,18	-	-	4	242,63	9	-	-	-	-	2	12,99	58,32	-	238,26
24	194	Kab. Semarang	9	4	3	2	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	195	Kab. Sragen	10	4	5	1	8	17.114,97	1	11.216,04	-	-	1	339,03	5	-	-	-	-	1	5.559,90	-	-	-
26	196	Kab. Sukoharjo	7	5	2	-	12	1.115,32	1	6,31	4	211,99	1	24,83	4	1	102,79	-	-	1	769,40	-	-	-
27	197	Kab. Tegal	4	2	2	-	8	218,21	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	218,21	-	-	-
28	198	Kab. Temanggung	17	9	7	1	15	396,90	1	194,27	1	17,54	6	185,09	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51
29	199	Kab. Wonogiri	9	4	4	1	8	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-
30	200	Kab. Wonosobo	8	3	5	-	17	5.758,15	4	160,77	1	5.063,82	7	533,56	5	-	-	-	-	-	-	59,87	-	100,38
31	201	Kota Magelang	16	5	5	6	12	614,34	2	20,50	-	-	2	580,84	5	1	3,00	-	-	2	10,00	-	-	-
32	202	Kota Pekalongan	13	4	8	1	6	1,29	-	-	-	-	1	1,29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	203	Kota Salatiga	10	6	3	1	12	1.158,93	-	-	-	-	9	1.158,93	3	-	-	-	-	-	-	-	-	51,26
34	204	Kota Semarang	10	3	5	2	9	5.278,65	2	3.273,32	1	2.005,33	-	-	6	-	-	-	-	-	-	112,59	-	-
35	205	Kota Surakarta	8	3	5	-	9	217,02	3	149,02	-	-	2	16,18	3	1	51,82	-	-	-	-	128,88	-	16,18
36	206	Kota Tegal	8	4	2	2	8	5.695,49	3	75,46	1	414,90	-	-	2	-	-	-	-	2	5.205,13	-	-	-
14	**Prov. D.I. Yogyakarta**		**80**	**28**	**42**	**10**	**52**	**5.685,55**	**14**	**1.675,90**	**1**	**198,67**	**11**	**2.730,33**	**21**	**2**	**187,08**	**-**	**-**	**3**	**893,57**	**600,39**	**-**	**425,71**
1	207	Prov. D.I. Yogyakarta	12	2	6	4	12	903,54	3	139,43	-	-	-	-	7	1	179,47	-	-	1	584,64	-	-	-
2	208	Kab. Bantul	9	4	3	2	5	1.902,33	1	633,73	-	-	2	1.268,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	252,33
3	209	Kab. Gunung Kidul	20	11	8	1	11	1.580,73	4	492,72	1	198,67	2	889,34	4	-	-	-	-	-	-	482,34	-	-
4	210	Kab. Kulon Progo	11	5	5	1	4	118,25	1	118,25	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	211	Kab. Sleman	14	3	10	1	13	962,40	1	111,51	-	-	7	572,39	4	-	-	-	-	1	278,50	111,51	-	173,38

Halaman 11 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	212	Kota Yogyakarta	14	3	10	1	7	218,30	4	180,26	-	-	-	-	1	1	7,61	-	-	1	30,43	6,54	-	-
15	**Prov. Jawa Timur**		**352**	**127**	**156**	**69**	**296**	**236.913,79**	**73**	**54.071,26**	**18**	**124.535,20**	**46**	**16.469,79**	**134**	**8**	**5.083,59**	**-**	**-**	**17**	**36.753,95**	**8.666,31**	**-**	**3.806,72**
1	213	Prov. Jawa Timur	6	-	4	2	12	73.702,31	2	1.842,30	2	71.519,99	1	75,19	6	1	264,83	-	-	-	-	1.842,30	-	75,19
2	214	Kab. Bangkalan	4	1	1	2	2	1.029,52	-	-	-	-	1	1.029,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.029,52
3	215	Kab. Banyuwangi	13	6	5	2	6	1.056,11	-	-	-	-	3	1.056,11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	216	Kab. Blitar	13	7	6	-	16	948,57	4	268,85	1	40,00	3	189,72	6	1	315,00	-	-	1	135,00	268,85	-	164,65
5	217	Kab. Bojonegoro	8	2	3	3	10	25.579,37	3	754,21	-	-	1	105,90	4	-	-	-	-	2	24.719,26	-	-	-
6	218	Kab. Bondowoso	4	-	4	-	9	11.089,30	5	720,59	-	-	1	10,38	-	2	307,61	-	-	1	10.050,72	720,57	-	10,38
7	219	Kab. Gresik	6	5	-	1	9	454,83	2	173,05	-	-	3	281,78	4	-	-	-	-	-	-	113,82	-	86,85
8	220	Kab. Jember	13	8	5	-	2	149,80	-	-	-	-	1	149,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	221	Kab. Jombang	10	1	4	5	8	107,04	-	-	-	-	1	107,04	6	-	-	-	-	1	-	-	-	107,04
10	222	Kab. Kediri	13	1	6	6	12	322,84	2	22,60	2	300,24	-	-	8	-	-	-	-	-	-	22,60	-	-
11	223	Kab. Lamongan	10	4	5	1	11	1.991,23	2	331,84	2	1.354,51	-	-	5	1	104,88	-	-	1	200,00	20,63	-	-
12	224	Kab. Lumajang	7	3	4	-	14	1.457,61	4	1.340,18	-	-	3	117,43	7	-	-	-	-	-	-	1.192,69	-	22,14
13	225	Kab. Madiun	8	1	3	4	10	11.068,68	3	1.777,49	1	5.125,47	2	154,13	3	1	4.011,59	-	-	-	-	30,25	-	154,13
14	226	Kab. Magetan	10	4	4	2	2	82,70	1	82,70	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	227	Kab. Malang	11	5	3	3	6	197,60	1	64,70	-	-	2	132,90	3	-	-	-	-	-	-	64,70	-	132,90
16	228	Kab. Mojokerto	10	5	3	2	5	39.199,02	1	39.199,02	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	229	Kab. Nganjuk	8	2	4	2	6	210,59	2	152,92	-	-	1	57,67	2	-	-	-	-	1	-	152,92	-	57,67
18	230	Kab. Ngawi	5	3	2	-	10	3.079,32	4	995,34	1	2.019,93	1	64,05	4	-	-	-	-	-	-	34,81	-	-
19	231	Kab. Pacitan	5	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	232	Kab. Pamekasan	8	3	4	1	2	148,66	2	148,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,50	-	-
21	233	Kab. Pasuruan	8	2	6	-	10	5.110,21	3	299,91	1	4.366,92	2	180,28	2	-	-	-	-	2	263,10	27,01	-	122,20

Halaman 12 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
22	234	Kab. Ponorogo	7	3	3	1	3	1.172,54	1	241,47	-	-	1	931,07	1	-	-	-	-	-	-	241,47	-	-
23	235	Kab. Probolinggo	10	4	5	1	5	370,82	2	354,39	-	-	1	16,43	2	-	-	-	-	-	-	354,39	-	16,43
24	236	Kab. Sampang	11	6	3	2	5	289,88	1	85,60	-	-	2	204,28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	163,83
25	237	Kab. Sidoarjo	13	7	4	2	6	839,07	2	839,07	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	371,75	-	-
26	238	Kab. Situbondo	8	4	4	-	11	118,97	5	102,85	-	-	1	16,12	5	-	-	-	-	-	-	69,35	-	16,12
27	239	Kab. Sumenep	9	7	2	-	8	833,96	1	833,96	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
28	240	Kab. Trenggalek	12	3	6	3	14	478,42	4	166,58	-	-	2	34,41	7	-	-	-	-	1	277,43	3,99	-	-
29	241	Kab. Tuban	8	3	3	2	4	17.205,66	-	-	2	15.205,66	1	2.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	242	Kab. Tulungagung	15	3	8	4	11	653,18	3	137,01	-	-	3	175,48	3	-	-	-	-	2	340,69	137,01	-	175,48
31	243	Kota Batu	5	-	4	1	5	50,85	1	42,96	-	-	1	7,89	3	-	-	-	-	-	-	42,96	-	7,89
32	244	Kota Blitar	13	3	8	2	11	307,10	3	155,85	-	-	1	8,76	5	1	8,11	-	-	1	134,38	1,74	-	-
33	245	Kota Kediri	14	3	8	3	16	1.017,26	2	734,21	-	-	1	283,05	12	-	-	-	-	1	-	734,21	-	-
34	246	Kota Madiun	6	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
35	247	Kota Malang	7	1	5	1	8	2.678,05	3	1.057,76	-	-	3	1.548,72	1	1	71,57	-	-	-	-	1.057,76	-	1.458,46
36	248	Kota Mojokerto	10	5	1	4	1	204,43	1	204,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,47	-	-
37	249	Kota Pasuruan	10	5	3	2	6	11.600,64	1	16,20	1	5.160,35	2	5.790,72	1	-	-	-	-	1	633,37	-	-	5,84
38	250	Kota Probolinggo	6	2	3	1	5	284,76	1	284,76	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	284,76	-	-
39	251	Kota Surabaya	8	3	4	1	10	21.822,89	1	639,80	5	19.442,13	1	1.740,96	3	-	-	-	-	-	-	639,80	-	-
16	**Prov. Banten**		**69**	**20**	**24**	**25**	**115**	**45.129,61**	**42**	**9.199,42**	**5**	**27.136,47**	**19**	**5.179,79**	**42**	**3**	**1.157,41**	**-**	**-**	**4**	**2.456,52**	**1.522,76**	**-**	**117,00**
1	252	Prov. Banten	3	-	3	-	11	2.420,37	5	1.909,76	-	-	2	332,21	3	-	-	-	-	1	178,40	409,62	-	-
2	253	Kab. Lebak	12	3	4	5	18	851,92	4	366,78	1	209,24	4	275,90	9	-	-	-	-	-	-	-	-	110,75
3	254	Kab. Pandeglang	5	4	1	-	17	3.101,21	9	810,76	1	-	4	2.290,45	3	-	-	-	-	-	-	198,15	-	6,25
4	255	Kab. Serang	18	5	5	8	15	30.065,29	5	3.115,27	3	26.927,23	-	-	6	1	22,79	-	-	-	-	700,00	-	-

Halaman 13 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	256	Kab. Tangerang	5	-	3	2	11	950,55	3	289,50	-	-	2	87,46	5	1	573,59	-	-	-	-	-	-	-
6	257	Kota Cilegon	13	5	1	7	13	3.459,34	3	1.263,49	-	-	3	1.634,82	5	1	561,03	-	-	1	-	49,66	-	-
7	258	Kota Serang	4	2	2	-	9	2.308,52	1	244,80	-	-	2	27,96	5	-	-	-	-	1	2.035,76	-	-	-
8	259	Kota Tangerang	3	-	2	1	9	985,42	6	454,43	-	-	2	530,99	1	-	-	-	-	-	-	137,66	-	-
9	260	Kota Tangerang Selatan	6	1	3	2	12	986,99	6	744,63	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	242,36	27,67	-	-
17	**Prov. Bali**		**116**	**26**	**74**	**16**	**154**	**34.812,42**	**31**	**4.212,97**	**11**	**10.903,69**	**15**	**4.055,32**	**73**	**7**	**637,64**	**-**	**-**	**17**	**15.002,80**	**922,56**	**-**	**8,32**
1	261	Prov. Bali	9	1	5	3	14	2.818,23	2	672,51	1	-	2	1.991,72	8	-	-	-	-	1	154,00	668,41	-	1,52
2	262	Kab. Badung	10	1	6	3	12	6.590,46	3	234,79	-	-	2	658,01	4	1	46,90	-	-	2	5.650,76	149,51	-	6,80
3	263	Kab. Bangli	18	3	13	2	15	113,15	1	65,26	-	-	2	22,90	10	1	24,99	-	-	1	-	-	-	-
4	264	Kab. Buleleng	10	2	8	-	10	2.880,35	1	1.737,25	3	1.143,10	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	265	Kab. Gianyar	20	7	9	4	17	3.003,90	2	174,81	1	77,65	2	66,25	9	-	-	-	-	3	2.685,19	-	-	-
6	266	Kab. Jembrana	8	2	4	2	11	965,58	2	10,96	1	195,00	-	-	4	1	26,55	-	-	3	733,07	10,96	-	-
7	267	Kab. Karangasem	14	4	9	1	17	2.004,03	3	19,88	3	825,01	1	646,14	8	-	-	-	-	2	513,00	9,13	-	-
8	268	Kab. Klungkung	14	4	10	-	20	8.600,46	4	320,05	1	8.033,26	1	9,15	11	1	95,00	-	-	2	143,00	62,01	-	-
9	269	Kab. Tabanan	4	-	4	-	20	1.428,55	6	149,45	-	-	3	559,10	6	3	444,20	-	-	2	275,80	-	-	-
10	270	Kota Denpasar	9	2	6	1	18	6.407,71	7	828,01	1	629,67	2	102,05	7	-	-	-	-	1	4.847,98	22,54	-	-
18	**Prov. Nusa Tenggara Barat**		**91**	**41**	**41**	**9**	**146**	**63.279,39**	**37**	**7.202,53**	**16**	**50.909,38**	**22**	**2.766,47**	**62**	**6**	**717,57**	**-**	**-**	**3**	**1.683,44**	**647,03**	**-**	**683,26**
1	271	Prov. Nusa Tenggara Barat	3	2	-	1	9	311,48	2	286,94	-	-	1	24,54	6	-	-	-	-	-	-	-	-	24,54
2	272	Kab. Dompu	10	6	4	-	27	6.492,46	13	4.326,51	-	-	4	146,99	4	4	403,02	-	-	2	1.615,94	89,85	-	-
3	273	Kab. Lombok Barat	14	5	8	1	13	1.522,94	1	32,71	2	713,49	3	709,24	6	-	-	-	-	1	67,50	-	-	88,55
4	274	Kab. Lombok Tengah	9	5	3	1	17	2.719,02	5	620,02	5	2.085,00	1	14,00	6	-	-	-	-	-	-	462,79	-	-
5	275	Kab. Lombok Timur	9	6	3	-	10	14.076,19	1	66,37	1	14.009,82	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 14 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	276	Kab. Lombok Utara	7	1	5	1	20	1.315,48	5	663,03	1	15,33	4	346,57	9	1	290,55	-	-	-	-	-	-	-
7	277	Kab. Sumbawa	8	3	5	-	9	3.437,61	1	283,02	1	2.700,30	3	454,29	4	-	-	-	-	-	-	-	-	75,80
8	278	Kab. Sumbawa Barat	15	6	6	3	6	14.956,03	1	400,00	1	14.556,03	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	279	Kota Bima	4	1	3	-	19	17.052,30	8	523,93	2	16.421,96	2	82,41	6	1	24,00	-	-	-	-	94,39	-	-
10	280	Kota Mataram	12	6	4	2	16	1.395,88	-	-	3	407,45	4	988,43	9	-	-	-	-	-	-	-	-	494,37
19	**Prov. Nusa Tenggara Timur**		**118**	**54**	**40**	**24**	**144**	**37.211,25**	**24**	**3.681,35**	**11**	**8.673,30**	**18**	**2.607,39**	**69**	**6**	**6.840,05**	**-**	**-**	**16**	**15.409,16**	**73,77**	**-**	**54,68**
1	281	Prov. Nusa Tenggara Timur	14	7	2	5	13	9.725,93	3	959,50	2	8.110,15	1	53,53	6	-	-	-	-	1	602,75	-	-	-
2	282	Kab. Alor	19	13	6	-	19	1.903,36	3	1.652,96	3	207,78	1	42,62	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	283	Kab. Belu	15	8	5	2	9	6.656,31	2	75,09	-	-	3	79,67	1	2	6.480,05	-	-	1	21,50	-	-	-
4	284	Kab. Flores Timur	9	5	3	1	24	1.620,92	3	221,41	3	221,40	1	219,56	12	1	190,85	-	-	4	767,70	-	-	46,40
5	285	Kab. Nagekeo	9	4	3	2	13	13.034,75	1	25,05	1	41,66	1	85,61	7	2	136,75	-	-	1	12.745,68	-	-	-
6	286	Kab. Sumba Barat Daya	14	2	9	3	18	469,28	5	129,96	-	-	3	306,92	9	1	32,40	-	-	-	-	15,76	-	-
7	287	Kab. Sumba Tengah	10	2	4	4	18	277,83	2	68,06	1	80,11	1	8,93	10	-	-	-	-	4	120,73	29,06	-	-
8	288	Kab. Timor Tengah Utara	17	7	6	4	21	2.790,34	4	427,32	1	12,20	3	1.416,38	10	-	-	-	-	3	934,44	28,95	-	8,28
9	289	Kota Kupang	11	6	2	3	9	732,53	1	122,00	-	-	4	394,17	3	-	-	-	-	1	216,36	-	-	-
20	**Prov. Kalimantan Barat**		**100**	**60**	**26**	**14**	**99**	**31.486,63**	**15**	**2.403,00**	**7**	**4.125,22**	**21**	**19.701,03**	**54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**5.257,38**	**210,64**	**-**	**216,08**
1	290	Prov. Kalimantan Barat	9	5	4	-	8	13.956,70	-	-	1	2.619,74	1	9.551,42	5	-	-	-	-	1	1.785,54	-	-	-
2	291	Kab. Bengkayang	9	3	4	2	15	2.378,76	2	236,72	-	-	4	2.142,04	9	-	-	-	-	-	-	-	-	10,17
3	292	Kab. Kapuas Hulu	9	7	2	-	4	128,50	1	30,78	-	-	1	97,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	293	Kab Kayong Utara	5	4	1	-	7	242,21	2	113,35	1	30,68	1	98,18	3	-	-	-	-	-	-	11,92	-	-
5	294	Kab. Ketapang	9	5	2	2	10	1.139,89	1	74,72	1	9,27	3	1.055,90	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	295	Kab. Kubu Raya	3	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 15 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	296	Kab. Landak	5	3	2	-	3	764,67	-	-	-	-	1	764,67	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	297	Kab. Melawi	5	3	2	-	3	30,99	1	30,99	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	298	Kab. Pontianak	5	5	-	-	6	2.238,49	1	1.048,45	2	1.190,04	-	-	3	-	-	-	-	-	-	145,16	-	-
10	299	Kab. Sambas	17	5	4	8	9	301,30	1	16,58	-	-	3	284,72	5	-	-	-	-	-	-	-	-	205,91
11	300	Kab. Sanggau	6	4	2	-	5	3.288,51	-	-	1	247,42	1	3.041,09	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	301	Kab. Sekadau	2	2	-	-	8	1.217,22	2	135,82	-	-	2	1.081,40	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	302	Kab. Sintang	4	3	1	-	10	4.260,52	2	235,38	-	-	2	553,30	5	-	-	-	-	1	3.471,84	-	-	-
14	303	Kota Pontianak	5	3	1	1	3	92,29	1	64,22	1	28,07	-	-	1	-	-	-	-	-	-	53,56	-	-
15	304	Kota Singkawang	7	5	1	1	4	1.446,58	1	415,99	-	-	2	1.030,59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21		**Prov. Kalimantan Tengah**	**110**	**53**	**46**	**11**	**122**	**109.768,25**	**34**	**14.163,40**	**8**	**83.612,60**	**13**	**8.353,10**	**52**	**8**	**3.104,63**	**-**	**-**	**7**	**534,52**	**11.301,52**	**-**	**-**
1	305	Kab. Barito Selatan	8	4	2	2	11	668,83	4	668,83	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	105,43	-	-
2	306	Kab. Gunung Mas	16	6	9	1	22	3.380,20	5	574,81	1	2.357,35	2	448,04	14	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-
3	307	Kab. Kapuas	17	11	4	2	13	16.241,48	3	11.025,34	1	500,00	2	4.287,49	5	2	428,65	-	-	-	-	10.929,34	-	-
4	308	Kab. Kotawaringin Barat	15	6	9	-	5	493,44	1	7,44	-	-	1	19,06	1	2	466,94	-	-	-	-	-	-	-
5	309	Kab. Kotawaringin Timur	7	3	4	-	16	60.062,97	3	231,39	2	58.407,82	1	1.189,24	6	-	-	-	-	4	234,52	170,19	-	-
6	310	Kab. Lamandau	14	9	4	1	5	32,09	1	19,58	1	12,51	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	311	Kab. Murung Raya	11	5	3	3	23	6.278,15	6	338,34	2	1.894,49	4	1.960,42	7	3	2.084,90	-	-	1	-	27,64	-	-
8	312	Kab. Pulang Pisau	7	2	4	1	11	968,13	8	968,13	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	28,92	-	-
9	313	Kota Palangka Raya	15	7	7	1	16	21.642,96	3	329,54	1	20.440,43	2	448,85	7	1	124,14	-	-	2	300,00	-	-	-
22		**Prov. Kalimantan Selatan**	**114**	**48**	**39**	**27**	**114**	**24.022,05**	**30**	**3.403,94**	**7**	**16.123,27**	**20**	**2.056,16**	**52**	**1**	**9,56**	**-**	**-**	**4**	**2.429,12**	**1.114,73**	**-**	**64,07**
1	314	Prov. Kalimantan Selatan	24	7	8	9	19	3.947,90	4	158,94	2	3.497,78	6	291,18	7	-	-	-	-	-	-	118,37	-	6,24
2	315	Kab. Balangan	9	4	2	3	19	1.541,05	5	510,05	1	222,40	1	16,95	10	-	-	-	-	2	791,65	216,63	-	-

Halaman 16 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	316	Kab. Barito Kuala	9	4	4	1	5	11.899,26	-	-	1	10.469,26	-	-	3	-	-	-	-	1	1.430,00	-	-	-
4	317	Kab. Hulu Sungai Selatan	6	4	1	1	6	199,33	2	155,45	-	-	1	43,88	3	-	-	-	-	-	-	-	-	43,88
5	318	Kab. Hulu Sungai Tengah	9	2	3	4	7	36,09	2	36,09	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	319	Kab. Hulu Sungai Utara	6	3	3	-	11	1.041,25	4	191,68	1	294,91	4	554,66	2	-	-	-	-	-	-	36,39	-	-
7	320	Kab. Tanah Bumbu	15	6	6	3	23	2.555,59	7	1.328,00	-	-	7	1.010,56	7	1	9,56	-	-	1	207,47	222,00	-	13,95
8	321	Kab. Tanah Laut	12	8	3	1	9	1.861,49	2	173,37	1	1.549,19	1	138,93	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	322	Kab. Tapin	7	3	3	1	4	706,89	3	706,89	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	377,87	-	-
10	323	Kota Banjarmasin	17	7	6	4	11	233,20	1	143,47	1	89,73	-	-	9	-	-	-	-	-	-	143,47	-	-
23	**Prov. Kalimantan Timur**		**80**	**37**	**23**	**20**	**83**	**18.155,23**	**11**	**3.324,95**	**2**	**2.515,05**	**17**	**5.749,41**	**47**	**4**	**4.997,60**	**1**	**449,82**	**1**	**1.118,40**	**146,23**	**-**	**41,11**
1	324	Kab. Berau	5	4	1	-	9	711,52	1	711,52	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	325	Kab. Kutai Barat	19	7	7	5	14	3.994,68	3	761,22	-	-	1	174,66	9	1	3.058,80	-	-	-	-	-	-	-
3	326	Kab. Nunukan	10	5	2	3	8	387,15	1	27,85	-	-	2	359,30	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	327	Kab. Paser	6	2	3	1	12	791,38	2	378,98	-	-	3	412,40	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	328	Kab. Penajam Paser Utara	10	5	4	1	13	6.197,07	-	-	1	2.515,05	3	1.163,16	6	2	1.400,46	-	-	1	1.118,40	-	-	-
6	329	Kota Balikpapan	6	2	2	2	10	4.234,22	4	1.445,38	-	-	3	2.788,84	3	-	-	-	-	-	-	146,23	-	41,11
7	330	Kota Bontang	13	6	3	4	12	744,82	-	-	-	-	4	744,82	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	331	Kota Tarakan	11	6	1	4	5	1.094,39	-	-	-	-	1	106,23	2	1	538,34	1	449,82	-	-	-	-	-
24	**Prov. Sulawesi Utara**		**153**	**60**	**60**	**33**	**312**	**70.235,05**	**128**	**31.755,47**	**7**	**8.779,40**	**37**	**11.180,15**	**105**	**20**	**9.654,13**	**-**	**-**	**15**	**8.865,90**	**2.949,90**	**-**	**637,32**
1	332	Prov. Sulawesi Utara	7	3	4	-	29	7.097,94	8	1.512,10	1	1.510,10	5	3.311,58	12	1	209,79	-	-	2	554,37	272,49	-	-
2	333	Kab. Bolaang Mongondow	12	4	6	2	21	9.326,28	9	6.647,76	1	1.110,64	1	797,08	8	2	770,80	-	-	-	-	-	-	-
3	334	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	15	3	8	4	34	5.498,32	14	2.798,93	-	-	4	2.008,43	13	2	672,46	-	-	1	18,50	19,81	-	-
4	335	Kab. Bolaang Mongondow Timur	16	8	6	2	31	6.225,23	15	3.848,98	1	672,81	2	559,40	11	1	656,18	-	-	1	487,86	1.657,78	-	-
5	336	Kab. Bolaang Mongondow Utara	15	5	6	4	30	5.660,26	12	2.346,77	-	-	3	748,28	8	5	2.472,13	-	-	2	93,08	-	-	1,30

Halaman 17 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	337	Kab. Kep. Sangihe	14	7	2	5	15	6.054,14	4	1.880,97	2	4.024,65	1	148,52	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	338	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	6	1	5	-	12	941,37	3	198,19	-	-	2	500,18	6	-	-	-	-	1	243,00	173,88	-	499,50
8	339	Kab. Kep. Talaud	11	6	3	2	42	7.215,39	21	4.317,52	1	1.461,20	9	1.133,17	9	-	-	-	-	2	303,50	133,80	-	43,81
9	340	Kab. Minahasa	11	2	6	3	18	1.176,67	4	64,27	-	-	5	1.008,14	8	1	104,26	-	-	-	-	35,40	-	4,09
10	341	Kab. Minahasa Selatan	27	11	9	7	33	6.852,36	14	3.294,83	-	-	3	447,21	10	3	1.867,22	-	-	3	1.243,10	44,62	-	88,62
11	342	Kota Bitung	3	1	1	1	4	2.149,72	1	531,72	-	-	-	-	-	2	1.024,90	-	-	1	593,10	531,72	-	-
12	343	Kota Kotamobagu	7	2	2	3	17	8.753,88	9	1.548,10	-	-	-	-	3	3	1.876,39	-	-	2	5.329,39	75,65	-	-
13	344	Kota Tomohon	9	7	2	-	26	3.283,49	14	2.765,33	1	-	2	518,16	9	-	-	-	-	-	-	4,75	-	-
25	**Prov. Sulawesi Tengah**		**68**	**29**	**22**	**17**	**128**	**32.255,11**	**51**	**11.981,95**	**6**	**4.789,21**	**44**	**11.493,70**	**21**	**2**	**405,00**	**-**	**-**	**4**	**3.585,25**	**2.198,06**	**-**	**977,19**
1	345	Prov. Sulawesi Tengah	6	4	-	2	15	4.135,37	7	1.086,48	1	1.218,63	5	1.830,26	2	-	-	-	-	-	-	8,91	-	9,32
2	346	Kab. Banggai	2	1	-	1	12	5.750,97	7	2.263,48	-	-	2	3.487,49	3	-	-	-	-	-	-	1.036,29	-	-
3	347	Kab. Banggai Kepulauan	5	2	3	-	11	2.263,18	3	310,00	1	1.232,73	6	720,45	1	-	-	-	-	-	-	37,26	-	96,94
4	348	Kab. Buol	11	3	4	4	11	2.849,24	2	206,03	-	-	3	1.424,05	5	-	-	-	-	1	1.219,16	11,28	-	50,95
5	349	Kab. Donggala	5	3	1	1	10	2.519,42	4	727,06	1	1,00	3	919,97	-	1	-	-	-	1	871,39	620,94	-	590,11
6	350	Kab. Morowali	5	2	2	1	14	1.918,86	7	1.504,58	1	224,19	5	190,09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	351	Kab. Parigi Moutong	2	2	-	-	6	2.988,67	4	2.860,39	-	-	2	128,28	-	-	-	-	-	-	-	4,24	-	-
8	352	Kab. Poso	7	3	2	2	8	2.304,32	1	79,48	-	-	4	1.567,80	1	1	405,00	-	-	1	252,04	79,48	-	13,45
9	353	Kab. Sigi	8	2	3	3	12	2.597,00	7	944,76	1	62,84	2	346,74	1	-	-	-	-	1	1.242,66	12,92	-	6,69
10	354	Kab. Tojo Una-Una	4	2	1	1	9	3.340,35	3	752,09	1	2.049,82	4	538,44	1	-	-	-	-	-	-	187,05	-	196,38
11	355	Kab. Toli-Toli	5	3	1	1	10	900,76	4	786,44	-	-	3	114,32	3	-	-	-	-	-	-	20,05	-	13,35
12	356	Kota Palu	8	2	5	1	10	686,97	2	461,16	-	-	5	225,81	3	-	-	-	-	-	-	179,64	-	-
26	**Prov. Sulawesi Selatan**		**205**	**72**	**86**	**47**	**313**	**203.239,62**	**98**	**26.329,49**	**13**	**6.875,27**	**59**	**31.502,91**	**113**	**16**	**7.396,14**	**-**	**-**	**14**	**131.135,81**	**11.852,90**	**-**	**4.522,55**
1	357	Prov. Sulawesi Selatan	2	1	1	-	14	3.229,51	3	3.151,77	1	-	3	77,74	7	-	-	-	-	-	-	3.151,77	-	50,59

Halaman 18 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	358	Kab. Bantaeng	10	3	2	5	9	1.471,64	3	1.333,36	1	-	2	83,67	2	1	54,61	-	-	-	-	116,37	-	24,47
3	359	Kab. Barru	12	2	7	3	16	726,69	4	707,28	-	-	2	19,41	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	360	Kab. Bone	8	2	5	1	10	62.925,96	2	375,21	-	-	1	163,58	5	-	-	-	-	2	62.387,17	152,19	-	5,31
5	361	Kab. Bulukumba	10	2	4	4	9	1.197,43	1	40,39	1	949,96	1	207,08	6	-	-	-	-	-	-	-	-	207,11
6	362	Kab. Enrekang	4	3	-	1	8	6.607,21	5	1.808,87	-	-	2	4.798,34	1	-	-	-	-	-	-	1.236,66	-	3,55
7	363	Kab. Gowa	6	1	-	5	6	759,45	3	745,45	-	-	1	14,00	2	-	-	-	-	-	-	490,18	-	14,00
8	364	Kab. Jeneponto	12	7	4	1	16	2.935,60	6	833,17	2	-	3	98,65	2	2	1.651,99	-	-	1	351,79	-	-	590,28
9	365	Kab. Kep. Selayar	11	6	4	1	14	22.057,07	3	277,82	-	-	2	176,57	6	1	26,30	-	-	2	21.576,38	-	-	-
10	366	Kab. Luwu	12	3	7	2	27	9.206,15	15	6.206,75	1	508,62	4	678,19	4	3	1.812,59	-	-	-	-	1.345,06	-	-
11	367	Kab. Luwu Timur	2	-	2	-	10	36.982,44	2	254,80	1	1.618,80	1	13.120,83	4	-	-	-	-	2	21.988,01	254,80	-	-
12	368	Kab. Luwu Utara	18	2	10	6	13	8.496,27	5	1.075,15	-	-	1	34,74	5	-	-	-	-	2	7.386,38	418,08	-	2.137,81
13	369	Kab. Maros	12	6	4	2	22	20.146,36	8	674,67	-	-	4	2.421,61	9	-	-	-	-	1	17.050,08	243,12	-	545,20
14	370	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	8	4	3	1	6	637,42	-	-	-	-	4	637,42	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	371	Kab. Pinrang	8	3	4	1	10	1.751,82	5	1.363,20	-	-	2	388,62	3	-	-	-	-	-	-	542,18	-	224,62
16	372	Kab. Sidenreng Rappang	7	3	2	2	12	1.776,02	4	764,33	-	-	2	430,76	3	1	547,93	-	-	2	33,00	592,33	-	180,83
17	373	Kab. Sinjai	11	3	7	1	16	1.509,77	4	584,46	2	291,27	1	12,39	8	1	621,65	-	-	-	-	230,95	-	12,39
18	374	Kab. Soppeng	8	4	3	1	9	4.574,36	1	678,75	2	3.506,62	3	388,99	3	-	-	-	-	-	-	553,43	-	29,90
19	375	Kab. Tana Toraja	8	2	3	3	21	3.962,05	3	354,99	1	-	6	3.521,69	9	2	85,37	-	-	-	-	245,70	-	380,05
20	376	Kab. Toraja Utara	7	3	2	2	12	837,38	3	364,48	1	-	2	201,70	5	1	271,20	-	-	-	-	-	-	-
21	377	Kab. Wajo	10	3	4	3	13	3.372,66	4	2.264,61	-	-	1	975,98	5	2	132,07	-	-	1	-	1.896,21	-	-
22	378	Kota Makassar	9	4	4	1	18	3.119,27	5	809,58	-	-	5	163,44	7	1	2.146,25	-	-	-	-	383,87	-	116,44
23	379	Kota Palopo	10	5	4	1	22	4.957,09	9	1.660,40	-	-	6	2.887,51	5	1	46,18	-	-	1	363,00	-	-	-

Halaman 19 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
27	**Prov. Sulawesi Tenggara**		**129**	**55**	**60**	**14**	**238**	**644.660,22**	**61**	**116.052,99**	**10**	**488.476,48**	**47**	**17.138,03**	**106**	**9**	**5.916,58**	**-**	**-**	**5**	**17.076,14**	**323,07**	**-**	**1.021,55**
1	380	Prov. Sulawesi Tenggara	19	6	12	1	30	90.906,73	11	85.571,07	-	-	6	903,37	11	1	4.344,00	-	-	1	88,29	-	-	197,98
2	381	Kab. Bombana	9	7	2	-	22	27.068,28	9	14.789,56	-	-	4	329,97	8	-	-	-	-	1	11.948,75	-	-	-
3	382	Kab. Buton	11	4	7	-	15	3.728,92	4	267,67	1	1.937,50	3	1.434,74	6	1	89,01	-	-	-	-	-	-	-
4	383	Kab. Buton Utara	13	9	3	1	21	5.858,60	4	352,45	-	-	5	5.487,20	10	1	18,95	-	-	1	-	12,50	-	-
5	384	Kab. Kolaka	7	2	4	1	17	3.007,85	3	479,56	-	-	2	1.750,79	11	1	777,50	-	-	-	-	19,28	-	-
6	385	Kab. Kolaka Utara	7	5	2	-	25	4.268,48	9	3.877,95	1	-	3	390,53	12	-	-	-	-	-	-	-	-	47,49
7	386	Kab. Konawe	13	5	4	4	23	5.772,72	3	1.410,83	1	1.803,30	7	2.125,79	10	2	432,80	-	-	-	-	-	-	19,30
8	387	Kab. Konawe Selatan	7	3	4	-	18	4.898,86	4	1.501,64	2	3.038,61	2	104,29	7	3	254,32	-	-	-	-	-	-	-
9	388	Kab. Muna	17	6	7	4	19	2.429,35	4	91,34	1	302,11	6	1.154,17	7	-	-	-	-	1	881,73	8,01	-	-
10	389	Kab. Wakatobi	15	5	7	3	22	114.143,94	4	838,74	2	108.675,81	5	472,02	10	-	-	-	-	1	4.157,37	82,08	-	4,25
11	390	Kota Bau-Bau	10	3	7	-	18	10.083,62	6	6.872,18	1	1.026,94	3	2.184,50	8	-	-	-	-	-	-	201,20	-	-
12	391	Kota Kendari	1	-	1	-	8	372.492,87	-	-	1	371.692,21	1	800,66	6	-	-	-	-	-	-	-	-	752,53
28	**Prov. Gorontalo**		**71**	**26**	**35**	**10**	**112**	**30.308,35**	**39**	**14.033,80**	**12**	**8.249,16**	**9**	**814,39**	**33**	**14**	**2.594,27**	**-**	**-**	**5**	**4.616,73**	**42,17**	**-**	**-**
1	392	Prov. Gorontalo	10	4	6	-	21	2.265,85	9	448,05	2	502,03	1	20,43	3	4	911,44	-	-	2	383,90	-	-	-
2	393	Kab. Boalemo	12	4	6	2	15	2.472,95	6	1.139,36	1	1.083,65	1	97,94	6	-	-	-	-	1	152,00	-	-	-
3	394	Kab. Bone Bolango	10	2	6	2	23	2.556,62	13	1.290,02	1	397,83	2	178,52	4	2	660,25	-	-	1	30,00	-	-	-
4	395	Kab. Gorontalo	9	3	5	1	21	10.490,50	3	6.398,44	6	3.674,18	1	37,30	7	4	380,58	-	-	-	-	30,00	-	-
5	396	Kab. Gorontalo Utara	12	3	6	3	10	1.106,08	2	444,84	-	-	1	264,24	5	2	397,00	-	-	-	-	-	-	-
6	397	Kab. Pohuwato	8	4	4	-	7	4.190,75	2	2.151,51	1	2.039,24	-	-	4	-	-	-	-	-	-	12,17	-	-
7	398	Kota Gorontalo	10	6	2	2	15	7.225,60	4	2.161,58	1	552,23	3	215,96	4	2	245,00	-	-	1	4.050,83	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
29	**Prov. Sulawesi Barat**		**44**	**18**	**17**	**9**	**103**	**21.748,33**	**49**	**16.700,29**	**-**	**-**	**17**	**2.520,64**	**29**	**6**	**1.913,50**	**-**	**-**	**2**	**613,90**	**2.443,22**	**-**	**220,08**
1	399	Prov. Sulawesi Barat	6	3	2	1	31	12.500,37	17	11.192,58	-	-	3	601,25	8	2	706,54	-	-	1	-	1.414,25	-	64,98
2	400	Kab. Majene	16	8	3	5	22	3.435,43	9	1.812,22	-	-	5	546,89	6	2	1.076,32	-	-	-	-	383,99	-	-
3	401	Kab. Mamuju	12	3	8	1	24	2.151,87	12	1.408,45	-	-	5	743,42	7	-	-	-	-	-	-	109,40	-	155,10
4	402	Kab. Mamuju Utara	10	4	4	2	26	3.660,66	11	2.287,04	-	-	4	629,08	8	2	130,64	-	-	1	613,90	535,58	-	-
30	**Prov. Maluku**		**25**	**9**	**12**	**4**	**30**	**65.917,10**	**11**	**5.391,55**	**-**	**-**	**2**	**628,29**	**12**	**2**	**18.489,26**	**-**	**-**	**3**	**41.408,00**	**-**	**-**	**-**
1	403	Kab. Maluku Tenggara Barat	25	9	12	4	30	65.917,10	11	5.391,55	-	-	2	628,29	12	2	18.489,26	-	-	3	41.408,00	-	-	-
31	**Prov. Maluku Utara**		**139**	**76**	**34**	**29**	**147**	**77.233,93**	**39**	**25.651,78**	**12**	**18.292,60**	**25**	**20.356,40**	**60**	**6**	**2.226,06**	**-**	**-**	**5**	**10.707,09**	**1.919,38**	**-**	**35,30**
1	404	Prov. Maluku Utara	23	10	6	7	37	18.156,98	15	5.185,69	1	104,00	5	12.717,29	15	-	-	-	-	1	150,00	1.910,15	-	-
2	405	Kab. Halmahera Barat	16	11	3	2	16	1.114,06	3	202,43	-	-	1	94,33	10	2	817,30	-	-	-	-	-	-	-
3	406	Kab. Halmahera Selatan	19	8	9	2	27	19.521,57	8	729,46	3	9.096,08	8	4.552,55	7	-	-	-	-	1	5.143,48	-	-	-
4	407	Kab. Halmahera Tengah	33	18	7	8	21	24.487,66	3	17.526,69	3	4.289,76	4	2.018,99	10	1	652,22	-	-	-	-	-	-	-
5	408	Kab. Halmahera Utara	33	21	3	9	17	3.676,67	5	1.433,09	2	1.542,87	2	670,71	7	1	30,00	-	-	-	-	-	-	-
6	409	Kota Tidore Kepulauan	15	8	6	1	29	10.276,99	5	574,42	3	3.259,89	5	302,53	11	2	726,54	-	-	3	5.413,61	9,23	-	35,30
32	**Prov. Papua**		**130**	**48**	**49**	**33**	**206**	**239.181,68**	**68**	**55.747,56**	**19**	**27.154,39**	**28**	**14.369,43**	**70**	**8**	**64.162,92**	**-**	**-**	**13**	**77.747,38**	**663,30**	**-**	**104,22**
1	410	Prov. Papua	30	8	10	12	25	115.156,52	12	25.878,44	3	2.574,40	1	949,89	7	1	57.151,48	-	-	1	28.602,31	-	-	-
2	411	Kab. Asmat	4	3	-	1	16	5.536,80	5	923,13	2	3.271,77	3	1.172,40	5	-	-	-	-	1	169,50	-	-	-
3	412	Kab. Biak Numfor	20	7	7	6	15	4.046,08	4	592,12	1	2.373,72	1	438,60	8	-	-	-	-	1	641,64	-	-	-
4	413	Kab. Jayapura	11	3	5	3	23	21.550,96	8	9.272,03	1	7.261,10	4	1.884,02	6	2	368,34	-	-	2	2.765,47	-	-	-
5	414	Kab. Jayawijaya	6	3	3	-	20	27.445,39	6	1.927,12	3	3.834,99	2	1.106,92	6	2	1.849,99	-	-	1	18.726,37	450,00	-	-
6	415	Kab. Kep. Yapen	6	4	2	-	13	5.253,16	5	1.559,83	1	-	3	3.693,33	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 21 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	416	Kab. Mappi	8	2	3	3	11	17.357,89	1	3.264,15	1	472,39	3	869,14	5	-	-	-	-	1	12.752,21	-	-	-
8	417	Kab. Mimika	6	1	2	3	24	12.207,63	6	1.188,29	2	842,14	3	1.368,29	9	1	767,04	-	-	3	8.041,87	-	-	-
9	418	Kab. Paniai	10	4	5	1	14	10.685,78	5	5.430,88	2	5.007,31	1	247,59	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	419	Kab. Pegunungan Bintang	10	5	3	2	16	7.293,07	6	4.513,26	1	1.015,75	3	818,16	5	-	-	-	-	1	945,90	213,30	-	104,22
11	420	Kab. Puncak Jaya	3	2	1	-	7	1.523,50	3	353,06	-	-	1	1.170,44	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	421	Kota Jayapura	16	6	8	2	22	11.124,90	7	845,25	2	500,82	3	650,65	6	2	4.026,07	-	-	2	5.102,11	-	-	-
33	**Prov. Papua Barat**		**44**	**17**	**19**	**8**	**72**	**19.124,58**	**24**	**12.820,00**	**4**	**3.278,69**	**15**	**3.025,89**	**29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.479,57**	**10,00**	**41,16**
1	422	Kab. Kaimana	13	4	7	2	19	1.866,14	7	1.218,29	-	-	4	647,85	8	-	-	-	-	-	-	15,20	-	-
2	423	Kab. Raja Ampat	5	1	3	1	20	7.655,18	9	4.170,01	2	3.008,96	2	476,21	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	424	Kab. Sorong	12	6	4	2	11	1.813,21	2	405,67	-	-	4	1.407,54	5	-	-	-	-	-	-	350,83	-	41,16
4	425	Kab. Sorong Selatan	5	2	2	1	8	2.516,76	3	1.920,19	1	132,00	3	464,57	1	-	-	-	-	-	-	1.042,80	10,00	-
5	426	Kota Sorong	9	4	3	2	14	5.273,29	3	5.105,84	1	137,73	2	29,72	8	-	-	-	-	-	-	70,74	-	-
Total			**4.369**	**1.791**	**1.739**	**839**	**5.776**	**3.783.829,62**	**1.609**	**865.374,94**	**354**	**1.603.921,28**	**945**	**411.957,56**	**2.318**	**231**	**183.958,62**	**2**	**537,49**	**317**	**718.079,73**	**68.852,83**	**505,62**	**24.293,10**
								SGD 3.57				**-**	**-**	**SGD 3.57**										
			Jumlah Rupiah					**3.783.861,64**						**411.985,78**										

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 12

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**9**	**17,65**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	3	
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**	**14**	**27,45**
1	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5	
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**28**	**54,90**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	18	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	9	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**51**	**100**

Lampiran 13

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Negara/Perusahaan**	**8**	**14,28**	**25.215,86**	**18,74**
1	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1		24.256,13	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1		107,22	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3		301,85	
4	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		-	
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1		445,93	
6	Lain-lain	1		104,73	
II	**Potensi Kerugian Negara/Perusahaan**	**1**	**1,82**	**11,67**	**0,01**
1	Lain-lain	1		11,67	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**8**	**14,29**	**108.700,53**	**80,78**
				USD 128.57	
	Jumlah Rupiah			**109.919,37**	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	2		3.272,62	
				USD 128.57	
	Jumlah Rupiah			4.491,46	
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara atau perusahaan milik negara	6		105.427,91	
IV	**Administrasi**	**25**	**44,63**	**-**	**-**
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1			
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3			
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1			
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	4			
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	5			
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	8			
7	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	2			
8	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1			
V	**Ketidakhematan**	**6**	**10,70**	**629,99**	**0,47**
				USD 154.27	
	Jumlah Rupiah			**2.092,47**	
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	6		629,99	
				USD 154.27	
	Jumlah Rupiah			2.092,47	
VI	**Ketidakefektifan**	**8**	**14,28**	**1,27**	**0,00**
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2		-	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4		1,27	
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1		-	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	**56**	**100**	**134.559,32**	**100**
				USD **282.84**	
	Jumlah Rupiah			**137.240,64**	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 14

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Total	Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Negara/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kekurangan Penerimaan
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jamsostek	5	-	1	4	5	642,26	-	-	-	-	1	642,26	4	-	-	-	-	-
2	Bank Indonesia	6	-	3	3	8	44.708,65	1	24.256,13	-	-	1	20.452,52	6	-	-	-	-	-
3	Lembaga Penjamin Simpanan	12	1	6	5	5	84.457,46	1	445,93	-	-	2	84.011,53	2	-	-	-	-	83.812,03
4	Penyelenggara Ibadah Haji	21	6	3	12	21	4.504,32	2	285,84	-	-	3	3.587,22	7	5	629,99	4	1,27	316,91
							USD 128.57						USD 128.57						
5	Laporan Keuangan Loan ADB 2575-INO Pada Rural Infrastructure Support To The PNPM Mandiri Project II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011	4	1	-	3	11	239,63	4	227,96	1	11,67	-	-	3	-	-	3	-	-
6	Laporan Keuangan Loan ADB No. 2654-INO Pada Metropolitan Sanitation Management And Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011	3	1	1	1	6	7,00	-	-	-	-	1	7,00	3	1	-	1	-	-
							USD 154.27								-	USD 154.27	-		
Total		**51**	**9**	**14**	**28**	**56**	**134.559,32**	**8**	**25.215,86**	**1**	**11,67**	**8**	**108.700,53**	**25**	**6**	**629,99**	**8**	**1,27**	**84.128,94**
							USD 282.84						**USD 128.57**			**USD 154.27**			
		Jumlah Rupiah					**137.240,64**		**25.215,86**		**11,67**		**109.919,37**			**2.092,47**		**1,27**	**84.128,94**

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Halaman 1 - Lampiran 15

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I 2012

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN					
I	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat				
	1	1	Pemerintah Pusat	1	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011
				1	
II	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga				
	1	2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2011
	2	3	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2011
	3	4	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2011
	4	5	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia 2011
	5	6	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2011
	6	7	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
	7	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2011
	8	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2011
	9	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2011
	10	11	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2011
	11	12	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2011
	12	13	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2011
	13	14	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2011
	14	15	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2011
	15	16	Kementerian Pendidikan Nasional	1	LK Kementerian Pendidikan Nasional 2011
	16	17	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2011
	17	18	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2011
	18	19	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011
	19	20	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2011
	20	21	Kementerian Kehutanan	1	LK Kementerian Kehutanan Tahun 2011
	21	22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
	22	23	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011
	23	24	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tahun 2011
	24	25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2011
	25	26	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2011
	26	27	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	LK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2011
	27	28	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2011
	28	29	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1	LK Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2011
	29	30	Kementerian Lingkungan Hidup	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2011
	30	31	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	LK Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011
	31	32	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011
	32	33	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2011
	33	34	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2011

Halaman 2 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	34	35	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2011
	35	36	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2011
	36	37	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2011
	37	38	Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/Bappenas	1	LK Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional/ Bappenas Tahun 2011
	38	39	Badan Pertanahan Nasional	1	LK Badan Pertanahan Nasional Tahun 2011
	39	40	Perpustakaan Nasional	1	LK Perpustakaan Nasional Tahun 2011
	40	41	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011
	41	42	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2011
	42	43	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011
	43	44	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2011
	44	45	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2011
	45	46	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2011
	46	47	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	1	LK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2011
	47	48	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2011
	48	49	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	LK Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Tahun 2011
	49	50	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2011
	50	51	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2011
	51	52	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2011
	52	53	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2011
	53	54	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2011
	54	55	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2011
	55	56	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2011
	56	57	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2011
	57	58	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	LK Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Tahun 2011
	58	59	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2011
	59	60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2011
	60	61	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2011
	61	62	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2011
	62	63	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2011
	63	64	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2011
	64	65	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2011
	65	66	Kementerian Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
	66	67	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2011
	67	68	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
	68	69	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2011
	69	70	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2011
	70	71	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2011
	71	72	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011
	72	73	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2011

Halaman 3 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	73	74	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2011
	74	75	Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2011
	75	76	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2011
	76	77	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2011
	77	78	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	LK Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu TA 2011
	78	79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011
	79	80	Bendahara Umum Negara (BUN)	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2011
	80	81	BA 999.01 - Pengelolaan Utang	1	LK BA 999.01 - Pengelolaan Utang Tahun 2011
	81	82	BA 999.02 - Hibah	1	LK BA 999.02 - Hibah Tahun 2011
	82	83	BA 999.03 - Investasi Pemerintah	1	LK BA 999.03 - Investasi Pemerintah Tahun 2011
	83	84	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	1	LK BA 999.04 - Penerusan Pinjaman Tahun 2011
	84	85	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	1	LK BA 999.05 - Transfer ke Daerah Tahun 2011
	85	86	BA 999.07 - Belanja Subsidi	1	LK BA 999.07 - Belanja Subsidi Tahun 2011
	86	87	BA 999.08 - Belanja Lainnya	1	LK BA 999.08 - Belanja Lainnya Tahun 2011
	87	88	Kementerian Pertanian	1	LK BA 999.07 Kementerian Pertanian Tahun 2011
		89		1	LK BA 999.08 Kementerian Pertanian Tahun 2011
	88	90	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK BA 999.03 Tahun 2011 Pada Kementerian Pekerjaan Umum Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur
		91		1	LK BA 999.08 Tahun 2011 Pada Kementerian Pekerjaan Umum Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur
				90	
III	**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**				
	1	**92**	**Provinsi Aceh**	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011
		93		1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011
		94		1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011
		95		1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2011
		96		1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011
		97		1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2011
		98		1	LKPD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2011
		99		1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011
		100		1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011
		101		1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011
		102		1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011
		103		1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011
		104		1	LKPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011
		105		1	LKPD Kabupaten Singkil Tahun 2011
		106		1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2011
		107		1	LKPD Kota Langsa Tahun 2011
		108		1	LKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2011
		109		1	LKPD Kota Sabang Tahun 2011
		110		1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2011

Halaman 4 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	2	111	**Provinsi Sumatera Utara**	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011
		112		1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2011
		113		1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2011
		114		1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011
		115		1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011
		116		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011
		117		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011
		118		1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011
		119		1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011
		120		1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011
		121		1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2011
		122		1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011
		123		1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2011
		124		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011
		125		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011
		126		1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2011
		127		1	LKPD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011
		128		1	LKPD Kota Binjai Tahun 2011
		129		1	LKPD Kota Medan Tahun 2011
		130		1	LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2011
		131		1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2011
		132		1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2011
		133		1	LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2011
		134		1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2011
	3	135	**Provinsi Sumatera Barat**	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
		136		1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2011
		137		1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011
		138		1	LKPD Kabupaten Kep. Mentawai. Tahun 2011
		139		1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
		140		1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011
		141		1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2011
		142		1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011
		143		1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011
		144		1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2011
		145		1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2011
		146		1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011
		147		1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2011
		148		1	LKPD Kota Padang Tahun 2011
		149		1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2011
		150		1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2011

Halaman 5 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		151		1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2011
		152		1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2011
		153		1	LKPD Kota Solok Tahun 2011
	4	**154**	**Provinsi Riau**	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2011
		155		1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2011
		156		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011
		157		1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2011
		158		1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011
		159		1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011
		160		1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011
		161		1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011
		162		1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2011
		163		1	LKPD Kota Dumai Tahun 2011
		164		1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2011
	5	**165**	**Provinsi Jambi**	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2011
		166		1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2011
		167		1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2011
		168		1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2011
		169		1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2011
		170		1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2011
		171		1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011
		172		1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011
		173		1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2011
		174		1	LKPD Kota Jambi Tahun 2011
		175		1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2011
	6	**176**	**Provinsi Sumatera Selatan**	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
		177		1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2011
		178		1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2011
		179		1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2011
		180		1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
		181		1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011
		182		1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011
		183		1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011
		184		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011
		185		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011
		186		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011
		187		1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011
		188		1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2011
		189		1	LKPD Kota Palembang Tahun 2011
		190		1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2011

Halaman 6 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		191		1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2011
	7	**192**	**Provinsi Bengkulu**	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2011
		193		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011
		194		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011
		195		1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011
		196		1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2011
		197		1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2011
		198		1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2011
		199		1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2011
		200		1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011
		201		1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2011
		202		1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2011
	8	**203**	**Provinsi Lampung**	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2011
		204		1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011
		205		1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011
		206		1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011
		207		1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011
		208		1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011
		209		1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2011
		210		1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2011
		211		1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
		212		1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2011
		213		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011
		214		1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011
		215		1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2011
		216		1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2011
		217		1	LKPD Kota Metro Tahun 2011
	9	**218**	**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011
		219		1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2011
		220		1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011
		221		1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011
		222		1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011
		223		1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2011
		224		1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011
		225		1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2011
	10	**226**	**Provinsi Kepulauan Riau**	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011
		227		1	LKPD Kabupaten Bintan TA 2011
		228		1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2011
		229		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011
		230		1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2011

Halaman 7 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		231		1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2011
		232		1	LKPD Kota Batam Tahun 2011
		233		1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2011
	11	**234**	**Provinsi DKI Jakarta**	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011
	12	**235**	**Provinsi Jawa Barat**	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011
		236		1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2011
		237		1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011
		238		1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2011
		239		1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2011
		240		1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2011
		241		1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2011
		242		1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2011
		243		1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2011
		244		1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2011
		245		1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011
		246		1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2011
		247		1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2011
		248		1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2011
		249		1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2011
		250		1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2011
		251		1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2011
		252		1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011
		253		1	LKPD Kota Bandung Tahun 2011
		254		1	LKPD Kota Banjar Tahun 2011
		255		1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2011
		256		1	LKPD Kota Bogor Tahun 2011
		257		1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2011
		258		1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2011
		259		1	LKPD Kota Depok Tahun 2011
		260		1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2011
		261		1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2011
	13	**262**	**Provinsi Jawa Tengah**	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
		263		1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
		264		1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2011
		265		1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2011
		266		1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2011
		267		1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2011
		268		1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2011
		269		1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2011
		270		1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2011

Halaman 8 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		271		1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2011
		272		1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2011
		273		1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2011
		274		1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2011
		275		1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2011
		276		1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2011
		277		1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2011
		278		1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2011
		279		1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2011
		280		1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011
		281		1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2011
		282		1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2011
		283		1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2011
		284		1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2011
		285		1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011
		286		1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2011
		287		1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
		288		1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2011
		289		1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2011
		290		1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011
		291		1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011
		292		1	LKPD Kota Magelang Tahun 2011
		293		1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2011
		294		1	LKPD Kota Semarang Tahun 2011
		295		1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2011
		296		1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2011
		297		1	LKPD Kota Tegal Tahun 2011
	14	**298**	**Provinsi D I Yogyakarta**	1	LKPD Provinsi DIY Tahun 2011
		299		1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2011
		300		1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2011
		301		1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011
		302		1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2011
		303		1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011
	15	**304**	**Provinsi Jawa Timur**	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011
		305		1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2011
		306		1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
		307		1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2011
		308		1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011
		309		1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2011
		310		1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2011

Halaman 9 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		311		1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2011
		312		1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2011
		313		1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2011
		314		1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2011
		315		1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2011
		316		1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2011
		317		1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2011
		318		1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2011
		319		1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011
		320		1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2011
		321		1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2011
		322		1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2011
		323		1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2011
		324		1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2011
		325		1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011
		326		1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2011
		327		1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2011
		328		1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
		329		1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2011
		330		1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2011
		331		1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2011
		332		1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2011
		333		1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2011
		334		1	LKPD Kota Batu Tahun 2011
		335		1	LKPD Kota Blitar Tahun 2011
		336		1	LKPD Kota Kediri Tahun 2011
		337		1	LKPD Kota Madiun Tahun 2011
		338		1	LKPD Kota Malang Tahun 2011
		339		1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2011
		340		1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2011
		341		1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2011
		342		1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2011
	16	**343**	**Provinsi Banten**	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2011
		344		1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2011
		345		1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011
		346		1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2011
		347		1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2011
		348		1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2011
		349		1	LKPD Kota Serang Tahun 2011
		350		1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2011

Halaman 10 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		351		1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2011
	17	**352**	**Provinsi Bali**	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2011
		353		1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2011
		354		1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2011
		355		1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2011
		356		1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2011
		357		1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2011
		358		1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2011
		359		1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2011
		360		1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2011
		361		1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2011
	18	**362**	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011
		363		1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2011
		364		1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011
		365		1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011
		366		1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011
		367		1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011
		368		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011
		369		1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011
		370		1	LKPD Kota Bima Tahun 2011
		371		1	LKPD Kota Mataram Tahun 2011
	19	**372**	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011
		373		1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2011
		374		1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2011
		375		1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2011
		376		1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2011
		377		1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011
		378		1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011
		379		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011
		380		1	LKPD Kota Kupang Tahun 2011
	20	**381**	**Provinsi Kalimantan Barat**	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011
		382		1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011
		383		1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011
		384		1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2011
		385		1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011
		386		1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011
		387		1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2011
		388		1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2011
		389		1	LKPD Kabupaten Pontianak Tahun 2011
		390		1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2011

Halaman 11 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		391		1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2011
		392		1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2011
		393		1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2011
		394		1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2011
		395		1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2011
	21	**396**	**Provinsi Kalimantan Tengah**	1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011
		397		1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011
		398		1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2011
		399		1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2011
		400		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011
		401		1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011
		402		1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2011
		403		1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011
		404		1	LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2011
	22	**405**	**Provinsi Kalimantan Selatan**	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011
		406		1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011
		407		1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2011
		408		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011
		409		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011
		410		1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011
		411		1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011
		412		1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011
		413		1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2011
		414		1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2011
	23	**415**	**Provinsi Kalimantan Timur**	1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2011
		416		1	LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011
		417		1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2011
		418		1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2011
		419		1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011
		420		1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2011
		421		1	LKPD Kota Bontang Tahun 2011
		422		1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2011
	24	**423**	**Provinsi Sulawesi Utara**	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011
		424		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011
		425		1	LKPD Kabupaten Boolang Mongondow Utara Tahun 2011
		426		1	LKPD Kabupaten Boolang Mongondow Selatan Tahun 2011
		427		1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2011
		428		1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2011
		429		1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011
		430		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011

Halaman 12 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		431		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011
		432		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011
		433		1	LKPD Kota Bitung Tahun 2011
		434		1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2011
		435		1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2011
	25	**436**	**Provinsi Sulawesi Tengah**	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011
		437		1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2011
		438		1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011
		439		1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2011
		440		1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2011
		441		1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2011
		442		1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2011
		443		1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2011
		444		1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2011
		445		1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011
		446		1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2011
		447		1	LKPD Kota Palu Tahun 2011
	26	**448**	**Provinsi Sulawesi Selatan**	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
		449		1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2011
		450		1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2011
		451		1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2011
		452		1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2011
		453		1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2011
		454		1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2011
		455		1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2011
		456		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011
		457		1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2011
		458		1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011
		459		1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011
		460		1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2011
		461		1	LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011
		462		1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2011
		463		1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011
		464		1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2011
		465		1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2011
		466		1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011
		467		1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011
		468		1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2011
		469		1	LKPD Kota Makassar Tahun 2011
		470		1	LKPD Kota Palopo Tahun 2011

Halaman 13 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	27	471	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011
		472		1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2011
		473		1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2011
		474		1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2011
		475		1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2011
		476		1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011
		477		1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2011
		478		1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011
		479		1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2011
		480		1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2011
		481		1	LKPD Kota Bau-Bau Tahun 2011
		482		1	LKPD Kota Kendari Tahun 2011
	28	483	**Provinsi Gorontalo**	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2011
		484		1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2011
		485		1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011
		486		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2011
		487		1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011
		488		1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2011
		489		1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2011
	29	490	**Provinsi Sulawesi Barat**	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011
		491		1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2011
		492		1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2011
		493		1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011
	30	494	**Provinsi Maluku**	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011
		495		1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010
		496		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2010
	31	497	**Provinsi Maluku Utara**	1	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2011
		498		1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011
		499		1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011
		500		1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011
		501		1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011
		502		1	LKPD Kota Tidore Tahun 2011
	32	503	**Provinsi Papua**	1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2011
		504		1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2011
		505		1	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2011
		506		1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2011
		507		1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011
		508		1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2011
		509		1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2011
		510		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2011

Halaman 14 - Lampiran 15

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
		511		1	LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2011
		512		1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2011
		513		1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011
		514		1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2011
		515		1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010
		516		1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2010
	33	**517**	**Provinsi Papua Barat**	1	LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2011
		518		1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011
		519		1	LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2011
		520		1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2011
		521		1	LKPD Kota Sorong Tahun 2011
				430	
IV	**Laporan Keuangan BUMN dan Badan Lainnya**				
	1	522	Kementerian Agama	1	LK Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 1432H/2011
	2	523	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2011
	3	524	Bank Indonesia	1	LK Bank Indonesia Tahun 2011
		525	Kementerian Pekerjaan Umum	1	LK *Loan* ADB 2575-INO Pada *Rural Infrastructure Support To The* PNPM Mandiri *Project* II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011
		526		1	LK *Loan* ADB No. 2654-INO Pada *Metropolitan Sanitation Management And Health Project* Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011
	4	527	PT Jamsostek	1	LK PT Jamsostek TB 2011
				6	
	Jumlah Pemeriksaan Keuangan			**527**	

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

Buku III
Pemeriksaan Kinerja

(Buku ke-3 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
DAFTAR LAMPIRAN		iv
BAB 1	Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja	1
BAB 2	Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2012	3
BAB 3	Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional	9
BAB 4	Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan dan TNI	21
BAB 5	Pemeriksaan Kinerja Lainnya	27
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM		35

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja

2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Kinerja

2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja

5.1. Perkembangan Posisi Keuangan dan Hasil Usaha Perusahaan pada PT Pelindo I

5.2. Perkembangan Posisi Keuangan dan Hasil Usaha Perusahaan pada PT Pelindo III

DAFTAR GAMBAR

1.1. Hubungan input, proses, output, dan outcome

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja

2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2012

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern.

Tujuan dan Konsep Pemeriksaan Kinerja

Tujuan dari pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas. Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat di dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja.

Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.

- **Ekonomi** berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.

- **Efisiensi** merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

- **Efektivitas** pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, output, proses, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- **Input** merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- **Proses** adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- **Output** adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- **Outcome** adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1. Hubungan input, proses, output, dan outcome

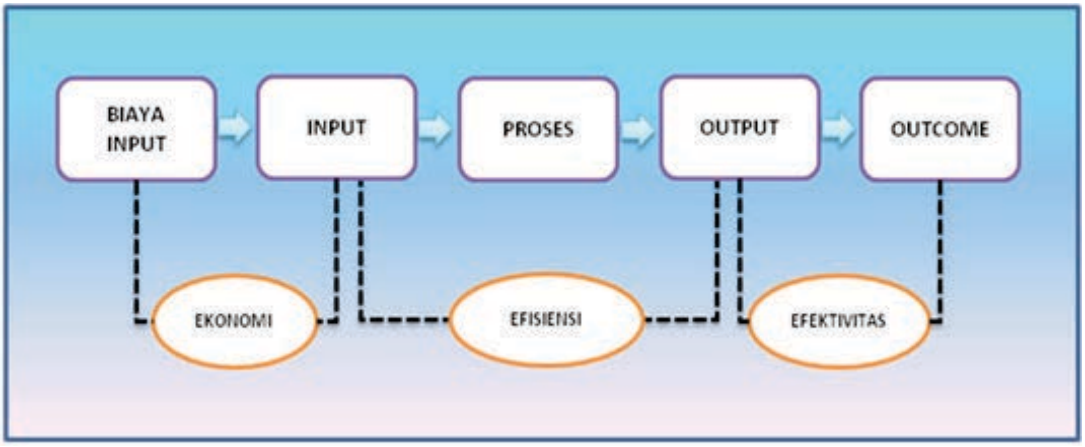

Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi dan pada akhirnya akan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan banyak pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2012

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 14 objek pemeriksaan, terdiri atas 9 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tema sebagai berikut:

- Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) Berbasis NIK Nasional;
- Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
- Pemeriksaan kinerja lainnya yang terdiri dari 3 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 objek pemeriksaan BUMN, dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMD.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; kelemahan sistem pengendalian intern (SPI); dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah **"kasus".** Namun istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya 80 kasus senilai Rp125.437,39 juta, yang terdiri atas 12 kasus ketidakekonomisan senilai Rp76.051,87 juta, 2 kasus ketidakefisienan senilai Rp29.766,27 juta, dan 66 kasus ketidakefektifan senilai Rp19.619,25 juta (Lampiran 1). Jumlah kasus dan nilai rupiah tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan Kinerja

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan:			
1	Ketidakekonomisan	12	76.051,87
2	Ketidakefisienan	2	29.766,27
3	Ketidakefektifan	66	19.619,25
	Jumlah	**80**	**125.437,39**

Hasil pemeriksaan kinerja pada IHPS I Tahun 2012, adalah sebagai berikut.

- Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 belum efektif, yaitu masih adanya kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dalam Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional; dan pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, di antaranya yaitu harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) bukan berdasarkan data harga pasar setempat yang diperoleh dari hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dan usulan HPS tersebut mengindikasikan hanya bersifat formalitas.

- Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI TA 2008, 2009, dan 2010 belum sepenuhnya efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik, transparan dan akuntabel, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam hal ini, masih ditemukan kelemahan sistem pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Kemhan dan TNI.

Pemeriksaan Kinerja Lainnya, yaitu:

- Kegiatan jasa pelayanan barang pada PT Pelindo I Cabang Pelabuhan Belawan dan *Belawan International Container Terminal* (BICT) di Medan, serta PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak di Surabaya Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 belum sepenuhnya efektif, efisien, dan ekonomis, yaitu sebagai berikut.

  - Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan jasa pelayanan barang, di antaranya pada PT Pelindo I, pengelolaan jasa penumpukan di lapangan penumpukan BICT belum optimal, yaitu adanya peti kemas yang telah berada di lapangan penumpukan lebih dari 10 hari *(longstay)* dan belum dibayar oleh pihak pemilik barang.

  - Kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dalam pengelolaan jasa pelayanan barang, di antaranya pada PT Pelindo III, waktu kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak sesuai standar dan jumlah jam istirahat melebihi ketentuan.

- Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi keekonomisan dalam pengelolaan jasa pelayanan barang, di antaranya pada PT Pelindo I, pengadaan *Harbour Mobile Crane* (HMC) untuk pengembangan bisnis di Batu Ampar tidak didukung dengan perencanaan yang memadai dan pengoperasian HMC oleh pihak ketiga mengakibatkan pemborosan senilai Rp4.955,67 juta dan USD67.56 ribu, serta PT Pelindo III, pemberian premi TKBM tidak didasarkan pada standar produktivitas bongkar muat dan pembayaran HIK tidak disesuaikan dengan jumlah penggunaan TKBM mengakibatkan pemborosan senilai Rp1.404,46 juta.

- Kegiatan perencanaan pemeliharaan pesawat Hercules C-130 TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada TNI AU di Jakarta, Bandung, dan Malang belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan suku cadang dan pencapaian sasaran kesiapan pesawat.

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota telah berupaya dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Namun masih terdapat masalah-masalah yang menghambat tercapainya efektivitas pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, di antaranya belum semua kegiatan kesiapsiagaan didukung *Standard Operating Procedure* (SOP); anggaran belum memadai; rencana penanggulangan bencana/rencana kontinjensi, sistem peringatan dini, kegiatan geladi dan simulasi, peta/jalur dan lokasi evakuasi belum memadai; serta pengelolaan peralatan dan logistik belum sesuai standar yang ada.

- Penyelenggaraan kesehatan haji Tahun 1432 H/2011 M di tanah air dan Arab Saudi menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan antara lain sarana dan prasarana pelayanan kesehatan haji belum dikelola secara optimal, penatausahaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan (Perbekkes) haji di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Mekah tidak tertib. Selain itu, terdapat persediaan obat dan Perbekkes yang mendekati kedaluwarsa dan terdapat pemborosan atas penghapusan/pemusnahan obat kedaluwarsa di Arab Saudi, serta hasil pengadaan mobil *ambulance* sebanyak tujuh unit dan *coaster* sebanyak dua unit TA 2011 tidak dimanfaatkan pada penyelenggaraan haji Tahun 1432 H.

- Kegiatan monitoring kinerja perkapalan dan kegiatan pengadaan kapal dan jasa pengelolaan kapal TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada bidang perkapalan PT Pertamina (Persero) belum sepenuhnya efektif dalam mengukur dan melaporkan kinerja bidang perkapalan. Kegiatan pengadaan kapal dan jasa pengelolaan kapal juga masih belum sepenuhnya efektif dalam menyediakan kapal baru untuk kepentingan operasional dan mendorong peningkatan kinerja kapal-kapal milik Pertamina.

- Kinerja atas Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku (Persero) Tahun 2010 dan 2011 menunjukkan bahwa Bank Maluku belum memiliki prosedur yang mengatur penatausahaan penerimaan negara, serta penggunaan rekening titipan dan pemblokiran dana dari pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai fasilitas pengelolaan keuangan daerah menimbulkan risiko

operasional bank dan terdapat pembukuan pendapatan operasional lainnya yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, mekanisme verifikasi oleh Bank Maluku terhadap surat setoran pajak (SSP) atas pencairan SP2D yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kurang memadai, serta penyajian rekening titipan setoran pajak belum didukung dengan sistem informasi yang memadai.

- Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Kabupaten Halmahera Utara belum efektif dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan farmasi Tahun 2011, terutama karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Selain hal tersebut, hasil pemeriksaan kinerja mengungkapkan adanya 104 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas 3 kelompok temuan, yaitu 6 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 39 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 59 kasus kelemahan struktur pengendalian intern (Lampiran 1). Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Kinerja

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	6
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	39
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	59
	Jumlah	**104**

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 27 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp86.472,67 juta, yang terdiri atas 5 kasus indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp36.410,49 juta, 4 kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp29.390,24 juta, 2 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp20.671,94 juta dan 16 kasus penyimpangan administrasi (Lampiran 1). Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Indikasi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	5	36.410,49
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	4	29.390,24
3	Kekurangan Penerimaan	2	20.671,94
4	Administrasi	16	-
	Jumlah	**27**	**86.472,67**

Atas temuan-temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp37.402,06 juta untuk indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan dan senilai Rp13.585,13 juta untuk potensi kerugian negara/daerah/perusahaan.

Penyetoran atas kasus indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan melebihi nilai temuan yaitu senilai Rp1.091,57 juta. Kelebihan penyetoran ini terjadi pada kegiatan penyiapan instruktur dan petugas pendampingan teknis, serta kegiatan pendampingan teknis pada kabupaten/kota/kecamatan dengan nilai temuan Rp25.043,53 juta dan telah disetorkan ke kas negara/daerah senilai Rp26.135,10 juta.

BAB 3

Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional

3.1 Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) Berbasis NIK Nasional merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3.2 Uraian singkat Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional yang dilakukan oleh pemerintah dhi. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri), adalah sebagai berikut.

Program Penerbitan NIK Nasional

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 101 Huruf a mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lama lima tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menerbitkan NIK bagi setiap penduduk paling lambat Tahun 2011. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil melakukan kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan di seluruh Indonesia.

3.4 Kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan tersebut terdiri atas kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi database sampai di tingkat kabupaten/kota, konsolidasi database kependudukan tingkat nasional di pusat dan pencetakan blangko surat penerbitan NIK pada kabupaten/kota.

3.5 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan penerbitan NIK Nasional pada Ditjen Dukcapil dari Tahun 2003 s.d. Tahun 2010 adalah senilai Rp637.965,23 juta, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: pembangunan *Data Center* (DC), aplikasi, *Data Recovery Center* (DRC), dan peralatan pendukung Tahun 2003 s.d. 2009 senilai Rp200.829,12 juta; peralatan utama dan pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikirim ke daerah Tahun 2006 s.d. 2010 senilai Rp155.222,15 juta; dana dekonsentrasi dalam rangka pembangunan database kependudukan Tahun 2010 senilai Rp270.574,96 juta; dan pengadaan Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (SP NIK) per keluarga Tahun 2010 senilai Rp11.339,00 juta.

3.6 Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 yang terkait langsung dengan Program Penerbitan NIK Nasional pada 6

provinsi dan 12 kabupaten/kota yang diuji petik, hanya Provinsi Jawa Tengah yang menganggarkan bantuan keuangan senilai Rp4.367,25 juta.

3.7 Target Tahun 2010 adalah pemutakhiran pada database kependudukan pada 497 kabupaten/kota dan pendistribusian SP NIK kepada penduduk di 330 kabupaten/kota, sedangkan untuk 167 kabupaten/kota lainnya dilaksanakan pada Tahun 2011.

Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional

3.8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat 3 mewajibkan kepada pemerintah bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan. Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah merencanakan Program Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional bagi 172 juta penduduk wajib KTP pada Tahun 2011 dan 2012.

3.9 Sistem KTP Elektronik Tahun 2011 akan meliputi DC/ Pusat Data Ditjen Dukcapil, DRC, 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota, dan pada Tahun 2012 di 3.886 kecamatan dan 300 kabupaten/kota.

Pemeriksaan BPK

3.10 Pada Semester I Tahun 2012, BPK menyelesaikan Pemeriksaan Kinerja atas Program Penerbitan NIK Nasional Tahun 2010 dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 pada Kemendagri dan 7 pemerintah provinsi, serta 12 pemerintah kabupaten/kota.

Tujuan Pemeriksaan

3.11 Pemeriksaan kinerja atas Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK Nasional bertujuan menilai efektivitas Program

Instansi yang diperiksa

- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri);
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang;
- Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pringsewu;
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, dan Kabupaten Cirebon;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, dan Kabupaten Batang;
- Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung; dan
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dan Kabupaten Minahasa.

Penerbitan NIK Nasional dan efektivitas Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional, serta kepatuhan pengadaan KTP Elektronik.

Sasaran Pemeriksaan

3.12 Sasaran pemeriksaan untuk Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) termasuk di antaranya

- mekanisme pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan dalam rangka penerbitan NIK nasional; dan
- pengadaan penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional.

Metodologi Pemeriksaan

3.13 Pemeriksaan ini menggunakan pendekatan proses untuk memperoleh pemahaman proses dan memudahkan mengidentifikasikan titik kritis, serta menggunakan kriteria pengelolaan yang baik (*model of good management*) untuk menilai efektivitas. Teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah wawancara, reviu dokumen, analisis prosedur, analisis hasil, analisis kualitatif, observasi lapangan, dan uji petik.

Hasil Pemeriksaan

3.14 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa

- Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional Tahun 2011 belum efektif; dan
- pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

3.15 Hal tersebut terlihat karena masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dalam Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional, serta ketidakpatuhan dalam pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik.

3.16 Permasalahan-permasalahan tersebut terdiri atas 16 kasus ketidakefektifan senilai Rp6.037,50 juta, 3 kasus ketidakekonomisan senilai Rp605,84 juta, 24 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, dan 12 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36.410,49 juta, potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28.906,16 juta, penyimpangan administrasi sebanyak 4 kasus. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

Program Penerbitan NIK Nasional

3.17 Hasil pemeriksaan atas Program Penerbitan NIK Nasional menunjukkan adanya kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev, yaitu 7 kasus ketidakefektifan, 9 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, dan 1 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Perencanaan

3.18 Hasil pemeriksaan atas perencanaan Program Penerbitan NIK Nasional menunjukkan adanya 3 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, yaitu perencanaan Program Penerbitan NIK Nasional belum memadai, di antaranya struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Program Penerbitan NIK Nasional belum memadai atau tumpang tindih, *standard operating procedure* (SOP) Pemutakhiran dan Konsolidasi Database Kependudukan tidak lengkap, dan SOP Kegiatan Penerbitan SP NIK Nasional tidak disusun.

3.19 Hal tersebut mengakibatkan di antaranya tujuan kegiatan Penerbitan NIK Nasional tidak tercapai yang terjadi di antaranya karena Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Dukcapil belum optimal dalam menyusun regulasi dan kebijakan terkait administrasi kependudukan.

3.20 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, di antaranya agar

- menyempurnakan dan mengintegrasikan SOTK Program Penerbitan NIK dalam struktur organisasi Kemendagri; dan
- memerintahkan Dirjen Dukcapil, di antaranya untuk menyusun dan menetapkan SOP Penerbitan NIK Nasional, serta proses konsolidasi database kependudukan tingkat nasional dan di daerah yang dijadikan acuan untuk melakukan pembersihan atas data ganda dan anomali.

Pelaksanaan

3.21 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Program Penerbitan NIK Nasional menunjukkan adanya 6 kasus ketidakefektifan, 6 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, dan 1 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan dalam rangka Penerbitan NIK Nasional di 12 pemerintah kabupaten/kota pada 6 pemerintah provinsi yang menjadi sampel pemeriksaan belum memadai, di antaranya pencocokan dan penelitian formulir pemutakhiran dan formulir per keluarga tidak didukung dasar dokumen resmi/dipersamakan validitasnya seperti KTP, kartu keluarga (KK), akta/surat kelahiran, surat pindah dan akta/surat kematian.

Hal tersebut mengakibatkan di antaranya hasil kegiatan pemutakhiran dan konsolidasi database kependudukan tidak akurat dan belum menggambarkan kondisi terkini, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut tidak tercapai.

Hal tersebut terjadi di antaranya karena Ditjen Dukcapil belum membuat SOP tentang konsolidasi database kependudukan tingkat nasional, serta mekanisme pembersihan data ganda dan data anomali.

- Sumber daya manusia pengelola SIAK belum sesuai standar kebutuhan jumlah dan standar kompetensi yang ditetapkan.

  Hal tersebut mengakibatkan di antaranya pengelolaan pelayanan data kependudukan kurang optimal karena penetapan jumlah operator SIAK di tiap-tiap tenaga pengelola database kependudukan (TPDK) tidak sesuai dengan beban kerja, dan tidak ada jaminan bahwa personel yang diangkat memiliki kemampuan sebagai pengelola SIAK.

  Hal tersebut terjadi di antaranya karena Ditjen Dukcapil

  √ menetapkan administrator database maupun operator tidak berdasarkan standar kualifikasi yang telah ditetapkan; dan

  √ tidak mempunyai analisis rasio antara jumlah operator dan jumlah ADB terhadap jumlah penduduk di suatu TPDK agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal.

- Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK dalam rangka konsolidasi database kependudukan Tahun 2010 pada Ditjen Dukcapil belum memadai, di antaranya peralatan di DC tidak dimanfaatkan dan tidak dapat dipergunakan. Peralatan SIAK yang dialokasikan ke daerah kurang diterima, rusak, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dimanfaatkan, serta tidak terselenggaranya konsolidasi database kependudukan secara *online* antara kabupaten ke provinsi serta provinsi ke pusat.

  Hal tersebut mengakibatkan

  √ tidak optimalnya penggunaan *hardware* yang ada dalam rangka pelaksanaan konsolidasi dan pemutakhiran database kependudukan secara nasional untuk menuju NIK tunggal Nasional;

  √ tidak terjaminnya keamanan peralatan SIAK pada provinsi/kabupaten/kota dan potensi terjadinya kerusakan atau kehilangan, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan sarana dan prasarana SIAK; dan

  √ tidak terpeliharanya sarana dan prasarana utama dan pendukung SIAK karena provinsi maupun kabupaten/kota tidak bisa mengajukan

anggaran untuk pemeliharaan atas barang-barang tersebut akibat belum tercatat sebagai aset pada tiap-tiap provinsi serta kabupaten/kota.

Hal tersebut terjadi di antaranya karena kurangnya koordinasi antara Ditjen Dukcapil dan pemerintah daerah dalam pengamanan/pengelolaan barang SIAK.

3.22 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, di antaranya agar

- memerintahkan Dirjen Dukcapil di antaranya untuk
  - √ menetapkan tata cara dan prosedur pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan; dan
  - √ meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengamanan/pengelolaan barang SIAK.
- meminta kepada para bupati/walikota untuk memerintahkan Kepala Dinas Dukcapil di antaranya untuk mengangkat tenaga operator dan administrator SIAK sesuai kualifikasi.

Monitoring dan Evaluasi

3.23 Hasil pemeriksaan atas monev Program Penerbitan NIK Nasional menunjukkan adanya 1 kasus ketidakefektifan, yaitu monev Program Penerbitan NIK Nasional belum memadai, di antaranya

- dari 3 tim monev pada tingkat pusat hanya 1 tim monev yang menyampaikan laporan monev, serta dari uji petik terhadap 6 provinsi dan 12 kabupaten/kota diketahui bahwa tidak seluruh provinsi/kabupaten/kota menyampaikan laporan monev secara berjenjang dan periodik;
- Ditjen Dukcapil belum menetapkan prosedur pemanfaatan laporan monev dan provinsi/kabupaten/kota belum menetapkan prosedur monev secara formal; dan
- laporan hasil kegiatan monev pada Program Penerbitan NIK Nasional belum ditindaklanjuti.

3.24 Hal tersebut mengakibatkan di antaranya Ditjen Dukcapil tidak dapat memonitor pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan termasuk masalah-masalah yang menghambat pencapaian sasaran dan target kinerja sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

3.25 Hal tersebut terjadi di antaranya karena tim monev pada tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota belum menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal dalam melaksanakan monev atas penerbitan NIK Nasional di tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota.

3.26 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri di antaranya agar menginstruksikan Dirjen Dukcapil untuk melakukan evaluasi atas kinerja tim monev pada tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota sehingga menjamin terlaksananya kegiatan monev atas program penerbitan NIK Nasional secara efektif.

Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional

3.27 Hasil pemeriksaan atas Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional menunjukkan adanya kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monev, yaitu 7 kasus ketidakefektifan, 1 kasus ketidakekonomisan senilai Rp191,33 juta, dan 12 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas.

Perencanaan

3.28 Hasil pemeriksaan atas perencanaan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional menunjukkan adanya 1 kasus ketidakefektifan dan 3 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, yaitu perencanaan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional belum memadai, di antaranya

- kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan penerapan KTP Elektronik belum memuat hal-hal penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- rencana pemanfaatan database SIAK sebagai dasar penerapan KTP Elektronik tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. KTP Elektronik yang akan dicetak kemungkinan tidak sesuai dengan kuota per kecamatan, karena KTP Elektronik yang dicetak sesuai dengan data urut yang dikirimkan ke *data center*. Database SIAK yang di-*install* ke dalam *server* KTP Elektronik masih memuat sebanyak 9.813.102 data ganda dan data anomali; dan
- belum tersedia regulasi/kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan database KTP Elektronik yang terpadu di kabupaten/kota dan pusat, yang meliputi jaminan pemeliharaan, kerahasiaan dan keamanan database kependudukan dari kerusakan, kehilangan, dan penggunaan data oleh pihak yang tidak berhak.

3.29 Hal tersebut mengakibatkan di antaranya pelaksanaan pekerjaan Penerapan KTP Elektronik untuk TA 2011 tidak dapat selesai tepat waktu yang terjadi di antaranya karena Ditjen Dukcapil dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota kurang berkoordinasi dalam melaksanakan persiapan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional.

3.30 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri di antaranya agar memerintahkan Dirjen Dukcapil meningkatkan koordinasi dengan gubernur/bupati/walikota dalam persiapan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional.

Pelaksanaan

3.31 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional menunjukkan adanya 5 kasus ketidakefektifan, 1 kasus ketidakekonomisan senilai Rp191,33 juta, dan 8 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, di antaranya sebagai berikut.

- Penyediaan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) Tahun 2011 belum dilaksanakan dengan optimal, sehingga mengakibatkan terhambatnya penerimaan hasil perekaman dari beberapa titik pelayanan ke DC. Hal tersebut terjadi di antaranya karena pihak konsorsium tidak optimal dalam memberikan layanan Jarkomdat guna mendukung kelancaran perekaman data penduduk di setiap titik pelayanan.

- Kegiatan pelayanan verifikasi data dan perekaman pas foto, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk di tempat pelayanan KTP Elektronik belum memadai, sehingga mengakibatkan di antaranya pelaksanaan perekaman KTP Elektronik di kecamatan/kelurahan belum efektif. Hal tersebut terjadi di antaranya karena SOP yang ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil belum memadai sehingga menimbulkan terjadinya perbedaan perlakukan di tingkat unit pelayanan.

- Mekanisme pendistribusian KTP Elektronik kepada penduduk belum memadai, sehingga mengakibatkan di antaranya kegiatan pendistribusian KTP Elektronik kepada penduduk Tahun 2011 terlambat. Hal tersebut terjadi di antaranya karena SOP Pendistribusian KTP Elektronik tidak menjelaskan secara rinci terkait otorisasi dan jangka waktu pendistribusian KTP Elektronik.

- Pekerjaan personalisasi tidak mencapai target yang ditetapkan dalam kontrak. Target yang telah ditetapkan dalam kontrak Tahun 2011 adalah sebanyak 67.015.400 KTP Elektronik diterbitkan dan didistribusikan ke kecamatan, namun sampai dengan 31 Desember 2011 terealisasi sebanyak 1.453.757 KTP Elektronik atau 2,17% yang sudah selesai dipersonalisasi dan sebanyak 48.404 KTP Elektronik atau 0,07% yang sudah dikirimkan ke kecamatan, sehingga konsorsium tidak dapat memenuhi jumlah pencapaian KTP Elektronik Tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal tersebut terjadi di antaranya karena Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) kurang berupaya dalam pemenuhan jumlah penerbitan KTP Elektronik Tahun 2011 yang ditetapkan dalam kontrak.

3.32 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan Dirjen Dukcapil di antaranya agar

- menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memberikan teguran secara tertulis kepada konsorsium di antaranya agar secara

proaktif menyelesaikan permasalahan perangkat dan masalah yang terkait dengan pekerjaan Jarkomdat yang ada di pusat dan daerah;

- menetapkan ketentuan yang seragam dan baku terkait perbaikan data penduduk pada saat perekaman; dan
- menyempurnakan SOP Pendistribusian KTP Elektronik dan memerintahkan PPK mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah penyelesaian atas terhambatnya pendistribusian KTP Elektronik Tahun 2012.

Monitoring dan Evaluasi

3.33 Hasil pemeriksaan atas monev Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional menunjukkan adanya 1 kasus ketidakefektifan dan 1 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, yaitu monev Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional belum memadai, di antaranya sebagai berikut.

- Mekanisme monev di tingkat pusat belum memadai, yaitu belum ada prosedur monev tertulis, dan pelaksanaan monev yang tumpang tindih.
- Hasil kegiatan monev atas Penerapan KTP Elektronik belum ditindaklanjuti.
- Mekanisme monev di tingkat provinsi/kabupaten/kota belum memadai, yaitu belum ada prosedur kerja monev tertulis, 3 provinsi tidak melaksanakan kegiatan monev, dan dari 4 provinsi yang melaksanakan kegiatan monev hanya 1 provinsi yang menyusun dan menyampaikan laporan monev ke gubernur maupun ke Ditjen Dukcapil secara resmi.

3.34 Hal tersebut mengakibatkan di antaranya informasi yang dihasilkan dari kegiatan monev tidak terintegrasi dan kurang bermanfaat untuk pengambilan keputusan yang terjadi di antaranya karena Ditjen Dukcapil belum menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal dalam menyusun dan menetapkan SOP mengenai monev Penerapan KTP Elektronik untuk tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota.

3.35 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri di antaranya agar menginstruksikan Dirjen Dukcapil untuk menyusun/menyempurnakan SOP yang lebih rinci mengenai bentuk dan tata cara pemantauan secara berjenjang atas kegiatan monev terkait Penerapan KTP Elektronik pada tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota.

Kepatuhan Kontrak KTP Elektronik

3.36 Hasil pemeriksaan atas kepatuhan kontrak KTP Elektronik menunjukkan adanya 11 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36.410,49 juta, potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28.906,16 juta, penyimpangan administrasi

sebanyak 3 kasus. Selain kasus ketidakpatuhan tersebut terdapat 3 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, 2 kasus ketidakefektifan, dan 2 kasus ketidakekonomisan senilai Rp414,51 juta.

3.37 Hasil pemeriksaan atas kepatuhan kontrak KTP Elektronik menunjukkan adanya indikasi kerugian negara sebanyak 5 kasus senilai Rp36.410,49 juta, di antaranya sebagai berikut.

- Kelebihan pembayaran pekerjaan Jarkomdat Tahun 2011 senilai Rp4.303,20 juta.
- Kelebihan pembayaran kegiatan penyiapan instruktur dan petugas pendampingan teknis, serta kegiatan pendampingan teknis pada kabupaten/kota/kecamatan senilai Rp25.043,53 juta (Rp1.529,23 juta+Rp23.514,30 juta).
- Kekurangan pekerjaan pengadaan blangko KTP Elektronik senilai Rp5.259,86 juta.
- Jaminan sanggahan yang tidak bisa dicairkan dari bank untuk disetor ke kas negara senilai Rp100,00 juta.

3.38 Hasil pemeriksaan atas kepatuhan kontrak KTP Elektronik menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp28.906,16 juta, yaitu sebagai berikut.

- Pekerjaan Jarkomdat Tahun 2012 berpotensi merugikan negara senilai Rp14.365,40 juta.
- Pengadaan *Operating System* (OS) Windows XP pada 300 kabupaten/kota Tahun 2012 berpotensi merugikan negara senilai Rp885,00 juta.
- Kekurangan pekerjaan *Automated Fingerprint Identification System (AFIS) Fingerprint Record Licenses* dan kesalahan penetapan bobot penilaian pada pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dialokasikan ke kabupaten/kota/kecamatan berpotensi merugikan negara senilai Rp13.655,76 juta (Rp70,62 juta+Rp13.585,14 juta).

3.39 Hal tersebut terjadi di antaranya karena

- PPK tidak menyusun dokumen kontrak pada item pekerjaan secara detail;
- panitia pengadaan barang jasa tidak cermat dalam melakukan evaluasi rincian anggaran dan biaya;
- panitia penerima barang tidak melakukan pemeriksaan atas penyelesaian pekerjaan;
- rekanan selaku pelaksana pekerjaan tidak mematuhi kontrak yang telah disepakati; dan

- Dirjen Dukcapil selaku pimpinan unit kerja dan Sesditjen Dukcapil selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas proses pengadaan.

3.40 Terhadap kasus-kasus indikasi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar melalui Dirjen Dukcapil memerintahkan PPK untuk

- mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Jarkomdat Tahun 2011 dengan menyetorkan ke kas negara senilai Rp4.303,20 juta;
- melakukan verifikasi ulang atas *invoice* seluruh kegiatan pekerjaan penyiapan instruktur dan petugas pendamping teknis kegiatan Tahun 2011 untuk memperoleh persetujuan dari Irjen Kemendagri. Apabila terdapat kelebihan pembayaran agar disetorkan ke kas negara;
- tidak mencairkan jaminan pelaksanaan senilai Rp5.259,86 juta yang belum diselesaikan oleh konsorsium; dan
- memerintahkan Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Kemendagri untuk memproses indikasi kerugian negara sebesar Rp100,00 juta.

3.41 Dari rekomendasi kasus-kasus indikasi kerugian negara yang merupakan kelebihan pembayaran/kekurangan pekerjaan tersebut di atas senilai Rp36.310,49 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp37.402,06 juta.

3.42 Penyetoran atas kasus indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan melebihi nilai temuan yaitu senilai Rp1.091,57 juta. Kelebihan penyetoran ini terjadi pada kegiatan penyiapan instruktur dan petugas pendampingan teknis, serta kegiatan pendampingan teknis pada kabupaten/kota/kecamatan dengan nilai temuan Rp25.043,53 juta dan telah disetorkan ke kas negara/daerah senilai Rp26.135,10 juta.

3.43 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar melalui Dirjen Dukcapil memerintahkan PPK untuk

- tidak membayarkan kepada konsorsium senilai Rp15.250,40 juta (Rp14.365,40 juta+Rp885,00 juta); dan
- melakukan verifikasi ulang terhadap bukti pertanggungjawaban kekurangan pekerjaan senilai Rp13.655,76 juta.

3.44 Dari rekomendasi kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut di atas senilai Rp28.906,16 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp13.585,13 juta.

3.45 Hasil pemeriksaan atas kepatuhan kontrak KTP Elektronik menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 3 kasus, di antaranya adalah

proses pengadaan pekerjaan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 belum sepenuhnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yaitu HPS yang ditetapkan oleh PPK bukan berdasarkan data harga pasar setempat yang diperoleh dari hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dan usulan HPS tersebut mengindikasikan hanya bersifat formalitas.

3.46 Hal tersebut mengakibatkan di antaranya HPS tidak dapat digunakan secara optimal sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya dari peserta lelang yang terjadi di antaranya karena Dirjen Dukcapil selaku pimpinan unit kerja dan Sesditjen Dukcapil selaku Kuasa Pengguna Anggaran lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas proses pengadaan.

3.47 BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar

- mengenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan selaku PPK, panitia pengadaan dan tim teknis teknologi informasi yang lalai dalam melaksanakan proses pengadaan; dan

- mengenakan sanksi kepada Dirjen Dukcapil selaku pimpinan unit kerja dan Sesditjen Dukcapil selaku KPA yang lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas proses pengadaan.

3.48 Selain permasalahan tersebut masih terdapat permasalahan-permasalahan lain yang mempengaruhi efektivitas Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK Nasional, serta kepatuhan pengadaan KTP Elektronik. Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kemendagri dhi. Dirjen Dukcapil dan instansi terkait lainnya untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rekomendasi yang termuat dalam LHP.

3.49 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan dan TNI

4.1 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) TA 2008, 2009, dan 2010.

4.2 Kemhan adalah entitas pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran (BA) 012 yang terdiri atas 5 Unit Organisasi (UO), yaitu UO Kemhan, UO Markas Besar TNI (Mabes TNI), UO TNI Angkatan Laut (TNI AL), UO TNI Angkatan Darat (TNI AD), dan UO TNI Angkatan Udara (TNI AU). Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kemhan menyelenggarakan fungsi

- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan; dan
- pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

4.3 Secara umum pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/08/M/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Petunjuk Pembinaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI, yang merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 630/KMK.06/2004 dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor MoU/04/M/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lain-lain di Lingkungan Dephan dan TNI.

4.4 SKB dan MoU tersebut merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara yang memberikan kesempatan kepada Kemhan untuk mengatur khusus tata cara pengeluaran belanja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (2). SKB dan MoU tersebut mengatur antara lain

- penyaluran dana belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain kepada Kepala Pusat Keuangan (Kapusku) Dephan setiap bulan sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu otorisasi yang ditetapkan Menhan yang selanjutnya diatur oleh Dephan dan TNI;

- dana belanja pegawai disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan surat perintah membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan dana belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain disalurkan oleh KPPN sesuai dengan SPM yang diterbitkan oleh KPA Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) ke rekening Menhan c.q. Kapusku Dephan;

- anggaran yang disediakan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk belanja pegawai hanya digunakan untuk pembayaran belanja pegawai dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya, sedangkan anggaran yang disediakan melalui DIPA untuk belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain digunakan berdasarkan otorisasi Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI, Kepala UO, dan Kepala Komando Utama (Ka. Kotama); dan

- Menhan, Panglima TNI, dan Kepala UO bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Dephan dan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan (Menkeu) bertanggung jawab atas kelancaran dalam penyediaan dan penyaluran dana kepada Dephan dan TNI sesuai ketentuan yang berlaku.

Alasan Pemeriksaan

4.5 Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kemhan menunjukkan bahwa LK Kemhan dan TNI sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan belum dapat disajikan secara memadai untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebabkan kelemahan desain sistem pengendalian intern yang belum dapat menyajikan nilai-nilai yang wajar dalam beberapa akun dalam laporan keuangan dengan jumlah yang material.

4.6 Sistem pengelolaan keuangan dengan mekanisme penyaluran dana berjenjang pada badan-badan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/08/M/VII/2006 menyulitkan Kemhan dan TNI untuk dapat menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) secara memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007.

4.7 Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja oleh BPK juga menunjukkan adanya kelemahan desain sistem pengelolaan keuangan yang menjadi akar penyebab dari permasalahan yang secara berulang terus ditemukan dalam setiap pemeriksaan, antara lain

- penggunaan dana di luar mekanisme APBN untuk membiayai kegiatan awal tahun anggaran karena keterlambatan proses otorisasi internal dan pendanaan berjenjang;

- penggunaan langsung penerimaan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan barang milik negara;
- akselerasi pelaksanaan pekerjaan yang dana/anggarannya belum tersedia;
- pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawaban keuangan formalitas karena substansi pekerjaan telah dilaksanakan sebelum otorisasi diterbitkan dan pendanaan tersedia;
- optimalisasi penggunaan anggaran dengan menghabiskan pagu anggaran setelah proses pelelangan; dan
- penggunaan pertanggungjawaban keuangan proforma untuk mencairkan dana pada akhir tahun anggaran dan dana hasil pencairan secara *off-budgeter* pada rekening yang dibuka tanpa izin Menkeu.

Tujuan Pemeriksaan

4.8 Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI telah efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya tata kelola pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

Sasaran dan Lingkup Pemeriksaan

4.9 Sasaran pemeriksaan kinerja ini adalah kegiatan pengelolaan keuangan yang mencakup belanja barang, belanja modal, dan pendidikan di lingkungan Kemhan dan TNI.

4.10 Lingkup pemeriksaan meliputi

- perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI;
- pelaksanaan atas kegiatan pemeliharaan, belanja pengembangan fasilitas (bangfas), dan pendidikan; dan
- pertanggungjawaban keuangan (kegiatan pemeliharaan, belanja bangfas, dan pendidikan).

Hasil Pemeriksaan

4.11 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan belum sepenuhnya efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kondisi tersebut sejalan dengan permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan-pemeriksaan BPK sebelumnya.

4.12 Pada pemeriksaan kinerja ini kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan tersebut terdiri atas 7 kasus efektivitas, 32 kasus kelemahan pengendalian intern yang mempengaruhi efektivitas, dan 5 kasus penyimpangan administrasi. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut.

Perencanaan

4.13 Perencanaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Kemhan dan TNI, masih menunjukkan kelemahan-kelemahan di antaranya perencanaan anggaran tidak sepenuhnya didasarkan pada rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

4.14 Penyebabnya antara lain adalah adanya kebijakan anggaran yang dipusatkan dan perencanaan yang disusun tidak berdasarkan rencana kebutuhan riil dari satker/subsatker dan dialokasikan dalam program kerja satker/subsatker.

4.15 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan untuk menginstruksikan Sekretaris Jenderal Pertahanan agar

- mengurangi porsi anggaran yang dipusatkan di Sekretariat Jenderal Kemhan di antaranya anggaran biaya perjalanan dinas dan mendistribusikan rencana kegiatan dan anggaran tersebut ke dalam program kerja satker/subsatker sesuai rencana kebutuhan satker; dan

- mendorong penyusunan rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan kebutuhan riil pada tingkat satker agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi satker secara optimal.

Pelaksanaan

4.16 Pelaksanaan anggaran yang meliputi mekanisme otorisasi dan pendanaan di lingkungan Kemhan dan TNI belum mendukung tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik sesuai prinsip tepat waktu dan tepat sasaran.

Otorisasi

4.17 Prosedur/mekanisme otorisasi internal yang berlaku telah menambah panjang proses pelaksanaan anggaran, sehingga mengakibatkan keterlambatan pada beberapa pelaksanaan kegiatan.

Pendanaan

4.18 Prosedur pendanaan belum mendukung tata kelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang lebih baik sesuai prinsip tepat waktu dan tepat sasaran di antaranya yaitu penyaluran persekot dana tidak efektif dan mekanisme penyaluran dana melalui Pusku Kemhan sebesar 1/12 (seperduabelas) setiap bulan yang pada bulan-bulan tertentu menimbulkan penumpukan dana yang belum dapat dimanfaatkan *(idle cash)*.

4.19 Terhadap kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan atas prosedur otorisasi dan pendanaan pada Kemhan dan TNI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menhan dan Panglima TNI berkoordinasi dengan Menkeu untuk melakukan peninjauan kembali atas SKB Menhan dan Menkeu Tahun 2004 dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang berlaku saat ini.

Pertanggungjawaban

4.20 Pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Kemhan dan TNI belum sepenuhnya mendukung tata kelola pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel, di antaranya terlihat dari masih ditemukannya pertanggungjawaban keuangan yang disusun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya/senyatanya dan hanya untuk memenuhi persyaratan kelengkapan formal untuk pencairan dana, terutama untuk pelaksanaan kegiatan melewati batas tahun anggaran dan pertanggungjawaban keuangan formalitas dengan membuat berita acara penyelesaian pekerjaan 100%.

4.21 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menhan untuk memperbaiki sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan yang diberlakukan pada satker UO Kemhan dan TNI agar dapat menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, akuntabel, sederhana namun dapat memenuhi kebutuhan pengguna (*stakeholder*), dan tidak menyulitkan pelaksana kegiatan.

4.22 Perbaikan sistem dan prosedur tersebut di antaranya dengan merevisi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/08/M/VII/2006 yaitu memperjelas sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan serta pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengujian kebenaran materiil/subtanstif (*doelmatigheid*) atas keberadaan dan keterjadian suatu kegiatan/transaksi.

4.23 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Pemeriksaan Kinerja Lainnya

5.1 Selain tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester I Tahun 2012 BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada 8 objek pemeriksaan lainnya. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 3 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, 3 objek pemeriksaan badan usaha milik negara (BUMN), dan 1 objek pemeriksaan badan usaha milik daerah (BUMD).

5.2 Objek pemeriksaan tersebut terbagi atas pemeriksaan terhadap jasa pelayanan barang dan pemeriksaan lain-lain.

Jasa Pelayanan Barang

5.3 Pemeriksaan atas jasa pelayanan barang dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (Persero) Kantor Pusat, Kantor Cabang Belawan, dan *Belawan International Container Terminal* (BICT) di Medan, serta PT Pelindo III (Persero) Kantor Pusat dan Cabang Tanjung Perak di Surabaya Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011.

5.4 PT Pelindo I dan III merupakan BUMN sektor perhubungan laut yang bergerak di bidang pengusahaan jasa kepelabuhan.

5.5 Perkembangan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada PT Pelindo I Tahun 2009 dan 2010 disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Perkembangan Posisi Keuangan dan Hasil Usaha Perusahaan pada PT Pelindo I

(nilai dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Perkembangan
1	**Perkembangan Posisi Keuangan**			
	Aset	1.630.824,67	2.005.179,95	22,95%
	Kewajiban	316.622,91	601.233,58	89,89%
	Ekuitas	1.314.201,76	1.403.946,37	6,83%
2	**Perkembangan Hasil Usaha Perusahaan**			
	Pendapatan Usaha	939.865,45	988.428,97	5,17%
	Beban Usaha	675.911,94	756.264,96	11,89%
	Laba Usaha	263.953,51	232.167,01	-12,04%

5.6 Jumlah aset PT Pelindo I per 31 Desember 2010 naik sebesar 22,95% dari Tahun 2009. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada aset tetap dalam konstruksi yang meningkat 271,49%. Jumlah kewajiban meningkat sebesar 89,89% dari Tahun 2009 disebabkan oleh kenaikan kewajiban lancar berupa penambahan saldo hutang usaha sebesar 246,04%. Adapun perkembangan laba usaha dibanding total aset *(return on asset)* Tahun 2010 mengalami penurunan karena terdapat peningkatan aset tetap namun statusnya masih dalam penyelesaian berupa penambahan alat-alat fasilitas pelabuhan, jalan dan bangunan, bangunan fasilitas pelabuhan, kapal, dan peralatan.

5.7 Perkembangan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada PT Pelindo III Tahun 2009 dan 2010 disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Perkembangan Posisi Keuangan dan Hasil Usaha Perusahaan pada PT Pelindo III

(nilai dalam juta rupiah)

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Perkembangan
1	**Perkembangan Posisi Keuangan**			
	Aset	4.555.991,86	4.870.334,00	6,90%
	Kewajiban	1.155.295,46	1.159.126,21	0,33%
	Ekuitas	3.400.696,40	3.711.207,79	9,13%
2	**Perkembangan Hasil Usaha Perusahaan**			
	Pendapatan Usaha	2.501.590,46	2.859.237,25	14,30%
	Beban Usaha	1.528.807,82	1.851.009,39	21,08%
	Laba Bersih	527.593,70	566.043,29	7,29%

5.8 Jumlah aset PT Pelindo III per 31 Desember 2010 meningkat sebesar 6,90% dibandingkan dengan Tahun 2009. Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap yang meningkat 13,21%. Kenaikan kewajiban sebesar 0,33% terutama disebabkan adanya kenaikan kewajiban lancar berupa penambahan saldo hutang usaha kepada pemasok. Adapun laba bersih meningkat sebesar 7,29% disebabkan adanya kenaikan pendapatan usaha bersih, yaitu pendapatan terminal peti kemas, pelayanan kapal, pelayanan usaha bongkar muat, dan pelayanan barang.

5.9 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa jasa pelayanan barang pada PT Pelindo I Kantor Pusat, Kantor Cabang Pelabuhan Belawan dan BICT di Medan, serta PT Pelindo III Kantor Pusat dan Kantor Cabang Tanjung Perak di Surabaya belum sepenuhnya efektif, efisien, dan ekonomis. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dalam kegiatan jasa pelayanan barang.

5.10 Kelemahan-kelemahan tersebut terdiri atas 12 kasus yang mempengaruhi efektivitas, 2 kasus yang mempengaruhi efisiensi, dan 5 kasus yang mempengaruhi keekonomisan, serta 23 kasus lainnya.

5.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam kegiatan jasa pelayanan barang di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Pelindo I, pengelolaan jasa penumpukan di lapangan penumpukan BICT belum optimal, yaitu adanya peti kemas yang telah berada di lapangan penumpukan lebih dari 10 hari (*longstay*) dan belum dibayar oleh pihak pemilik barang, mengakibatkan ketersediaan lapangan penumpukan BICT berkurang dan BICT berpotensi kehilangan pendapatan jasa penumpukan.

- Penyebabnya adalah Direksi PT Pelindo I belum melakukan evaluasi penerapan tarif progresif dan memperpendek masa berlakunya; *General Manager* (GM) BICT tidak mematuhi Surat Keputusan Direksi PT Pelindo I Nomor US.11/2/11/P.I-08 tanggal 24 Juli 2008; dan belum melaporkan peti kemas yang berada di terminal internasional yang telah lebih dari 30 hari kepada pihak Bea dan Cukai.

- Di PT Pelindo III, hasil kegiatan pengadaan sistem aplikasi di Cabang Tanjung Perak, yaitu beberapa modul dalam aplikasi operasional terminal peti kemas konvensional (CSTEP) belum digunakan dan terdapat pembelian fitur-fitur yang belum diperlukan dalam aplikasi peti kemas berbasis grafis pada Dermaga Multipurpose Nilam Timur (CTOS), sehingga mengakibatkan ketidakefektifan minimal senilai Rp53,00 juta.

- Hal tersebut terjadi karena panitia pengadaan barang dan jasa lalai tidak melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.

5.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Direksi PT Pelindo I agar mengevaluasi dan menerapkan tarif progresif dengan memperpendek masa I agar tidak terjadi *longstay*, memindahkan peti kemas yang tidak diambil lebih dari 10 hari dari lapangan penumpukan, dan berkoordinasi dengan Bea dan Cukai atas peti kemas berstatus barang yang dinyatakan tidak dikuasai untuk dipindahkan ke tempat penimbunan pabean; dan

- Direksi PT Pelindo III agar memberikan sanksi kepada Senior Manager Sub Direktorat Sistem Informasi dan panitia pengadaan barang dan jasa atas kelalaiannya tidak mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa.

5.13 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dalam pengelolaan jasa pelayanan barang di antaranya adalah pada PT Pelindo III, waktu kerja tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak sesuai standar dan jumlah jam istirahat melebihi ketentuan mengakibatkan PT Pelindo III kehilangan pendapatan selama satu tahun minimal 3.588 box senilai Rp1.264,77 juta. Penyebabnya adalah perhitungan dan pembayaran upah TKBM didasarkan pada *shift* kerja bukan pada produktivitas bongkar muat.

5.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT Pelindo III agar perhitungan dan pembayaran upah TKBM didasarkan pada produktivitas bongkar muat.

5.15 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi keekonomisan dalam pengelolaan jasa pelayanan barang di antaranya sebagai berikut.

- Di PT Pelindo I, pengadaan *Harbour Mobile Crane* (HMC) untuk pengembangan bisnis di Batu Ampar tidak didukung dengan perencanaan yang memadai dan pengoperasian HMC oleh pihak ketiga mengakibatkan pemborosan senilai Rp4.955,67 juta dan USD67.56 ribu. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Pelindo I tidak membuat rencana pengadaan dan pengoperasian HMC berdasarkan rencana pengembangan bisnis yang memadai, kebijakan GM BICT untuk tidak memanfaatkan operator HMC organik yang telah tersedia dan lebih memilih memanfaatkan tenaga *outsourcing*, serta untuk tetap menggunakan HMC mitra usaha pada bulan Juli dan Agustus 2011 walaupun HMC milik sendiri mampu menggantikan HMC mitra usaha.

- Di PT Pelindo III, pemberian premi TKBM tidak didasarkan pada standar produktivitas bongkar muat dan pembayaran HIK tidak disesuaikan dengan jumlah penggunaan TKBM mengakibatkan pemborosan senilai Rp1.404,46 juta. Penyebabnya adalah perhitungan dan pembayaran HIK tidak didasarkan pada realisasi penggunaan TKBM dan pemberian premi produktivitas yang diatur dalam kesepakatan bersama antara PT Pelindo III dengan Koperasi TKBM Usaha Karya tidak didasarkan pada standar produktivitas bongkar muat yang berlaku.

5.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Direksi PT Pelindo I agar kegiatan investasi didasarkan pada rencana pengembangan bisnis yang memadai, menggunakan karyawan organik yang sudah terdidik dan terlatih untuk mengoperasikan HMC dan menghentikan pemakaian operator HMC *outsourcing,* serta memberikan sanksi kepada GM BICT atas penggunaan HMC mitra usaha pada bulan Juli dan Agustus 2011; dan

- Direksi PT Pelindo III agar perhitungan dan pembayaran HIK didasarkan pada realisasi jumlah TKBM yang melaksanakan bongkar muat dan mengadendum kesepakatan bersama antara PT Pelindo III dengan Koperasi TKBM Usaha Karya khususnya klausul tentang pembayaran premi produktivitas dengan mencantumkan batas minimum produktivitas yang dapat diberikan premi.

5.17 Selain kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan, hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan jasa pelayanan barang pada PT Pelindo I juga mengungkap adanya temuan ketidakpatuhan

terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya potensi kerugian senilai Rp484,08 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp195,14 juta.

Kinerja Lainnya

5.18 Selain pemeriksaan atas kegiatan jasa pelayanan barang, BPK telah melaksanakan 6 pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan kinerja atas perencanaan pemeliharaan pesawat Hercules C-130 pada TNI Angkatan Udara (TNI AU), kesiapsiagaan prabencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air dan Arab Saudi, kegiatan monitoring kinerja perkapalan dan kegiatan pengadaan kapal dan jasa pengelolaan kapal pada bidang perkapalan PT Pertamina (Persero), Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku (Persero), dan pengelolaan pelayanan instalasi farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.

5.19 Hasil pemeriksaan kinerja atas 6 objek pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang terdiri atas 31 kasus yang mempengaruhi efektivitas dan 4 kasus yang mempengaruhi keekonomisan, serta 35 kasus lainnya.

5.20 Hasil pemeriksaan kinerja atas enam objek pemeriksaan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Perencanaan Pemeliharaan Pesawat Hercules C-130

5.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas perencanaan pemeliharaan pesawat Hercules C-130 TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada TNI AU di Jakarta, Bandung, dan Malang menunjukkan bahwa perencanaan pemeliharaan pesawat Hercules C-130 belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan suku cadang dan pencapaian sasaran kesiapan pesawat. Hal tersebut antara lain terlihat dari tidak efektifnya koordinasi antara Dinas Aeronautika Angkatan Udara (Disaeroau) dan Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Udara (Diskomlekau) dengan satuan pengguna dalam menyusun usul pesanan, dan tidak efektifnya penyusunan harga dugaan dalam usul pesanan.

Kesiapsiagaan Prabencana

5.22 Hasil pemeriksaan kinerja atas kesiapsiagaan prabencana Tahun 2009, 2010, dan Semester I Tahun 2011 pada BNPB di Jakarta, Sumatera Barat, dan D.I Yogyakarta menunjukkan bahwa BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota telah berupaya dalam melakukan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

5.23 Namun, masih terdapat masalah-masalah yang menghambat tercapainya efektivitas pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masalah-masalah itu adalah belum semua kegiatan kesiapsiagaan didukung *standard operating procedure* (SOP); anggaran belum memadai; rencana

penanggulangan bencana/rencana kontinjensi, sistem peringatan dini, kegiatan geladi dan simulasi, peta/jalur dan lokasi evakuasi belum memadai; serta pengelolaan peralatan dan logistik belum sesuai dengan standar yang ada.

5.24 Selain itu, masih terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakhematan (tidak ekonomis) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya pada manajemen peralatan dan logistik untuk menghadapi bencana terutama penyusunan HPS pekerjaan bantuan logistik kedaruratan pada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB TA 2011 belum dilakukan dengan cermat, antara lain adanya kesalahan perhitungan aritmatik yang mengakibatkan nilai kontrak lebih tinggi dari HPS yang seharusnya dan pengadaan perlengkapan penanggulangan bencana Tahun 2010 tidak dapat dinilai kewajarannya.

Penyelenggaraan Kesehatan Haji

5.25 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan kesehatan haji Tahun 1432 H/2011 M di tanah air dan Arab Saudi menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan antara lain sarana dan prasarana pelayanan kesehatan haji belum dikelola secara optimal, penatausahaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan (Perbekkes) haji di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Mekah tidak tertib, terdapat persediaan obat dan Perbekkes yang mendekati kedaluwarsa dan terdapat pemborosan atas penghapusan/pemusnahan obat kedaluwarsa di Arab Saudi senilai Rp4.966,32 juta, terdapat alat kesehatan pada BPHI di Mekah dan Madinah belum dimanfaatkan, rusak dan tidak ditemukan senilai Rp1.102,53 juta, serta hasil pengadaan mobil *ambulance* sebanyak tujuh unit dan *coaster* sebanyak dua unit TA 2011 tidak dimanfaatkan pada penyelenggaraan haji Tahun 1432 H, masing-masing senilai Rp5.186,30 juta dan Rp939,74 juta.

Kegiatan Monitoring Kinerja Perkapalan

5.26 Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan monitoring kinerja perkapalan dan kegiatan pengadaan kapal dan jasa pengelolaan kapal TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada bidang perkapalan PT Pertamina (Persero) menunjukkan bahwa kegiatan monitoring kinerja belum sepenuhnya efektif dalam mengukur dan melaporkan kinerja bidang perkapalan. Kegiatan pengadaan kapal dan jasa pengelolaan kapal juga masih belum sepenuhnya efektif dalam menyediakan kapal baru untuk kepentingan operasional dan mendorong peningkatan kinerja kapal-kapal milik Pertamina.

Bank Pembangunan Daerah Maluku (Persero)

5.27 Hasil pemeriksaan atas kinerja BPD Maluku Tahun 2010 dan 2011 pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama (KCU) Ambon, Kantor Cabang (KC) Piru, dan KC Dobo di Ambon, Piru, dan Dobo menunjukkan bahwa

- Bank Maluku belum memiliki prosedur yang mengatur penatausahaan penerimaan negara;
- penggunaan rekening titipan dan pemblokiran dana dari pencairan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai fasilitas pengelolaan keuangan daerah menimbulkan risiko operasional bank dan terdapat pembukuan pendapatan operasional lainnya yang tidak sesuai ketentuan;
- mekanisme verifikasi oleh Bank Maluku terhadap surat setoran pajak (SSP) atas pencairan SP2D yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kurang memadai; dan
- penyajian rekening titipan setoran pajak belum didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengelolaan pelayanan Instalasi Farmasi

5.28 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pelayanan instalasi farmasi pada RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara TA 2011 di Tobelo menunjukkan bahwa manajemen RSUD Tobelo belum efektif dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan farmasi Tahun 2011, terutama karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

5.29 Terhadap kelemahan-kelemahan pada enam objek pemeriksaan tersebut BPK telah merekomendasikan kepada para pimpinan manajemen entitas agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

5.30 Selain kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dan keekonomisan, hasil pemeriksaan atas enam objek pemeriksaan tersebut juga mengungkap adanya satu kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai USD2,160.00 ribu yang terjadi pada kegiatan monitoring kinerja perkapalan PT Pertamina (Persero).

5.31 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

Bangfas	: Pengembangan Fasilitas
BICT	: *Belawan International Container Terminal*
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHI	: Balai Pengobatan Haji Indonesia
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

D

DBMS	: *Database Management System*
DC	: *Data Center*
Dephan	: Departemen Pertahanan
Dirjen Dukcapil	: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ditjen Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DRC	: *Data Recovery Center*

E

3E	: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

G

GM	: *General Manager*

H

HMC	: *Harbour Mobile Crane*
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri

I

IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
Irjen	: Inspektur Jenderal

J

Jarkomdat	: Jaringan Komunikasi Data

K

KAK	: Kerangka Acuan Kerja
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemhan	: Kementerian Pertahanan
KK	: Kartu Keluarga
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KTP	: Kartu Tanda Penduduk

L

LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan

M

Mabes TNI	:	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Menhan	:	Menteri Pertahanan
Menkeu	:	Menteri Keuangan
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MoU	:	*Memorandum of Understanding*

N

NIK	:	Nomor Induk Kependudukan

O

OS	:	*Operating System*

P

Perbekkes	:	Perbekalan Kesehatan
Permenhan	:	Peraturan Menteri Pertahanan
Permenkeu	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNRI	:	Percetakan Negara Republik Indonesia
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PT Pelindo	:	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

R

RKA-KL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah

S

Satker	:	Satuan Kerja
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sesditjen	:	Sekretaris Direktorat Jenderal
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SKB	:	Surat Keputusan Bersama
SOP	:	*Standard Operating Procedure*
SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SP	:	Surat Pemberitahuan
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SSP	:	Surat Setoran Pajak

T

TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TKBM	:	Tenaga Kerja Bongkar Muat
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TPDK	:	Tenaga Pengelola Database Kependudukan

U

UO	:	Unit Organisasi

W

WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		
		Total Ketidakpatuhan		Indikasi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Total Kelemahan Pengendalian Intern	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Indikasi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK Nasional																									
1	Kementerian Dalam Negeri	12	65.316,65	5	36.410,49	3	28.906,16	-	-	4	24	-	6	18	19	6.643,34	3	605,84	-	-	16	6.037,50	37.402,06	13.585,13	-
Pengelolaan Keuangan																									
2	Kementerian Pertahanan	2	-	-	-	-	-	-	-	2	13	1	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Markas Besar TNI	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TNI AD	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
5	TNI AL	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	2	4	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
6	TNI AU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Sub Total	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**32**	**1**	**16**	**15**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kinerja Lainnya																									
	Jasa Pelayanan Barang																								
7	PT Pelindo I (Persero)	5	679,22	-	-	1	484,08	1	195,14	3	8	1	5	2	12	45.578,79	3	10.777,11	1	28.501,50	8	6.300,18	-	-	-
																USD 67.56		USD 67.56							
8	PT Pelindo III (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	6	3	7	2.768,23	2	1.450,46	1	1.264,77	4	53,00	-	-	-
	Sub Total	**5**	**679,22**	**-**	**-**	**1**	**484,08**	**1**	**195,14**	**3**	**18**	**2**	**11**	**5**	**19**	**48.347,02**	**5**	**12.227,57**	**2**	**29.766,27**	**12**	**6.353,18**	**-**	**-**	**-**
																USD 67.56		**USD 67.56**							
	Lain-Lain																								
9	TNI Angkatan Udara (Perencanaan Pemeliharaan Pesawat Hercules C-130)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kesiapsiagaan Prabencana)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	14	194,86	1	194,86	-	-	13	-	-	-	-
11	Kementerian Kesehatan (Penyelenggaraan Kesehatan Haji)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	12.194,89	1	4.966,32	-	-	6	7.228,57	-	-	-
12	PT Pertamina (Persero) (Kegiatan Monitoring Kinerja Perkapalan)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	2	3	8	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-
			USD 2,160.00						USD 2,160.00							USD 6,056.62		USD 6,056.62							
13	PT BPD Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Pengelolaan Pelayanan Instalasi Farmasi)	3	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-	8	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
	Sub Total	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**4**	**30**	**3**	**6**	**21**	**35**	**12.389,75**	**4**	**5.161,18**	**-**	**-**	**31**	**7.228,57**	**-**	**-**	**-**
			USD 2,160.00						**USD 2.160,00**							**USD 6,056.62**		**USD 6,056.62**							
Total		**27**	**65.995,87**	**5**	**36.410,49**	**4**	**29.390,24**	**2**	**195,14**	**16**	**104**	**6**	**39**	**59**	**80**	**67.380,11**	**12**	**17.994,59**	**2**	**29.766,27**	**66**	**19.619,25**	**37.402,06**	**13.585,13**	**-**
			USD 2,160.00						**USD 2,160.00**							**USD 6,124.18**		**USD 6,124.18**							
Total Nilai Rupiah		**27**	**86.472,67**	**5**	**36.410,49**	**4**	**29.390,24**	**2**	**20.671,94**	**16**	**104**	**6**	**39**	**59**	**80**	**125.437,39**	**12**	**76.051,87**	**2**	**29.766,27**	**66**	**19.619,25**	**37.402,06**	**13.585,13**	**-**

Keterangan
Nilai ekuivalen valas menggunakan data nilai tengah kurs transaksi Bank Indonesia per tanggal 29 Juni 2012

Lampiran 2

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2012

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan Kinerja					
I	**Program Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK Nasional**				
	1	1	**Kementerian Dalam Negeri**	1	Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) Berbasis NIK Nasional pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
				1	
II	**Pengelolaan Keuangan**				
	2	1	**Kementerian Pertahanan**	1	Pengelolaan Keuangan pada Kementerian Pertahanan TA 2008, 2009, 2010 di Jakarta
	3	2	**Mabes TNI**	1	Pengelolaan Keuangan pada Markas Besar TNI di Jakarta dan Bandung
	4	3	**TNI AL**	1	Pengelolaan Keuangan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Jakarta dan Surabaya
	5	4	**TNI AD**	1	Pengelolaan Keuangan pada Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TA 2008, 2009, dan 2010 di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Jayapura
	6	5	**TNI AU**	1	Pengelolaan Keuangan pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Jakarta, Bandung, Makassar, dan Jayapura
				5	
III	**Kinerja Lainnya**				
	7	1	**PT Pelindo I (Persero)**	1	Jasa Pelayanan Barang pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Medan
	8	2	**PT Pelindo III (Persero)**	1	Jasa Pelayanan Barang pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2010 dan Semester I Tahun 2011 di Surabaya
	9	3	**TNI AU**	1	Perencanaan Pemeliharaan Pesawat Hercules C-130 TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara di Jakarta
	10	4	**Badan Nasional Penanggulangan Bencana**	1	Kesiapsiagaan Prabencana Tahun 2009, 2010, dan Semester I Tahun 2011 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, Sumatera Barat, dan D.I. Yogyakarta.
	11	5	**Kementerian Kesehatan**	1	Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 1432 H/2011 M di Tanah Air dan Arab Saudi
	12	6	**PT Pertamina**	1	Kegiatan Monitoring Kinerja Perkapalan dan Kegiatan Pengadaan Kapal dan Jasa Pengelolaan Kapal TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Bidang Perkapalan PT Pertamina (Persero)
	13	7	**Provinsi Maluku**	1	Kinerja BPD Maluku Tahun 2010 dan 2011 pada Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama Ambon, Kantor Cabang Piru, dan Kantor Cabang Dobo di Ambon, Piru, dan Dobo
	14	8	**Provinsi Maluku Utara**	1	Pengelolaan Pelayanan Instalasi Farmasi pada RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara TA 2011 di Tobelo
				8	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja			**14**	

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

Buku IV
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(Buku ke-4 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester I Tahun 2012	3
BAB 3 Pengelolaan Pendapatan	9
BAB 4 Pelaksanaan Belanja	21
BAB 5 Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	49
BAB 6 Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kewajiban Pelayanan Umum	53
BAB 7 Operasional Badan Usaha Milik Negara	69
BAB 8 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	83
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

2.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

3.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan

4.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat

4.2 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah

5.1 Koreksi *Cost Recovery* Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

6.1 Perhitungan Subsidi

6.2 Anggaran dan Realisasi Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2011

6.3 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum

7.1 Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN

8.1 Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu lainnya

DAFTAR GRAFIK

2.1 Persentase Kasus Kerugian

2.2 Persentase Kasus Potensi Kerugian

2.3 Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan
3. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan
4. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
6. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
9. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
11. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
12. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kewajiban Pelayanan Umum
14. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kewajiban Pelayanan Umum

15. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kewajiban Pelayanan Umum
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
17. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
18. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
20. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
21. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya
22. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester I Tahun 2012
23. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester I Tahun 2012
24. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester I Tahun 2012
25. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDTT Semester I Tahun 2012

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

- Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.

- Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.

- Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Jika tidak, pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

BAB 2

Resume PDTT Semester I Tahun 2012

Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas 81 objek pemeriksaan pada 62 entitas. PDTT tersebut meliputi 37 objek pemeriksaan pada 23 entitas di lingkungan pemerintah pusat, 24 objek pemeriksaan pada 20 entitas di lingkungan pemerintah daerah, 18 objek pemeriksaan pada 17 entitas di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 2 objek pemeriksaan pada 2 entitas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Cakupan pemeriksaan atas 62 entitas tersebut adalah senilai Rp405,48 triliun.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam enam tema sebagai berikut

- pengelolaan pendapatan;
- pelaksanaan belanja;
- pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi;
- pelaksanaan subsidi pemerintah/kewajiban pelayanan umum;
- operasional BUMN; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Hasil PDTT dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih kasus dan dibedakan dalam dua kategori yaitu kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Hasil PDTT Semester I Tahun 2012 menunjukkan adanya 252 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	55
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	119
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	78
	Jumlah	**252**

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil PDTT Semester I Tahun 2012 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 702 kasus senilai Rp5.266.538,14 juta. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan :			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	210	821.923,44
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	55	1.527.976,33
3	Kekurangan Penerimaan	157	1.277.987,83
	Sub Total 1	**422**	**3.627.887,60**
4	Administrasi	201	-
5	Ketidakhematan	34	705.951,49
6	Ketidakefisienan	3	325.241,05
7	Ketidakefektifan	42	607.458,00
	Sub Total 2	**280**	**1.638.650,54**
	Jumlah	**702**	**5.266.538,14**

Berdasarkan Tabel 2.2., hasil pemeriksaan BPK yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012 menemukan sebanyak 702 kasus senilai Rp5.266.538,14 juta. Sub total 1 menunjukkan kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 422 kasus senilai Rp3.627.887,60 juta. Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan atau penyerahan aset. Sub total 2 menunjukkan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 280 kasus senilai Rp1.638.650,54 juta. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Rincian kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 210 kasus senilai Rp821.923,44 juta disajikan pada Lampiran 22. Kerugian negara/daerah/perusahaan antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemahalan harga (*mark up*), belanja/pengadaan fiktif, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar, dan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi. Persentase kasus kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian

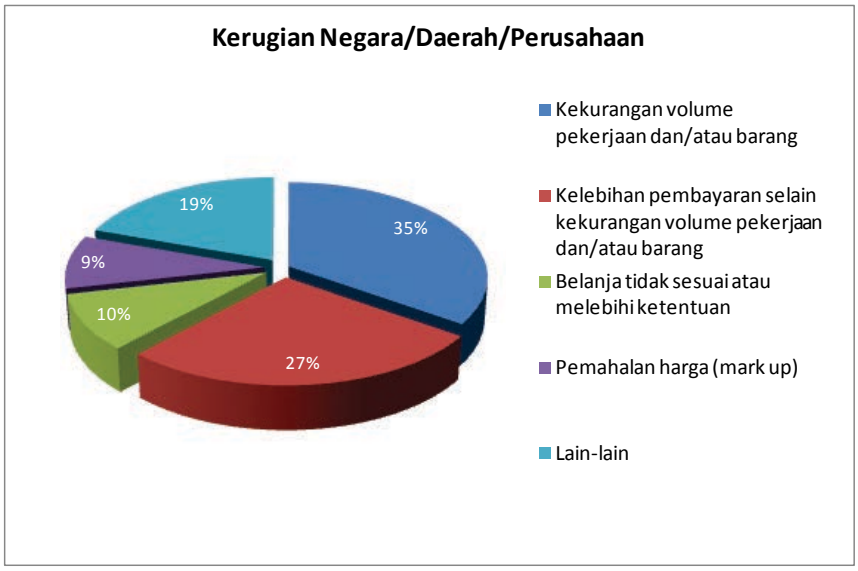

Grafik 2.1. menyajikan kasus-kasus kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 73 kasus (35 % dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp308.128,64 juta ditemukan pada pemeriksaan operasional BUMN, PDTT lainnya, dan pelaksanaan belanja;
- kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 57 kasus (27% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp57.171,21 juta ditemukan pada pemeriksaan pelaksanaan subsidi pemerintah, pelaksanaan belanja, operasional BUMN, dan PDTT lainnya;
- kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 20 kasus (10% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp4.368,76 juta ditemukan pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, dan PDTT lainnya; dan
- kasus pemahalan harga sebanyak 19 kasus (9% dari seluruh kasus kerugian) senilai Rp272.452,71 juta ditemukan pada pemeriksaan pelaksanaan belanja dan PDTT lainnya.

Rincian kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 55 kasus senilai Rp1.527.976,33 juta disajikan dalam Lampiran 23. Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan di antaranya terjadi karena rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih. Persentase kasus potensi kerugian yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian

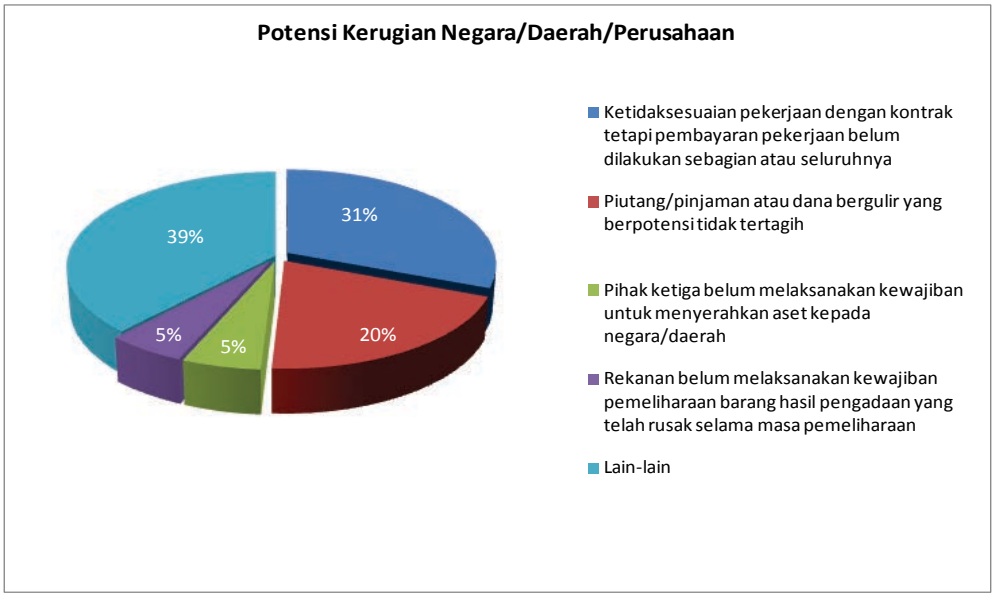

Grafik 2.2. menyajikan kasus-kasus potensi kerugian yang banyak terjadi, yaitu

- kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 17 kasus (31% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp140.349,00 juta ditemukan pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, dan PDTT lainnya;

- kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 11 kasus (20% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp60.513,96 juta ditemukan pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan, operasional BUMN, dan PDTT lainnya;

- kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah sebanyak 3 kasus (5% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp4.462,57 juta ditemukan pada pemeriksaan belanja dan pelaksanaan subsidi pemerintah; dan

- kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan sebanyak 3 kasus (5% dari seluruh kasus potensi kerugian) senilai Rp139,93 juta ditemukan pada pemeriksaan belanja.

Rincian kasus kekurangan penerimaan sebanyak 157 kasus senilai Rp1.277.987,83 juta disajikan dalam Lampiran 24. Kekurangan penerimaan di antaranya terjadi karena penerimaan negara/daerah belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan

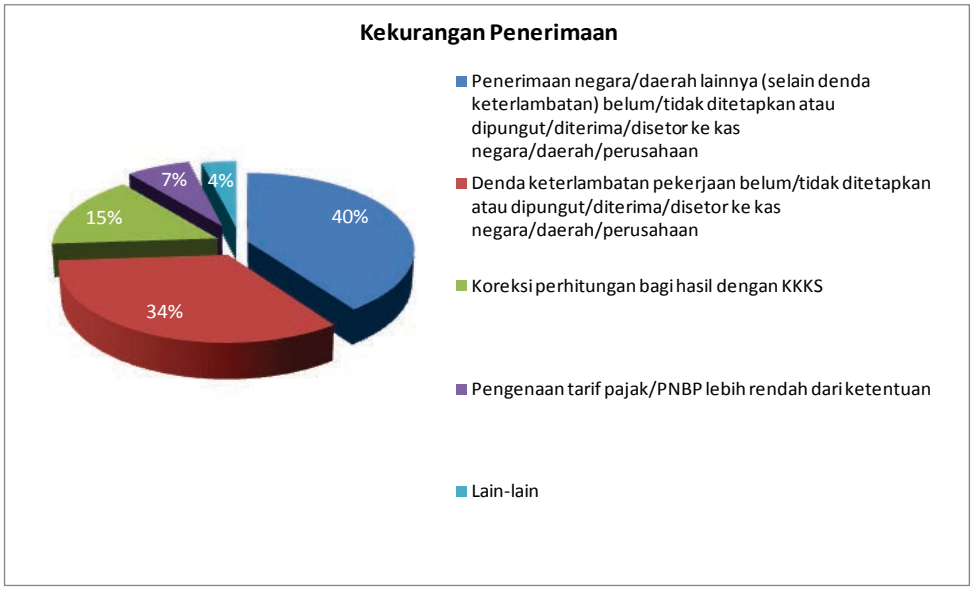

Grafik 2.3. menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi, yaitu

- kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 63 kasus (40% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp231.022,84 juta ditemukan pada pemeriksaan operasional BUMN, PDTT lainnya, pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, dan subsidi pemerintah;

- kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 53 kasus (34% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp107.868,36 juta ditemukan pada pemeriksaan subsidi pemerintah, pengelolaan pendapatan, pelaksanaan belanja, operasional BUMN, dan PDTT lainnya; dan

- kasus koreksi perhitungan bagi hasil dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebanyak 24 kasus (15% dari seluruh kasus kekurangan penerimaan) senilai Rp487.939,87 juta ditemukan pada pemeriksaan pelaksanaan KKS.

Pengembalian ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3.627.887,60 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp7.160,80 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp4.356,32 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.804,48 juta.

BAB 3

Pengelolaan Pendapatan

3.1 Pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan pajak asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.2 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas pengelolaan pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2009 s.d. 2011 atas 18 objek pemeriksaan pada 5 kementerian/lembaga (KL) dan 4 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Pemeriksaan pengelolaan pendapatan negara merupakan pemeriksaan PNBP pada 14 objek di 5 KL yaitu Kejaksaan RI, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, TNI AD, dan Kepolisian Negara RI. Adapun pemeriksaan pengelolaan pendapatan di lingkungan pemerintah daerah meliputi empat objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan pendapatan pajak reklame pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta serta pemungutan dan penyetoran pajak oleh Bendahara Pemerintah pada Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon.

3.4 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan adalah senilai Rp2,43 triliun dari realisasi anggaran pendapatan senilai Rp2,63 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp101,93 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan yang berdampak finansial.

Tujuan Pemeriksaan

3.5 Secara umum tujuan pemeriksaan atas pendapatan adalah untuk menilai apakah

- sistem pengendalian intern (SPI) yang terkait pengelolaan pendapatan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
- pemungutan, penatausahaan, dan penyetoran pendapatan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

3.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan

administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus".** Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

3.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

3.8 Hasil evaluasi atas SPI pendapatan menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- kelemahan atas struktur pengendalian intern.

3.9 Hasil evaluasi SPI terhadap pendapatan menunjukkan terdapat 51 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 28 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 1.

3.10 Sebanyak 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas

- sebanyak 6 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; dan
- sebanyak 4 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

3.11 Kasus-kasus tersebut terjadi di enam entitas seperti disajikan pada Lampiran 3.

3.12 Sebanyak 28 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 9 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan;

- sebanyak 17 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan

- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

3.13 Kasus-kasus tersebut terjadi di tujuh entitas seperti disajikan pada Lampiran 3.

3.14 Sebanyak 11 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 6 kasus entitas tidak memiliki *standard operating procedure* (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;

- sebanyak 3 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan

- sebanyak 2 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

3.15 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 3.

3.16 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2011 terdapat reklame yang sudah terpasang/tayang tetapi belum ditetapkan pajak reklame sehingga mengakibatkan tertundanya penagihan atas potensi pendapatan pajak reklame senilai Rp9.734,67 juta.

- Di Kejaksaan RI, pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Bengkulu selama Tahun 2010 dan 2011 terdapat penyimpanan uang barang bukti perkara pidana khusus tidak dititipkan ke bank pemerintah dan penyimpanan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) belum tercatat pada laporan barang bukti yang masih dalam proses hukum sehingga bisa menimbulkan peluang penyalahgunaan barang bukti.

- Di Kepolisian Negara RI, pada Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung, penerimaan hibah Tahun 2009 s.d. Juni 2011 belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan minimal senilai Rp4.654,15 juta dan belum dicatat dalam sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) minimal senilai Rp4.501,81 juta mengakibatkan akuntabilitas pendapatan hibah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan risiko penyalahgunaan dan hilangnya aset tetap perolehan dari hibah.

- Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat penatausahaan pajak TA 2010 dan 2011 pada Bank Maluku Cabang Piru tidak memadai, antara lain tidak memadai dan tidak lengkapnya pencatatan buku kontrol

dan pencatatan atas PPN dan PPh yang tidak dapat disetor, serta tidak dilakukan verifikasi surat perintah pencairan dana (SP2D) dan surat setoran pajak (SSP).

- Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, mekanisme pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak tidak diatur secara formal dalam sistem dan prosedur pengelolaan kas. Hal ini mengakibatkan rawannya penyimpangan pajak atas pajak yang dipungut, dipotong, dan disetor bukan oleh bendahara pengeluaran.

Penyebab

3.17 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun pengendalian kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait. Selain itu, kasus tersebut juga disebabkan mekanisme pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak tidak diatur secara formal dan tegas.

Rekomendasi

3.18 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi kepada pengelola yang lalai dalam melaksanakan tugas, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan koordinasi dengan pihak yang terkait. Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan agar menyusun mekanisme pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak secara formal dalam sistem dan prosedur pengelolaan kas serta melaporkan dan mencatat aset hibah.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

3.19 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 2 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pendapatan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan		
1	Kerugian Negara/Daerah	4	867,32
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah	7	55.546,51
3	Kekurangan Penerimaan	51	45.519,57
4	Administrasi	22	-
	Jumlah	**84**	**101.933,40**

3.20 Berdasarkan Tabel 3.1., hasil pemeriksaan mengungkapkan 84 kasus senilai Rp101.933,40 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan pendapatan atas 18 objek pemeriksaan pada 5 KL dan 4 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Kerugian Negara/Daerah (4 kasus senilai Rp867,32 juta)

3.21 Kerugian negara/daerah adalah berkurangnya kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3.22 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara/daerah meliputi belanja atau pengadaan fiktif lainnya (selain perjalanan dinas), penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

3.23 Hasil pemeriksaan atas pendapatan menunjukkan adanya kerugian negara/daerah sebanyak 4 kasus senilai Rp867,32 juta yang terdiri atas

- sebanyak 1 kasus belanja atau pengadaan fiktif lainnya (selain perjalanan dinas) senilai Rp397,91 juta;
- sebanyak 1 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp205,50 juta; dan
- sebanyak 2 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp263,91 juta.

3.24 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 3.

3.25 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kepolisian Negara RI (Polri), pada Polda Kepulauan Bangka Belitung, terdapat pendapatan pelatihan satpam TA 2009 dan 2010 yang digunakan langsung untuk biaya penginapan dan pelatihan yang berindikasi fiktif

senilai Rp397,91 juta dan kelebihan pembayaran atas biaya penginapan, biaya makan dan honor instruktur pelatihan senilai Rp192,10 juta mengakibatkan kerugian negara keseluruhan senilai Rp590,01 juta.

- Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat SSP TA 2010 dan 2011 senilai Rp205,50 juta yang disetorkan melalui Bank BNI cabang Ambon namun senyatanya dana tersebut tidak disetorkan ke Bank BNI melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat belanja makanan dan minuman (jasa katering/jasa boga) Tahun 2010 yang seharusnya tidak dikenakan PPN namun dikenakan PPN sehingga nilai kontrak pengadaan lebih besar dari seharusnya dan mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp71,81 juta.

Penyebab

3.26 Kasus-kasus kerugian negara/daerah pada umumnya terjadi karena pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung kurang optimal, sengaja menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya serta tidak cermat dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak.

Rekomendasi

3.27 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara/daerah dengan menyetorkan ke kas negara/daerah atau melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara/Daerah (7 kasus senilai Rp55.546,51 juta)

3.28 Potensi kerugian negara/daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

3.29 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih.

3.30 Hasil pemeriksaan atas pendapatan menunjukkan terdapat 7 kasus yang berpotensi merugikan negara/daerah senilai Rp55.546,51 juta, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp122,33 juta; dan

- sebanyak 6 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp55.424,18 juta.

3.31 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 3.

3.32 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kejaksaan Negara RI, pada Kejati dan Kejari di Kalimantan Selatan TA 2010 dan 2011 terdapat uang pengganti yang berasal dari perkara korupsi pada lima kejari belum tertagih mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp24.787,44 juta. Selain itu terdapat denda tilang yang diputus *verstek* pada tujuh kejari belum dibayar oleh pelanggar senilai Rp746,37 juta.

- Di Kejaksaan Negara RI, pada Kejati dan Kejari di Jambi TA 2010 dan 2011 terdapat uang pengganti yang berasal dari perkara korupsi pada delapan kejari belum tertagih mengakibatkan potensi kerugian negara senilai Rp18.496,09 juta.

- Di Kejaksaan RI, pada Kejati dan Kejari di Bengkulu TA 2010 dan 2011 terdapat piutang uang pengganti pada delapan kejari senilai Rp7.877,26 juta belum tertagih. Hal tersebut mengakibatkan tujuan utama dari pengenaan hukuman membayar uang pengganti untuk mengoptimalkan pengembalian uang negara yang hilang akibat perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejari tidak tercapai.

Penyebab

3.33 Kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana kurang optimal dalam mengintensifkan penagihan piutang, serta pengawasan atasan langsung terkait pengelolaan uang/penerimaan masih lemah.

Rekomendasi

3.34 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar lebih optimal dalam melaksanakan eksekusi atas uang pengganti dan pengawasan atasan langsung terkait dengan pengelolaan uang/penyelesaiannya dan atau dalam rangka tertib administrasi lebih ditingkatkan, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian uang titipan.

Kekurangan Penerimaan (51 kasus senilai Rp45.519,57 juta)

3.35 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

3.36 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan negara/daerah, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

3.37 Hasil pemeriksaan atas pendapatan menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 51 kasus senilai Rp45.519,57 juta, yang terdiri atas

- sebanyak 2 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp120,55 juta;
- sebanyak 40 kasus penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp36.683,87 juta;
- sebanyak 4 kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah senilai Rp7.759,77 juta; dan
- sebanyak 5 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp955,38 juta.

3.38 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 3.

3.39 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pelayanan Pajak terdapat kekurangan penerimaan pajak Tahun 2011 atas 1.804 reklame yang sudah habis masa berlakunya dan belum daftar ulang namun masih tayang senilai Rp8.309,95 juta.
- Di Provinsi Maluku, terdapat PPN dan PPh TA 2010 dan 2011 belum disetor oleh bendahara umum daerah (BUD) pada PT BPD Maluku yang mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan negara atas penyetoran PPN dan PPh senilai Rp6.910,27 juta.
- Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, terdapat PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan PNS, bupati dan wakil bupati TA 2010 dan 2011 yang belum disetor ke kas negara mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp3.730,58 juta.
- Di TNI AD, pada Kodam I Bukit Barisan (Kodam I/BB), pemanfaatan aset/barang milik negara di lingkungan Kodam I/BB belum ada izin dan hasilnya digunakan langsung mengakibatkan PNBP kurang diterima minimal senilai Rp2.895,84 juta dan USD327.60 ribu (ekuivalen Rp3.105,64 juta) atau seluruhnya senilai Rp6.001,48 juta.

- Di Kementerian Luar Negeri, pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Warsawa terdapat PNBP atas kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan KBRI antara lain pelayanan jasa konsuler dan jasa keimigrasian TA 2010 dan 2011 yang belum disetor ke kas negara. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai USD213.52 ribu (ekuivalen Rp1.824,17 juta). Selain itu terdapat restitusi pajak atas pengadaan barang dan jasa belum mendapat penggantian dari Pemerintah Polandia minimal senilai PLN54.42 ribu (ekuivalen Rp150,47 juta).

- Di Kejaksaan Negara RI, pada Kejati dan Kejari di Kalimantan Tengah TA 2010 dan 2011 terdapat penerimaan dari denda tilang dan ongkos perkara tilang pada empat kejari masih tersimpan di rekening giro per tanggal 11 Oktober 2011 dan belum disetorkan ke kas negara. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp1.833,84 juta.

- Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat PPN dan PPh TA 2010 dan 2011 atas empat SKPD belum disetor ke kas negara yang mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan negara senilai Rp1.552,05 juta.

3.40 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp45.519,57 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp403,99 juta, diantaranya adalah Mabes TNI senilai USD34.15 ribu (ekuivalen Rp323,82 juta), Kementerian Luar Negeri senilai USD6.58 ribu (ekuivalen Rp62,40 juta), Kejaksaan RI senilai Rp11,32 juta, Kepolisian Negara RI senilai Rp6,09 juta, dan Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku senilai Rp466,60 ribu.

Penyebab

3.41 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung. Selain itu, kasus kekurangan penerimaan terjadi karena kurangnya koordinasi dengan pihak terkait.

Rekomendasi

3.42 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar mempertanggungjawabkan hasil penerimaan atas pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu BPK telah merekomendasikan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan.

Administrasi (22 kasus)

3.43 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

3.44 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah serta penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.

3.45 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan dan pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.

3.46 Hasil pemeriksaan atas pendapatan menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sebanyak 22 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 3 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah;
- sebanyak 6 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 12 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan.

3.47 Kasus-kasus tersebut terjadi di enam entitas seperti disajikan pada Lampiran 3.

3.48 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pelayanan Pajak TA 2011 terdapat tujuh permohonan izin reklame yang masih dalam proses Dinas Tata Ruang dan 24 reklame yang masih dalam proses Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)-nya oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak II Kota Administrasi Jakarta Barat senilai Rp3.073,57 juta.

- Di Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdapat keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut TA 2010 dan 2011 pada Bagian Umum dan Perlengkapan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kelautan, dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon dengan waktu keterlambatan berkisar antara 1 s.d. 10 bulan, yang mengakibatkan keterlambatan penerimaan negara senilai Rp2.155,79 juta.

- Di Kejaksaan RI, Kejati dan Kejari Kalimantan Tengah, pada Tahun 2010 dan 2011 terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan denda tilang senilai Rp1.300,57 juta yang disebabkan pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang tidak sesuai ketentuan.

- Di Kejaksaan RI, Kejati dan Kejari Jambi, pada Tahun 2010 dan 2011 terdapat uang rampasan terlambat diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Bendahara Khusus Penerima sehingga terlambat disetorkan ke kas negara senilai Rp381,60 juta.

Penyebab

3.49 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, para pelaksana lalai dalam pelaksanaan tugas dan kurang mematuhi ketentuan dalam melakukan penyetoran pendapatan negara/daerah.

Rekomendasi

3.50 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pejabat pelaksana yang lalai dalam menaati ketentuan perundang-undangan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

3.51 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Pelaksanaan Belanja

4.1 Pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

4.2 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan PDTT atas pelaksanaan belanja TA 2009 s.d. 2011 atas 36 entitas pada 20 kementerian/lembaga (KL) dan 16 pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. Pemeriksaan meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah.

4.3 Pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja terdiri atas 2 subtema, yaitu sebagai berikut:

- Belanja pemerintah pusat; dan
- Belanja pemerintah daerah.

4.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pemeriksaan pelaksanaan belanja dapat dilihat pada uraian berikut.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

4.5 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah memeriksa belanja pemerintah pusat TA 2009 s.d. 2011. Pemeriksaan dilakukan pada 20 KL yang meliputi 33 objek pemeriksaan.

4.6 Cakupan pemeriksaan belanja pemerintah pusat pada 20 KL adalah senilai Rp12,85 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp13,62 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp270,59 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

4.7 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah

- sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;

- penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban anggaran belanja telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pelaksanaan kegiatan yang terkait pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku dengan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan
- informasi keuangan telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

4.8 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

4.9 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

4.10 Salah satu tujuan pemeriksaan atas belanja adalah untuk menilai apakah SPI atas pelaksanaan anggaran belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

4.11 Hasil evaluasi atas SPI belanja menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta SOP yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- kelemahan atas struktur pengendalian intern.

4.12 Hasil evaluasi SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan terdapat 56 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 19 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 27 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 4.

4.13 Sebanyak 19 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas

- sebanyak 13 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak 3 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
- sebanyak 2 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

4.14 Kasus-kasus tersebut terjadi di tujuh entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.15 Sebanyak 27 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 5 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 18 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 2 kasus pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN;
- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; dan
- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.

4.16 Kasus-kasus tersebut terjadi di delapan entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.17 Sebanyak 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 6 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 3 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan
- sebanyak 1 kasus entitas tidak memiliki satuan pengawas intern.

4.18 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.19 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Negeri Kalimantan Tengah, terdapat penitipan barang bukti berupa uang yang disimpan dalam rekening penitipan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Sampit serta dalam brankas bendaharawan pengeluaran pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya senilai Rp2.963,00 juta tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan Menteri Keuangan tidak dapat memonitor atas penyimpanan uang barang bukti/sitaan dan pengamanan atas uang barang bukti menjadi kurang terjamin serta dapat menimbulkan peluang penyalahgunaan atas barang bukti tersebut.

- Di Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Roma, terdapat pengadaan barang yang dilaksanakan Tahun 2010 belum dicatat dan belum diinput dalam SIMAK senilai Rp1.655,32 juta. Hal tersebut mengakibatkan laporan barang milik negara (BMN) pada KBRI Roma belum menyajikan nilai BMN yang sebenarnya.

- Di Kementerian Luar Negeri, pada KBRI Washington DC terdapat beban pusat persekot resmi minus senilai USD115.46 ribu ekuivalen Rp1.032,24 juta belum mendapat penggantian dari Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri sehingga mengakibatkan anggaran rutin KBRI Washington terbebani.

- Di Kementerian Luar Negeri, pada KBRI Takhta Suci Vatikan terdapat pengeluaran TA 2010 untuk promosi budaya dan kerjasama pendidikan yang kegiatannya berada di wilayah kerja KBRI Roma mengakibatkan pelaksanaan kegiatan KBRI Vatikan berbenturan tugas dan fungsi dengan KBRI Roma sehingga berpotensi menimbulkan pembebanan keuangan negara yang berlebihan.

Penyebab

4.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena perencanaan tidak memadai, pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta SOP termasuk kesepakatan pembagian tugas dan fungsi belum memadai.

Rekomendasi

4.21 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP, serta memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

4.22 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 5 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 6.

Tabel 4.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Pusat

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (Juta Rp)
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang mengakibatkan		
1	Kerugian Negara	71	46.909,41
2	Potensi Kerugian Negara	2	21,74
3	Kekurangan Penerimaan	17	10.183,48
4	Administrasi	58	-
5	Ketidakhematan	19	29.450,30
6	Ketidakefisienan	1	4.753,18
7	Ketidakefektifan	16	179.276,27
	Jumlah	**184**	**270.594,38**

4.23 Berdasarkan Tabel 4.1., hasil pemeriksaan mengungkapkan 184 kasus senilai Rp270.594,38 juta, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 20 KL.

Kerugian Negara (71 kasus senilai Rp46.909,41 juta)

4.24 Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4.25 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara meliputi belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, dan pemahalan harga (*mark up*). Kerugian negara juga meliputi pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

4.26 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 71 kasus senilai Rp46.909,41 juta yang terdiri atas

- sebanyak 6 kasus belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif senilai Rp5.634,09 juta;
- sebanyak 2 kasus rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan senilai Rp1.205,13 juta;
- sebanyak 19 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp11.105,79 juta;
- sebanyak 20 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp6.185,53 juta;
- sebanyak 3 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp20.859,86 juta;
- sebanyak 3 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp248,65 juta;
- sebanyak 4 kasus pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp194,76 juta;
- sebanyak 3 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp28,03 juta; dan
- sebanyak 11 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1.447,57 juta.

4.27 Kasus-kasus tersebut terjadi di 15 entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna di Sumatera Selatan sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp7.813,77 juta.
- Di Kepolisian Negara RI, pada Polda Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d. 2011 terdapat kelebihan pembayaran atas kegiatan yang bersifat rutin seperti kegiatan lidik selidik, kegiatan magang dan pembulatan bintara, piket jaga, dan kegiatan pengadaan barang jasa mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1.094,63 juta. Atas kerugian negara tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp322,65 juta.
- Di TNI AD, pada Kodam I Bukit Barisan di Medan terdapat pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan pendidikan Akademi Perawatan (Akper) Paramedis Kesdam I/BB Tahun 2010 dan 2011 berindikasi tidak dilaksanakan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp327,52 juta. Atas kerugian negara tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas

negara senilai Rp21,97 juta. Selain itu di Zidam I/BB terdapat pekerjaan pemeliharaan mesin stasioner TA 2011 senilai Rp48,00 juta dan kegiatan pemanasan materiil Zeni TA 2010 dan 2011 senilai Rp481,57 juta tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp529,57 juta.

- Di Kementerian Perhubungan, pelaksanaan pekerjaan Spesifik Sinyal dan Telekomunikasi Pembangunan Jalan Kereta Api Jalur Ganda Cirebon-Kroya TA 2010 dan 2011 tidak sesuai kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran pengadaan kabel senilai Rp563,10 juta dan kelebihan pembayaran pekerjaan instalasi dan non instalasi senilai Rp267,29 juta.

4.29 Dari kasus-kasus kerugian negara senilai Rp46.909,41 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp2.805,27 juta di antaranya adalah Kementerian Perhubungan senilai Rp1.658,73 juta, Kepolisian Negara RI senilai Rp454,20 juta, dan TNI AL senilai Rp227,19 juta.

Penyebab

4.30 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, dan penerima barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang yang diterima. Selain itu, pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai kondisi senyatanya, lalai dalam pelaksanaan tugas dan tidak cermat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Rekomendasi

4.31 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (2 kasus senilai Rp21,74 juta)

4.32 Potensi kerugian negara adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

4.33 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya, pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.

4.34 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 2 kasus senilai Rp21,74 juta yang terdiri atas

- sebanyak 1 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp21,74 juta; dan

- sebanyak 1 kasus pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan.

4.35 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.36 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kejaksaan RI, pada Kejati dan Kejari Kalimantan Selatan, terdapat analisa harga satuan pekerjaan atas lima jenis pekerjaan tidak sesuai standar SNI dan kelebihan perhitungan penggunaan bekisting senilai Rp19,24 juta serta terdapat kelebihan perhitungan penugasan operator komputer dan administrasi senilai Rp2,50 juta, namun atas dua pekerjaan tersebut pembayarannya belum 100% sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara seluruhnya senilai Rp21,74 juta.

Penyebab

4.37 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena konsultan perencana, pengawas, dan kontraktor pelaksana tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.38 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara atau melengkapi pekerjaan sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan (17 kasus senilai Rp10.183,48 juta)

4.39 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

4.40 Kasus-kasus kekurangan penerimaan negara meliputi penerimaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan.

4.41 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 17 kasus senilai Rp10.183,48 juta, yang terdiri atas

- sebanyak 9 kasus denda keterlambatan pekerjaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp3.761,28 juta;

- sebanyak 5 kasus penerimaan negara (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp6.310,91 juta; dan

- sebanyak 3 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp111,29 juta.

4.42 Kasus-kasus tersebut terjadi di enam entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.43 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, PT DGI belum menyelesaikan pembayaran atas penggunaan tiang pancang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp2.552,38 juta.

- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat pendapatan bunga jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan keuangan negara dan kekurangan penerimaan jasa giro dari dana bantuan minimal senilai Rp2.481,01 juta.

- Di TNI AD, terdapat pelaksanaan kegiatan pengadaan di lingkungan Direktorat Peralatan TA 2010 dan 2011 terlambat tetapi belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp1.955,20 juta.

- Di TNI AL, Pangkalan Utama TNI AL IV Tanjung Pinang, terdapat pembayaran tunjangan kinerja Tahun 2011 dengan menggunakan dana potongan PPh Pasal 21 karena jumlah kebutuhan tunjangan kinerja yang lebih besar dari pendanaan yang diterima mengakibatkan penerimaan negara dari PPh Pasal 21 kurang diterima senilai Rp720,61 juta.

4.44 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp10.183,48 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp1.737,09 juta, di antaranya oleh TNI AL senilai Rp1.530,58 juta dan Mabes TNI Rp125,11 juta.

Penyebab

4.45 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pemanfaatan aset oleh entitas belum mengacu pada ketentuan, dan rekanan tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati,

penanggung jawab kurang memperhitungkan secara akurat kebutuhan yang riil atas tunjangan kinerja yang harus dibayarkan, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.46 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan melakukan upaya penarikan atas kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan.

Administrasi (58 kasus)

4.47 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara, tidak mengurangi hak negara, kekurangan penerimaan negara, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

4.48 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian negara, pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan, pelaksanaan lelang secara proforma, dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.

4.49 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain, penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara.

4.50 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 58 kasus yang terdiri atas

- sebanyak 6 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 12 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 5 kasus pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran;

- sebanyak 14 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 4 kasus pelaksanaan lelang secara proforma;
- sebanyak 11 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara;
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 1 kasus penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan; dan
- sebanyak 2 kasus sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara.

4.51 Kasus-kasus tersebut terjadi di 12 entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.52 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AU, Staf Personel TNI AU (Spersau), terdapat belanja barang rutin pada dinas-dinas di jajaran Spersau TA 2010 dan 2011 yang dipertanggungjawabkan melalui kontrak dengan pihak mitra pelaksana namun realisasi pelaksanaannya tidak sesuai dengan pertanggungjawabannya sehingga atas kegiatan belanja barang tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan secara riil senilai Rp5.092,90 juta.
- Di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pada BA 999.08 terdapat aset yang dihasilkan dari realisasi belanja TA 2011 senilai Rp3.278,90 juta belum diserahkan oleh Kementerian Keuangan kepada BPPT.
- Di Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdapat penggunaan biaya personel pada pengadaan peralatan dan sistem pengelolaan TI dan telekomunikasi TA 2010 kurang dilengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp2.500,05 juta mengakibatkan biaya personel yang telah dibayarkan kepada rekanan tidak dapat diyakini kewajarannya.
- Di Kementerian Luar Negeri, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth, terdapat kendaraan dinas dan barang rusak berat belum dihapuskan mengakibatkan aset-aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan operasional masih tercatat dalam laporan BMN sehingga laporan BMN tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Penyebab

4.53 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan anggaran, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta penanggung jawab terkait penghapusan aset kurang aktif menanggapi usulan penghapusan dari KJRI Perth.

Rekomendasi

4.54 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas perkembangan pengajuan usulan penghapusan aset.

Ketidakhematan (19 kasus senilai Rp29.450,30 juta)

4.55 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

4.56 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 19 kasus pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp29.450,30 juta.

4.57 Kasus-kasus tersebut terjadi di tujuh entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.58 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di TNI AD, Direktorat Peralatan TNI AD, terdapat harga pengadaan senjata dan peralatannya TA 2010 lebih tinggi dari *price list* yang dikeluarkan oleh supplier luar negeri mengakibatkan kemahalan harga pengadaan senilai Rp7.491,05 juta.

- Di Kementerian Perhubungan, terdapat pengadaan bahan/material untuk pekerjaan Satuan Kerja Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa TA 2010 dan 2011 yang tidak memanfaatkan persediaan bahan di gudang hasil pengadaan TA 2010 mengakibatkan pemborosan senilai Rp3.589,13 juta.

- Di TNI AU, Staf Personel TNI AU, terdapat harga pengadaan barang belum sesuai dengan satuan indeks harga yang berlaku di lingkungan TNI AU mengakibatkan harga barang yang ditetapkan dalam kontrak lebih tinggi dari yang seharusnya senilai Rp2.621,31 juta.

- Di Kementerian Perhubungan, terdapat pekerjaan studi standardisasi jembatan (*I-Girder, U-Girder,* dan *Voided Slab)* Tahun 2011 yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di TA 2007 dan 2008 dengan kajian *I-Girder* dan *Voided Slab* dan bahkan sampai dengan TA 2010 telah dimanfaatkan sebagai acuan pekerjaan jembatan di sebagian lokasi Cirebon-Kroya mengakibatkan pemborosan keuangan negara senilai Rp1.354,80 juta.

Penyebab

4.59 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena adanya kecenderungan memanfaatkan anggaran tanpa memperhatikan prinsip ekonomis, entitas kurang cermat merencanakan kegiatan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.60 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefisienan (1 kasus senilai Rp4.753,18 juta)

4.61 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

4.62 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya satu kasus ketidakefisienan, yaitu penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp4.753,18 juta.

4.63 Kasus tersebut terjadi di Kementerian Perhubungan, terdapat realisasi pekerjaan timbunan *sub ballast* berupa lapisan pasir batu (sirtu) dan pekerjaan penimbunan tanah belum sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis diperlukan tambahan volume urugan sirtu maupun tanah timbunan meskipun dengan risiko pekerjaan yang sama diulang kembali yang mengakibatkan pengeluaran biaya untuk pekerjaan tersebut menjadi tidak efisien senilai Rp4.753,18 juta.

Penyebab

4.64 Kasus ketidakefisienan terjadi karena anggaran yang tersedia relatif terbatas sehingga anggarannya tidak dapat dipenuhi secara utuh sesuai dengan gambar yang diusulkan.

Rekomendasi

4.65 Terhadap kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar pejabat terkait memberikan sanksi kepada KPA sesuai ketentuan berlaku.

Ketidakefektifan (16 kasus senilai Rp179.276,27 juta)

4.66 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

4.67 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak pada pencapaian tujuan organisasi, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4.68 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp179.276,27 juta yang terdiri atas

- sebanyak 6 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp103.334,49 juta;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp388,84 juta;
- sebanyak 5 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp75.259,57 juta;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi; dan
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp293,37 juta.

4.69 Kasus-kasus tersebut terjadi di sepuluh entitas seperti disajikan pada Lampiran 6.

4.70 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Mabes TNI, penggunaan dana *reimbursement* sebagai bentuk kompensasi berupa penggantian dana atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI untuk mendukung kegiatan operasional pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di bawah bendera PBB Tahun 2010 dan 2011 tidak sesuai dengan tujuannya antara lain digunakan untuk perjalanan dinas luar negeri pejabat di lingkungan TNI dan dipinjamkan kepada beberapa satker untuk berbagai kegiatan senilai Rp88.622,71 juta.

- Di Kementerian Perhubungan, terdapat hasil pengadaan pekerjaan Satuan Kerja Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa TA 2010 dan 2011 senilai Rp68.692,98 juta berpotensi rusak dan tidak terpelihara karena tidak segera dimanfaatkan.

Penyebab

4.71 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas membuat perencanaan yang kurang memadai, menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan anggaran, PPK dan penanggung jawab kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pengawasan dan pengendalian belum optimal.

Rekomendasi

4.72 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan, dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

4.73 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2009, 2010, dan 2011 atas 18 objek pemeriksaan pada 16 entitas pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

4.74 Cakupan pemeriksaan belanja daerah pada 16 entitas tersebut adalah senilai Rp4,17 triliun dari realisasi anggaran belanja senilai Rp9,13 triliun. Total temuan pemeriksaan senilai Rp239,32 miliar merupakan temuan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Tujuan Pemeriksaan

4.75 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah

- SPI yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan

- pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

4.76 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

4.77 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

4.78 Pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah bertujuan antara lain menilai apakah SPI entitas terhadap belanja daerah maupun terhadap pengamanan atas kekayaan daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

4.79 Hasil evaluasi SPI atas pemeriksaan belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kelemahan atas aspek perencanaan, pembukuan dan pencatatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan sebagai berikut:

- kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan;
- kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan
- kelemahan atas struktur pengendalian intern.

4.80 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada 16 entitas menunjukkan adanya 18 kasus kelemahan SPI, yaitu 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 9 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 7.

4.81 Sebanyak satu kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

4.82 Sebanyak 9 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, terdiri atas

- sebanyak 6 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;

- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; dan

- sebanyak 1 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.

4.83 Kasus-kasus tersebut terjadi di enam entitas seperti disajikan pada Lampiran 9.

4.84 Sebanyak 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;

- sebanyak 3 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati; dan

- sebanyak 1 kasus satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

4.85 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 9.

4.86 Kasus-kasus SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Banten, pada pemeriksaan belanja hibah dan bantuan sosial (bansos), proses penganggaran terkait dana hibah dan bansos belum memiliki tolok ukur yang jelas serta belum memadai. Permasalahan ini mengakibatkan akuntabilitas besaran anggaran hibah dan bansos sangat lemah karena tidak berdasarkan pertimbangan dokumen perencanaan yang berbasis kinerja dan proses pelibatan dengan *stakeholder* yang ada.

- Di Provinsi Banten, pada pemeriksaan belanja hibah dan bansos, sistem pengendalian internal terhadap aspek monitoring pertanggungjawaban pemberian hibah dan bansos belum memadai antara lain yaitu untuk pemberian hibah dan bansos selama Tahun 2010 dan 2011 belum memiliki tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan peraturan gubernur, aturan terkait hibah sangat longgar terutama terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban, serta tidak pernah ada aktivitas evaluasi dan monitoring pertanggungjawaban atas pemberian bansos.

- Di Kota Cilegon, Provinsi Banten, pengawasan dan pengendalian internal Dinas Pendidikan atas pelaksanaan kegiatan di SMP/SMA/SMK kurang optimal antara lain yaitu berita acara atas pelaporan dan rekonsiliasi keuangan belum dibuat dan belum didokumentasikan dengan baik, tidak melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan terhadap hasil pengadaan barang hanya dilaksanakan pada saat penyerahan barang dari

penyedia barang/jasa. Permasalahan ini mengakibatkan adanya resiko penyimpangan yang tidak dapat dideteksi/diantisipasi secara dini oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Penyebab

4.87 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, kurang cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas, serta pengawasan maupun pengendalian kegiatan lemah.

Rekomendasi

4.88 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

4.89 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 8 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 9.

Tabel 4.2. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Belanja Pemerintah Daerah

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	103	59.410,30
2	Potensi Kerugian Daerah	16	22.737,21
3	Kekurangan Penerimaan	36	2.746,22
4	Administrasi	30	-
5	Ketidakhematan	6	1.507,26
6	Ketidakefektifan	9	152.920,25
	Jumlah	**200**	**239.321,24**

4.90 Berdasarkan Tabel 4.2., hasil pemeriksaan mengungkapkan 200 kasus senilai Rp239.321,24 juta, sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 16 pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Kerugian Daerah (103 kasus senilai Rp59.410,30 juta)

4.91 Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4.92 Pada umumnya kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan fiktif lainnya, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pemahalan harga (*mark up*), dan biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan.

4.93 Kerugian daerah juga meliputi pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan.

4.94 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 103 kasus senilai Rp59.410,30 juta, terdiri atas

- sebanyak 2 kasus belanja atau pengadaan fiktif selain perjalanan dinas senilai Rp424,89 juta;
- sebanyak 52 kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp32.563,29 juta;
- sebanyak 25 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp17.846,85 juta;
- sebanyak 12 kasus pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp6.006,69 juta;
- sebanyak 2 kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp484,89 juta;
- sebanyak 1 kasus pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp66,70 juta;
- sebanyak 4 kasus spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp905,56 juta; dan
- sebanyak 5 kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1.111,43 juta.

4.95 Kasus-kasus tersebut terjadi di 16 entitas seperti disajikan pada Lampiran 9.

4.96 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat pembayaran 18 paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur TA 2010 s.d. 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp9.920,76 juta.

- Di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 13 paket pekerjaan pembangunan jalan dan drainase TA 2010 pada Dinas PU dan Perhubungan tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp4.721,32 juta.

- Di Provinsi DKI Jakarta, pada Dinas Pendidikan terdapat belanja dana pendidikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di SMAN 53 Jakarta Timur Tahun Pelajaran 2010/2011 tidak didukung bukti pengeluaran riil. Hal tersebut mengakibatkan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tersebut menjadi tidak sah dan berindikasi kerugian daerah senilai Rp422,44 juta. Atas kerugian daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp250,00 juta.

- Di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Dinas PU TA 2011 terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sepuluh pekerjaan peningkatan jalan mengakibatkan kerugian keuangan daerah senilai Rp1.392,87 juta.

4.97 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp59.410,30 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp1.409,05 juta, di antaranya adalah Kota Cilegon Provinsi Banten senilai Rp606,06 juta; Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp325,00 juta, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp303,51 juta.

Penyebab

4.98 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

4.99 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Daerah (16 kasus senilai Rp22.737,21 juta)

4.100 Potensi kerugian daerah adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

4.101 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian daerah meliputi ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya dan pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah serta lain-lain kasus potensi kerugian daerah.

4.102 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya potensi kerugian daerah sebanyak 16 kasus senilai Rp22.737,21 juta, terdiri atas

- sebanyak 9 kasus ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp20.689,18 juta;
- sebanyak 3 kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan senilai Rp139,93 juta;
- sebanyak 2 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah; dan
- sebanyak 2 kasus potensi kerugian daerah lainnya senilai Rp1.908,10 juta.

4.103 Kasus-kasus tersebut terjadi di tujuh entitas seperti disajikan pada Lampiran 9.

4.104 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada Dinas PU bidang Bina Marga TA 2010 terdapat pekerjaan peningkatan jalan Simpang Batu Redi – Batu Redi dan ruas Sei. Beno Harapan – Simpang Libas realisasi keuangannya melebihi realisasi fisik riil lapangan. Namun kekurangan volume bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp12.924,42 juta.
- Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada Dinas PU TA 2010 terdapat kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Agung Sangata tahap II, tetapi kekurangan volume bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp3.265,52 juta.

- Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pada Dinas PU TA 2010 terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi serta kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan yang merupakan kewajiban/tanggungan kontraktor pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Sangata namun bisa diperhitungkan pada realisasi keuangan berikutnya sehingga mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp2.016,78 juta.

Penyebab

4.105 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

4.106 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada kontraktor sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, memberi sanksi kepada pelaksana, serta memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya.

Kekurangan Penerimaan (36 kasus senilai Rp2.746,22 juta)

4.107 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

4.108 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut yaitu denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah dan penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah.

4.109 Hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 36 kasus senilai Rp2.746,22 juta, terdiri atas

- sebanyak 33 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp2.377,16 juta; dan

- sebanyak 3 kasus penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp369,06 juta.

4.110 Kasus-kasus tersebut terjadi di 13 entitas seperti disajikan pada Lampiran 9.

4.111 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan unit pemukiman Transmigrasi II – III pada Dinas PU TA 2007 belum selesai dan tidak dilanjutkan tetapi belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp506,17 juta.

- Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan 14 paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana gedung dan jalan oleh Dinas PU dan Dinas Pemuda dan Olahraga TA 2011 mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tetapi denda keterlambatan belum dipungut sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp344,69 juta.

- Di Provinsi Banten, pelaksanaan kegiatan pembangunan beberapa puskesmas dengan tempat perawatan pada Dinas Kesehatan TA 2011 mengalami keterlambatan tetapi denda keterlambatan belum dipungut sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp201,72 juta.

- Di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan TA 2011 mengalami keterlambatan tetapi belum dikenakan denda keterlambatan sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah senilai Rp194,24 juta.

4.112 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp2.746,22 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp92,96 juta, di antaranya adalah Kota Tangerang, Provinsi Banten senilai Rp46,14 juta, Kota Serang, Provinsi Banten senilai Rp28,08 juta dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten senilai Rp17,39 juta.

Penyebab

4.113 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

4.114 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta memasukkan kontraktor ke daftar hitam (*blacklist*).

Administrasi (30 kasus)

4.115 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

4.116 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan administrasi meliputi pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah, dan pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan.

4.117 Penyimpangan administrasi juga meliputi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.

4.118 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 30 kasus, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 15 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 9 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan tetapi tidak menimbulkan kerugian daerah;
- sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah; dan
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.

4.119 Kasus-kasus tersebut terjadi di sepuluh entitas seperti disajikan pada Lampiran 9.

4.120 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Provinsi Banten, pada pemeriksaan belanja hibah dan bansos, sebanyak 92 organisasi penerima hibah uang TA 2010 dan 2011 dari Provinsi Banten

belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengakibatkan APBD yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja hibah senilai Rp68.298,59 juta tidak dapat dipastikan subtansi penggunaannya dan berisiko digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian hibahnya.

- Di Kota Jayapura, Provinsi Papua, terdapat pengeluaran untuk bantuan kepada partai politik, bantuan sosial, dan belanja hibah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan organisasi kemasyarakatan senilai Rp41.006,48 juta TA 2011 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum dipertanggungjawabkan mengakibatkan belanja tersebut tidak dapat diyakini kebenaran penggunaannya.

- Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perubahan metode pelaksanaan pekerjaan dan penambahan item pekerjaan baru pada Dinas PU TA 2010 tidak dituangkan dalam justifikasi teknis sehingga mengakibatkan nilai pekerjaan senilai Rp6.432,25 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

Penyebab

4.121 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam membuat pertanggungjawaban kegiatan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

4.122 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar melengkapi bukti pertanggungjawaban, memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di unit kerjanya masing-masing.

Ketidakhematan (6 kasus senilai Rp1.507,26 juta)

4.123 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

4.124 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar dan pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga.

4.125 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak 6 kasus senilai Rp1.507,26 juta yang terdiri atas

- sebanyak 1 kasus penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar; dan

- sebanyak 5 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp1.507,26 juta.

4.126 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 9.

4.127 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perhitungan koefisien analisis harga satuan pada pekerjaan penghampar lapis pondasi atas aspal beton tidak sesuai dengan standar mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp606,67 juta.

- Di Kota Jayapura, Provinsi Papua, terdapat kemahalan harga pada pekerjaan pembangunan gedung olahraga (GOR) (Tahap VIII) pada Dinas PU TA 2011 senilai Rp97,11 juta, kemahalan harga akibat selisih harga dalam rencana anggaran biaya (RAB) dengan standardisasi harga satuan yang telah ditetapkan kepala daerah pada pekerjaan pengadaan pakaian pada Dinas Pendidikan TA 2011 senilai Rp311,31 juta serta kemahalan harga pada pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) TA 2011 senilai Rp120,73 juta sehingga memboroskan keuangan daerah keseluruhan senilai Rp529,15 juta.

- Di Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat perhitungan analisis harga satuan pada pekerjaan pembangunan jalan Trans Kalimantan Timur - Bebakung pada Dinas PU dan Perhubungan dhi. Bidang Bina Marga TA 2010 yang tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp336,61 juta.

Penyebab

4.128 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas, panitia pengadaan kurang cermat dalam merencanakan kegiatan dan menyusun HPS, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

4.129 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (9 kasus senilai Rp152.920,25 juta)

4.130 Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

4.131 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4.132 Hasil pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 9 kasus senilai Rp152.920,25 juta yang terdiri atas

- sebanyak 3 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp32,92 juta;
- sebanyak 3 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp152.887,33 juta; dan
- sebanyak 3 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4.133 Kasus-kasus tersebut terjadi di sembilan entitas seperti disajikan pada Lampiran 9.

4.134 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat aset hasil pengadaan Tahun 2006 hingga 2011 berupa pasar Kecamatan Long Ikis dan hasil pengadaan Tahun 2009 berupa jembatan Tanah Grogot-Sungai Tuak dengan total aset senilai Rp76.992,77 juta belum digunakan sehingga belum memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaannya dan berpotensi rusak.
- Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat aset hasil pengadaan TA 2008 s.d 2011 berupa gedung Christian Center dan Graha Kutim Expo Center senilai Rp73.011,71 juta belum dapat digunakan sehingga belum memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaannya.
- Di Kota Serang, Provinsi Banten, terdapat alat laboratorium bahasa hasil pengadaan TA 2011 senilai Rp2.882,85 juta pada 20 sekolah menengah pertama (SMP) belum dimanfaatkan mengakibatkan pengadaan tersebut tidak efektif karena tidak digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

Penyebab

4.135 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan, tidak segera memanfaatkan dana yang sudah tersedia, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

4.136 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan, dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.

4.137 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

5.1 Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak kerja sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.2 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi (*cost recovery*) pada 3 entitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk 3 wilayah kerja (WK).

5.3 Entitas KKKS pada tiap-tiap WK tersebut meliputi KKKS Conoco Phillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea-B, KKKS PT Chevron Pacific Indonesia WK Rokan, dan Total E&P Indonesie WK Mahakam (TEPI).

5.4 Anggaran dan realisasi *cost recoverable* tiga KKKS yang diperiksa masing-masing senilai USD21.92 miliar ekuivalen Rp207,84 triliun dan senilai USD24.38 miliar ekuivalen Rp231,17 triliun. Sementara itu, cakupan pemeriksaan adalah senilai 100% dari realisasi *cost recoverable* atau senilai USD24.38 miliar ekuivalen Rp231,17 triliun . Nilai temuan pemeriksaan atas tiga KKKS tersebut senilai USD51,470.45 ribu ekuivalen Rp487.939,87 juta.

Tujuan Pemeriksaan

5.5 Pemeriksaan atas pelaksanaan kontrak bagi hasil dan KKS Minyak dan Gas Bumi bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai atas kewajaran perhitungan bagi hasil dari pelaksanaan KKS, menilai kepatuhan KKKS terhadap ketentuan perundang-undangan, dan SPI dalam kegiatan produksi dan *lifting* migas.

Hasil Pemeriksaan

5.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

5.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

5.8 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak dan gas mengungkapkan adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern pada tiga KKKS, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
- sebanyak 1 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

5.9 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 12.

Penyebab

5.10 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan KKKS memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan kewajiban pelaporan dan tidak cermat dalam menggolongkan biaya-biaya sesuai dengan subtansi biaya sesungguhnya.

Rekomendasi

5.11 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar KKKS antara lain menyempurnakan *business process and procedures* dan menyampaikan koreksi laporan kepada BPMIGAS.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

5.12 Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi.

5.13 Hasil pemeriksaan berdasarkan kelompok temuan ketidakpatuhan atas pelaksanaan KKS pada tiga KKKS mengungkapkan adanya 25 kasus terdiri atas kekurangan penerimaan sebanyak 24 kasus senilai USD51,470.45 ribu ekuivalen Rp487.939,87 juta dan 1 kasus administrasi. Rincian jenis temuan pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada Lampiran 11 dan rincian temuan berdasarkan entitas disajikan dalam Lampiran 12.

Kekurangan Penerimaan (24 kasus senilai USD51,470.45 ribu ekuivalen Rp487.939,87 juta)

5.14 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

5.15 Pada umumnya temuan kekurangan penerimaan atas pelaksanaan KKS tersebut merupakan koreksi perhitungan bagi hasil migas (koreksi *cost recovery* yang tidak dapat diperhitungkan/*non cost recovery*).

5.16 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak dan gas menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 24 kasus senilai USD51,470.45 ribu ekuivalen Rp487.939,87 juta untuk koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS.

5.17 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 12.

5.18 Pemeriksaan pada tiga KKKS mengungkapkan adanya koreksi *cost recovery* dalam perhitungan bagi hasil senilai USD51,470.45 ribu disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Koreksi *Cost Recovery* (KKKS)

No	Entitas	Koreksi *Cost Recovery* (ribu USD)
1	Conoco Phillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea-B	38,152.55
2	PT Chevron Pacific Indonesia WK Rokan	538.24
3	Total E&P Indonesia WK Mahakam	12,779.66
Jumlah		**51,470.45**
Jumlah juta rupiah		**Rp487.939,87**

* valas dirupiahkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012

Penyebab

5.19 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya disebabkan adanya ketidakcermatan perhitungan klaim *cost recovery* oleh KKKS dan adanya ketidakpatuhan terhadap klausul KKS, pedoman-pedoman tata kerja, serta ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi

5.20 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar BPMIGAS dan KKKS melakukan koreksi perhitungan bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi (1 kasus)

5.21 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/perusahaan atau potensi kerugian negara/perusahaan, tidak mengurangi hak negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5.22 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak bumi dan gas menunjukkan adanya satu kasus penyimpangan administrasi, yaitu penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain. Kasus tersebut yaitu TEPI belum melaksanakan komitmen untuk menempatkan dana cadangan kegiatan *abandonment and site restoration* (ASR).

Penyebab

5.23 Kasus penyimpangan administrasi disebabkan BPMIGAS dan TEPI masih melakukan pembahasan mengenai mekanisme pencadangan, alokasi biaya, dan verifikasi besarnya biaya ASR.

Rekomendasi

5.24 Terhadap kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan BPMIGAS dan TEPI segera menetapkan mekanisme pencadangan, alokasi biaya, dan verifikasi besarnya biaya ASR dan merealisasikan pencadangan dana ASR.

5.25 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kewajiban Pelayanan Umum

6.1 Dalam Semester I Tahun 2012, BPK telah menyelesaikan LHP subsidi/kewajiban pelayanan umum pada sembilan entitas di lingkungan BUMN, yaitu subsidi jenis BBM tertentu (subsidi JBT) dan subsidi LPG tabung gas 3 kg pada PT Pertamina (Persero) (PT Pertamina), subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PT PLN), perhitungan KPU/PSO pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)(PT Pelni), subsidi beras pada Perum Bulog, dan subsidi pupuk pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP), PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), PT Pupuk Kujang (PT PK), PT Petrokimia Gresik (PT PG), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM). Selain itu BPK juga memeriksa cadangan benih nasional (CBN), bantuan langsung benih unggul (BLBU), pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, dan bantuan langsung pupuk (BLP) pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan instansi terkait.

6.2 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah/kewajiban pelayanan umum pada sembilan BUMN dan Kementerian Pertanian adalah senilai Rp131,91 triliun atau 41,44% dari realisasi anggaran senilai Rp318,31 triliun. Pemeriksaan pelaksanaan subsidi pemerintah menemukan koreksi subsidi negatif senilai Rp2,57 triliun dan koreksi subsidi positif senilai Rp7,38 miliar. Selain itu, pemeriksaan pelaksanaan subsidi juga menemukan temuan senilai Rp1,58 triliun yang merupakan temuan kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Tujuan Pemeriksaan

6.3 Pemeriksaan atas subsidi JBT dan subsidi tabung 3 kg pada PT Pertamina (Persero), badan usaha lainnya yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan JBT yaitu PT Petronas Niaga Indonesia (Petronas) dan PT Aneka Kimia Raya Corporindo (PT AKR), bertujuan untuk

- menilai kewajaran volume penjualan JBT dan LPG tabung 3 kg yang didistribusikan kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia selama Tahun 2011;
- menilai kewajaran nilai subsidi JBT dan subsidi LPG tabung 3 kg yang layak dibayar oleh pemerintah Tahun 2011; dan
- menilai jumlah pembayaran subsidi JBT dan LPG tabung 3 kg TA 2011.

6.4 Pemeriksaan atas subsidi listrik bertujuan untuk menguji dan menilai kewajaran nilai subsidi listrik TA 2011 yang layak dibayarkan pemerintah kepada PT PLN (Persero).

6.5 Pemeriksaan atas kewajiban pelayanan umum (KPU) bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri TA 2011 pada PT Pelni, bertujuan menilai kewajaran biaya KPU TA 2011 yang layak dibayar pemerintah dan menilai pelaksanaan KPU bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri telah sesuai dengan perjanjian dan ketentuan/ peraturan yang berlaku.

6.6 Pemeriksaan atas subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah TA 2011, bertujuan menilai kewajaran realisasi penyaluran beras miskin (raskin) sampai titik distribusi, menilai realisasi perhitungan harga pembelian beras (HPB), dan menilai perhitungan subsidi raskin TA 2011.

6.7 Pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PKT, PT PSP, PT PK, PT PG, dan PT PIM bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan jumlah subsidi pupuk TA 2011 dan menilai penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan tingkat pengecer resmi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.8 Pemeriksaan atas subsidi benih, subsidi pupuk, BLBU, CBN Tahun 2011 pada Kementerian Pertanian (Kementan), PT Sang Hyang Seri (Persero) (PT SHS), PT Pertani (Persero)(PT Pertani), PT Berdikari (Persero)(PT Berdikari), serta instansi terkait lainnya bertujuan untuk

- menilai harga pokok penjualan/harga pokok penyerahan (HPP) atas benih pada program subsidi benih, CBN, BLBU, dan pupuk pada program BLP serta perhitungan biaya lain telah ditetapkan secara wajar;
- menilai penyaluran pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, bantuan benih unggul dan bantuan pupuk kepada kelompok tani telah tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah maupun persyaratan teknis; dan
- menilai pencairan dan pertanggungjawaban pembayaran subsidi benih, CBN, BLBU, dan BLP telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

6.9 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/ perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Koreksi Subsidi

6.10 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi menunjukkan bahwa pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada tujuh BUMN penerima subsidi senilai Rp16,31 triliun dari nilai yang telah ditetapkan dan pemerintah lebih bayar kepada dua BUMN senilai Rp439,62 miliar, secara rinci diuraikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Perhitungan Subsidi

(dalam juta rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Pagu subsidi	Perhitungan subsidi					
			Perusahaan (unaudited)	Koreksi		BPK (audited)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
				Positif	Negatif			
1	PT Pertamina, PT Petronas,PT AKR							
	a. Subsidi JBT		135.615.199,89		73.842,22	135.541.357,66	129.185.610,76	6.355.746,89
	b. Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina)		21.164.528,51		1,74	21.164.526,76	20.557.562,57	606.964,19
2	PT PLN TA 2011	8.624.474,00	94.601.510,19		1.423.769,84	93.177.740,34	85.582.869,94	7.594.870,39
3	PT Pelni	872.752,50	919.672,51	7.386,26	10.467,79	916.590,98	860.457,84	56.133,13
4	Perum Bulog		16.318.477,97		435.114,55	15.883.363,42	16.318.477,97	(435.114,55)
5	PT PKT		2.928.072,19		43.748,79	2.884.323,39	2.072.491,00	811.832,39
6	PT PSP		2.473.971,72		330.394,55	2.143.577,17	2.125.444,86	18.132,31
7	PT PG		7.996.674,06		131.800,89	7.864.873,16	7.146.377,00	718.496,16
8	PT PK		1.020.449,76		67.653,41	952.796,35	957.305,35	(4.509,00)
9	PT PIM		740.525,40		62.132,59	678.392,81	522.956,17	155.436,63
10	BLBU, CBN pada Kementan	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**9.497.226,50**	**283.779.082,25**	**7.386,26**	**2.578.926,42**	**281.207.542,08**	**265.329.553,51**	**15.877.988,57**

6.11 Hasil pemeriksaan atas subsidi JBT pada PT Pertamina, PT Petronas, dan PT AKR, menunjukkan bahwa jumlah subsidi JBT yang telah diverifikasi oleh BPH Migas senilai Rp135,61 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp73,84 miliar, sehingga jumlah subsidi JBT menjadi senilai Rp135,54 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT Pertamina, PT Petronas, dan PT AKR senilai Rp129,18 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT Pertamina, PT Petronas, dan PT AKR senilai Rp6,35 triliun.

6.12 Hasil pemeriksaan atas subsidi LPG tabung 3 kg pada PT Pertamina menunjukkan bahwa jumlah subsidi yang dihitung oleh PT Pertamina/telah diverifikasi Kementrian ESDM senilai Rp21,16 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp1,74 juta, sehingga jumlah subsidi LPG 3 kg menjadi senilai Rp21,16 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT Pertamina senilai Rp20,55 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT Pertamina senilai Rp606,96 miliar.

6.13 Hasil pemeriksaan atas subsidi listrik pada PT PLN menunjukkan bahwa semula PT PLN menghitung subsidi listrik senilai Rp94,60 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp1,42 triliun, sehingga jumlah subsidi listrik menjadi senilai Rp93,17 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PT PLN senilai Rp85,58 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT PLN senilai Rp7,59 triliun.

6.14 Hasil pemeriksaan atas KPU/PSO pada PT Pelni menunjukkan bahwa semula PT Pelni menghitung subsidi KPU senilai Rp919,67 miliar, dikoreksi positif senilai Rp7,38 miliar dikoreksi kurang senilai Rp10,46 miliar, sehingga jumlah kewajiban KPU/PSO menjadi senilai Rp916,59 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT Pelni senilai Rp860,45 miliar. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT Pelni senilai Rp56,13 miliar.

6.15 Hasil pemeriksaan atas subsidi beras pada Perum Bulog menunjukkan bahwa semula Perum Bulog menghitung subsidi beras senilai Rp16,31 triliun dan dikoreksi negatif senilai Rp435,11 miliar , sehingga jumlah subsidi beras menjadi senilai Rp15,88 triliun. Perhitungan subsidi tersebut belum memperhitungkan *margin fee* yang seharusnya diterima oleh Perum Bulog dan belum ditetapkan pemerintah. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada Perum Bulog senilai Rp16,31 triliun. Dengan demikian, subsidi lebih diterima Perum Bulog senilai Rp435,11 miliar.

6.16 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PKT menunjukkan bahwa semula PT PKT menghitung subsidi pupuk senilai Rp2,92 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp43,74 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp2,88 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PKT senilai Rp2,07 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT PKT senilai Rp811,83 miliar.

6.17 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PSP menunjukkan bahwa semula PT PSP menghitung subsidi pupuk senilai Rp2,47 triliun, dikoreksi kurang senilai Rp330,39 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp2,14 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PSP senilai Rp2,12 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT PSP senilai Rp18,13 miliar.

6.18 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PG menunjukkan bahwa semula PT PG menghitung subsidi pupuk senilai Rp7,99 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp131,80 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp7,86 triliun. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PG senilai Rp7,14 triliun. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT PG senilai Rp718,49 miliar.

6.19 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PK menunjukkan bahwa semula PT PK menghitung subsidi pupuk senilai Rp1,02 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp67,65 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai Rp952,79 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PK senilai Rp957,30 miliar. Dengan demikian, subsidi lebih diterima PT PK senilai Rp4,50 miliar.

6.20 Hasil pemeriksaan atas subsidi pupuk pada PT PIM menunjukkan bahwa semula PT PIM menghitung subsidi pupuk senilai Rp740,52 miliar dan dikoreksi kurang senilai Rp62,13 miliar, sehingga jumlah subsidi pupuk menjadi senilai

Rp678,39 miliar. Pemerintah sudah menyelesaikan pembayaran kepada PT PIM senilai Rp522,95 miliar. Dengan demikian, subsidi kurang diterima PT PIM senilai Rp155,43 miliar.

6.21 Hasil pemeriksaan atas subsidi benih, subsidi pupuk, BLBU, CBN Tahun 2011, PT SHS, PT Pertani, PT Berdikari, bantuan langsung benih unggul (BLBU) pada Kementan, PT SHS, PT Pertani (Persero), dan instansi/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Kementan memperoleh alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 6.2. Anggaran dan Realisasi Subsidi Kementerian Pertanian Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kegiatan	BA	MAK	Anggaran	Nilai Kontrak PSO	Realisasi
1	BLBU	018	57	1.361.621,40	1.311.166,05	1.311.166,05
2	CBN	999.08	58	518.334,38	518.164,16	472.707,05
3	Subsidi Benih	999.07	55	120.322,87	120.322,87	74.578,39
4	BLP	018	57	1.096.884,35	1.096.589,51	1.096.589,51
5	Subsidi Pupuk	999.07	55	18.344,60	15.562.534,00	13.025.322,20

Sistem Pengendalian Intern

6.22 Hasil pemeriksaan SPI pada 10 entitas mengungkapkan adanya 55 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 15 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 11 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, serta 29 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 13.

6.23 Sebanyak 15 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas

- sebanyak 9 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat;
- sebanyak 2 kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 1 kasus entitas terlambat menyampaikan laporan;
- sebanyak 2 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai; dan
- sebanyak 1 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

6.24 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.25 Sebanyak 11 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, terdiri atas

- sebanyak 3 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 1 kasus penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan;
- sebanyak 6 kasus penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya atau belanja; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan lainnya.

6.26 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.27 Sebanyak 29 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 9 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur;
- sebanyak 18 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati;
- sebanyak 1 kasus tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan struktur pengendalian intern lain-lain .

6.28 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT PLN, hasil inventarisasi aset tetap PLN Kantor Pusat berbeda dengan nilai aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) per 31 Desember 2011, mengakibatkan aset tetap yang tercatat dalam Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Kantor Pusat per 31 Desember 2011 belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan aset tetap yang tidak ada fisiknya berpotensi hilang.
- Di PT Pelni, pemotongan denda dan pengurangan pembayaran tidak di perhitungkan dari nilai realisasi KPU mengakibatkan PT Pelni menanggung kekurangan pendapatan atas pemotongan denda dan pengurangan pembayaran yang diperhitungkan dari nilai pagu/kontrak senilai Rp12.294,65 juta.

Penyebab

6.30 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pada umumnya disebabkan pengendalian atau pengamanan aset tetap kurang optimal, pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan belum memperhatikan keberadaan dan kondisi aset

tersebut, serta tidak mempertimbangkan kelebihan pelaksanaan *voyage* tertentu dalam pengurangan dana KPU.

Rekomendasi

6.31 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar entitas mengevaluasi hasil inventarisasi aset dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku serta mengatur klausul dalam kontrak KPU mengenai denda KPU dipotong dari nilai realisasi kerugian KPU.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

6.32 Selain koreksi perhitungan subsidi dan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 6.3. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 14 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 15.

Tabel 6.3. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan :			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	6	25.586,75
2	Potensi kerugian Perusahaan	3	9.381,55
3	Kekurangan Penerimaan	11	504.985,09
4	Administrasi	53	-
5	Ketidakhematan	3	631.657,27
6	Ketidakefisienan	2	320.487,87
7	Ketidakefektifan	4	94.542,33
Jumlah		**82**	**1.586.640,86**

6.33 Berdasarkan Tabel 6.3., hasil pemeriksaan mengungkapkan 82 kasus senilai Rp1.586.640,86 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 9 BUMN dan 1 KL.

Kerugian Negara/Perusahaan (6 kasus senilai Rp25.586,75 juta)

6.34 Kerugian negara/perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

6.35 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara meliputi belanja perjalanan dinas fiktif, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan.

6.36 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 6 kasus senilai Rp25.586,75 juta, terdiri atas 1 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp166,34 juta dan 5 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp25.420,41 juta.

6.37 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.38 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pertanian, terdapat pembebanan dan perhitungan komponen biaya pada harga pokok penjualan (HPP) pupuk BLP dan HPP subsidi benih Tahun 2011 yang masih mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian yang bersifat sementara mengakibatkan kerugian negara atas kelebihan pembayaran senilai Rp20.575,06 juta.

- Di Perum Bulog, terdapat pembayaran tambahan harga atas pengadaan gabah dan beras Tahun 2011 di Divisi Regional (Divre) DKI Jakarta dan Divre Jawa Timur tidak didukung adendum kontrak sehingga terjadi kelebihan bayar senilai Rp551,15 juta.

Penyebab

6.39 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pembayaran dilaksanakan berdasarkan HPP yang mengacu pada keputusan menteri yang masih bersifat sementara dan pejabat terkait tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, serta lalai dalam melakukan pengawasan atas pembayaran pengadaan gabah.

Rekomendasi

6.40 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan melakukan penyetoran atas kerugian negara ke kas negara dan bukti setor disampaikan ke BPK.

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan (3 kasus senilai Rp9.381,55 juta)

6.41 Potensi kerugian negara/perusahaan adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

6.42 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan meliputi aset tidak diketahui keberadaannya, pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada perusahaan, dan lain-lain kasus potensi kerugian negara/perusahaan.

6.43 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya potensi kerugian negara/perusahaan sebanyak 3 kasus senilai Rp9.381,55 juta, yang terdiri atas

- sebanyak 1 kasus aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp2.767,38 juta;
- sebanyak 1 kasus pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada perusahaan senilai Rp4.462,57 juta; dan
- sebanyak 1 kasus potensi kerugian negara/perusahaan lainnya senilai Rp2.151,60 juta.

6.44 Kasus-kasus tersebut terjadi di dua entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.45 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Kementerian Pertanian, berdasarkan pemeriksaan fisik terdapat persediaan CBN di gudang PT SHS Cabang Pati senilai Rp2.767,38 juta tidak diketahui keberadaannya sehingga menimbulkan peluang terjadi kerugian negara.
- Di PT PLN, terdapat batubara milik PLN pembangkit Sumatera Bagian Utara (PLN Kit SBU) sebanyak 5.830,388 MT hilang dalam kecelakaan tongkang saat pengangkutan dan tidak diasuransikan mengakibatkan PT PLN berpotensi menanggung kerugian senilai Rp4.462,57 juta.

Penyebab

6.46 Kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap persediaan CBN serta Manajemen PLN Kit SBU tidak berusaha untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul atas pekerjaan pengangkutan tersebut.

Rekomendasi

6.47 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku, lebih optimal dalam melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan benih CBN, serta meneliti dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait atas kehilangan batubara tersebut sesuai kuantitas dan kualitas saat pengiriman.

Kekurangan Penerimaan (11 kasus senilai Rp504.985,09 juta)

6.48 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

6.49 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum atau tidak ditetapkan/dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan, penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum atau tidak ditetapkan/dipungut/ diterima/disetor ke kas negara/perusahaan, pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan, dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.

6.50 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya kekurangan penerimaan sebanyak 11 kasus senilai Rp504.985,09 juta, yang terdiri atas

- sebanyak 3 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp54.640,33 juta;
- sebanyak 5 kasus penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp10.671,78 juta;
- sebanyak 1 kasus pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp49,43 juta; dan
- sebanyak 2 kasus kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah senilai Rp439.623,55 juta.

6.51 Kasus-kasus tersebut terdapat pada lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.52 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di Perum Bulog, terdapat kelebihan pembayaran subsidi raskin TA 2011 oleh pemerintah kepada Perum Bulog senilai Rp435.114,55 juta.
- Di PT PLN, terdapat pelaksanaan pekerjaan pada anak perusahaan dan beberapa unit PLN Tahun 2011 yang terlambat diselesaikan tetapi belum dikenakan denda keterlambatan sehingga PLN belum memperoleh pendapatan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan denda daya mampu senilai Rp53.706,34 juta.
- Di PT PK, terdapat kelebihan pembayaran subsidi pupuk Tahun 2011 oleh pemerintah kepada PT PK senilai Rp4.509,00 juta.

Penyebab

6.53 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena Perum Bulog dan PT PK kurang cermat dalam menghitung jumlah subsidi yang ditagihkan kepada pemerintah dan manajemen anak perusahaan dan unit PT PLN kurang tegas dalam mengenakan denda keterlambatan dan denda daya mampu kepada kontraktor pekerjaan.

Rekomendasi

6.54 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi Perum Bulog membicarakan penyelesaian kelebihan penerimaan dana subsidi raskin TA 2011 dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dan PT PK menyetor kelebihan pembayaran subsidi tersebut ke kas negara dan mengenakan sanksi kepada kontraktor pekerjaan yang terlambat sesuai ketentuan yang berlaku.

Administrasi (53 kasus)

6.55 Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/perusahaan, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

6.56 Kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas), proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan dan lain-lain. Selain itu terdapat kasus-kasus koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

6.57 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya 53 kasus penyimpangan administrasi yang terdiri atas

- sebanyak 2 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas);
- sebanyak 1 kasus proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- sebanyak 12 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 37 kasus koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum; dan
- sebanyak 1 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

6.58 Kasus-kasus tersebut terjadi di sepuluh entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.59 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT PSP, terdapat surat perjanjian jual beli (SPJB) antara distributor CV Tani Jaya Perkasa dengan pengecernya Tahun 2011 tidak mencantumkan alokasi penyaluran per bulan dan beberapa pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan SPJB pelaksanaan mengakibatkan pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi antara distributor dan pengecer tersebut belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi tidak tercapainya prinsip penyaluran pupuk bersubsidi yaitu tepat jumlah.

- Di PT PIM, terdapat penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2011 pada beberapa pengecer belum didukung pengadministrasian yang memadai sehingga berpotensi tidak tepat jumlah dan/atau sasaran serta kemungkinan menimbulkan terjadinya penyimpangan.

- Di PT PG, terdapat penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2011 di beberapa provinsi melebihi alokasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/SR.130/12/2011 mengakibatkan potensi kekurangan pupuk bersubsidi dalam suatu wilayah dan kelebihan alokasi pupuk bersubsidi pada wilayah lainnya.

Penyebab

6.60 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena distributor lalai dan tidak cermat dalam membuat dan mengadendum SPJB pupuk bersubsidi dengan pengecernya, direksi tidak menerapkan sanksi yang tegas terhadap distributor dan pengecer yang tidak menyelenggarakan administrasi yang memadai dalam pelaksanaan penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Rekomendasi

6.61 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada pimpinan entitas terkait agar memberikan sanksi kepada distributor yang lalai dan tidak menyelenggarakan administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu agar kelebihan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dibuktikan dengan dukungan data rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) atau surat rekomendasi dari dinas pertanian setempat.

Ketidakhematan (3 kasus senilai Rp631.657,27 juta)

6.62 Temuan ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

6.63 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya ketidakhematan sebanyak tiga kasus senilai Rp631.657,27 juta, yang merupakan kasus pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga.

6.64 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.65 Kasus-kasus tersebut antara lain di Kementerian Pertanian, terdapat kebijakan subsidi pupuk Tahun 2011 yang kurang tepat yaitu pengalihan pasokan pupuk bersubsidi dari PT PSP kepada PT PIM dan PT PKT sedangkan HPP PT PIM dan PT PKT lebih tinggi dari HPP PT PSP sehingga menimbulkan pemborosan keuangan negara senilai Rp365.572,05 juta.

Penyebab

6.66 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak optimal dalam pelaksanaan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan anggaran pupuk bersubsidi untuk memperoleh harga yang paling menguntungkan negara, serta kebijakan Direksi PT PSP yang lebih mengutamakan penjualan pupuk non subsidi daripada pupuk bersubsidi.

Rekomendasi

6.67 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan supaya menegur PT PSP dalam mengatur pengadaan pupuk bersubsidi didasarkan analisis dan mempertimbangkan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Ketidakefisienan (2 kasus senilai Rp320.487,87 juta)

6.68 Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.

6.69 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya ketidakefisienan sebanyak 2 kasus senilai Rp320.487,87 juta merupakan kasus penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari seharusnya.

6.70 Kasus-kasus tersebut terjadi di satu entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.71 Kasus-kasus ketidakefisienan tersebut di antaranya terjadi di PT Pelni, yaitu terdapat realisasi *load factor* (tingkat isian) kabin kelas non ekonomi Tahun 2011 yang rendah sedangkan kapasitas untuk penumpang kelas ekonomi yang tersedia lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan/realisasi yang seharusnya dapat memanfaatkan kabin kelas non ekonomi yang *load factory* kecil sehingga penggunaan dana KPU senilai Rp320.487,87 juta tidak tepat sasaran.

Penyebab

6.72 Kasus-kasus ketidakefisienan pada umumnya terjadi karena kabin kelas non ekonomi tidak diminati penumpang.

Rekomendasi

6.73 Terhadap kasus-kasus ketidakefisienan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Direksi PT Pelni melakukan modifikasi kabin kelas non ekonomi menjadi kabin kelas ekonomi dan/atau muatan secara bertahap.

Ketidakefektifan (4 kasus senilai Rp94.542,33 juta)

6.74 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan, serta fungsi instansi tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

6.75 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

6.76 Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan subsidi pemerintah menunjukkan adanya kasus ketidakefektifan yang terjadi sebanyak 4 kasus senilai Rp94.542,33 juta yang terdiri atas

- sebanyak 1 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp94.542,33 juta;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi; dan
- sebanyak 2 kasus pelayanan kepada masyarakat tidak optimal.

6.77 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 15.

6.78 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT PLN, terdapat pengeluaran PT Indonesia Power (PT IP) terkait Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) *Pemaron Add On Combined Cycle* sejak Tahun 2003 s.d. 2010 senilai Rp94.542,33 juta belum dapat dimanfaatkan sehingga pengeluaran PT IP belum memberikan manfaat dan kondisi kelistrikan di sistem Bali dalam keadaan krisis pasokan yang berkepanjangan.
- Di PT Pelni, terdapat peralatan *Departure Control System*/DCS (sistem/peralatan yang digunakan saat keberangkatan penumpang di pelabuhan agar jumlah penumpang di atas kapal dapat diketahui secara *real time*) yang

tidak beroperasi karena tidak terdapat koneksi internet dan tidak tersedia operator sehingga mengakibatkan informasi penumpang embarkasi tidak dapat diketahui secara *real time*.

Penyebab

6.79 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut pada umumnya terjadi karena Direksi PLN dan PT IP belum melakukan kajian secara komprehensif dari sisi operasi pembangkit dan perencanaan sistem kelistrikan saat memulai Proyek PLTGU *Pemaron Add On* pada Tahun 2002. Selain itu, pembuatan DCS belum disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat dan didukung dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.

Rekomendasi

6.80 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memanfaatkan aset eks Proyek PLTGU *Pemaron Add On* serta memperbaiki kelemahan sistem aplikasi *ticketing*.

6.81 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Operasional Badan Usaha Milik Negara

7.1 BPK telah melakukan PDTT atas operasional BUMN pada enam entitas yaitu PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (PT HIN), PT PAL Indonesia (Persero) (PT PAL), PT Semen Gresik (Persero) Tbk (PT SG), PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT SIER), dan PT Pertamina (Persero).

7.2 Cakupan pemeriksaan operasional atas enam BUMN adalah senilai Rp20,37 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp31,12 triliun. Total temuan pemeriksaan operasional BUMN senilai Rp1,73 triliun yang merupakan temuan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefisienan. Selain temuan tersebut, terdapat temuan kelemahan SPI dan penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

7.3 Secara umum tujuan pemeriksaan pada enam BUMN tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi serta kegiatan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

7.4 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

7.5 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

7.6 Hasil pemeriksaan SPI pada enam entitas mengungkapkan adanya 46 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 5 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 27 kasus kelemahan sistem

pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, serta 14 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan pada Lampiran 16.

7.7 Sebanyak 5 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas

- sebanyak 3 kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; dan
- sebanyak 2 kasus sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

7.8 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 18.

7.9 Sebanyak 27 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan, terdiri atas

- sebanyak 5 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai;
- sebanyak 1 kasus mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan;
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;
- sebanyak 5 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan;
- sebanyak 13 kasus penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan
- sebanyak 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan lainnya.

7.10 Kasus-kasus tersebut terjadi di lima entitas seperti disajikan pada Lampiran 18.

7.11 Sebanyak 14 kasus kelemahan struktur pengendalian intern, terdiri atas

- sebanyak 4 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; dan
- sebanyak 10 kasus SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

7.12 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 18.

7.13 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT HIN, pembayaran termin Tahun 2011 untuk renovasi Hotel Inna Kuta Beach kepada kontraktor terlambat dilakukan PT HIN sehingga PT HIN berpotensi terkena denda senilai Rp4.833,44 juta.

- Di PT PAL, terdapat hutang kepada Pemerintah eks perjanjian *subsidiary loan agreement* (SLA) senilai Rp456.231,50 juta tidak dibukukan/disajikan dalam laporan keuangan sejak Tahun 1996 mengakibatkan Laporan Keuangan PT PAL Tahun Buku 1996 sampai dengan 2010 kurang menyajikan (*understated*) pinjaman kepada Pemerintah senilai Rp456.231,50 juta.

- Di PT INKA, terdapat pengeluaran kas untuk membiayai perjalanan dinas pegawai dan/atau eksternal/pihak ketiga yang tidak diatur dalam ketentuan internal perusahaan mengakibatkan peningkatan biaya PT INKA.

Penyebab

7.14 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan dana yang memadai untuk pembangunan hotel belum tersedia, tidak mengungkap pinjaman tersebut dalam laporan keuangan dan belum menetapkan kebijakan mengenai batasan pembayaran/penggantian biaya perjalanan dinas pegawai/pejabat eksternal/pihak ketiga.

Rekomendasi

7.15 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar menyelesaikan permasalahan potensi denda keterlambatan pembayaran dan ketersediaan dana pembangunan hotel melalui upaya-upaya yang dapat dipertanggungjawabkan, mengungkapkan hutang kepada pemerintah dalam catatan atas laporan keuangan termasuk dampaknya terhadap laporan-laporan keuangan sejak Tahun 1996 sampai 2010, serta segera menetapkan kebijakan mengenai batasan pembayaran/penggantian biaya perjalanan dinas pegawai/pejabat eksternal/pihak ketiga.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan

7.16 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/perusahaan, potensi kerugian negara/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang dapat dilihat pada Tabel 7.1. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok dapat dilihat pada Lampiran 17 dan rincian temuan menurut entitas disajikan pada Lampiran 18.

Tabel 7.1. Kelompok Temuan Pemeriksaan atas Operasional BUMN

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara/Perusahaan	9	295.527,73
2	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	15	1.068.526,01
3	Kekurangan Penerimaan	4	146.923,54
4	Administrasi	17	-
5	Ketidakhematan	5	43.310,14
6	Ketidakefektifan	12	180.719,15
Jumlah		**62**	**1.735.006,57**

7.17 Berdasarkan Tabel 7.1., hasil pemeriksaan mengungkapkan 62 kasus senilai Rp1.735.006,57 juta sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada enam BUMN.

Kerugian Negara/Perusahaan (9 kasus senilai Rp295.527,73 juta)

7.18 Kerugian negara/perusahaan adalah kerugian nyata dan pasti jumlahnya berupa berkurangnya kekayaan negara atau perusahaan berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

7.19 Pada umumnya kasus-kasus kerugian negara/perusahaan yaitu pekerjaan adanya belanja perjalanan dinas fiktif, kekurangan volume pekerjaan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi dan pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet.

7.20 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 9 kasus mengenai kerugian negara/perusahaan senilai Rp295.527,73 juta terdiri atas

- sebanyak 1 kasus belanja perjalanan dinas fiktif senilai Rp163,30 juta;
- sebanyak 1 kasus kekurangan volume pekerjaan senilai Rp123.557,80 juta;
- sebanyak 3 kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp5.531,31 juta;
- sebanyak 3 kasus penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp21.869,36 juta; dan
- sebanyak 1 kasus pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet senilai Rp144.405,96 juta.

7.21 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 18.

7.22 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT HIN, terdapat kelebihan penerimaan atas pembayaran kegiatan pertemuan rapat, seminar dan pameran yang diselenggarakan instansi pemerintah Tahun 2010 dan 2011 (s.d. triwulan III) yang belum dikembalikan ke instansi terkait/kas negara mengakibatkan kelebihan penerimaan tersebut berindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp2.737,81 juta.

- Di PT PAL, terdapat pembayaran uang muka ke pemasok yang pertanggungjawabannya telah melebihi batas waktu yang ditentukan (maksimal 30 hari kerja) tetapi barang belum diterima mengakibatkan PT PAL mengalami kerugian minimal senilai Rp123.557,80 juta.

- Di PT PAL, terdapat sisa pinjaman PT PAL kepada pemerintah antara lain berupa bunga, administrasi, denda atas perjanjian SLA dan rekening dana investasi (RDI) senilai Rp144.405,96 juta yang belum jelas penyelesaiannya karena tidak termasuk dalam program restrukturisasi menjadi penanaman modal negara dalam APBN perubahan Tahun 2011.

Penyebab

7.23 Kasus-kasus kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena kebijakan *general manager* hotel menandatangani berita acara serah terima (BAST) dan membuat kuitansi tagihan yang tidak sesuai dengan *invoice* atau realisasi kegiatan yang sebenarnya, pejabat terkait di PT PAL menyetujui syarat pembayaran dengan uang muka namun tidak mengawasi dan melakukan klaim atas pembayaran uang muka yang barangnya tidak/belum diterima, serta Direksi PT PAL membiarkan penghapusbukuan pinjaman kepada pemerintah tanpa menyelesaikan dokumen legal seperti persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rekomendasi

7.24 Terhadap kasus-kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas untuk mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan ke kas negara/perusahaan atas kelebihan penerimaan pembayaran kontrak, memberikan sanksi kepada pejabat terkait dan meminta pejabat terkait untuk menyetorkan ke kas negara/perusahaan atas kerugian yang terjadi, serta mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara pada PT PAL kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara terkait sisa kewajiban yang belum ditentukan statusnya sebagaimana perubahan APBN Tahun 2011.

Potensi Kerugian Negara/Perusahaan (15 kasus senilai Rp1.068.526,01 juta)

7.25 Potensi kerugian negara/perusahaan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

7.26 Pada umumnya kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan meliputi adanya aset dikuasai oleh pihak lain, piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih, dan lain-lain kasus potensi kerugian negara/perusahaan.

7.27 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya 15 kasus mengenai potensi kerugian perusahaan senilai Rp1.068.526,01 juta terdiri atas

- sebanyak 2 kasus aset dikuasai pihak lain senilai Rp85.645,68 juta;
- sebanyak 2 kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1.704,54 juta; dan
- sebanyak 11 kasus potensi kerugian negara/perusahaan lainnya senilai Rp981.175,79 juta.

7.28 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 18.

7.29 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT PAL, terdapat barang impor untuk pembangunan kapal yang tertahan di KPP Bea Cukai Tj Perak tersimpan di tempat penimbunan sementara (TPS) telah melebihi 60 hari sehingga sesuai ketentuan menjadi milik negara yang mengakibatkan PT PAL telah kehilangan hak atas barang impor minimal senilai Rp64.139,67 juta.
- Di PT SIER, terdapat piutang biaya fasilitas (fasilitas umum, pemeliharaan operasi, sampah dan analisa air) yang telah berumur lebih dari 1 tahun senilai Rp866,34 juta belum dilakukan penagihan secara optimal mengakibatkan PT SIER belum dapat memanfaatkan piutang tersebut dan berpotensi tidak tertagih.

Penyebab

7.30 Kasus-kasus potensi kerugian negara/perusahaan pada umumnya terjadi karena entitas belum memiliki dana untuk melunasi kewajiban BM PPN Impor, PPnBM dan biaya lainnya serta belum optimal melakukan penagihan piutang dan tidak melaksanakan perjanjian sewa menyewa.

Rekomendasi

7.31 Terhadap kasus kasus kerugian negara/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain mengupayakan dana talangan dari PT PPA untuk melunasi kewajiban BM, PPN, PPnBM dan biaya lainnya serta berupaya secara optimal supaya piutang dapat tertagih.

Kekurangan Penerimaan (4 kasus senilai Rp146.923,54 juta)

7.32 Kekurangan penerimaan adalah adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara dhi. perusahaan tetapi tidak atau belum masuk ke kas perusahaan karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan.

7.33 Pada umumnya kasus-kasus kekurangan penerimaan meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan dan penerimaan perusahaan (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara.

7.34 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 4 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp146.923,54 juta, terdiri atas

- sebanyak 1 kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp10.047,15 juta; dan

- sebanyak 3 kasus penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp136.876,39 juta.

7.35 Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga entitas seperti disajikan pada Lampiran 18.

7.36 Kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT HIN, terdapat kekurangan pembayaran kompensasi dari mitra *built, operate, and transfer* (BOT) sejak bulan Mei 2009 s.d. Desember 2010 senilai USD79.16 ribu. Selain itu, terhadap keterlambatan pembayaran tersebut dikenakan denda senilai USD41.08 ribu yang belum diterima PT HIN. Hal tersebut mengakibatkan PT HIN belum memperoleh kompensasi dan denda keterlambatan senilai USD120.24 ribu.

- Di PT PAL, terdapat kewajiban pabean minimal senilai Rp135.715,28 juta atas barang impor dengan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yang jatuh tempo dan/atau hasil produksinya telah diekspor yang belum diselesaikan oleh PT PAL. Hal tersebut mengakibatkan negara belum menerima pendapatan negara dari BM dan PPN barang impor senilai Rp135.715,28 juta.

- Di PT SG (Persero) Tbk, terdapat biaya retribusi atas pemberian izin eksploitasi lahan untuk lahan dengan luas di atas 50 hektar belum dibayar PT SG kepada pemda senilai Rp3.905,39 juta dan belum dapat menunjukan bukti pembayaran retribusi hasil produksi dari mulut tambang untuk batu kapur dan tanah liat pada Tahun 2010 dan 2011 senilai Rp6.141,75 juta. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tuban belum memperoleh pendapatan daerah yang seharusnya disetor PT SG senilai Rp10.047,15 juta.

Penyebab

7.37 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pimpinan entitas tidak melakukan pengendalian atas pemenuhan kewajiban BOT yang diatur dalam perjanjian, kurang memperhatikan ketentuan peraturan daerah serta Kepala Divisi Pengadaan dan Pergudangan tidak memberikan informasi yang jelas kepada Direksi PT PAL terkait kewajiban BM dan PPN barang impor.

Rekomendasi

7.38 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi terkait untuk menginventarisasi kewajiban mitra BOT sesuai kewajiban dan segera meminta untuk melaksanakan kewajiban tersebut, melakukan klarifikasi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk meminta penegasan dan penjelasan mengenai penyesuaian kewajiban pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) (baik retribusi tetap maupun retribusi hasil produksi dari mulut tambang) sesuai dengan peraturan daerah. Selain itu BPK telah merekomendasikan agar memberikan sanksi kepada Kepala Divisi Pengadaan dan Pergudangan serta Kepala Divisi Perbendaharaan karena tidak menyelesaikan dokumentasi impor dan perpanjangan pemberitahuan impor barang (PIB) terkait kewajiban pabean berupa BM, PPN, dan PPnBM atas barang/bahan impor yang masih dalam persediaan dan/atau telah dijual.

Administrasi (17 kasus)

7.39 Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan adanya suatu kerugian atau potensi kerugian, tidak mengurangi hak negara/perusahaan (kekurangan penerimaan), tidak menghambat operasional/program entitas dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

7.40 Pada umumnya kasus-kasus penyimpangan yang bersifat administratif meliputi pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), pemecahan kontrak penyimpangan terhadap peraturan per UU bidang pengelolaan barang milik negara/perusahaan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan,

pertambangan, perpajakan, dll., pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

7.41 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya penyimpangan administrasi sebanyak 17 kasus terdiri atas

- sebanyak 1 kasus pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- sebanyak 3 kasus pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) selain perjalanan dinas;
- sebanyak 1 kasus pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan;
- sebanyak 2 kasus penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/perusahaan;
- sebanyak 8 kasus penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain;
- sebanyak 1 kasus pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah; dan
- sebanyak 1 kasus kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

7.42 Kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut terjadi di enam entitas seperti disajikan pada Lampiran 18.

7.43 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Di PT SG Tbk, terdapat pengeluaran dana Bina Lingkungan (BL) BUMN Peduli Tahun 2010 pada PT SP untuk bantuan biaya pasar murah senilai Rp165,72 juta tidak didukung persetujuan Menteri BUMN, mengakibatkan penyaluran dana BUMN Peduli Tahun 2010 senilai Rp165,72 juta diragukan keabsahannya.
- Di PT HIN, terdapat pembangunan tambahan gedung perkantoran dan apartemen di atas objek BOT tidak secara jelas terdefinisi dalam perjanjian BOT, mengakibatkan potensi adanya permasalahan pada saat transfer aset di akhir perjanjian.
- Di PT INKA, terdapat 38 transaksi pengambilan uang muka pegawai Tahun 2011 belum dipertanggungjawabkan senilai Rp3.716,75 juta mengakibatkan kebijakan keuangan pengelolaan kas untuk tertib administrasi dan pengendalian intern menjadi tidak tercapai.

Penyebab

7.44 Kasus-kasus penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat terkait tidak segera melakukan klarifikasi dan meminta penetapannya kepada Menteri BUMN atas penyaluran dana BUMN Peduli, lemahnya pengendalian PT HIN dalam pembuatan kontrak dan pelaksanaan pembangunan gedung, serta pemberian kelonggaran kepada pegawai yang terlambat dan/atau belum mempertanggungjawabkan uang muka.

Rekomendasi

7.45 Terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi antara lain kepada pimpinan entitas terkait agar mempertanggungjawabkan penyaluran dana BUMN Peduli senilai yang belum ada penetapannya dari Kementerian BUMN kepada RUPS, mengadendum perjanjian BOT terkait penegasan bangunan dan fasilitas penunjang lainnya adalah termasuk gedung perkantoran dan apartemen yang akan dialihkan pada waktu berakhirnya perjanjian BOT kepada PT HIN, serta mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada pejabat terkait yang memberikan kelonggaran penarikan uang muka.

Ketidakhematan (5 kasus senilai Rp43.310,14 juta)

7.46 Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan *input* dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

7.47 Pada umumnya kasus-kasus ketidakhematan meliputi pengadaan barang/jasa melebihi ketentuan dan pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga.

7.48 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan terdapat 5 kasus ketidakhematan senilai Rp43.310,14 juta terdiri atas

- sebanyak 1 kasus pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan senilai Rp18.793,77 juta; dan
- sebanyak 4 kasus pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp24.516,37 juta.

7.49 Kasus-kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti di sajikan pada Lampiran 18.

7.50 Kasus-kasus ketidakhematan tersebut di antaranya sebagai berikut

- Di PT HIN, terdapat perubahan desain dan rencana pembongkaran bangunan yang telah dibangun di Hotel Inna Kuta Beach berpotensi menimbulkan pemborosan senilai Rp3.058,69 juta atas rencana pembongkaran bangunan yang sudah dibangun.

- Di PT SG, terdapat keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan pembangkit listrik 2x35 MW yang direncanakan untuk menyalurkan listrik ke Pabrik Semen Tonasa V sehingga PT SG harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya penyambungan daya ke PLN senilai Rp19.750,00 juta. Hal tersebut mengakibatkan PT SG mengalami ketidakhematan minimal senilai biaya penyambungan.

- Di PT PAL, terdapat pengadaan *steel plate* melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk pembuatan kapal yang telah selesai mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp18.793,77 juta.

Penyebab

7.51 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena adanya perubahan-perubahan desain sesuai arahan pemegang saham dan dewan komisaris, pekerjaan kurang terencana dengan baik, dan pemesanan barang dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan.

Rekomendasi

7.52 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain mengkaji kembali dan memfinalisasi desain bangunan Hotel Inna Kuta Beach dengan mempertimbangkan potensi kerugian dan investasi tambahan akibat rencana pembongkaran dan pekerjaan tambah yang akan dilakukan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada pegawai/pejabat terkait.

Ketidakefektifan (12 kasus senilai Rp180.719,15 juta)

7.53 Temuan ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil pengadaan barang/jasa tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan tidak tercapai, serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi terhambat.

7.54 Pada umumnya kasus-kasus ketidakefektifan meliputi penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan, pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai.

7.55 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN menunjukkan adanya ketidakefektifan sebanyak 12 kasus senilai Rp180.719,15 juta yang terdiri atas

- sebanyak 1 kasus penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp1.332,99 juta;

- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp170,00 juta;
- sebanyak 2 kasus barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp57.052,67 juta;
- sebanyak 1 kasus pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- sebanyak 5 kasus pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp120.515,32 juta; dan
- sebanyak 2 kasus fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp1.648,17 juta.

7.56 Kasus kasus tersebut terjadi di empat entitas seperti disajikan pada Lampiran 18.

7.57 Kasus-kasus ketidakefektifan tersebut di antaranya sebagai berikut

- Di PT PAL, PT PAL tidak mampu menyelesaikan kewajiban atas barang impor tertahan di KPP Bea Cukai, sehingga diblokir dan tidak dapat melakukan importasi barang serta fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor PT PAL kedaluwarsa. Hal tersebut mengakibatkan PT PAL menanggung kewajiban minimal senilai Rp87.113,76 juta atas bea masuk, PPN, dan PPnBM barang/bahan impor yang belum diselesaikan.
- Di PT SG Tbk, Semen Padang (SP) telah mengeluarkan biaya-biaya terkait pembebasan dan penyiapan lahan pertambangan senilai Rp56.432,67 juta namun lahan belum dapat dimanfaatkan. Hal tersebut mengakibatkan biaya yang telah dikeluarkan SP sejak Tahun 2004 minimal senilai Rp56.432,67 juta belum memberikan manfaat.
- Di PT SG Tbk, pengeluaran dana *corporate social responsibity* (CSR) non Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) senilai Rp1.332,99 juta tidak sesuai peruntukannya. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran biaya CSR non PKBL Tahun 2010 dan 2011 senilai Rp1.332,99 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penyebab

7.58 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas terkait belum menetapkan SOP tentang kriteria, lingkup, dan batasan nilai yang patut dan wajar untuk pengeluaran dana CSR non PKBL, kurangnya koordinasi antara Direksi SP dengan instansi terkait untuk memastikan luas lahan tambang yang diizinkan, serta PT PAL tidak dapat menyelesaikan administrasi dokumen impor dan menyusun kerangka acuan kerja (KAK) sebagai dasar bagi pejabat dan pelaksana untuk mengurus barang impor.

Rekomendasi

7.59 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada pimpinan entitas untuk menyusun dan menetapkan SOP penyaluran dana CSR non PKBL dan KAK pengurusan barang impor, berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan luas lahan tambang yang diizinkan, serta menyelesaikan dokumen impor.

7.60 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

8.1 Selain tema-tema PDTT seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester I Tahun 2012 BPK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya pada 7 entitas yaitu 3 entitas di lingkungan pemerintah pusat, 2 entitas di lingkungan pemerintah daerah, dan 2 entitas BUMD.

Pemerintah Pusat

8.2 Tiga entitas PDTT lainnya di lingkungan pemerintah pusat sebagai berikut.

- Di Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).
- Di Kementerian Pertanian, Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional.
- Di Kementerian Kesehatan, pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pemerintah Daerah

8.3 Dua entitas PDTT lainnya di lingkungan pemerintah daerah sebagai berikut.

- Di Kabupaten Berau, penyertaan modal pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- Di Kabupaten Paser, penyertaan modal pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

BUMD

8.4 Dua entitas PDTT lainnya di lingkungan BUMD sebagai berikut.

- Di Provinsi DKI Jakarta, pendapatan dan biaya pada PD Dharma Jaya.
- Di Kota Makassar, pengelolaan PDAM Kota Makassar.

8.5 Cakupan pemeriksaan atas tujuh entitas tersebut, disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Cakupan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

Entitas Yang DIperiksa	Cakupan Pemeriksaan (juta Rp)	Total Temuan (juta Rp)	% Temuan
(1)	(2)	(3)	**(4)= 3/2 x 100%**
Pemerintah Pusat	1.588.258,56	769.148,00	48,43%
Pemerintah Daerah	227.231,39	391,29	0,17%
BUMD	742.178,36	75.562,60	10,18%
Jumlah	**2.557.668,31**	**845.101,89**	**33,04%**

Hasil Pemeriksaan

8.6 Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah **"kasus"**. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

8.7 Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat

8.8 Hasil pemeriksaan atas tiga entitas di lingkungan pemerintah pusat menunjukkan adanya 9 kasus kelemahan SPI dan 24 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp769.147,98 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan.

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

8.9 Pemeriksaan atas P2D2 pada Kementerian Keuangan serta BPKP bertujuan untuk memberikan simpulan atas kepatuhan pemerintah terhadap perjanjian yang disepakati pemerintah dan Bank Dunia dalam menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) bidang infrastruktur, menagih dana pinjaman (*reimbursement*), serta melaksanakan kegiatan verifikasi, penguatan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi P2D2.

8.10 Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan penyaluran DAK infrastruktur, penagihan dana pinjaman (*reimbursement*), serta pelaksanaan kegiatan verifikasi, penguatan kelembagaan, monitoring dan evaluasi P2D2 **telah sesuai** dengan *Loan Agreement Number* 7914-ID serta dokumen-dokumen perjanjian terkait lainnya. Namun BPK masih menemukan tujuh kasus kelemahan SPI, diantaranya adalah sebagai berikut.

- Unit Implementasi Proyek (UIP) P2D2 belum memiliki target yang terukur baik mengenai waktu pelaksanaan maupun indikator kinerja yang akan dicapai. Hal tersebut mengakibatkan pencapaian sasaran program P2D2 tidak dapat terukur secara jelas.

- Terdapat pelaksanaan jasa konsultan bidang infrastruktur oleh PT Yodya Karya (Persero) mengalami perubahan lingkup kegiatan bimbingan teknis dan reviu. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan waktu pelaksanaan sehingga kegiatan pemberian asistensi intensif bagi pemda di setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tidak dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan penguatan kemampuan pemda dalam memenuhi persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan DAK tidak dilaksanakan secara optimal.

Penyebab

8.11 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena UIP belum mengatur rencana kerja dan target tahunan atas pencapaian keluaran P2D2 Tahun 2012 s.d. 2014, dan evaluasi atas efektivitas pencapaian sub komponen dukungan teknis belum dilakukan.

Rekomendasi

8.12 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan sebagai UIP untuk menyusun rencana kerja dan target tahunan atas pencapaian keluaran P2D2 Tahun 2012 s.d. 2014 serta mengevaluasi efektivitas dukungan teknis yang dilaksanakan oleh konsultan serta menetapkan dan melaksanakan langkah perbaikan agar penguatan kemampuan pemda dalam memenuhi persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan DAK dapat dicapai.

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional

8.13 PDTT atas Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) Tahun 2011 di Kementerian Pertanian bertujuan untuk menilai apakah: (1) perencanaan kegiatan telah dilaksanakan secara memadai; (2) pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya pengadaan barang/jasa dan penyaluran bantuan sosial ke masyarakat telah dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran serta sesuai dengan aturan dan persyaratan yang ditetapkan; (3) pertanggungjawaban fisik dan keuangan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

8.14 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7 kasus senilai Rp3.941,41 juta. Temuan-temuan signifikan di antaranya adalah sebagai berikut.

- Terdapat tiga paket pekerjaan sambung samping (*entres*) di Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng Tahun 2011 yang memasukkan PPN atas barang bebas PPN serta menaikkan volume *entres* per hektar sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp863,70 juta.

- Pengadaan rehabilitasi sambung samping di Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa belum dipungut PPN senilai Rp1.052,91 juta.

- Pekerjaan Pengadaan Bibit *Somatic Embryogenesis* (SE) di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta pengadaan *entres* di Kabupaten Polewali Mandar terlambat diselesaikan tetapi belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp916,66 juta.

8.15 Dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp3.941,41 juta, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp321,15 juta.

Penyebab

8.16 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya disebabkan pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak cermat dalam menyusun HPS dan menyetujui adendum kontrak serta kurang optimalnya Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

8.17 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar berkoordinasi dengan gubernur/bupati terkait untuk memerintahkan menegur PPK dan bendahara pengeluaran atas kelalaiannya serta menyetorkan kelebihan pembayaran maupun kekurangan penerimaan yang terjadi ke kas negara.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia

8.18 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk: (1) menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia di lingkungan Kementerian Kesehatan telah didukung dengan penerapan SPI yang memadai; (2) menguji apakah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pembuatan

vaksin flu burung untuk manusia telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi asas kehematan, efisiensi, dan efektivitas; (3) menguji apakah hasil pengadaan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

8.19 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 2 kasus kelemahan SPI dan 17 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp765.206,57 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakefektifan.

8.20 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- Terdapat pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi, riset, dan alih teknologi vaksin flu burung TA 2008 s.d. 2010 senilai Rp718.800,55 juta tidak direncanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Terdapat kerja sama yang tidak sehat antara para pihak dalam pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi, riset, dan alih teknologi vaksin flu burung TA 2008 s.d. 2010 sehingga mengakibatkan indikasi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya senilai Rp347.454,55 juta, potensi kerugian negara senilai Rp224.440,84 juta dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dipungut senilai Rp35.940,02 juta dan jaminan pelaksanaan yang belum ditarik senilai Rp35.940,02 juta.

- Terdapat kerja sama tidak sehat antara para pihak dalam pekerjaan pembangunan sarana prasarana *system connecting* fasilitas produksi dan *chicken breeding* riset dan teknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia TA 2010 s.d. 2011 berpotensi merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya senilai Rp107.160,31 juta.

Penyebab

8.21 Kasus-kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya disebabkan pelaksanaan dana APBN-P TA 2008 senilai Rp200,00 miliar diserahkan pelaksanaannya kepada satker yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakannya; perencanaan pengadaan yang kurang baik; lemahnya lingkungan pengendalian di Kementerian Kesehatan yang memberi ruang kepada pihak luar untuk terlibat dalam proses penganggaran dan perencanaan pengadaan.

Rekomendasi

8.22 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas, menarik kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan kepada rekanan dan menyetorkan ke kas negara, serta mengenakan sanksi kepada rekanan.

Pemerintah Daerah

8.23 Hasil pemeriksaan atas dua entitas di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan adanya 7 kasus kelemahan SPI dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp391,29 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Paser

8.24 PDTT atas penyertaan modal pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser bertujuan untuk menilai apakah: (1) SPI atas penyertaan modal pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; (2) penyertaan modal pemerintah daerah telah memperoleh manfaat ekonomis; (3) pengamanan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan dan barang milik daerah yang dimanfaatkan/dikerjasamakan/dipindahtangankan telah memadai.

8.25 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 7 kasus kelemahan SPI dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp391,29 juta. Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah penyerahan dana dividen PT Hutansanggam Labanan Lestari (PT HLL) kepada Pemerintah Kabupaten Berau tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Buku 2010 belum dapat dimanfaatkan senilai Rp391,29 juta.

8.26 Dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp391,29 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp391,29 juta.

Penyebab

8.27 Kasus-kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya disebabkan Kepala Bagian Perekonomian belum melakukan koordinasi penyetoran dividen dengan PT HLL.

Rekomendasi

8.28 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, BPK RI telah merekomendasikan kepada Bupati Berau agar Kepala Bagian Perekonomian meningkatkan koordinasi dengan PT HLL dalam hal penyetoran dividen.

BUMD

8.29 Hasil PDTT atas dua entitas di lingkungan BUMD menunjukkan adanya 8 kasus kelemahan SPI dan 28 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku senilai Rp75.562,55 juta yang meliputi ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah/perusahaan, potensi kerugian daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan ketidakhematan.

Pendapatan dan Biaya pada PD Dharma Jaya Tahun Buku 2010 dan 2011

8.30 PDTT atas pendapatan dan biaya pada PD Dharma Jaya Tahun Buku 2010 dan 2011 bertujuan untuk menguji dan menilai apakah SPI dari entitas dan pengamanan atas kekayaan khususnya terkait pengelolaan pendapatan, biaya, kerjasama dengan pihak ketiga, perolehan aset, serta investasi telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan tertentu.

8.31 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya tujuh kasus kelemahan SPI dan 24 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp10.335,75 juta. Kasus-kasus tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- Pengeluaran kas Biro Direksi dipertanggungjawabkan dengan kegiatan-kegiatan yang terindikasi fiktif senilai Rp1.424,65 juta, diberikan kepada Badan Pengawas tidak sesuai ketentuan senilai Rp209,09 juta dan dipergunakan untuk pembuatan modul yang tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp312,80 juta, serta tidak diketahui penggunaannya senilai Rp1.233,05 juta sehingga berindikasi merugikan kas perusahaan keseluruhan senilai Rp3.179,59 juta.

- Terdapat pengeluaran kas perusahaan senilai Rp1.119,11 juta yang dipertanggungjawabkan dengan kegiatan-kegiatan yang berindikasi fiktif sehingga mengakibatkan indikasi kerugian perusahaan.

Penyebab

8.32 Kasus-kasus kelemahan SPI dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya disebabkan direksi telah menyalahgunakan wewenang pengeluaran uang perusahaan dengan tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku; kepala bidang keuangan dan kepala SPI lalai dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya serta staf khusus direksi lalai dalam mengadministrasikan bukti-bukti pertanggungjawaban; direktur utama, Plt. direktur administrasi dan keuangan, dan Plt. direktur usaha telah membuat surat tugas dan memerintahkan untuk membuat surat perintah kerja untuk semua kegiatan yang terindikasi fiktif; serta kepala divisi umum dan kepala bidang keuangan sebagai pembuat pertanggungjawaban secara sengaja merekayasa dokumen pertanggungjawaban administrasi.

Rekomendasi

8.33 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direksi PD Dharma Jaya, Kepala Bidang Keuangan, Kepala SPI, Kepala Divisi Umum, dan Staf Khusus Direksi yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dan lalai dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan

8.34 BPK telah merekomendasikan Direksi PD Dharma Jaya untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian PD Dharma Jaya dengan menyetorkan ke kas perusahaan dan menyerahkan bukti setornya kepada BPK RI.

Pengelolaan PDAM Kota Makassar

8.35 Pemeriksaan atas Pengelolaan PDAM Kota Makassar bertujuan untuk menilai dan menentukan: (1) apakah SPI dalam kerjasama PDAM dengan pihak ketiga sudah memadai; (2) apakah kerjasama PDAM dengan pihak ketiga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) apakah kerjasama PDAM dengan pihak ketiga menguntungkan PDAM.

8.36 Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 1 kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp65.226,80 juta. Kasus-kasus tersebut antara lain sebagai berikut.

- Kerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT Traya dalam pengadaan kerjasama Rehabilitasi, Operasi, Transfer Instalasi Pengolahan Air (ROT IPA) Panaikang Tahun 2007, diketahui PDAM Kota Makassar membeli air kepada PT Traya lebih mahal dari yang seharusnya dapat dibeli (dengan memperhitungkan biaya operasional, biaya modal dan keuntungan wajar) sehingga merugikan keuangan PDAM senilai Rp38.168,66 juta. Selain itu, terdapat pembayaran uang muka dilakukan dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan prosedur PDAM Kota Makassar yaitu antara lain pembayaran uang muka tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan pembayaran tidak disetujui oleh semua pihak sesuai ketentuan.

- Kerjasama pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian Instalasi Pengolahan Air (IPA) Maccini Sombala Tahun 2012 s.d. 2036 antara PDAM Kota Makassar dan PT Multi Engka Utama bermasalah di antaranya harga air curah dalam kontrak dibuat lebih tinggi dibandingkan harga pada dokumen penawaran teknis sehingga berpotensi merugikan perusahaan senilai Rp24.421,47 juta.

- PDAM memberikan tarif khusus lebih rendah daripada tarif penuh kepada PT Baruga Asrinusa Development sehingga mengurangi potensi pendapatan PDAM senilai Rp2.636,67 juta.

Penyebab

8.37 Kasus-kasus kelemahan SPI dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya disebabkan kebijakan Walikota Makassar memberikan ijin prinsip persetujuan kerjasama ROT IPA Panaikang, kebijakan walikota, badan pengawas dan direksi PDAM periode 2006-2010 yang memberikan persetujuan atas pembayaran uang muka walaupun atas kegiatan tersebut tidak terdapat dalam RKAP dan RKAP perubahannya; direksi PDAM belum sepenuhnya mentaati peraturan yang berlaku; dan menyepakati tarif khusus kepada PT BAD yang di bawah tarif penuh; Tim Kajian Peningkatan dan Pelayanan dan Panitia Pengadaan Badan Usaha tidak melaksanakan tugasnya dengan cermat dan optimal.

Rekomendasi

8.38 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direktur Utama PDAM Kota Makassar agar menunjuk konsultan untuk menghitung nilai investasi dan nilai jual air yang wajar dan BPKP untuk melakukan reviu terhadap perhitungan tersebut serta menarik kembali dana atau kekurangan tarif yang terjadi.

8.39 LHP atas PDTT lainnya secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

Akper : Akademi Perawatan
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
ASR : *Abandonment and Site Restoration*

B

Bansos : Bantuan Sosial
BAST : Berita Acara Serah Terima
BL : Bina Lingkungan
BLBU : Bantuan Langsung Benih Unggul
BLP : Bantuan Langsung Pupuk
BM : Bea Masuk
BMN : Barang Milik Negara
BNI : Bank Negara Indonesia
BOT : *Built, Operate, and Transfer*
BPD : Bank Pembangunan Daerah
BPH Migas : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMIGAS : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BUD : Bendahara Umum Daerah
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara

C

CBN : Cadangan Benih Nasional
CSR : *Corporate Social Responsibity*

D

DAK : Dana Alokasi Khusus
DCS : *Departure Control System*
Dirjen PSP : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Divre : Divisi Regional
DKI : Daerah Khusus Ibukota
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

G

GOR : Gedung Olahraga

H

HPB : Harga Pembelian Beras
HPP : Harga Pokok Penjualan
HPP : Harga Pokok Penyerahan
HPS : Harga Perkiraan Sendiri

I

IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IPA	:	Instalasi Pengolahan Air

J

JBT	:	Jenis BBM Tertentu

K

KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kasubbag	:	Kepala Sub Bagian
KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kejati	:	Kejaksaan Tinggi
Kejari	:	Kejaksaan Negeri
Kementan	:	Kementerian Pertanian
Kesdam I/BB	:	Kesehatan Daerah Militer
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KJRI	:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	:	Kementerian/Lembaga
Kodam	:	Komando Daerah Militer
Kodam I/BB	:	Komando Daerah Militer I Bukit Barisan
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KPU	:	Kewajiban Pelayanan Umum

L

LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LPG	:	*Liquied Petroleum Gas*

M

Mabes TNI	:	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

P

PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
P2B	:	Pengawasan dan Penertiban Bangunan
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
P2D2	:	Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PIB	:	Pemberitahuan Impor Barang
PKBL	:	Program Kemitraan Bina Lingkungan
PLN Kit SBU	:	PLN pembangkit Sumatera Bagian Utara
Plt	:	Pelaksana Tugas
PLTGU	:	Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
Polda	:	Kepolisian Daerah

Polri : Kepolisian Republik Indonesia
PSO : *Public Service Obligation*
PT AKR : PT Aneka Kimia Raya Corporindo
PT HIN : PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
PT HLL : PT Hutansanggam Labanan Lestari
PT INKA : PT Industri Kereta Api (Persero)
PT IP : PT Indonesia Power
PT PAL : PT PAL Indonesia (Persero)
PT Pelni : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT PG : PT Petrokimia Gresik (Persero)
PT PIM : PT Pupuk Iskandar Muda (Persero)
PT PK : PT Pupuk Kujang (Persero)
PT PKT : PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero)
PT PLN : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT PPA : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Pusri : PT Pupuk Sriwijaya Palembang (Persero)
PT SG : PT Semen Gresik (Persero) Tbk
PT SHS : PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT SIER : PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)
PU : Pekerjaan Umum

R

RAB : Rancangan Anggaran Biaya
Raskin : Beras Miskin
RDI : Rekening Dana Investasi
RDKK : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani
RKAP : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
ROT IPA : Rehabilitasi, Operasi, Transfer Instalasi Pengolahan Air
Rupbasan : Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAP : Standar Akuntansi Pemerintah
SDM : Sumber Daya Manusia
SE : *Somatic Embryogenesis*
SIMAK BMN : Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
SIPD : Surat Izin Pertambangan Daerah
SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA : *Subsidiary Loan Agreement*
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMAN : Sekolah Menengah Atas Negeri
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SOP : *Standard Operating Procedure*
SP : Semen Padang
Spersau : Staf Personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
SPI : Sistem Pengendalian Intern
SPJ : Surat Pertanggungjawaban
SPJB : Surat Perjanjian Jual Beli
SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SSP	:	Surat Setoran Pajak
Subsidi JBT	:	Subsidi Jenis BBM Tertentu

T

TA	:	Tahun Anggaran
TEPI	:	Total E&P Indonesie
TNI AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TPS	:	Tempat Penimbunan Sementara

U

UIP	:	Unit Implementasi Proyek

W

WK	:	Wilayah Kerja

Z

Zidam	:	Zeni Daerah Militer

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**12**	**23,53**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	4	
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**	**28**	**54,90**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	9	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	17	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**11**	**21,57**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	
3	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**51**	**100**

Lampiran 2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Negara/Daerah**	**4**	**4,76%**	**867,32**	**0,90%**
1	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya (selain perjalanan dinas)	1		397,91	
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		205,50	
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2		263,91	
II	**Potensi Kerugian Negara/Daerah**	**7**	**8,33%**	**55.546,51**	**57,95%**
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1		122,33	
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	6		55.424,18	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**51**	**60,71%**	**39.438,92**	**41,15%**
				USD 596.97	
				AUD 28.59	
				PLN 54.42	
	Jumlah rupiah			**45.519,57**	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	2		120,55	
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	40		33.852,03	
				USD 254.27	
				AUD 28.59	
				PLN 54.42	
	Jumlah rupiah			36.683,87	
3	Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah	4		4.654,12	
				USD 327.60	
	Jumlah Rupiah			7.759,77	
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	5		812,22	
				USD 15.10	
	Jumlah rupiah			955,38	
IV	**Administrasi**	**22**	**26,19%**	**-**	**0%**
1	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah	3		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6		-	
3	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	12		-	
4	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	**84**	**100%**	**95.852,75**	**100%**
				USD 596.97	
				AUD 28.59	
				PLN 54.42	
	Jumlah rupiah			**101.933,40**	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Halaman 1 - Lampiran 3

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Total	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendapatan Negara																
1		**Kejaksaan RI**	**15**	**2**	**10**	**3**	**20**	**57.321,72**	**-**	**-**	**6**	**55.424,17**	**7**	**1.897,55**	**7**	**11,32**
	1	Pelaksaan Anggaran Kegiatan Serta Intensifikasi PNBP TA 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Serta Instansi Terkait	5	1	3	1	5	7.885,23	-	-	1	7.877,26	2	7,97	2	-
	2	Pelaksaan Anggaran Kegiatan Serta Intensifikasi PNBP TA 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi Serta Instansi Terkait	3	1	2	-	3	18.506,33	-	-	1	18.496,09	1	10,24	1	-
	3	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA. 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	4	-	3	1	6	25.558,02	-	-	2	25.533,82	2	24,20	2	11,32
	4	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA. 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	3	-	2	1	6	5.372,14	-	-	2	3.517,00	2	1.855,14	2	-
2		**Kementerian Luar Negeri**	**1**	**-**	**1**	**-**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**-**	**1**	**-**
								USD 235.20						**USD 235.20**		**USD 6.58**
								AUD 28.59						**AUD 28.59**		
								PLN 54.42						**PLN 54.42**		
	5	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Washington D.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KJRI New York	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Takhta Suci Vatikan	1	-	1	-	1	USD 15.10	-	-	-	-	1	USD 15.10	-	-
	8	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Canberra	-	-	-	-	1	USD 6.58	-	-	-	-	1	USD 6.58	-	USD 6.58
	10	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KJRI Perth	-	-	-	-	2	AUD 28.59	-	-	-	-	1	AUD 28.59	1	-
	11	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Warsawa	-	-	-	-	2	PLN 54.42	-	-	-	-	2	PLN 54.42	-	-
				-	-	-	-	USD 213.52	-	-	-	-	-	USD 213.52	-	-
3		**Mabes TNI**														
	12	Pengelolaan Anggaran dan kegiatan Kantor Atase Pertahanan/ Penasehat militer Republik Indonesia TA 2010 dan 2011 pada Mabes TNI		-	-	-	1	USD 34.15	-	-	-	-	1	USD 34.15	-	USD 34.15

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
			Total	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4		**TNI AD**														
	13	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Kodam I/Bukit Barisan di Medan dan Kodam Iskandar Muda	1	1	-	-	6	3.200,96	-	-	-	-	3	3.200,96	3	-
								USD 327.60					-	USD 327.60		
5		**Kepolisian Negara RI**														
	14	Pelaksanaan Anggaran Belanja dan PNBP TA 2009 s.d. 2011 pada Kepolisian Kepulauan Bangka Belitung	4	2	2	-	9	2.371,63	2	590,01	1	122,33	6	1.659,29	-	6,09
		Sub Jumlah Pendapatan Negara	21	**5**	**13**	**3**	**42**	**62.894,31**	**2**	**590,01**	**7**	**55.546,50**	**22**	**6.757,80**	**11**	**17,41**
								USD 596.95						**USD 596.95**		**USD 40.73**
								AUD 28.59						**AUD 28.59**		**-**
								PLN 54.42						**PLN 54.42**		**-**
Pendapatan Daerah																
6		**Prov. DKI Jakarta**														
	15	Pajak Reklame TA 2011 pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya	8	-	6	2	5	10.231,92	-	-	-	-	4	10.231,92	1	-
7		**Prov. Maluku**														
	16	Pemungutan dan penyetoran pajak oleh Bendahara Prov. Maluku TA 2010 dan 2011	6	1	2	3	5	8.659,78	-	-	-	-	5	8.659,78	-	-
	17	Pemungutan dan penyetoran pajak oleh Bendahara Kab. Seram Bagian Barat TA 2010 dan 2011	8	2	4	2	18	11.474,06	-	-	-	-	10	11.474,06	8	-
	18	Pemungutan dan penyetoran pajak oleh Bendahara Kota Ambon TA 2010 dan 2011	8	4	3	1	14	2.592,63	2	277,31	-	-	10	2.315,32	2	0,46
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah Pendapatan Daerah	**30**	**7**	**15**	**8**	**42**	**32.958,39**	**2**	**277,31**	**-**	**-**	**29**	**32.681,08**	**11**	**0,46**
		Total	**51**	**12**	**28**	**11**	**84**	**95.852,70**	**4**	**867,32**	**7**	**55.546,50**	**51**	**39.438,88**	**22**	**17,87**
								USD 596.95						**USD 596.95**		**USD 40.73**
								AUD 28.59						**AUD 28.59**		
								PLN 54.42						**PLN 54.42**		
		Jumlah rupiah	**51**	**12**	**28**	**11**	**84**	**101.933,09**	**4**	**867,32**	**7**	**55.546,50**	**51**	**45.519,27**	**22**	**403,99**

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**19**	**33,93**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	13	-
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	3	-
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	-
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	2	-
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**	**27**	**48,21**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	18	-
3	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	2	-
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	-
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	-
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**10**	**17,86**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	-
3	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	1	-
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**56**	**100**

Halaman 1 - Lampiran 5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Negara**	**71**	**38,59**	**46.726,16**	**17,28**
				USD 19.32	
	Jumlah rupiah			**46.909,41**	
1	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	6		5.634,09	
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2		1.205,13	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	19		11.105,79	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	20		6.185,53	
5	Pemahalan harga (*mark up*)	3		20.859,86	
6	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3		159,34	
				USD 9.42	
	Jumlah rupiah			248,65	
7	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	4		194,76	
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3		28,03	
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	11		1.353,63	
				USD 9.90	
	Jumlah rupiah			1.447,57	
II	**Potensi Kerugian Negara**	**2**	**1,09**	**21,74**	**0,01**
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1		21,74	
2	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1		-	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**17**	**9,24**	**10.183,48**	**3,77**
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	9		3.761,28	
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	5		6.310,91	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	3		111,29	
IV	**Administrasi**	**58**	**31,52**	**-**	**0,00**
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	6		-	
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	12		-	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5		-	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	14		-	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	4		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	11		-	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2		-	
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1		-	
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara	2		-	
V	**Ketidakhematan**	**19**	**10,33**	**29.445,91**	**10,89**
				USD 0.46	
	Jumlah rupiah			**29.450,30**	
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	19		29.445,91	
				USD 0.46	
	Jumlah rupiah			29.450,30	

Halaman 2 - Lampiran 5

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
VI	**Ketidakefisienan**	1	**0,54**	**4.753,18**	**1,76**
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1		4.753,18	
VII	**Ketidakefektifan**	**16**	**8,70**	**179.276,27**	**66,30**
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	6		103.334,49	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		388,84	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	5		75.259,57	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		293,37	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	**184**	**100**	**270.406,74**	**100**
				USD 19.78	
	Jumlah rupiah			**270.594,38**	

Keterangan
Nilai Valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Halaman 1 - Lampiran 6

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
			Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidahematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		**Kejaksaan RI**	**5**	**3**	**2**	**-**	**12**	**322,05**	**7**	**293,70**	**2**	**21,74**	**2**	**6,61**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**144,46**	**1,10**
	1	Pelaksaan Anggaran Kegiatan Serta Intensifikasi PNBP TA 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu Serta Instansi Terkait	2	-	2	-	3	18,92	2	16,16	-	-	1	2,76	-	-	-	-	-	-	-	16,16	1,10
	2	Pelaksaan Anggaran Kegiatan Serta Intensifikasi PNBP TA 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi Serta Instansi Terkait	1	1	-	-	4	102,04	3	102,04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,80	-
	3	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA. 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	1	1	-	-	4	150,04	1	124,45	1	21,74	1	3,85	1	-	-	-	-	-	-	68,69	-
	4	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNBP TA. 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	1	1	-	-	1	51,05	1	51,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,81	-
2		**Kementerian Luar Negeri**	**27**	**8**	**15**	**4**	**20**	**574,70**	**4**	**23,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**2**	**167,60**	**-**	**-**	**2**	**383,59**	**18,01**	**-**
			-	**-**	**-**	**-**	**-**	**USD 5.90**	**-**	**USD 5.90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**USD 3.12**	**-**
	5	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Washington D.C.	5	2	2	1	5	271,79	1	5,50	-	-	-	-	2	1	149,47	-	-	1	116,82	-	-
	6	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KJRI New York	5	1	3	1	3	284,78	1	18,01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	266,77	18,01	-
	7	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Takhta Suci Vatikan	2	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Roma	4	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Canberra	5	1	3	1	3	USD 4.81	1	USD 4.81	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	USD 2.87	-
	10	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KJRI Perth	3	1	2	-	2	18,13	-	-	-	-	-	-	1	1	18,13	-	-	-	-	-	-
	11	Belanja dan PNBP TA 2010 dan 2011 pada KBRI Warsawa	3	-	3	-	1	USD 1.09	1	USD 1.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 0.25	-
3		**Kementerian Perhubungan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17**	**82.462,89**	**9**	**2.070,14**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5**	**6.557,75**	**1**	**4.753,18**	**2**	**69.081,82**	**1.658,73**	**-**
	12	Pelaksanaan Anggaran Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya di Provinsi Jawa Tengah TA 2010 dan 2011 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	-	-	-	-	9	9.222,63	5	1.658,73	-	-	-	-	-	2	2.421,88	1	4.753,18	1	388,84	1.658,73	-

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
			Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidahematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	13	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	-	-	-	-	8	73.240,26	4	411,41	-	-	-	-	-	3	4.135,87	-	-	1	68.692,98	-	-
4		**Mabes TNI**	**5**	**-**	**1**	**4**	**13**	**88.933,71**	**3**	**141,33**	**-**	**-**	**1**	**125,01**	**5**	**2**	**44,66**	**-**	**-**	**2**	**88.622,71**	**120,67**	**125,11**
								USD 13.88		**USD 13.42**				**-**			**USD 0.46**				**-**	**-**	**-**
	14	Pengelolaan Anggaran dan kegiatan Kantor Atase Pertahanan/Penasehat militer Republik Indonesia TA 2010 dan 2011 pada Mabes TNI	1	-	-	1	5	USD 13.88	2	USD 13.42	-	-	-	-	2	1	USD 0.46	-	-	-	-	-	-
	15	Pengelolaan Dana Reimbursement TA 2010 dan 2011 di lingkungan Mabes TNI	4	-	1	3	8	88.933,71	1	141,33	-	-	1	125,01	3	1	44,66	-	-	2	88.622,71	120,67	125,11
5		**TNI AD**	**5**	**2**	**2**	**1**	**28**	**16.002,70**	**9**	**3.420,43**	**-**	**-**	**3**	**2.058,79**	**13**	**3**	**10.523,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**138,00**	**80,30**
	16	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Kodam I/Bukit Barisan dan Kodam Iskandar Muda	2	2	-	-	12	1.464,41	7	1.360,82	-	-	2	103,59	3	-	-	-	-	-	-	138,00	80,30
	17	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Direktorat Peralatan Angkatan Darat	3	-	2	1	16	14.538,29	2	2.059,61	-	-	1	1.955,20	10	3	10.523,48	-	-	-	-	-	-
6		**TNI AL**	**2**	**2**	**-**	**-**	**23**	**3.056,57**	**7**	**749,21**	**-**	**-**	**7**	**1.278,26**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**1.029,10**	**227,19**	**1.530,58**
	18	Pelaksanaan Anggaran dan kegiataan pada Lantamal IV dan jajaran terkait TA 2010 dan 2011	1	1	-	-	6	2.043,86	3	522,02	-	-	2	786,11	-	-	-	-	-	1	735,73	-	630,57
	19	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Lantamal VII dan Lantamal VIII	1	1	-	-	17	1.012,71	4	227,19	-	-	5	492,15	6	-	-	-	-	2	293,37	227,19	900,01
7		**TNI AU**																					
	20	Pelaksanaa Anggaran dan kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Staf Personel TNI Angkatan Udara (Spersau) serta dinas terkait	3	-	3	-	6	2.669,31	1	15,00	-	-	-	-	3	1	2.621,31	-	-	1	33,00	-	-
8		**Kepolisian Negara RI**																					
	21	Pelaksanaan Anggaran Belanja dan PNBP TA 2009 s.d. 2011 pada Kepolisian Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	8	1.730,26	8	1.730,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454,20	-
9		**Kementerian Pemuda dan Olahraga**																					
	22	Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka sea games XXVI TA 2010 dan 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga	2	-	2	-	36	52.457,03	14	38.126,00	-	-	3	6.708,12	13	4	1.825,06	-	-	2	5.797,85	-	-
		BA 999.03 dan BA 999.07																					
10	23	BA 999.03 serta BA 999.07 pada Kementerian Perumahan Rakyat	1	-	-	1	1	8,50	1	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan															Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
			Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidahematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		BA 999.08 (BSBL)																					
11	24	BA 999.08 (BSBL) pada Badan Kepegawaian Negara	-	-	-	-	2	23,15	1	23,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	25	BA 999.08 pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	-	-	-	-	1	14,43	1	14,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,43	-
13	26	BA 999.08 pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	27	BA 999.08 pada Sekretariat Negara	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	28	BA 999.08 pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	-	1	-	5	7.775,31	1	69,29	-	-	-	-	1	2	7.706,02	-	-	1	-	-	-
16	29	BA 999.08 pada Kementerian Sosial	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
17	30	BA 999.08 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1	-	-	1	14.328,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.328,18	-	-
18	31	BA 999.08 pada Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	32	BA 999.08 pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		BA 999.07 dan BA 999.08																					
20	33	BA 999.07 dan BA 999.08 pada Kementerian Komunikasi dan informatika	1	1	-	-	6	47,78	4	41,12	-	-	1	6,66	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	**56**	**19**	**27**	**10**	**184**	**270.406,57**	**71**	**46.726,07**	**2**	**21,74**	**17**	**10.183,45**	**58**	**19**	**29.445,88**	**1**	**4.753,18**	**16**	**179.276,25**	**2.775,69**	**1.737,09**
								USD 19.78		**USD 19.32**		**-**		**-**			**USD 0.46**		**-**		**-**	**USD 3.12**	**-**
		Jumlah Rupiah	**56**	**19**	**27**	**10**	**184**	**270.594,08**	**71**	**46.909,22**	**2**	**21,74**	**17**	**10.183,45**	**58**	**19**	**29.450,24**	**1**	**4.753,18**	**16**	**179.276,25**	**2.805,27**	**1.737,09**

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 7

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**1**	**5,56**
1	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**	**9**	**50,00**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	6	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**8**	**44,44**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	
3	Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	1	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**18**	**100**

Lampiran 8

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Daerah**	**103**	**51,50**	**59.410,30**	**24,82**
1	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	2		424,89	
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	52		32.563,29	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	25		17.846,85	
4	Pemahalan harga (*mark up*)	12		6.006,69	
5	Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2		484,89	
6	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1		66,70	
7	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	4		905,56	
8	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5		1.111,43	
II	**Potensi Kerugian Daerah**	**16**	**8,00**	**22.737,21**	**9,50**
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	9		20.689,18	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	3		139,93	
3	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	2		-	
4	Lain-lain	2		1.908,10	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**36**	**18,00**	**2.746,22**	**1,15**
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke kas negara/daerah	33		2.377,16	
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	3		369,06	
IV	**Administrasi**	**30**	**15,00**	**-**	**0,00**
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	1		-	
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	15		-	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	9		-	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah	2		-	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2		-	
V	**Ketidakhematan**	**6**	**3,00**	**1.507,26**	**0,63**
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1		-	
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	5		1.507,26	
VI	**Ketidakefektifan**	**9**	**4,50**	**152.920,25**	**63,90**
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	3		32,92	
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3		152.887,33	
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	3		-	
	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	**200**	**100**	**239.321,24**	**100**

Halaman 1 - Lampiran 9

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
			Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidahematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		**Prov. DKI Jakarta**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	Pengelolaan Dana Pendidikan di SMAN 53 Tahun Pelajaran 2010/2011 dan 2011/2012 serta Tindak Lanjut BOP dan BOS di SDN Bambu Apus 04 Pagi TA2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	1	-	1	-	2	753,13	2	753,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325,00	-
2		**Prov. Banten**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang	-	-	-	-	11	834,68	8	609,62	-	-	3	225,06	-	-	-	-	-	56,86	-
	3	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung	-	-	-	-	13	872,24	6	515,12	3	139,93	4	217,19	-	-	-	-	-	-	-
	4	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	-	-	-	-	15	2.115,79	11	2.078,18	-	-	3	28,29	-	-	-	1	9,32	2,45	0,08
	5	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang di Serang	-	-	-	-	8	1.395,00	3	1.334,78	-	-	2	40,88	1	1	19,34	1	-	-	1,27
	6	Belanja Daerah TA 2011 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa	-	-	-	-	12	1.581,06	6	1.165,91	-	-	3	399,69	1	2	15,46	-	-	-	-
	7	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon	2	-	-	2	8	1.037,93	8	1.037,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,06	-
	8	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	-	-	-	-	19	4.511,11	9	1.440,31	-	-	7	187,95	2	-	-	1	2.882,85	27,56	28,08
	9	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang	-	-	-	-	7	169,32	5	123,18	-	-	1	46,14	-	-	-	1	-	87,61	46,14
	10	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang	-	-	-	-	12	847,86	5	675,38	1	60,34	4	88,54	1	-	-	1	23,60	303,51	17,39
	11	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten TA 2010 dan 2011 (PDTT) Di Serang	4	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
3		**Prov. Kalimantan Timur**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Belanja daerah infrastruktur pemerintah kabupaten Bulungan TA 2010 dan 2011	1	-	1	-	10	5.643,31	4	4.467,69	-	-	2	568,95	3	1	606,67	-	-	-	-
	13	Belanja daerah infrastruktur pemerintah kabupaten Tana Tidung TA 2010 dan 2011	5	-	3	2	13	5.439,26	4	5.035,53	2	-	2	67,12	3	1	336,61	1	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 9

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.		Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
			Total SPI	Kelemahan sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidahematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	14	Belanja daerah infrastruktur pemerintah kabupaten Malinau TA 2010 dan 2011	2	-	1	1	12	12.297,19	3	11.352,15	1	600,35	1	344,69	6	-	-	1	-	-	-
	15	Belanja daerah infrastruktur pemerintah kabupaten Paser TA 2010 dan 2011	1	-	-	1	14	7.539,64	10	7.229,35	1	153,54	1	156,75	2	-	-	-	-	-	-
	16	Belanja daerah infrastruktur daerah TA 2009, 2010 dan 2011 pada pemerintah kabupaten Paser	-	-	-	-	15	99.128,75	7	18.618,08	2	3.194,24	2	323,66	3	-	-	1	76.992,77	-	-
	17	Belanja infrastruktur daerah TA 2009 s.d. 2011 pada pemerintah kabupaten Kutai Timur	2	-	2	-	13	92.106,70	7	656,20	5	18.438,79	-	-	-	-	-	1	73.011,71	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		**Prov. Papua**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	Belanja Kota Jayapura TA 2011	-	-	-	-	13	3.048,10	5	2.317,69	1	150,00	1	51,24	5	1	529,15	-	-	-	-
		Jumlah	**18**	**1**	**9**	**8**	**200**	**239.321,07**	**103**	**59.410,23**	**16**	**22.737,19**	**36**	**2.746,15**	**30**	**6**	**1.507,23**	**9**	**152.920,25**	**1.409,05**	**92,96**

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan

Lampiran 10

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**1**	**50,00**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
II	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**1**	**50,00**
1	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**2**	**100**

Lampiran 11

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kekurangan Penerimaan**	**24**	**96,00**	**USD 51,470.45**	**100**
1	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	24		USD 51,470.45	
	Jumlah Rupiah			**487.939,87**	
II	**Administrasi**	**1**	**4,00**	**-**	**-**
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1			
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		**25**	**100**	**USD 51,470.45**	**100**
Nilai dalam Rupiah *				**487.939,87**	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 12

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KKKS Conoco Phillips Indonesia Inc. Ltd.	-	-	-	-	11	USD 38,152.55	11	USD 38,152.55	-
2	KKKS PT Chevron Pasific Indonesia	2	1	-	1	6	USD 538.24	6	USD 538.24	-
3	KKKS Total E & P Indonesie WK Mahakam	-	-	-	-	8	USD 12,779.66	7	USD 12,779.66	1
Jumlah		**2**	**1**	**-**	**1**	**25**	**USD 51,470.45**	**24**	**USD 51,470.45**	**1**
Jumlah dalam rupiah							**487.939,87**		**487.939,87**	

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 13

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kewajiban Pelayanan Umum

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**15**	**27,27**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	9	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1	
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan**	**11**	**20,00**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	6	
4	Lain-lain	1	
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**29**	**52,73**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	18	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
4	Lain-lain	1	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**55**	**100**

Lampiran 14

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kewajiban Pelayanan Umum

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Negara/Perusahaan**	**6**	**7,32**	**25.586,75**	**1,61**
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1		166,34	
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	5		25.420,41	
II	**Potensi Kerugian Negara/Perusahaan**	**3**	**3,66**	**9.381,55**	**0,59**
1	Aset tidak diketahui keberadaannya	1		2.767,38	
2	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/perusahaan	1		4.462,57	
3	Lain-lain	1		2.151,60	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**11**	**13,41**	**504.985,09**	**31,83**
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara atau perusahaan	3		54.640,33	
2	Penerimaan Negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	5		10.671,78	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1		49,43	
4	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	2		439.623,55	
IV	**Administrasi**	**53**	**64,63**	**-**	**-**
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2		-	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	12		-	
4	Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum	37		-	
5	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	
V	**Ketidakhematan**	**3**	**3,66**	**631.657,27**	**39,81**
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	3		631.657,27	
VI	**Ketidakefisienan**	**2**	**2,44**	**320.487,87**	**20,20**
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	2		320.487,87	
VII	**Ketidakefektifan**	**4**	**4,88**	**94.542,33**	**5,96**
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		94.542,33	
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		**82**	**100**	**1.586.640,86**	**100**

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 15

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Subsidi Pemerintah/Kewajiban Pelayanan Umum

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan														
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan		Kerugian Negara/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidak efisienan		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Subsidi Listrik PT PLN	2	1	1		6	155.283,07			1	4.462,57	2	56.278,17	2					1	94.542,33
2	Subsidi JBT Pertamina	29	7		22	31	-				-		-	31						
3	Subsidi PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	-				3	-				-		-	3						
4	Subsidi PT Pupuk Iskandar Muda	-				2	-				-		-	2						
5	Subsidi PT Pupuk Kujang	-				5	4.509,00				-	1	4.509,00	4						
6	Subsidi PT Petrokimia Gresik	-				2	-				-		-	2						
7	Subsidi PT Pupuk Kalimantan Timur	-				3	-				-		-	3						
8	Subsidi Raskin Perum Bulog	14	5	5	4	8	443.389,77	1	551,15		-	4	442.838,62	3						
9	Subsidi Benih, Subsidi Pupuk, BLBU, BLP, CBN Tahun 2011 pada Kementerian Pertanian	2		1	1	15	661.978,01	5	25.035,60	2	4.918,99	2	366,15	2	3	631.657,27			1	
10	PSO PT Pelayaran Indonesia (Pelni) (Persero)	8	2	4	2	7	321.481,02					2	993,15	1			2	320.488	2	
													-							
JUMLAH		**55**	**15**	**11**	**29**	**82**	**1.586.640,87**	**6**	**25.586,75**	**3**	**9.381,56**	**11**	**504.985,09**	**53**	**3**	**631.657,27**	**2**	**320.487,87**	**4**	**94.542,33**

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan

Lampiran 16

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**5**	**10,87**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan**	**27**	**58,70**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	13	
6	Lain-lain	1	
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**14**	**30,43**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	10	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**46**	**100**

Halaman 1 - Lampiran 17

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Negara/Perusahaan**	**9**	**14,52**	**295.527,73**	**22,96**
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1		163,30	
2	Kekurangan volume pekerjaan	1		123.557,80	
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	3		5.531,31	
4	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	3		21.869,36	
5	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1		144.405,96	
II	**Potensi Kerugian Negara/Perusahaan**	**15**	**24,19**	**622.071,90**	**48,32**
				USD 47,094.31	
	Jumlah rupiah			**1.068.526,01**	
1	Aset dikuasai pihak lain	2		85.645,68	
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2		1.704,54	
3	Lain-lain	11		534.721,68	
				USD 47,094.31	
	Jumlah rupiah			981.175,79	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**4**	**6,45**	**145.783,60**	**11,32**
				USD 120.24	
	Jumlah rupiah			**146.923,54**	
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	1		10.047,15	
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/disetor ke Kas negara/perusahaan	3		135.736,45	
				USD 120.24	
	Jumlah rupiah			136.876,39	
IV	**Administrasi**	**17**	**27,42**	**-**	**-**
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1		-	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3		-	
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/ perusahaan	2		-	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	8		-	
6	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		-	
7	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	

Halaman 2 - Lampiran 17

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp dan ribu valas)	%
V	**Ketidakhematan**	**5**	**8,06**	**43.310,14**	**3,36**
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1		18.793,77	
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	4		24.516,37	
VI	**Ketidakefektifan**	**12**	**19,35**	**180.719,15**	**14,04**
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1		1.332,99	
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1		170,00	
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2		57.052,67	
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1		-	
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5		120.515,32	
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2		1.648,17	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		**62**	**100**	**1.287.412,52**	**100**
				USD 47,214.55	
	Jumlah dalam Rupiah			**1.735.006,57**	

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 18

Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PT Hotel Indonesia Natour	10	2	8		12	8.952,84	2	4.753,87	2	329,11	1	21,17	2	1	3.058,69	4	790,00
						1	USD 120.24					1	USD 120.24					
2	PT PAL Indonesia (Persero)	6	2	2	2	23	1.134.046,12	5	271.546,86	12	620.876,45	1	135.715,28	3	1	18.793,77	1	87.113,76
							USD 47,094.31				USD 47,094.31							
3	PT Semen Gresik (Persero), Tbk	11		8	3	15	120.964,37	-				1	10.047,15	8	1	19.750,00	5	91.167,22
4	PT Industri Kereta Api	6	1	3	2	6	20.934,70	2	19.227,02			-		2	2	1.707,68		
5	PT SIER (Persero)	-				4	2.514,51	-		1	866,34	-		1	-		2	1.648,17
6	PT Pertamina (Persero)	13		6	7	1	-	-				-		1	-			
Jumlah		**46**	**5**	**27**	**14**	**62**	**1.287.412,54**	**9**	**295.527,75**	**15**	**622.071,90**	**4**	**145.783,60**	**17**	**5**	**43.310,14**	**12**	**180.719,15**
							USD 47,214.55		**-**		**USD 47,094.31**		**USD 120.24**			**-**		**-**
Jumlah rupiah		**46**	**5**	**27**	**14**	**62**	**1.735.006,47**	**9**	**295.527,75**	**15**	**1.068.525,96**	**4**	**146.923,48**	**17**	**5**	**43.310,14**	**12**	**180.719,15**

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 19

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%
	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
I	**Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan**	**2**	**8,33**
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	**Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan**	**17**	**70,84**
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	
3	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	1	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	4	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5	
III	**Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**	**5**	**20,83**
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	3	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	
	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	**24**	**100**

Lampiran 20

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	%	Nilai (juta Rp)	%
	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	**Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan**	**17**	**26,15**	**393.621,93**	**46,58**
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	2		694,79	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	2		1.848,97	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1		140.901,76	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan	4		2.187,11	
5	Pemahalan harga (*mark up*)	4		245.586,16	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1		209,09	
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2		1.545,85	
8	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1		648,20	
II	**Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan**	**12**	**18,46**	**371.763,31**	**43,99**
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	6		119.515,75	
2	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1		-	
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3		3.385,24	
4	Lain-lain	2		248.862,32	
III	**Kekurangan Penerimaan**	**14**	**21,54**	**79.690,06**	**9,43**
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan	5		36.921,89	
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah atau perusahaan	7		40.110,83	
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	2		2.657,34	
				-	
IV	**Administrasi**	**20**	**30,77**	-	**-**
1	Pelaksanaan lelang secara proforma	4		-	
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan	13		-	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1		-	
4	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1		-	
5	Lain-lain	1		-	
V	**Ketidakhematan**	**1**	**1,54**	**26,52**	**-**
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	1		26,52	
VI	**Ketidakefektifan**	**1**	**1,54**	**-**	**-**
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1		-	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		**65**	**100**	**845.101,82**	**100**

Lampiran 21

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan menurut Entitas

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan													Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan	
		Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Perusahaan	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara/ Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	PUSAT																			
1	Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	7	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada Kementerian Pertanian	-	-	-	-	7	3.941,41	3	1.006,70	-	-	4	2.934,71	-	-	-	-	-	142,00	179,15
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan TA 2008 s.d. 2011	2	-	2	-	17	765.206,57	5	349.499,67	6	343.766,88	2	71.940,02	3	-	-	1	-		-
	Jumlah Pusat	**9**	**1**	**4**	**4**	**24**	**769.147,98**	**8**	**350.506,37**	**6**	**343.766,88**	**6**	**74.874,73**	**3**	**-**	**-**	**1**	**-**	**142,00**	**179,15**
	DAERAH						-		-		-		-			-				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Berau	5	-	5	-	7	391,29	-	-	-	-	1	391,29	6	-	-	-	-		391,29
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Paser	2	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-		-
	Jumlah Daerah	**7**	**-**	**6**	**1**	**13**	**391,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**391,29**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**391,29**
	BUMD																			
1	Pendapatan dan Biaya pada PD Dharma Jaya	7	1	6	-	24	10.335,75	8	4.946,91	5	3.574,96	6	1.787,36	4	1	26,52		-		-
2	Pengelolaan PDAM Kota Makassar	1		1	-	4	65.226,80	1	38.168,66	1	24.421,47	1	2.636,67	1	-	-	-	-		-
	Jumlah BUMD	**8**	**1**	**7**	**-**	**28**	**75.562,55**	**9**	**43.115,57**	**6**	**27.996,43**	**7**	**4.424,03**	**5**	**1**	**26,52**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah	**24**	**2**	**17**	**5**	**65**	**845.101,82**	**17**	**393.621,94**	**12**	**371.763,31**	**14**	**79.690,05**	**20**	**1**	**26,52**	**1**	**-**	**142,00**	**570,44**

Keterangan
Terdapat perbedaan nilai total antara lampiran menurut entitas dengan lampiran menurut kelompok dan jenis temuan karena pembulatan

Lampiran 22

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Tema Pemeriksaan	Total kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
				Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan																									
				Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif				Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Pemahalan harga (Mark up)		penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi		pembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan				spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet		penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan perjalanan dinas	penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain perjalanan dinas)
				Belanja *Perjalanan Dinas* Fiktif		Belanja atau pengadaan fiktif *lainnya*												Biaya *Perjalanan Dinas* ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan		pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan										
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																													
1	Pengelolaan Pendapatan	4	867,32	-	-	1	397,91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	205,50	-	-	-	-	-	-	2	263,91	-	-	-	-
2	Pelaksanaan Belanja	174	106.319,71	-	-	8	6.058,98	2	1.205,13	71	43.669,08	45	24.032,38	15	26.866,55	-	-	5	733,54	5	261,46	7	933,59	16	2.559,00	-	-	157,81	4.056,51
	Pemerintah Pusat	71	46.909,41	-	-	6	5.634,09	2	1.205,13	19	11.105,79	20	6.185,53	3	20.859,86	-	-	3	248,65	4	194,76	3	28,03	11	1.447,57	-	-	138,69	2.666,58
	Pemerintah Daerah	103	59.410,30	-	-	2	424,89	-	-	52	32.563,29	25	17.846,85	12	6.006,69	-	-	2	484,89	1	66,70	4	905,56	5	1.111,43	-	-	19,12	1.389,93
3	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	6	25.586,75	-	-	1	166,34	-	-	-	-	5	25.420,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Operasional Badan Usaha Milik Negara	9	295.527,73	1	163,30	-	-	-	-	1	123.557,80	3	5.531,31	-	-	3	21.869,36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	144.405,96	-	-
6	PDTT Lainnya	17	393.621,93	2	694,79	2	1.848,97	-	-	1	140.901,76	4	2.187,11	4	245.586,16	1	209,09	-	-	-	-	-	-	2	1.545,85	1	648,20	-	142,00
	Total	**210**	**821.923,44**	**3**	**858,09**	**12**	**8.472,20**	**2**	**1.205,13**	**73**	**308.128,64**	**57**	**57.171,21**	**19**	**272.452,71**	**5**	**22.283,95**	**5**	**733,54**	**5**	**261,46**	**7**	**933,59**	**20**	**4.368,76**	**2**	**145.054,16**	**157,81**	**4.198,51**

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 23

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Tema Pemeriksaan	Total Potensi kerugian negara/ daerah/perusahaan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan																	
				Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Pembelian aset yang berstatus sengketa		Aset tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/ daerah		Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Lain-lain	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																					
1	Pengelolaan Pendapatan	7	55.546,51	1	122,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	55.424,18	-	-
2	Pelaksanaan Belanja	18	22.758,95	10	20.710,92	3	139,93	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	1.908,10
	Pemerintah Pusat	2	21,74	1	21,74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Pemerintah Daerah	16	22.737,21	9	20.689,18	3	139,93	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1.908,10
3	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	3	9.381,55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.767,38	-	-	1	4.462,57	-	-	1	2.151,60
5	Operasional Badan Usaha Milik Negara	15	1.068.526,01	-	-	-	-	2	85.645,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.704,54	11	981.175.79
6	PDTT Lainnya	12	371.763,31	6	119.515,75	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3.385,24	2	248.862,32
	Total	**55**	**1.527.976,33**	**17**	**140.349,00**	**3**	**139,93**	**2**	**85.645,68**	**1**	**-**	**1**	**2.767,38**	**1**	**-**	**3**	**4.462,57**	**11**	**60.513,96**	**16**	**1.1234.097,81**

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Lampiran 24

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Tema Pemeriksaan	Total Kekurangan Penerimaan		Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan												Nilai penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan	
				Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah/perusahaan				Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah		Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan denda keterlambatan pekerjaan	penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan)
				Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan											
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu																	
1	Pengelolaan Pendapatan	51	45.519,57	2	120,55	40	36.683,87	4	7.759,77	5	955,38	-	-	-	-	6,09	397,90
2	Pelaksanaan Belanja	53	12.929,70	42	6.138,44	8	6.679,97	-	-	3	111,29	-	-	-	-	170,06	1.659,99
	Pemerintah Pusat	17	10.183,48	9	3.761,28	5	6.310,91	-	-	3	111,29	-	-	-	-	81,40	1.655,69
	Pemerintah Daerah	36	2.746,22	33	2.377,16	3	369,06	-	-	-	-	-	-	-	-	88,66	4,30
3	Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	24	487.939,87	-	-	-	-	-	-	-	-	24	487.939,87	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Subsidi Pemerintah	11	504.985,09	3	54.640,33	5	10.671,78	-	-	1	49,43	-	-	2	439.623,55	-	-
5	Operasional Badan Usaha Milik Negara	4	146.923,54	1	10.047,15	3	136.876,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PDTT Lainnya	14	79.690,06	5	36.921,89	7	40.110,83	-	-	2	2.657,34	-	-	-	-	-	570,44
	Total	**157**	**1.277.987,83**	**53**	**107.868,36**	**63**	**231.022,84**	**4**	**7.759,77**	**11**	**3.773,43**	**24**	**487.939,87**	**2**	**439.623,55**	**176,15**	**2.628,33**

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 29 Juni 2012

Halaman 1 - Lampiran 25

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDTT Semester I Tahun 2012

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu					
I	**Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Pendapatan**				
	1	1	**Kejaksaan Republik Indonesia**	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA. 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi
		2		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu
		3		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
		4		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2010 dan 2011 pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
	2	5	**Kementerian Sekretariat Negara**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2011
	3	6	**Kementerian Luar Negeri**	1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. di Amerika Serikat
		7		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Takhta Suci Vatikan di Italia
		8		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia
		9		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra di Australia
		10		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warsawa di Polandia
		11		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York di Amerika Serikat
		12		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2010 dan 2011 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth di Australia
	4	13	**Mabes TNI**	1	Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan Kantor Atase Pertahanan/Penasehat Militer Republik Indonesia Tahun 2010 dan 2011 pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
		14		1	Pengelolaan Dana Reimburstment Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) di Jakarta dan Lebanon
	5	15	**TNI AD**	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Kodam I/Bukit Barisan dan Kodam Iskandar Muda di Medan dan Banda Aceh
		16		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Direktorat Peralatan Angkatan Darat di Jakarta, Bandung, dan Surabaya
	6	17	**TNI AL**	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Lantamal IV dan Jajaran Terkait TA 2010 dan 2011 di Tanjung Pinang
		18		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Lantamal VII dan VIII serta Jajaran Terkait TA 2010 dan 2011 di Tanjung Pinang
	7	19	**TNI AU**	1	Pelaksanaan Anggaran dan kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Staf Personel TNI Angkatan Udara (Spersau) serta dinas terkait di Jakarta
	8	20	**Kementerian Perhubungan**	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan Jawa Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		21		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2010 dan 2011 pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon Kroya Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah
	9	22	**Kementerian Sosial**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 TA 2011 pada Kementerian Sosial
	10	23	**Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2011 pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
	11	24	**Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya BA 999.08 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2011
	12	25	**Kementerian Komunikasi dan Informasi**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Tahun 2011
	13	26	**Kepolisian Republik Indonesia**	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2009 s.d TA 2011 pada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang
	14	27	**Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya BA 999.08 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2011
	15	28	**Badan Kepegawaian Negara**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Lainnya Ba 999.08 Badan Kepegawaian Negara Tahun 2011

Halaman 2 - Lampiran 25

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	16	29	**Kementerian Pemuda dan Olah Raga**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dalam Rangka Sea Games XXVI TA 2010 dan 2011 pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga
	17	30	**Kementerian Perumahan Rakyat**	1	LK Investasi Pemerintah (BA 999.03) Serta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi (BA 999.07) Tahun 2011 Pada Kementerian Perumahan Rakyat
	18	31	**Badan Tenaga Nuklir Nasional**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 pada Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2011
	19	32	**Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2011
	20	33	**Badan Nasional Penanggulangan Bencana**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Lainnya (BA 999.08) TA 2011 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	21	34	**Provinsi DKI Jakarta**	1	Pengelolaan Dana Pendidikan di SMAN 53 Tahun Pelajaran 2010/2011 dan 2011/2012 Serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BOP dan BOS di SDN Bambu Apus 04 Pagi TA 2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
		35		1	Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
	22	36	**Provinsi Banten**	1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
		37		1	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten TA 2010 dan 2011 (PDTT) Di Serang
		38		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
		39		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
		40		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang di Serang
		41		1	Belanja Daerah TA 2011 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
		42		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon
		43		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Serang di Serang
		44		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang
		45		1	Belanja Daerah TA 2011 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang
	23	46	**Provinsi Kalimantan Timur**	1	Belanja Daerah Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Bulungan TA 2010 dan 2011 di Tanjung Selor
	24	47		1	Belanja Infrastruktur Daerah TA 2009 s.d. 2011 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangata
		48		1	Belanja Daerah Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Malinau TA 2010 dan 2011 di Malinau
		49		1	Belanja Infrastruktur Daerah TA 2009, 2010, dan 2011 pada Pemerintah Kabupaten Passer di Tanah Grogot
		50		1	Belanja Daerah Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Paser TA 2010 dan 2011 di Tanah Grogot
		51		1	Belanja Daerah Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tana Tidung TA 2010 dan 2011 di Tideng Pale
	25	52	**Provinsi Maluku**	1	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Provinsi Maluku TA 2010 dan 2011 di Ambon
		53		1	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2010 dan 2011 di Piru
		54		1	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Oleh Bendahara Pemerintah Kota Ambon TA 2010 dan 2011 di Ambon
	26	55	**Provinsi Papua**	1	Belanja Kota Jayapura TA 2011 (s.d. Oktober)
				55	
II	**Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi**				
	1	56	**BP Migas, PT Chevron Pacific Indonesia**	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2011 Wilayah Kerja Roka pada BP Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia di Jkarta, Pekanbaru, dan San Ramon (USA)
	2	57	**BP Migas, Total E&P Indonesie**	1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja Mahakam pada BP Migas dan KKKS Total E&P Indonesia serta Instansi Lain yang Terkait
	3	58	**BP Migas, Conocophillips Indonesia Inc Ltd**	1	Perhitngan Bagi Hasil Migas Tahun 2011 Wilayah Kerja South Natuna Sea-B pada BP Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Conocophilips Indonesia Inc Ltd serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Kepulauan Riau
				3	
III	**Subsidi**				
	1	59	**Kementerian Pertanian**	1	Subsidi Benih, Subsidi Pupuk, BLBU, BLP, CBN Tahun 2011 pada Kementarian Pertanian, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero) Serta Instansi Terkait Lainnya di Wliayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Ti

Halaman 3 - Lampiran 25

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	2	60	**PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2011 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Semarang dan Jakarta
	3	61	**PT Pupuk Kalimantan Timur**	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2011 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Surabaya dan Jakarta
	4	62	**PT Pupuk Iskandar Muda**	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2011 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Medan dan Jakarta
	5	63	**PT Pupuk Kujang**	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2011 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek
	6	64	**PT Petrokimia Gresik**	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2011 pada PT Petrokimia Gresik di Gresik
	7	65	**Perum Bulog**	1	Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah TA 2011 pada Perum Bulog di Jakarta dan Daerah
	8	66	**PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)**	1	Subsidi Listrik TA 2011 pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	9	67	**PT Pertamina (Persero), PT AKR Corp TBK, PT Petronas Niaga Ind, BPH Migas, Ditjen Migas Kementrian ESDM**	1	Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg Tahun 2011 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corp TBK, PT Petronas Niaga Indonesia, BPH Migas, Ditjen Migas Kementrian ESDM dan Instansi Terkait Lainnya di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, da
	10	68	**PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)**	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri TA 2011 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
				10	
IV	**Operasional BUMN**				
	1	69	**PT Surabaya Industrial Estate Rungkut**	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi TB 2010 dan 2011 (Semester 1) pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut di Surabaya
	2	70	**PT Hotel Indonesia Natour (Persero)**	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) Tahun 2010 dan 2011 (sd. Triwulan III) di Jakarta, Bali dan Padang
	3	71	**PT PAL Indonesia (Persero)**	1	Kegiatan Penjualan, Pengadaan, Produksi dan Investasi pada PT PAL Indonesia (Persero) TB 2009, 2010 dan 2011 (Semseter I) di Surabaya
	4	72	**PT Semen Gresik (Persero) TBK**	1	Pengadaan, Biaya dan Investasi pada PT Semen Gresik (Persero) TBK dan Anak Perusahaan TB 2010 dan 2011 (s.d Triwulan III) di Gresik, Tuban, Pangkep, dan Indarung
	5	73	**PT Industri Kereta Api (Persero)**	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Biaya Pemasaran dan Penjualan pada PT Industri Keretta Api (Persero) TB 2010 dan 2011
	6	74	**PT Pertamina (Persero)**	1	Kegiatan Investasi PT Pertamina (Persero) Tahun 2010 dan 2011 Semester 1 di Jakarta, Medan, Balongan, dan Tuban
				6	
V	**PDTT Lainnya**				
	1	75	**Kementerian Kesehatan**	1	Pengadaan Sarana dan Prasaran Pengadaan Vaksin Flu Burung Untuk Manusia Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkunganKemenerian Kesehatan TA 2008 s.d. 2011
	2	76	**Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**	1	Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Tahun 2011 pada Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
	3	77	**Kementerian Pertanian**	1	Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) TA 2011 pada Kementerian Pertanian dan Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota yang Membidangi Perkebunan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Instansi Terkait La
	4	78	**Provinsi DKI Jakarta**	1	Pendapatan dan Biaya pada PD Dharma Jaya Tahun Buku 2010 dan 2011
	5	79	**Provinsi Kalimantan Timur**	1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redep
		80		1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tanah Grorot
	6	81	**Provinsi Sulawesi Selatan**	1	Pengelolaan PDAM Kota Makassar guna Mendalami Hasil Pemeriksaan BPK dan Kontrak-Kontrak dengan Pihak Ketiga di Makassar
				7	
	Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu			**81**	

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

Buku V
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

(Buku ke-5 dari 5 Buku)

Jakarta, September 2012

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012

Buku V
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara

(Buku ke-5 dari 5 Buku)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GRAFIK		iv
DAFTAR LAMPIRAN		v
BAB 1	Gambaran Umum	1
BAB 2	Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	3
BAB 3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	5
BAB 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15

DAFTAR TABEL

3.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.2 Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2012 atas Data TLRHP sejak Tahun 2008

3.3 Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.4 Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.5 Data Pemantauan TLRHP pada BUMN (Termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

3.6 Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

4.1 Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012

4.2 Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003

4.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

4.4 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011

4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2012

4.6 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat Periode Semester I Tahun 2012

4.7 Data Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2012 pada Instansi Pusat dengan Status Telah Ditetapkan

4.8 Data Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2012 pada Instansi Pusat dengan Status Dalam Proses Penetapan

4.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Periode Semester I Tahun 2012

4.10 Data Kerugian Periode Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah dengan Status Telah Ditetapkan

4.11 Data Kerugian Periode Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan

4.12 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang

4.13 Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2003

4.14 Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

4.15 Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011

4.16 Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester I Tahun 2012

DAFTAR GRAFIK

3 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

3.2 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

3.3 Status Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

3.4 Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga Tahun 2008 s.d. 2012 (Semester I)

2. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012 (Semester I)

3. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, dan Otorita Tahun 2008 s.d. 2012 (Semester I)

BAB 1

Gambaran Umum

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pengertian rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

B. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB 2

Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 secara keseluruhan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan badan usaha lainnya, terdapat 183.862 rekomendasi senilai Rp80,97 triliun. Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94.689 rekomendasi senilai Rp31,52 triliun, status belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 43.297 rekomendasi senilai Rp26,29 triliun, status belum ditindaklanjuti sebanyak 45.715 rekomendasi senilai Rp22,80 triliun, dan status tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 161 rekomendasi senilai 337,85 miliar.

Selain itu terdapat pula tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 10.055 rekomendasi, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 5.475 rekomendasi. Rekomendasi ini meliputi 23,57% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2007.

Secara kumulatif rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 adalah senilai Rp16,90 triliun.

B. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap data kerugian negara/daerah mulai akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/daerah sebanyak 16.883 kasus senilai Rp4.640,68 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.419 kasus senilai Rp564,80 miliar, pelunasan sebanyak 6.812 kasus senilai Rp735,60 miliar, serta penghapusan sebanyak 125 kasus senilai Rp12,44 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir Semester I Tahun 2012 sebanyak 9.946 kasus senilai Rp3.327,84 miliar.

Selain itu, BPK juga berkewajiban untuk menyampaikan LHP BPK yang mengandung unsur pidana kepada instansi berwenang (Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)). LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 sebanyak 319 temuan senilai Rp34.066,86 miliar.

Hasil pemantauan terhadap LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang menunjukkan bahwa dari 319

temuan dimaksud, sebanyak 186 temuan atau 58,31% telah ditindaklanjuti baik berupa pelimpahan, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan dan persidangan, telah diputus oleh peradilan, maupun dihentikan penyidikannya. Adapun sebanyak 133 temuan atau 41,69% belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

BAB 3

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) yang memuat data pemantauan pelaksanaan TLRHP atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. IHPS I Tahun 2012 memuat hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP Tahun 2008 s.d. Tahun 2012 (Semester I) yang disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BHMN, dan badan lainnya.

Pemantauan TLRHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

TLRHP adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. TLRHP BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang TLRHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu

- tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dan/atau tindakan administratif. Penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dilakukan antara lain dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan, dan/atau mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke negara/daerah/perusahaan atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Hasil pemantauan TLRHP mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 secara keseluruhan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, KKKS, dan badan usaha lainnya, terdapat 183.862 rekomendasi senilai Rp80,97 triliun. Status pemantauan TLRHP dari Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Data Pemantauan TLRHP
Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
Pemerintah Pusat	22.163	38.332.752,53	11.890	9.690.723,10	4.784	11.876.427,35	5.456	16.629.624,97	33	135.977,11	7.650.568,40
Pemerintah Daerah	157.439	16.659.174,77	80.617	3.976.299,05	37.584	7.986.531,78	39.150	4.500.365,70	88	195.978,24	3.981.543,92
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	3.930	11.684.909,28	2.045	9.138.550,85	877	1.655.714,89	968	884.746,38	40	5.897,17	5.269.346,89
BHMN, KKKS, Badan Usaha Lainnya, dan Saham Pemerintah 50%	330	14.293.387,40	137	8.721.795,73	52	4.776.663,31	141	794.928,37	-	-	-
TOTAL	**183.862**	**80.970.223,98**	**94.689**	**31.527.368,72**	**43.297**	**26.295.337,32**	**45.715**	**22.809.665,42**	**161**	**337.852,52**	**16.901.459,21**

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 10.055 rekomendasi senilai Rp9,45 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 5.475 rekomendasi senilai Rp1,04 triliun. Rekomendasi ini meliputi 23,57% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2007.

Secara kumulatif rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 adalah senilai Rp16,90 triliun. Untuk mengetahui perkembangan data TLRHP selama Semester I Tahun 2012 di bawah ini disajikan data TLRHP Semester I Tahun 2012 dibandingkan data TLRHP Semester II Tahun 2011 atas data sejak Tahun 2008.

Tabel 3.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2012 atas Data TLRHP sejak Tahun 2008

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester I Tahun 2012	183.862	80.970.223,98	94.689	31.527.368,72	43.297	26.295.337,32	45.715	22.809.665,42	161	337.852,52	16.901.459,21
Semester II Tahun 2011	162.387	75.547.134,65	91.450	31.371.445,41	39.820	24.276.050,53	30.963	19.561.786,19	154	337.852,52	16.662.816,56
Perkembangan	**21.475**	**5.423.089,33**	**3.239**	**155.923,31**	**3.477**	**2.019.286,79**	**14.752**	**3.247.879,23**	**7**	**0,00**	**238.642,65**

Selama Semester I Tahun 2012, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp238,64 miliar.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada periode 2008 s.d. 2012 (Semester I), yaitu 94.689 dari 183.862 (51,50%) terlihat lebih besar dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang telah diperiksa BPK telah memperhatikan pelaksanaan TLRHP BPK.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 secara keseluruhan dari 93 kementerian/lembaga terdapat 22.163 rekomendasi senilai Rp38,33 triliun. Status pemantauan hasil pelaksanaan TLRHP dari Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.3. Rincian hasil pemantauan TLRHP menurut entitas kementerian/lembaga disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 3.3. Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
11.863	53.124.632,43	22.163	34.363.516,95	11.890	9.263.793,09	4.784	11.135.252,88	5.456	13.828.493,87	33	135.977,11	6.850.880,94
	USD 490,324.96		USD 416,499.72		USD 42,946.63		USD 78,180.11		USD 295,372.98		-	USD 84,169.70
	EUR 47.37		EUR 11.58		EUR 11.58		-		-		-	EUR 12.18
	JPY 267,381.23		JPY 150,835.50		JPY 150,835.50		-		-		-	-
	SAR 1,502.90		-		-		-		-		-	-
	THB 25.00		THB 25.00		-		-		THB 25.00		-	-
	SGD 350.19		SGD 350.19		SGD 217.79		SGD 0.24		SGD 132.16		-	SGD 217.79
	-		RON 2.94		-		-		RON 2.94		-	-
	KRW 3,075.01		KRW 3,075.01		-		KRW 3,075.01		-		-	-
Total (Rp)	**57.811.887,18**		**38.332.752,53**		**9.690.723,10**		**11.876.427,35**		**16.629.624,97**		**135.977,11**	**7.650.568,40**

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah 29 Juni 2012, hanya mata uang Rumania yang menggunakan kurs tengah 28 Agustus 2012

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.1. adalah sebagai berikut.

Grafik 3.1. Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

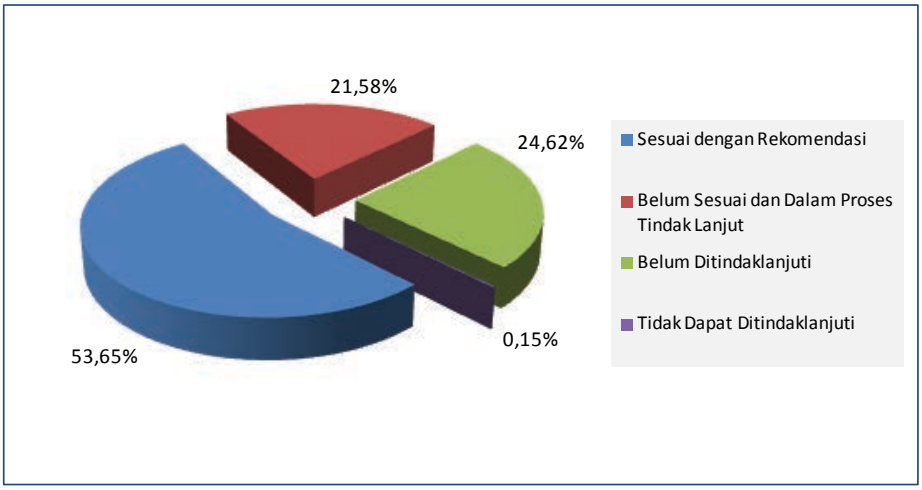

Dari Tabel 3.3. dan Grafik 3.1. data pemantauan TLRHP di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.890 atau 53,65%, sedangkan sebanyak 4.784 rekomendasi atau 21,58% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 5.456

rekomendasi atau 24,62% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 33 rekomendasi atau 0,15% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 11.890 rekomendasi senilai Rp9,69 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/penyerahan aset ke negara senilai Rp7,65 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (53,65%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah pusat telah memperhatikan pelaksanaan TLRHP BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada pemerintah pusat yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.575 rekomendasi senilai Rp2,95 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 566 rekomendasi senilai Rp128,22 miliar. Rekomendasi ini meliputi 19% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. 2007 pada Pemerintah Pusat.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa dari Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 secara keseluruhan dari 524 pemerintah daerah terdapat 157.439 rekomendasi senilai Rp16,65 triliun. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.4. Rincian hasil pemantauan TLRHP menurut entitas pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 2.

Tabel 3.4. Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
68.778	46.928.580,80	157.439	16.539.767,13	80.617	3.961.109,53	37.584	7.889.721,07	39.150	4.492.958,29	88	195.978,24	3.966.354,40
	USD 12,901.33		USD 12,592.95		USD 1,602.27		USD 10,212.10		USD 778.58		USD 0.00	USD 1,602.27
	SGD 3.57		SGD 3.57						SGD 3.57			
Total (Rp)	**47.050.911,88**		**16.659.174,77**		**3.976.299,05**		**7.986.531,78**		**4.500.365,70**		**195.978,24**	**3.981.543,92**

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah 29 Juni 2012.

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.2. adalah sebagai berikut.

Grafik 3.2. Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

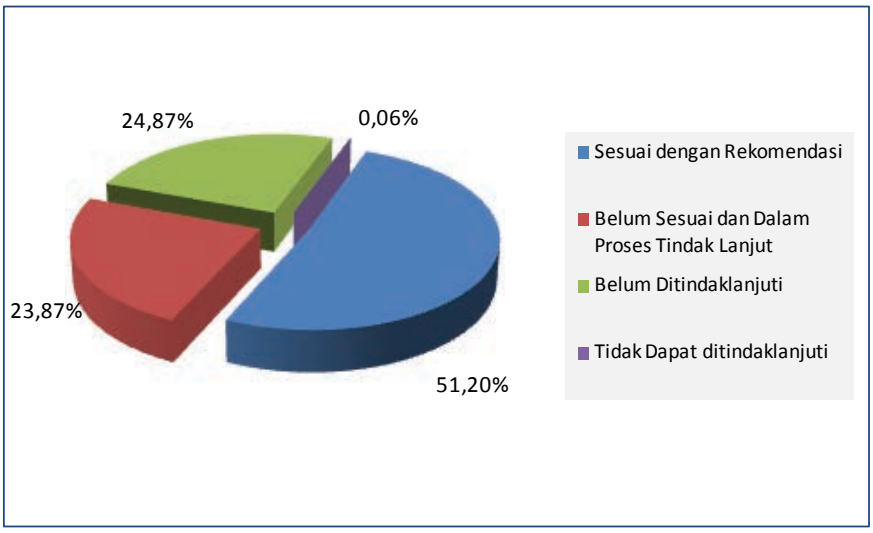

Dari Tabel 3.4. dan Grafik 3.2. terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 80.617 atau 51,20% sedangkan sebanyak 37.584 rekomendasi atau 23,87% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 39.150 rekomendasi atau 24,87% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 88 rekomendasi atau 0,06% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 80.617 rekomendasi senilai Rp3,97 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp3,98 triliun. Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (51,20%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah telah memperhatikan pelaksanaan TLRHP BPK.

Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada pemerintah daerah yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 8.083 rekomendasi senilai Rp3,45 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4.706 rekomendasi senilai Rp804,13 miliar. Rekomendasi ini meliputi 24,80% dari seluruh rekomendasi BPK pada pemerintah daerah Tahun 2005 s.d. 2007.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan)

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 secara keseluruhan dari 169 BUMN (termasuk Anak Perusahaan) terdapat 3.930 rekomendasi senilai Rp11,68 triliun. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.5. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut entitas BUMN (termasuk Anak Perusahaan) disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.5. Data Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah atau perusahaan negara/daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
BUMN (Induk perusahaan)	2.020	83.450.154,67	3.686	6.040.748,72	1.848	4.154.227,76	847	1.124.913,77	952	755.710,02	39	5.897,17	4.499.403,80
		USD 1,362,068.74		USD 579,008.03		USD 510,569.50		USD 54,827.10		USD 13,611.43		-	USD 66,012.84
		EUR 469.83		EUR 24.20		EUR 24.20		-		-		-	EUR 24.20
		JPY 104,916.81		-		-		-		-		-	JPY 0.00
		CNY 896.89		-		-		-		-		-	CNY 0.00
BUMN (anak perusahaan)	166	28.589.293,43	244	146.051,17	197	135.010,96	30	11.040,21	16	-	1	-	135.028,10
	-	USD 53,701.07	-	USD 931.19	-	USD 931.19	-	-	-	-	-	-	USD 931.19
	-	EUR 117.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**2.186**	**112.039.448,10**	**3.930**	**6.186.799,89**	**2.045**	**4.289.238,72**	**877**	**1.135.953,98**	**968**	**755.710,02**	**40**	**5.897,17**	**4.634.431,90**
		USD 1,415,769.81		**USD 579,939.22**		**USD 511,500.69**		**USD 54,827.10**		**USD 13,611.43**		**-**	**USD 66,944.03**
		EUR 587.31		**EUR 24.20**		**EUR 24.20**		**-**		**-**		**-**	**EUR 24.20**
		JPY 104,916.81		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**
		CNY 896.89		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**
Total (Rp)	**2.186**	**125.481.772,26**	**3.930**	**11.684.909,28**	**2.045**	**9.138.550,85**	**877**	**1.655.714,89**	**968**	**884.746,38**	**40**	**5.897,17**	**5.269.346,89**

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah 29 Juni 2012.

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2008 sampai dengan Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.3. adalah sebagai berikut.

Grafik 3.3. Status Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

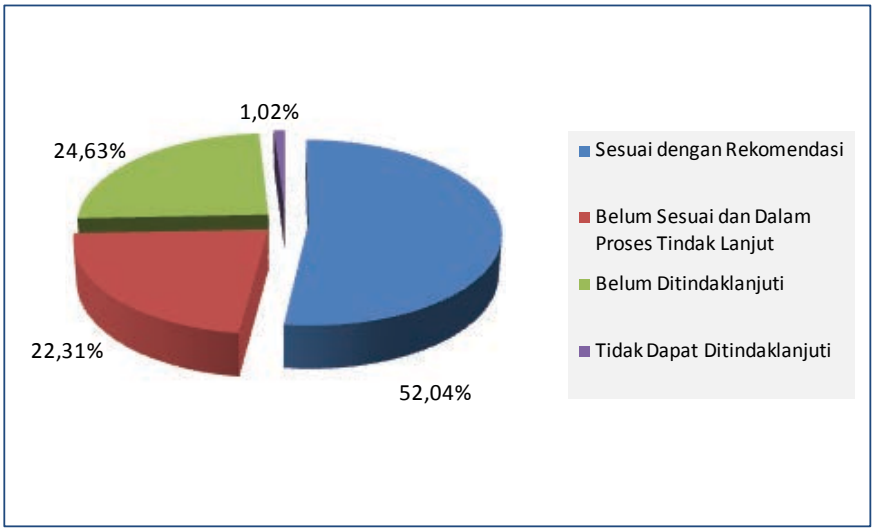

Dari Tabel 3.5. dan Grafik 3.3. terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.045 atau 52,04%, sedangkan sebanyak 877 rekomendasi atau 22,31% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 968 rekomendasi atau 24,63% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 40 rekomendasi atau 1,02% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 2.045 rekomendasi senilai Rp9,13 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke perusahaan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) senilai Rp5,26 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi terlihat lebih besar (52,04%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) telah memperhatikan pelaksanaan TLRHP BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada BUMN yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 340 rekomendasi senilai Rp2,94 triliun, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 197 rekomendasi senilai Rp111,19 miliar. Rekomendasi ini meliputi 18,17% dari seluruh rekomendasi BPK pada BUMN tahun 2005 s.d. 2007.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Badan Usaha Lainnya, dan Saham Pemerintah 50%

Hasil pemantauan TLRHP atas BHMN, KKKS, badan usaha lainnya, dan Saham Pemerintah 50% mengungkapkan bahwa dari Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 terdapat 330 rekomendasi senilai Rp14,29 triliun. Status pemantauan pelaksanaan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 3.6. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut entitas BHMN, KKKS, dan badan usaha lainnya, dan saham pemerintah 50% disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.6. Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah atau perusahaan negara/daerah
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
BHMN	45	207.112,38	57	-	8	-	14	-	35	-	-	-	-
	-	USD 137,143.74	-	USD 11,250.02	-	-	-	USD 11,250.02	-	-	-	-	-
KKKS	203	51.763,69	234	4.776,10	102	1.739,68	30	2.748,23	102	288,19	-	-	-
	-	USD 1,810,481.08	-	USD 1,495,718.07	-	USD 919,832.99	-	USD 492,327.52	-	USD 83,557.56	-	-	-
	-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	-	-	-	-	-	-
Badan Usaha Lainnya (Lembaga)	16	-	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-
Saham Pemerintah 50%	3	2.514,51	4	2.514,51	-	-	-	-	4	2.514,51	-	-	-
TOTAL	**267**	**261.390,58**	**330**	**7.290,61**	**137**	**1.739,68**	**52**	**2.748,23**	**141**	**2.802,70**	**-**	**-**	**-**
		USD 1,947,624.82		**USD 1,506,968.09**		**USD 919,832.99**		**USD 503,577.54**		**USD 83,557.56**		**-**	**-**
		SGD 5.30		**SGD 5.30**		**SGD 5.30**		**-**		**-**		**-**	**-**
Total (Rp)	**267**	**18.724.913,17**	**330**	**14.293.387,40**	**137**	**8.721.795,73**	**52**	**4.776.663,31**	**141**	**794.928,37**	**-**	**-**	**-**

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah 29 Juni 2012.

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.4. adalah sebagai berikut.

Grafik 3.4. Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya, dan Saham Pemerintah 50% Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2012 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

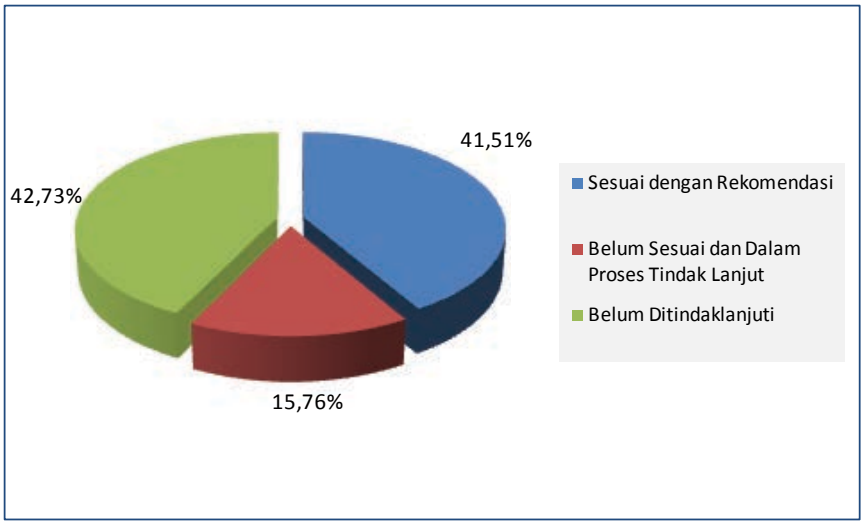

Dari Tabel 3.6. dan Grafik 3.4. terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 137 rekomendasi atau 41,51%, sedangkan sebanyak 52 rekomendasi atau 15,76% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 141 rekomendasi atau 42,73% belum ditindaklanjuti.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2007 pada BHMN, KKKS, badan usaha lainnya, dan Saham Pemerintah 50% yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 57 rekomendasi senilai Rp100,92 miliar, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi. Rekomendasi ini meliputi 25% dari seluruh rekomendasi BPK pada BHMN, KKKS, badan lainnya dan saham pemerintah 50% Tahun 2005 s.d. 2007.

BAB 4

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pendahuluan

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Gambaran Umum

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2012 memuat data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah ”telah ditetapkan” dan ”dalam proses penetapan”.

Data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 merupakan data kerugian yang dimuat dalam IHPS Semester I Tahun 2012.

Pada Semester I Tahun 2012, BPK telah melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada instansi pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, dengan cakupan sebesar 28,47% atau sejumlah 574 entitas dari 2.016 total entitas yang seharusnya dipantau.

Data kerugian negara/daerah mulai akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 sebanyak 16.883 kasus senilai Rp4.640,68 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 4.419 kasus senilai Rp564,80 miliar, pelunasan sebanyak 6.812 kasus senilai Rp735,60 miliar, serta penghapusan sebanyak 125 kasus senilai Rp12,44 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir Semester I Tahun 2012 sebanyak 9.946 kasus senilai Rp3.327,84 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	3.128	441,19	942	21,75	1.178	36,30	78	2,98	1.872	380,16
	USD	-	60,00	-	-	-	-	-	60,00	-	-
	KSHS	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-
TGR Non Bendahara	IDR	9.788	820,90	2.550	177,67	3.673	100,02	33	1,52	6.082	541,69
	USD	-	3.023,74	-	6,97	-	-	-	-	-	3.016,77
	AUD	-	2.111,93	-	-	-	-	-	-	-	2.111,93
	GBP	-	199,15	-	-	-	-	-	-	-	199,15
	CAD	-	39,60	-	-	-	-	-	-	-	39,60
	JPY	-	523.747,20	-	-	-	-	-	-	-	523.747,20
	EUR	-	33.231,17	-	-	-	-	-	-	-	33.231,17
	DEM	-	373,87	-	-	-	-	-	-	-	373,87
Pihak Ketiga	IDR	3.909	1.487,31	888	227,14	1.949	98,34	4	1,25	1.956	1.160,58
	USD		141.054,76		14.319,83	-	52.835,80	-	-		73.899,13
Pengelola Keuangan	IDR	58	44,14	39	2,43	12	0,11	10	5,91	36	35,69
Total	**IDR**	**16.883**	**2.793,54**	**4.419**	**428,99**	**6.812**	**234,77**	**125**	**11,66**	**9.946**	**2.118,12**
	USD	**-**	**144.138,50**	**-**	**14.326,80**	**-**	**52.835,80**	**-**	**60,00**	**-**	**76.915,90**
	AUD	**-**	**2.111,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.111,93**
	GBP	**-**	**199,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199,15**
	CAD	**-**	**39,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,60**
	JPY	**-**	**523.747,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**523.747,20**
	EUR	**-**	**33.231,17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33.231,17**
	DEM	**-**	**373,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**373,87**
	KSHS	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**
Total Valas Ekuivalen	**IDR**		**1.847,14**		**135,81**		**500,83**		**0,78**		**1.209,72**
Total Kerugian Negara	**IDR**	**16.883**	**4.640,68**	**4.419**	**564,80**	**6.812**	**735,60**	**125**	**12,44**	**9.946**	**3.327,84**

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2011

Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003

Data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 yaitu sebanyak 2.102 kasus senilai Rp154,00 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 573 kasus senilai Rp11,78 miliar, pelunasan sebanyak 226 kasus senilai Rp8,80 miliar, dan penghapusan sebanyak 26 kasus senilai Rp3,12 miliar. Sisa kerugian negara/daerah akhir Tahun 2003 yaitu sebanyak 1.850 kasus senilai Rp130,28 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Data Laporan Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	151	18,19	68	1,62	31	0,56	1	0,71	119	15,29
TGR Non Bendahara	IDR	1.470	63,79	353	2,51	170	3,20	22	1,03	1.278	57,03
	USD	-	524,53	-	-	-	-	-	-	-	524,53
	DEM	-	373,87	-	-	-	-	-	-	-	373,87
	GBP	-	59,77	-	-	-	-	-	-	-	59,77
Pihak Ketiga	IDR	442	55,89	126	6,84	15	4,92	2	1,18	425	42,92
Pengelola Keuangan	IDR	39	8,03	26	0,79	10	0,11	1	0,18	28	6,94
Total	**IDR**	**2.102**	**145,92**	**573**	**11,78**	**226**	**8,80**	**26**	**3,12**	**1.850**	**122,20**
	USD	**-**	**524,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**524,53**
	DEM	**-**	**373,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**373,87**
	GBP	**-**	**59,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59,77**
Total Valas Ekuivalen	**IDR**	**-**	**8,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,08**
Total Kerugian Negara	**IDR**	**2.102**	**154,00**	**573**	**11,78**	**226**	**8,80**	**26**	**3,12**	**1.850**	**130,28**

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

Data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009 yaitu sebanyak 11.862 kasus senilai Rp2.732,77 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 3.296 kasus senilai Rp402,31 miliar, pelunasan sebanyak 5.085 kasus senilai Rp565,62 miliar, dan penghapusan sebanyak 98 kasus senilai Rp9,15 miliar.

Sisa kerugian negara/daerah pada akhir Semester I Tahun 2009 yaitu sebanyak 6.679 kasus senilai Rp1.758,95 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah
Periode Semester I Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	2.465	363,72	733	19,24	884	25,42	77	2,27	1.504	316,78
	USD	-	60,00	-	-	-	-	-	60,00	-	-
	KsHS	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-
TGR Non Bendahara	IDR	6.465	625,22	1.842	161,80	2.647	75,01	10	0,30	3.808	388,09
	USD	-	2.499,20	-	6,97	-	-	-	-	-	2.492,23
	AUD	-	2.111,93	-	-	-	-	-	-	-	2.111,93
	GBP	-	139,38	-	-	-	-	-	-	-	139,38
	CAD	-	39,60	-	-	-	-	-	-	-	39,60
	JPY	-	523.747,20	-	-	-	-	-	-	-	523.747,20
	EUR	-	32.592,55	-	-	-	-	-	-	-	32.592,55
Pihak Ketiga	IDR	2.910	647,34	707	196,05	1.552	86,35	2	0,67	1.356	364,86
	USD	3	60.040,42	1	2.479,03	-	39.940,04	-	-	3	17.621,34
Pengelola Keuangan	IDR	19	36,10	13	1,64	2	0,00	9	5,72	8	28,73
Total Kerugian	**IDR**	**11.859**	**1.672,39**	**3.295**	**378,74**	**5.085**	**186,79**	**98**	**8,37**	**6.676**	**1.098,47**
	USD	**3**	**62.599,63**	**1**	**2.486,01**	**-**	**39.940,04**	**-**	**60,00**	**3**	**20.113,58**
	KsHS	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**-**	**-**
	AUD	**-**	**2.111,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.111,93**
	GBP	**-**	**139,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**139,38**
	CAD	**-**	**39,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39,60**
	JPY	**-**	**523.747,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**523.747,20**
	EUR	**-**	**32.592,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.592,55**
Total Valas Ekuivalen	**IDR**	**3**	**1.060,38**	**1**	**23,57**	**-**	**378,83**	**-**	**0,78**	**3**	**660,48**
Total Kerugian Negara	**IDR**	**11.862**	**2.732,77**	**3.296**	**402,31**	**5.085**	**565,62**	**98**	**9,15**	**6.679**	**1.758,95**

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

Data Kerugian Negara/Daerah Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011

Data kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011 yaitu sebanyak 2.814 kasus senilai Rp1.497,49 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 532 kasus senilai Rp141,81 miliar, pelunasan sebanyak 1.483 kasus senilai Rp160,37 miliar, dan penghapusan sebanyak 1 kasus senilai Rp0,18 miliar.

Sisa kerugian negara/daerah pada akhir Semester II Tahun 2011 yaitu sebanyak 1.330 kasus senilai Rp1.195,13 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Data Kerugian Negara/Daerah
Periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	509	58,96	141	0,88	261	10,31	-	-	248	47,77
TGR Non Bendahara	IDR	1.772	125,38	341	11,57	851	21,14	1	0,18	920	92,49
	EUR	-	638,61	-	-	-	-	-	-	-	638,61
Pihak Ketiga	IDR	533	537,60	50	17,10	371	6,66	-	-	162	513,84
	USD	-	81.014,33	-	11.840,79	-	12.895,75	-	-	-	56.277,79
Pengelola Keuangan	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Kerugian	**IDR**	**2.814**	**721,94**	**532**	**29,56**	**1.483**	**38,12**	**1**	**0,18**	**1.330**	**654,08**
	USD	**-**	**81.014,33**	**-**	**11.840,79**	**-**	**12.895,75**	**-**	**-**	**-**	**56.277,79**
	EUR	**-**	**638,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**638,61**
Total Valas Ekuivalen	**IDR**		**775,55**	**0**	**112,25**	**0**	**122,25**	**0**	**-**	**-**	**541,05**
Total Kerugian Negara	**IDR**	**2.814**	**1.497,49**	**532**	**141,81**	**1.483**	**160,37**	**1**	**0,18**	**1.330**	**1.195,13**

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2012

Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode Semester I Tahun 2012 terdapat 105 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp253,28 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 18 kasus senilai Rp8,90 miliar dan pelunasan sebanyak 18 kasus senilai Rp1,05 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah akhir Semester I Tahun 2012 yaitu sebanyak 87 kasus senilai Rp243,33 miliar.

Rincian data kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Periode Semester I Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	3	0,31	-	-	2	0,00	-	-	1	0,31
TGR Non Bendahara	IDR	81	6,50	14	1,77	5	0,65	-	-	76	4,08
Pihak III	IDR	21	246,47	4	7,13	11	0,40	-	-	10	238,94
Pengelola Keuangan	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**IDR**	**105**	**253,28**	**18**	**8,90**	**18**	**1,05**	**-**	**-**	**87**	**243,33**

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

Selanjutnya hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah periode Semester I Tahun 2012 dirinci lebih lanjut dalam pemantauan pada instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, dan BUMD, sebagai berikut.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

Jumlah kasus kerugian negara pada instansi pusat periode Semester I Tahun 2012 yaitu sebanyak 50 kasus senilai Rp250,61 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran yang telah dilakukan sebanyak 10 kasus senilai Rp8,87 miliar dan pelunasan sebanyak 13 kasus senilai Rp0,88 miliar dengan sisa kerugian negara yaitu sebanyak 37 kasus senilai Rp240,86 miliar.

Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara di instansi pusat periode Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat Periode Semester I Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR										
TGR Non Bendahara	IDR	31	4,19	6	1,74	2	0,48			29	1,97
Pihak Ketiga	IDR	19	246,42	4	7,13	11	0,40			8	238,89
Total	**IDR**	**50**	**250,61**	**10**	**8,87**	**13**	**0,88**	**-**	**-**	**37**	**240,86**

Data kerugian negara pada instansi pusat selanjutnya dirinci berdasarkan proses penyelesaian kerugian negara pada status telah ditetapkan dan dalam proses penetapan sebagai berikut.

1. Data kerugian negara dengan status telah ditetapkan

Tabel 4.7. Data Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2012 pada Instansi Pusat dengan Status Telah Ditetapkan

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR										
TGR Non Bendahara	IDR	2	0,01							2	0,01
Pihak Ketiga	IDR	18	0,64	3	0,02	11	0,40			7	0,22
Total	**IDR**	**20**	**0,65**	**3**	**0,02**	**11**	**0,40**	**-**	**-**	**9**	**0,23**

2. Data kerugian negara dengan status dalam proses penetapan

Tabel 4.8. Data Kerugian Negara Periode Semester I Tahun 2012 pada Instansi Pusat dengan Status Dalam Proses Penetapan

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR										
TGR Non Bendahara	IDR	29	4,18	6	1,75	2	0,48			27	1,95
Pihak Ketiga	IDR	1	245,78	1	7,11					1	238,67
Total	**IDR**	**30**	**249,96**	**7**	**8,86**	**2**	**0,48**	**-**	**-**	**28**	**240,62**

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara pada BUMN

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara menunjukkan bahwa pada periode Semester I Tahun 2012 tidak terdapat penambahan data kasus kerugian negara maupun penyelesaiannya pada BUMN.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

Kasus kerugian daerah periode Semester I Tahun 2012 sebanyak 55 kasus senilai Rp2,66 miliar, dengan penyelesaian berupa angsuran sebanyak 8 kasus senilai Rp0,02 miliar dan pelunasan sebanyak 5 kasus senilai Rp0,16 miliar. Sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sebanyak 50 kasus senilai Rp2,48 miliar.

Data hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah periode Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Periode Semester I Tahun 2012

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	3	0,31			2	-	-		1	0,31
TGR Non Bendahara	IDR	50	2,30	8	0,02	3	0,16	-		47	2,12
Pihak Ketiga	IDR	2	0,05			-		-		2	0,05
Total	**IDR**	**55**	**2,66**	**8**	**0,02**	**5**	**0,16**	**-**	**-**	**50**	**2,48**

Data kerugian daerah pada instansi daerah selanjutnya dirinci berdasarkan proses penyelesaian kerugian daerah pada tahap telah ditetapkan dan dalam proses penetapan sebagai berikut.

1. Data kerugian daerah dengan status telah ditetapkan

Tabel 4.10. Data Kerugian Periode Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah dengan Status Telah Ditetapkan

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR	3	0,31	-		2	0,00	-	-	1	0,31
TGR Non Bendahara	IDR	18	1,44	6	0,01	3	0,16	-	-	15	1,27
Pihak Ketiga	IDR	2	0,05	-		-	-	-	-	2	0,05
Total	**IDR**	**23**	**1,80**	**6**	**0,01**	**5**	**0,16**	**-**	**-**	**18**	**1,63**

2. Data kerugian daerah dengan status dalam proses penetapan

Tabel 4.11. Data Kerugian Periode Semester I Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah dengan Status Dalam Proses Penetapan

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Subyek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab Kerugian Negara		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										11=3-(7+9)	12=4-(6+8+10)
TGR Bendahara	IDR									-	-
TGR Non Bendahara	IDR	32	0,85	2	0,01					32	0,84
Pihak Ketiga	IDR									-	-
Total	**IDR**	**32**	**0,85**	**2**	**0,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32**	**0,84**

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode Semester I Tahun 2012 tidak terdapat penambahan maupun penyelesaiannya data kasus kerugian daerah pada BUMD.

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Lainnya

Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester I Tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode Semester I Tahun 2012 tidak terdapat data mengenai kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya pada badan pengelola keuangan lainnya seperti BHMN dan badan layanan umum (BLU).

Permasalahan dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Permasalahan-permasalahan berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara/daerah adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara belum diterbitkan.

2. Kepatuhan instansi dalam pembentukan, penetapan struktur organisasi Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D), dan pelaksanaan koordinasi dengan inspektorat belum dilaksanakan secara optimal.

3. Kinerja Tim TPKN/D dalam proses penyelesaian kerugian negara/daerah, dan penatausahaan data kerugian negara/daerah belum tertib dan belum dibuat database atau daftar inventaris kerugian negara/daerah pada instansi belum dilaksanakan secara optimal.

4. Proses penyelesaian kerugian negara/daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain penyelesaian dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) namun tidak disertai jaminan.

5. Terdapat kendala-kendala dalam penyelesaian kerugian negara/daerah terkait penanggung jawab meninggal dunia, ahli waris tidak diketahui keberadaannya, dan penanggung jawab kerugian negara/daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengganti kerugian negara/daerah, serta pelaksanaan penagihan pada saat penanggung jawab menjalani proses hukum.

6. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi mekanisme penyelesaian kerugian negara/daerah kepala pelaksana penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi

Terhadap permasalahan-permasalahan di atas, BPK telah merekomendasikan sebagai berikut.

1. Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

2. Untuk mengisi kekosongan hukum atas pelaksanaan penyelesaian kerugian negara/daerah sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah dimaksud, instansi dapat menyusun petunjuk teknis atau *standard operating procedure* (SOP) tentang tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkungannya.

3. Pimpinan instansi membentuk TPKN/D dan/atau meningkatkan kinerja TPKN/D yang sudah terbentuk serta meningkatkan koordinasi dengan inspektorat dalam mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah.

4. Pimpinan instansi mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai tata cara yang termuat dalam peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, dan peraturan lain tentang penyelesaian kerugian negara/daerah.

5. Pimpinan instansi meningkatkan koordinasi dalam menangani kendala-kendala penyelesaian kerugian negara/daerah antara lain dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pelimpahan atau penghapusan piutang negara/daerah maupun BPK dalam pertimbangan penyelesaian kerugian negara/daerah sesuai kewenangannya.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memenuhi amanat undang-undang dimaksud, sejak Tahun 2003 BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. semester I Tahun 2012 sebanyak 319 temuan senilai Rp34.066,86 miliar.

Hasil pemantauan tindak lanjut terhadap LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang menunjukkan bahwa dari 319 temuan dimaksud, sebanyak 186 temuan atau 58,31% telah ditindaklanjuti baik berupa pelimpahan, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan dan persidangan, telah diputus oleh peradilan, maupun dihentikan penyidikannya. Adapun sebanyak 133 temuan atau 41,69% belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut LHP BPK periode Tahun 2003 s.d. Semester 1 Tahun 2012 yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK yang Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

No	Instansi Penegak Hukum	Kasus					Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket
		Skel Ketua											
		Tahun	Surat Keluar	Temuan	NILAI (IDR)	NILAI (USD)	Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan /Proses Peradilan	Vonis / Banding / Kasasi	SP3	
1	POLRI	2003	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		2004	1	10	18.964,61	-	0	0	0	0	0	10	0
		2005	1	1	103,63	-	0	0	0	0	1	0	0
		2006	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		2007	3	3	673,28	-	0	2	0	0	1	0	0
		2008	2	1	7,96	-	0	0	1	0	0	0	0
		2009	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		2010	2	2	16,13	-	0	0	2	0	0	0	0
		2011	3	20	11,64	-	0	0	0	0	0	0	20
		2012	2	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	SUB TOTAL		14	37	19.777,25	-	0	2	3	0	2	10	20
2	KEJAKSAAN	2003	4	17	120,57	-	11	0	0	0	6	0	0
		2004	9	54	383,83	3.240,00	25	0	0	0	29	0	0
		2005	7	14	2.746,12	39.095,83	0	0	4	4	0	0	6
		2006	9	18	613,94	112.047,47	0	14	0	0	0	0	4
		2007	10	28	1.681,83	53.838,40	0	7	0	1	11	0	9
		2008	6	4	85,62	-	0	0	0	0	2	0	2
		2009	16	20	216,54	315,41	0	1	1	2	2	1	13
		2010	10	15	82,15	8.834,64	0	0	0	0	0	0	15
		2011	2	2	1,29	-	0	0	0	0	0	0	2
		2012	3	2	4,38	-	0	0	0	0	0	0	2
	SUB TOTAL		76	174	5.936,27	217.371,74	36	22	5	7	50	1	53
3	KPK	2003	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		2004	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		2005	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
		2006	3	8	120,33	-	0	3	0	0	5	0	0
		2007	5	4	18,76	235.214,22	0	2	0	0	2	0	0
		2008	13	23	2.748,73	26.375,63	1	12	0	1	9	0	0
		2009	15	22	402,57	1.463,99	0	6	0	4	2	0	10
		2010	14	46	394,98	453,00	0	0	0	1	0	0	45
		2011	3	4	78,51	-	0	0	0	0	0	0	4
		2012	2	1	30,74	-	0	0	0	0	0	0	1
	SUB TOTAL		55	108	3.794,62	263.506,84	1	23	0	6	18	0	60
TOTAL			145	319	29.508,14	480.878,58	37	47	8	13	70	11	133
TOTAL VALAS EKUIVALEN		IDR		319	4.558,72		186						133
TOTAL KERUGIAN					34.066,86								

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

Rincian tindak lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang adalah sebagai berikut.

1. Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2003

LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2003 yaitu sebanyak 17 temuan senilai Rp120,57 miliar dengan tindak lanjut berupa pelimpahan sebanyak 11 temuan dan telah diputus oleh peradilan sebanyak 6 temuan.

Rincian data tindak lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan instansi yang berwenang periode Tahun 2003 disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Data Tindak Lanjut LHP BPK mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2003

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Instansi Penegak Hukum	Kasus			Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket
	Skel Ketua									
	Temuan	NILAI (IDR)	NILAI (USD)	Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan /Proses Peradilan	Vonis /Banding /Kasasi	SP3	
POLRI	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
KEJAKSAAN	17	120,57	-	11	0	0	0	6	0	0
KPK	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**17**	**120,57**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**

2. Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2004 sampai dengan Semester I Tahun 2009

LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009 sebanyak 181 temuan senilai Rp32.916,43 miliar triliun dengan tindak lanjut berupa pelimpahan sebanyak 26 temuan, proses penyelidikan sebanyak 44 temuan, proses penyidikan sebanyak 6 temuan, proses penuntutan dan persidangan sebanyak 10 temuan, dan telah diputus oleh peradilan sebanyak 63 temuan, SP3 sebanyak 11 temuan. Adapun laporan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti atau belum diketahui data tindak lanjutnya sebanyak 21 temuan.

Rincian data tindak lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan instansi yang berwenang periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009 disajikan dalam Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Data Tindak Lanjut LHP BPK mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Tahun 2004 s.d. Semester I Tahun 2009

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Instansi Penegak Hukum	Kasus			Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket
	Skel Ketua									
	Temuan	Nilai (IDR)	Nilai (USD)	Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan /Proses Peradilan	Vonis / Banding / Kasasi	SP3	
POLRI	15	19.749,47	-	0	2	1	0	2	10	0
KEJAKSAAN	123	5.601,52	208.221,70	25	22	5	5	44	1	21
KPK	43	3.111,63	261.589,86	1	20	0	5	17	0	0
TOTAL	**181**	**28.462,62**	**469.811,56**	**26**	**44**	**6**	**10**	**63**	**11**	**21**
VALAS EKUIVALEN	**181**	**4.453,81**		**160**						**21**
TOTAL KERUGIAN		**32.916,43**								

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

3. Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester II Tahun 2009 sampai dengan Semester II Tahun 2011

LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011 yaitu sebanyak 118 temuan senilai Rp994,76 miliar dengan tindak lanjut berupa proses penyelidikan sebanyak 3 temuan, proses penyidikan sebanyak 2 temuan, proses penuntutan dan persidangan sebanyak 3 temuan, dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 1 temuan. Adapun LHP yang belum ditindaklanjuti yaitu sebanyak 109 temuan.

Rincian data tindak lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan instansi yang berwenang periode Semester II Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2011 disajikan dalam Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Data Tindak Lanjut LHP BPK mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester II Tahun 2009 s.d Semester II Tahun 2011

(nilai dalam miliar IDR dan ribu valas)

Instansi Penegak Hukum	Kasus			Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket
	Skel Ketua									
	Temuan	Nilai (IDR)	Nilai (USD)	Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan /Proses Peradilan	Vonis / Banding / Kasasi	SP3	
POLRI	22	27,77	-	0	0	2	0	0	0	20
KEJAKSAAN	32	209,82	9.150,04	0	0	0	2	0	0	30
KPK	64	652,26	1.917,00	0	3	0	1	1	0	59
TOTAL	118	889,85	11.067,04	0	3	2	3	1	0	109
VALAS EKUIVALEN	**118**	**104,91**		**9**						**109**
TOTAL KERUGIAN		**994,76**								

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Juni 2012.

4. Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester I Tahun 2012

LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Semester I Tahun 2012 yaitu sebanyak 3 temuan senilai 35,12 miliar, belum diperoleh data tentang tindak lanjut oleh instansi yang berwenang.

Rincian data tindak lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Semester I Tahun 2012 disajikan dalam Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Data Tindak Lanjut LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang Periode Semester I Tahun 2012

(IDR dalam miliar dan valas dalam ribu)

Instansi Penegak Hukum	Kasus			Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti / Tidak Ada Ket
	Skel Ketua			Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan /Proses Peradilan	Vonis /Banding /Kasasi	SP3	
	Temuan	Nilai (IDR)	Nilai (USD)							
POLRI	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
KEJAKSAAN	2	4,38	-	0	0	0	0	0	0	2
KPK	1	30,74	-	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	**3**	**35,12**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**

LAMPIRAN

Halaman 1 - Lampiran 1

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2008 s.d. 2012 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kementerian Pertahanan	2008	19	306.100,95	155	2.710,65	84	330,36	40	2.380,29	28	-	3	-	330,36
		2009	17	17.381,31	117	4.990,07	72	48,55	12	-	33	4.941,52	-	-	48,55
		2010	17	3.539,38	130	3.539,38	27	-	38	-	65	3.539,38	-	-	-
		2011	28	22.997,73	59	22.263,72	34	16.749,55	14	5.514,17	11	-	-	-	16.749,55
		2012	19	5.955,64	38	5.955,64	1	155,58	-	-	37	5.800,06	-	-	155,58
		Jumlah	100	355.975,01	499	39.459,46	218	17.284,04	104	7.894,46	174	14.280,96	3	-	17.284,04
2	Mabes TNI	2008	34	13.571,03	63	331,02	60	331,02	3	-	-	-	-	-	331,02
		2009	22	475,51	35	138,91	35	138,91	-	-	-	-	-	-	138,91
		2010	10	95,94	14	95,94	14	95,94	-	-	-	-	-	-	95,94
		2011	27	878,32	52	828,48	44	715,39	6	113,09	2	-	-	-	715,39
		2012	14	412,29	32	412,29	12	412,29	8	-	12	-	-	-	412,29
				USD 13.42		USD 13.42		-		-		USD 13,42		-	-
		Jumlah	107	15.433,09	196	1.806,64	165	1.693,55	17	113,09	14	-	-	-	1.693,55
				USD 13.42		USD 13.42		-		-		USD 13,42		-	-
3	TNI AD	2008	95	73.056,76	211	73.056,75	179	3.788,59	12	55.923,91	20	13.344,25	-	-	2.560,99
		2009	54	2.338,18	97	2.338,18	96	2.338,18	1	-	-	-	-	-	661,08
		2010	27	5.643,49	45	5.643,49	42	5.643,49	3	-	-	-	-	-	2.386,60
		2011	61	8.588,91	84	8.521,05	72	2.392,36	12	6.128,69	-	-	-	-	2.353,24
		2012	30	78.538,28	52	19.237,82	12	385,46	2	383,08	38	18.469,28	-	-	46,15
		Jumlah	267	168.165,62	489	108.797,29	401	14.548,08	30	62.435,68	58	31.813,53	-	-	8.008,06
4	TNI AL	2008	51	41.460,93	83	41.506,46	83	41.506,46	-	-	-	-	-	-	41.506,46
		2009	10	964,23	18	649,84	17	86,09	1	563,75	-	-	-	-	86,09
		2010	22	18.834,30	49	2.351,12	49	2.351,12	-	-	-	-	-	-	2.054,25
		2011	57	5.796,37	71	2.509,96	51	820,47	17	572,76	1	810,00	2	306,73	820,47
		2012	19	6.226,51	30	2.424,27	14	1.088,65	1	-	11	1.335,62	4	-	-
		Jumlah	159	73.282,34	251	49.441,65	214	45.852,79	19	1.136,51	12	2.145,62	6	306,73	44.467,27
5	TNI AU	2008	54	161.377,79	132	132.491,71	122	59.774,45	10	72.717,26	-	-	-	-	18.913,25
				USD 151.96	-	USD 151.96		USD 151.96		-		-		-	-
		2009	20	8.285,34	34	1.515,66	34	1.515,66	-	-	-	-	-	-	1.382,72
				USD 971.83	-	-		-		-		-		-	-

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	37	15.102,36	56	2.066,05	56	2.066,05	-	-	-	-	-	-	1.463,70
		2011	28	10.040,18	55	120,57	51	40,72	4	79,85	-	-	-	-	40,72
		2012	28	8.205,51	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
		Jumlah	167	203.011,18	293	136.193,99	263	63.396,88	14	72.797,11	16	-	-	-	21.800,39
				USD 1,123.79		USD 151.96		USD 151.96		-		-		-	-
6	Kementerian Luar Negeri	2008	188	497.677,48	229	497.663,54	189	495.284,75	31	2.242,41	8	54,12	1	82,26	495.219,97
				USD 122.75	-	USD 122.99		USD 122.99		-		-		-	USD 91.38
				EUR 11.18	-	EUR 11.18		EUR 11.18		-		-		-	EUR 11.78
		2009	146	650.000,84	187	649.749,58	156	646.306,79	26	3.410,64	5	32,15	-	-	646.225,09
				USD 1,599.93	-	USD 1,597.42		USD 1,597.42		-		-		-	USD 1,549.22
				EUR 0.40	-	EUR 0.40		EUR 0.40		-		-		-	EUR 0.40
		2010	160	37.747,43	228	37.747,42	105	33.726,30	39	2.552,20	84	1.468,92	-	-	33.488,93
				USD 86.43	-	USD 86.43		USD 13.25		-		USD 73.18		-	-
		2011	47	3.477,31	73	3.477,31	35	705,04	7	-	31	2.772,27	-	-	674,14
				-	-	USD 10.92		USD 7.18		USD 3.74		-		-	USD 2.94
				-	-	-		-		-		-		-	-
				-	-	RON 2.94		-		-		RON 2.94		-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-		-		-		-		-	-
				-	-	-		-		-		-		-	-
				-	-	-		-		-		-		-	-
		Jumlah	541	1.188.903,06	717	1.188.637,85	485	1.176.022,88	103	8.205,25	128	4.327,46	1	82,26	1.175.608,13
			-	USD 1,809.11	-	USD 1,817.76	-	USD 1.740,84	-	USD 3.74	-	USD 73.18	-	-	USD 1,643.54
			-	EUR 11.58	-	EUR 11.58	-	EUR 11.58	-	-	-	-	-	-	EUR 12.18
			-	-	-	RON 2.94	-	-	-	-	-	RON 2.94	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2008	28	5.200,91	39	3.152,91	32	3.152,61	7	0,30	-	-	-	-	3.152,61
		2009	27	4.131,32	39	1.435,64	12	1.435,64	4	-	23	-	-	-	1.435,64
		2010	37	65.425,66	89	64.987,88	15	1.037,35	44	9.472,46	30	54.478,07	-	-	1.048,65

Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	35	47.236,00	66	44.858,55	14	6.885,46	28	28.137,17	24	9.835,92	-	-	6.885,46
		2012	30	123.076,06	87	123.076,05	-	943,46	5	8.760,42	82	113.372,17	-	-	943,79
			-	USD 13.72	-	USD 13.72	-	-	-	USD 13.72	-	-	-	-	-
			-	KRW 3,075.01	-	KRW 3,075.01	-	-	-	KRW 3,075.01	-	-	-	-	-
			-	SGD 0.24	-	SGD 0.24	-	-	-	SGD 0.24	-	-	-	-	-
		Jumlah	157	245.069,95	320	237.511,03	73	13.454,52	88	46.370,35	159	177.686,16	-	-	13.466,15
				USD 13.72		USD 13.72		-		USD 13.72		-		-	-
				KRW 3,075.01		KRW 3,075.01		-		KRW 3,075.01		-		-	-
				SGD 0.24		SGD 0.24		-		SGD 0.24		-		-	-
8	Wantannas	2008	10	16,80	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	7	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	3,52	5	3,52	5	3,52	-	-	-	-	-	-	3,52
		2012	8	5,18	17	5,18	1	5,18	-	-	16	-	-	-	5,18
		Jumlah	35	25,50	69	8,70	53	8,70	-	-	16	-	-	-	8,70
9	BIN	2008	5	39,20	5	39,20	5	39,20	-	-	-	-	-	-	39,20
		2009	14	11,26	21	11,26	21	11,26	-	-	-	-	-	-	11,26
		2010	11	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	4	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
		Jumlah	38	50,46	55	50,46	49	50,46	-	-	6	-	-	-	50,46
10	Lemsaneg	2008	3	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	17	42.946,08	44	1.047,20	25	870,44	11	176,76	8	-	-	-	892,44
		2010	8	395,24	13	-	9	-	4	-	-	-	-	-	331,74
		2011	8	777,75	18	777,75	11	-	2	-	5	777,75	-	-	-
		2012	9	2.673,16	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2.673,16
		Jumlah	45	46.792,23	92	1.824,95	49	870,44	17	176,76	26	777,75	-	-	3.897,34
11	Lemhannas	2008	13	166,94	18	86,84	18	86,84	-	-	-	-	-	-	86,84
		2009	8	94,98	11	94,98	11	94,98	-	-	-	-	-	-	94,98
		2010	5	24,12	11	24,12	11	24,12	-	-	-	-	-	-	24,12
		2011	6	60,50	6	60,50	6	60,50	-	-	-	-	-	-	60,50
		2012	7	165,69	10	165,69	-	-	-	-	10	165,69	-	-	-
		Jumlah	39	512,23	56	432,13	46	266,44	-	-	10	165,69	-	-	266,44

Halaman 4 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Menko Polhukam	2008	7	34,21	9	34,21	9	34,21	-	-	-	-	-	-	34,21
		2009	15	243,71	34	243,71	34	243,71	-	-	-	-	-	-	243,71
		2010	6	94,65	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	418,54	12	418,53	10	32,22	-	-	2	386,31	-	-	32,22
		2012	11	930,70	16	930,69	9	894,75	-	-	7	35,94	-	-	894,75
		Jumlah	45	1.721,81	78	1.627,14	69	1.204,89	-	-	9	422,25	-	-	1.204,89
13	Kementerian Dalam Negeri	2008	28	260.384,13	44	5.130,18	34	5.130,18	9	-	1	-	-	-	5.130,18
		2009	38	34.710,53	95	10.449,13	90	9.449,26	5	999,87	-	-	-	-	9.449,26
		2010	87	684.873,70	192	14.407,16	149	9.934,27	41	3.783,55	1	-	1	689,34	12.436,07
				USD 309.79	-	-		-		-		-		-	-
		2011	65	117.410,17	147	35.561,13	75	28.467,33	58	6.568,02	14	525,78	-	-	8.289,42
		2012	45	165.664,26	122	144.521,44	3	51.023,90	5	1.001,63	114	92.495,91	-	-	52.115,47
		Jumlah	263	1.263.042,79	600	210.069,04	351	104.004,94	118	12.353,07	130	93.021,69	1	689,34	87.420,40
			-	USD 309.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2008	4	48,27	6	48,27	6	48,27	-	-	-	-	-	-	48,27
		2009	6	699,84	13	699,83	7	132,89	6	566,94	-	-	-	-	132,89
		2010	7	158,40	10	158,40	9	158,40	1	-	-	-	-	-	158,40
		2011	4	399,50	5	399,50	5	399,50	-	-	-	-	-	-	399,50
		2012	9	1.036,03	15	85,93	2	85,93	-	-	13	-	-	-	85,93
		Jumlah	30	2.342,04	49	1.391,93	29	824,99	7	566,94	13	-	-	-	824,99
15	Kementerian Sekretariat Negara	2008	63	34.486,69	93	34.486,68	64	32.834,31	29	1.652,37	-	-	-	-	8.793,46
		2009	24	23.283,05	38	23.283,05	23	4.353,87	15	18.892,43	-	36,75	-	-	4.353,87
		2010	21	-	25	-	17	-	8	-	-	-	-	-	-
		2011	154	16.993,44	219	16.993,44	22	960,66	194	16.032,78	3	-	-	-	960,66
		2012	18	1.670,15	18	1.660,55	-	-	-	-	18	1.660,55	-	-	-
		Jumlah	280	76.433,33	393	76.423,72	126	38.148,84	246	36.577,58	21	1.697,30	-	-	14.107,99
16	TMII	2008	4	749,90	7	749,89	4	639,31	3	110,58	-	-	-	-	639,31
		2009	12	138,60	21	138,60	18	126,00	3	12,60	-	-	-	-	126,00
		2010	9	9.988,17	13	9.988,16	1	3.183,91	8	6.804,25	4	-	-	-	3.183,91
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	10.876,67	41	10.876,65	23	3.949,22	14	6.927,43	4	-	-	-	3.949,22

Halaman 5 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	BKN	2008	6	-	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	3	313,40	3	313,40	2	7,45	1	305,95	-	-	-	-	7,45
		2010	12	150,92	36	150,92	13	150,92	23	-	-	-	-	-	150,92
		2011	6	400,94	11	400,94	7	346,57	4	54,37	-	-	-	-	276,00
		2012	11	479,67	13	479,66	4	55,07	3	347,55	6	77,04	-	-	545,33
		Jumlah	38	1.344,93	70	1.344,92	32	560,01	32	707,87	6	77,04	-	-	979,70
18	BPN	2008	22	2.616,79	52	2.616,79	46	2.616,79	5	-	1	-	-	-	1.872,24
		2009	38	1.988,46	75	1.988,46	57	1.988,46	9	-	9	-	-	-	1.988,46
		2010	42	2.168,82	62	2.168,82	56	2.168,82	6	-	-	-	-	-	2.169,13
		2011	53	816,39	65	816,39	24	816,39	39	-	2	-	-	-	810,79
		2012	13	2.176,01	15	2.176,00	-	334,55	4	166,01	11	1.675,44	-	-	334,55
		Jumlah	168	9.766,47	269	9.766,46	183	7.925,01	63	166,01	23	1.675,44	-	-	7.175,17
19	LAN	2008	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	226,77	2	226,77	1	220,77	1	6,00	-	-	-	-	220,77
		2010	7	315,75	16	315,75	13	315,75	3	-	-	-	-	-	293,25
		2011	16	132,27	31	132,27	9	132,27	20	-	2	-	-	-	132,27
		2012	8	1.817,54	20	1.817,53	10	258,62	9	1.550,31	1	8,60	-	-	258,62
			-	USD 0.52	-	USD 0.52	-	USD 0.52	-	-	-	-	-	-	USD 0.52
		Jumlah	34	2.492,33	70	2.492,32	34	927,41	33	1.556,31	3	8,60	-	-	904,91
			-	USD 0.52	-	USD 0.52	-	USD 0.52	-	-	-	-	-	-	USD 0.52
20	Arsip Nasional	2008	5	5.869,64	7	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-
		2009	4	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	1.005,47	9	1.005,47	9	1.005,47	-	-	-	-	-	-	740,10
		2011	8	4.416,22	12	475,87	9	475,87	3	-	-	-	-	-	475,87
		2012	8	86,86	11	86,86	7	80,06	2	6,80	2	-	-	-	87,83
		Jumlah	32	11.378,19	44	1.568,20	34	1.561,40	8	6,80	2	-	-	-	1.303,80
21	KPU	2008	21	73.375,97	41	55.915,17	27	3.036,35	9	52.878,82	5	-	-	-	3.036,41
		2009	256	863.608,81	530	266.137,81	341	120.561,18	169	144.631,74	19	944,89	1	-	47.296,43
		2010	9	24.242,50	22	4.592,24	11	1.325,39	11	3.266,85	-	-	-	-	1.325,39
		2011	13	5.422,16	30	5.422,15	10	347,34	20	5.074,81	-	-	-	-	295,06
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	299	966.649,44	623	332.067,37	389	125.270,26	209	205.852,22	24	944,89	1	-	51.953,29

Halaman 6 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Kementerian Hukum dan HAM	2008	100	134.197,86	184	118.696,76	180	7.106,61	3	187,51	-	-	1	111.402,64	8.280,76
		2009	77	4.432,38	166	4.100,45	166	4.100,45	-	-	-	-	-	-	3.926,05
		2010	62	7.916,47	136	3.239,60	126	2.715,74	10	523,86	-	-	-	-	2.644,62
		2011	28	2.320,96	83	2.320,95	56	1.586,47	6	734,48	21	-	-	-	1.586,47
		2012	21	262.551,98	39	3.216,43	-	-	-	-	39	3.216,43	-	-	12.203,68
		Jumlah	288	411.419,65	608	131.574,19	528	15.509,27	19	1.445,85	60	3.216,43	1	111.402,64	28.641,58
23	Kejaksaan RI	2008	97	957.843,59	202	951.435,74	32	16.543,98	28	132.454,37	142	802.437,39	-	-	3.978,05
				USD 5.00	-	USD 5.00		-		-		USD 5.00		-	-
		2009	144	5.383.958,82	306	5.432.778,74	54	14.830,77	23	57.758,43	229	5.360.189,54	-	-	11.994,21
				USD 293,631.75	-	USD 293,631.75		-		USD 34.95		USD 293,596.80		-	-
		2010	77	47.023,35	158	43.450,38	27	836,93	15	4.697,45	116	37.916,00	-	-	836,93
				USD 5.00	-	USD 5.00		-		USD 5.00		-		-	-
		2011	53	39.069,54	150	38.089,81	20	0,63	9	-	121	38.089,18	-	-	242,04
				USD 14.63	-	USD 14.63		-		-		USD 14.63		-	-
				THB 25.00	-	THB 25.00		-		-		THB 25.00		-	-
		2012	53	60.204,26	143	963,67	3	85,23	9	-	131	878,44	-	-	242,14
		Jumlah	424	6.488.099,56	959	6.466.718,34	136	32.297,54	84	194.910,25	739	6.239.510,55	-	-	17.293,37
			-	USD 293,656.38	-	USD 293,656.38	-	-	-	USD 39,95	-	USD 293,616.43	-	-	-
			-	THB 25.00	-	THB 25.00	-	-	-	-	-	THB 25.00	-	-	-
24	POLRI	2008	33	6.412,21	45	6.412,21	41	4.602,80	4	1.809,41	-	-	-	-	2.425,30
		2009	118	4.686,75	171	4.686,74	164	3.901,28	7	785,46	-	-	-	-	3.767,53
		2010	87	17.039,35	128	13.613,65	111	11.295,18	13	2.318,47	4	-	-	-	10.039,65
		2011	52	31.748,39	111	31.269,43	26	7.672,61	12	5.623,33	73	17.973,49	-	-	6.738,70
		2012	38	91.005,91	79	14.983,99	-	-	-	-	79	14.983,99	-	-	10.959,01
				USD 7.83	-	-		-		-		-		-	USD 7.83
		Jumlah	328	150.892,61	534	70.966,02	342	27.471,87	36	10.536,67	156	32.957,48	-	-	33.930,19
			-	USD 7.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7.83
25	Komnas HAM	2008	5	27,39	9	27,39	9	27,39	-	-	-	-	-	-	27,39
		2009	18	1.044,25	30	680,03	22	4,99	7	648,20	1	26,84	-	-	4,99
		2010	5	78,46	11	78,46	11	78,46	-	-	-	-	-	-	2,74
		2011	6	73,52	11	-	8	-	3	-	-	-	-	-	73,52
		2012	4	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
		Jumlah	38	1.223,62	67	785,88	50	110,84	10	648,20	7	26,84	-	-	108,64

Halaman 7 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Mahkamah Konstitusi	2008	2	159,66	2	74,95	2	74,95	-	-	-	-	-	-	74,95
		2009	5	121,85	8	121,85	8	121,85	-	-	-	-	-	-	121,85
		2010	6	106,60	13	86,98	13	86,98	-	-	-	-	-	-	86,98
		2011	3	196,79	7	196,79	7	196,79	-	-	-	-	-	-	196,79
		2012	6	230,66	13	173,68	11	173,68	2	-	-	-	-	-	173,68
		Jumlah	22	815,56	43	654,25	41	654,25	2	-	-	-	-	-	654,25
27	MPR	2008	4	43,50	5	43,50	5	43,50	-	-	-	-	-	-	43,50
		2009	6	275,71	9	153,77	8	153,77	1	-	-	-	-	-	153,77
		2010	5	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	3	519,65	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	29,02	5	29,02	5	29,02	-	-	-	-	-	-	29,02
		Jumlah	21	867,88	27	226,29	26	226,29	1	-	-	-	-	-	226,29
28	DPR	2008	8	3.042,66	18	59,07	18	59,07	-	-	-	-	-	-	59,07
		2009	17	36.912,30	28	32.614,86	25	32.552,10	3	62,76	-	-	-	-	3.753,69
		2010	7	376,67	13	326,45	13	326,45	-	-	-	-	-	-	326,45
		2011	21	28.237,26	30	24.415,00	17	4.014,47	13	20.400,53	-	-	-	-	4.014,47
		2012	20	4.273,28	37	3.347,39	3	221,71	2	52,49	32	3.073,19	-	-	221,71
		Jumlah	73	72.842,17	126	60.762,77	76	37.173,80	18	20.515,78	32	3.073,19	-	-	8.375,39
29	DPD	2008	2	69,88	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	69,88
		2009	8	33,19	8	33,19	8	33,19	-	-	-	-	-	-	33,19
		2010	4	230,01	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	230,01
		2011	7	1.564,54	11	1.358,80	10	3,02	1	1.355,78	-	-	-	-	206,72
		2012	5	126,41	10	126,41	10	126,41	-	-	-	-	-	-	126,41
		Jumlah	26	2.024,03	35	1.518,40	34	162,62	1	1.355,78	-	-	-	-	666,21
30	Mahkamah Agung	2008	25	1.179,08	43	770,91	32	770,91	11	-	-	-	-	-	785,82
		2009	21	98,73	40	98,73	19	96,75	21	1,98	-	-	-	-	96,75
		2010	44	3.664,69	79	795,86	42	751,51	37	44,35	-	-	-	-	993,48
		2011	56	3.691,17	100	2.418,52	35	1.257,95	63	1.160,57	2	-	-	-	1.316,91
		2012	19	1.949,53	39	1.232,10	-	65,35	39	1.166,75	-	-	-	-	65,61
		Jumlah	165	10.583,20	301	5.316,12	128	2.942,47	171	2.373,65	2	-	-	-	3.258,57
31	Komisi Yudisial	2008	2	3,47	2	3,47	2	3,47	-	-	-	-	-	-	3,47
		2009	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	8	1.165,95	10	26,81	10	26,81	-	-	-	-	-	-	16,10

Halaman 8 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	4	19,28	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3,65
		2012	4	55,28	8	55,28	5	55,28	3	-	-	-	-	-	55,28
		Jumlah	21	1.243,98	28	85,56	25	85,56	3	-	-	-	-	-	78,50
32	KPK	2008	5	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	-	10	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	7	47,15	8	47,15	5	47,15	3	-	-	-	-	-	4,00
		2011	6	-	11	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Jumlah	27	47,15	43	47,15	35	47,15	7	-	1	-	-	-	4,00
33	PPATK	2008	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	3	6.196,19	3	6.196,19	3	6.196,19	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	2.032,96	15	2.032,96	15	2.032,96	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	305,10	10	305,10	6	305,10	4	-	-	-	-	-	-
		2012	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	34	8.534,25	32	8.534,25	28	8.534,25	4	-	-	-	-	-	-
34	BNN	2008	12	716,34	16	716,33	15	602,54	1	113,79	-	-	-	-	602,54
		2009	10	1.866,57	17	1.866,57	17	1.866,57	-	-	-	-	-	-	1.866,57
		2010	14	397,54	32	397,54	26	355,34	5	42,20	1	-	-	-	355,34
		2011	14	1.723,88	26	1.723,87	-	1.028,96	2	694,91	24	-	-	-	1.028,96
		2012	13	3.514,79	19	-	-	-	19	-	-	-	-	-	3.523,41
				USD 0.95	-	-		-		-		-		-	-
		Jumlah	63	8.219,12	110	4.704,31	58	3.853,41	27	850,90	25	-	-	-	7.376,82
			-	USD 0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kementerian Pertanian	2008	9	3.368,08	16	3.368,07	5	2.405,61	10	962,46	-	-	1	-	2.405,61
		2009	33	5.668,97	54	2.064,47	19	1.970,41	35	94,06	-	-	-	-	1.970,41
		2010	55	56.371,86	90	50.180,89	50	49.746,80	20	434,09	20	-	-	-	49.746,80
		2011	65	19.358,07	100	18.098,21	59	16.982,76	38	1.115,45	3	-	-	-	16.982,76
		2012	54	639.244,08	97	601.446,08	8	1.213,16	22	576.518,68	67	23.714,24	-	-	1.213,16
		Jumlah	216	724.011,06	357	675.157,72	141	72.318,74	125	579.124,74	90	23.714,24	1	-	72.318,74
36	Kementerian Kehutanan	2008	101	270.417,54	165	268.550,88	63	2.904,94	78	263.758,91	24	1.887,03	-	-	2.904,94
				USD 25,906.17	-	USD 25,697.74		USD 31.27		USD 25,570.05		USD 96.42		-	USD 31.27
		2009	118	577.867,56	210	491.162,86	109	36.377,44	86	446.917,95	15	7.867,47	-	-	36.377,44
				USD 12,850.92	-	USD 12,813.81		USD 32.85		USD 12,780.96		-		-	USD 33.33

Halaman 9 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	78	75.239,40	111	74.779,06	42	2.813,82	46	70.818,02	23	1.147,22	-	-	2.526,35
				USD 525.78	-	USD 525.78		-		USD 525.78		-		-	-
		2011	52	7.042.072,41	80	6.483.860,62	27	8.714,56	37	459.111,26	16	6.016.034,80	-	-	8.714,56
				USD 1,088.02	-	USD 1,088.01		-		USD 75.75		USD 1,012.26		-	-
		2012	25	30.009,28	44	2.679,75	-	924,94	1	1.347,92	43	406,89	-	-	924,94
		Jumlah	374	7.995.606,19	610	7.321.033,17	241	51.735,70	248	1.241.954,06	121	6.027.343,41	-	-	51.448,23
			-	USD 40,370.89	-	USD 40,125.34	-	USD 64.12	-	USD 38,952.54	-	USD 1,108.68	-	-	USD 64.60
37	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2008	37	291.567,57	68	45.625,75	51	43.849,54	17	1.776,21	-	-	-	-	43.849,54
				JPY 1,299.04	-	-		-		-		-		-	-
		2009	35	32.609,46	66	1.990,34	26	1.188,93	40	801,41	-	-	-	-	1.188,93
		2010	36	33.540,20	55	3.024,59	29	2.400,27	25	624,32	1	-	-	-	2.400,27
		2011	42	425.917,49	54	6.229,73	2	3.718,85	49	2.510,88	3	-	-	-	2.695,98
		2012	14	441.398,05	18	6.619,95	-	-	-	-	18	6.619,95	-	-	2.058,33
		Jumlah	164	1.225.032,77	261	63.490,36	108	51.157,59	131	5.712,82	22	6.619,95	-	-	52.193,05
			-	JPY 1,299.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kementerian Pekerjaan Umum	2008	32	53.000,02	53	52.672,23	46	52.390,75	7	281,48	-	-	-	-	52.390,75
				EUR 35.79	-	-		-		-		-		-	-
		2009	156	172.650,35	362	83.686,20	282	79.711,28	40	3.422,53	40	552,39	-	-	82.620,05
		2010	102	60.362,53	239	26.644,08	142	20.938,29	55	3.408,47	41	479,46	1	1.817,86	21.013,35
		2011	62	762.420,93	152	50.427,83	50	31.470,32	53	15.163,30	49	3.794,21	-	-	27.432,69
		2012	46	767.367,81	96	764.383,38	6	1.443,67	16	752.264,29	74	10.675,42	-	-	3.657,86
		Jumlah	398	1.815.801,64	902	977.813,72	526	185.954,31	171	774.540,07	204	15.501,48	1	1.817,86	187.114,70
			-	EUR 35.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kementerian Perhubungan	2008	33	14.140,14	60	5.850,29	30	5.259,38	29	590,91	1	-	-	-	5.259,38
		2009	33	84.586,26	48	658,98	40	658,98	8	-	-	-	-	-	658,98
		2010	84	530.235,21	147	24.986,29	105	14.358,07	38	10.603,11	4	-	-	25,11	4.623,37
		2011	16	249.627,87	27	31.129,24	13	31.129,24	12	-	2	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	166	878.589,48	282	62.624,80	188	51.405,67	87	11.194,02	7	-	-	25,11	10.541,73

Halaman 10 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	Kemenpera	2008	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	3	228,37	3	228,37	1	139,27	2	89,10	-	-	-	-	139,27
		2010	23	1.197,85	26	1.197,85	16	1.197,85	9	-	1	-	-	-	1.197,85
		2011	21	403,25	27	403,25	6	403,25	3	-	18	-	-	-	403,25
		2012	13	10.052,65	17	10.052,64	4	2.178,27	1	84,99	12	7.789,38	-	-	2.178,27
		Jumlah	62	11.882,12	75	11.882,11	29	3.918,64	15	174,09	31	7.789,38	-	-	3.918,64
41	Bapertarum	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	41.145,88	7	41.145,88	2	109,54	5	41.036,34	-	-	-	-	109,54
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	41.145,88	7	41.145,88	2	109,54	5	41.036,34	-	-	-	-	109,54
42	Kementerian PDT	2008	10	945,54	26	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	15,93	25	-	23	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	14	1.336,99	22	1.336,99	21	1.336,99	1	-	-	-	-	-	1.336,99
		2011	16	104.470,79	31	2.044,95	25	1.260,97	6	783,98	-	-	-	-	1.259,28
		2012	18	9.791,94	39	1.973,69	-	-	-	-	39	1.973,69	-	-	7.338,09
		Jumlah	66	116.561,19	143	5.355,63	95	2.597,96	9	783,98	39	1.973,69	-	-	9.934,36
43	BMKG	2008	18	564,50	24	564,50	24	564,50	-	-	-	-	-	-	564,51
		2009	12	621,27	21	191,07	21	191,07	-	-	-	-	-	-	191,07
		2010	19	3.143,81	39	3.143,81	37	790,78	2	2.353,03	-	-	-	-	790,78
		2011	9	8.140,42	16	19,80	16	19,80	-	-	-	-	-	-	19,80
		2012	8	490,43	12	490,43	9	190,43	3	300,00	-	-	-	-	190,43
		Jumlah	66	12.960,43	112	4.409,61	107	1.756,58	5	2.653,03	-	-	-	-	1.756,59
44	Kementerian Perindustrian	2008	12	-	20	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	16	1.704,40	20	1.699,17	20	1.699,17	-	-	-	-	-	-	1.111,41
		2010	12	222,81	17	222,81	17	222,81	-	-	-	-	-	-	222,81
		2011	13	417,60	13	417,60	10	417,60	3	-	-	-	-	-	417,60
		2012	11	63,64	15	63,64	7	11,00	4	52,64	4	-	-	-	455,34
		Jumlah	64	2.408,45	85	2.403,22	73	2.350,58	8	52,64	4	-	-	-	2.207,16

Halaman 11 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Kementerian Perdagangan	2008	30	-	35	-	29	-	6	-	-	-	-	-	-
		2009	8	-	15	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	41	3.665,66	71	3.666,13	57	2.429,50	14	1.236,16	-	-	-	0,47	1.129,30
			-	USD 6.60	-	USD 6.60	-	USD 6.60	-	-	-	-	-	-	USD 6.60
		2011	26	3.475,17	48	3.475,17	18	3.475,17	3	-	27	-	-	-	2.300,02
		2012	13	1.476,22	21	753,73	2	393,40	1	-	18	360,33	-	-	391,05
		Jumlah	118	8.617,05	190	7.895,03	119	6.298,07	26	1.236,16	45	360,33	-	0,47	3.820,37
				USD 6.60		USD 6.60		USD 6.60		-		-		-	USD 6.60
46	Kementerian Kop. & UKM	2008	10	2.142,76	18	1.635,14	14	414,59	2	1.220,55	-	-	2	-	354,66
		2009	24	6.084,76	38	6.084,75	27	500,00	10	2.237,95	-	-	1	3.346,80	-
		2010	16	19.471,60	32	19.471,60	31	17.468,98	1	2.002,62	-	-	-	-	17.468,98
		2011	18	5.208,84	20	1.614,46	14	1.149,73	6	464,73	-	-	-	-	10,79
		2012	9	869,60	13	-	4	-	3	-	6	-	-	-	833,15
		Jumlah	77	33.777,56	121	28.805,95	90	19.533,30	22	5.925,85	6	-	3	3.346,80	18.667,58
47	BSN	2008	3	517,73	3	517,73	3	517,73	-	-	-	-	-	-	517,73
		2009	4	300,78	5	300,78	5	300,78	-	-	-	-	-	-	300,78
		2010	7	11,55	10	11,55	10	11,55	-	-	-	-	-	-	11,55
		2011	14	59,23	27	30,44	23	30,44	4	-	-	-	-	-	59,23
		2012	5	216,23	10	216,22	1	41,14	8	175,08	1	-	-	-	41,14
		Jumlah	33	1.105,52	55	1.076,72	42	901,64	12	175,08	1	-	-	-	930,43
48	BKPM	2008	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	8,60	2	8,60	2	8,60	-	-	-	-	-	-	8,60
		2010	15	-	24	-	16	-	6	-	2	-	-	-	-
		2011	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	79,62	3	79,62	1	-	2	79,62	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	88,22	35	88,22	25	8,60	8	79,62	2	-	-	-	8,60
49	Kementerian ESDM	2008	45	251.959,93	60	250.758,10	52	97.306,01	7	153.452,09	-	-	1	-	97.668,35
				USD 46,877.81	-	USD 18,200.43		USD 14,441.56		USD 3,758.87		-		-	USD 43,118.94
		2009	34	384,46	42	384,46	37	83,12	5	301,34	-	-	-	-	83,12
				USD 8.51	-	USD 8.51		USD 8.51		-		-		-	USD 8.51
		2010	57	278.268,79	95	251.503,29	72	85.288,57	23	166.214,72	-	-	-	-	86.693,01
				USD 29,261.54	-	USD 17,731.87		USD 10,391.39		USD 7,340.48		-		-	USD 21,921.06

Halaman 12 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	31	106.398,87	51	97.927,01	23	17.684,45	28	80.242,56	-	-	-	-	22.037,74
				USD 43,332.44	-	USD 43,012.10		USD 15,091.82		USD 27,920.28		-		-	USD 15,412.16
		2012	8	3.414,58	12	-	4	-	8	-	-	-	-	-	3.414,58
				USD 1,000.00	-	-		-		-		-		-	USD 1,000.00
		Jumlah	175	640.426,63	260	600.572,86	188	200.362,15	71	400.210,71	-	-	1	-	209.896,80
			-	USD 120,480.30	-	USD 78,952.91	-	USD 39,933.28	-	USD 39,019.63	-	-	-	-	USD 81,460.67
50	Kementerian LH	2008	25	-	35	-	34	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	60	34.209,86	125	1.680,79	89	280,80	36	1.399,99	-	-	-	-	428,18
				USD 651.40	-	-		-		-		-		-	-
		2010	16	20.109,49	29	20.109,49	28	5.004,45	-	-	-	-	1	15.105,04	5.002,93
		2011	20	10.428,02	33	2.867,82	28	2.867,82	5	-	-	-	-	-	3.831,05
		2012	10	4.267,81	15	211,53	2	37,60	13	173,93	-	-	-	-	184,88
		Jumlah	131	69.015,18	237	24.869,63	181	8.190,67	55	1.573,92	-	-	1	15.105,04	9.447,04
			-	USD 651.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kementerian BUMN	2008	13	90,77	19	90,77	19	90,77	-	-	-	-	-	-	90,77
		2009	8	165,79	8	165,79	8	165,79	-	-	-	-	-	-	165,79
		2010	9	1.227,87	9	61,20	9	61,20	-	-	-	-	-	-	61,20
		2011	4	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	11	96,57	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
		Jumlah	45	1.581,00	54	317,76	40	317,76	1	-	13	-	-	-	317,76
52	Kementerian Ristek	2008	9	169.947,96	9	166.716,05	8	166.716,05	1	-	-	-	-	-	166.716,05
		2009	7	121.728,67	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	11	955,86	14	116,23	12	116,23	2	-	-	-	-	-	116,23
		2011	14	74.045,96	32	70.493,51	18	26.823,43	10	43.670,08	4	-	-	-	26.823,43
		2012	21	103.935,75	41	10.606,06	1	30,24	2	26,44	38	10.549,38	-	-	30,71
		Jumlah	62	470.614,20	103	247.931,85	44	193.685,95	17	43.696,52	42	10.549,38	-	-	193.686,42
53	BPPT	2008	24	49.101,17	30	14.249,86	22	5.143,61	8	9.106,25	-	-	-	-	5.143,61
				USD 506.73	-	USD 476.73		USD 476.73		-		-		-	USD 476.73
		2009	9	3.414,68	10	315,65	10	315,65	-	-	-	-	-	-	160,75
		2010	23	26.374,98	34	26.156,71	32	26.156,71	2	-	-	-	-	-	25.113,74
		2011	12	3.994,11	23	3.881,91	22	3.881,91	1	-	-	-	-	-	288,16
		2012	15	13.107,01	38	4.260,90	-	61,60	3	738,58	35	3.460,72	-	-	61,60
		Jumlah	83	95.991,95	135	48.865,03	86	35.559,48	14	9.844,83	35	3.460,72	-	-	30.767,86
			-	USD 506.73	-	USD 476.73	-	USD 476.73	-	-	-	-	-	-	USD 476.73

Halaman 13 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	LIPI	2008	7	10.754,76	9	10.754,76	8	10.754,76	1	-	-	-	-	-	10.754,76
		2009	8	246,69	8	35,80	6	31,30	2	4,50	-	-	-	-	31,30
		2010	17	8.233,65	17	7.204,58	12	1.035,89	5	6.168,69	-	-	-	-	1.035,97
		2011	28	80.564,60	59	72.185,57	47	860,87	9	71.324,70	3	-	-	-	677,27
		2012	10	10.587,59	24	449,89	-	120,80	1	47,25	23	281,84	-	-	120,80
		Jumlah	70	110.387,29	117	90.630,60	73	12.803,62	18	77.545,14	26	281,84	-	-	12.620,10
55	BATAN	2008	7	-	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
				USD 36.72	-	USD 36.72		USD 36.72		-		-		-	USD 36.72
		2009	14	3.179,94	24	234,82	24	234,82	-	-	-	-	-	-	234,82
		2010	9	6.046,62	12	82,06	12	82,06	-	-	-	-	-	-	82,06
		2011	15	2.513,25	25	202,03	25	202,03	-	-	-	-	-	-	169,15
		2012	13	2.588,01	33	1.034,24	-	3,94	1	30,01	32	1.000,29	-	-	3,94
		Jumlah	58	14.327,82	101	1.553,15	67	522,85	2	30,01	32	1.000,29	-	-	489,97
			-	USD 36,72	-	USD 36.72	-	USD 36.72	-	-	-	-	-	-	USD 36.72
56	BAPETEN	2008	6	62,21	8	62,20	7	24,03	1	38,17	-	-	-	-	24,03
		2009	6	17,90	7	17,90	6	17,90	1	-	-	-	-	-	17,90
		2010	9	73,22	15	73,22	10	25,00	4	48,22	1	-	-	-	25,00
				USD 222.15	-	USD 222.15		-		-		USD 222.15		-	-
		2011	9	73,25	14	73,24	11	70,45	2	2,79	1	-	-	-	70,45
		2012	11	104,04	25	104,04	-	-	-	-	25	104,04	-	-	-
		Jumlah	41	330,62	69	330,60	34	137,38	8	89,18	27	104,04	-	-	137,38
			-	USD 222.15	-	USD 222.15	-	-	-	-	-	USD 222.15	-	-	-
57	Badan Informasi Geospasial	2008	13	1.611,83	13	1.611,83	13	1.611,83	-	-	-	-	-	-	1.741,40
		2009	4	4.536,69	6	69,65	6	69,65	-	-	-	-	-	-	74,31
		2010	13	595,66	13	350,56	12	286,93	1	63,63	-	-	-	-	307,13
		2011	16	7.120,41	24	4.485,98	7	1.909,73	6	2.565,72	11	10,53	-	-	1.906,91
		2012	10	56.478,90	27	3.382,30	-	19,22	2	2.706,17	25	656,91	-	-	-
		Jumlah	56	70.343,49	83	9.900,32	38	3.897,36	9	5.335,52	36	667,44	-	-	4.029,75
58	LAPAN	2008	9	45,70	11	45,70	11	45,70	-	-	-	-	-	-	45,70
				USD 145.46	-	-		-		-		-		-	-
		2009	6	3.038,21	7	289,69	4	6,61	3	283,08	-	-	-	-	6,61
		2010	23	58.281,44	29	409,43	17	243,37	4	41,17	8	124,89	-	-	243,37

Halaman 14 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	17	11.374,13	36	9.732,28	14	60,63	8	46,80	14	9.624,85	-	-	60,63
		2012	9	3.012,59	21	1.932,07	2	8,82	2	83,28	17	1.839,97	-	-	8,82
		Jumlah	64	75.752,07	104	12.409,17	48	365,13	17	454,33	39	11.589,71	-	-	365,13
			-	USD 145.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Kementerian Agama	2008	135	103.975,29	253	19.992,20	141	17.564,24	36	2.125,03	76	302,93	-	-	12.817,47
				SAR 284.40	-	-		-		-		-		-	-
		2009	86	86.978,47	183	65.226,04	90	23.006,69	72	42.143,86	17	-	4	75,49	22.377,92
				SAR 1,097.00	-	-		-		-		-		-	-
		2010	154	228.474,57	340	40.902,90	184	28.326,97	37	7.192,33	119	5.383,60	-	-	16.426,73
				USD 270.54	-	USD 270.52		USD 249.48		USD 14.09		USD 6.95		-	USD 249.48
				JPY 266,082.19	-	JPY 150,835.50		JPY 150,835.50		-		-		-	-
		2011	119	235.339,76	248	22.323,00	102	9.253,36	99	12.771,94	47	297,70	-	-	105.344,20
				USD 1.05	-	USD 1.05		USD 1.05		-		-		-	USD 1.05
		2012	59	43.460,32	139	14.312,61	5	3.673,42	24	5.012,97	110	5.626,22	-	-	3.673,42
				USD 128.57	-	USD 128.57		-		-		USD 128.57		-	-
		Jumlah	553	698.228,41	1.163	162.756,75	522	81.824,68	268	69.246,13	369	11.610,45	4	75,49	160.639,74
			-	USD 400.16	-	USD 400.14	-	USD 250.53	-	USD 14.09	-	USD 135.52	-	-	USD 250.53
			-	SAR 1,381.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 266,082.19	-	JPY 150,835.50	-	JPY 150,835.50	-	-	-	-	-	-	-
60	Kementerian Sosial	2008	14	17.010,79	24	-	23	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	28	159.643,08	45	7.029,72	37	2.612,42	7	4.417,30	1	-	-	-	2.612,42
		2010	42	146.627,20	49	10.850,30	26	747,63	22	9.268,17	1	834,50	-	-	1.980,00
		2011	20	4.889,18	31	2.127,44	18	1.945,05	13	182,39	-	-	-	-	-
		2012	29	36.394,32	46	3.047,29	5	61,24	27	1.355,62	14	1.630,43	-	-	61,24
		Jumlah	133	364.564,57	195	23.054,75	109	5.366,34	70	15.223,48	16	2.464,93	-	-	4.653,66
61	BN Penanggulangan Bencana	2008	7	1.534,04	15	1.534,03	14	161,18	1	1.372,85	-	-	-	-	1.205,12
		2009	11	7.749,04	19	7.749,04	16	7.749,04	2	-	1	-	-	-	9.235,36
		2010	15	902,10	27	424,25	22	306,47	5	117,78	-	-	-	-	306,47
				USD 2,385.73	-	USD 0.06		USD 0.06		-		-		-	USD 0.06
		2011	59	81.829,39	98	24.406,38	15	2.175,22	65	22.203,51	18	27,65	-	-	22.865,31
		2012	27	161.021,00	38	471,82	-	-	-	-	38	471,82	-	-	-
		Jumlah	119	253.035,57	197	34.585,52	67	10.391,91	73	23.694,14	57	499,47	-	-	33.612,26
			-	USD 2,385.73	-	USD 0.06	-	USD 0.06	-	-	-	-	-	-	USD 0.06

Halaman 15 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	Kemenko Kesra	2008	17	207.642,88	23	207.472,56	10	2.144,97	8	92.736,30	5	112.591,29	-	-	2.144,97
		2009	15	65.103,71	31	65.103,70	7	2.942,77	12	14.306,02	12	47.854,91	-	-	2.992,05
		2010	16	15.972,29	17	234,48	7	188,35	2	46,13	8	-	-	-	188,35
		2011	5	870,56	7	870,56	1	147,98	3	722,58	3	-	-	-	147,98
		2012	19	8.435,30	23	707,97	-	58,94	2	57,80	21	591,23	-	-	82,50
				USD 0.05	-	USD 0.05		USD 0.05		-		-		-	USD 0.05
		Jumlah	72	298.024,74	101	274.389,27	25	5.483,01	27	107.868,83	49	161.037,43	-	-	5.555,85
			-	USD 0.05	-	USD 0.05	-	USD 0.05	-	-	-	-	-	-	USD 0.05
63	KPP & PA	2008	4	132,46	5	91,58	5	91,58	-	-	-	-	-	-	91,58
		2009	2	199,06	2	54,54	2	54,54	-	-	-	-	-	-	54,54
		2010	12	5.242,71	14	5.002,28	14	5.002,28	-	-	-	-	-	-	164,24
		2011	10	11.075,47	16	6.775,37	15	6.775,37	1	-	-	-	-	-	259,34
		2012	10	1.666,29	24	182,60	22	182,60	2	-	-	-	-	-	182,60
		Jumlah	38	18.315,99	61	12.106,37	58	12.106,37	3	-	-	-	-	-	752,30
64	Kementerian Kesehatan	2008	43	218.546,56	80	41.351,92	71	1.302,21	9	40.049,71	-	-	-	-	1.302,21
				USD 125.88	-	USD 125.88		-		USD 125.88		-		-	-
		2009	72	454.031,97	103	78.730,09	57	2.111,12	37	76.618,97	9	-	-	-	2.114,60
		2010	53	25.139,24	93	22.107,13	53	19.755,15	35	2.351,98	5	-	-	-	19.930,05
		2011	116	1.097.901,80	235	267.652,29	66	128.207,46	160	139.252,51	9	192,32	-	-	13.801,51
				SAR 121.50	-	-		-		-		-		-	-
		2012	43	1.005.167,81	148	948.900,22	9	-	103	446.557,55	36	502.342,67	-	-	2.096,91
		Jumlah	327	2.800.787,38	659	1.358.741,65	256	151.375,94	344	704.830,72	59	502.534,99	-	-	39.245,28
			-	USD 125.88	-	USD 125.88	-	-	-	USD 125.88	-	-	-	-	-
			-	SAR 121.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Kementerian Nakertrans	2008	31	237.539,95	46	70.729,76	21	69.111,10	9	721,13	16	897,53	-	-	69.111,10
		2009	29	7.746,69	43	113,90	10	37,26	9	76,64	24	-	-	-	37,26
				USD 203.60	-	USD 203.60		-		-		USD 203.60		-	-
		2010	38	23.759,82	56	10.005,42	23	1.646,62	27	8.358,80	6	-	-	-	1.653,98
		2011	63	30.242,42	164	7.475,19	22	3.723,05	24	3.740,89	118	11,25	-	-	16.576,14
		2012	33	23.463,55	60	19.796,81	3	804,57	8	1.857,35	49	17.134,89	-	-	788,00
		Jumlah	194	322.752,43	369	108.121,08	79	75.322,60	77	14.754,81	213	18.043,67	-	-	88.166,48
			-	USD 203.60	-	USD 203.60	-	-	-	-	-	USD 203.60	-	-	-

Halaman 16 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	BKKBN	2008	10	186,38	10	186,38	9	186,38	1	-	-	-	-	-	186,38
		2009	11	392,37	17	392,37	16	112,74	1	279,63	-	-	-	-	112,74
		2010	22	30.022,90	22	30.022,89	18	18.776,28	3	5.359,70	1	5.886,91	-	-	18.776,28
		2011	64	22.385,11	116	6.319,42	45	414,97	36	5.904,45	35	-	-	-	326,87
		2012	27	74.920,67	62	585,45	2	252,68	28	159,40	32	173,37	-	-	117,93
		Jumlah	134	127.907,43	227	37.506,51	90	19.743,05	69	11.703,18	68	6.060,28	-	-	19.520,20
67	BPOM	2008	11	114,12	19	114,12	17	114,12	2	-	-	-	-	-	114,12
		2009	12	4.363,17	21	4.363,17	18	4.363,17	3	-	-	-	-	-	4.363,17
		2010	10	1,04	18	1,04	15	1,04	3	-	-	-	-	-	1,04
		2011	13	4.227,28	27	1.679,06	23	1.191,34	4	487,72	-	-	-	-	1.191,34
		2012	18	1.667,49	35	1.260,76	5	9,18	2	578,12	28	673,46	-	-	417,56
		Jumlah	64	10.373,10	120	7.418,15	78	5.678,85	14	1.065,84	28	673,46	-	-	6.087,23
68	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2008	45	1.915,26	77	1.915,25	67	1.411,23	9	504,02	1	-	-	-	1.411,23
				USD 8.69	-	USD 8.69		USD 8.69		-		-		-	-
		2009	166	300.207,76	417	247.322,17	254	194.101,83	93	46.225,22	70	6.995,12	-	-	45.282,45
				USD 9.56	-	USD 9.56		-		USD 9.56		-		-	-
		2010	132	4.825.709,10	274	237.155,76	155	115.675,18	74	119.078,10	45	2.402,48	-	-	91.078,82
		2011	284	1.550.866,22	662	416.796,50	313	213.683,86	199	190.566,13	150	12.546,51	-	-	90.851,89
				USD 61.74	-	USD 61.74		USD 61.74		-		-		-	USD 19.65
		2012	46	1.514.113,58	89	26.882,59	-	-	-	-	89	26.882,59	-	-	-
				USD 32.76	-	-		-		-		-		-	-
		Jumlah	673	8.192.811,92	1.519	930.072,27	789	524.872,10	375	356.373,47	355	48.826,70	-	-	228.624,39
			-	USD 112.75	-	USD 79.99	-	USD 70.43	-	USD 9.56	-	-	-	-	USD 19.65
69	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2008	8	89,97	8	15,00	4	15,00	2	-	2	-	-	-	15,00
		2009	19	6.461,64	37	421,19	25	421,19	5	-	7	-	-	-	421,19
		2010	27	5.907,58	47	585,09	24	515,51	10	69,58	13	-	-	-	515,99
		2011	32	5.876,42	77	2.674,16	23	1.031,67	22	1.642,49	32	-	-	-	1.031,67
		2012	47	17.729,53	98	17.697,23	-	-	-	-	98	17.697,23	-	-	-
		Jumlah	133	36.065,14	267	21.392,67	76	1.983,37	39	1.712,07	152	17.697,23	-	-	1.983,85
70	Kemenpora	2008	5	291,00	5	291,00	3	291,00	2	-	-	-	-	-	291,00
		2009	18	1.221,43	22	1.221,42	17	828,09	5	393,33	-	-	-	-	828,09
		2010	11	2.002,70	11	2.002,69	5	424,34	4	1.578,35	2	-	-	-	581,51

Halaman 17 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	13	17.931,93	17	17.812,08	3	6.894,32	4	7.817,81	10	3.099,95	-	-	6.894,32
		2012	58	70.330,24	77	58.499,59	-	-	-	-	77	58.499,59	-	-	-
		Jumlah	105	91.777,30	132	79.826,78	28	8.437,75	15	9.789,49	89	61.599,54	-	-	8.594,92
71	Perpustakaan Nasional	2008	10	82,00	21	82,00	21	82,00	-	-	-	-	-	-	82,00
		2009	5	458,08	7	458,08	3	-	1	-	3	458,08	-	-	-
		2010	11	1.535,53	21	1.535,53	20	1.535,53	1	-	-	-	-	-	1.535,53
		2011	5	47,61	8	47,61	8	47,61	-	-	-	-	-	-	47,61
		2012	6	112,84	8	82,81	2	82,81	-	-	6	-	-	-	82,81
		Jumlah	37	2.236,06	65	2.206,03	54	1.747,95	2	-	9	458,08	-	-	1.747,95
72	Kementerian Keuangan	2008	137	136.835,33	271	18.253,55	206	18.172,30	60	81,25	4	-	1	-	2.501,73
		2009	286	660.956,87	490	595.146,70	372	389.085,72	102	203.685,78	14	-	2	2.375,20	1.503,27
				USD 25,200.00	-	-		-		-		-		-	-
		2010	553	5.383.591,20	1.064	5.340.809,34	718	2.396.556,24	251	2.806.094,73	95	138.158,37	-	-	1.852.537,85
				-	-	-		-		-		-		-	-
		2011	516	6.141.951,21	1.261	4.711.848,87	232	2.590.628,27	108	2.083.941,73	921	37.273,60	-	5,27	1.667.320,54
				USD 12.59	-	USD 12.59		USD 12.59		-		-		-	-
		2012	1	265,12	1	265,12	-	131,93	1	133,19	-	-	-	-	131,93
		Jumlah	1.493	12.323.599,73	3.087	10.666.323,58	1.528	5.394.574,46	522	5.093.936,68	1.034	175.431,97	3	2.380,47	3.523.995,32
				USD 25,212.59	-	USD 12.59	-	USD 12.59	-	-	-	-	-	-	-
73	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	2008	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	733,68	15	733,68	12	558,68	2	-	1	175,00	-	-	335,30
		2010	8	492,20	11	492,20	10	492,20	1	-	-	-	-	-	456,70
		2011	14	293,59	22	289,29	11	3,59	2	-	9	285,70	-	-	3,59
		2012	11	385,22	13	5,80	8	5,80	5	-	-	-	-	-	12,86
		Jumlah	46	1.904,69	65	1.520,97	45	1.060,27	10	-	10	460,70	-	-	808,45
74	BPKP	2008	6	46,00	6	46,00	6	46,00	-	-	-	-	-	-	46,00
		2009	9	72,19	12	72,19	11	72,19	1	-	-	-	-	-	72,19
		2010	17	953,57	29	617,38	22	615,26	6	2,12	1	-	-	-	615,26
		2011	16	356,34	19	356,34	10	251,91	9	104,43	-	-	-	-	251,91
		2012	11	37,76	18	37,76	-	37,76	2	-	16	-	-	-	37,76
		Jumlah	59	1.465,86	84	1.129,67	49	1.023,12	18	106,55	17	-	-	-	1.023,12

Halaman 18 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	BPS	2008	7	3.012,55	13	865,15	12	865,15	1	-	-	-	-	-	865,15
		2009	16	552,14	22	552,13	16	180,39	6	370,44	-	-	-	1,30	47,53
		2010	9	103,47	15	103,47	14	103,47	1	-	-	-	-	-	103,47
		2011	31	6.382,62	60	917,79	25	-	9	399,52	26	518,27	-	-	63,70
		2012	12	1.624,11	23	1.624,11	-	-	1	35,95	22	1.588,16	-	-	7,08
		Jumlah	75	11.674,89	133	4.062,65	67	1.149,01	18	805,91	48	2.106,43	-	1,30	1.086,93
76	Kemenko Perekonomian	2008	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	41,25	2	41,25	2	41,25	-	-	-	-	-	-	41,25
		2010	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	40,91	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	82,16	11	41,25	10	41,25	1	-	-	-	-	-	41,25
77	BPK	2008	14	13,11	15	13,11	15	13,11	-	-	-	-	-	-	9,49
		2009	24	-	25	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010	20	71,30	28	71,30	26	71,30	2	-	-	-	-	-	71,32
		2011	12	-	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	70	84,41	85	84,41	82	84,41	3	-	-	-	-	-	80,81
78	Bank Indonesia	2008	11	94.020,70	18	94.020,70	10	919,71	8	93.100,99	-	-	-	-	919,71
		2009	12	2.847,94	21	2.847,94	13	14,00	8	2.833,94	-	-	-	-	14,00
		2010	13	598.401,27	21	598.401,27	8	69.220,60	13	529.180,67	-	-	-	-	95.845,48
		2011	13	1.676,71	29	1.676,71	16	459,58	13	1.217,13	-	-	-	-	459,58
		2012	10	24.256,13	20	24.256,13	-	-	-	-	20	24.256,13	-	-	-
		Jumlah	59	721.202,75	109	721.202,75	47	70.613,89	42	626.332,73	20	24.256,13	-	-	97.238,77
79	LPS	2008	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	11	199,50	14	199,50	4	-	10	199,50	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	199,50	39	199,50	28	-	11	199,50	-	-	-	-	-
80	BNP2TKI	2008	11	-	20	-	9	-	7	-	4	-	-	-	-
			-	USD 2,325.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	21	8.053,98	32	-	8	-	12	-	12	-	-	-	-

Halaman 19 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	11	593,44	17	336,84	10	336,84	-	-	7	-	-	-	336,84
		2011	10	676,88	13	575,02	6	237,75	5	337,27	2	-	-	-	237,75
		2012	14	1.539,29	38	1.077,70	2	67,98	34	1.009,72	2	-	-	-	25,76
		Jumlah	67	10.863,59	120	1.989,56	35	642,57	58	1.346,99	27	-	-	-	600,35
			-	USD 2,325.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	BPLS	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	266,89	19	266,89	19	266,89	-	-	-	-	-	-	266,89
		2010	5	128,68	9	2,06	8	2,06	1	-	-	-	-	-	128,68
		2011	4	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	17,99	10	17,99	-	-	-	-	10	17,99	-	-	-
		Jumlah	27	413,56	44	286,94	33	268,95	1	-	10	17,99	-	-	395,57
82	LPP TVRI	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	56.570,38	12	53.598,29	3	17.710,41	9	35.887,88	-	-	-	-	17.710,41
		2010	15	326,04	20	326,02	6	74,05	11	123,43	3	128,54	-	-	74,05
		2011	21	66.197,07	42	66.197,05	7	1.333,06	22	2.275,04	13	62.588,95	-	-	1.333,06
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	46	123.093,49	74	120.121,36	16	19.117,52	42	38.286,35	16	62.717,49	-	-	19.117,52
83	LPP RRI	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	679,74	32	557,84	17	46,95	13	510,89	2	-	-	-	46,95
		2011	14	15.082,43	51	10.099,55	6	752,69	12	2.413,39	33	6.933,47	-	-	93,61
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	15.762,17	83	10.657,39	23	799,64	25	2.924,28	35	6.933,47	-	-	140,56
84	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Otorita Batam)	2008	36	257.898,24	59	256.120,21	53	173.902,71	4	81.414,85	-	59,05	2	743,60	155.356,49
				USD 185.45	-	USD 185.45		USD 184.45		USD 1.00		-		-	USD 184.45
				SGD 349.95	-	SGD 349.95		SGD 217.79		-		SGD 132.16		-	SGD 217.79
		2009	13	10.534,34	18	17.670,17	15	9.609,27	3	8.060,90	-	-	-	-	4.638,82
		2010	37	4.220,15	67	3.917,36	60	3.052,54	4	864,82	1	-	2	-	3.027,41
		2011	49	130.841,10	88	57.965,94	77	4.068,13	10	53.897,81	-	-	1	-	4.068,13
				USD 17.75	-	USD 17.75		USD 17.75		-		-		-	USD 17.75
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	135	403.493,83	232	335.673,68	205	190.632,65	21	144.238,38	1	59,05	5	743,60	167.090,85
				USD 203.20		USD 203.20		USD 202.20		USD 1.00		-		-	USD 202.20
				SGD 349.95		SGD 349.95		SGD 217.79		-		SGD 132.16		-	SGD 217.79

Halaman20 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	BASARNAS	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	30.518,36	20	20.726,72	18	20.726,72	2	-	-	-	-	-	1.158,57
		2012	8	14.797,92	22	1.175,38	11	1.175,38	11	-	-	-	-	-	56,45
		Jumlah	19	45.316,28	42	21.902,10	29	21.902,10	13	-	-	-	-	-	1.215,02
86	KPPU	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	11,70	2	11,70	2	11,70	-	-	-	-	-	-	11,70
		2010	5	163,48	7	163,48	5	-	2	163,48	-	-	-	-	3,39
		2011	4	45,39	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	8	1.073,19	11	844,04	4	11,44	4	832,60	3	-	-	-	11,44
		Jumlah	19	1.293,76	26	1.019,22	16	23,14	7	996,08	3	-	-	-	26,53
87	BAWASLU	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	7	12.432,43	26	4.943,02	17	857,54	8	4.085,48	-	-	1	-	857,54
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	12.432,43	26	4.943,02	17	857,54	8	4.085,48	-	-	1	-	857,54
88	Ombudsman RI	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		Jumlah	3	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
89	BNPP	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	20	16.140,99	59	14.234,47	-	3.638,59	3	5.656,85	56	4.939,03	-	-	3.638,59
		Jumlah	20	16.140,99	59	14.234,47	-	3.638,59	3	5.656,85	56	4.939,03	-	-	3.638,59
90	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah Pusat (LKPP)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 21 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	9	-	24	-	19	-	5	-	-	-	-	-	377,30
		2012	7	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		Jumlah	16	-	36	-	19	-	5	-	12	-	-	-	377,30
91	ETESP	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
92	STAR SDP	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	4,39	5	4,39	5	4,39	-	-	-	-	-	-	4,39
		2011	8	104,19	8	104,18	6	46,74	2	57,44	-	-	-	-	46,74
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	108,58	13	108,57	11	51,13	2	57,44	-	-	-	-	51,13
93	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	2.180,46	31	1.589,52	21	194,59	9	114,32	1	1.280,61	-	-	194,59
		Jumlah	10	2.180,46	31	1.589,52	21	194,59	9	114,32	1	1.280,61	-	-	194,59
		TOTAL	**11.863**	**53.124.632,43**	**22.163**	**34.363.516,95**	**11.890**	**9.263.793,09**	**4.784**	**11.135.252,88**	**5.456**	**13.828.493,87**	**33**	**135.977,11**	**6.850.880,94**
				USD 490,324.96		**USD 416,499.72**		**USD 42,946.63**		**USD 78,180.11**		**USD 295,372.98**		**-**	**USD 84,169.70**
				EUR 47.37		**EUR 11.58**		**EUR 11.58**		**-**		**-**		**-**	**EUR 12.18**
				JPY 267,381.23		**JPY 150,835.50**		**JPY 150,835.50**		**-**		**-**		**-**	**-**
				SAR 1.502.90		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**
				THB 25.00		**THB 25.00**		**-**		**-**		**THB 25.00**		**-**	**-**
				SGD 350.19		**SGD 350.19**		**SGD 217.79**		**SGD 0.24**		**SGD 132.16**		**-**	**SGD 217.79**
				-		**RON 2.94**		**-**		**-**		**RON 2.94**		**-**	**-**
				KRW 3,075.01		**KRW 3,075.01**		**-**		**KRW 3,075.01**		**-**		**-**	**-**

Halaman 1 - Lampiran 2

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Prov. Aceh	2008	43	26.416,17	97	26.314,17	73	7.286,46	24	19.027,71	-	-	-	-	7.280,18
		2009	74	850.306,75	200	44.100,07	114	1.964,39	51	40.196,14	35	1.939,54	-	-	668,10
		2010	94	4.796.948,13	237	191.443,67	44	3.054,40	31	36,24	162	188.353,03	-	-	2.627,15
		2011	70	77.059,87	254	26.952,53	64	-	132	239,53	58	26.713,00	-	-	239,53
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	281	5.750.730,92	788	288.810,44	295	12.305,25	238	59.499,62	255	217.005,57	-	-	10.814,96
2	Kab. Aceh Barat	2008	21	7.805,09	45	6.628,75	27	-	14	6.354,50	4	274,25	-	-	-
		2009	15	35.878,14	35	10.901,46	4	-	4	9.918,79	27	982,67	-	-	-
		2010	10	6.721,14	30	6.721,14	-	-	12	6.721,14	18	-	-	-	-
		2011	19	22.293,08	57	6.937,69	-	-	34	4.558,52	23	2.379,17	-	-	-
		2012	17	4.187,15	50	4.187,15	-	-	-	-	50	4.187,15	-	-	-
		Jumlah	82	76.884,60	217	35.376,19	31	-	64	27.552,95	122	7.823,24	-	-	-
3	Kab. Aceh Barat Daya	2008	12	3.891,31	22	3.891,30	20	3.244,87	2	646,43	-	-	-	-	3.244,87
		2009	14	10.857,30	42	5.167,19	-	-	1	11,20	41	5.155,99	-	-	-
		2010	23	9.374,16	103	7.810,52	4	62,31	15	1.441,94	84	6.306,27	-	-	62,31
		2011	18	11.729,81	48	9.027,26	-	-	-	-	48	9.027,26	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	67	35.852,58	215	25.896,27	24	3.307,18	18	2.099,57	173	20.489,52	-	-	3.307,18
4	Kab. Aceh Besar	2008	26	4.058,69	55	3.427,52	48	-	7	2.572,71	-	854,81	-	-	946,25
		2009	18	22.680,49	45	501,15	41	145,20	2	256,50	2	99,45	-	-	626,81
		2010	21	4.011,86	43	4.011,85	30	523,01	13	3.488,84	-	-	-	-	523,01
		2011	24	2.911,74	56	2.864,83	23	1.468,20	8	136,51	25	1.260,12	-	-	-
		2012	15	33.976,99	44	2.247,64	-	-	-	-	44	2.247,64	-	-	-
		Jumlah	104	67.639,77	243	13.052,99	142	2.136,41	30	6.454,56	71	4.462,02	-	-	2.096,07

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Kab. Aceh Jaya	2008	10	835,78	20	835,77	13	761,71	4	74,06	3	-	-	-	-
		2009	21	22.488,44	48	4.262,17	30	744,22	13	3.517,95	5	-	-	-	57,47
		2010	24	9.254,50	48	1.708,44	19	716,68	4	743,17	25	248,59	-	-	50,14
		2011	19	13.891,83	50	2.353,42	-	23,77	2	1.017,29	48	1.312,36	-	-	-
		2012	13	4.579,63	26	1.273,49	-	-	-	-	26	1.273,49	-	-	-
		Jumlah	87	51.050,18	192	10.433,29	62	2.246,38	23	5.352,47	107	2.834,44	-	-	107,61
6	Kab. Aceh Selatan	2008	21	23.961,03	62	23.961,02	50	16.932,16	12	7.028,86	-	-	-	-	16.711,04
		2009	19	42.354,47	44	30.108,16	23	12.574,50	14	17.419,81	7	113,85	-	-	12.539,74
		2010	20	4.988,92	54	4.042,38	39	1.230,92	14	2.811,46	1	-	-	-	1.230,92
		2011	20	17.124,96	59	966,41	-	255,36	-	-	59	711,05	-	-	255,36
		2012	11	1.709,52	24	1.709,52	-	-	-	-	24	1.709,52	-	-	-
		Jumlah	91	90.138,90	243	60.787,49	112	30.992,94	40	27.260,13	91	2.534,42	-	-	30.737,06
7	Kab. Aceh Singkil	2008	11	1.593,37	34	1.496,08	29	660,23	2	162,98	3	672,87	-	-	660,23
		2009	13	1.898,16	34	1.282,61	22	1.078,88	5	179,95	7	23,78	-	-	180,39
		2010	17	20.447,79	63	1.033,10	48	893,86	9	139,24	6	-	-	-	209,22
		2011	23	21.580,77	68	7.690,84	-	-	-	-	68	7.690,84	-	-	-
		2012	15	23.976,00	41	564,28	-	-	-	-	41	564,28	-	-	-
		Jumlah	79	69.496,09	240	12.066,91	99	2.632,97	16	482,17	125	8.951,77	-	-	1.049,84
8	Kab. Aceh Tamiang	2008	22	16.815,50	41	16.815,49	35	14.301,75	4	412,19	2	2.101,55	-	-	8.015,00
		2009	25	21.956,82	71	8.279,27	56	4.798,78	11	3.265,08	4	215,41	-	-	284,57
		2010	14	1.485,31	52	394,96	40	186,36	9	14,50	3	194,10	-	-	96,36
		2011	24	24.250,03	67	2.457,69	25	-	2	1.994,23	40	463,46	-	-	-
		2012	16	2.200,02	47	2.200,02	-	-	-	-	47	2.200,02	-	-	-
		Jumlah	101	66.707,68	278	30.147,43	156	19.286,89	26	5.686,00	96	5.174,54	-	-	8.395,93
9	Kab. Aceh Tengah	2008	11	128,39	18	64,18	17	50,73	1	13,45	-	-	-	-	50,73
		2009	14	2.120,92	34	1.666,66	30	448,62	4	1.218,04	-	-	-	-	448,62
		2010	22	28.863,21	53	1.766,26	12	50,13	17	938,68	24	777,45	-	-	127,85

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	16	40.208,43	38	10.248,78	27	537,02	10	256,97	1	9.454,79	-	-	537,02
		2012	17	2.333,82	46	2.333,82	-	-	-	-	46	2.333,82	-	-	-
		Jumlah	80	73.654,77	189	16.079,70	86	1.086,50	32	2.427,14	71	12.566,06	-	-	1.164,22
10	Kab. Aceh Tenggara	2008	37	20.064,38	60	13.286,05	48	10.763,46	10	2.447,89	2	74,70	-	-	292,06
		2009	15	47.358,61	32	33.643,01	27	17.544,23	5	16.098,78	-	-	-	-	9.039,20
		2010	15	25.502,92	33	14.327,88	27	9.432,67	4	4.895,21	2	-	-	-	454,47
		2011	12	30.051,75	36	7.547,02	-	-	-	-	36	7.547,02	-	-	-
		2012	24	9.608,64	66	7.906,56	-	-	-	-	66	7.906,56	-	-	-
		Jumlah	103	132.586,30	227	76.710,52	102	37.740,36	19	23.441,88	106	15.528,28	-	-	9.785,73
11	Kab. Aceh Timur	2008	14	9.788,19	22	8.953,78	19	7.291,40	1	1.662,38	2	-	-	-	6.851,51
		2009	26	77.127,26	72	6.374,23	35	871,56	21	3.721,57	16	1.781,10	-	-	869,47
		2010	25	14.693,96	59	1.482,27	26	37,50	11	864,95	22	579,82	-	-	-
		2011	19	40.065,09	44	6.579,46	-	-	-	-	44	6.579,46	-	-	-
		2012	12	632,99	23	632,99	-	-	-	-	23	632,99	-	-	-
		Jumlah	96	142.307,49	220	24.022,73	80	8.200,46	33	6.248,90	107	9.573,37	-	-	7.720,98
12	Kab. Aceh Utara	2008	15	100,00	29	100,00	27	-	2	100,00	-	-	-	-	-
		2009	23	664.878,34	56	225.656,06	41	5.572,06	9	219.981,74	6	102,26	-	-	101,80
		2010	59	543.962,50	117	13.143,01	82	1.840,97	19	6.983,53	16	4.318,51	-	-	-
		2011	21	312.942,45	49	571,50	-	-	-	-	49	571,50	-	-	-
		2012	12	16.721,03	23	11.153,42	-	-	-	-	23	11.153,42	-	-	-
		Jumlah	130	1.538.604,32	274	250.623,99	150	7.413,03	30	227.065,27	94	16.145,69	-	-	101,80
13	Kab. Bener Meriah	2008	10	199,77	15	199,77	12	-	3	199,77	-	-	-	-	-
		2009	20	43.106,89	54	2.329,46	27	-	20	174,31	7	2.155,15	-	-	-
		2010	15	23.142,05	36	321,43	27	142,94	5	141,35	4	37,14	-	-	142,94
		2011	31	4.240,81	74	4.240,81	-	-	1	568,12	73	3.672,69	-	-	-
		2012	12	10.346,10	24	552,04	-	-	-	-	24	552,04	-	-	-
		Jumlah	88	81.035,62	203	7.643,51	66	142,94	29	1.083,55	108	6.417,02	-	-	142,94

Halaman 4 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Kab. Bireuen	2008	14	10.802,46	36	10.802,46	23	-	8	10.802,46	5	-	-	-	-
		2009	21	42.645,53	53	42.178,02	23	92,93	13	42.009,73	17	75,36	-	-	92,93
		2010	11	11.399,67	28	2.912,88	-	467,11	1	64,45	27	2.381,32	-	-	467,11
		2011	27	72.867,86	74	5.374,19	-	-	-	-	74	5.374,19	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	73	137.715,52	191	61.267,55	46	560,04	22	52.876,64	123	7.830,87	-	-	560,04
15	Kab. Gayo Lues	2008	13	4.755,71	22	4.755,71	17	3.129,87	5	1.625,84	-	-	-	-	2.229,26
		2009	18	11.210,52	48	512,16	42	33,28	4	478,88	2	-	-	-	33,28
		2010	21	2.992,13	42	2.545,95	26	260,13	7	79,48	9	2.206,34	-	-	260,13
		2011	25	4.030,46	58	2.922,48	27	253,88	10	2.403,48	21	265,12	-	-	253,88
		2012	13	2.925,40	25	1.541,80	-	-	-	-	25	1.541,80	-	-	-
		Jumlah	90	25.914,22	195	12.278,10	112	3.677,16	26	4.587,68	57	4.013,26	-	-	2.776,55
16	Kab. Nagan Raya	2008	18	897,43	36	897,43	32	897,43	2	-	2	-	-	-	897,43
		2009	11	18.391,67	25	441,49	24	309,45	1	132,04	-	-	-	-	309,45
		2010	13	6.298,69	34	518,66	29	462,02	3	37,65	2	18,99	-	-	462,02
		2011	24	4.562,05	69	3.350,16	31	229,58	3	299,89	35	2.820,69	-	-	77,63
		2012	9	101,04	30	101,04	-	-	-	-	30	101,04	-	-	-
		Jumlah	75	30.250,88	194	5.308,78	116	1.898,48	9	469,58	69	2.940,72	-	-	1.746,53
17	Kab. Pidie	2008	19	997,89	38	997,88	11	39,15	23	958,73	4	-	-	-	39,15
		2009	15	1.728,17	31	1.728,16	15	0,66	11	269,55	5	1.457,95	-	-	0,66
		2010	11	1.634,17	30	1.634,17	17	-	13	1.634,17	-	-	-	-	-
		2011	38	41.980,16	95	41,28	-	-	-	-	95	41,28	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	83	46.340,39	194	4.401,49	43	39,81	47	2.862,45	104	1.499,23	-	-	39,81
18	Kab. Pidie Jaya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	27	1.771,93	59	1.771,93	37	310,17	17	1.461,76	5	-	-	-	-
		2010	14	817,55	44	648,59	3	36,07	24	592,12	17	20,40	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	26	4.342,41	83	4.342,41	5	-	31	147,40	47	4.195,01	-	-	-
		2012	15	7.086,28	46	1.105,34	-	-	-	-	46	1.105,34	-	-	-
		Jumlah	82	14.018,17	232	7.868,27	45	346,24	72	2.201,28	115	5.320,75	-	-	-
19	Kab. Simeulue	2008	15	23.382,66	36	5.028,86	33	5.028,86	2	-	1	-	-	-	5.028,86
		2009	21	21.668,02	63	2.018,07	45	10,20	17	2.007,87	1	-	-	-	10,20
		2010	12	22.963,50	19	3.636,57	12	2.200,45	7	1.436,12	-	-	-	-	2.200,45
		2011	36	70.352,02	116	4.189,29	-	-	-	-	116	4.189,29	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	84	138.366,20	234	14.872,79	90	7.239,51	26	3.443,99	118	4.189,29	-	-	7.239,51
20	Kota Banda Aceh	2008	13	5.302,25	27	5.302,23	22	5.298,97	3	1,63	2	1,63	-	-	298,97
		2009	36	5.169,90	73	5.169,89	61	430,27	11	4.700,65	1	38,97	-	-	390,51
		2010	10	1.254,58	22	1.031,42	18	86,66	3	944,76	1	-	-	-	86,66
		2011	19	7.257,04	51	5,33	45	5,33	5	-	1	-	-	-	5,33
		2012	12	9.028,21	29	681,73	-	-	-	-	29	681,73	-	-	-
		Jumlah	90	28.011,98	202	12.190,60	146	5.821,23	22	5.647,04	34	722,33	-	-	781,47
21	Kota Langsa	2008	12	1.198,27	29	1.198,27	22	1.135,77	2	62,50	5	-	-	-	1.135,77
		2009	11	3.860,76	19	2.510,69	13	381,26	4	2.097,39	2	32,04	-	-	381,26
		2010	11	6.634,04	33	569,25	29	-	-	-	4	569,25	-	-	-
		2011	13	35.717,23	36	8.590,91	-	-	-	-	36	8.590,91	-	-	-
		2012	15	93,99	43	93,99	1	22,01	-	-	42	71,98	-	-	22,01
		Jumlah	62	47.504,29	160	12.963,11	65	1.539,04	6	2.159,89	89	9.264,18	-	-	1.539,04
22	Kota Lhokseumawe	2008	13	143,61	30	143,61	10	-	20	143,61	-	-	-	-	-
		2009	23	2.392,02	55	930,10	23	272,69	21	273,77	11	383,64	-	-	155,99
		2010	12	-	29	-	6	-	9	-	14	-	-	-	-
		2011	27	4.145,66	84	3.545,10	5	-	25	3.057,18	54	487,92	-	-	-
		2012	13	3.314,53	29	3.689,26	-	-	-	-	29	3.689,26	-	-	-
		Jumlah	88	9.995,82	227	8.308,07	44	272,69	75	3.474,56	108	4.560,82	-	-	155,99

Halaman 6 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	Kota Sabang	2008	27	3.708,65	52	2.504,79	46	26,46	6	2.478,33	-	-	-	-	11,90
		2009	10	1.581,40	21	1.354,40	18	1.354,40	2	-	1	-	-	-	1.354,40
		2010	21	28.803,58	42	200,49	18	40,54	5	140,78	19	19,17	-	-	40,54
		2011	13	66,24	28	66,24	11	15,01	12	46,23	5	5,00	-	-	15,01
		2012	15	366,23	44	366,23	-	-	-	-	44	366,23	-	-	230,99
				SGD 3,57		SGD 3,57						SGD 3,57			
		Jumlah	86	34.526,10	187	4.492,15	93	1.436,41	25	2.665,34	69	390,40	-	-	1.652,84
				SGD 3,57		SGD 3,57						SGD 3,57			
24	Kota Subulussalam	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	24	13.838,75	74	10.377,93	25	-	15	8.826,29	34	1.551,64	-	-	-
		2010	17	5.297,81	50	1.030,54	5	21,39	6	48,75	39	960,40	-	-	21,39
		2011	29	35.573,85	71	491,84	-	-	-	-	71	491,84	-	-	-
		2012	16	1.622,81	49	1.090,54	-	-	-	-	49	1.090,54	-	-	-
		Jumlah	86	56.333,22	244	12.990,85	30	21,39	21	8.875,04	193	4.094,42	-	-	21,39
25	Prov. Sumatera Utara	2008	42	12.437,18	96	11.248,45	38	219,02	27	10.907,68	31	121,75	-	-	219,02
		2009	46	61.052,49	113	47.246,87	47	2.960,94	54	37.296,18	12	6.989,75	-	-	2.960,94
		2010	28	348.956,69	76	319.355,33	32	5.294,16	29	148.035,62	15	166.025,55	-	-	5.294,16
		2011	52	44.149,12	122	40.697,11	26	3.709,47	23	9.160,46	73	27.827,18	-	-	3.709,47
		2012	19	77.754,60	52	29.141,71	-	-	-	-	52	29.141,71	-	-	-
		Jumlah	187	544.350,08	459	447.689,47	143	12.183,59	133	205.399,94	183	230.105,94	-	-	12.183,59
26	Kab. Asahan	2008	35	10.587,33	94	10.571,81	70	3.027,05	22	7.544,76	2	-	-	-	3.027,05
		2009	38	487,86	91	487,86	80	377,75	9	110,11	2	-	-	-	377,75
		2010	32	11.041,48	74	5.806,37	33	539,16	17	4.061,42	24	1.205,79	-	-	539,16
		2011	16	2.109,55	36	2.109,55	1	5,00	1	191,25	34	1.913,30	-	-	5,00
		2012	17	4.974,01	43	5.070,63	28	31,50	9	4.677,24	6	361,89	-	-	31,50
		Jumlah	138	29.200,23	338	24.046,22	212	3.980,46	58	16.584,78	68	3.480,98	-	-	3.980,46

Halaman 7 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	Kab. Batubara	2008	7	96,22	16	96,21	7	58,74	3	14,09	6	23,38	-	-	58,74
		2009	20	41.857,71	55	41.857,71	34	657,63	21	41.200,08	-	-	-	-	657,63
		2010	17	24.028,77	52	24.028,77	25	423,47	25	23.605,30	2	-	-	-	423,47
		2011	25	84.823,55	57	83.164,39	-	-	-	-	57	83.164,39	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	69	150.806,25	180	149.147,08	66	1.139,84	49	64.819,47	65	83.187,77	-	-	1.139,84
28	Kab. Dairi	2008	22	10.384,89	57	1.905,13	33	107,41	9	1.690,99	15	106,73	-	-	107,41
		2009	14	3.056,11	40	3.056,10	27	475,45	12	2.185,65	1	395,00	-	-	475,45
		2010	25	936,26	68	606,61	2	337,18	23	269,43	43	-	-	-	337,18
		2011	16	3.464,24	36	2.391,27	14	145,69	16	1.384,08	6	861,50	-	-	145,69
		2012	12	638,42	29	621,96	-	-	-	-	29	621,96	-	-	-
		Jumlah	89	18.479,92	230	8.581,07	76	1.065,73	60	5.530,15	94	1.985,19	-	-	1.065,73
29	Kab. Deli Serdang	2008	41	17.721,76	84	3.855,07	56	44,65	13	3.203,20	15	607,22	-	-	44,65
		2009	25	13.334,79	61	6.723,92	25	616,08	14	2.852,51	22	3.255,33	-	-	616,08
		2010	25	81.159,86	62	2.731,15	39	460,60	19	1.963,65	4	306,90	-	-	460,60
		2011	22	3.841,83	44	3.841,83	-	-	-	-	44	3.841,83	-	-	-
		2012	11	58,18	19	47,78	-	-	-	-	19	47,78	-	-	-
		Jumlah	124	116.116,42	270	17.199,75	120	1.121,33	46	8.019,36	104	8.059,06	-	-	1.121,33
30	Kab. Humbang Hasundutan	2008	15	770,52	35	770,51	24	255,51	11	515,00	-	-	-	-	255,51
		2009	19	9.691,50	43	7.334,82	31	263,13	5	2.858,15	7	4.213,54	-	-	263,13
		2010	15	11.754,53	31	8.576,10	3	26,29	3	117,14	25	8.432,67	-	-	26,29
		2011	19	1.284,24	54	1.284,23	2	39,16	5	68,95	47	1.176,12	-	-	54,13
		2012	10	3.453,03	18	685,63	-	-	6	685,63	12	-	-	-	-
		Jumlah	78	26.953,82	181	18.651,29	60	584,09	30	4.244,87	91	13.822,33	-	-	599,06
31	Kab. Karo	2008	11	658,60	24	249,67	16	124,67	6	125,00	2	-	-	-	124,67
		2009	12	1.083,23	32	318,16	4	314,42	25	3,74	3	-	-	-	314,42
		2010	16	5.607,00	29	3.218,84	6	228,30	16	2.990,54	7	-	-	-	228,30

Halaman 8 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	26	2.610,55	76	2.330,12	38	1.239,04	24	748,47	14	342,61	-	-	1.239,04
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	65	9.959,38	161	6.116,79	64	1.906,43	71	3.867,75	26	342,61	-	-	1.906,43
32	Kab. Labuhanbatu	2008	25	4.130,61	57	4.130,60	51	833,86	6	3.296,74	-	-	-	-	833,86
		2009	25	5.066,96	66	5.066,95	53	477,52	13	4.589,43	-	-	-	-	477,52
		2010	11	584,15	26	584,14	18	242,67	8	341,47	-	-	-	-	242,67
		2011	23	6.492,99	58	6.492,98	40	-	16	6.383,65	2	109,33	-	-	-
		2012	10	68.615,84	22	600,20	-	-	-	-	22	600,20	-	-	-
		Jumlah	94	84.890,55	229	16.874,87	162	1.554,05	43	14.611,29	24	709,53	-	-	1.554,05
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	3.275,45	37	3.275,44	4	30,32	9	211,95	24	3.033,17	-	-	30,32
		2012	11	5.041,15	25	4.380,15	-	-	-	-	25	4.380,15	-	-	-
		Jumlah	26	8.316,60	62	7.655,59	4	30,32	9	211,95	49	7.413,32	-	-	30,32
34	Kab. Labuhanbatu Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	2.670,85	49	2.670,84	5	596,83	20	1.965,65	24	108,36	-	-	596,83
		2012	16	1.878,64	42	1.878,55	-	-	-	-	42	1.878,55	-	-	-
		Jumlah	29	4.549,49	91	4.549,39	5	596,83	20	1.965,65	66	1.986,91	-	-	596,83
35	Kab. Langkat	2008	13	116.593,52	36	4.579,71	13	2.335,83	19	2.243,88	4	-	-	-	2.335,83
		2009	20	113.794,59	54	109.569,33	33	43.613,12	21	65.956,21	-	-	-	-	43.613,12
		2010	23	12.764,17	56	6.221,89	18	2.938,96	36	3.282,93	2	-	-	-	2.938,96
		2011	33	8.256,02	78	6.847,50	3	784,75	22	2.138,06	53	3.924,69	-	-	784,75
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	89	251.408,30	224	127.218,43	67	49.672,66	98	73.621,08	59	3.924,69	-	-	49.672,66

Halaman 9 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	Kab. Mandailing Natal	2008	26	2.876,99	53	2.876,99	18	848,70	25	1.879,39	10	148,90	-	-	848,70
		2009	22	2.104,67	52	2.104,66	18	293,44	7	1.094,81	27	716,41	-	-	293,44
		2010	32	1.280,09	96	1.280,09	26	391,49	37	851,04	33	37,56	-	-	391,49
		2011	19	1.659,20	40	1.659,19	3	761,26	25	541,59	12	356,34	-	-	761,26
		2012	11	14.713,77	23	426,14	-	-	-	-	23	426,14	-	-	-
		Jumlah	110	22.634,72	264	8.347,07	65	2.294,89	94	4.366,83	105	1.685,35	-	-	2.294,89
37	Kab. Nias	2008	16	7.382,80	46	7.486,09	25	298,57	17	7.187,52	4	-	-	-	298,57
		2009	20	19.983,85	67	14.452,32	39	3.297,08	21	6.883,37	7	4.271,87	-	-	3.297,08
		2010	13	3.078,86	34	141,42	23	76,92	9	64,50	2	-	-	-	76,92
		2011	14	768,32	31	768,32	15	-	15	768,32	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	63	31.213,83	178	22.848,15	102	3.672,57	62	14.903,71	14	4.271,87	-	-	3.672,57
38	Kab. Nias Barat	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	880,42	43	776,02	17	-	9	166,94	17	609,08	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	880,42	43	776,02	17	-	9	166,94	17	609,08	-	-	-
39	Kab. Nias Selatan	2008	16	20.617,69	38	20.617,67	1	3.675,35	2	10.699,73	35	6.242,59	-	-	3.675,35
		2009	17	3.242,83	48	3.242,83	1	104,18	-	-	47	3.138,65	-	-	104,18
		2010	15	685,34	45	685,33	2	199,64	1	7,71	42	477,98	-	-	199,64
		2011	17	2.658,15	55	2.658,14	22	191,31	24	2.360,16	9	106,67	-	-	191,31
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	65	27.204,01	186	27.203,97	26	4.170,48	27	13.067,60	133	9.965,89	-	-	4.170,48
40	Kab. Nias Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 10 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	19	10.835,07	60	10.835,07	-	-	-	-	60	10.835,07	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	19	10.835,07	60	10.835,07	-	-	-	-	60	10.835,07	-	-	-
41	Kab. Padang Lawas	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	343,09	20	343,09	12	84,72	7	258,37	1	-	-	-	84,72
		2010	20	6.231,29	53	1.831,53	-	-	2	-	51	1.831,53	-	-	-
		2011	15	233.543,26	33	2.339,99	-	-	-	-	33	2.339,99	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	44	240.117,64	106	4.514,61	12	84,72	9	258,37	85	4.171,52	-	-	84,72
42	Kab. Padang Lawas Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	6.867,61	18	6.867,61	10	187,88	4	6.621,38	4	58,35	-	-	187,88
		2010	20	4.763,11	52	4.763,10	32	80,14	14	3.442,72	6	1.240,24	-	-	80,14
		2011	19	6.178,96	54	6.178,96	25	-	27	6.178,96	2	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	50	17.809,68	124	17.809,67	67	268,02	45	16.243,06	12	1.298,59	-	-	268,02
43	Kab. Pakpak Bharat	2008	17	3.946,69	44	1.648,39	33	1.310,53	9	337,86	2	-	-	-	1.310,53
		2009	12	7.193,79	26	844,02	19	171,50	4	-	3	672,52	-	-	164,20
		2010	17	571.189,61	47	1.225,63	3	135,46	20	170,96	24	919,21	-	-	135,46
		2011	22	4.907,48	59	2.140,06	32	183,07	17	1.951,03	10	5,96	-	-	183,07
		2012	7	281,80	26	10,42	-	-	-	-	26	10,42	-	-	-
		Jumlah	75	587.519,37	202	5.868,52	87	1.800,56	50	2.459,85	65	1.608,11	-	-	1.793,26
44	Kab. Samosir	2008	23	4.607,36	49	3.310,55	14	444,66	25	2.235,41	10	630,48	-	-	444,66
		2009	14	3.084,02	35	649,75	-	63,65	19	586,10	16	-	-	-	63,65
		2010	28	5.297,82	67	4.238,24	1	456,23	28	3.645,39	38	136,62	-	-	456,23
		2011	11	1.416,54	47	674,33	1	61,15	1	-	45	613,18	-	-	61,15
		2012	9	380,25	27	380,25	1	-	1	-	25	380,25	-	-	-
		Jumlah	85	14.785,99	225	9.253,12	17	1.025,69	74	6.466,90	134	1.760,53	-	-	1.025,69

Halaman 11 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Kab. Serdang Bedagai	2008	19	3.901,29	53	2.733,48	34	482,66	19	2.250,82	-	-	-	-	482,66
		2009	29	14.914,14	74	693,51	32	13,37	42	680,14	-	-	-	-	13,37
		2010	17	11.984,37	38	2.046,74	19	169,27	19	1.877,47	-	-	-	-	169,27
				USD 144.00											
		2011	25	26.645,15	67	2.972,59	5	42,30	46	2.251,35	16	678,94	-	-	42,30
		2012	12	478,42	24	74,32	-	-	-	-	24	74,32	-	-	-
		Jumlah	102	57.923,37	256	8.520,64	90	707,60	126	7.059,78	40	753,26	-	-	707,60
				USD 144.00											
46	Kab. Simalungun	2008	47	37.399,75	105	2.169,25	8	586,51	24	991,21	73	591,53	-	-	586,51
		2009	17	5.144,43	53	3.009,69	3	18,79	20	39,26	30	2.951,64	-	-	18,79
		2010	28	58.606,70	66	2.476,40	11	56,11	29	2.047,97	26	372,32	-	-	56,11
		2011	25	29.857,14	66	27.588,01	6	132,64	50	27.455,37	10	-	-	-	132,64
		2012	14	2.532,22	29	2.235,20	1	102,59	5	535,07	23	1.597,54	-	-	102,59
		Jumlah	131	133.540,24	319	37.478,55	29	896,64	128	31.068,88	162	5.513,03	-	-	896,64
47	Kab. Tapanuli Selatan	2008	17	3.679,68	36	3.076,07	27	384,34	8	2.691,73	1	-	-	-	384,34
		2009	19	928,07	56	854,67	41	258,40	9	596,27	6	-	-	-	258,40
		2010	34	48.829,30	95	6.328,53	78	3.250,40	11	3.078,13	6	-	-	-	3.250,40
		2011	11	1.030,23	34	1.030,23	32	494,54	2	535,69	-	-	-	-	494,54
		2012	16	4.881,99	49	704,16	-	-	-	-	49	704,16	-	-	-
		Jumlah	97	59.349,27	270	11.993,66	178	4.387,68	30	6.901,82	62	704,16	-	-	4.387,68
48	Kab. Tapanuli Tengah	2008	35	4.541,41	71	3.888,87	50	1.888,92	11	991,16	10	1.008,79	-	-	1.888,92
		2009	16	2.663,19	37	355,79	27	198,82	6	156,97	4	-	-	-	198,82
		2010	20	1.194,90	54	1.194,90	27	174,47	24	1.020,43	3	-	-	-	174,47
		2011	11	26.694,28	34	1.422,34	1	-	-	-	33	1.422,34	-	-	-
		2012	13	5.126,94	35	2.665,48	-	-	-	-	35	2.665,48	-	-	-
		Jumlah	95	40.220,72	231	9.527,38	105	2.262,21	41	2.168,56	85	5.096,61	-	-	2.262,21

Halaman 12 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
49	Kab. Tapanuli Utara	2008	21	810,59	57	711,86	1	672,97	7	10,50	49	28,39	-	-	672,97
		2009	42	5.766,26	65	5.688,28	34	160,28	25	5.528,00	6	-	-	-	160,28
		2010	16	4.289,40	39	1.033,48	10	17,49	11	577,41	18	438,58	-	-	17,49
		2011	17	860,24	40	628,28	17	-	18	613,28	5	15,00	-	-	-
		2012	13	1.525,85	23	1.100,33	-	368,20	1	-	22	732,13	-	-	368,20
		Jumlah	109	13.252,34	224	9.162,23	62	1.218,94	62	6.729,19	100	1.214,10	-	-	1.218,94
50	Kab. Toba Samosir	2008	17	59.721,39	41	1.135,70	11	-	11	500,00	19	635,70	-	-	-
		2009	13	3.613,25	34	449,39	23	426,61	5	-	6	22,78	-	-	426,61
		2010	10	14.172,81	30	14.172,80	15	5.858,67	6	1.354,06	9	6.960,07	-	-	5.858,67
		2011	21	5.104,98	54	5.104,98	-	-	-	-	54	5.104,98	-	-	-
		2012	16	1.794,15	38	820,25	1	-	-	-	37	820,25	-	-	-
		Jumlah	77	84.406,58	197	21.683,12	50	6.285,28	22	1.854,06	125	13.543,78	-	-	6.285,28
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kota Binjai	2008	24	7.245,00	70	5.960,69	49	942,75	19	5.017,94	2	-	-	-	942,75
		2009	18	8.130,80	34	3.436,18	19	317,91	15	3.118,27	-	-	-	-	317,91
		2010	15	14.590,81	40	4.207,20	14	358,69	23	3.848,51	3	-	-	-	358,69
		2011	22	14.769,59	55	6.531,48	15	-	-	-	40	6.531,48	-	-	-
		2012	14	11.568,58	34	3.325,18	-	-	1	1,41	33	3.323,77	-	-	-
		Jumlah	93	56.304,78	233	23.460,73	97	1.619,35	58	11.986,13	78	9.855,25	-	-	1.619,35
52	Kota Gunung Sitoli	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	206,06	34	206,06	8	-	26	206,06	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	206,06	34	206,06	8	-	26	206,06	-	-	-	-	-
53	Kota Medan	2008	72	56.701,13	224	30.434,74	131	20.970,59	87	9.464,15	6	-	-	-	20.970,59
				USD 41.78		USD 41.77		USD 35.71		USD 6.06					USD 35.71
		2009	54	49.580,15	109	42.637,73	61	18.814,72	42	23.823,01	6	-	-	-	18.814,72

Halaman 13 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	49	44.075,84	128	27.701,81	21	3.656,06	78	22.262,13	29	1.783,62	-	-	3.656,06
		2011	37	11.586,93	98	5.684,73	23	347,49	19	2.396,20	56	2.941,04	-	-	347,49
		2012	12	4.760,63	24	6.472,44	4	4.599,77	-	-	20	1.872,67	-	-	4.599,77
		Jumlah	224	166.704,68	583	112.931,45	240	48.388,63	226	57.945,49	117	6.597,33	-	-	48.388,63
				USD 41.78		USD 41.77		USD 35.71		USD 6.06					USD 35.71
54	Kota Padangsidimpuan	2008	25	21.486,22	63	2.082,70	42	129,42	21	1.953,28	-	-	-	-	129,42
		2009	17	9.487,14	41	8.015,62	34	161,26	7	7.854,36	-	-	-	-	161,26
		2010	20	3.125,05	55	2.959,60	50	134,15	5	2.825,45	-	-	-	-	134,15
		2011	19	4.699,03	53	877,30	40	1,44	10	875,86	3	-	-	-	1,44
		2012	16	2.195,80	54	2.195,80	-	-	-	-	54	2.195,80	-	-	-
		Jumlah	97	40.993,24	266	16.131,02	166	426,27	43	13.508,95	57	2.195,80	-	-	426,27
55	Kota Pematangsiantar	2008	56	37.699,14	145	10.533,79	65	135,41	72	10.398,38	8	-	-	-	135,41
		2009	25	41.024,27	61	1.511,01	20	148,77	39	589,27	2	772,97	-	-	148,77
		2010	26	21.841,39	94	15.547,17	53	-	40	15.547,17	1	-	-	-	-
		2011	22	3.945,16	67	2.790,16	45	-	12	-	10	2.790,16	-	-	-
		2012	11	1.549,81	25	832,87	-	-	-	-	25	832,87	-	-	-
		Jumlah	140	106.059,77	392	31.215,00	183	284,18	163	26.534,82	46	4.396,00	-	-	284,18
56	Kota Sibolga	2008	51	2.997,78	96	2.129,04	75	630,99	14	1.207,14	7	290,91	-	-	630,99
		2009	17	2.634,23	42	226,33	35	13,20	4	213,13	3	-	-	-	13,20
		2010	10	458,93	23	458,93	8	26,57	11	432,36	4	-	-	-	26,57
		2011	23	1.049,09	63	1.049,08	26	86,40	8	669,98	29	292,70	-	-	86,40
		2012	5	936,13	10	936,12	2	20,31	-	-	8	915,81	-	-	20,31
		Jumlah	106	8.076,16	234	4.799,50	146	777,47	37	2.522,61	51	1.499,42	-	-	777,47
57	Kota Tanjungbalai	2008	19	2.612,02	53	535,98	39	95,71	9	440,27	5	-	-	-	95,71
		2009	16	2.276,74	39	2.144,81	26	681,50	9	1.463,31	4	-	-	-	681,50
		2010	18	4.999,13	47	4.299,52	22	136,89	8	1.286,86	17	2.875,77	-	-	136,89

Halaman 14 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	18	5.460,68	35	224,60	12	-	6	224,60	17	-	-	-	-
		2012	15	4.130,98	30	380,08	-	-	1	-	29	380,08	-	-	-
		Jumlah	86	19.479,55	204	7.584,99	99	914,10	33	3.415,04	72	3.255,85	-	-	914,10
58	Kota Tebing Tinggi	2008	24	22.705,39	69	1.071,04	6	52,12	17	722,92	46	296,00	-	-	52,12
		2009	17	8.576,77	38	260,20	10	10,27	17	159,93	11	90,00	-	-	10,27
		2010	16	4.150,87	48	2.721,39	18	10,00	13	2.711,39	17	-	-	-	10,00
		2011	5	2.360,54	16	886,74	-	-	-	-	16	886,74	-	-	-
		2012	17	4.430,69	38	1.041,99	-	-	-	-	38	1.041,99	-	-	-
		Jumlah	79	42.224,26	209	5.981,36	34	72,39	47	3.594,24	128	2.314,73	-	-	72,39
59	Prov. Sumatera Barat	2008	74	337.425,79	166	19.425,05	123	2.284,50	37	16.447,73	6	692,82	-	-	2.284,50
		2009	22	32.249,16	73	31.452,49	54	31.440,77	18	11,72	1	-	-	-	31.440,77
		2010	109	7.618,91	266	5.128,43	219	3.068,39	45	2.060,04	2	-	-	-	3.068,39
		2011	46	22.353,66	136	7.511,24	62	419,90	31	7.091,34	43	-	-	-	419,90
		2012	39	37.357,13	105	12.305,54	-	461,65	5	135,47	100	11.708,42	-	-	461,65
		Jumlah	290	437.004,65	746	75.822,75	458	37.675,21	136	25.746,30	152	12.401,24	-	-	37.675,21
60	Kab. Agam	2008	36	3.633,01	87	662,64	47	150,52	26	512,12	14	-	-	-	150,52
		2009	28	9.216,73	62	3.735,66	45	2.906,41	15	829,25	2	-	-	-	2.906,41
		2010	34	2.041,09	71	640,11	14	2,45	45	637,66	12	-	-	-	2,45
		2011	25	10.558,17	62	8.176,56	8	3,95	31	143,57	23	8.029,04	-	-	3,95
		2012	15	9.137,19	36	6.314,69	-	-	-	-	36	6.314,69	-	-	-
		Jumlah	138	34.586,19	318	19.529,66	114	3.063,33	117	2.122,60	87	14.343,73	-	-	3.063,33
61	Kab. Dharmasraya	2008	27	3.786,94	70	3.365,46	9	730,40	54	2.179,74	7	455,32	-	-	730,40
		2009	43	12.811,15	129	4.686,76	32	2.022,89	76	2.019,97	21	643,90	-	-	2.022,89
		2010	38	805,97	110	785,99	15	329,93	68	447,48	27	8,58	-	-	329,93
		2011	19	4.047,88	44	3.118,84	5	52,16	28	3.066,68	11	-	-	-	52,16
		2012	18	2.481,64	58	2.481,63	-	1.139,36	1	346,11	57	996,16	-	-	1.139,36
		Jumlah	145	23.933,58	411	14.438,68	61	4.274,74	227	8.059,98	123	2.103,96	-	-	4.274,74

Halaman 15 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2008	28	1.717,24	76	248,86	44	-	12	-	20	248,86	-	-	-
		2009	27	7.739,03	81	2.428,59	49	211,63	16	1.307,64	16	909,32	-	-	211,63
		2010	27	3.264,17	64	2.825,76	2	586,02	58	2.239,74	4	-	-	-	586,02
		2011	34	4.636,79	93	1.481,83	7	49,13	46	429,31	40	1.003,39	-	-	49,13
		2012	19	4.896,93	38	4.855,63	-	-	-	-	38	4.855,63	-	-	-
		Jumlah	135	22.254,16	352	11.840,67	102	846,78	132	3.976,69	118	7.017,20	-	-	846,78
63	Kab. Lima Puluh Kota	2008	52	61.804,30	124	22.018,76	70	1.022,79	43	12.708,94	11	8.287,03	-	-	1.022,79
		2009	18	11.689,17	48	2.807,86	32	2.185,92	11	614,24	5	7,70	-	-	2.185,92
		2010	43	10.888,02	136	3.811,73	76	1.435,93	56	2.375,80	4	-	-	-	1.435,93
		2011	28	1.511,22	67	1.038,77	34	320,33	32	718,44	1	-	-	-	320,33
		2012	22	2.564,30	50	1.384,97	-	18,23	2	7,52	48	1.359,22	-	-	18,23
		Jumlah	163	88.457,01	425	31.062,09	212	4.983,20	144	16.424,94	69	9.653,95	-	-	4.983,20
64	Kab. Padang Pariaman	2008	26	42.887,72	54	21.288,74	36	18.417,00	14	2.871,74	4	-	-	-	18.417,00
		2009	35	29.471,24	74	4.033,55	47	93,59	23	3.939,96	4	-	-	-	93,59
		2010	20	2.601,68	60	508,92	20	243,91	34	265,01	6	-	-	-	243,91
		2011	47	35.616,83	139	5.236,30	13	4,19	46	4.450,91	80	781,20	-	-	4,19
		2012	21	2.815,75	56	1.525,04	-	15,16	1	-	55	1.509,88	-	-	15,16
		Jumlah	149	113.393,22	383	32.592,55	116	18.773,85	118	11.527,62	149	2.291,08	-	-	18.773,85
65	Kab. Pasaman	2008	28	9.496,32	52	3.548,39	32	138,55	19	3.409,84	1	-	-	-	138,55
		2009	28	4.364,81	86	1.357,14	38	-	47	1.357,14	1	-	-	-	-
		2010	52	10.828,11	130	6.452,96	24	-	99	6.433,70	7	19,26	-	-	-
		2011	15	1.541,04	41	683,28	15	633,43	25	49,85	1	-	-	-	633,43
		2012	19	5.070,54	49	3.675,57	-	94,37	-	-	49	3.581,20	-	-	94,37
		Jumlah	142	31.300,82	358	15.717,34	109	866,35	190	11.250,53	59	3.600,46	-	-	866,35
66	Kab. Pasaman Barat	2008	48	12.356,76	143	3.894,03	94	672,73	42	2.832,80	7	388,50	-	-	672,73
		2009	32	9.029,56	86	667,65	61	54,79	12	506,36	13	106,50	-	-	54,79
		2010	34	6.870,18	118	5.535,26	45	1.252,12	59	4.023,73	14	259,41	-	-	1.252,12

Halaman 16 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	24	11.470,66	66	1.182,57	33	148,57	28	1.034,00	5	-	-	-	148,57
		2012	23	11.299,79	66	6.142,27	1	62,41	2	684,46	63	5.395,40	-	-	62,41
		Jumlah	161	51.026,95	479	17.421,78	234	2.190,62	143	9.081,35	102	6.149,81	-	-	2.190,62
67	Kab. Pesisir Selatan	2008	40	10.379,28	98	8.482,55	80	5.642,52	16	2.840,03	2	-	-	-	5.642,52
		2009	20	3.360,82	51	779,79	43	687,99	7	91,80	1	-	-	-	687,99
		2010	25	2.914,63	72	2.852,42	33	1.752,42	38	1.100,00	1	-	-	-	1.752,42
		2011	32	1.469,38	100	564,92	53	377,97	15	45,90	32	141,05	-	-	377,97
		2012	20	9.562,31	52	7.311,40	-	20,52	2	75,11	50	7.215,77	-	-	20,52
		Jumlah	137	27.686,42	373	19.991,08	209	8.481,42	78	4.152,84	86	7.356,82	-	-	8.481,42
68	Kab. Sijunjung	2008	24	1.974,56	50	587,54	21	167,10	25	312,44	4	108,00	-	-	167,10
		2009	20	290,74	52	68,94	9	-	37	44,64	6	24,30	-	-	-
		2010	41	1.643,63	97	524,87	63	151,94	27	260,37	7	112,56	-	-	151,94
				USD 924.18		USD 924.18				USD 924.18					
		2011	22	5,94	60	5,94	10	5,94	47	-	3	-	-	-	5,94
		2012	22	2.604,37	66	706,26	-	62,72	1	19,77	65	623,77	-	-	62,72
		Jumlah	129	6.519,24	325	1.893,55	103	387,70	137	637,22	85	868,63	-	-	387,70
				USD 924.18		USD 924.18				USD 924.18					
69	Kab. Solok	2008	14	2.234,83	37	2.234,82	29	1.134,99	8	1.099,83	-	-	-	-	1.134,99
		2009	27	14.994,51	74	5.220,59	54	427,58	20	4.793,01	-	-	-	-	427,58
		2010	32	10.399,52	102	4.615,11	73	673,58	28	3.941,53	1	-	-	-	673,58
		2011	34	4.517,19	75	1.531,81	20	13,60	54	1.518,21	1	-	-	-	13,60
		2012	19	636,06	42	600,84	-	-	-	-	42	600,84	-	-	-
		Jumlah	126	32.782,11	330	14.203,17	176	2.249,75	110	11.352,58	44	600,84	-	-	2.249,75
70	Kab. Solok Selatan	2008	25	1.737,98	67	915,74	43	175,10	21	740,64	3	-	-	-	175,10
		2009	25	12.197,54	75	11.464,07	42	-	31	11.464,07	2	-	-	-	-
		2010	53	38.741,04	168	34.088,51	4	-	157	34.088,51	7	-	-	-	-

Halaman 17 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	27	27.917,67	77	1.345,35	1	-	56	1.345,35	20	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	130	80.594,23	387	47.813,67	90	175,10	265	47.638,57	32	-	-	-	175,10
71	Kab. Tanah Datar	2008	28	3.311,70	85	372,63	81	306,13	4	66,50	-	-	-	-	306,13
		2009	39	16.317,05	94	971,05	88	114,35	5	856,70	1	-	-	-	114,35
		2010	24	970,92	65	259,83	53	73,50	12	186,33	-	-	-	-	73,50
		2011	36	19.946,25	97	2.445,25	69	25,33	23	2.419,92	5	-	-	-	25,33
		2012	33	5.310,14	122	2.070,41	-	-	-	-	122	2.070,41	-	-	-
		Jumlah	160	45.856,06	463	6.119,17	291	519,31	44	3.529,45	128	2.070,41	-	-	519,31
72	Kota Bukittinggi	2008	28	12.385,09	64	419,78	41	-	19	419,78	4	-	-	-	-
		2009	24	814,28	66	97,00	42	2,50	20	94,50	4	-	-	-	2,50
		2010	60	8.539,96	164	7.527,64	99	2.299,12	63	5.228,52	2	-	-	-	2.299,12
		2011	24	1.311,62	58	331,18	13	-	14	-	31	331,18	-	-	-
		2012	19	3.048,58	51	1.090,72	-	-	-	-	51	1.090,72	-	-	-
		Jumlah	155	26.099,53	403	9.466,32	195	2.301,62	116	5.742,80	92	1.421,90	-	-	2.301,62
73	Kota Padang	2008	65	12.433,26	193	6.738,75	175	2.719,11	18	4.019,64	-	-	-	-	2.719,11
		2009	47	29.671,81	123	6.288,11	107	6.149,58	16	138,53	-	-	-	-	6.149,58
		2010	39	392,09	123	392,09	106	262,17	16	129,92	1	-	-	-	262,17
		2011	59	13.850,61	188	6.848,92	59	650,91	1	86,49	128	6.111,52	-	-	650,91
		2012	26	11.129,39	75	4.933,11	-	51,92	1	1.925,71	74	2.955,48	-	-	51,92
		Jumlah	236	67.477,16	702	25.200,98	447	9.833,69	52	6.300,29	203	9.067,00	-	-	9.833,69
74	Kota Padang Panjang	2008	21	1.201,01	59	734,76	59	734,76	-	-	-	-	-	-	734,76
		2009	20	5.414,89	46	287,03	45	287,03	1	-	-	-	-	-	243,30
		2010	44	5.008,89	112	1.567,73	101	373,70	10	1.194,03	1	-	-	-	373,70
		2011	21	360,10	58	282,52	52	248,29	6	34,23	-	-	-	-	248,29
		2012	25	2.649,24	77	669,74	-	603,25	2	-	75	66,49	-	-	603,25
		Jumlah	131	14.634,13	352	3.541,78	257	2.247,03	19	1.228,26	76	66,49	-	-	2.203,30

Halaman 18 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	Kota Pariaman	2008	23	4.150,50	51	1.894,11	34	-	16	1.894,11	1	-	-	-	-
		2009	33	8.427,43	81	3.907,39	44	9,02	34	3.898,37	3	-	-	-	9,02
		2010	21	3.985,41	55	835,48	43	-	6	787,93	6	47,55	-	-	-
		2011	29	22.243,09	75	1.404,10	10	-	27	819,24	38	584,86	-	-	-
		2012	13	533,84	34	304,43	-	-	-	-	34	304,43	-	-	-
		Jumlah	119	39.340,27	296	8.345,51	131	9,02	83	7.399,65	82	936,84	-	-	9,02
76	Kota Payakumbuh	2008	46	18.063,35	86	3.998,61	73	191,56	12	3.728,18	1	78,87	-	-	191,56
		2009	35	7.508,99	98	1.272,89	82	358,86	14	823,17	2	90,86	-	-	358,86
		2010	36	1.708,35	92	-	79	-	13	-	-	-	-	-	-
		2011	49	7.196,39	114	5.134,41	32	4.055,82	43	17,63	39	1.060,96	-	-	4.055,82
		2012	20	1.010,26	49	1.010,25	-	43,46	1	-	48	966,79	-	-	43,46
		Jumlah	186	35.487,34	439	11.416,16	266	4.649,70	83	4.568,98	90	2.197,48	-	-	4.649,70
77	Kota Sawahlunto	2008	22	3.430,29	46	2.362,04	24	1.715,70	13	646,34	9	-	-	-	1.715,70
		2009	37	21.865,86	103	15.332,94	56	2.413,49	27	12.908,67	20	10,78	-	-	2.413,49
		2010	29	30.358,50	87	27.970,10	48	4.179,29	32	23.790,81	7	-	-	-	4.179,29
		2011	32	4.647,22	95	4.093,30	35	3.549,98	11	-	49	543,32	-	-	3.549,98
		2012	22	3.490,71	79	3.129,19	-	739,18	1	-	78	2.390,01	-	-	739,18
		Jumlah	142	63.792,58	410	52.887,57	163	12.597,64	84	37.345,82	163	2.944,11	-	-	12.597,64
78	Kota Solok	2008	34	5.008,88	80	3.496,05	64	1.337,02	15	2.159,03	1	-	-	-	1.337,02
		2009	26	15.507,31	61	7.322,54	49	6.092,69	9	1.229,85	3	-	-	-	6.092,69
		2010	45	5.142,78	106	1.245,70	78	911,02	28	334,68	-	-	-	-	911,02
		2011	29	6.375,98	60	1.768,60	43	1.768,60	17	-	-	-	-	-	219,91
		2012	20	2.489,41	49	407,07	-	-	-	-	49	407,07	-	-	-
		Jumlah	154	34.524,36	356	14.239,96	234	10.109,33	69	3.723,56	53	407,07	-	-	8.560,64
79	Prov. Riau	2008	63	10.298,00	121	8.497,99	79	982,45	41	7.515,54	1	-	-	-	982,45
		2009	74	46.050,89	323	45.829,30	222	13.672,20	99	32.157,10	2	-	-	-	13.672,20
		2010	80	147.016,05	184	49.963,88	124	6.779,65	60	43.184,23	-	-	-	-	6.779,65

Halaman 19 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	91	54.988,12	227	34.886,50	108	13.993,31	78	20.681,94	41	211,25	-	-	13.993,31
		2012	52	225.526,77	108	219.549,04	1	-	1	-	106	219.549,04	-	-	465,62
		Jumlah	360	483.879,83	963	358.726,71	534	35.427,61	279	103.538,81	150	219.760,29	-	-	35.893,23
80	Kab. Bengkalis	2008	37	39.575,17	107	39.575,13	50	4.418,52	45	11.463,07	12	23.693,54	-	-	4.418,52
		2009	77	51.962,28	214	51.962,27	75	6.312,43	131	45.649,84	8	-	-	-	6.312,43
		2010	52	32.877,64	136	26.338,74	44	1.550,99	46	13.957,02	46	10.830,73	-	-	1.550,99
		2011	30	33.037,46	76	33.037,44	23	3.895,51	52	8.280,86	1	20.861,07	-	-	3.328,94
		2012	17	16.983,79	45	15.454,03	-	-	-	-	45	15.454,03	-	-	19,81
		Jumlah	213	174.436,34	578	166.367,61	192	16.177,45	274	79.350,79	112	70.839,37	-	-	15.630,69
81	Kab. Indragiri Hilir	2008	30	13.971,50	83	10.603,37	55	6.095,87	28	4.507,50	-	-	-	-	6.095,87
		2009	46	13.731,70	111	19.709,90	77	9.782,63	34	9.927,27	-	-	-	-	9.782,63
		2010	25	8.127,90	61	19.971,45	50	4.352,79	10	15.618,66	1	-	-	-	4.352,79
		2011	19	8.662,31	64	7.692,36	35	1.708,17	28	5.984,19	1	-	-	-	1.708,17
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	120	44.493,41	319	57.977,08	217	21.939,46	100	36.037,62	2	-	-	-	21.939,46
82	Kab. Indragiri Hulu	2008	36	22.452,67	101	14.886,08	79	8.413,45	10	3.778,03	12	2.694,60	-	-	8.341,95
		2009	41	6.624,53	116	6.011,42	91	2.359,72	16	3.651,70	9	-	-	-	2.359,72
		2010	31	183.144,95	82	182.687,95	56	32.160,58	21	150.527,37	5	-	-	-	32.160,58
		2011	49	69.656,50	128	39.457,36	82	280,24	37	39.177,12	9	-	-	-	280,24
		2012	28	18.198,71	71	13.193,66	-	-	-	-	71	13.193,66	-	-	-
		Jumlah	185	300.077,36	498	256.236,47	308	43.213,99	84	197.134,22	106	15.888,26	-	-	43.142,49
83	Kab. Kampar	2008	27	26.650,97	69	6.330,10	62	3.644,53	5	2.685,57	2	-	-	-	3.644,53
		2009	46	9.838,95	140	9.455,10	99	4.209,48	37	4.891,61	4	354,01	-	-	4.209,48
		2010	21	7.713,82	57	6.509,72	2	715,83	4	1.266,38	51	4.527,51	-	-	715,83
		2011	58	3.390,49	144	3.390,48	22	1.408,98	35	1.118,86	87	862,64	-	-	1.408,98
		2012	27	4.357,77	64	832,25	-	-	-	-	64	832,25	-	-	-
		Jumlah	179	51.952,00	474	26.517,65	185	9.978,82	81	9.962,42	208	6.576,41	-	-	9.978,82

Halaman 20 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	Kab. Kuantan Singingi	2008	47	8.690,36	102	7.373,08	84	4.892,27	15	1.191,34	3	1.289,47	-	-	4.892,27
		2009	32	13.007,76	90	11.497,04	75	9.169,48	15	2.327,56	-	-	-	-	9.169,48
		2010	32	4.167,55	83	3.787,64	67	2.453,05	14	1.334,59	2	-	-	-	2.453,05
		2011	43	54.754,25	113	6.158,45	77	2.454,42	34	3.704,03	2	-	-	-	355,70
		2012	26	8.741,47	66	1.078,19	41	217,78	23	860,41	2	-	-	-	217,78
		Jumlah	180	89.361,39	454	29.894,40	344	19.187,00	101	9.417,93	9	1.289,47	-	-	17.088,28
85	Kab. Kepulauan Meranti	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	3.641,32	32	242,92	26	199,01	3	43,91	3	-	-	-	197,82
		2011	23	4.600,84	57	4.606,42	33	1.185,20	13	1.779,87	11	1.641,35	-	-	1.226,14
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	8.242,16	89	4.849,34	59	1.384,21	16	1.823,78	14	1.641,35	-	-	1.423,96
86	Kab. Pelalawan	2008	20	3.327,25	54	3.327,25	39	1.812,74	14	1.514,51	1	-	-	-	565,36
		2009	47	31.893,83	193	30.562,78	75	2.093,46	108	27.706,84	10	762,48	-	-	2.093,46
		2010	23	5.322,02	69	3.676,08	31	1.042,14	18	2.633,94	20	-	-	-	1.042,14
		2011	27	2.536,58	61	3.786,56	20	540,57	38	2.961,08	3	284,91	-	-	515,45
		2012	16	9.487,32	54	5.387,31	-	-	-	-	54	5.387,31	-	-	587,62
		Jumlah	133	52.567,00	431	46.739,98	165	5.488,91	178	34.816,37	88	6.434,70	-	-	4.804,03
87	Kab. Rokan Hilir	2008	32	8.010,29	78	2.897,35	32	1.566,24	15	1.320,91	31	10,20	-	-	1.566,24
		2009	40	32.411,48	127	20.346,13	59	1.993,56	43	285,42	25	18.067,15	-	-	1.993,56
		2010	24	5.664,68	63	4.105,38	22	1.991,52	19	237,38	22	1.876,48	-	-	1.991,52
		2011	34	18.969,09	92	11.653,34	29	2.750,10	29	787,56	34	8.115,68	-	-	2.750,10
		2012	24	5.849,70	74	4.038,20	-	-	-	-	74	4.038,20	-	-	-
		Jumlah	154	70.905,24	434	43.040,40	142	8.301,42	106	2.631,27	186	32.107,71	-	-	8.301,42
88	Kab. Rokan Hulu	2008	29	3.216,86	47	2.848,13	39	2.848,13	8	-	-	-	-	-	2.848,13
		2009	35	9.687,10	103	8.985,99	88	945,32	13	7.855,33	2	185,34	-	-	945,32
		2010	16	8.930,46	43	8.930,45	26	464,42	17	8.466,03	-	-	-	-	464,42

Halaman 21 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	26	4.141,22	58	2.648,40	39	479,80	18	2.007,72	1	160,88	-	-	479,80
		2012	19	11.574,32	32	8.738,38	-	-	-	-	32	8.738,38	-	-	80,04
		Jumlah	125	37.549,96	283	32.151,35	192	4.737,67	56	18.329,08	35	9.084,60	-	-	4.817,71
89	Kab. Siak	2008	17	10.602,66	40	6.099,36	37	5.870,88	3	228,48	-	-	-	-	5.870,88
		2009	62	58.467,68	140	24.369,23	117	21.276,77	20	3.092,46	3	-	-	-	21.276,77
				USD 164.36											
		2010	59	60.545,37	199	31.380,71	158	20.377,99	41	11.002,72	-	-	-	-	20.377,99
		2011	49	18.267,45	126	14.722,84	71	728,59	26	12.683,02	29	1.311,23	-	-	728,59
		2012	29	3.689,97	75	1.187,10	-	-	-	-	75	1.187,10	-	-	782,62
		Jumlah	216	151.573,13	580	77.759,24	383	48.254,23	90	27.006,68	107	2.498,33	-	-	49.036,85
				USD 164.36											
90	Kota Dumai	2008	35	5.095,63	82	5.067,81	73	1.971,95	7	2.980,85	2	115,01	-	-	1.971,95
		2009	38	30.312,84	98	28.611,41	55	6.969,81	30	7.790,42	13	13.851,18	-	-	6.969,81
		2010	36	4.094,83	96	4.634,60	55	1.225,07	27	2.414,22	14	995,31	-	-	1.225,07
		2011	28	4.193,83	61	2.447,96	41	892,19	13	780,71	7	775,06	-	-	892,19
				USD 258.03		USD 258.03		USD 177.99		USD 80.04					USD 177.99
		2012	16	89.896,36	41	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
		Jumlah	153	133.593,49	378	40.761,78	224	11.059,02	77	13.966,20	77	15.736,56	-	-	11.059,02
				USD 258.03		USD 258.03		USD 177.99		USD 80.04					USD 177.99
91	Kota Pekanbaru	2008	31	3.355,55	86	3.355,54	60	2.025,00	22	1.114,62	4	215,92	-	-	2.025,00
		2009	51	22.483,88	109	8.852,29	75	1.123,09	30	6.672,96	4	1.056,24	-	-	1.123,09
		2010	27	15.413,94	61	5.958,29	34	4.082,43	25	1.875,86	2	-	-	-	4.082,43
		2011	34	12.846,31	76	3.172,48	33	401,74	32	2.601,38	11	169,36	-	-	401,74
		2012	19	4.120,79	44	2.790,67	-	-	-	-	44	2.790,67	-	-	-
		Jumlah	162	58.220,49	376	24.129,33	202	7.632,28	109	12.264,84	65	4.232,21	-	-	7.632,28
92	Prov. Jambi	2008	88	27.216,18	224	16.882,99	201	14.615,21	23	2.267,78	-	-	-	-	14.615,21
		2009	41	8.470,78	101	7.627,40	98	6.285,72	3	1.341,68	-	-	-	-	7.129,10

Halaman 22 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	55	27.480,87	127	3.854,64	81	3.379,88	46	474,76	-	-	-	-	3.379,88
		2011	47	12.287,43	114	11.529,89	21	499,24	92	11.030,65	1	-	-	-	499,24
		2012	21	26.782,84	41	25.715,21	-	-	-	-	41	25.715,21	-	-	487,66
		Jumlah	252	102.238,10	607	65.610,13	401	24.780,05	164	15.114,87	42	25.715,21	-	-	26.111,09
93	Kab. Batang Hari	2008	43	6.130,84	83	5.783,65	60	2.156,79	21	3.626,86	2	-	-	-	2.464,34
		2009	30	4.364,78	96	3.377,72	65	841,82	31	2.535,90	-	-	-	-	851,40
		2010	31	7.756,53	78	6.847,45	41	1.623,95	33	5.223,50	4	-	-	-	1.780,22
		2011	49	119,53	86	119,52	6	60,82	66	58,70	14	-	-	-	-
		2012	16	2.260,52	43	2.033,02	-	-	-	-	43	2.033,02	-	-	-
		Jumlah	169	20.632,20	386	18.161,36	172	4.683,38	151	11.444,96	63	2.033,02	-	-	5.095,96
94	Kab. Bungo	2008	39	19.007,10	105	13.943,82	85	6.846,14	20	7.097,68	-	-	-	-	6.846,14
		2009	58	33.374,30	139	4.859,48	110	507,37	29	4.352,11	-	-	-	-	507,37
		2010	48	19.570,03	102	19.532,50	51	5.937,93	51	13.594,57	-	-	-	-	6.037,85
		2011	27	332,26	55	286,24	25	53,34	30	232,90	-	-	-	-	53,34
		2012	18	3.379,61	51	3.379,61	-	-	-	-	51	3.379,61	-	-	-
		Jumlah	190	75.663,30	452	42.001,65	271	13.344,78	130	25.277,26	51	3.379,61	-	-	13.444,70
95	Kab. Kerinci	2008	26	10.033,43	62	10.021,20	44	6.166,67	14	3.854,53	4	-	-	-	6.166,67
		2009	45	21.344,23	102	11.933,20	67	1.925,92	35	10.007,28	-	-	-	-	2.562,06
		2010	44	12.134,95	85	6.241,96	26	1.062,78	37	5.179,18	22	-	-	-	1.073,89
		2011	23	1.544,91	58	1.503,99	5	379,59	51	1.124,40	2	-	-	-	379,59
		2012	22	1.403,07	64	1.124,13	-	-	-	-	64	1.124,13	-	-	278,93
		Jumlah	160	46.460,59	371	30.824,48	142	9.534,96	137	20.165,39	92	1.124,13	-	-	10.461,14
96	Kab. Merangin	2008	30	33.037,39	78	9.348,32	44	4.055,17	33	5.293,15	1	-	-	-	4.055,17
		2009	33	9.659,45	97	7.947,74	57	1.775,69	39	6.163,84	1	8,21	-	-	1.775,69
		2010	21	5.122,11	45	3.585,14	25	1.610,11	20	1.975,03	-	-	-	-	1.610,11
		2011	22	2.515,25	59	1.666,07	8	237,05	32	1.429,02	19	-	-	-	237,05
		2012	16	2.200,50	46	1.819,56	-	-	-	-	46	1.819,56	-	-	65,22
		Jumlah	122	52.534,70	325	24.366,83	134	7.678,02	124	14.861,04	67	1.827,77	-	-	7.743,24

Halaman 23 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
97	Kab. Muaro Jambi	2008	68	9.888,71	150	7.225,93	112	1.981,10	38	5.244,83	-	-	-	-	1.981,10
		2009	42	5.500,26	113	4.395,16	88	1.509,69	25	2.885,47	-	-	-	-	1.515,18
		2010	25	3.962,63	60	3.160,87	32	1.578,67	18	1.582,20	10	-	-	-	1.596,29
		2011	29	6.465,03	60	6.385,68	18	866,56	38	5.519,12	4	-	-	-	866,56
		2012	15	688,57	36	361,39	-	-	-	-	36	361,39	-	-	-
		Jumlah	179	26.505,20	419	21.529,03	250	5.936,02	119	15.231,62	50	361,39	-	-	5.959,13
98	Kab. Sarolangun	2008	30	10.423,32	71	3.779,51	39	1.690,95	32	2.088,56	-	-	-	-	1.690,95
		2009	38	9.442,51	99	8.175,47	65	1.307,94	31	3.276,54	3	3.590,99	-	-	1.307,94
		2010	39	9.093,99	67	7.767,17	9	1.561,99	44	4.102,55	14	2.102,63	-	-	1.561,99
				USD 466.91		USD 466.91						USD 466.91			
		2011	27	2.177,56	59	1.843,87	1	28,04	26	1.317,70	32	498,13	-	-	28,04
		2012	19	47.178,95	62	47.151,03	-	-	-	-	62	47.151,03	-	-	27,92
		Jumlah	153	78.316,33	358	68.717,05	114	4.588,92	133	10.785,35	111	53.342,78	-	-	4.616,84
				USD 466.91		USD 466.91						USD 466.91			
99	Kab. Tanjung Jabung Timur	2008	34	14.868,21	91	10.535,09	57	8.146,86	32	2.388,23	2	-	-	-	8.146,86
		2009	32	19.985,75	106	16.618,22	65	5.228,56	38	11.389,66	3	-	-	-	5.228,56
		2010	21	1.779,22	48	1.772,46	32	863,92	14	908,54	2	-	-	-	863,92
		2011	32	1.653,12	63	1.593,47	11	934,94	46	464,78	6	193,75	-	-	889,52
		2012	16	8.245,66	42	8.245,66	-	-	-	-	42	8.245,66	-	-	-
		Jumlah	135	46.531,96	350	38.764,90	165	15.174,28	130	15.151,21	55	8.439,41	-	-	15.128,86
100	Kab. Tanjung Jabung Barat	2008	42	18.319,84	122	15.485,28	96	3.440,61	26	12.044,67	-	-	-	-	3.611,94
		2009	52	1.600.195,25	129	5.866,56	111	1.723,20	18	4.143,36	-	-	-	-	1.723,20
		2010	33	1.040,59	60	949,72	35	590,61	25	359,11	-	-	-	-	590,61
		2011	23	10.835,05	43	9.495,49	13	1.143,68	26	8.329,40	4	22,41	-	-	1.146,27
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	150	1.630.390,73	354	31.797,05	255	6.898,10	95	24.876,54	4	22,41	-	-	7.072,02
101	Kab. Tebo	2008	27	20.629,69	96	8.740,39	52	3.968,86	41	4.771,53	3	-	-	-	3.968,86
		2009	43	143.065,43	108	16.739,34	67	8.047,27	40	8.692,07	1	-	-	-	10.417,82

Halaman 24 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	40	169.233,26	80	7.842,03	23	1.269,42	45	6.175,47	12	397,14	-	-	1.257,20
		2011	29	3.106,07	71	2.555,01	2	117,07	58	2.334,46	11	103,48	-	-	553,71
		2012	13	766,69	34	766,69	-	-	-	-	34	766,69	-	-	-
		Jumlah	152	336.801,14	389	36.643,46	144	13.402,62	184	21.973,53	61	1.267,31	-	-	16.197,59
102	Kota Jambi	2008	33	1.846,98	67	535,95	60	216,35	7	319,60	-	-	-	-	216,35
		2009	87	13.206,65	191	13.206,64	156	4.137,34	35	9.069,30	-	-	-	-	4.137,34
		2010	26	2.909,62	59	2.693,40	33	1.212,59	26	1.480,81	-	-	-	-	1.365,60
		2011	20	132,95	54	132,94	5	13,94	40	35,94	9	83,06	-	-	14,75
		2012	14	9.710,08	33	9.710,08	-	-	-	-	33	9.710,08	-	-	-
		Jumlah	180	27.806,28	404	26.279,01	254	5.580,22	108	10.905,65	42	9.793,14	-	-	5.734,04
103	Kota Sungai Penuh	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	559,17	27	120,25	20	99,39	7	20,86	-	-	-	-	538,30
		2011	21	2.038,22	70	1.599,21	14	1.028,82	51	570,39	5	-	-	-	1.022,38
		2012	16	2.840,90	37	2.825,11	-	4,47	1	81,88	36	2.738,76	-	-	20,25
		Jumlah	52	5.438,29	134	4.544,57	34	1.132,68	59	673,13	41	2.738,76	-	-	1.580,93
104	Prov. Sumatera Selatan	2008	60	48.553,64	111	6.819,74	83	6.350,82	25	468,92	3	-	-	-	6.084,05
		2009	40	25.571,84	92	9.406,59	64	268,98	27	9.137,61	1	-	-	-	1.624,14
		2010	35	10.306,01	81	10.203,01	54	935,53	27	9.267,48	-	-	-	-	965,22
		2011	68	11.580,94	169	5.770,34	113	3.097,98	48	1.803,68	8	868,68	-	-	3.097,98
		2012	30	6.770,75	95	4.811,90	16	-	11	-	68	4.811,90	-	-	-
		Jumlah	233	102.783,18	548	37.011,58	330	10.653,31	138	20.677,69	80	5.680,58	-	-	11.771,39
105	Kab. Banyuasin	2008	32	3.644,90	81	1.413,82	75	1.236,85	6	176,97	-	-	-	-	3.244,66
		2009	29	5.883,71	74	5.365,21	64	1.337,17	10	4.028,04	-	-	-	-	1.337,17
		2010	23	4.294,47	60	752,43	58	677,13	2	75,30	-	-	-	-	3.224,73
		2011	17	1.178,73	46	1.033,39	40	260,14	6	773,25	-	-	-	-	260,14
		2012	25	1.185,11	58	481,00	24	108,92	29	372,08	5	-	-	-	108,92
		Jumlah	126	16.186,92	319	9.045,85	261	3.620,21	53	5.425,64	5	-	-	-	8.175,62

Halaman 25 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106	Kab. Empat Lawang	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	28	2.371,16	76	2.257,52	65	867,99	11	1.389,53	-	-	-	-	926,68
		2010	25	4.475,60	69	858,96	56	138,52	12	720,44	1	-	-	-	138,52
		2011	22	6.479,56	63	4.416,86	34	47,92	29	4.368,94	-	-	-	-	128,30
		2012	32	4.841,62	83	4.626,35	21	-	57	4.626,35	5	-	-	-	-
		Jumlah	107	18.167,94	291	12.159,69	176	1.054,43	109	11.105,26	6	-	-	-	1.193,50
107	Kab. Lahat	2008	21	376,09	39	138,55	32	112,50	6	26,05	1	-	-	-	112,50
		2009	41	1.809,35	93	1.472,57	80	641,02	11	831,55	2	-	-	-	641,02
		2010	34	3.515,18	90	3.353,61	72	256,12	18	3.097,49	-	-	-	-	268,70
		2011	23	531,28	54	406,73	43	282,92	11	123,81	-	-	-	-	288,72
		2012	26	4.597,54	65	2.188,91	-	-	-	-	65	2.188,91	-	-	803,11
		Jumlah	145	10.829,44	341	7.560,37	227	1.292,56	46	4.078,90	68	2.188,91	-	-	2.114,05
108	Kab. Muara Enim	2008	21	552,62	39	300,50	35	163,39	4	137,11	-	-	-	-	163,39
		2009	48	1.023,95	83	1.021,62	67	425,65	16	595,97	-	-	-	-	425,65
		2010	38	1.990,08	91	986,30	83	714,17	8	272,13	-	-	-	-	1.723,85
		2011	23	1.188,79	54	1,50	50	0,10	4	1,40	-	-	-	-	34,30
		2012	19	2.466,84	38	120,89	32	58,63	5	62,26	1	-	-	-	554,46
		Jumlah	149	7.222,28	305	2.430,81	267	1.361,94	37	1.068,87	1	-	-	-	2.901,65
109	Kab. Musi Banyuasin	2008	36	3.889,04	82	748,34	71	138,84	11	609,50	-	-	-	-	138,84
		2009	43	255.012,09	99	26.151,62	86	10.236,60	13	15.915,02	-	-	-	-	10.723,18
		2010	35	433,97	60	433,96	37	163,03	4	270,93	19	-	-	-	163,03
		2011	23	2.659,24	61	1.300,67	51	232,91	10	1.067,76	-	-	-	-	561,47
		2012	31	10.005,19	72	3.283,66	13	-	10	-	49	3.283,66	-	-	114,65
		Jumlah	168	271.999,53	374	31.918,25	258	10.771,38	48	17.863,21	68	3.283,66	-	-	11.701,17
110	Kab. Musi Rawas	2008	34	2.308,05	80	113,35	80	113,35	-	-	-	-	-	-	113,35
		2009	33	1.671,45	69	1.659,14	67	1.540,65	2	118,49	-	-	-	-	1.526,38
		2010	24	29,04	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-	18,02

Halaman 26 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	21	3.056,74	52	868,16	48	797,60	4	70,56	-	-	-	-	819,80
		2012	22	563,55	56	126,82	52	11,09	4	115,73	-	-	-	-	447,81
		Jumlah	134	7.628,83	301	2.767,47	291	2.462,69	10	304,78	-	-	-	-	2.925,36
111	Kab. Ogan Ilir	2008	13	13.642,66	25	781,40	22	289,73	3	491,67	-	-	-	-	289,73
		2009	24	3.867,61	54	2.762,26	39	1.664,69	15	1.097,57	-	-	-	-	1.664,69
		2010	14	1.633,93	36	1.159,00	33	166,75	3	992,25	-	-	-	-	168,98
		2011	38	3.843,54	83	3.400,57	53	518,20	18	2.882,37	12	-	-	-	518,40
		2012	20	1.763,68	45	1.157,81	25	165,10	18	904,32	2	88,39	-	-	165,10
		Jumlah	109	24.751,42	243	9.261,04	172	2.804,47	57	6.368,18	14	88,39	-	-	2.806,90
112	Kab. Ogan Komering Ilir	2008	11	588,69	27	577,90	25	16,97	2	560,93	-	-	-	-	27,76
		2009	29	3.808,50	65	159,75	65	159,75	-	-	-	-	-	-	159,75
		2010	28	3.788,95	76	1.624,34	76	1.624,34	-	-	-	-	-	-	1.948,57
		2011	17	876,71	44	37,44	37	37,09	7	0,35	-	-	-	-	37,09
		2012	23	1.424,31	50	1.077,89	46	920,51	4	157,38	-	-	-	-	920,51
		Jumlah	108	10.487,16	262	3.477,32	249	2.758,66	13	718,66	-	-	-	-	3.093,68
113	Kab. Ogan Komering Ulu	2008	22	4.598,40	40	717,61	34	320,00	6	397,61	-	-	-	-	320,00
		2009	60	7.751,49	137	2.423,98	109	1.296,82	27	1.127,16	1	-	-	-	1.296,82
		2010	40	17.712,52	92	5.378,43	73	2.442,84	18	2.935,59	1	-	-	-	2.442,84
		2011	29	4.391,88	58	470,17	40	-	13	461,79	5	8,38	-	-	2.345,49
		2012	22	7.612,78	58	2.702,14	-	-	-	-	58	2.702,14	-	-	13,38
		Jumlah	173	42.067,07	385	11.692,33	256	4.059,66	64	4.922,15	65	2.710,52	-	-	6.418,53
114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2008	43	6.403,20	108	3.497,18	69	1.918,03	39	1.579,15	-	-	-	-	4.673,03
		2009	30	5.662,15	72	3.432,13	50	2.928,14	21	503,99	1	-	-	-	2.928,14
		2010	18	496,04	53	496,03	44	135,74	8	360,29	1	-	-	-	135,74
		2011	24	2.217,99	65	1.552,19	24	82,82	16	1.144,26	25	325,11	-	-	248,82
		2012	22	4.476,78	53	3.787,97	18	464,79	24	3.114,96	11	208,22	-	-	3.351,39
		Jumlah	137	19.256,16	351	12.765,50	205	5.529,52	108	6.702,65	38	533,33	-	-	11.337,12

Halaman 27 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2008	29	2.229,72	65	1.986,54	65	1.986,54	-	-	-	-	-	-	1.998,60
		2009	15	468,06	40	468,06	40	468,06	-	-	-	-	-	-	468,06
		2010	26	2.361,09	70	2.361,09	70	2.361,09	-	-	-	-	-	-	2.255,16
		2011	19	1.647,64	47	593,15	46	582,48	1	10,67	-	-	-	-	582,48
		2012	20	6.553,50	50	2.569,74	39	469,49	11	2.100,25	-	-	-	-	469,49
		Jumlah	109	13.260,01	272	7.978,58	260	5.867,66	12	2.110,92	-	-	-	-	5.773,79
116	Kota Lubuklinggau	2008	21	3.952,83	45	1.402,33	40	1.239,45	5	162,88	-	-	-	-	1.268,73
		2009	29	12.923,27	58	139,92	56	69,65	2	70,27	-	-	-	-	69,65
		2010	18	322,40	49	296,73	49	296,73	-	-	-	-	-	-	319,45
		2011	41	5.595,06	85	2.763,95	72	1.634,53	7	1.129,42	6	-	-	-	2.265,25
		2012	18	604,32	40	315,41	21	28,15	19	287,26	-	-	-	-	28,15
		Jumlah	127	23.397,88	277	4.918,34	238	3.268,51	33	1.649,83	6	-	-	-	3.951,23
117	Kota Pagar Alam	2008	36	1.566,91	66	463,23	55	395,48	11	67,75	-	-	-	-	952,52
		2009	18	1.364,90	38	243,66	36	118,47	2	125,19	-	-	-	-	230,43
		2010	17	3.312,81	40	2.027,40	28	7,85	11	2.019,55	1	-	-	-	8,91
		2011	50	5.287,23	127	2.632,09	89	288,56	23	625,38	15	1.718,15	-	-	2.549,20
		2012	25	7.249,59	59	6.265,94	-	-	-	-	59	6.265,94	-	-	90,97
		Jumlah	146	18.781,44	330	11.632,32	208	810,36	47	2.837,87	75	7.984,09	-	-	3.832,03
118	Kota Palembang	2008	50	8.428,18	118	2.035,94	95	1.511,61	22	524,33	1	-	-	-	1.798,41
		2009	57	8.028,06	112	7.837,66	66	129,39	36	7.708,27	10	-	-	-	129,39
		2010	26	3.452,66	51	26,97	35	5,61	16	21,36	-	-	-	-	5,61
		2011	34	5.197,88	86	1.609,90	72	335,47	9	946,39	5	328,04	-	-	335,47
		2012	35	5.021,11	72	1.400,68	-	-	-	-	72	1.400,68	-	-	1.604,75
		Jumlah	202	30.127,89	439	12.911,15	268	1.982,08	83	9.200,35	88	1.728,72	-	-	3.873,63
119	Kota Prabumulih	2008	20	6.980,10	46	1.130,77	41	359,10	5	771,67	-	-	-	-	1.926,49
		2009	26	10.420,35	73	1.860,70	64	480,83	9	1.379,87	-	-	-	-	1.007,64

Halaman 28 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	23	4.731,51	55	4.211,47	46	3.468,81	9	742,66	-	-	-	-	3.468,81
		2011	16	242,80	38	-	34	-	4	-	-	-	-	-	54,69
		2012	20	2.530,41	54	2.476,13	33	-	21	2.476,13	-	-	-	-	26,98
		Jumlah	105	24.905,17	266	9.679,07	218	4.308,74	48	5.370,33	-	-	-	-	6.484,61
120	Prov. Bengkulu	2008	49	33.941,24	92	28.984,93	79	6.437,52	13	22.547,41	-	-	-	-	6.437,52
		2009	73	28.053,66	139	18.809,01	86	13.107,17	52	5.600,24	1	101,60	-	-	8.169,55
		2010	51	25.343,63	87	5.712,67	40	4.085,00	44	1.627,67	3	-	-	-	3.984,23
		2011	48	5.785,43	112	4.934,23	35	3.013,38	75	1.920,85	2	-	-	-	2.741,17
		2012	15	13.714,98	32	289,27	18	12,76	14	276,51	-	-	-	-	212,76
		Jumlah	236	106.838,94	462	58.730,11	258	26.655,83	198	31.972,68	6	101,60	-	-	21.545,23
121	Kab. Bengkulu Selatan	2008	18	1.659,18	46	1.073,86	44	685,08	2	388,78	-	-	-	-	685,08
		2009	45	2.353,18	77	1.826,88	51	745,69	18	1.081,19	8	-	-	-	745,69
		2010	20	4.301,27	36	2.162,43	15	1.626,08	12	521,14	9	15,21	-	-	807,78
		2011	21	205,82	41	205,81	1	-	21	66,65	19	139,16	-	-	-
		2012	12	1.007,84	28	1.007,84	-	-	-	-	28	1.007,84	-	-	-
		Jumlah	116	9.527,29	228	6.276,82	111	3.056,85	53	2.057,76	64	1.162,21	-	-	2.238,55
122	Kab. Bengkulu Tengah	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	36,10	21	36,10	11	36,10	8	-	2	-	-	-	36,10
		2011	9	196,44	13	170,72	4	123,39	4	47,33	5	-	-	-	123,39
		2012	13	413,11	29	413,10	1	392,88	1	20,22	27	-	-	-	392,88
		Jumlah	34	645,65	63	619,92	16	552,37	13	67,55	34	-	-	-	552,37
123	Kab. Bengkulu Utara	2008	38	11.634,74	82	975,20	73	800,50	9	174,70	-	-	-	-	800,50
		2009	27	146.621,89	50	3.413,76	32	1.304,67	17	2.109,09	1	-	-	-	1.304,67
		2010	39	7.110,16	90	1.995,65	12	182,40	77	1.813,25	1	-	-	-	182,40
		2011	24	7.605,85	37	1.815,99	21	453,16	16	1.362,83	-	-	-	-	453,16
		2012	12	8.185,12	18	7.323,29	2	146,84	1	-	15	7.176,45	-	-	146,84
		Jumlah	140	181.157,76	277	15.523,89	140	2.887,57	120	5.459,87	17	7.176,45	-	-	2.887,57

Halaman 29 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
124	Kab. Kaur	2008	18	2.009,24	37	751,36	35	467,30	2	284,06	-	-	-	-	467,30
		2009	13	879,51	25	879,51	20	501,15	4	378,36	-	-	1	-	501,15
		2010	8	1.122,97	18	1.122,96	7	507,35	11	615,61	-	-	-	-	507,35
		2011	10	1.993,68	17	1.944,33	3	417,13	14	1.527,20	-	-	-	-	417,13
		2012	13	4.472,61	28	463,48	-	34,47	4	43,17	24	385,84	-	-	34,47
		Jumlah	62	10.478,01	125	5.161,64	65	1.927,40	35	2.848,40	24	385,84	1	-	1.927,40
125	Kab. Kepahiang	2008	28	3.037,22	63	645,44	58	529,85	3	115,59	1	-	1	-	529,85
		2009	23	13.832,84	49	3.443,82	37	3.133,40	11	310,42	1	-	-	-	3.133,40
		2010	21	3.253,04	38	3.122,07	23	852,40	15	2.269,67	-	-	-	-	834,73
		2011	13	4.191,03	27	4.191,03	3	233,58	24	3.957,45	-	-	-	-	233,58
		2012	10	6.819,17	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
		Jumlah	95	31.133,30	199	11.402,36	121	4.749,23	53	6.653,13	24	-	1	-	4.731,56
126	Kab. Lebong	2008	21	1.594,82	56	1.486,38	47	656,50	9	829,88	-	-	-	-	656,50
		2009	18	3.366,42	38	3.296,42	12	220,85	18	3.075,57	8	-	-	-	220,85
		2010	21	1.868,93	36	1.868,93	9	289,60	27	1.579,33	-	-	-	-	289,60
		2011	21	2.863,98	49	2.863,97	-	280,73	23	1.683,22	26	900,02	-	-	280,73
		2012	17	4.405,30	30	303,19	5	54,00	23	249,19	2	-	-	-	54,00
		Jumlah	98	14.099,45	209	9.818,89	73	1.501,68	100	7.417,19	36	900,02	-	-	1.501,68
127	Kab. Mukomuko	2008	15	5.308,78	34	4.788,78	31	1.988,73	3	2.800,05	-	-	-	-	229,78
		2009	31	2.039,50	61	710,12	12	367,71	4	342,41	45	-	-	-	49,26
		2010	13	702,35	25	702,34	11	379,73	14	322,61	-	-	-	-	379,73
		2011	17	1.050,88	36	993,57	10	240,85	23	752,72	3	-	-	-	240,85
		2012	6	63.861,01	16	1.479,37	9	-	2	-	5	1.479,37	-	-	-
		Jumlah	82	72.962,52	172	8.674,18	73	2.977,02	46	4.217,79	53	1.479,37	-	-	899,62
128	Kab. Rejang Lebong	2008	16	3.502,39	37	169,00	35	169,00	2	-	-	-	-	-	169,00
		2009	38	2.077,05	70	1.711,63	27	359,96	39	568,32	4	783,35	-	-	359,96
		2010	29	2.577,21	56	1.339,67	39	374,10	16	965,57	1	-	-	-	358,61

Halaman 30 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	20	8.285,26	32	588,70	20	200,20	12	388,50	-	-	-	-	200,20
		2012	12	9.034,28	16	20,22	12	-	4	20,22	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	25.476,19	211	3.829,22	133	1.103,26	73	1.942,61	5	783,35	-	-	1.087,77
129	Kab. Seluma	2008	25	17.240,14	59	13.434,07	54	6.257,66	4	4.193,35	1	2.983,06	-	-	6.257,66
		2009	20	3.010,63	35	2.017,16	19	621,53	14	1.395,63	-	-	2	-	536,87
		2010	13	172,13	23	172,12	6	32,00	11	140,12	6	-	-	-	32,00
		2011	20	10.843,07	44	3.093,98	19	1.348,56	20	1.745,42	5	-	-	-	1.348,56
		2012	13	2.631,02	41	2.050,57	-	-	-	-	41	2.050,57	-	-	-
		Jumlah	91	33.896,99	202	20.767,90	98	8.259,75	49	7.474,52	53	5.033,63	2	-	8.175,09
130	Kota Bengkulu	2008	16	3.367,90	31	3.217,95	27	3.217,95	4	-	-	-	-	-	3.217,95
		2009	103	4.142,14	185	2.931,13	75	2.856,18	32	13,73	78	61,22	-	-	2.856,18
		2010	15	1.881,06	31	1.239,85	14	939,85	15	-	2	300,00	-	-	-
		2011	27	1.755,28	58	1.256,23	10	292,24	44	963,99	4	-	-	-	292,43
		2012	11	728,07	21	631,07	-	-	21	631,07	-	-	-	-	-
		Jumlah	172	11.874,45	326	9.276,23	126	7.306,22	116	1.608,79	84	361,22	-	-	6.366,56
131	Prov. Lampung	2008	26	3.200,55	52	2.688,05	12	171,90	10	-	30	2.516,15	-	-	171,90
		2009	44	54.759,69	103	12.575,17	69	1.485,60	28	10.223,53	5	783,81	1	82,23	1.485,60
		2010	43	10.086,80	114	6.033,32	89	858,12	24	5.175,20	1	-	-	-	858,12
		2011	90	113.825,53	231	107.731,05	29	39,87	14	4.468,09	188	103.223,09	-	-	39,87
		2012	19	9,28	52	9,28	-	-	-	-	52	9,28	-	-	-
		Jumlah	222	181.881,85	552	129.036,87	199	2.555,49	76	19.866,82	276	106.532,33	1	82,23	2.555,49
132	Kab. Lampung Barat	2008	17	5.003,87	42	1.718,56	34	646,76	5	1.071,80	3	-	-	-	646,76
		2009	17	9.219,53	35	2.996,59	23	173,37	9	2.205,67	3	617,55	-	-	259,22
		2010	16	8.498,44	38	261,76	30	-	8	160,10	-	101,66	-	-	-
		2011	19	7.891,79	48	176,13	27	142,53	8	-	13	33,60	-	-	142,53
		2012	8	264,52	18	264,52	-	-	-	-	18	264,52	-	-	-
		Jumlah	77	30.878,15	181	5.417,56	114	962,66	30	3.437,57	37	1.017,33	-	-	1.048,51

Halaman 31 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
133	Kab. Lampung Selatan	2008	14	4.225,81	42	4.193,76	32	996,27	5	1.229,91	4	508,41	1	1.459,17	996,27
		2009	18	3.181,44	45	697,42	39	276,06	5	421,36	1	-	-	-	276,06
		2010	24	2.969,75	56	2.633,75	48	2.422,67	8	211,08	-	-	-	-	2.422,67
		2011	38	88.201,99	103	2.823,64	35	559,30	11	1.868,68	57	395,66	-	-	559,30
		2012	15	7.641,83	53	5.129,68	-	-	-	-	53	5.129,68	-	-	37,17
		Jumlah	109	106.220,82	299	15.478,25	154	4.254,30	29	3.731,03	115	6.033,75	1	1.459,17	4.291,47
134	Kab. Lampung Tengah	2008	32	19.383,45	65	1.703,18	43	715,30	11	366,03	11	621,85	-	-	715,30
		2009	21	9.642,90	60	8.637,01	52	4.916,18	8	3.720,83	-	-	-	-	4.916,18
		2010	20	9.322,83	69	7.559,78	49	6.979,68	7	570,99	13	9,11	-	-	6.979,68
		2011	27	34.497,68	74	31.350,24	41	646,55	3	28.156,84	30	2.546,85	-	-	646,55
		2012	17	10.073,93	44	366,15	-	-	-	-	44	366,15	-	-	-
		Jumlah	117	82.920,79	312	49.616,36	185	13.257,71	29	32.814,69	98	3.543,96	-	-	13.257,71
135	Kab. Lampung Timur	2008	17	12.504,75	38	3.488,84	32	1.568,68	5	1.920,16	1	-	-	-	1.568,68
		2009	23	5.241,40	53	5.241,40	37	69,47	16	5.171,93	-	-	-	-	69,47
		2010	22	3.207,71	60	2.058,47	17	145,09	14	1.783,48	29	129,90	-	-	145,09
		2011	38	285.297,69	109	114.875,10	30	-	22	112.418,73	57	2.456,37	-	-	-
		2012	14	1.363,77	35	377,77	-	-	-	-	35	377,77	-	-	-
		Jumlah	114	307.615,32	295	126.041,58	116	1.783,24	57	121.294,30	122	2.964,04	-	-	1.783,24
136	Kab. Lampung Utara	2008	16	6.181,24	35	3.109,96	12	2.847,45	23	262,51	-	-	-	-	2.847,45
		2009	24	10.381,12	51	5.204,09	18	3.493,70	2	1.590,24	31	120,15	-	-	3.493,70
		2010	38	6.740,65	101	4.468,05	13	987,14	1	-	87	3.480,91	-	-	987,14
		2011	52	7.958,15	131	5.883,34	-	-	40	211,76	91	5.671,58	-	-	-
		2012	16	5.650,02	44	626,10	-	-	-	-	44	626,10	-	-	-
		Jumlah	146	36.911,18	362	19.291,54	43	7.328,29	66	2.064,51	253	9.898,74	-	-	7.328,29
137	Kab. Mesuji	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 32 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	16	1.354,83	42	578,96	14	-	15	578,96	13	-	-	-	-
		2012	12	2.261,94	42	2.030,12	-	-	-	-	42	2.030,12	-	-	-
		Jumlah	28	3.616,77	84	2.609,08	14	-	15	578,96	55	2.030,12	-	-	-
138	Kab. Pesawaran	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	4	623,96	12	623,95	9	342,36	2	170,33	1	111,26	-	-	342,36
		2010	20	1.707,86	58	688,02	43	28,99	12	542,61	3	116,42	-	-	28,99
		2011	16	11.356,65	42	467,12	32	1,00	10	466,12	-	-	-	-	1,00
		2012	17	4.106,52	41	794,67	-	-	-	-	41	794,67	-	-	-
		Jumlah	57	17.794,99	153	2.573,76	84	372,35	24	1.179,06	45	1.022,35	-	-	372,35
139	Kab. Pringsewu	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	14	1.162,02	49	388,97	31	263,76	8	125,21	10	-	-	-	263,76
		2012	22	1.038,87	57	1.012,34	-	-	-	-	57	1.012,34	-	-	-
		Jumlah	36	2.200,89	106	1.401,31	31	263,76	8	125,21	67	1.012,34	-	-	263,76
140	Kab. Tanggamus	2008	14	5.159,63	35	1.599,54	29	865,15	5	734,39	1	-	-	-	865,15
		2009	23	9.831,90	60	7.687,62	47	6.829,18	13	858,44	-	-	-	-	6.829,18
		2010	21	6.695,06	69	3.832,31	52	424,49	7	3.407,82	10	-	-	-	424,49
		2011	15	90.184,83	43	238,63	28	164,81	1	-	14	73,82	-	-	164,81
		2012	17	1.960,41	43	1.960,41	-	-	-	-	43	1.960,41	-	-	-
		Jumlah	90	113.831,83	250	15.318,51	156	8.283,63	26	5.000,65	68	2.034,23	-	-	8.283,63
141	Kab. Tulang Bawang	2008	15	8.606,99	38	2.772,73	14	616,12	5	1.073,66	19	1.082,95	-	-	616,12
		2009	26	47.628,49	56	2.819,45	26	1.071,62	20	1.676,64	10	71,19	-	-	1.071,62
		2010	31	5.974,91	95	5.902,79	12	3.516,58	26	1.819,79	57	566,42	-	-	3.516,58
		2011	17	799,46	43	799,45	21	-	1	14,93	21	784,52	-	-	-
		2012	13	1.108,13	34	185,55	-	-	-	-	34	185,55	-	-	922,57
		Jumlah	102	64.117,98	266	12.479,97	73	5.204,32	52	4.585,02	141	2.690,63	-	-	6.126,89

Halaman 33 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
142	Kab. Tulang Bawang Barat	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	234,87	42	234,86	31	169,31	8	65,55	3	-	-	-	169,31
		2012	13	414,69	36	-	-	-	-	-	36	-	-	-	154,28
		Jumlah	26	649,56	78	234,86	31	169,31	8	65,55	39	-	-	-	323,59
143	Kab. Way Kanan	2008	18	10.046,12	44	2.284,68	5	719,95	2	673,98	37	890,75	-	-	719,95
		2009	22	4.244,32	68	2.939,88	3	184,48	2	87,61	63	2.667,79	-	-	184,48
		2010	21	1.276,65	57	1.276,64	29	-	20	924,11	8	352,53	-	-	-
		2011	16	9.447,09	44	3.178,61	18	-	26	3.178,61	-	-	-	-	-
		2012	19	10.935,32	59	1.142,86	-	-	-	-	59	1.142,86	-	-	-
		Jumlah	96	35.949,50	272	10.822,67	55	904,43	50	4.864,31	167	5.053,93	-	-	904,43
144	Kota Bandar Lampung	2008	31	12.017,54	77	10.399,34	52	8.470,82	22	12,45	1	-	2	1.916,07	8.470,82
		2009	40	6.332,11	91	1.387,40	39	1.180,73	3	206,67	49	-	-	-	1.180,73
		2010	45	33.210,68	116	4.053,80	65	1.223,68	21	2.281,02	30	549,10	-	-	1.223,68
		2011	36	43.129,60	87	9.522,43	34	20,93	6	-	47	9.501,50	-	-	20,93
		2012	28	3.267,02	95	778,64	-	-	-	-	95	778,64	-	-	65,99
		Jumlah	180	97.956,95	466	26.141,61	190	10.896,16	52	2.500,14	222	10.829,24	2	1.916,07	10.962,15
145	Kota Metro	2008	21	4.177,34	43	2.638,45	35	194,66	8	2.443,79	-	-	-	-	194,66
		2009	33	3.054,93	63	311,55	16	39,19	2	246,34	45	26,02	-	-	39,19
		2010	22	2.666,94	62	966,16	36	416,53	16	549,63	10	-	-	-	416,53
		2011	29	15.733,07	77	387,55	22	-	1	-	54	387,55	-	-	-
		2012	5	827,71	10	49,70	-	-	-	-	10	49,70	-	-	-
		Jumlah	110	26.459,99	255	4.353,41	109	650,38	27	3.239,76	119	463,27	-	-	650,38
146	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	2008	29	3.371,90	50	2.462,63	45	2.352,95	5	109,68	-	-	-	-	2.352,95
		2009	26	18.966,23	56	4.152,81	44	3.634,43	12	518,38	-	-	-	-	3.634,43

Halaman 34 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	26	1.156,98	43	972,96	35	836,64	8	136,32	-	-	-	-	836,64
		2011	28	549,99	43	473,61	11	30,60	13	40,17	19	402,84	-	-	30,60
		2012	20	497,47	27	497,47	-	-	-	-	27	497,47	-	-	-
		Jumlah	129	24.542,57	219	8.559,48	135	6.854,62	38	804,55	46	900,31	-	-	6.854,62
147	Kab. Bangka	2008	26	10.207,04	48	193,44	48	193,44	-	-	-	-	-	-	193,44
		2009	61	2.360,43	106	1.684,88	99	1.160,24	5	524,64	2	-	-	-	1.160,24
		2010	33	12.342,86	57	11.338,92	37	2.398,04	3	26,73	14	210,95	3	8.703,20	2.398,04
		2011	38	2.986,32	59	552,69	31	13,75	18	538,94	10	-	-	-	13,75
		2012	12	186,41	16	96,41	-	-	-	-	16	96,41	-	-	-
		Jumlah	170	28.083,06	286	13.866,34	215	3.765,47	26	1.090,31	42	307,36	3	8.703,20	3.765,47
148	Kab. Bangka Barat	2008	13	680,58	22	680,58	22	680,58	-	-	-	-	-	-	680,58
		2009	32	1.148,97	59	523,56	58	523,56	1	-	-	-	-	-	523,56
		2010	10	1.185,33	19	7,89	16	7,89	3	-	-	-	-	-	7,89
		2011	28	180.858,13	39	273,17	17	144,77	11	69,28	11	59,12	-	-	144,77
		2012	11	24,24	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		Jumlah	94	183.897,25	151	1.485,20	113	1.356,80	15	69,28	23	59,12	-	-	1.356,80
149	Kab. Bangka Selatan	2008	11	968,95	23	282,05	23	282,05	-	-	-	-	-	-	282,05
		2009	35	19.093,94	85	2.618,84	76	2.581,77	8	37,07	1	-	-	-	2.581,77
		2010	32	5.830,08	68	1.702,64	40	776,06	4	-	24	926,58	-	-	776,06
		2011	19	1.926,87	29	603,76	11	396,50	14	10,41	4	196,85	-	-	396,50
		2012	9	60,53	10	60,53	-	-	-	-	10	60,53	-	-	-
		Jumlah	106	27.880,37	215	5.267,82	150	4.036,38	26	47,48	39	1.183,96	-	-	4.036,38
150	Kab. Bangka Tengah	2008	22	3.534,13	48	2.007,89	42	1.494,27	4	513,62	2	-	-	-	1.494,27
		2009	20	13.025,29	42	197,41	34	197,41	8	-	-	-	-	-	197,41
		2010	15	907,02	30	513,23	12	10,00	8	480,09	10	23,14	-	-	10,00
		2011	15	181,47	21	103,38	4	-	9	43,21	8	60,17	-	-	-
		2012	6	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
		Jumlah	78	17.647,91	149	2.821,91	92	1.701,68	29	1.036,92	28	83,31	-	-	1.701,68

Halaman 35 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151	Kab. Belitung	2008	18	2.090,70	42	1.072,69	37	1.053,67	5	19,02	-	-	-	-	1.053,67
		2009	27	6.441,34	59	2.030,26	31	1.208,09	21	822,17	7	-	-	-	1.208,09
		2010	27	738,64	72	375,64	34	100,09	36	275,55	2	-	-	-	100,09
		2011	33	5.680,13	44	720,51	22	440,15	18	280,36	4	-	-	-	440,15
		2012	13	473,72	19	473,72	-	-	-	-	19	473,72	-	-	-
		Jumlah	118	15.424,53	236	4.672,82	124	2.802,00	80	1.397,10	32	473,72	-	-	2.802,00
152	Kab. Belitung Timur	2008	21	8.028,36	45	479,58	41	394,87	4	84,71	-	-	-	-	394,87
		2009	21	1.394,00	39	921,38	34	483,25	5	438,13	-	-	-	-	483,25
		2010	21	1.046,60	41	1.026,59	27	677,10	12	349,49	2	-	-	-	677,10
		2011	15	834,53	20	744,86	11	496,03	9	248,83	-	-	-	-	496,03
		2012	15	563,46	19	293,70	-	-	-	-	19	293,70	-	-	-
		Jumlah	93	11.866,95	164	3.466,11	113	2.051,25	30	1.121,16	21	293,70	-	-	2.051,25
153	Kota Pangkalpinang	2008	9	152,43	18	1.230,01	18	1.230,01	-	-	-	-	-	-	1.230,01
		2009	78	8.608,25	126	1.278,05	82	609,19	25	668,86	19	-	-	-	609,19
		2010	63	3.848,98	136	3.142,25	102	355,89	30	2.786,36	4	-	-	-	355,89
		2011	42	1.448,03	76	1.023,86	18	417,84	25	347,03	33	258,99	-	-	417,84
		2012	12	448,89	12	368,46	-	-	-	-	12	368,46	-	-	-
		Jumlah	204	14.506,58	368	7.042,63	220	2.612,93	80	3.802,25	68	627,45	-	-	2.612,93
154	Prov. Kepulauan Riau	2008	17	1.059,92	29	1.059,92	29	1.059,92	-	-	-	-	-	-	340,85
		2009	45	50.173,18	90	6.048,34	69	5.447,47	18	529,43	3	71,44	-	-	4.235,32
		2010	53	5.845,32	101	2.892,20	85	981,42	16	1.910,78	-	-	-	-	799,17
		2011	98	758.570,87	156	6.075,63	82	1.779,98	43	4.295,65	31	-	-	-	550,12
		2012	11	914,32	16	914,32	3	3,43	13	910,89	-	-	-	-	914,32
		Jumlah	224	816.563,61	392	16.990,41	268	9.272,22	90	7.646,75	34	71,44	-	-	6.839,78
155	Kab. Bintan	2008	24	2.028,17	44	191,88	42	174,61	2	17,27	-	-	-	-	174,61
		2009	30	15.921,11	45	15.866,50	33	153,65	12	15.712,85	-	-	-	-	153,65
		2010	33	8.930,27	60	8.930,26	48	8.840,34	12	89,92	-	-	-	-	8.840,34

Halaman 36 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	42	485,56	105	487,85	84	103,55	21	384,30	-	-	-	-	87,89
		2012	14	6.605,89	23	5.520,27	3	-	20	5.520,27	-	-	-	-	-
		Jumlah	143	33.971,00	277	30.996,76	210	9.272,15	67	21.724,61	-	-	-	-	9.256,49
156	Kab. Karimun	2008	19	4.041,32	30	620,59	30	620,59	-	-	-	-	-	-	620,59
		2009	60	18.277,26	91	23.008,74	82	9.215,91	6	13.753,77	3	39,06	-	-	7.081,84
		2010	62	15.922,98	127	27.381,01	104	25.286,61	11	42,15	12	2.052,25	-	-	25.255,74
		2011	58	50.600,83	150	12.044,23	112	11.777,43	16	255,25	22	11,55	-	-	333,69
		2012	10	1.701.844,66	27	115,42	22	-	5	115,42	-	-	-	-	-
		Jumlah	209	1.790.687,05	425	63.169,99	350	46.900,54	38	14.166,59	37	2.102,86	-	-	33.291,86
157	Kab. Kepulauan Anambas	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	15.934,17	61	1.098,71	54	943,15	7	155,56	-	-	-	-	943,15
		2011	43	18.562,28	104	596,24	58	271,06	45	282,85	1	42,33	-	-	271,06
		2012	18	2.052,47	34	1.007,17	4	2,50	24	860,79	6	143,88	-	-	2,50
		Jumlah	86	36.548,92	199	2.702,12	116	1.216,71	76	1.299,20	7	186,21	-	-	1.216,71
158	Kab. Lingga	2008	24	6.018,06	37	4.390,58	33	2.004,24	4	2.386,34	-	-	-	-	2.004,24
		2009	36	25.301,38	64	2.991,46	45	1.341,33	12	1.650,13	7	-	-	-	1.341,33
		2010	37	41.668,36	88	13.558,27	48	11.570,43	36	1.978,69	4	9,15	-	-	11.570,43
		2011	58	193,33	139	181,81	58	142,35	68	39,46	13	-	-	-	110,10
		2012	14	681.126,17	32	80,74	-	-	-	-	32	80,74	-	-	-
		Jumlah	169	754.307,30	360	21.202,86	184	15.058,35	120	6.054,62	56	89,89	-	-	15.026,10
159	Kab. Natuna	2008	28	10.084,77	43	4.306,37	35	3.025,01	8	1.281,36	-	-	-	-	3.025,01
		2009	43	652,41	61	652,40	48	591,05	12	61,35	1	-	-	-	591,05
		2010	50	12.804,46	101	12.804,45	45	757,46	18	10.030,75	38	2.016,24	-	-	49,70
		2011	57	8.255,37	110	7.035,14	47	6.956,31	19	78,83	44	-	-	-	294,23
		2012	20	8.006,78	30	97,62	20	97,62	6	-	4	-	-	-	97,62
		Jumlah	198	39.803,79	345	24.895,98	195	11.427,45	63	11.452,29	87	2.016,24	-	-	4.057,61

Halaman 37 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
160	Kota Batam	2008	27	20.824,06	33	20.495,93	21	19.852,48	12	643,45	-	-	-	-	19.574,76
		2009	54	13.687,45	98	10.444,24	75	849,73	13	9.586,41	10	8,10	-	-	849,73
		2010	54	7.343,83	102	7.320,54	62	6.600,57	35	700,52	5	19,45	-	-	6.600,57
		2011	60	16.012,07	137	13.725,60	90	1.174,56	30	12.054,94	17	496,10	-	-	5,61
		2012	18	1.209,22	30	1.209,22	-	-	-	-	30	1.209,22	-	-	-
		Jumlah	213	59.076,63	400	53.195,53	248	28.477,34	90	22.985,32	62	1.732,87	-	-	27.030,67
161	Kota Tanjungpinang	2008	41	11.202,46	68	12.597,30	61	444,58	7	12.152,72	-	-	-	-	444,58
		2009	50	8.429,87	61	107,44	49	87,12	5	20,32	7	-	-	-	87,12
		2010	54	6.695,66	106	425,27	93	332,06	9	93,21	4	-	-	-	332,06
		2011	61	1.551,82	140	1.551,81	92	1,51	38	447,76	10	1.102,54	-	-	1,51
		2012	20	73.183,36	31	120,49	6	-	17	120,49	8	-	-	-	-
		Jumlah	226	101.063,17	406	14.802,31	301	865,27	76	12.834,50	29	1.102,54	-	-	865,27
162	Prov. DKI Jakarta	2008	395	339.290,23	849	257.419,15	714	63.309,02	93	11.635,09	31	3.874,37	11	178.600,67	65.367,00
		2009	337	493.220,78	735	202.627,34	592	120.131,70	122	78.571,56	18	3.924,08	3	-	126.705,42
		2010	215	79.695,21	449	24.634,36	372	24.392,29	77	242,07	-	-	-	-	31.091,31
		2011	411	250.022,01	965	85.184,02	569	40.800,80	191	22.324,27	205	22.058,95	-	-	43.376,33
		2012	132	97.568,41	281	35.290,33	44	1.214,53	40	3.229,42	197	30.846,38	-	-	4.134,80
		Jumlah	1.490	1.259.796,64	3.279	605.155,20	2.291	249.848,34	523	116.002,41	451	60.703,78	14	178.600,67	270.674,86
163	Prov. Jawa Barat	2008	140	114.916,55	210	99.652,59	114	96.436,19	16	1.199,67	80	2.016,73	-	-	96.439,20
		2009	104	7.212,28	159	4.422,82	123	1.487,84	34	2.926,53	2	8,45	-	-	2.775,14
		2010	73	16.480,40	183	9.192,87	165	8.141,44	17	669,98	1	381,45	-	-	9.847,80
		2011	100	128.725,58	226	3.367,57	170	3.101,26	53	266,31	3	-	-	-	2.988,32
		2012	20	5.453,00	46	2.786,31	22	49,78	24	2.736,53	-	-	-	-	49,78
		Jumlah	437	272.787,81	824	119.422,16	594	109.216,51	144	7.799,02	86	2.406,63	-	-	112.100,24
164	Kab. Bandung	2008	24	3.554,07	47	3.287,21	42	1.034,57	4	2.092,64	1	160,00	-	-	1.034,57
		2009	42	5.310,54	88	944,54	77	571,35	9	172,35	2	200,84	-	-	815,80
		2010	44	3.629,48	92	1.850,87	47	839,75	30	834,10	15	177,02	-	-	708,46

Halaman 38 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	16	2.415,56	34	2.157,88	22	1.497,94	12	659,94	-	-	-	-	3.088,04
		2012	18	8.740,93	42	7.613,82	1	1.107,29	1	19,15	40	6.487,38	-	-	2.234,40
		Jumlah	144	23.650,58	303	15.854,32	189	5.050,90	56	3.778,18	58	7.025,24	-	-	7.881,27
165	Kab. Bandung Barat	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	38	4.060,89	73	4.060,88	71	339,69	2	3.721,19	-	-	-	-	339,69
		2010	31	1.680,72	84	1.590,40	78	1.590,40	6	-	-	-	-	-	1.590,40
		2011	28	2.042,35	75	1.668,97	64	1.038,22	4	68,60	7	562,15	-	-	1.606,23
		2012	18	274,42	51	274,40	2	84,25	1	93,14	48	97,01	-	-	84,25
		Jumlah	115	8.058,38	283	7.594,65	215	3.052,56	13	3.882,93	55	659,16	-	-	3.620,57
166	Kab. Bekasi	2008	8	1.003,24	15	580,55	13	580,55	1	-	1	-	-	-	580,55
		2009	31	16.648,38	61	15.023,30	36	9.829,12	20	5.194,18	5	-	-	-	11.075,98
		2010	23	6.969,66	41	4.702,65	7	407,44	5	3.707,89	29	587,32	-	-	1.965,26
		2011	25	1.705,31	53	1.685,24	33	366,51	15	1.233,24	5	85,49	-	-	-
		2012	13	14.336,06	31	14.238,06	-	-	-	-	31	14.238,06	-	-	-
		Jumlah	100	40.662,65	201	36.229,80	89	11.183,62	41	10.135,31	71	14.910,87	-	-	13.621,79
167	Kab. Bogor	2008	20	3.370,78	38	2.704,72	34	1.803,14	4	901,58	-	-	-	-	2.371,35
		2009	22	25.003,19	52	22.526,05	34	3.359,58	13	19.092,78	5	73,69	-	-	3.350,52
		2010	27	9.097,39	58	9.097,38	21	660,56	25	5.307,06	12	3.129,76	-	-	660,56
		2011	15	5.764,40	41	4.641,60	28	-	13	4.641,60	-	-	-	-	253,60
		2012	9	3.064,29	23	3.030,12	-	11,87	1	-	22	3.018,25	-	-	11,87
		Jumlah	93	46.300,05	212	41.999,87	117	5.835,15	56	29.943,02	39	6.221,70	-	-	6.647,90
168	Kab. Ciamis	2008	11	3.723,39	19	-	16	-	3	-	-	-	-	-	-
		2009	15	1.227,76	24	882,50	23	882,50	1	-	-	-	-	-	1.118,41
		2010	18	1.520,79	34	956,11	30	956,11	4	-	-	-	-	-	1.311,51
		2011	26	44.556,90	49	26,02	41	26,02	7	-	1	-	-	-	104,18
		2012	22	2.024,19	60	1.800,60	-	-	-	-	60	1.800,60	-	-	-
		Jumlah	92	53.053,03	186	3.665,23	110	1.864,63	15	-	61	1.800,60	-	-	2.534,10

Halaman 39 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
169	Kab. Cianjur	2008	49	4.763,10	88	2.757,51	39	306,86	32	1.267,21	17	1.183,44	-	-	1.958,94
		2009	37	5.875,61	73	5.875,61	5	171,86	11	2.441,12	57	3.262,63	-	-	171,86
		2010	39	7.750,02	76	3.095,72	27	570,44	33	2.525,28	16	-	-	-	1.465,50
		2011	24	15.954,88	65	1.614,23	19	312,86	23	819,45	23	481,92	-	-	381,98
		2012	21	1.489,43	42	1.386,69	6	71,56	-	-	36	1.315,13	-	-	71,56
		Jumlah	170	35.833,04	344	14.729,76	96	1.433,58	99	7.053,06	149	6.243,12	-	-	4.049,84
170	Kab. Cirebon	2008	12	1.971,90	24	1.289,30	23	1.289,30	1	-	-	-	-	-	1.289,30
		2009	38	4.984,33	53	1.679,75	40	1.402,27	11	277,48	2	-	-	-	1.524,75
		2010	17	3.399,26	32	2.243,56	19	239,52	12	1.874,88	1	129,16	-	-	-
		2011	21	4.924,68	55	1.256,68	38	831,48	16	425,20	1	-	-	-	831,48
		2012	15	3.531,36	46	3.491,36	-	-	-	-	46	3.491,36	-	-	-
		Jumlah	103	18.811,53	210	9.960,65	120	3.762,57	40	2.577,56	50	3.620,52	-	-	3.645,53
171	Kab. Garut	2008	8	18.747,07	21	15.812,46	10	122,17	4	8.661,68	7	7.028,61	-	-	122,17
		2009	24	2.112,66	57	2.112,65	27	1.038,40	3	131,50	27	942,75	-	-	1.038,40
		2010	44	7.481,74	71	7.066,91	10	-	10	3.805,50	51	3.261,41	-	-	8,14
		2011	57	10.277,17	123	4.995,52	67	1.186,60	39	3.798,75	17	10,17	-	-	1.111,71
		2012	12	355,78	34	353,35	-	10,07	1	0,14	33	343,14	-	-	12,49
		Jumlah	145	38.974,42	306	30.340,89	114	2.357,24	57	16.397,57	135	11.586,08	-	-	2.292,91
172	Kab. Indramayu	2008	8	1.462,02	18	1.441,37	15	287,00	3	1.154,37	-	-	-	-	307,64
		2009	23	1.629,92	50	1.284,37	44	1.198,58	4	85,79	2	-	-	-	1.324,66
		2010	12	201,88	22	-	16	-	6	-	-	-	-	-	201,88
		2011	23	5.136,82	53	3.832,96	27	1.111,90	19	2.171,13	7	549,93	-	-	-
		2012	18	8.771,52	38	8.771,52	1	-	3	462,30	34	8.309,22	-	-	-
		Jumlah	84	17.202,16	181	15.330,22	103	2.597,48	35	3.873,59	43	8.859,15	-	-	1.834,18
173	Kab. Karawang	2008	18	1.888,37	35	702,20	32	702,20	2	-	1	-	-	-	702,20
		2009	48	10.480,15	109	2.433,84	80	542,81	26	1.336,03	3	555,00	-	-	729,92
				USD 4.00		USD 4.00		USD 4.00							USD 4.00

Halaman 40 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	14	629,28	28	438,18	11	6,96	14	120,52	3	310,70	-	-	210,45
		2011	43	7.041,92	105	6.194,23	12	-	15	3.384,89	78	2.809,34	-	-	177,27
		2012	19	4.019,75	40	4.019,75	-	-	-	-	40	4.019,75	-	-	-
		Jumlah	142	24.059,47	317	13.788,20	135	1.251,97	57	4.841,44	125	7.694,79	-	-	1.819,84
				USD 4.00		USD 4.00		USD 4.00							USD 4.00
174	Kab. Kuningan	2008	9	210,37	17	210,37	16	208,75	1	1,62	-	-	-	-	182,04
		2009	18	1.723,73	39	185,95	38	185,95	1	-	-	-	-	-	274,89
		2010	16	380,57	29	327,67	23	314,13	6	13,54	-	-	-	-	366,13
		2011	21	1.040,36	48	1.040,35	29	953,45	16	86,90	3	-	-	-	736,87
		2012	19	23.077,90	43	2.704,48	15	388,04	28	2.316,44	-	-	-	-	388,89
		Jumlah	83	26.432,93	176	4.468,82	121	2.050,32	52	2.418,50	3	-	-	-	1.948,82
175	Kab. Majalengka	2008	8	127,75	18	127,75	18	127,75	-	-	-	-	-	-	127,75
		2009	21	2.540,23	49	1.144,79	40	842,18	9	302,61	-	-	-	-	853,39
		2010	21	772,52	38	119,69	16	119,69	22	-	-	-	-	-	119,69
		2011	15	1.816,15	31	1.754,15	16	642,45	15	1.111,70	-	-	-	-	704,45
		2012	10	219,07	24	219,07	2	153,15	-	-	22	65,92	-	-	153,15
		Jumlah	75	5.475,72	160	3.365,45	92	1.885,22	46	1.414,31	22	65,92	-	-	1.958,43
176	Kab. Purwakarta	2008	22	4.213,19	54	2.717,02	31	1.150,35	12	1.566,67	11	-	-	-	1.250,73
		2009	38	8.383,50	81	6.592,24	21	183,80	20	3.639,68	40	2.768,76	-	-	194,76
		2010	24	7.705,30	61	7.705,29	12	-	14	6.291,46	35	1.413,83	-	-	133,66
		2011	14	3.970,31	24	2.640,79	4	53,63	17	2.462,92	3	124,24	-	-	582,74
		2012	19	4.857,60	41	4.841,21	-	174,43	1	316,77	40	4.350,01	-	-	174,43
		Jumlah	117	29.129,90	261	24.496,55	68	1.562,21	64	14.277,50	129	8.656,84	-	-	2.336,32
177	Kab. Subang	2008	10	2.294,99	21	170,38	20	94,10	1	76,28	-	-	-	-	94,10
		2009	21	7.997,44	44	2.938,92	34	1.669,85	8	1.229,19	2	39,88	-	-	1.693,38
		2010	13	1.051,29	22	1.051,28	14	146,35	5	904,93	3	-	-	-	146,36

Halaman 41 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	31	16.065,83	53	4.699,70	17	396,27	6	4.075,95	30	227,48	-	-	416,51
		2012	11	202,55	22	202,55	-	-	-	-	22	202,55	-	-	-
		Jumlah	86	27.612,10	162	9.062,83	85	2.306,57	20	6.286,35	57	469,91	-	-	2.350,35
178	Kab. Sukabumi	2008	38	1.217,06	61	617,94	49	367,93	11	218,13	1	31,88	-	-	367,93
		2009	39	7.180,33	84	5.035,36	51	4.400,69	26	487,55	7	147,12	-	-	4.314,98
		2010	14	563,41	19	203,49	13	153,42	4	50,07	2	-	-	-	153,42
		2011	32	4.033,50	89	3.136,58	64	1.203,54	25	1.933,04	-	-	-	-	1.841,20
		2012	15	1.699,04	31	1.699,04	1	30,00	-	-	30	1.669,04	-	-	30,00
		Jumlah	138	14.693,34	284	10.692,41	178	6.155,58	66	2.688,79	40	1.848,04	-	-	6.707,53
179	Kab. Sumedang	2008	13	2.614,23	22	2.583,54	11	424,66	10	2.158,88	1	-	-	-	424,66
		2009	35	1.418,44	64	1.038,94	34	186,07	25	852,87	5	-	-	-	186,07
		2010	11	1.644,88	18	717,37	1	-	12	553,08	5	164,29	-	-	-
		2011	31	4.661,26	99	4.034,60	49	1.547,99	39	2.486,61	11	-	-	-	92,82
		2012	19	3.966,70	52	388,20	3	21,51	1	-	48	366,69	-	-	21,51
		Jumlah	109	14.305,51	255	8.762,65	98	2.180,23	87	6.051,44	70	530,98	-	-	725,06
180	Kab. Tasikmalaya	2008	27	1.075,94	40	657,57	32	521,92	8	135,65	-	-	-	-	531,63
		2009	8	37,02	13	37,02	12	37,02	1	-	-	-	-	-	37,02
		2010	7	771,80	17	771,79	4	26,91	11	744,88	2	-	-	-	-
		2011	62	14.092,85	158	5.857,81	40	255,52	35	3.260,65	83	2.341,64	-	-	254,53
		2012	10	1.471,72	22	596,72	-	-	-	-	22	596,72	-	-	-
		Jumlah	114	17.449,33	250	7.920,91	88	841,37	55	4.141,18	107	2.938,36	-	-	823,18
181	Kota Bandung	2008	12	971,43	17	971,43	4	542,05	13	429,38	-	-	-	-	542,05
		2009	74	6.083,72	165	3.861,75	82	3.645,43	42	172,71	41	43,61	-	-	3.660,91
		2010	43	22.538,26	110	22.100,28	67	682,32	27	5.078,51	16	16.339,45	-	-	684,10
		2011	39	25.857,57	102	20.786,18	73	9.424,82	14	9.004,80	15	2.356,56	-	-	10.330,42
		2012	19	29.073,35	47	3.367,88	-	-	-	-	47	3.367,88	-	-	-
		Jumlah	187	84.524,33	441	51.087,52	226	14.294,62	96	14.685,40	119	22.107,50	-	-	15.217,48

Halaman 42 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
182	Kota Banjar	2008	10	10.818,52	11	695,92	11	695,92	-	-	-	-	-	-	440,07
		2009	21	1.026,98	33	411,91	29	411,91	2	-	2	-	-	-	396,89
		2010	21	595,37	38	251,92	37	251,92	1	-	-	-	-	-	251,92
		2011	12	492,92	28	492,92	24	492,92	2	-	2	-	-	-	492,92
		2012	13	893,81	32	893,81	12	893,81	20	-	-	-	-	-	893,81
		Jumlah	77	13.827,60	142	2.746,48	113	2.746,48	25	-	4	-	-	-	2.475,61
183	Kota Bekasi	2008	22	1.619,44	42	1.491,49	34	1.141,50	7	349,99	1	-	-	-	1.611,04
		2009	46	1.410,34	70	171,75	40	78,13	17	93,62	13	-	-	-	262,39
		2010	20	6.317,54	34	6.317,54	5	4.668,38	19	833,46	10	815,70	-	-	1.649,16
		2011	32	3.901,61	71	3.291,90	25	26,26	28	2.755,67	18	509,97	-	-	26,26
		2012	24	2.096,37	64	602,87	1	37,29	-	-	63	565,58	-	-	37,29
		Jumlah	144	15.345,30	281	11.875,55	105	5.951,56	71	4.032,74	105	1.891,25	-	-	3.586,14
184	Kota Bogor	2008	16	1.627,24	29	1.256,80	21	111,00	-	-	8	1.145,80	-	-	193,14
		2009	9	933,56	22	842,78	21	842,78	1	-	-	-	-	-	842,78
		2010	33	4.023,55	58	1.137,34	51	557,93	7	579,41	-	-	-	-	570,89
		2011	22	19.300,60	65	1.661,75	10	269,15	12	-	43	1.392,60	-	-	269,20
		2012	11	1.117,66	21	704,40	-	-	-	-	21	704,40	-	-	-
		Jumlah	91	27.002,61	195	5.603,07	103	1.780,86	20	579,41	72	3.242,80	-	-	1.876,01
185	Kota Cimahi	2008	12	1.393,51	15	1.140,18	4	91,45	9	1.033,73	2	15,00	-	-	91,45
		2009	40	4.080,76	87	2.758,66	25	518,30	11	1.219,69	51	1.020,67	-	-	518,30
		2010	24	3.961,26	49	885,44	29	433,75	14	451,69	6	-	-	-	433,75
		2011	24	527,39	47	507,38	21	90,36	10	417,02	16	-	-	-	90,36
		2012	27	3.305,90	76	2.981,91	-	-	-	-	76	2.981,91	-	-	40,48
		Jumlah	127	13.268,82	274	8.273,57	79	1.133,86	44	3.122,13	151	4.017,58	-	-	1.174,34
186	Kota Cirebon	2008	35	16.915,42	54	3.145,98	50	1.939,31	4	1.206,67	-	-	-	-	1.575,63
		2009	24	1.099,18	51	228,27	40	191,54	11	36,73	-	-	-	-	191,54
		2010	15	272,27	39	272,27	36	272,27	3	-	-	-	-	-	221,59

Halaman 43 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	20	6.633,94	46	2.213,87	35	1.505,73	10	684,03	1	24,11	-	-	1.558,67
		2012	16	852,10	40	353,66	12	68,00	15	31,28	13	254,38	-	-	14,27
		Jumlah	110	25.772,91	230	6.214,05	173	3.976,85	43	1.958,71	14	278,49	-	-	3.561,70
187	Kota Depok	2008	12	2.309,48	26	742,02	26	742,02	-	-	-	-	-	-	704,54
		2009	37	14.608,29	74	10.980,89	71	10.817,82	3	163,07	-	-	-	-	1.650,51
		2010	12	3.385,69	23	419,92	17	419,92	5	-	1	-	-	-	352,47
		2011	7	24,12	11	24,12	6	24,12	5	-	-	-	-	-	24,12
		2012	11	775,95	25	775,94	1	114,92	-	-	24	661,02	-	-	-
		Jumlah	79	21.103,53	159	12.942,89	121	12.118,80	13	163,07	25	661,02	-	-	2.731,64
188	Kota Sukabumi	2008	18	7.882,88	36	700,75	33	654,27	3	46,48	-	-	-	-	654,27
		2009	22	3.300,22	51	1.555,10	34	477,77	16	1.077,33	1	-	-	-	297,13
		2010	25	1.014,73	57	950,40	33	166,45	24	783,95	-	-	-	-	166,56
		2011	67	5.089,66	163	2.403,63	106	1.764,01	57	639,62	-	-	-	-	1.428,97
		2012	15	729,09	40	630,24	22	158,04	18	472,20	-	-	-	-	158,04
		Jumlah	147	18.016,58	347	6.240,12	228	3.220,54	118	3.019,58	1	-	-	-	2.704,97
189	Kota Tasikmalaya	2008	39	5.110,16	95	3.756,00	80	1.716,33	3	17,08	12	2.022,59	-	-	1.725,85
		2009	23	3.924,36	47	1.555,18	29	681,61	15	850,02	3	23,55	-	-	686,58
		2010	7	940,91	14	940,91	-	-	-	-	14	940,91	-	-	-
		2011	22	521,82	56	521,81	4	-	2	221,07	50	300,74	-	-	-
		2012	19	559,52	39	559,52	14	559,52	22	-	3	-	-	-	559,52
		Jumlah	110	11.056,77	251	7.333,42	127	2.957,46	42	1.088,17	82	3.287,79	-	-	2.971,95
190	Prov. Jawa Tengah	2008	71	22.845,59	137	22.154,49	94	20.845,23	4	1.247,93	39	61,33	-	-	20.845,23
		2009	24	1.160,24	48	1.160,23	37	174,80	10	933,23	1	52,20	-	-	274,78
		2010	52	11.896,45	92	8.944,25	55	1.523,07	12	976,17	23	6.445,01	2	-	1.523,07
		2011	45	1.533,95	131	1.662,82	58	1.662,82	51	-	21	-	1	-	1.662,82
		2012	18	18.516,31	40	2.119,47	8	1.952,57	32	166,90	-	-	-	-	1.952,57
		Jumlah	210	55.952,54	448	36.041,26	252	26.158,49	109	3.324,23	84	6.558,54	3	-	26.258,47

Halaman 44 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
191	Kab. Banjarnegara	2008	44	806,10	115	806,10	115	806,10	-	-	-	-	-	-	806,10
		2009	13	1.931,96	23	1.931,96	23	1.931,96	-	-	-	-	-	-	1.931,96
		2010	27	7.028,12	40	498,07	36	461,24	4	36,83	-	-	-	-	461,24
		2011	29	5.672,01	53	5.664,01	47	5.175,19	6	488,82	-	-	-	-	3.376,48
		2012	17	1.453,68	47	73,72	44	73,72	3	-	-	-	-	-	175,68
		Jumlah	130	16.891,87	278	8.973,86	265	8.448,21	13	525,65	-	-	-	-	6.751,46
192	Kab. Banyumas	2008	15	5.303,77	43	5.303,76	41	3.939,19	2	1.364,57	-	-	-	-	3.939,19
		2009	16	1.516,64	38	658,25	38	658,25	-	-	-	-	-	-	658,25
		2010	20	263,68	36	184,81	36	184,81	-	-	-	-	-	-	263,68
		2011	29	3.266,10	58	2.185,58	47	2.169,57	11	16,01	-	-	-	-	614,59
		2012	6	287,77	15	-	7	-	8	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	86	10.637,96	190	8.332,40	169	6.951,82	21	1.380,58	-	-	-	-	5.475,71
193	Kab. Batang	2008	32	643,77	65	584,83	55	284,24	4	300,59	-	-	6	-	284,24
		2009	15	241,57	29	241,57	28	184,07	1	57,50	-	-	-	-	184,07
		2010	27	505,27	44	106,25	26	99,24	18	7,01	-	-	-	-	213,07
		2011	9	208,99	18	-	14	-	4	-	-	-	-	-	-
		2012	12	90,63	20	83,71	6	-	14	83,71	-	-	-	-	-
		Jumlah	95	1.690,23	176	1.016,36	129	567,55	41	448,81	-	-	6	-	681,38
194	Kab. Blora	2008	24	2.595,59	59	1.008,26	58	891,31	1	116,95	-	-	-	-	891,31
		2009	14	368,86	35	333,22	23	272,74	12	60,48	-	-	-	-	272,74
		2010	29	987,88	66	306,48	45	166,19	21	140,29	-	-	-	-	524,36
		2011	33	35,77	64	-	14	-	49	-	1	-	-	-	22,33
		2012	18	13.183,03	49	647,96	19	-	29	-	1	647,96	-	-	-
		Jumlah	118	17.171,13	273	2.295,92	159	1.330,24	112	317,72	2	647,96	-	-	1.710,74
195	Kab. Boyolali	2008	17	1.328,20	31	10,47	29	10,47	1	-	1	-	-	-	10,47
		2009	12	18.540,13	19	40,13	15	32,21	4	7,92	-	-	-	-	32,21
		2010	10	4.918,88	25	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-

Halaman 45 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	33	10.758,84	61	111,14	16	33,69	20	40,56	25	36,89	-	-	33,69
		2012	14	261,10	29	-	4	-	25	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	86	35.807,15	165	161,74	88	76,37	51	48,48	26	36,89	-	-	76,37
196	Kab. Brebes	2008	36	2.295,76	87	2.295,75	72	1.868,25	12	427,50	3	-	-	-	1.869,44
		2009	12	344,65	32	344,64	26	147,16	6	197,48	-	-	-	-	110,37
		2010	15	153,50	35	153,50	12	-	19	153,50	4	-	-	-	-
		2011	9	46,38	26	46,38	9	46,38	17	-	-	-	-	-	46,38
		2012	20	9.869,96	42	244,75	10	40,49	11	188,37	21	15,89	-	-	40,49
		Jumlah	92	12.710,25	222	3.085,02	129	2.102,28	65	966,85	28	15,89	-	-	2.066,68
197	Kab. Cilacap	2008	20	13.897,24	39	13.897,24	38	13.460,24	1	437,00	-	-	-	-	13.460,24
		2009	44	854,06	99	854,06	97	745,56	2	108,50	-	-	-	-	745,56
		2010	20	7.731,65	36	7.731,64	34	170,34	2	7.561,30	-	-	-	-	170,34
		2011	51	2.415,83	104	2.416,58	88	2.382,44	14	34,14	2	-	-	-	441,80
		2012	22	2.206,65	46	1.596,82	18	1.302,51	17	90,20	11	204,11	-	-	213,76
		Jumlah	157	27.105,43	324	26.496,34	275	18.061,09	36	8.231,14	13	204,11	-	-	15.031,70
198	Kab. Demak	2008	21	2.462,46	43	627,18	41	627,18	2	-	-	-	-	-	627,18
		2009	14	320,21	42	320,20	32	14,21	9	305,99	1	-	-	-	14,21
		2010	24	933,73	37	933,73	29	645,50	5	288,23	3	-	-	-	645,50
		2011	21	315,39	61	315,38	42	245,81	13	69,57	6	-	-	-	245,81
		2012	15	1.729,03	33	1.671,47	12	27,61	19	-	2	1.643,86	-	-	-
		Jumlah	95	5.760,82	216	3.867,96	156	1.560,31	48	663,79	12	1.643,86	-	-	1.532,70
199	Kab. Grobogan	2008	18	4.502,73	34	4.156,94	25	1.552,39	8	2.604,55	1	-	-	-	1.552,39
		2009	19	5.384,80	39	2.881,56	31	1.769,13	6	1.112,43	2	-	-	-	1.769,13
		2010	21	6.527,30	59	1.604,82	22	1.287,54	31	317,28	6	-	-	-	1.287,54
		2011	16	1.070,19	34	537,88	16	455,60	17	82,28	1	-	-	-	455,60
		2012	15	348,70	31	115,37	8	-	11	-	12	115,37	-	-	-
		Jumlah	89	17.833,72	197	9.296,57	102	5.064,66	73	4.116,54	22	115,37	-	-	5.064,66

Halaman 46 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
200	Kab. Jepara	2008	16	56,83	23	56,83	23	56,83	-	-	-	-	-	-	56,83
		2009	11	1.347,70	22	1.347,70	22	1.347,70	-	-	-	-	-	-	1.347,70
		2010	12	361,20	25	361,20	25	361,20	-	-	-	-	-	-	361,20
		2011	6	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	-	16	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	54	1.765,73	102	1.765,73	87	1.765,73	15	-	-	-	-	-	1.765,73
201	Kab. Karanganyar	2008	19	141,98	26	141,98	26	141,98	-	-	-	-	-	-	87,61
		2009	9	1.724,12	18	1.724,12	16	478,53	2	1.245,59	-	-	-	-	478,53
		2010	31	3.990,17	65	3.595,16	61	358,68	4	3.236,48	-	-	-	-	333,09
		2011	26	3.887,80	49	56,16	40	56,16	9	-	-	-	-	-	56,16
		2012	14	3.831,12	32	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-
		Jumlah	99	13.575,19	190	5.517,42	143	1.035,35	15	4.482,07	32	-	-	-	955,39
202	Kab. Kebumen	2008	23	697,48	44	697,48	37	517,46	7	180,02	-	-	-	-	517,46
		2009	10	11.554,62	14	11.554,62	12	11.554,62	2	-	-	-	-	-	11.554,62
		2010	26	146,17	43	146,17	39	146,17	4	-	-	-	-	-	146,17
		2011	28	1.579,35	65	1.579,35	62	1.579,35	3	-	-	-	-	-	1.579,35
		2012	20	722,06	39	688,84	32	688,84	7	-	-	-	-	-	688,84
		Jumlah	107	14.699,68	205	14.666,46	182	14.486,44	23	180,02	-	-	-	-	14.486,44
203	Kab. Kendal	2008	35	6.631,04	74	6.625,90	24	5,12	18	1.604,72	32	5.016,06	-	-	5,12
		2009	23	186.975,84	45	3.329,01	32	59,43	13	3.269,58	-	-	-	-	59,43
		2010	16	6.569,37	41	4.176,43	11	28,66	25	749,07	5	3.398,70	-	-	28,66
		2011	9	1.574,29	19	1.540,79	5	-	13	1.540,79	1	-	-	-	-
		2012	16	2.415,33	32	-	1	-	12	-	19	-	-	-	-
		Jumlah	99	204.165,87	211	15.672,13	73	93,21	81	7.164,16	57	8.414,76	-	-	93,21
204	Kab. Klaten	2008	12	1.327,39	35	289,41	32	238,05	3	51,36	-	-	-	-	470,35
		2009	8	1.314,96	22	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-
		2010	32	8.513,99	64	2.974,53	28	7,05	34	2.967,48	2	-	-	-	7,05

Halaman 47 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	26	2.306,34	49	115,00	11	115,00	38	-	-	-	-	-	115,00
		2012	15	6.598,60	34	6.580,07	6	4.543,98	28	-	-	2.036,09	-	-	4.543,98
		Jumlah	93	20.061,28	204	9.959,01	88	4.904,08	114	3.018,84	2	2.036,09	-	-	5.136,38
205	Kab. Kudus	2008	30	969,27	53	253,37	53	253,37	-	-	-	-	-	-	253,37
		2009	15	480,63	27	5,64	27	5,64	-	-	-	-	-	-	5,64
		2010	25	1.219,74	39	1.219,73	33	615,29	6	604,44	-	-	-	-	615,29
		2011	20	20.665,95	51	521,62	44	521,62	7	-	-	-	-	-	521,62
		2012	10	2.142,14	23	505,47	6	-	16	505,47	1	-	-	-	-
		Jumlah	100	25.477,73	193	2.505,83	163	1.395,92	29	1.109,91	1	-	-	-	1.395,92
206	Kab. Magelang	2008	42	290,26	85	290,25	35	48,76	50	241,49	-	-	-	-	48,76
		2009	12	166,61	32	166,61	26	139,59	6	27,02	-	-	-	-	149,51
		2010	21	991,87	41	991,86	35	704,57	5	287,29	1	-	-	-	704,57
		2011	19	9.891,29	36	2.842,92	15	2.621,68	21	221,24	-	-	-	-	2.621,68
		2012	28	10.938,37	72	91,80	7	-	59	91,80	6	-	-	-	-
		Jumlah	122	22.278,40	266	4.383,44	118	3.514,60	141	868,84	7	-	-	-	3.524,52
207	Kab. Pati	2008	29	5.448,34	78	1.069,01	73	1.069,01	4	-	1	-	-	-	1.052,64
		2009	24	2.965,37	51	241,77	47	241,77	4	-	-	-	-	-	241,77
		2010	12	1.137,31	28	1.137,31	20	1.137,31	8	-	-	-	-	-	1.137,31
		2011	14	836,67	34	791,72	22	388,12	10	403,60	2	-	-	-	388,12
		2012	9	133,91	24	133,91	1	-	23	133,91	-	-	-	-	-
		Jumlah	88	10.521,60	215	3.373,72	163	2.836,21	49	537,51	3	-	-	-	2.819,84
208	Kab. Pekalongan	2008	11	173,01	36	173,01	26	107,86	10	65,15	-	-	-	-	107,86
		2009	10	191,60	28	136,09	24	89,01	4	47,08	-	-	-	-	134,41
		2010	12	3.931,60	26	3.931,59	15	2.009,79	11	1.921,80	-	-	-	-	2.009,79
		2011	28	593,61	51	70,49	19	-	32	70,49	-	-	-	-	427,13
		2012	16	388,77	27	-	16	-	9	-	2	-	-	-	-
		Jumlah	77	5.278,59	168	4.311,18	100	2.206,66	66	2.104,52	2	-	-	-	2.679,19

Halaman 48 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
209	Kab. Pemalang	2008	24	103,60	48	-	45	-	3	-	-	-	-	-	-
		2009	14	75,88	26	75,87	17	35,36	8	40,51	1	-	-	-	35,36
		2010	52	1.936,31	84	8,86	34	8,86	48	-	2	-	-	-	8,86
		2011	22	561,12	43	342,91	25	342,91	16	-	2	-	-	-	342,91
		2012	11	678,63	20	401,23	3	-	17	401,23	-	-	-	-	-
		Jumlah	123	3.355,54	221	828,87	124	387,13	92	441,74	5	-	-	-	387,13
210	Kab. Purbalingga	2008	8	1.827,71	21	532,27	18	408,35	2	123,92	1	-	-	-	408,35
		2009	10	1.476,07	16	1.476,07	8	1.077,08	4	398,99	4	-	-	-	1.077,08
		2010	44	480,86	75	510,40	68	214,96	7	295,44	-	-	-	-	214,96
		2011	16	587,50	35	587,50	28	587,50	7	-	-	-	-	-	587,50
		2012	11	9.743,83	31	45,00	2	-	29	45,00	-	-	-	-	45,00
		Jumlah	89	14.115,97	178	3.151,24	124	2.287,89	49	863,35	5	-	-	-	2.332,89
211	Kab. Purworejo	2008	25	3.457,21	49	3.457,21	24	1.544,16	13	1.808,05	12	105,00	-	-	1.544,16
		2009	12	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	261,69
		2010	24	837,40	44	437,21	34	37,55	10	399,66	-	-	-	-	206,20
		2011	26	993,24	54	77,71	37	-	17	77,71	-	-	-	-	535,15
		2012	15	754,02	25	594,53	9	-	16	594,53	-	-	-	-	159,48
		Jumlah	102	6.041,87	192	4.566,66	124	1.581,71	56	2.879,95	12	105,00	-	-	2.706,68
212	Kab. Rembang	2008	22	5.381,46	41	1.231,56	29	235,17	12	996,39	-	-	-	-	235,17
		2009	12	1.963,34	31	661,33	18	77,24	13	584,09	-	-	-	-	77,24
		2010	24	511,33	60	274,23	28	137,86	32	136,37	-	-	-	-	137,86
		2011	7	-	14	-	4	-	10	-	-	-	-	-	-
		2012	17	353,81	52	5.073,38	11	1.540,89	41	3.532,49	-	-	-	-	1.540,89
		Jumlah	82	8.209,94	198	7.240,50	90	1.991,16	108	5.249,34	-	-	-	-	1.991,16
213	Kab. Semarang	2008	31	5.499,73	61	5.499,73	61	4.670,96	-	828,77	-	-	-	-	2.166,87
		2009	11	722,28	24	474,28	16	109,78	7	364,50	1	-	-	-	109,78
		2010	33	-	70	-	31	-	18	-	21	-	-	-	-

Halaman 49 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	29	-	52	-	31	-	20	-	1	-	-	-	-
		2012	9	-	28	-	15	-	12	-	1	-	-	-	-
		Jumlah	113	6.222,01	235	5.974,01	154	4.780,74	57	1.193,27	24	-	-	-	2.276,65
214	Kab. Sragen	2008	14	1.317,63	28	62,49	28	62,49	-	-	-	-	-	-	62,49
		2009	24	1.471,24	45	1.041,33	44	1.041,33	1	-	-	-	-	-	1.041,33
		2010	19	428,14	38	-	37	-	-	-	-	-	1	-	-
		2011	25	1.568,28	58	240,40	54	240,40	3	-	1	-	-	-	239,80
		2012	6	11.555,08	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	88	16.340,37	175	1.344,22	169	1.344,22	4	-	1	-	1	-	1.343,62
215	Kab. Sukoharjo	2008	27	3.475,81	63	32,05	48	17,36	15	14,69	-	-	-	-	17,36
		2009	12	816,85	31	518,10	27	439,34	4	78,76	-	-	-	-	439,34
		2010	5	103,68	12	103,68	12	103,68	-	-	-	-	-	-	103,68
		2011	16	1.834,56	37	653,95	23	336,95	14	317,00	-	-	-	-	336,95
		2012	14	1.115,33	38	1.130,81	10	34,74	28	1.096,07	-	-	-	-	34,74
		Jumlah	74	7.346,23	181	2.438,59	120	932,07	61	1.506,52	-	-	-	-	932,07
216	Kab. Tegal	2008	21	3.860,12	43	2.341,74	18	223,82	17	495,15	8	1.622,77	-	-	132,26
		2009	26	12.915,11	76	12.891,08	14	143,16	36	12.124,15	26	623,77	-	-	175,31
		2010	12	1.236,16	30	1.236,16	3	696,73	4	539,43	23	-	-	-	80,47
		2011	23	3.919,54	42	3.619,84	7	457,36	17	3.097,38	18	65,10	-	-	435,25
		2012	10	218,21	19	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	92	22.149,14	210	20.088,82	42	1.521,07	93	16.256,11	75	2.311,64	-	-	823,29
217	Kab. Temanggung	2008	10	112,70	21	112,70	20	55,00	1	57,70	-	-	-	-	55,00
		2009	11	626,54	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	10.188,59	43	10.174,04	38	7.266,83	5	2.907,21	-	-	-	-	7.281,38
		2011	20	105,69	30	-	26	-	4	-	-	-	-	-	-
		2012	28	396,91	60	419,12	40	205,26	20	213,86	-	-	-	-	205,77
		Jumlah	94	11.430,43	176	10.705,86	146	7.527,09	30	3.178,77	-	-	-	-	7.542,15

Halaman 50 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
218	Kab. Wonogiri	2008	23	551,05	46	-	43	-	3	-	-	-	-	-	-
		2009	14	10.376,44	36	94,96	27	87,10	8	7,86	-	-	1	-	87,10
		2010	13	211,44	22	-	17	-	5	-	-	-	-	-	-
		2011	10	-	17	-	8	-	9	-	-	-	-	-	-
		2012	10	-	20	-	2	-	18	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	70	11.138,93	141	94,96	97	87,10	43	7,86	-	-	1	-	87,10
219	Kab. Wonosobo	2008	25	1.192,74	51	907,65	35	710,89	14	196,76	2	-	-	-	-
		2009	19	5.476,28	30	15,98	6	0,66	24	15,32	-	-	-	-	-
		2010	31	8.822,20	71	8.245,25	32	184,71	32	8.059,52	7	1,02	-	-	184,71
		2011	41	862,96	75	63,20	48	63,20	27	-	-	-	-	-	63,20
		2012	19	5.758,15	52	654,69	24	120,62	28	534,07	-	-	-	-	-
		Jumlah	135	22.112,33	279	9.886,77	145	1.080,08	125	8.805,67	9	1,02	-	-	247,91
220	Kota Magelang	2008	22	3.532,71	58	3.532,70	41	3.393,70	11	139,00	6	-	-	-	3.393,70
		2009	25	696,20	31	696,20	6	95,50	5	600,70	20	-	-	-	95,50
		2010	54	11.166,83	101	9.071,96	72	3.917,06	25	5.154,90	4	-	-	-	3.917,06
		2011	30	7.274,91	70	6.509,90	50	1.509,90	15	5.000,00	4	-	1	-	1.509,90
		2012	21	614,35	3	40,58	-	-	-	-	3	40,58	-	-	-
		Jumlah	152	23.285,00	263	19.851,34	169	8.916,16	56	10.894,60	37	40,58	1	-	8.916,16
221	Kota Pekalongan	2008	29	-	63	-	54	-	9	-	-	-	-	-	-
		2009	9	2.927,38	20	2.927,37	17	2.365,75	3	561,62	-	-	-	-	2.365,75
		2010	23	17.695,33	46	14.221,83	22	4.542,39	23	9.679,44	1	-	-	-	4.543,39
		2011	10	1.686,46	25	112,56	11	112,56	13	-	1	-	-	-	112,56
		2012	15	1,29	25	1,29	5	1,29	20	-	-	-	-	-	1,29
		Jumlah	86	22.310,46	179	17.263,05	109	7.021,99	68	10.241,06	2	-	-	-	7.022,99
222	Kota Salatiga	2008	18	205,75	26	205,75	23	205,75	2	-	1	-	-	-	205,75
		2009	11	316,21	25	354,68	24	316,21	1	38,47	-	-	-	-	316,21
		2010	30	15.291,92	55	15.291,92	39	14.880,23	15	411,69	-	-	1	-	14.880,23

Halaman 51 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	12	1.962,75	37	1.962,75	26	1.746,80	11	215,95	-	-	-	-	1.746,80
		2012	16	1.158,93	47	9.862,99	7	3.637,80	40	6.225,19	-	-	-	-	3.637,80
		Jumlah	87	18.935,56	190	27.678,09	119	20.786,79	69	6.891,30	1	-	1	-	20.786,79
223	Kota Semarang	2008	23	4.599,47	72	4.599,46	63	440,71	8	4.158,75	1	-	-	-	440,71
		2009	39	1.920,55	66	1.920,54	33	1.157,65	16	739,47	17	23,42	-	-	1.157,65
		2010	24	6.074,37	46	5.396,28	33	2.020,57	12	3.375,71	1	-	-	-	2.045,37
		2011	40	1.501,81	143	1.512,91	71	1.137,73	50	375,18	21	-	1	-	1.137,73
		2012	13	5.278,65	24	3.160,72	6	23,43	18	3.137,29	-	-	-	-	23,43
		Jumlah	139	19.374,85	351	16.589,91	206	4.780,09	104	11.786,40	40	23,42	1	-	4.804,89
224	Kota Surakarta	2008	25	477,84	40	477,83	34	421,01	6	56,82	-	-	-	-	421,01
		2009	13	526,80	24	168,19	23	168,19	1	-	-	-	-	-	168,19
		2010	23	911,19	43	847,06	34	494,47	9	352,59	-	-	-	-	489,59
		2011	10	1.058,53	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	143,00
		2012	13	217,04	27	20,13	10	18,93	17	1,20	-	-	-	-	204,84
		Jumlah	84	3.191,40	151	1.513,21	118	1.102,60	33	410,61	-	-	-	-	1.426,63
225	Kota Tegal	2008	20	534,97	55	534,96	46	499,62	9	35,34	-	-	-	-	499,62
		2009	22	2.685,16	48	1.685,15	41	1.289,17	7	395,98	-	-	-	-	1.294,60
		2010	21	540,42	33	218,26	24	137,72	9	80,54	-	-	-	-	141,24
		2011	27	3.032,93	55	3.032,92	33	821,29	18	2.010,34	4	201,29	-	-	748,11
		2012	12	5.695,50	24	75,46	11	75,46	13	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	102	12.488,98	215	5.546,75	155	2.823,26	56	2.522,20	4	201,29	-	-	2.683,57
226	Prov. D.I. Yogyakarta	2008	32	47,78	59	47,78	57	47,78	-	-	2	-	-	-	47,78
		2009	39	18.576,10	52	18.576,10	52	18.576,10	-	-	-	-	-	-	18.551,97
		2010	34	3.360,24	69	3.360,23	65	2.378,80	4	981,43	-	-	-	-	2.059,98
		2011	40	2.166,89	72	2.166,89	39	1.260,91	33	905,98	-	-	-	-	128,05
		2012	22	903,55	38	139,43	19	-	19	139,43	-	-	-	-	-
		Jumlah	167	25.054,56	290	24.290,43	232	22.263,59	56	2.026,84	2	-	-	-	20.787,78

Halaman 52 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
227	Kab. Bantul	2008	42	638,58	76	638,58	72	638,58	2	-	2	-	-	-	638,58
		2009	20	3.612,00	23	3.611,99	16	2.018,33	4	1.593,66	3	-	-	-	2.018,33
		2010	53	3.213,74	75	2.777,25	60	1.962,25	7	-	6	-	2	815,00	1.962,25
		2011	32	1.879,88	66	1.879,87	43	390,40	23	1.489,47	-	-	-	-	390,40
		2012	12	1.902,35	20	633,74	2	72,37	18	561,37	-	-	-	-	324,70
		Jumlah	159	11.246,55	260	9.541,43	193	5.081,93	54	3.644,50	11	-	2	815,00	5.334,26
228	Kab. Gunung Kidul	2008	42	1.518,40	94	894,05	92	894,05	2	-	-	-	-	-	894,05
		2009	10	49,78	19	49,78	16	49,78	2	-	1	-	-	-	49,78
		2010	22	587,16	44	587,15	33	329,19	11	257,96	-	-	-	-	329,19
		2011	19	1.084,61	35	1.084,60	10	757,74	21	149,47	4	177,39	-	-	553,13
		2012	26	1.580,73	66	10,38	-	-	55	10,38	11	-	-	-	-
		Jumlah	119	4.820,68	258	2.625,96	151	2.030,76	91	417,81	16	177,39	-	-	1.826,15
229	Kab. Kulon Progo	2008	16	72,16	20	72,16	20	72,16	-	-	-	-	-	-	119,72
		2009	6	884.817,96	16	712,03	16	712,03	-	-	-	-	-	-	712,03
		2010	10	816,49	21	802,63	18	802,63	3	-	-	-	-	-	802,63
		2011	57	307,38	91	93,60	67	93,60	23	-	1	-	-	-	215,99
		2012	14	118,25	20	118,24	2	43,33	8	74,91	10	-	-	-	43,33
		Jumlah	103	886.132,24	168	1.798,66	123	1.723,75	34	74,91	11	-	-	-	1.893,70
230	Kab. Sleman	2008	28	3.507,83	67	3.507,83	67	3.507,83	-	-	-	-	-	-	3.507,83
		2009	36	22.602,85	53	22.602,84	51	22.478,93	2	123,91	-	-	-	-	22.478,93
		2010	41	172,92	72	172,92	70	40,57	2	132,35	-	-	-	-	40,57
		2011	31	178,80	56	14,58	52	14,58	4	-	-	-	-	-	0,21
		2012	25	962,41	47	176,12	-	-	-	-	47	176,12	-	-	262,09
		Jumlah	161	27.424,81	295	26.474,29	240	26.041,91	8	256,26	47	176,12	-	-	26.289,63
231	Kota Yogyakarta	2008	12	1.212,46	21	1.212,46	20	1.200,16	1	12,30	-	-	-	-	1.200,16
		2009	33	41.460,43	45	41.460,43	39	14.889,34	6	26.571,09	-	-	-	-	-
		2010	40	1.081,10	85	1.048,67	76	29,17	9	1.019,50	-	-	-	-	29,17

Halaman 53 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	28	10.399,94	45	6.138,54	27	79,38	7	180,91	11	5.878,25	-	-	74,76
		2012	19	218,30	31	173,72	-	-	31	173,72	-	-	-	-	-
		Jumlah	132	54.372,23	227	50.033,82	162	16.198,05	54	27.957,52	11	5.878,25	-	-	1.304,09
232	Prov. Jawa Timur	2008	104	7.374,66	157	855,94	98	855,94	6	-	53	-	-	-	875,08
		2009	47	3.295,77	76	651,50	71	651,50	5	-	-	-	-	-	711,18
		2010	47	24.917,84	77	17.287,79	66	16.984,21	11	303,58	-	-	-	-	23.836,85
		2011	88	6.592,59	180	4.231,06	108	2.267,26	48	1.963,80	24	-	-	-	2.236,16
		2012	13	73.701,70	31	1.916,87	23	1.916,87	8	-	-	-	-	-	1.916,87
		Jumlah	299	115.882,56	521	24.943,16	366	22.675,78	78	2.267,38	77	-	-	-	29.576,14
233	Kab. Bangkalan	2008	41	1.023,32	74	664,42	74	664,42	-	-	-	-	-	-	846,34
		2009	23	112,50	49	112,50	49	112,50	-	-	-	-	-	-	112,50
		2010	23	734,18	39	66,42	39	66,42	-	-	-	-	-	-	582,61
		2011	10	-	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	4	-	10	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	101	1.870,00	193	843,34	191	843,34	2	-	-	-	-	-	1.541,45
234	Kab. Banyuwangi	2008	97	5.782,90	192	4.693,48	169	731,81	18	3.950,38	5	11,29	-	-	1.037,73
		2009	22	4.719,64	28	17,59	27	17,59	1	-	-	-	-	-	17,59
		2010	50	921,36	111	910,55	109	653,91	2	256,64	-	-	-	-	664,72
		2011	30	10.576,31	105	1.079,93	75	383,20	28	696,73	2	-	-	-	390,14
		2012	16	1.056,11	32	846,04	17	-	14	846,04	1	-	-	-	-
		Jumlah	215	23.056,32	468	7.547,59	397	1.786,51	63	5.749,79	8	11,29	-	-	2.110,18
235	Kab. Blitar	2008	50	2.200,62	80	131,81	74	131,81	6	-	-	-	-	-	670,33
		2009	35	4.609,49	52	2.275,54	44	1.142,42	8	1.133,12	-	-	-	-	1.699,97
		2010	41	1.890,82	89	584,07	56	35,60	23	399,31	10	149,16	-	-	703,77
		2011	36	5.213,26	80	3.990,10	68	3.990,10	12	-	-	-	-	-	3.990,10
		2012	19	948,58	51	498,57	35	474,45	14	24,12	2	-	-	-	474,45
		Jumlah	181	14.862,77	352	7.480,09	277	5.774,38	63	1.556,55	12	149,16	-	-	7.538,62

Halaman 54 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
236	Kab. Bojonegoro	2008	57	7.360,13	82	7.109,34	80	1.098,96	2	6.010,38	-	-	-	-	1.098,96
		2009	54	40.591,28	98	5.355,42	92	2.070,32	6	3.285,10	-	-	-	-	2.106,22
		2010	31	11.008,36	67	1.616,95	62	1.187,44	5	429,51	-	-	-	-	1.900,86
		2011	29	1.274,87	67	420,60	61	420,60	6	-	-	-	-	-	457,83
		2012	13	25.579,38	33	1.468,86	12	698,09	21	770,77	-	-	-	-	698,09
		Jumlah	184	85.814,02	347	15.971,17	307	5.475,41	40	10.495,76	-	-	-	-	6.261,96
237	Kab. Bondowoso	2008	60	2.511,57	96	1.110,87	94	222,43	2	888,44	-	-	-	-	960,52
		2009	40	10.810,03	52	1.170,11	48	184,31	4	985,80	-	-	-	-	239,68
		2010	27	627,87	60	-	56	-	4	-	-	-	-	-	308,98
		2011	32	3.811,10	76	2.157,38	55	57,57	18	2.099,81	3	-	-	-	80,11
		2012	12	11.089,33	30	398,59	26	398,59	4	-	-	-	-	-	730,98
		Jumlah	171	28.849,90	314	4.836,95	279	862,90	32	3.974,05	3	-	-	-	2.320,27
238	Kab. Gresik	2008	48	801,34	84	463,05	80	463,05	3	-	1	-	-	-	703,56
		2009	17	276,77	37	276,77	26	196,77	7	80,00	4	-	-	-	196,77
		2010	20	4.592,09	43	4.336,78	27	4.183,14	16	153,64	-	-	-	-	4.438,44
				USD 126.50		USD 126.50		USD 121.85		USD 4.65					USD 121.85
		2011	36	3.528,50	88	3.526,50	53	3.424,44	32	102,06	3	-	-	-	3.627,29
		2012	12	454,84	31	454,84	11	356,61	20	98,23	-	-	-	-	356,88
		Jumlah	133	9.653,54	283	9.057,94	197	8.624,01	78	433,93	8	-	-	-	9.322,94
				USD 126.50		USD 126.50		USD 121.85		USD 4.65					USD 121.85
239	Kab. Jember	2008	87	32.644,71	176	29.660,78	161	10.184,65	15	19.476,13	-	-	-	-	10.953,10
		2009	39	8.511,14	107	7.649,51	60	936,27	46	6.713,24	1	-	-	-	936,27
		2010	46	796,11	106	382,34	82	78,72	23	229,13	1	74,49	-	-	375,37
		2011	25	6.456,43	58	182,56	39	7,93	16	133,83	3	40,80	-	-	88,16
		2012	14	149,80	24	149,80	11	2,05	12	147,75	1	-	-	-	2,05
		Jumlah	211	48.558,19	471	38.024,99	353	11.209,62	112	26.700,08	6	115,29	-	-	12.354,95
240	Kab. Jombang	2008	39	129,84	49	129,84	49	129,84	-	-	-	-	-	-	129,84
		2009	36	614,87	63	315,96	60	178,61	3	137,35	-	-	-	-	191,95

Halaman 55 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	23	50,17	35	10,73	34	10,73	1	-	-	-	-	-	10,73
		2011	25	7.703,24	62	3.446,87	40	998,17	22	2.448,70	-	-	-	-	998,17
		2012	15	107,04	33	-	27	-	5	-	1	-	-	-	13,12
		Jumlah	138	8.605,16	242	3.903,40	210	1.317,35	31	2.586,05	1	-	-	-	1.343,81
241	Kab. Kediri	2008	67	2.749,90	98	691,25	98	691,25	-	-	-	-	-	-	691,25
		2009	44	3.217,22	69	96,54	69	96,54	-	-	-	-	-	-	1.955,81
		2010	41	2.106,42	56	1.909,35	51	1.017,73	5	891,62	-	-	-	-	1.059,43
		2011	16	1.925,74	52	1.911,66	52	1.911,66	-	-	-	-	-	-	1.911,66
		2012	17	322,85	39	322,85	25	322,85	13	-	1	-	-	-	322,85
		Jumlah	185	10.322,13	314	4.931,65	295	4.040,03	18	891,62	1	-	-	-	5.941,00
242	Kab. Lamongan	2008	53	5.729,58	90	5.708,26	86	5.621,47	4	86,79	-	-	-	-	5.621,47
		2009	17	155,18	33	155,18	30	155,18	3	-	-	-	-	-	155,18
		2010	9	2.314,93	17	530,19	14	530,19	3	-	-	-	-	-	530,19
		2011	11	758,72	21	758,71	15	581,45	4	177,26	2	-	-	-	581,45
		2012	15	1.991,25	31	331,84	16	20,63	13	311,21	2	-	-	-	20,63
		Jumlah	105	10.949,66	192	7.484,18	161	6.908,92	27	575,26	4	-	-	-	6.908,92
243	Kab. Lumajang	2008	56	242,88	78	166,96	77	166,96	-	-	1	-	-	-	242,88
		2009	41	1.750,50	97	1.750,50	93	194,04	4	1.556,46	-	-	-	-	194,04
		2010	35	1.148,98	99	680,37	88	233,63	11	446,74	-	-	-	-	714,13
		2011	34	1.017,47	88	1.017,46	72	671,31	16	346,15	-	-	-	-	671,31
		2012	18	1.457,58	55	1.413,40	33	1.174,75	22	238,65	-	-	-	-	1.218,92
		Jumlah	184	5.617,41	417	5.028,69	363	2.440,69	53	2.588,00	1	-	-	-	3.041,28
244	Kab. Madiun	2008	57	1.358,51	94	212,82	94	212,82	-	-	-	-	-	-	212,82
		2009	28	241,50	47	241,50	46	241,50	1	-	-	-	-	-	253,36
		2010	35	2.044,35	64	506,65	62	448,58	2	58,07	-	-	-	-	448,58
		2011	26	8.986,11	58	7.584,36	40	7.470,16	17	66,10	1	48,10	-	-	7.600,62
		2012	15	10.914,56	39	1.747,24	11	201,50	26	1.545,74	2	-	-	-	201,50
		Jumlah	161	23.545,03	302	10.292,57	253	8.574,56	46	1.669,91	3	48,10	-	-	8.716,88

Halaman 56 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
245	Kab. Magetan	2008	51	1.316,65	75	762,89	74	656,82	1	106,07	-	-	-	-	656,82
		2009	34	716,32	54	339,20	47	297,96	7	41,24	-	-	-	-	297,96
		2010	21	6.121,23	44	4.896,87	32	2.921,39	12	1.975,48	-	-	-	-	2.940,20
		2011	17	2.231,28	40	418,42	26	60,83	10	82,59	4	275,00	-	-	60,83
		2012	10	82,70	34	82,70	23	27,70	11	55,00	-	-	-	-	27,70
		Jumlah	133	10.468,18	247	6.500,08	202	3.964,70	41	2.260,38	4	275,00	-	-	3.983,51
246	Kab. Malang	2008	101	8.579,80	160	3.760,38	156	3.689,10	4	71,28	-	-	-	-	3.810,69
		2009	41	2.004,75	84	1.094,50	80	786,21	4	308,29	-	-	-	-	793,09
		2010	38	1.227,81	72	163,09	69	163,09	3	-	-	-	-	-	1.033,72
		2011	47	2.820,75	101	228,62	94	228,62	7	-	-	-	-	-	228,62
		2012	15	197,61	32	142,01	20	142,01	11	-	1	-	-	-	132,21
		Jumlah	242	14.830,72	449	5.388,60	419	5.009,03	29	379,57	1	-	-	-	5.998,33
247	Kab. Mojokerto	2008	70	4.625,39	133	2.388,94	132	2.175,69	1	213,25	-	-	-	-	2.168,20
		2009	49	869,43	92	308,36	91	149,56	1	158,80	-	-	-	-	163,63
		2010	27	3.465,12	50	221,01	49	221,01	1	-	-	-	-	-	381,74
		2011	44	4.549,23	120	2.016,09	63	902,53	54	1.113,56	3	-	-	-	1.078,28
		2012	11	39.199,02	32	39.199,01	-	1.411,15	1	37.787,86	31	-	-	-	1.411,15
		Jumlah	201	52.708,19	427	44.133,41	335	4.859,94	58	39.273,47	34	-	-	-	5.203,00
248	Kab. Nganjuk	2008	25	14,46	38	14,46	36	14,46	2	-	-	-	-	-	14,46
		2009	42	881,58	67	881,58	60	728,53	7	153,05	-	-	-	-	728,53
		2010	29	1.269,14	56	1.197,74	41	632,40	15	565,34	-	-	-	-	632,40
		2011	24	295,59	56	295,59	36	295,59	20	-	-	-	-	-	295,59
		2012	10	210,60	28	210,60	13	210,60	15	-	-	-	-	-	210,60
		Jumlah	130	2.671,37	245	2.599,97	186	1.881,58	59	718,39	-	-	-	-	1.881,58
249	Kab. Ngawi	2008	53	5.097,86	71	2.381,05	48	1.903,41	23	477,64	-	-	-	-	1.903,41
		2009	19	2.828,29	30	588,91	26	588,91	4	-	-	-	-	-	588,91
		2010	16	1.046,93	38	1.040,67	18	703,33	13	192,52	7	144,82	-	-	703,33

Halaman 57 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	25	2.446,70	65	1.045,83	41	269,44	21	776,39	3	-	-	-	269,44
		2012	12	3.072,38	29	1.052,44	8	55,09	10	721,03	11	276,32	-	-	55,09
		Jumlah	125	14.492,16	233	6.108,90	141	3.520,18	71	2.167,58	21	421,14	-	-	3.520,18
250	Kab. Pacitan	2008	34	1.927,39	55	462,28	54	360,87	1	101,41	-	-	-	-	659,55
		2009	17	428,44	22	428,44	22	428,44	-	-	-	-	-	-	428,44
		2010	33	1.856,08	46	1.840,42	46	1.840,42	-	-	-	-	-	-	1.840,42
		2011	31	161,09	67	62,62	58	6,00	9	56,62	-	-	-	-	6,00
		2012	6	-	20	-	8	-	12	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	121	4.373,00	210	2.793,76	188	2.635,73	22	158,03	-	-	-	-	2.934,41
251	Kab. Pamekasan	2008	41	2.961,62	62	2.839,04	41	2.587,94	10	251,10	11	-	-	-	2.609,10
		2009	34	2.394,18	64	2.384,98	56	1.949,51	8	435,47	-	-	-	-	1.958,71
		2010	14	3.369,52	31	3.024,52	27	864,90	4	2.159,62	-	-	-	-	1.209,90
		2011	12	666,76	24	666,76	22	665,37	2	1,39	-	-	-	-	665,37
		2012	10	148,66	24	148,66	2	53,50	1	95,16	21	-	-	-	53,50
		Jumlah	111	9.540,74	205	9.063,96	148	6.121,22	25	2.942,74	32	-	-	-	6.496,58
252	Kab. Pasuruan	2008	103	58.149,20	195	35.019,57	188	6.247,10	7	28.772,47	-	-	-	-	6.249,68
		2009	28	989,79	62	736,21	62	736,21	-	-	-	-	-	-	745,80
		2010	31	574,75	61	48,13	61	48,13	-	-	-	-	-	-	305,14
		2011	31	1.624,23	82	1.624,23	69	931,18	13	693,05	-	-	-	-	931,18
		2012	13	5.111,66	43	332,41	30	-	8	-	5	332,41	-	-	149,22
		Jumlah	206	66.449,63	443	37.760,55	410	7.962,62	28	29.465,52	5	332,41	-	-	8.381,02
253	Kab. Ponorogo	2008	58	1.253,00	92	1.253,00	92	1.253,00	-	-	-	-	-	-	1.253,00
		2009	29	285,37	56	273,43	55	215,63	1	57,80	-	-	-	-	215,63
		2010	43	6.239,05	86	6.065,15	55	6.065,15	31	-	-	-	-	-	6.065,15
		2011	23	3.651,70	46	3.421,77	24	1.423,39	22	1.998,38	-	-	-	-	1.611,36
		2012	8	1.172,54	19	931,06	14	9,67	5	921,39	-	-	-	-	251,15
		Jumlah	161	12.601,66	299	11.944,41	240	8.966,84	59	2.977,57	-	-	-	-	9.396,29

Halaman 58 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
254	Kab. Probolinggo	2008	47	1.612,22	86	346,49	70	140,63	14	205,86	2	-	-	-	195,21
		2009	25	144,55	36	130,53	31	106,04	5	24,49	-	-	-	-	113,94
		2010	25	1.126,63	50	3,75	41	-	9	3,75	-	-	-	-	907,26
		2011	35	10.496,86	84	229,18	78	229,18	6	-	-	-	-	-	229,18
		2012	14	370,82	48	296,24	25	296,24	21	-	2	-	-	-	296,24
		Jumlah	146	13.751,08	304	1.006,19	245	772,09	55	234,10	4	-	-	-	1.741,83
255	Kab. Sampang	2008	40	7.335,05	74	1.440,00	70	1.053,83	4	386,17	-	-	-	-	1.053,83
		2009	17	2.647,80	41	2.577,64	40	2.577,64	1	-	-	-	-	-	2.665,55
		2010	29	1.245,66	48	419,94	44	288,44	4	131,50	-	-	-	-	656,55
		2011	15	587,32	36	587,32	31	275,45	5	311,87	-	-	-	-	275,45
		2012	10	289,88	27	289,87	7	179,83	18	110,04	2	-	-	-	179,83
		Jumlah	111	12.105,71	226	5.314,77	192	4.375,19	32	939,58	2	-	-	-	4.831,21
256	Kab. Sidoarjo	2008	64	2.556,90	99	1.695,35	97	963,01	2	732,34	-	-	-	-	1.824,55
		2009	31	8.953,17	52	4.999,03	50	4.999,03	2	-	-	-	-	-	4.999,03
		2010	35	3.494,88	83	2.821,39	70	160,24	13	2.661,15	-	-	-	-	3.056,67
		2011	41	3.027,02	95	3.027,02	72	70,36	23	2.956,66	-	-	-	-	70,36
		2012	14	839,07	38	839,07	28	839,07	10	-	-	-	-	-	839,07
		Jumlah	185	18.871,04	367	13.381,86	317	7.031,71	50	6.350,15	-	-	-	-	10.789,68
257	Kab. Situbondo	2008	72	48.299,26	122	45.943,28	121	2.314,93	1	43.628,35	-	-	-	-	3.056,14
		2009	37	4.632,21	75	1.039,31	56	189,60	19	849,71	-	-	-	-	423,77
		2010	30	4.233,27	82	52,71	77	52,71	5	-	-	-	-	-	513,15
		2011	36	497,79	87	484,68	66	407,11	19	77,57	2	-	-	-	407,11
		2012	14	118,98	64	82,91	43	69,96	21	12,95	-	-	-	-	153,89
		Jumlah	189	57.781,51	430	47.602,89	363	3.034,31	65	44.568,58	2	-	-	-	4.554,06
258	Kab. Sumenep	2008	33	1.660,01	51	473,25	31	292,28	16	180,97	4	-	-	-	294,10
		2009	15	409,79	25	409,79	21	159,83	4	249,96	-	-	-	-	159,83
		2010	24	17.347,11	47	17.314,28	36	17.155,71	9	127,80	2	30,77	-	-	17.188,53

Halaman 59 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	9	0,33	22	0,33	11	0,33	11	-	-	-	-	-	0,33
		2012	12	833,96	18	833,96	6	-	12	833,96	-	-	-	-	-
		Jumlah	93	20.251,20	163	19.031,61	105	17.608,15	52	1.392,69	6	30,77	-	-	17.642,79
259	Kab. Trenggalek	2008	51	2.389,92	89	1.371,78	87	837,98	2	533,80	-	-	-	-	837,98
		2009	21	180,33	34	180,32	31	47,24	3	133,08	-	-	-	-	47,24
		2010	50	1.639,28	90	1.639,27	69	461,51	17	1.177,76	4	-	-	-	458,48
		2011	29	107,47	70	107,47	47	107,47	22	-	1	-	-	-	107,47
		2012	20	474,43	51	197,00	13	11,30	38	185,70	-	-	-	-	11,30
		Jumlah	171	4.791,43	334	3.495,84	247	1.465,50	82	2.030,34	5	-	-	-	1.462,47
260	Kab. Tuban	2008	33	2.012,43	55	1.119,43	55	1.119,43	-	-	-	-	-	-	1.231,69
		2009	41	213,36	57	101,33	56	85,28	1	16,05	-	-	-	-	85,28
		2010	27	8.462,09	58	3.543,18	57	2.977,81	1	565,37	-	-	-	-	5.563,61
		2011	16	1.377,40	42	1.163,13	35	908,71	7	254,42	-	-	-	-	908,71
		2012	7	17.204,60	17	620,55	9	-	8	620,55	-	-	-	-	-
		Jumlah	124	29.269,88	229	6.547,62	212	5.091,23	17	1.456,39	-	-	-	-	7.789,29
261	Kab. Tulungagung	2008	48	2.079,00	89	1.739,92	89	1.739,92	-	-	-	-	-	-	2.079,00
		2009	25	1.822,44	41	1.710,31	41	1.710,31	-	-	-	-	-	-	1.710,31
		2010	37	3.314,27	69	1.018,84	68	1.018,84	1	-	-	-	-	-	1.018,84
		2011	27	396,68	69	396,68	63	396,68	6	-	-	-	-	-	397,53
		2012	18	653,19	68	269,59	57	269,59	11	-	-	-	-	-	439,22
		Jumlah	155	8.265,58	336	5.135,34	318	5.135,34	18	-	-	-	-	-	5.644,90
262	Kota Batu	2008	47	16.005,52	71	15.528,55	52	303,34	19	15.225,21	-	-	-	-	373,18
		2009	32	1.352,81	54	375,59	37	220,00	14	155,59	3	-	-	-	366,31
		2010	40	3.553,04	126	420,57	110	420,57	15	-	1	-	-	-	792,75
		2011	33	26.305,79	103	16.252,25	69	571,81	34	15.680,44	-	-	-	-	571,81
		2012	10	50,86	19	50,86	16	50,86	3	-	-	-	-	-	50,86
		Jumlah	162	47.268,02	373	32.627,82	284	1.566,58	85	31.061,24	4	-	-	-	2.154,91

Halaman 60 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
263	Kota Blitar	2008	53	4.023,07	80	540,44	80	540,44	-	-	-	-	-	-	669,29
		2009	14	-	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	36	162,54	53	39,09	52	39,09	1	-	-	-	-	-	39,09
		2011	27	148,15	48	148,15	42	148,15	6	-	-	-	-	-	148,15
		2012	19	307,12	41	37,10	31	37,10	10	-	-	-	-	-	15,98
		Jumlah	149	4.640,88	244	764,78	227	764,78	17	-	-	-	-	-	872,51
264	Kota Kediri	2008	70	4.449,56	103	1.569,67	103	1.569,67	-	-	-	-	-	-	1.990,57
		2009	33	3.774,69	50	2.674,61	45	1.261,80	5	1.412,81	-	-	-	-	1.261,80
		2010	24	3.514,79	48	3.453,38	44	3.453,38	4	-	-	-	-	-	3.453,38
		2011	41	1.497,24	113	245,40	70	245,40	36	-	7	-	-	-	245,40
		2012	24	1.017,26	64	1.017,26	53	779,21	11	238,05	-	-	-	-	779,21
		Jumlah	192	14.253,54	378	8.960,32	315	7.309,46	56	1.650,86	7	-	-	-	7.730,36
265	Kota Madiun	2008	40	3.353,02	57	496,73	54	496,73	3	-	-	-	-	-	496,73
		2009	33	1.857,48	58	738,24	57	611,17	1	127,07	-	-	-	-	611,17
		2010	18	1.829,99	38	1.790,90	38	1.790,90	-	-	-	-	-	-	1.824,55
		2011	24	1.985,28	57	193,31	37	193,31	20	-	-	-	-	-	193,31
		2012	7	-	16	-	3	-	13	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	122	9.025,77	226	3.219,18	189	3.092,11	37	127,07	-	-	-	-	3.125,76
266	Kota Malang	2008	52	532,81	67	367,59	67	367,59	-	-	-	-	-	-	396,17
		2009	30	394,39	37	1,44	24	1,44	-	-	13	-	-	-	52,05
		2010	31	1.332,16	46	6,97	46	6,97	-	-	-	-	-	-	1.057,18
		2011	30	1.641,08	91	904,29	67	904,29	24	-	-	-	-	-	904,29
		2012	14	2.678,06	34	2.606,49	31	2.606,49	3	-	-	-	-	-	2.606,49
		Jumlah	157	6.578,50	275	3.886,78	235	3.886,78	27	-	13	-	-	-	5.016,18
267	Kota Mojokerto	2008	54	16.350,87	92	1.797,99	83	1.746,03	4	51,96	5	-	-	-	1.761,10
		2009	41	8.272,28	68	319,63	62	68,93	6	250,70	-	-	-	-	87,63
		2010	28	849,55	58	820,70	57	820,70	1	-	-	-	-	-	820,70

Halaman 61 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	12	-	22	-	20	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	8	204,43	20	21,95	20	21,95	-	-	-	-	-	-	224,89
		Jumlah	143	25.677,13	260	2.960,27	242	2.657,61	13	302,66	5	-	-	-	2.894,32
268	Kota Pasuruan	2008	73	3.722,85	114	585,71	109	366,52	4	219,19	1	-	-	-	494,00
		2009	44	8.905,59	100	6.022,73	77	4.671,09	23	1.351,64	-	-	-	-	4.926,09
		2010	31	309,17	64	261,00	54	92,27	10	168,73	-	-	-	-	140,43
		2011	40	4.500,61	106	2.598,61	81	1.174,30	25	1.424,31	-	-	-	-	1.216,27
		2012	13	11.600,65	35	55,09	20	55,09	14	-	1	-	-	-	105,91
		Jumlah	201	29.038,87	419	9.523,14	341	6.359,27	76	3.163,87	2	-	-	-	6.882,70
269	Kota Probolinggo	2008	37	2.559,79	58	2.251,52	57	2.231,47	1	20,05	-	-	-	-	2.231,47
		2009	30	2.888,25	48	2.739,04	33	2.739,04	2	-	13	-	-	-	2.753,44
		2010	27	515,12	75	425,31	62	424,79	13	0,52	-	-	-	-	456,62
		2011	24	451,96	57	451,96	31	123,26	26	328,70	-	-	-	-	123,26
		2012	11	284,76	27	284,76	19	284,76	8	-	-	-	-	-	284,76
		Jumlah	129	6.699,88	265	6.152,59	202	5.803,32	50	349,27	13	-	-	-	5.849,55
270	Kota Surabaya	2008	62	1.276,27	126	190,53	123	190,53	3	-	-	-	-	-	1.262,94
		2009	43	880,46	73	698,05	52	575,50	17	122,55	4	-	-	-	764,02
		2010	80	5.762,96	173	3.781,81	94	1.356,07	76	2.425,74	3	-	-	-	3.458,26
		2011	22	75.942,07	49	2.036,42	34	1.896,42	14	140,00	1	-	-	-	1.896,42
		2012	12	21.822,90	28	3.637,18	8	2.380,76	20	1.256,42	-	-	-	-	2.380,76
		Jumlah	219	105.684,66	449	10.343,99	311	6.399,28	130	3.944,71	8	-	-	-	9.762,40
271	Prov. Banten	2008	29	360,29	66	331,95	48	296,41	3	29,66	15	5,88	-	-	324,75
		2009	61	17.040,45	141	16.199,60	78	10.245,69	49	5.953,91	14	-	-	-	11.086,53
		2010	23	6.579,92	46	6.473,34	30	6.444,86	4	-	12	28,48	-	-	6.551,44
		2011	31	4.654,72	55	3.643,82	35	3.015,86	7	627,96	13	-	-	-	4.078,17
		2012	26	3.198,20	43	2.761,33	24	1.139,49	17	693,38	2	928,46	-	-	1.394,80
		Jumlah	170	31.833,58	351	29.410,04	215	21.142,31	80	7.304,91	56	962,82	-	-	23.435,69

Halaman 62 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
272	Kab. Lebak	2008	38	950,64	68	911,62	49	311,34	11	581,84	4	18,44	4	-	311,34
		2009	16	1.154,38	45	1.154,38	42	883,53	2	270,85	-	-	1	-	883,53
		2010	27	1.968,96	56	1.865,10	49	1.487,56	7	377,54	-	-	-	-	1.546,22
		2011	32	1.692,42	50	1.501,55	35	774,48	3	727,07	12	-	-	-	965,35
		2012	32	14.126,44	58	14.020,14	23	655,09	10	13.284,16	25	80,89	-	-	652,92
		Jumlah	145	19.892,84	277	19.452,79	198	4.112,00	33	15.241,46	41	99,33	5	-	4.359,36
273	Kab. Pandeglang	2008	25	2.893,34	49	2.869,33	9	797,77	39	2.071,56	1	-	-	-	761,93
		2009	42	327,41	75	323,09	31	105,37	25	112,90	19	104,82	-	-	103,94
		2010	24	417,21	51	363,77	23	6,02	27	357,75	1	-	-	-	59,45
		2011	35	1.541,49	48	818,71	10	125,34	9	254,65	29	438,72	-	-	295,09
		2012	26	5.210,68	53	5.000,74	27	719,60	8	1.973,76	18	2.307,38	-	-	719,60
		Jumlah	152	10.390,13	276	9.375,64	100	1.754,10	108	4.770,62	68	2.850,92	-	-	1.940,01
274	Kab. Serang	2008	42	2.060,37	82	1.993,81	62	977,98	20	1.015,83	-	-	-	-	996,25
		2009	31	2.325,02	68	1.985,74	32	500,82	33	329,22	3	1.155,70	-	-	473,50
		2010	43	906,94	94	856,28	32	28,01	23	828,27	39	-	-	-	28,01
		2011	26	1.684,79	42	1.651,09	10	140,82	14	1.350,59	18	159,68	-	-	279,77
		2012	31	4.412,87	64	4.392,23	19	772,97	41	2.230,36	4	1.388,90	-	-	783,47
		Jumlah	173	11.389,99	350	10.879,15	155	2.420,60	131	5.754,27	64	2.704,28	-	-	2.561,00
275	Kab. Tangerang	2008	85	57.310,26	159	3.886,13	145	3.722,90	14	163,23	-	-	-	-	4.643,39
		2009	52	7.196,53	108	5.732,67	86	3.293,84	14	2.438,83	8	-	-	-	4.381,10
		2010	15	49,71	28	49,71	25	49,71	3	-	-	-	-	-	49,71
		2011	41	2.895,38	70	2.481,78	42	1.824,36	28	657,42	-	-	-	-	2.152,37
		2012	27	2.823,67	46	1.942,58	31	1.746,70	10	195,88	5	-	-	-	1.746,70
		Jumlah	220	70.275,55	411	14.092,87	329	10.637,51	69	3.455,36	13	-	-	-	12.973,27
276	Kota Cilegon	2008	35	1.817,23	77	1.637,69	67	1.386,83	8	250,86	-	-	2	-	1.463,75
		2009	22	1.277,64	39	1.233,34	38	1.233,34	1	-	-	-	-	-	1.228,25
		2010	22	4.455,05	62	4.455,05	51	4.371,20	9	83,85	-	-	2	-	8.676,33

Halaman 63 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	37	996,91	50	637,89	41	547,39	8	90,50	-	-	1	-	522,67
		2012	30	4.497,30	48	2.745,19	12	442,40	33	2.108,80	3	193,99	-	-	1.098,12
		Jumlah	146	13.044,13	276	10.709,16	209	7.981,16	59	2.534,01	3	193,99	5	-	12.989,12
277	Kota Serang	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	24	89,03	55	78,30	51	78,30	3	-	1	-	-	-	89,03
		2010	21	261,79	47	248,32	41	207,20	5	41,12	1	-	-	-	232,28
		2011	26	514,61	39	492,77	27	492,77	10	-	2	-	-	-	473,07
		2012	27	7.063,56	50	1.809,49	37	482,80	11	1.326,69	2	-	-	-	482,80
		Jumlah	98	7.928,99	191	2.628,88	156	1.261,07	29	1.367,81	6	-	-	-	1.277,18
278	Kota Tangerang	2008	25	837,87	41	4,35	40	4,35	-	-	1	-	-	-	917,51
		2009	50	3.126,69	89	2.045,85	77	1.689,78	6	356,07	6	-	-	-	1.937,74
		2010	13	2.504,92	35	1.319,65	34	550,38	1	769,27	-	-	-	-	1.498,61
		2011	37	8.345,99	55	7.465,03	40	4.319,98	13	3.145,05	2	-	-	-	5.238,49
		2012	18	1.155,02	27	850,60	19	489,63	8	360,97	-	-	-	-	736,30
		Jumlah	143	15.970,49	247	11.685,48	210	7.054,12	28	4.631,36	9	-	-	-	10.328,65
279	Kota Tangerang Selatan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	19	573,00	35	554,10	35	554,10	-	-	-	-	-	-	554,10
		2011	35	1.558,67	58	1.501,12	58	1.501,12	-	-	-	-	-	-	1.436,29
		2012	27	1.834,87	42	1.234,91	26	1.144,07	2	90,84	14	-	-	-	1.478,06
		Jumlah	81	3.966,54	135	3.290,13	119	3.199,29	2	90,84	14	-	-	-	3.468,45
280	Prov. Bali	2008	52	6.391,48	161	6.391,47	149	3.767,73	9	2.623,74	3	-	-	-	3.767,73
		2009	63	16.212,90	142	16.212,90	138	16.212,90	4	-	-	-	-	-	15.207,10
		2010	33	4.793,02	79	3.180,61	77	1.479,83	2	1.700,78	-	-	-	-	1.414,83
		2011	72	374.836,29	203	14.465,27	161	13.342,29	30	1.122,98	12	-	-	-	13.342,29
		2012	15	2.818,23	25	1,89	10	-	15	-	-	1,89	-	-	672,15
		Jumlah	235	405.051,92	610	40.252,14	535	34.802,75	60	5.447,50	15	1,89	-	-	34.404,10

Halaman 64 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
281	Kab. Badung	2008	27	3.986,45	54	220,19	53	220,19	1	-	-	-	-	-	1.045,45
		2009	28	20.318,09	78	20.318,17	72	8.853,04	6	11.465,13	-	-	-	-	8.853,04
		2010	36	1.459,00	85	990,41	84	990,41	1	-	-	-	-	-	990,41
		2011	47	0,12	88	0,12	44	0,12	19	-	25	-	-	-	0,12
		2012	21	6.590,47	50	1.736,47	-	111,90	2	624,57	48	1.000,00	-	-	268,23
		Jumlah	159	32.354,13	355	23.265,36	253	10.175,66	29	12.089,70	73	1.000,00	-	-	11.157,25
282	Kab. Bangli	2008	13	304,30	31	304,30	31	304,30	-	-	-	-	-	-	304,30
		2009	55	760,00	108	760,00	84	560,30	20	199,70	4	-	-	-	560,30
		2010	12	280,59	34	280,54	21	35,62	5	244,92	8	-	-	-	35,62
		2011	59	3.340,56	154	1.538,60	73	21,11	67	1.460,31	14	57,18	-	-	21,11
		2012	24	113,17	51	16,53	29	-	22	16,53	-	-	-	-	-
		Jumlah	163	4.798,62	378	2.899,97	238	921,33	114	1.921,46	26	57,18	-	-	921,33
283	Kab. Buleleng	2008	38	2.024,23	71	2.024,22	68	1.939,76	3	84,46	-	-	-	-	1.939,76
		2009	20	153,01	80	153,00	69	118,12	11	34,88	-	-	-	-	118,12
		2010	102	2.478,94	247	608,62	209	341,71	37	266,91	1	-	-	-	797,23
		2011	55	6.327,36	238	5.356,37	146	16,55	86	5.338,16	6	1,66	-	-	16,55
		2012	19	2.880,36	59	1.837,25	24	448,62	35	1.388,63	-	-	-	-	448,62
		Jumlah	234	13.863,90	695	9.979,46	516	2.864,76	172	7.113,04	7	1,66	-	-	3.320,28
284	Kab. Gianyar	2008	47	2.950,94	98	1.427,29	94	1.148,21	4	279,08	-	-	-	-	1.148,21
		2009	16	53,44	34	53,44	34	53,44	-	-	-	-	-	-	53,44
		2010	36	3.456,42	98	2.758,44	74	1.194,00	22	1.564,44	2	-	-	-	1.194,00
		2011	46	5.224,20	139	5.098,05	82	495,86	57	4.602,19	-	-	-	-	498,45
		2012	28	3.003,93	70	53,16	-	-	-	-	70	53,16	-	-	-
		Jumlah	173	14.688,93	439	9.390,38	284	2.891,51	83	6.445,71	72	53,16	-	-	2.894,10
285	Kab. Jembrana	2008	23	4.794,92	53	4.602,41	48	3.930,29	4	672,12	1	-	-	-	3.930,29
		2009	21	16.572,37	37	15.694,00	30	2.131,29	7	13.562,71	-	-	-	-	2.131,29
		2010	44	2.384,54	112	2.251,90	95	603,74	15	1.648,16	2	-	-	-	651,82

Halaman 65 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	44	2.435,55	103	1.681,96	80	206,09	21	1.475,87	2	-	-	-	155,77
		2012	15	965,59	30	-	27	-	1	-	2	-	-	-	10,96
		Jumlah	147	27.152,97	335	24.230,27	280	6.871,41	48	17.358,86	7	-	-	-	6.880,13
286	Kab. Karangasem	2008	24	1.028,51	54	1.028,50	48	1.027,49	6	1,01	-	-	-	-	1.027,49
		2009	33	214,70	70	214,69	65	165,58	5	49,11	-	-	-	-	165,58
		2010	54	2.437,55	168	1.924,14	158	664,51	6	1.259,63	4	-	-	-	1.004,28
		2011	50	3.910,99	175	2.987,77	132	137,03	41	2.850,74	2	-	-	-	137,03
		2012	24	2.004,04	51	646,14	41	-	9	646,14	1	-	-	-	9,13
		Jumlah	185	9.595,79	518	6.801,24	444	1.994,61	67	4.806,63	7	-	-	-	2.343,51
287	Kab. Klungkung	2008	20	1.586,95	47	1.586,94	38	378,52	8	1.208,42	1	-	-	-	378,52
		2009	16	255,83	37	205,85	35	194,40	2	11,45	-	-	-	-	244,38
		2010	22	894,84	57	768,32	46	572,47	11	195,85	-	-	-	-	698,99
		2011	42	3.134,35	131	2.940,25	52	470,30	34	2.469,95	45	-	-	-	593,38
		2012	25	8.600,47	59	267,18	38	9,15	16	164,99	5	93,04	-	-	71,17
		Jumlah	125	14.472,44	331	5.768,54	209	1.624,84	71	4.050,66	51	93,04	-	-	1.986,44
288	Kab. Tabanan	2008	21	986,22	39	914,22	38	914,22	1	-	-	-	-	-	914,22
		2009	20	1.260,21	36	890,23	35	754,17	1	136,06	-	-	-	-	754,17
		2010	59	10.732,65	131	2.823,96	121	1.400,47	9	1.060,83	1	362,66	-	-	1.409,09
		2011	55	7.542,88	109	35,37	56	31,20	43	4,17	10	-	-	-	374,71
		2012	21	1.428,55	52	866,14	-	-	-	-	52	866,14	-	-	-
		Jumlah	176	21.950,51	367	5.529,92	250	3.100,06	54	1.201,06	63	1.228,80	-	-	3.452,19
289	Kota Denpasar	2008	48	17.336,02	123	4.896,45	121	4.896,45	2	-	-	-	-	-	4.896,45
		2009	67	21.700,21	135	10.476,17	123	9.292,03	12	1.184,14	-	-	-	-	11.804,40
		2010	39	11.003,88	82	749,88	78	152,81	4	597,07	-	-	-	-	154,01
		2011	33	1.068,67	106	1.013,70	83	771,26	23	242,44	-	-	-	-	771,60
		2012	20	6.407,71	37	910,77	32	418,74	5	492,03	-	-	-	-	441,29
		Jumlah	207	57.516,49	483	18.046,97	437	15.531,29	46	2.515,68	-	-	-	-	18.067,75

Halaman 66 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
290	Prov. Nusa Tenggara Barat	2008	75	10.275,31	160	10.219,23	118	9.806,22	31	147,81	11	265,20	-	-	9.806,22
		2009	23	3.908,44	51	3.908,43	19	3.174,50	30	733,93	2	-	-	-	211,42
		2010	56	9.047,95	112	8.013,22	63	4.314,62	25	3.698,60	24	-	-	-	4.314,62
		2011	68	1.691,59	157	1.691,59	110	112,22	43	1.579,37	4	-	-	-	112,22
		2012	38	290.463,65	156	3.562,49	101	31,08	44	3.531,41	8	-	3	-	1.078,99
		Jumlah	260	315.386,94	636	27.394,96	411	17.438,64	173	9.691,12	49	265,20	3	-	15.523,47
291	Kab. Bima	2008	8	86,14	15	86,13	12	47,50	3	38,63	-	-	-	-	47,50
		2009	14	247,54	23	247,53	18	66,50	5	181,03	-	-	-	-	66,50
		2010	15	126,68	27	126,67	15	27,81	9	98,86	3	-	-	-	27,81
		2011	26	196,16	48	196,16	29	38,73	10	157,43	9	-	-	-	38,73
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	63	656,52	113	656,49	74	180,54	27	475,95	12	-	-	-	180,54
292	Kab. Dompu	2008	20	658,01	38	658,01	14	234,13	10	413,88	14	10,00	-	-	234,13
		2009	34	2.152,15	85	2.152,14	38	223,96	6	1.777,06	41	151,12	-	-	223,96
		2010	15	227,66	25	227,64	11	102,96	10	122,36	4	-	-	2,32	102,96
		2011	15	190,31	27	190,31	12	11,09	15	179,22	-	-	-	-	11,09
		2012	28	4.287,55	98	4.287,55	1	89,85	-	-	97	4.197,70	-	-	89,85
		Jumlah	112	7.515,68	273	7.515,65	76	661,99	41	2.492,52	156	4.358,82	-	2,32	661,99
293	Kab. Lombok Barat	2008	17	220,38	39	220,36	28	88,07	9	30,91	2	101,38	-	-	88,07
		2009	14	755,07	31	755,07	16	120,70	12	632,95	3	1,42	-	-	120,70
		2010	61	1.641,45	113	1.641,44	25	257,01	28	1.150,14	60	234,29	-	-	257,01
		2011	49	7.517,53	108	5.958,76	57	-	34	5.646,06	17	-	-	312,70	-
		2012	23	342,84	90	342,84	79	112,10	11	230,74	-	-	-	-	112,10
		Jumlah	164	10.477,27	381	8.918,47	205	577,88	94	7.690,80	82	337,09	-	312,70	577,88
294	Kab. Lombok Tengah	2008	32	2.514,14	55	2.514,13	18	68,90	6	2.409,32	31	35,91	-	-	68,90
		2009	40	22.051,54	81	21.931,53	54	21.606,70	18	324,83	9	-	-	-	21.606,70
		2010	39	3.610,92	89	3.610,92	48	1.628,70	26	1.982,22	15	-	-	-	1.628,70

Halaman 67 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	63	383,54	107	383,54	7	21,40	19	106,14	81	256,00	-	-	21,40
		2012	17	1.990,42	68	1.990,41	8	-	14	711,79	46	1.278,62	-	-	462,79
		Jumlah	191	30.550,56	400	30.430,53	135	23.325,70	83	5.534,30	182	1.570,53	-	-	23.788,49
295	Kab. Lombok Timur	2008	15	600,71	37	600,70	4	183,31	14	373,42	19	43,97	-	-	183,31
		2009	21	523,94	47	523,94	15	12,50	4	441,56	28	69,88	-	-	12,50
		2010	40	69,44	94	69,44	2	-	7	65,47	85	3,97	-	-	-
		2011	37	1.768,77	81	1.768,76	-	1,55	1	316,50	80	1.450,71	-	-	1,55
		2012	15	4.197,61	71	71,19	56	-	7	71,19	8	-	-	-	-
		Jumlah	128	7.160,47	330	3.034,03	77	197,36	33	1.268,14	220	1.568,53	-	-	197,36
296	Kab. Sumbawa	2008	16	351,74	27	158,40	21	17,66	6	140,74	-	-	-	-	17,66
		2009	19	1.131,43	39	1.131,43	31	551,90	8	579,53	-	-	-	-	551,90
		2010	13	313,36	22	313,36	16	275,45	6	37,91	-	-	-	-	275,45
		2011	25	10.534,10	33	1.415,55	15	223,83	11	800,98	7	390,74	-	-	223,83
		2012	13	737,32	46	737,31	40	75,80	5	378,49	1	283,02	-	-	75,80
		Jumlah	86	13.067,95	167	3.756,05	123	1.144,64	36	1.937,65	8	673,76	-	-	1.144,64
297	Kab. Sumbawa Barat	2008	11	196,61	23	196,61	16	58,34	5	138,27	2	-	-	-	58,34
		2009	36	1.227,16	96	867,55	63	645,39	28	222,16	5	-	-	-	645,39
		2010	32	359,46	62	287,46	43	62,04	17	225,42	2	-	-	-	62,04
		2011	26	305,52	52	305,52	-	193,40	12	112,12	40	-	-	-	193,40
		2012	18	400,00	48	400,00	-	-	-	-	48	400,00	-	-	-
		Jumlah	123	2.488,75	281	2.057,14	122	959,17	62	697,97	97	400,00	-	-	959,17
298	Kab. Lombok Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	26	825,06	58	811,42	32	462,59	26	348,83	-	-	-	-	462,59
		2012	16	995,28	55	995,26	22	9,50	4	22,19	29	963,57	-	-	9,50
		Jumlah	42	1.820,34	113	1.806,68	54	472,09	30	371,02	29	963,57	-	-	472,09

Halaman 68 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
299	Kota Bima	2008	31	29.056,67	79	28.672,00	24	9.203,41	31	15.406,43	24	4.062,16	-	-	9.203,41
		2009	16	2.638,43	34	2.638,43	19	-	15	2.638,43	-	-	-	-	-
		2010	24	1.225,50	46	1.225,49	2	30,40	1	450,06	43	745,03	-	-	30,40
		2011	18	2.253,29	35	2.253,28	8	587,01	3	1.610,41	24	55,86	-	-	587,01
		2012	19	630,35	98	606,34	33	94,39	4	241,00	61	270,95	-	-	94,39
		Jumlah	108	35.804,24	292	35.395,54	86	9.915,21	54	20.346,33	152	5.134,00	-	-	9.915,21
300	Kota Mataram	2008	6	39,99	13	39,99	11	39,99	2	-	-	-	-	-	39,99
		2009	16	295,49	31	295,49	29	279,75	2	15,74	-	-	-	-	279,75
		2010	69	909,19	159	888,78	114	637,24	11	249,39	34	2,15	-	-	637,24
		2011	61	308,53	143	308,52	48	154,47	35	111,96	60	42,09	-	-	154,47
		2012	25	586,61	76	586,61	-	-	-	-	76	586,61	-	-	-
		Jumlah	177	2.139,81	422	2.119,39	202	1.111,45	50	377,09	170	630,85	-	-	1.111,45
301	Prov. Nusa Tenggara Timur	2008	73	27.250,42	130	7.967,30	87	220,20	28	4.610,60	15	3.136,50	-	-	2.617,18
		2009	56	19.036,00	113	2.164,26	72	541,17	14	1.623,09	27	-	-	-	541,17
		2010	81	9.021,14	154	8.166,86	112	234,78	20	1.353,63	21	6.578,45	1	-	234,78
		2011	66	8.105,05	157	2.485,81	17	-	87	1.737,52	53	748,29	-	-	365,35
		2012	20	9.725,93	59	9.123,18	-	-	-	-	59	9.123,18	-	-	-
		Jumlah	296	73.138,54	613	29.907,41	288	996,15	149	9.324,84	175	19.586,42	1	-	3.758,48
302	Kab. Alor	2008	19	9.689,98	43	9.611,31	34	2.713,69	6	6.897,62	3	-	-	-	2.713,69
		2009	27	7.839,41	55	6.109,57	29	1.468,51	21	4.641,06	5	-	-	-	1.468,51
		2010	35	1.160,85	79	527,91	39	252,97	12	248,75	28	26,19	-	-	252,97
		2011	36	5.988,41	88	2.628,13	26	514,02	31	879,38	31	1.234,73	-	-	514,02
		2012	27	1.903,37	79	1.903,37	-	-	-	-	79	1.903,37	-	-	-
		Jumlah	144	26.582,02	344	20.780,29	128	4.949,19	70	12.666,81	146	3.164,29	-	-	4.949,19
303	Kab. Belu	2008	8	513,75	16	513,75	15	509,98	1	3,77	-	-	-	-	509,98
		2009	29	948,74	62	948,73	26	100,54	33	848,19	3	-	-	-	156,60
		2010	56	2.130,84	149	2.084,87	66	1.207,80	53	294,78	30	582,29	-	-	1.217,11

Halaman 69 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	32	199,86	80	116,61	30	-	13	14,41	37	102,20	-	-	-
		2012	20	6.656,33	41	154,77	-	-	-	-	41	154,77	-	-	-
		Jumlah	145	10.449,52	348	3.818,73	137	1.818,32	100	1.161,15	111	839,26	-	-	1.883,69
304	Kab. Ende	2008	9	93,17	21	11,26	15	1,00	2	10,26	4	-	-	-	1,00
		2009	15	4.646,86	23	3.680,52	-	10,00	1	2.013,05	22	1.657,47	-	-	10,00
		2010	36	1.320,00	81	920,00	31	-	45	920,00	5	-	-	-	-
		2011	36	5.300,65	121	4.219,77	28	2.802,34	51	1.417,43	42	-	-	-	3.326,21
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	96	11.360,68	246	8.831,55	74	2.813,34	99	4.360,74	73	1.657,47	-	-	3.337,21
305	Kab. Flores Timur	2008	16	15.270,45	22	14.841,63	7	462,55	4	986,00	11	13.393,08	-	-	462,55
		2009	21	664,27	49	196,92	22	36,94	16	159,98	11	-	-	-	36,94
		2010	23	12.393,86	56	1.205,12	19	67,37	31	1.137,75	6	-	-	-	67,37
		2011	23	2.069,89	49	1.712,98	-	-	-	-	49	1.712,98	-	-	-
		2012	22	1.620,94	61	662,37	-	62,30	3	319,55	58	280,52	-	-	62,30
		Jumlah	105	32.019,41	237	18.619,02	48	629,16	54	2.603,28	135	15.386,58	-	-	629,16
306	Kab. Kupang	2008	29	2.856,34	46	466,63	39	339,64	4	126,99	3	-	-	-	339,64
		2009	47	792,18	114	792,17	17	29,07	27	730,99	70	32,11	-	-	29,07
		2010	36	565,80	75	565,79	29	5,37	22	525,73	24	34,69	-	-	14,77
		2011	33	2.740,38	95	2.588,16	9	-	15	945,63	71	1.642,53	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	6.954,70	330	4.412,75	94	374,08	68	2.329,34	168	1.709,33	-	-	383,48
307	Kab. Lembata	2008	11	73,31	23	73,30	21	31,94	1	41,36	1	-	-	-	31,94
		2009	14	1.340,31	23	1.340,31	17	-	6	1.340,31	-	-	-	-	-
		2010	41	6.052,90	113	4.104,84	49	681,43	57	3.423,41	7	-	-	-	681,43
		2011	24	6.956,47	46	1.276,41	6	41,61	22	869,27	18	365,53	-	-	65,29
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	90	14.422,99	205	6.794,86	93	754,98	86	5.674,35	26	365,53	-	-	778,66

Halaman 70 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
308	Kab. Manggarai	2008	14	953,41	29	953,41	26	953,41	1	-	2	-	-	-	999,93
		2009	33	1.088,75	83	1.088,74	60	178,38	17	520,36	5	390,00	1	-	178,38
		2010	18	2.858,89	42	2.543,10	37	408,89	4	-	-	-	1	2.134,21	408,89
		2011	21	885,98	57	466,96	19	103,74	15	310,98	23	52,24	-	-	103,74
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	86	5.787,03	211	5.052,21	142	1.644,42	37	831,34	30	442,24	2	2.134,21	1.690,94
309	Kab. Manggarai Barat	2008	24	3.135,91	56	3.135,89	18	612,34	10	1.987,03	28	536,52	-	-	612,34
		2009	28	1.016,14	53	1.016,13	49	408,60	3	607,53	1	-	-	-	408,60
		2010	27	1.746,04	49	1.746,03	34	205,85	8	712,17	7	828,01	-	-	205,85
		2011	34	4.087,69	81	655,86	49	107,09	13	548,77	19	-	-	-	236,31
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	113	9.985,78	239	6.553,91	150	1.333,88	34	3.855,50	55	1.364,53	-	-	1.463,10
310	Kab. Manggarai Timur	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	4.525,30	93	4.525,30	42	80,50	33	4.369,80	18	75,00	-	-	89,15
		2011	35	25.675,28	74	8.810,95	15	371,61	26	86,42	33	8.352,92	-	-	371,61
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	65	30.200,58	167	13.336,25	57	452,11	59	4.456,22	51	8.427,92	-	-	460,76
311	Kab. Sabu Raijua	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	384,63	39	384,63	25	134,10	6	250,53	8	-	-	-	134,10
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	384,63	39	384,63	25	134,10	6	250,53	8	-	-	-	134,10
312	Kab. Nagekeo	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	17	917,75	30	159,60	23	47,16	6	112,44	1	-	-	-	47,16
		2010	26	3.456,41	47	914,14	15	15,22	24	869,48	8	29,44	-	-	15,22

Halaman 71 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	17	695,04	59	239,60	27	-	31	239,60	1	-	-	-	-
		2012	18	13.121,82	45	239,39	-	-	-	-	45	239,39	-	-	-
		Jumlah	78	18.191,02	181	1.552,73	65	62,38	61	1.221,52	55	268,83	-	-	62,38
313	Kab. Ngada	2008	22	1.111,00	43	783,82	35	430,93	7	339,66	1	13,23	-	-	430,93
		2009	14	136,22	28	136,22	26	122,17	2	14,05	-	-	-	-	122,17
		2010	21	4.414,32	59	4.414,32	37	3.888,70	11	525,62	11	-	-	-	6.877,57
		2011	16	826,47	47	826,46	17	9,33	28	817,13	2	-	-	-	10,18
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	73	6.488,01	177	6.160,82	115	4.451,13	48	1.696,46	14	13,23	-	-	7.440,85
314	Kab. Rote Ndao	2008	12	2.288,63	28	2.288,62	6	600,28	8	1.578,09	14	110,25	-	-	600,28
		2009	16	1.271,21	28	1.271,20	14	204,16	5	267,75	9	799,29	-	-	204,16
		2010	25	11.851,20	54	287,52	32	16,80	15	270,72	7	-	-	-	16,80
		2011	42	1.821,56	109	1.145,72	43	-	60	1.134,38	6	11,34	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	95	17.232,60	219	4.993,06	95	821,24	88	3.250,94	36	920,88	-	-	821,24
315	Kab. Sikka	2008	13	2.673,52	25	2.673,52	-	-	-	-	25	2.673,52	-	-	-
		2009	25	599,63	46	599,63	13	-	15	-	18	599,63	-	-	3.408,35
		2010	24	90,11	58	90,10	28	21,40	12	68,70	18	-	-	-	21,40
		2011	39	4.414,88	115	4.414,87	41	36,75	40	3.946,35	34	431,77	-	-	36,75
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	101	7.778,14	244	7.778,12	82	58,15	67	4.015,05	95	3.704,92	-	-	3.466,50
316	Kab. Sumba Barat	2008	7	106,41	12	10,40	9	10,40	3	-	-	-	-	-	15,39
		2009	37	1.284,30	85	1.280,83	64	1.028,05	21	252,78	-	-	-	-	1.029,80
		2010	36	10.680,09	72	783,93	43	529,10	26	254,83	3	-	-	-	529,10
		2011	42	668,07	89	668,06	61	68,07	16	225,32	12	374,67	-	-	139,56
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	122	12.738,87	258	2.743,22	177	1.635,62	66	732,93	15	374,67	-	-	1.713,85

Halaman 72 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
317	Kab. Sumba Barat Daya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	51,17	24	25,80	9	25,80	4	-	11	-	-	-	36,98
		2010	22	871,02	45	600,56	36	334,59	4	265,97	5	-	-	-	334,59
		2011	28	46.490,57	61	3.592,85	-	161,01	5	536,48	56	2.895,36	-	-	161,01
		2012	23	469,30	72	436,89	-	15,56	2	0,20	70	421,13	-	-	15,56
		Jumlah	87	47.882,06	202	4.656,10	45	536,96	15	802,65	142	3.316,49	-	-	548,14
318	Kab. Sumba Tengah	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	23	5.754,56	46	680,90	23	0,78	19	680,12	4	-	-	-	0,78
		2010	26	7.044,42	62	837,33	21	7,46	18	479,56	23	350,31	-	-	7,46
		2011	18	213,91	50	73,91	25	-	23	73,91	2	-	-	-	-
		2012	16	277,84	47	157,10	-	29,06	1	-	46	128,04	-	-	29,06
		Jumlah	83	13.290,73	205	1.749,24	69	37,30	61	1.233,59	75	478,35	-	-	37,30
319	Kab. Sumba Timur	2008	13	532,97	27	489,32	25	193,64	2	295,68	-	-	-	-	2.565,45
		2009	66	3.184,90	143	1.559,27	132	1.434,00	10	125,27	1	-	-	-	2.288,18
		2010	38	2.334,38	88	2.334,37	58	2.205,40	10	128,97	20	-	-	-	2.477,04
		2011	40	1.928,74	112	1.841,53	48	1.029,73	33	811,80	31	-	-	-	1.078,68
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	157	7.980,99	370	6.224,49	263	4.862,77	55	1.361,72	52	-	-	-	8.409,35
320	Kab. Timor Tengah Selatan	2008	35	2.884,60	66	1.325,41	8	140,51	15	331,71	43	853,19	-	-	140,51
		2009	42	2.078,60	73	1.061,24	12	185,02	10	570,48	51	305,74	-	-	185,02
		2010	40	4.121,29	78	619,83	34	18,67	20	383,79	24	217,37	-	-	34,38
		2011	25	39,00	63	39,00	-	-	-	-	63	39,00	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	142	9.123,49	280	3.045,48	54	344,20	45	1.285,98	181	1.415,30	-	-	359,91
321	Kab. Timor Tengah Utara	2008	20	2.182,84	33	809,23	-	269,32	33	539,91	-	-	-	-	269,32
		2009	15	1.236,75	31	329,70	4	191,45	8	138,25	19	-	-	-	216,43
		2010	38	2.627,91	96	2.627,90	3	5,22	24	2.558,26	69	64,42	-	-	5,22

Halaman 73 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	38	12.708,70	90	10.683,20	21	-	18	2.186,71	51	8.496,49	-	-	-
		2012	24	2.837,47	51	1.903,01	-	63,68	1	38,82	50	1.800,51	-	-	63,68
		Jumlah	135	21.593,67	301	16.353,04	28	529,67	84	5.461,95	189	10.361,42	-	-	554,65
322	Kota Kupang	2008	30	8.567,78	67	8.144,50	45	2.217,96	12	5.858,80	10	67,74	-	-	2.218,04
		2009	26	320,23	39	247,32	33	136,76	5	110,56	1	-	-	-	136,76
		2010	35	3.606,98	71	1.915,00	17	73,42	22	1.771,33	32	70,25	-	-	73,42
		2011	43	2.625,45	110	2.567,43	58	830,44	34	1.715,04	18	21,95	-	-	830,44
		2012	15	732,53	35	516,17	-	-	-	-	35	516,17	-	-	-
		Jumlah	149	15.852,97	322	13.390,42	153	3.258,58	73	9.455,73	96	676,11	-	-	3.258,66
323	Prov. Kalimantan Barat	2008	85	17.688,81	209	14.649,63	134	1.529,42	50	12.754,84	25	365,37	-	-	2.475,48
		2009	84	59.664,11	217	52.325,04	104	13.380,50	84	28.666,36	29	10.278,18	-	-	14.918,86
		2010	77	14.022,94	147	4.505,95	96	2.554,20	48	1.951,75	3	-	-	-	2.593,75
		2011	77	1.463,60	170	1.117,70	5	91,20	42	-	123	1.026,50	-	-	91,20
		2012	13	13.956,70	27	12.171,16	-	-	-	-	27	12.171,16	-	-	-
		Jumlah	336	106.796,16	770	84.769,48	339	17.555,32	224	43.372,95	207	23.841,21	-	-	20.079,29
324	Kab. Bengkayang	2008	37	8.542,47	92	7.719,61	65	6.230,38	26	1.489,23	1	-	-	-	6.283,30
		2009	29	187,66	62	187,65	35	137,14	24	50,51	3	-	-	-	145,98
		2010	12	646,70	30	646,69	17	546,30	13	100,39	-	-	-	-	554,30
		2011	23	1.037,11	78	1.019,04	15	66,36	59	952,68	4	-	-	-	64,31
		2012	15	2.378,77	45	616,08	-	-	-	-	45	616,08	-	-	-
		Jumlah	116	12.792,71	307	10.189,07	132	6.980,18	122	2.592,81	53	616,08	-	-	7.047,89
325	Kab. Kapuas Hulu	2008	28	2.782,55	63	1.000,62	56	760,90	7	239,72	-	-	-	-	760,90
		2009	52	3.509,83	120	2.954,36	91	2.334,54	29	619,82	-	-	-	-	2.334,54
		2010	42	2.896,97	80	2.193,24	49	839,73	30	1.353,51	1	-	-	-	468,91
		2011	24	969,12	45	967,62	26	244,81	18	722,81	1	-	-	-	396,91
		2012	10	74.417,93	21	128,51	-	-	-	-	21	128,51	-	-	-
		Jumlah	156	84.576,40	329	7.244,35	222	4.179,98	84	2.935,86	23	128,51	-	-	3.961,26

Halaman 74 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
326	Kab. Kayong Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	43	4.972,07	115	3.276,02	74	828,18	38	2.447,84	3	-	-	-	828,18
		2010	22	3.765,44	53	3.484,73	35	1.290,59	18	2.194,14	-	-	-	-	1.290,59
		2011	19	2.561,83	41	2.561,83	25	-	16	2.561,83	-	-	-	-	-
		2012	8	242,22	20	242,22	-	11,92	-	-	20	230,30	-	-	11,92
		Jumlah	92	11.541,56	229	9.564,80	134	2.130,69	72	7.203,81	23	230,30	-	-	2.130,69
327	Kab. Ketapang	2008	24	3.330,07	43	3.330,07	32	3.194,08	11	135,99	-	-	-	-	3.194,08
		2009	79	29.372,50	171	4.819,41	82	1.760,80	82	3.058,61	7	-	-	-	1.760,80
		2010	17	1.969,80	46	559,44	25	258,95	21	300,49	-	-	-	-	258,95
		2011	30	1.513,31	82	1.464,93	27	92,32	4	271,79	51	1.100,82	-	-	92,32
		2012	12	84,00	44	84,00	-	-	-	-	44	84,00	-	-	-
		Jumlah	162	36.269,68	386	10.257,85	166	5.306,15	118	3.766,88	102	1.184,82	-	-	5.306,15
328	Kab. Kubu Raya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	27	763,36	56	720,37	55	720,37	1	-	-	-	-	-	720,37
		2011	17	38,86	28	38,86	24	38,86	4	-	-	-	-	-	38,86
		2012	5	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
		Jumlah	49	802,22	94	759,23	79	759,23	5	-	10	-	-	-	759,23
329	Kab. Landak	2008	24	2.882,24	66	1.776,99	58	1.038,44	8	738,55	-	-	-	-	5,56
		2009	33	2.456,20	72	2.456,20	49	1.503,65	15	383,64	8	568,91	-	-	1.591,25
		2010	20	2.406,23	42	2.406,22	24	498,98	18	1.907,24	-	-	-	-	498,98
		2011	25	4.965,54	64	4.965,53	37	3.927,14	15	985,37	12	53,02	-	-	3.927,14
		2012	6	764,67	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		Jumlah	108	13.474,88	256	11.604,94	168	6.968,21	56	4.014,80	32	621,93	-	-	6.022,93
330	Kab. Melawi	2008	49	15.306,66	107	14.718,68	40	2.708,88	58	12.009,80	9	-	-	-	2.708,88
		2009	29	2.699,31	56	1.109,38	21	107,21	24	935,10	11	67,07	-	-	107,21
		2010	29	2.258,57	60	2.258,57	25	33,87	35	2.224,70	-	-	-	-	33,87

Halaman 75 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	36	5.057,27	82	5.057,26	3	-	8	3.537,79	71	1.519,47	-	-	-
		2012	7	30,99	13	30,99	-	-	-	-	13	30,99	-	-	-
		Jumlah	150	25.352,80	318	23.174,88	89	2.849,96	125	18.707,39	104	1.617,53	-	-	2.849,96
331	Kab. Pontianak	2008	36	8.137,96	80	7.279,39	62	133,49	17	7.145,90	1	-	-	-	133,49
		2009	36	1.552,08	78	859,01	60	105,66	13	753,35	5	-	-	-	105,66
		2010	23	1.946,18	51	1.946,18	35	126,12	11	1.820,06	5	-	-	-	126,12
		2011	14	-	25	-	8	-	13	-	4	-	-	-	-
		2012	9	2.238,49	18	2.238,49	-	145,16	-	-	18	2.093,33	-	-	145,16
		Jumlah	118	13.874,71	252	12.323,07	165	510,43	54	9.719,31	33	2.093,33	-	-	510,43
332	Kab. Sambas	2008	47	9.536,04	90	186,93	86	186,93	4	-	-	-	-	-	3.247,31
		2009	8	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	3.211,05	51	466,26	47	466,26	4	-	-	-	-	-	468,79
		2011	25	161,50	38	119,75	28	-	7	-	3	119,75	-	-	-
		2012	11	359,26	39	359,26	-	359,26	-	-	39	-	-	-	359,26
		Jumlah	115	13.267,85	238	1.132,20	181	1.012,45	15	-	42	119,75	-	-	4.075,36
333	Kab. Sanggau	2008	16	187,30	28	58,74	8	16,01	16	42,73	4	-	-	-	16,01
		2009	45	805,64	81	805,63	42	221,93	37	583,70	2	-	-	-	226,43
		2010	37	2.247,89	100	1.511,91	75	371,39	25	1.140,52	-	-	-	-	371,39
		2011	18	543,86	38	543,85	32	83,91	6	459,94	-	-	-	-	97,01
		2012	8	3.288,52	23	3.288,52	7	-	14	3.288,52	2	-	-	-	-
		Jumlah	124	7.073,21	270	6.208,65	164	693,24	98	5.515,41	8	-	-	-	710,84
334	Kab. Sekadau	2008	47	9.597,75	134	6.481,44	107	3.176,72	24	3.304,72	3	-	-	-	3.192,88
		2009	36	987,39	76	766,02	60	407,32	14	193,32	2	165,38	-	-	381,71
		2010	30	3.234,11	60	3.234,10	39	285,07	16	1.256,60	5	1.692,43	-	-	584,57
		2011	24	965,38	53	755,66	13	-	12	396,33	28	359,33	-	-	-
		2012	6	1.217,22	15	1.217,22	-	-	-	-	15	1.217,22	-	-	-
		Jumlah	143	16.001,85	338	12.454,44	219	3.869,11	66	5.150,97	53	3.434,36	-	-	4.159,16

Halaman 76 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
335	Kab. Sintang	2008	36	7.575,88	82	5.609,69	53	1.130,43	29	4.479,26	-	-	-	-	465,53
		2009	28	668,59	59	641,81	43	289,56	16	352,25	-	-	-	-	289,56
		2010	25	699,70	46	307,70	35	79,52	11	228,18	-	-	-	-	79,52
		2011	21	3.360,44	49	1.245,00	24	195,31	11	317,98	14	731,71	-	-	195,77
		2012	8	4.260,52	15	788,68	-	-	-	-	15	788,68	-	-	-
		Jumlah	118	16.565,13	251	8.592,88	155	1.694,82	67	5.377,67	29	1.520,39	-	-	1.030,38
336	Kota Pontianak	2008	36	997,59	70	997,59	38	198,44	32	799,15	-	-	-	-	750,16
		2009	70	26.259,86	136	24.245,72	82	1.133,92	50	23.111,80	4	-	-	-	1.267,63
		2010	25	1.827,59	44	826,88	36	400,13	8	426,75	-	-	-	-	507,13
		2011	44	6.018,13	94	5.244,23	17	217,90	3	184,90	74	4.841,43	-	-	217,90
		2012	5	88,67	9	28,07	-	-	-	-	9	28,07	-	-	60,59
		Jumlah	180	35.191,84	353	31.342,49	173	1.950,39	93	24.522,60	87	4.869,50	-	-	2.803,41
337	Kota Singkawang	2008	23	26,36	40	23,90	32	14,22	7	9,68	1	-	-	-	26,04
		2009	50	1.672,51	96	1.001,13	71	512,30	8	462,37	17	26,46	-	-	851,66
		2010	22	295,70	45	295,70	36	81,83	7	-	2	213,87	-	-	81,83
		2011	46	3.425,03	126	698,36	13	123,44	21	129,04	92	445,88	-	-	123,44
		2012	6	1.446,59	24	1.620,57	-	-	-	-	24	1.620,57	-	-	-
		Jumlah	147	6.866,19	331	3.639,66	152	731,79	43	601,09	136	2.306,78	-	-	1.082,97
338	Prov. Kalimantan Tengah	2008	55	12.217,57	121	10.669,23	79	10.094,43	39	574,80	3	-	-	-	10.178,71
		2009	64	11.935,61	112	11.935,60	77	10.519,39	35	1.416,21	-	-	-	-	10.893,03
		2010	64	7.281,91	154	7.281,90	132	6.923,98	20	357,92	-	-	2	-	6.923,98
		2011	83	9.550,91	144	9.550,90	104	7.185,04	36	2.365,86	4	-	-	-	7.185,04
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	266	40.986,00	531	39.437,63	392	34.722,84	130	4.714,79	7	-	2	-	35.180,76
339	Kab. Barito Selatan	2008	39	8.246,16	81	8.153,46	55	3.264,49	20	4.888,97	6	-	-	-	3.216,61
		2009	39	2.345,82	86	2.345,82	71	371,46	15	1.974,36	-	-	-	-	344,46
		2010	42	4.651,60	96	4.637,74	77	1.036,56	19	3.601,18	-	-	-	-	1.036,56

Halaman 77 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	23	1.784,52	58	1.784,51	21	24,92	14	1.168,39	23	591,20	-	-	24,92
		2012	15	746,54	34	641,11	-	-	-	-	34	641,11	-	-	-
		Jumlah	158	17.774,64	355	17.562,64	224	4.697,43	68	11.632,90	63	1.232,31	-	-	4.622,55
340	Kab. Barito Timur	2008	45	9.108,40	99	5.499,54	71	1.916,11	16	1.067,28	12	2.516,15	-	-	1.916,11
		2009	25	5.144,19	63	5.144,18	42	4.324,93	8	819,25	13	-	-	-	4.324,93
		2010	47	7.614,81	121	7.047,88	57	4.629,49	31	1.866,37	33	552,02	-	-	4.629,49
		2011	38	3.958,68	125	3.919,88	68	516,29	37	2.087,85	20	1.315,74	-	-	516,29
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	155	25.826,08	408	21.611,48	238	11.386,82	92	5.840,75	78	4.383,91	-	-	11.386,82
341	Kab. Barito Utara	2008	34	23.461,30	74	23.461,29	44	659,24	17	22.775,80	12	-	1	26,25	659,24
		2009	55	2.187,82	117	979,36	87	250,13	20	727,56	9	-	1	1,67	250,13
		2010	35	518,75	97	518,73	81	382,55	7	-	8	21,97	1	114,21	382,55
		2011	58	346,57	123	346,56	50	196,03	72	150,53	1	-	-	-	196,03
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	182	26.514,44	411	25.305,94	262	1.487,95	116	23.653,89	30	21,97	3	142,13	1.487,95
342	Kab. Gunung Mas	2008	32	1.762,14	60	1.762,13	43	867,82	17	894,31	-	-	-	-	867,82
		2009	42	2.538,91	92	2.538,90	81	373,76	11	2.165,14	-	-	-	-	373,76
		2010	42	1.348,60	109	1.348,59	43	344,88	16	456,19	50	547,52	-	-	344,88
		2011	29	1.576,62	72	1.576,62	-	5,32	3	146,70	69	1.424,60	-	-	5,32
		2012	23	1.837,87	61	1.837,87	-	150,09	-	-	61	1.687,78	-	-	150,09
		Jumlah	168	9.064,14	394	9.064,11	167	1.741,87	47	3.662,34	180	3.659,90	-	-	1.741,87
343	Kab. Kapuas	2008	33	5.054,19	86	5.054,18	80	1.365,89	1	164,00	5	3.524,29	-	-	1.365,89
		2009	65	815,23	142	755,23	131	523,45	5	231,78	6	-	-	-	523,45
		2010	31	68,68	80	49,45	66	41,28	7	8,17	7	-	-	-	41,28
		2011	32	192,52	67	4,52	22	-	9	4,52	36	-	-	-	-
		2012	18	15.599,48	57	4.383,49	-	-	-	-	57	4.383,49	-	-	-
		Jumlah	179	21.730,10	432	10.246,87	299	1.930,62	22	408,47	111	7.907,78	-	-	1.930,62

Halaman 78 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
344	Kab. Katingan	2008	24	2.279,10	44	2.279,10	34	665,43	9	1.613,67	1	-	-	-	288,04
		2009	36	6.564,97	86	5.972,07	40	924,44	41	5.047,63	5	-	-	-	924,31
		2010	32	3.459,67	82	3.386,64	59	1.434,43	22	1.952,21	1	-	-	-	1.404,08
		2011	17	2.401,45	39	2.282,67	24	784,64	13	1.498,03	2	-	-	-	784,64
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	109	14.705,19	251	13.920,48	157	3.808,94	85	10.111,54	9	-	-	-	3.401,07
345	Kab. Kotawaringin Barat	2008	21	221,57	45	221,57	43	138,27	2	83,30	-	-	-	-	138,27
		2009	69	22.896,26	140	15.285,69	139	15.285,69	1	-	-	-	-	-	15.285,69
		2010	56	1.861,14	137	1.861,13	128	1.292,47	9	568,66	-	-	-	-	1.292,47
		2011	29	726,00	58	725,99	54	725,69	4	0,30	-	-	-	-	725,69
		2012	16	26,50	36	26,50	-	-	-	-	36	26,50	-	-	-
		Jumlah	191	25.731,47	416	18.120,88	364	17.442,12	16	652,26	36	26,50	-	-	17.442,12
346	Kab. Kotawaringin Timur	2008	33	2.473,98	64	2.473,97	48	1.181,22	14	1.292,75	2	-	-	-	1.294,22
		2009	36	5.784,46	91	5.784,46	66	758,07	25	5.026,39	-	-	-	-	758,07
		2010	65	12.142,95	149	12.142,93	51	4.673,99	71	7.031,39	27	437,55	-	-	4.673,99
		2011	15	1.865,76	52	1.773,50	24	668,13	13	1.105,37	15	-	-	-	668,13
		2012	16	61,20	43	61,20	-	-	-	-	43	61,20	-	-	-
		Jumlah	165	22.328,35	399	22.236,06	189	7.281,41	123	14.455,90	87	498,75	-	-	7.394,41
347	Kab. Lamandau	2008	18	12.363,25	47	2.175,98	34	1.041,59	8	1.134,39	5	-	-	-	1.041,59
		2009	30	12.416,92	76	1.743,23	75	1.743,23	1	-	-	-	-	-	1.743,23
		2010	22	1.778,80	45	1.474,72	30	1.454,72	15	20,00	-	-	-	-	1.454,72
		2011	31	786,54	66	638,39	41	470,77	25	167,62	-	-	-	-	470,77
		2012	14	13.374,49	27	358,37	-	-	-	-	27	358,37	-	-	-
		Jumlah	115	40.720,00	261	6.390,69	180	4.710,31	49	1.322,01	32	358,37	-	-	4.710,31
348	Kab. Murung Raya	2008	22	2.431,42	48	2.431,41	31	1.386,95	5	655,65	12	388,81	-	-	1.386,95
		2009	35	10.597,15	109	10.597,15	77	6.605,74	16	3.991,41	16	-	-	-	6.605,74
		2010	31	3.758,66	101	3.758,66	81	1.330,85	17	2.427,81	3	-	-	-	1.330,85

Halaman 79 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	32	1.274,18	90	1.274,18	45	218,87	14	729,62	31	325,69	-	-	218,87
		2012	20	2.030,69	44	1.404,76	-	27,64	1	177,17	43	1.199,95	-	-	27,64
		Jumlah	140	20.092,10	392	19.466,16	234	9.570,05	53	7.981,66	105	1.914,45	-	-	9.570,05
349	Kab. Pulang Pisau	2008	13	2.252,49	23	2.252,49	19	161,72	4	2.090,77	-	-	-	-	161,72
		2009	58	3.225,23	114	3.225,21	70	2.241,33	32	944,71	12	39,17	-	-	2.241,33
		2010	38	1.247,13	82	1.247,13	49	415,36	32	831,77	1	-	-	-	415,36
		2011	13	302,79	30	302,79	21	122,51	8	50,00	-	-	1	130,28	122,51
		2012	17	628,08	34	628,08	1	75,19	3	-	30	552,89	-	-	75,19
		Jumlah	139	7.655,72	283	7.655,70	160	3.016,11	79	3.917,25	43	592,06	1	130,28	3.016,11
350	Kab. Seruyan	2008	18	209,45	37	209,44	22	130,99	6	75,85	9	2,60	-	-	130,99
		2009	40	5.579,07	102	5.579,07	31	1.656,72	65	3.922,35	6	-	-	-	1.656,72
		2010	37	18.955,14	127	18.955,13	13	4.368,51	13	559,74	101	14.026,88	-	-	4.368,51
		2011	41	32.971,67	94	32.971,66	37	221,65	16	1.795,11	41	30.954,90	-	-	221,65
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	136	57.715,33	360	57.715,30	103	6.377,87	100	6.353,05	157	44.984,38	-	-	6.377,87
351	Kab. Sukamara	2008	22	335,84	44	253,31	33	224,94	7	28,37	4	-	-	-	224,94
		2009	61	4.237,46	61	2.333,93	33	630,22	18	1.703,71	10	-	-	-	630,22
		2010	24	7.652,48	62	3.982,11	37	430,98	19	3.551,13	6	-	-	-	430,98
		2011	24	2.087,18	60	159,92	16	109,75	17	39,79	27	10,38	-	-	109,75
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	131	14.312,96	227	6.729,27	119	1.395,89	61	5.323,00	47	10,38	-	-	1.395,89
352	Kota Palangkaraya	2008	51	3.693,73	98	3.023,85	42	2.875,88	49	16,36	7	131,61	-	-	2.946,19
		2009	31	-	64	-	26	-	8	-	30	-	-	-	-
		2010	36	13.625,32	108	13.605,32	25	397,80	58	13.207,52	25	-	-	-	397,80
		2011	51	8.324,14	130	8.312,52	24	16,92	29	4.118,95	77	4.176,65	-	-	16,92
		2012	23	388,93	52	388,93	-	-	-	-	52	388,93	-	-	-
		Jumlah	192	26.032,12	452	25.330,62	117	3.290,60	144	17.342,83	191	4.697,19	-	-	3.360,91

Halaman 80 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
353	Prov. Kalimantan Selatan	2008	52	2.023,40	82	2.023,40	57	2.023,40	21	-	4	-	-	-	2.023,40
		2009	49	6.361,73	74	6.368,63	67	6.368,63	7	-	-	-	-	-	6.368,63
		2010	57	9.816,67	117	9.816,66	81	8.323,95	34	1.492,71	2	-	-	-	8.323,95
		2011	44	6.631,88	95	6.631,87	22	2.440,57	34	3.535,36	39	655,94	-	-	2.440,57
		2012	42	477,22	72	319,30	-	-	-	-	72	319,30	-	-	-
		Jumlah	244	25.310,90	440	25.159,86	227	19.156,55	96	5.028,07	117	975,24	-	-	19.156,55
354	Kab. Balangan	2008	32	216,28	60	212,53	57	212,53	3	-	-	-	-	-	216,28
		2009	42	18.468,96	73	18.468,96	70	18.468,96	3	-	-	-	-	-	18.468,96
		2010	15	72.989,73	35	72.989,73	32	26.098,50	3	46.891,23	-	-	-	-	26.098,50
		2011	24	668,40	54	668,39	25	663,40	29	4,99	-	-	-	-	663,40
		2012	21	1.330,92	45	539,26	-	8,32	-	-	45	530,94	-	-	-
		Jumlah	134	93.674,29	267	92.878,87	184	45.451,71	38	46.896,22	45	530,94	-	-	45.447,14
355	Kab. Banjar	2008	57	5.335,67	106	5.335,67	84	3.379,14	19	1.956,53	3	-	-	-	3.379,14
		2009	23	4.173,08	30	4.173,08	26	3.798,08	4	375,00	-	-	-	-	3.798,08
		2010	36	19.849,65	67	19.835,78	52	4.079,06	14	15.756,72	1	-	-	-	4.079,06
		2011	31	380,45	67	380,45	56	110,44	8	270,01	3	-	-	-	110,44
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	147	29.738,85	270	29.724,98	218	11.366,72	45	18.358,26	7	-	-	-	11.366,72
356	Kab. Barito Kuala	2008	29	4.354,59	51	4.354,59	43	1.090,29	8	3.264,30	-	-	-	-	1.090,29
		2009	13	2.863,14	21	2.863,13	19	1.153,41	2	1.709,72	-	-	-	-	1.153,41
		2010	29	7.923,07	60	7.923,07	50	593,72	10	7.329,35	-	-	-	-	593,72
		2011	24	14.237,35	47	14.237,35	17	332,61	12	10.469,26	18	3.435,48	-	-	332,61
		2012	12	10.469,26	21	10.469,26	-	-	-	-	21	10.469,26	-	-	-
		Jumlah	107	39.847,41	200	39.847,40	129	3.170,03	32	22.772,63	39	13.904,74	-	-	3.170,03
357	Kab. Hulu Sungai Selatan	2008	15	744,69	19	744,68	15	179,85	4	564,83	-	-	-	-	179,85
		2009	11	3.742,43	22	3.742,42	19	2.841,60	3	900,82	-	-	-	-	2.841,60
		2010	21	461,27	30	461,27	12	414,90	6	41,53	12	4,84	-	-	414,90

Halaman 81 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	13	1.049,33	29	1.049,32	27	130,27	1	-	1	919,05	-	-	130,27
		2012	11	199,33	22	199,33	-	-	-	-	22	199,33	-	-	-
		Jumlah	71	6.197,05	122	6.197,02	73	3.566,62	14	1.507,18	35	1.123,22	-	-	3.566,62
358	Kab. Hulu Sungai Tengah	2008	20	393,94	30	393,93	25	172,65	3	221,28	2	-	-	-	172,65
		2009	12	1.480,30	18	1.418,74	16	1.370,36	2	48,38	-	-	-	-	1.370,36
		2010	23	437,43	35	1.494,01	18	1.361,19	16	132,82	1	-	-	-	1.361,19
		2011	32	321,80	77	321,80	28	201,44	13	120,36	36	-	-	-	201,44
		2012	13	36,09	34	36,09	-	-	-	-	34	36,09	-	-	-
		Jumlah	100	2.669,56	194	3.664,57	87	3.105,64	34	522,84	73	36,09	-	-	3.105,64
359	Kab. Hulu Sungai Utara	2008	19	2.203,48	39	2.203,48	38	2.203,48	1	-	-	-	-	-	2.203,48
		2009	19	754,13	35	754,13	34	754,13	1	-	-	-	-	-	754,13
		2010	8	277,47	11	277,47	8	277,47	3	-	-	-	-	-	277,47
		2011	14	1.123,95	40	1.123,95	23	1.123,95	17	-	-	-	-	-	1.123,95
		2012	10	1.041,26	29	1.041,26	-	36,39	-	-	29	1.004,87	-	-	-
		Jumlah	70	5.400,29	154	5.400,29	103	4.395,42	22	-	29	1.004,87	-	-	4.359,03
360	Kab. Kotabaru	2008	21	4.812,69	46	4.352,49	28	326,98	10	4.025,51	8	-	-	-	326,98
		2009	12	65,96	18	65,96	14	-	4	65,96	-	-	-	-	-
		2010	54	2.236,38	109	2.236,38	36	859,78	66	1.376,60	7	-	-	-	859,78
		2011	25	3.878,77	66	3.791,34	11	-	40	597,08	15	3.194,26	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	112	10.993,80	239	10.446,17	89	1.186,76	120	6.065,15	30	3.194,26	-	-	1.186,76
361	Kab. Tabalong	2008	18	431,97	38	431,97	29	103,08	9	328,89	-	-	-	-	103,08
		2009	22	423,92	42	423,92	41	423,92	1	-	-	-	-	-	423,92
		2010	11	-	17	-	10	-	5	-	2	-	-	-	-
		2011	37	2.422,87	78	1.714,90	-	16,39	-	-	78	1.698,51	-	-	16,39
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	88	3.278,76	175	2.570,79	80	543,39	15	328,89	80	1.698,51	-	-	543,39

Halaman 82 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
362	Kab. Tanah Bumbu	2008	59	74.475,87	130	74.475,86	108	11.136,07	22	63.339,79	-	-	-	-	11.136,07
		2009	20	8.110,64	38	8.110,64	33	7.880,64	4	230,00	1	-	-	-	7.880,64
		2010	24	2.080,37	42	2.080,36	35	2.062,80	6	17,56	1	-	-	-	2.062,80
		2011	20	276,45	31	276,45	23	179,45	8	97,00	-	-	-	-	179,45
		2012	28	2.555,67	74	2.338,62	-	235,95	-	-	74	2.102,67	-	-	-
		Jumlah	151	87.499,00	315	87.281,93	199	21.494,91	40	63.684,35	76	2.102,67	-	-	21.258,96
363	Kab. Tanah Laut	2008	30	107.674,95	52	107.681,81	35	25.620,02	17	82.061,79	-	-	-	-	25.569,65
		2009	14	10.039,43	28	10.039,43	20	1.517,56	8	8.521,87	-	-	-	-	1.517,56
		2010	30	62.252,67	53	62.252,67	34	1.307,08	19	60.945,59	-	-	-	-	1.307,08
		2011	12	196,85	21	196,85	12	156,85	9	40,00	-	-	-	-	106,15
		2012	14	1.861,49	41	2.437,09	-	36,39	-	-	41	2.400,70	-	-	-
		Jumlah	100	182.025,39	195	182.607,85	101	28.637,90	53	151.569,25	41	2.400,70	-	-	28.500,44
364	Kab. Tapin	2008	25	29.557,95	38	29.557,95	27	14.834,45	11	14.723,50	-	-	-	-	14.834,45
		2009	27	9.605,26	36	9.605,26	33	2.382,31	2	7.222,95	1	-	-	-	2.382,31
		2010	13	342,61	20	342,60	16	310,18	4	32,42	-	-	-	-	310,18
		2011	13	227,14	24	227,13	17	212,61	7	14,52	-	-	-	-	212,61
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	78	39.732,96	118	39.732,94	93	17.739,55	24	21.993,39	1	-	-	-	17.739,55
365	Kota Banjarbaru	2008	30	825,61	55	825,61	35	597,68	10	227,93	10	-	-	-	597,68
		2009	14	67,00	24	67,00	23	67,00	1	-	-	-	-	-	67,00
		2010	34	1.123,87	60	1.123,87	48	1.003,82	12	120,05	-	-	-	-	1.003,82
		2011	21	27,19	54	27,19	30	-	24	27,19	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	99	2.043,67	193	2.043,67	136	1.668,50	47	375,17	10	-	-	-	1.668,50
366	Kota Banjarmasin	2008	40	387,32	68	387,32	55	121,19	13	266,13	-	-	-	-	121,19
		2009	51	1.429,07	59	1.429,06	48	1.361,57	11	67,49	-	-	-	-	1.361,57
		2010	36	190,39	72	190,39	42	190,39	30	-	-	-	-	-	190,39

Halaman 83 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	29	7.779,34	56	7.779,32	24	257,76	11	200,25	21	7.321,31	-	-	257,76
		2012	20	233,21	61	233,20	-	143,47	-	-	61	89,73	-	-	143,47
		Jumlah	176	10.019,33	316	10.019,29	169	2.074,38	65	533,87	82	7.411,04	-	-	2.074,38
367	Prov. Kalimantan Timur	2008	44	5.995,17	89	5.995,17	32	4.045,07	47	1.950,10	10	-	-	-	4.045,07
		2009	13	241,76	42	241,76	25	241,76	17	-	-	-	-	-	241,76
		2010	46	6.908,40	111	6.908,38	21	5.133,86	60	1.385,37	30	389,15	-	-	5.133,86
		2011	72	24.076,28	188	24.076,28	117	12.360,28	71	11.716,00	-	-	-	-	12.360,28
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
		Jumlah	175	37.221,61	430	37.221,59	195	21.780,97	195	15.051,47	40	389,15	-	-	21.780,97
368	Kab. Berau	2008	35	3.141,62	66	3.141,62	58	1.704,97	8	1.436,65	-	-	-	-	1.704,97
				USD 1,262.72		USD 1,262.72		USD 1,262.72							USD 1,262.72
		2009	32	4.365,15	60	4.365,14	55	1.027,86	5	3.337,28	-	-	-	-	1.027,86
		2010	25	1.925,70	56	1.925,69	29	725,79	27	1.199,90	-	-	-	-	725,79
				USD 6,586.10		USD 6,586.10				USD 6,586.10					
		2011	25	16.363,28	53	16.363,27	32	1.253,87	20	15.109,40	1	-	-	-	1.253,87
				USD 281.15		USD 281.15				USD 281.15					
		2012	17	1.102,81	31	1.102,81	4	69,46	27	1.033,35	-	-	-	-	69,46
		Jumlah	134	26.898,56	266	26.898,53	178	4.781,95	87	22.116,58	1	-	-	-	4.781,95
				USD 8,129.98		USD 8,129.97		USD 1,262.72		USD 6,867.25					USD 1,262.72
369	Kab. Bulungan	2008	15	2.240,10	32	2.240,10	24	2.005,75	7	234,35	1	-	-	-	2.005,75
		2009	26	12.599,33	75	12.437,94	54	8.901,53	19	2.994,62	2	541,79	-	-	8.901,53
		2010	22	849,12	63	849,11	48	450,83	9	398,28	6	-	-	-	450,93
		2011	14	201,55	29	201,53	2	122,22	16	2,70	11	76,61	-	-	122,22
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	77	15.890,10	199	15.728,68	128	11.480,33	51	3.629,95	20	618,40	-	-	11.480,43
370	Kab. Kutai Barat	2008	20	16.777,44	38	16.777,43	29	5.504,61	9	11.272,82	-	-	-	-	5.504,61
		2009	14	20.793,31	33	20.793,30	23	162,91	8	12.066,92	2	8.563,47	-	-	162,91

Halaman 84 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	15	12.505,21	45	12.505,20	12	697,62	31	11.807,58	2	-	-	-	697,62
		2011	19	3.297,41	34	3.297,41	30	1.563,13	3	1.734,28	1	-	-	-	1.563,13
		2012	17	935,89	40	935,89	-	-	-	-	40	935,89	-	-	-
		Jumlah	85	54.309,26	190	54.309,23	94	7.928,27	51	36.881,60	45	9.499,36	-	-	7.928,27
371	Kab. Kutai Kartanegara	2008	74	377.241,37	180	377.241,37	62	31.653,96	114	345.587,41	4	-	-	-	31.653,96
				USD 2,250.34		USD 2,250.34				USD 2,250.34					
		2009	20	79.897,81	45	79.897,81	16	-	28	79.897,81	1	-	-	-	-
		2010	27	22.160,09	79	22.160,08	27	3.691,15	42	14.747,97	10	3.720,96	-	-	3.691,15
		2011	118	33.236,07	150	33.236,06	50	7.384,98	97	25.322,22	3	528,86	-	-	7.384,98
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	239	512.535,34	454	512.535,32	155	42.730,09	281	465.555,41	18	4.249,82	-	-	42.730,09
				USD 2,250.34		USD 2,250.34				USD 2,250.34					
372	Kab. Kutai Timur	2008	43	58.334,67	148	58.334,66	96	15.523,83	43	29.763,30	9	13.047,53	-	-	15.523,83
		2009	24	21.263,44	64	21.263,43	42	3.608,54	20	17.654,89	2	-	-	-	3.608,54
		2010	22	6.411,43	68	6.411,43	46	3.173,23	22	3.238,20	-	-	-	-	3.173,23
		2011	16	2.576,25	35	2.576,24	16	854,03	15	1.722,21	4	-	-	-	225,38
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	105	88.585,79	315	88.585,76	200	23.159,63	100	52.378,60	15	13.047,53	-	-	22.530,98
373	Kab. Malinau	2008	23	819,71	45	819,71	37	819,71	8	-	-	-	-	-	819,71
		2009	21	1.055,80	51	1.055,80	38	25,00	12	1.030,80	1	-	-	-	25,00
		2010	23	3.433,52	59	3.433,51	44	1.907,66	15	1.525,85	-	-	-	-	1.907,66
		2011	21	1.360,26	38	1.360,26	30	107,56	6	1.252,70	2	-	-	-	107,56
		2012	11	12.297,20	23	12.297,19	1	21,59	20	12.275,60	2	-	-	-	21,59
		Jumlah	99	18.966,49	216	18.966,47	150	2.881,52	61	16.084,95	5	-	-	-	2.881,52
374	Kab. Nunukan	2008	36	2.843,73	96	2.843,73	84	681,44	12	2.162,29	-	-	-	-	681,44
		2009	21	856,92	44	856,91	42	543,40	2	313,51	-	-	-	-	543,40
		2010	43	30.258,78	102	30.258,77	64	5.391,36	37	24.867,41	1	-	-	-	5.391,36

Halaman 85 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	12	609,80	23	609,80	17	609,80	6	-	-	-	-	-	609,80
		2012	12	387,16	24	387,16	6	77,00	18	310,16	-	-	-	-	77,00
		Jumlah	124	34.956,39	289	34.956,37	213	7.303,00	75	27.653,37	1	-	-	-	7.303,00
375	Kab. Paser	2008	16	3.286,96	34	3.286,96	31	2.937,19	3	349,77	-	-	-	-	2.937,19
		2009	48	18.421,75	152	18.201,62	92	8.377,00	49	9.824,62	11	-	-	-	8.377,00
		2010	14	1.725,86	31	1.725,86	24	1.571,13	7	154,73	-	-	-	-	5.771,13
		2011	10	459,04	27	459,03	15	49,57	12	409,46	-	-	-	-	49,86
		2012	31	8.331,05	61	8.331,04	3	133,27	16	580,30	42	7.617,47	-	-	133,27
		Jumlah	119	32.224,66	305	32.004,51	165	13.068,16	87	11.318,88	53	7.617,47	-	-	17.268,45
376	Kab. Penajam Paser Utara	2008	22	1.064,29	49	1.064,29	46	976,11	3	88,18	-	-	-	-	976,11
		2009	18	5.925,45	43	182,45	40	182,45	3	-	-	-	-	-	182,45
		2010	33	11.298,67	72	11.298,66	57	5.867,19	13	5.431,47	2	-	-	-	5.867,19
		2011	21	727,74	64	727,73	45	374,82	19	352,91	-	-	-	-	374,82
		2012	17	4.796,61	32	3.678,21	11	226,63	15	3.451,58	6	-	-	-	-
		Jumlah	111	23.812,76	260	16.951,34	199	7.627,20	53	9.324,14	8	-	-	-	7.400,57
377	Kab. Tana Tidung	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	2.722,47	55	2.722,46	18	622,92	14	2.099,54	23	-	-	-	622,92
		2011	26	2.411,27	68	2.411,26	28	337,92	19	2.073,34	21	-	-	-	337,92
		2012	13	5.439,28	23	5.102,66	-	-	-	-	23	5.102,66	-	-	-
		Jumlah	64	10.573,02	146	10.236,38	46	960,84	33	4.172,88	67	5.102,66	-	-	960,84
378	Kota Balikpapan	2008	29	3.542,88	53	3.542,87	48	2.752,03	5	790,84	-	-	-	-	2.752,03
		2009	41	3.875,16	67	3.875,16	44	3.838,93	21	36,23	2	-	-	-	3.838,93
		2010	26	-	52	-	38	-	14	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	34	-	27	-	6	-	1	-	-	-	-
		2012	16	4.234,23	23	4.234,22	8	2.688,64	15	1.545,58	-	-	-	-	187,25
		Jumlah	130	11.652,27	229	11.652,25	165	9.279,60	61	2.372,65	3	-	-	-	6.778,21

Halaman 86 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
379	Kota Bontang	2008	17	815,33	31	815,33	28	815,33	3	-	-	-	-	-	815,33
		2009	58	11.509,96	140	11.509,95	87	5.418,59	53	6.091,36	-	-	-	-	5.418,59
		2010	10	4.517,48	22	4.517,48	8	2.794,15	14	1.723,33	-	-	-	-	2.794,15
		2011	34	7.577,63	86	7.577,63	45	7.144,15	41	433,48	-	-	-	-	7.144,15
		2012	14	760,99	34	760,99	3	16,17	31	744,82	-	-	-	-	16,17
		Jumlah	133	25.181,39	313	25.181,38	171	16.188,39	142	8.992,99	-	-	-	-	16.188,39
380	Kota Samarinda	2008	37	41.835,22	86	41.835,22	18	12.065,07	16	29.770,15	52	-	-	-	12.065,07
		2009	73	115.813,95	145	115.813,93	40	3.600,06	78	103.375,42	24	8.691,92	3	146,53	3.600,06
		2010	23	18.439,06	63	18.439,06	23	2.623,50	38	15.815,56	2	-	-	-	2.623,50
		2011	43	1.419,08	102	1.419,08	50	40,00	17	1.379,08	35	-	-	-	40,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	176	177.507,31	396	177.507,29	131	18.328,63	149	150.340,21	113	8.691,92	3	146,53	18.328,63
381	Kota Tarakan	2008	33	11.303,59	63	11.303,58	53	10.519,51	5	416,75	5	367,32	-	-	10.519,51
		2009	20	1.763,20	52	1.763,19	37	1.493,65	14	269,54	1	-	-	-	1.493,65
		2010	17	334,15	41	334,15	32	334,15	9	-	-	-	-	-	334,15
		2011	28	8.607,42	53	8.607,41	20	2.167,94	27	6.439,47	6	-	-	-	2.199,48
		2012	12	1.094,41	32	106,23	18	-	13	106,23	1	-	-	-	-
		Jumlah	110	23.102,77	241	22.114,56	160	14.515,25	68	7.231,99	13	367,32	-	-	14.546,79
382	Prov. Sulawesi Utara	2008	40	4.184,30	63	4.184,29	30	712,75	11	1.043,52	22	2.428,02	-	-	712,75
		2009	20	3.313,34	49	3.313,32	34	1.754,10	8	1.338,85	7	220,37	-	-	1.754,10
		2010	18	2.343,48	45	2.343,48	20	888,00	13	1.372,70	12	82,78	-	-	888,00
		2011	87	40.449,36	193	14.879,50	-	-	-	-	193	14.879,50	-	-	-
		2012	25	116.129,16	78	1.321,48	-	-	-	-	78	1.321,48	-	-	-
		Jumlah	190	166.419,64	428	26.042,07	84	3.354,85	32	3.755,07	312	18.932,15	-	-	3.354,85
383	Kab. Bolaang Mongondow	2008	24	3.157,69	43	284,77	33	143,61	5	76,16	5	65,00	-	-	143,61
		2009	35	762,34	57	762,34	45	426,67	6	261,14	6	74,53	-	-	426,67
		2010	26	2.867,55	51	2.867,54	12	411,92	8	747,34	31	1.708,28	-	-	411,92

Halaman 87 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	37	2.221,41	88	2.221,40	46	105,90	18	1.942,54	24	172,96	-	-	105,90
		2012	25	9.326,30	65	7.939,39	-	-	-	-	65	7.939,39	-	-	-
		Jumlah	147	18.335,29	304	14.075,44	136	1.088,10	37	3.027,18	131	9.960,16	-	-	1.088,10
384	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	8	197,82	22	197,82	5	-	17	197,82	-	-	-	-	-
		2011	20	3.631,42	47	3.631,42	-	-	-	-	47	3.631,42	-	-	-
		2012	29	4.553,97	84	3.423,77	-	-	-	-	84	3.423,77	-	-	-
		Jumlah	57	8.383,21	153	7.253,01	5	-	17	197,82	131	7.055,19	-	-	-
385	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	400,09	9	400,09	-	-	-	-	9	400,09	-	-	-
		2011	14	1.408,07	24	1.408,07	1	36,45	1	-	22	1.371,62	-	-	36,45
		2012	32	5.512,10	76	4.873,68	-	-	-	-	76	4.873,68	-	-	-
		Jumlah	50	7.320,26	109	6.681,84	1	36,45	1	-	107	6.645,39	-	-	36,45
386	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	5.728,02	23	5.728,01	8	663,43	10	5.064,58	5	-	-	-	663,43
		2010	14	1.926,78	26	1.926,78	9	71,45	17	1.855,33	-	-	-	-	71,45
		2011	15	5.051,81	29	5.051,81	-	-	-	-	29	5.051,81	-	-	-
		2012	23	5.660,27	58	2.432,65	-	-	-	-	58	2.432,65	-	-	-
		Jumlah	66	18.366,88	136	15.139,25	17	734,88	27	6.919,91	92	7.484,46	-	-	734,88
387	Kab. Minahasa	2008	63	961,37	113	961,37	54	946,37	25	-	34	15,00	-	-	946,37
		2009	12	1.103,51	21	1.103,50	13	799,49	6	295,37	2	8,64	-	-	799,49
		2010	22	428,01	43	428,00	27	341,60	8	86,40	8	-	-	-	341,60

Halaman 88 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	13	416,38	38	416,38	7	347,62	1	68,76	30	-	-	-	347,62
		2012	22	2.065,51	48	544,87	-	-	-	-	48	544,87	-	-	-
		Jumlah	132	4.974,78	263	3.454,12	101	2.435,08	40	450,53	122	568,51	-	-	2.435,08
388	Kab. Minahasa Selatan	2008	29	3.597,88	52	3.597,87	12	346,73	11	2.619,36	29	631,78	-	-	346,73
		2009	11	3.428,68	21	3.428,68	2	-	2	51,89	17	3.376,79	-	-	-
		2010	10	409,57	22	409,57	8	-	-	-	14	409,57	-	-	-
		2011	30	31.686,38	84	31.686,38	-	11,00	1	39,00	83	31.636,38	-	-	11,00
		2012	45	6.941,00	90	4.356,53	-	-	-	-	90	4.356,53	-	-	-
		Jumlah	125	46.063,51	269	43.479,03	22	357,73	14	2.710,25	233	40.411,05	-	-	357,73
389	Kab. Minahasa Tenggara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	18	4.395,33	38	2.713,13	-	-	12	2.713,13	26	-	-	-	-
		2010	20	21.888,11	64	13.175,50	-	-	-	-	64	13.175,50	-	-	-
		2011	23	25.662,35	61	6.605,36	-	19,20	61	6.586,16	-	-	-	-	19,20
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	61	51.945,79	163	22.493,99	-	19,20	73	9.299,29	90	13.175,50	-	-	19,20
390	Kab. Minahasa Utara	2008	22	931,10	40	931,10	11	322,25	25	608,85	4	-	-	-	322,25
		2009	12	2.255,66	25	2.255,65	10	609,84	12	1.645,81	3	-	-	-	609,84
		2010	18	354,91	39	354,91	3	189,96	3	164,95	33	-	-	-	189,96
		2011	20	1.102,75	50	1.102,75	-	-	-	-	50	1.102,75	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	72	4.644,42	154	4.644,41	24	1.122,05	40	2.419,61	90	1.102,75	-	-	1.122,05
391	Kab. Kepulauan Sangihe	2008	22	568,21	50	568,20	33	400,81	5	124,79	12	42,60	-	-	400,81
		2009	13	12.324,52	24	12.324,52	22	2.645,82	2	9.678,70	-	-	-	-	2.645,82
		2010	25	1.187,31	49	1.187,31	19	406,42	5	780,89	25	-	-	-	406,42
		2011	18	1.201,74	46	1.201,74	31	-	9	1.201,74	6	-	-	-	-
		2012	19	6.054,15	58	1.739,13	-	-	-	-	58	1.739,13	-	-	-
		Jumlah	97	21.335,93	227	17.020,90	105	3.453,05	21	11.786,12	101	1.781,73	-	-	3.453,05

Halaman 89 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
392	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	6.840,92	23	6.840,91	13	3.160,02	10	3.680,89	-	-	-	-	3.160,02
		2010	11	1.248,62	29	1.248,60	20	619,89	7	594,96	2	33,75	-	-	619,89
		2011	14	2.010,22	37	2.010,21	12	717,02	25	1.293,19	-	-	-	-	717,02
		2012	13	828,88	35	48,05	-	-	-	-	35	48,05	-	-	-
		Jumlah	49	10.928,64	124	10.147,77	45	4.496,93	42	5.569,04	37	81,80	-	-	4.496,93
393	Kab. Kepulauan Talaud	2008	27	9.105,46	53	9.105,45	2	6.291,52	4	111,85	47	2.702,08	-	-	8.330,72
		2009	23	25.322,48	44	25.322,47	13	24.676,21	18	646,26	13	-	-	-	24.676,21
		2010	18	16.599,99	60	16.599,98	15	-	8	2.278,98	37	14.321,00	-	-	-
		2011	19	6.224,38	39	6.224,37	16	401,96	14	5.822,41	9	-	-	-	401,96
		2012	35	6.911,90	83	6.420,73	1	3,16	-	-	82	6.417,57	-	-	3,16
		Jumlah	122	64.164,21	279	63.673,00	47	31.372,85	44	8.859,50	188	23.440,65	-	-	33.412,05
394	Kota Bitung	2008	35	16.690,04	54	11.360,67	48	9.536,49	6	1.824,18	-	-	-	-	9.536,49
		2009	29	1.360,96	49	1.360,95	30	124,19	17	1.236,76	2	-	-	-	124,19
		2010	17	681,33	51	681,32	33	593,29	18	88,03	-	-	-	-	593,29
		2011	44	532,66	93	532,66	-	-	-	-	93	532,66	-	-	-
		2012	7	2.149,72	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
		Jumlah	132	21.414,71	260	13.935,60	111	10.253,97	41	3.148,97	108	532,66	-	-	10.253,97
395	Kota Kotamobagu	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	333,84	21	333,83	4	78,17	3	247,56	14	8,10	-	-	78,17
		2010	18	3.286,89	46	3.286,88	14	413,06	25	2.873,82	7	-	-	-	413,06
		2011	31	1.725,91	58	1.725,90	-	7,50	1	8,53	57	1.709,87	-	-	7,50
		2012	15	3.439,49	40	1.469,40	-	-	-	-	40	1.469,40	-	-	-
		Jumlah	74	8.786,13	165	6.816,01	18	498,73	29	3.129,91	118	3.187,37	-	-	498,73
396	Kota Manado	2008	29	2.587,98	58	2.587,97	18	387,44	9	1.218,36	31	982,17	-	-	387,44
		2009	8	5.661,98	14	5.661,98	1	77,16	1	-	12	5.584,82	-	-	77,16

Halaman 90 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	20	9.989,91	56	9.989,91	16	13,03	1	1.026,60	39	8.950,28	-	-	13,03
		2011	66	4.564,00	156	4.564,00	-	50,00	1	401,50	155	4.112,50	-	-	50,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	123	22.803,87	284	22.803,86	35	527,63	12	2.646,46	237	19.629,77	-	-	527,63
397	Kota Tomohon	2008	37	4.974,61	69	4.974,60	53	4.234,63	9	739,97	7	-	-	-	4.234,63
		2009	3	21.812,70	7	21.812,69	2	1.500,00	3	17.147,62	2	3.165,07	-	-	1.500,00
		2010	17	40.406,26	41	40.406,25	4	1.201,21	5	38.419,92	32	785,12	-	-	1.201,21
		2011	34	66.564,02	81	66.564,01	-	138,75	3	1.866,30	78	64.558,96	-	-	138,75
		2012	28	3.283,50	61	3.278,61	-	-	-	-	61	3.278,61	-	-	-
		Jumlah	119	137.041,09	259	137.036,16	59	7.074,59	20	58.173,81	180	71.787,76	-	-	7.074,59
398	Prov. Sulawesi Tengah	2008	21	909,01	44	182,31	26	78,17	12	104,14	6	-	-	-	78,17
		2009	38	20.599,62	98	20.599,62	30	2.052,02	62	18.547,60	6	-	-	-	2.052,02
		2010	55	6.020,09	161	5.146,36	130	1.183,08	27	3.963,28	4	-	-	-	1.198,86
		2011	75	17.784,48	150	8.818,45	37	6.776,23	106	2.042,22	7	-	-	-	740,39
		2012	18	4.135,38	23	2.389,78	1	86,50	22	2.303,28	-	-	-	-	300,26
		Jumlah	207	49.448,58	476	37.136,52	224	10.176,00	229	26.960,52	23	-	-	-	4.369,70
399	Kab. Banggai	2008	14	56,21	26	56,21	25	56,21	1	-	-	-	-	-	56,21
		2009	14	3.091,94	33	1.274,26	29	1.264,00	4	10,26	-	-	-	-	2.718,32
		2010	40	1.966,87	136	1.544,18	86	1.357,53	49	121,43	1	65,22	-	-	1.780,21
		2011	36	8.558,85	53	2.066,97	38	44,28	13	629,51	2	1.393,18	-	-	44,28
		2012	9	5.750,98	12	1.266,34	5	-	7	1.266,34	-	-	-	-	624,89
		Jumlah	113	19.424,85	260	6.207,96	183	2.722,02	74	2.027,54	3	1.458,40	-	-	5.223,91
400	Kab. Banggai Kepulauan	2008	17	3.386,39	44	3.075,34	35	2.567,81	7	507,53	2	-	-	-	2.567,81
		2009	16	4.038,37	50	3.233,28	32	2.775,52	16	457,76	2	-	-	-	2.785,59
		2010	34	5.905,72	121	4.743,83	91	3.041,29	28	1.702,54	2	-	-	-	3.414,08
		2011	34	2.884,46	61	2.637,09	31	185,76	14	2.451,33	16	-	-	-	365,16
		2012	13	2.263,19	18	503,98	4	63,35	11	357,69	3	82,94	-	-	197,56
		Jumlah	114	18.478,13	294	14.193,52	193	8.633,73	76	5.476,85	25	82,94	-	-	9.330,20

Halaman 91 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
401	Kab. Buol	2008	23	42.524,96	47	42.338,80	27	22.223,25	19	20.115,55	1	-	-	-	22.409,40
		2009	38	11.310,73	114	10.802,59	88	5.275,52	23	5.527,07	3	-	-	-	5.281,01
		2010	34	43.255,53	95	42.957,91	73	38.537,12	5	4.420,79	17	-	-	-	4.181,37
		2011	20	15.151,69	24	14.351,82	8	4.512,31	14	9.839,51	2	-	-	-	4.267,01
		2012	17	2.849,25	27	351,28	16	266,78	6	84,50	5	-	-	-	329,02
		Jumlah	132	115.092,16	307	110.802,40	212	70.814,98	67	39.987,42	28	-	-	-	36.467,81
402	Kab. Donggala	2008	24	3.367,60	53	3.367,60	30	2.140,73	22	1.226,87	1	-	-	-	2.140,73
		2009	29	23.666,47	75	23.666,46	23	19.489,24	24	4.110,58	28	66,64	-	-	19.489,24
		2010	42	6.846,96	118	6.396,70	51	4.474,27	50	1.922,43	17	-	-	-	4.474,27
		2011	21	8.529,51	24	2.626,71	15	645,81	9	1.980,90	-	-	-	-	677,47
		2012	11	2.519,43	16	411,46	8	134,51	8	276,95	-	-	-	-	1.345,57
		Jumlah	127	44.929,97	286	36.468,93	127	26.884,56	113	9.517,73	46	66,64	-	-	28.127,28
403	Kab. Morowali	2008	36	18.153,69	80	18.153,69	25	890,87	27	6.119,56	28	11.143,26	-	-	890,87
		2009	28	6.030,01	78	5.884,63	14	1.178,36	44	4.706,27	20	-	-	-	1.178,36
		2010	49	8.234,57	124	2.377,96	15	182,24	47	2.143,38	62	52,34	-	-	6.038,84
		2011	26	1.811,52	27	1.519,98	11	60,39	15	1.142,96	1	316,63	-	-	241,41
		2012	15	1.918,86	23	1.909,89	3	31,66	19	1.878,23	1	-	-	-	31,66
		Jumlah	154	36.148,65	332	29.846,15	68	2.343,52	152	15.990,40	112	11.512,23	-	-	8.381,14
404	Kab. Parigi Moutong	2008	37	6.427,02	74	6.427,02	49	5.638,62	20	788,40	5	-	-	-	5.432,29
		2009	34	5.530,60	86	4.288,45	36	2.864,32	32	1.424,13	18	-	-	-	2.873,55
		2010	41	6.957,58	125	1.998,23	64	1.199,53	54	723,91	7	74,79	-	-	1.199,53
		2011	21	10.725,01	24	6.621,96	7	1.015,22	16	5.606,74	1	-	-	-	917,11
		2012	6	2.988,68	8	2.872,23	-	59,19	8	2.813,04	-	-	-	-	59,21
		Jumlah	139	32.628,89	317	22.207,89	156	10.776,88	130	11.356,22	31	74,79	-	-	10.481,69
405	Kab. Poso	2008	14	5.620,66	38	4.985,08	22	1.962,85	8	3.022,23	8	-	-	-	1.962,85
		2009	30	2.491,52	75	1.210,77	43	637,49	14	573,28	18	-	-	-	382,97
		2010	24	2.605,41	83	2.605,39	61	457,90	8	1.989,65	14	157,84	-	-	221,64

Halaman 92 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	40	889,11	56	255,04	41	233,01	12	22,03	3	-	-	-	623,80
		2012	12	2.304,33	17	1.633,83	5	225,07	9	247,48	3	1.161,28	-	-	238,53
		Jumlah	120	13.911,03	269	10.690,11	172	3.516,32	51	5.854,67	46	1.319,12	-	-	3.429,79
406	Kab. Sigi	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.261,86
		2010	37	3.414,48	121	1.259,37	108	494,03	13	765,34	-	-	-	-	270,64
		2011	18	1.591,62	18	1.538,77	15	886,78	3	651,99	-	-	-	-	961,28
		2012	17	2.597,02	26	1.334,73	-	8,41	21	1.262,71	5	63,61	-	-	29,93
		Jumlah	72	7.603,12	165	4.132,87	123	1.389,22	37	2.680,04	5	63,61	-	-	2.523,71
407	Kab. Tojo Una-Una	2008	42	600,19	86	594,99	76	565,88	8	29,11	2	-	-	-	565,88
		2009	34	3.827,90	87	3.181,47	68	810,78	14	2.370,69	5	-	-	-	880,24
		2010	30	5.125,72	84	5.075,22	45	313,71	12	4.761,51	27	-	-	-	364,20
		2011	27	2.464,12	33	2.314,19	19	441,79	13	1.872,40	1	-	-	-	449,81
		2012	12	3.340,35	16	851,76	-	238,61	4	361,25	12	251,90	-	-	636,54
		Jumlah	145	15.358,28	306	12.017,63	208	2.370,77	51	9.394,96	47	251,90	-	-	2.896,67
408	Kab. Tolitoli	2008	28	4.184,42	61	3.318,43	28	559,83	25	2.758,60	8	-	-	-	559,83
		2009	61	3.260,64	159	3.087,57	8	888,40	27	491,23	124	1.707,94	-	-	888,40
		2010	24	896,03	65	663,75	-	405,00	8	121,00	57	137,75	-	-	405,00
		2011	25	2.914,19	31	2.684,93	-	1.183,53	8	739,27	23	762,13	-	-	1.232,42
		2012	12	900,76	16	880,71	2	52,64	6	828,07	8	-	-	-	2.772,58
		Jumlah	150	12.156,04	332	10.635,39	38	3.089,40	74	4.938,17	220	2.607,82	-	-	5.858,23
409	Kota Palu	2008	47	1.661,54	109	1.621,99	47	692,18	25	780,37	37	149,44	-	-	601,12
		2009	44	1.854,45	116	1.645,01	80	873,20	33	771,81	3	-	-	-	895,61
		2010	24	3.397,80	90	686,91	60	523,02	25	163,89	5	-	-	-	540,02
		2011	26	4.116,98	34	2.856,97	7	900,72	9	15,77	18	1.940,48	-	-	726,17
		2012	12	686,97	21	299,21	8	115,75	11	183,46	2	-	-	-	340,69
		Jumlah	153	11.717,74	370	7.110,09	202	3.104,87	103	1.915,30	65	2.089,92	-	-	3.103,61

Halaman 93 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
410	Prov. Sulawesi Selatan	2008	89	41.740,13	212	35.078,34	118	1.756,33	59	31.470,92	35	1.851,09	-	-	1.756,33
		2009	30	10.736,98	93	10.736,94	74	9.337,00	17	660,25	2	739,69	-	-	9.337,00
		2010	70	19.457,24	161	18.085,99	104	5.066,78	41	13.019,21	16	-	-	-	5.066,78
		2011	63	106.142,08	149	34.871,16	72	4.288,23	47	22.737,14	26	7.151,24	4	694,55	4.288,23
		2012	30	3.229,52	30	3.229,52	-	3.202,37	5	-	25	27,15	-	-	3.202,37
		Jumlah	282	181.305,95	645	102.001,95	368	23.650,71	169	67.887,52	104	9.769,17	4	694,55	23.650,71
411	Kab. Bantaeng	2008	13	1.662,91	25	1.662,91	1	297,09	5	1.071,82	12	294,00	7	-	297,09
		2009	18	954,44	49	954,43	15	194,64	9	156,11	25	603,68	-	-	194,64
		2010	22	533,46	55	533,45	-	68,24	4	228,79	51	236,42	-	-	68,24
		2011	37	1.175,81	82	902,90	1	211,92	2	290,63	79	400,35	-	-	211,92
		2012	14	1.471,66	39	1.417,03	9	265,84	23	1.083,45	7	67,74	-	-	265,84
		Jumlah	104	5.798,28	250	5.470,72	26	1.037,73	43	2.830,80	174	1.602,19	7	-	1.037,73
412	Kab. Barru	2008	13	1.049,08	25	960,53	21	934,53	3	26,00	1	-	-	-	994,53
		2009	18	3.734,05	35	3.577,01	18	1.927,88	16	1.649,13	1	-	-	-	1.927,88
		2010	17	3.497,61	31	3.420,83	16	2.516,01	11	904,82	4	-	-	-	2.516,01
		2011	18	2.095,34	35	723,52	23	115,45	12	608,07	-	-	-	-	115,45
		2012	21	726,70	44	726,70	7	-	22	115,16	15	611,54	-	-	-
		Jumlah	87	11.102,78	170	9.408,59	85	5.493,87	64	3.303,18	21	611,54	-	-	5.553,87
413	Kab. Bone	2008	39	9.612,60	66	2.475,35	12	1.600,49	12	874,86	42	-	-	-	1.600,49
		2009	17	553,70	37	553,70	9	260,22	13	293,48	15	-	-	-	260,22
		2010	30	952,08	100	313,90	27	271,29	60	19,51	13	23,10	-	-	271,29
		2011	16	561,25	33	511,41	27	455,04	6	56,37	-	-	-	-	455,04
		2012	15	62.925,97	40	538,78	24	420,33	16	118,45	-	-	-	-	420,33
		Jumlah	117	74.605,60	276	4.393,14	99	3.007,37	107	1.362,67	70	23,10	-	-	3.007,37
414	Kab. Bulukumba	2008	41	1.804,07	90	1.804,06	56	646,06	34	1.158,00	-	-	-	-	646,06
		2009	21	8.397,41	43	5.469,52	21	739,13	22	4.730,39	-	-	-	-	739,13
		2010	14	84,50	26	84,50	11	-	14	84,50	1	-	-	-	-

Halaman 94 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	15	5.908,58	35	347,00	31	121,94	4	225,06	-	-	-	-	121,94
		2012	14	1.197,43	33	1.197,43	2	207,08	31	990,35	-	-	-	-	207,08
		Jumlah	105	17.391,99	227	8.902,51	121	1.714,21	105	7.188,30	1	-	-	-	1.714,21
415	Kab. Enrekang	2008	19	1.292,77	38	1.037,21	20	509,18	15	528,03	3	-	-	-	509,18
		2009	15	695,08	29	695,07	10	380,75	9	314,32	10	-	-	-	380,75
		2010	19	943,23	38	636,52	16	497,05	22	139,47	-	-	-	-	497,05
		2011	27	106,90	64	106,89	23	93,03	40	13,86	1	-	-	-	93,03
		2012	10	2.157,79	35	2.157,78	12	1.518,67	22	639,11	1	-	-	-	1.518,67
		Jumlah	90	5.195,77	204	4.633,47	81	2.998,68	108	1.634,79	15	-	-	-	2.998,68
416	Kab. Gowa	2008	20	815,16	45	533,16	25	372,90	16	160,26	3	-	1	-	372,90
		2009	21	1.300,97	59	1.066,53	42	355,43	16	711,10	1	-	-	-	355,43
		2010	27	1.910,76	50	1.225,29	23	-	14	-	13	1.225,29	-	-	-
		2011	29	3.100,76	54	237,22	33	237,22	10	-	11	-	-	-	253,89
		2012	9	759,46	15	759,45	-	504,19	5	255,26	10	-	-	-	504,19
		Jumlah	106	7.887,11	223	3.821,65	123	1.469,74	61	1.126,62	38	1.225,29	1	-	1.486,41
417	Kab. Jeneponto	2008	50	12.488,99	114	4.090,95	58	512,63	37	2.341,37	19	1.236,95	-	-	512,63
		2009	27	15.199,64	79	13.946,36	53	737,89	24	7.493,17	2	5.000,00	-	715,30	737,89
		2010	21	8.766,38	60	6.417,49	13	1.098,00	19	4.798,54	28	520,95	-	-	1.098,00
		2011	26	3.054,65	80	3.005,94	35	198,69	15	1.939,51	30	867,74	-	-	198,69
		2012	19	2.935,62	54	931,82	1	106,82	2	85,97	51	739,03	-	-	106,82
		Jumlah	143	42.445,28	387	28.392,56	160	2.654,03	97	16.658,56	130	8.364,67	-	715,30	2.654,03
418	Kab. Luwu	2008	43	8.368,50	92	6.716,97	37	771,13	43	5.389,23	12	556,61	-	-	771,13
		2009	19	3.755,13	46	3.754,66	20	399,50	18	1.232,38	8	2.122,78	-	-	399,50
		2010	26	524,33	80	524,32	24	112,37	40	98,49	16	313,46	-	-	112,37
		2011	16	592,58	37	592,57	22	346,03	10	84,70	5	161,84	-	-	346,03
		2012	25	9.206,16	62	7.393,56	-	1.345,06	4	4.099,08	58	1.949,42	-	-	1.345,06
		Jumlah	129	22.446,70	317	18.982,08	103	2.974,09	115	10.903,88	99	5.104,11	-	-	2.974,09

Halaman 95 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
419	Kab. Luwu Timur	2008	27	21.193,99	63	20.379,95	55	19.665,71	8	594,76	-	-	-	119,48	19.665,71
		2009	17	4.405,66	48	4.405,66	44	1.232,19	4	3.173,47	-	-	-	-	1.232,19
		2010	11	1.153,88	36	1.093,82	30	1.048,23	5	45,59	1	-	-	-	1.048,23
		2011	26	101,09	65	101,09	62	101,09	2	-	1	-	-	-	101,09
		2012	10	36.982,44	20	14.994,43	13	254,80	7	14.739,63	-	-	-	-	254,80
		Jumlah	91	63.837,06	232	40.974,95	204	22.302,02	26	18.553,45	2	-	-	119,48	22.302,02
420	Kab. Luwu Utara	2008	24	1.158,92	49	1.158,91	31	463,19	15	695,72	3	-	-	-	463,19
		2009	16	2.415,63	32	2.415,62	11	398,46	13	1.981,61	8	35,55	-	-	398,46
		2010	22	871,00	68	870,99	24	418,55	33	354,16	11	98,28	-	-	418,55
		2011	30	289,39	73	289,38	26	21,73	44	231,08	3	36,57	-	-	21,73
		2012	24	8.601,75	58	1.215,37	30	658,87	26	556,50	2	-	-	-	683,87
		Jumlah	116	13.336,69	280	5.950,27	122	1.960,80	131	3.819,07	27	170,40	-	-	1.985,80
421	Kab. Maros	2008	38	2.368,46	67	2.368,45	38	721,94	28	1.646,51	1	-	-	-	721,94
		2009	43	5.354,75	99	5.354,74	36	281,01	40	4.527,50	23	546,23	-	-	281,01
		2010	53	7.102,63	136	7.102,62	35	257,38	70	6.449,35	31	395,89	-	-	257,38
		2011	63	81.023,53	183	44.051,97	79	422,69	97	43.599,28	7	30,00	-	-	422,69
		2012	25	20.146,37	66	3.096,27	8	963,03	56	2.131,46	2	1,78	-	-	963,03
		Jumlah	222	115.995,74	551	61.974,05	196	2.646,05	291	58.354,10	64	973,90	-	-	2.646,05
422	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2008	24	4.955,52	38	2.420,62	19	1.501,36	14	585,17	5	334,09	-	-	1.501,36
		2009	16	827,09	28	827,09	3	150,79	13	676,30	12	-	-	-	150,79
		2010	22	3.281,65	47	3.281,64	24	2.384,48	18	897,16	5	-	-	-	2.384,48
		2011	29	31.324,80	68	31.299,79	30	30.898,42	12	174,06	26	227,31	-	-	30.898,42
		2012	10	637,42	34	637,42	-	-	-	-	34	637,42	-	-	-
		Jumlah	101	41.026,48	215	38.466,56	76	34.935,05	57	2.332,69	82	1.198,82	-	-	34.935,05
423	Kab. Pinrang	2008	26	1.530,59	26	1.325,52	16	228,34	7	507,59	3	589,59	-	-	228,34
		2009	19	1.373,19	46	1.356,77	38	1.023,21	7	333,56	1	-	-	-	1.023,21

Halaman 96 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	17	1.500,03	40	1.035,85	24	702,80	12	333,05	4	-	-	-	702,80
		2011	30	4.351,01	90	891,44	32	72,40	49	205,69	9	613,35	-	-	72,40
		2012	12	1.751,83	33	1.751,82	18	1.123,76	15	628,06	-	-	-	-	1.123,76
		Jumlah	104	10.506,65	235	6.361,40	128	3.150,51	90	2.007,95	17	1.202,94	-	-	3.150,51
424	Kab. Kepulauan Selayar	2008	30	7.299,35	69	7.299,33	46	1.094,70	11	5.356,36	12	848,27	-	-	1.094,70
		2009	28	4.420,18	84	4.420,17	50	1.530,86	34	2.889,31	-	-	-	-	1.530,86
		2010	32	3.451,58	76	3.451,57	25	65,29	45	3.355,29	6	30,99	-	-	65,29
		2011	32	8.170,00	83	5.295,73	55	2.021,68	24	3.274,05	4	-	-	-	2.021,68
		2012	17	22.057,08	53	454,38	30	26,96	20	427,42	3	-	-	-	26,96
		Jumlah	139	45.398,19	365	20.921,18	206	4.739,49	134	15.302,43	25	879,26	-	-	4.739,49
425	Kab. Sidenreng Rappang	2008	17	8.115,21	29	2.693,47	18	986,35	11	1.707,12	-	-	-	-	986,35
		2009	20	5.914,86	38	1.952,30	22	572,71	14	1.379,59	1	-	1	-	572,71
		2010	28	6.036,84	56	1.974,23	31	1.954,38	10	19,85	12	-	3	-	1.954,38
		2011	22	1.850,20	64	1.719,44	50	1.222,79	13	496,65	1	-	-	-	1.222,79
		2012	11	1.776,02	41	1.195,09	16	1.184,63	25	10,46	-	-	-	-	1.184,63
		Jumlah	98	23.693,13	228	9.534,53	137	5.920,86	73	3.613,67	14	-	4	-	5.920,86
426	Kab. Sinjai	2008	22	1.078,87	57	618,87	11	15,30	30	311,68	16	291,89	-	-	15,30
		2009	17	853,72	47	853,72	13	-	25	853,72	9	-	-	-	-
		2010	25	1.224,09	75	1.101,45	38	631,22	28	470,23	8	-	1	-	631,22
		2011	25	8.586,15	72	817,44	62	664,04	7	153,40	3	-	-	-	664,04
		2012	21	1.509,78	58	888,12	-	243,34	4	266,03	54	378,75	-	-	243,34
		Jumlah	110	13.252,61	309	4.279,60	124	1.553,90	94	2.055,06	90	670,64	1	-	1.553,90
427	Kab. Soppeng	2008	11	639,26	30	639,26	18	272,72	9	366,54	3	-	-	-	272,72
		2009	17	3.137,60	47	2.919,10	29	777,72	16	2.141,38	2	-	-	-	777,72
		2010	15	1.151,85	45	1.106,11	28	700,31	16	405,80	1	-	-	-	700,31
		2011	13	180,40	33	180,39	16	175,43	16	4,96	1	-	-	-	175,43
		2012	13	4.568,45	32	4.568,45	-	553,43	1	119,40	31	3.895,62	-	-	553,43
		Jumlah	69	9.677,56	187	9.413,31	91	2.479,61	58	3.038,08	38	3.895,62	-	-	2.479,61

Halaman 97 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
428	Kab. Takalar	2008	23	2.589,80	47	2.589,79	2	710,47	8	1.289,17	37	590,15	-	-	710,47
		2009	15	7.918,09	39	7.918,08	10	6.281,16	2	807,61	27	829,31	-	-	6.281,16
		2010	32	2.113,94	67	2.023,94	2	123,57	2	103,57	63	1.796,80	-	-	123,57
		2011	20	13.772,83	63	13.192,40	26	260,35	32	12.840,75	5	91,30	-	-	260,35
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	90	26.394,66	216	25.724,21	40	7.375,55	44	15.041,10	132	3.307,56	-	-	7.375,55
429	Kab. Tana Toraja	2008	16	2.979,99	37	2.979,99	13	20,28	14	921,68	10	2.038,03	-	-	20,28
		2009	18	854,95	45	854,95	11	294,58	15	560,37	19	-	-	-	294,58
		2010	27	2.022,52	74	592,22	12	15,00	34	577,22	28	-	-	-	15,00
		2011	22	1.271,66	78	1.271,65	-	215,13	5	98,08	73	958,44	-	-	215,13
		2012	20	1.130,94	57	1.045,26	21	625,75	30	419,51	6	-	-	-	625,75
		Jumlah	103	8.260,06	291	6.744,07	57	1.170,74	98	2.576,86	136	2.996,47	-	-	1.170,74
430	Kab. Toraja Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	1.187,63	31	1.187,62	22	482,11	9	705,51	-	-	-	-	482,11
		2011	17	3.629,51	37	1.237,01	21	352,86	16	884,15	-	-	-	-	352,86
		2012	16	3.555,56	34	566,18	18	59,44	16	506,74	-	-	-	-	59,44
		Jumlah	50	8.372,70	102	2.990,81	61	894,41	41	2.096,40	-	-	-	-	894,41
431	Kab. Wajo	2008	15	766,51	27	766,51	19	111,61	6	654,90	2	-	-	-	111,61
		2009	12	559,63	18	559,62	6	121,13	11	438,49	1	-	-	-	121,13
		2010	44	4.087,83	128	4.072,09	87	2.654,90	37	1.417,19	4	-	-	-	2.654,90
		2011	12	422,22	39	422,21	33	80,70	6	341,51	-	-	-	-	80,70
		2012	18	11.870,77	41	3.236,08	28	2.563,51	13	672,57	-	-	-	-	2.563,51
		Jumlah	101	17.706,96	253	9.056,51	173	5.531,85	73	3.524,66	7	-	-	-	5.531,85
432	Kota Makassar	2008	19	3.530,73	54	3.525,73	14	405,60	19	2.564,53	21	555,60	-	-	405,60
		2009	39	5.803,23	81	1.624,58	13	-	50	1.624,58	18	-	-	-	-
		2010	63	33.824,55	162	28.732,93	61	4.243,98	64	23.218,33	36	1.270,62	1	-	4.474,78

Halaman 98 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	33	49.409,13	77	45.006,97	22	867,29	44	3.335,24	11	40.804,44	-	-	867,29
		2012	18	3.048,21	54	929,47	-	415,73	6	457,63	48	56,11	-	-	415,73
		Jumlah	172	95.615,85	428	79.819,68	110	5.932,60	183	31.200,31	134	42.686,77	1	-	6.163,40
433	Kota Palopo	2008	12	7.057,83	26	6.210,86	4	2.696,15	11	3.514,71	11	-	-	-	2.696,15
		2009	15	2.885,04	46	2.857,19	18	620,96	22	1.513,29	6	722,94	-	-	620,96
		2010	19	989,16	62	989,16	37	80,66	23	908,50	2	-	-	-	80,66
		2011	30	12.965,64	105	12.965,63	62	2.177,17	41	10.724,07	2	64,39	-	-	2.177,19
		2012	24	4.957,08	59	4.547,88	5	345,04	3	63,85	51	4.138,99	-	-	345,04
		Jumlah	100	28.854,75	298	27.570,72	126	5.919,98	100	16.724,42	72	4.926,32	-	-	5.920,00
434	Kota Parepare	2008	15	2.442,98	17	2.048,98	13	679,12	4	1.369,86	-	-	-	-	679,12
		2009	18	2.532,76	24	920,30	20	640,55	4	279,75	-	-	-	-	640,55
		2010	32	4.843,30	72	2.269,19	59	1.605,91	13	663,28	-	-	-	-	1.605,91
		2011	26	1.366,90	60	1.223,89	27	677,79	27	546,10	6	-	-	-	677,79
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	91	11.185,94	173	6.462,36	119	3.603,37	48	2.858,99	6	-	-	-	3.603,37
435	Prov. Sulawesi Tenggara	2008	101	29.651,52	269	11.521,54	119	3.280,89	71	3.807,72	79	4.432,93	-	-	1.695,72
		2009	78	1.760.066,90	207	32.221,50	111	13.530,92	79	17.085,26	17	1.600,92	-	4,40	8.901,00
		2010	69	36.276,40	200	29.565,02	86	14.104,53	98	15.460,49	16	-	-	-	7.509,23
		2011	49	16.140,14	127	4.762,41	42	611,40	37	3.057,20	48	1.093,81	-	-	611,40
		2012	24	90.906,74	77	6.534,76	-	-	-	-	77	6.534,76	-	-	-
		Jumlah	321	1.933.041,70	880	84.605,23	358	31.527,74	285	39.410,67	237	13.662,42	-	4,40	18.717,35
436	Kab. Bombana	2008	31	24.176,23	91	20.482,29	41	2.218,48	45	18.263,81	5	-	-	-	2.295,37
		2009	58	101.345,16	183	77.992,05	-	3.960,48	2	39.092,06	181	34.939,51	-	-	3.960,48
		2010	25	74.387,87	80	65.539,96	1	5.250,33	9	16.977,29	70	43.312,34	-	-	5.317,79
		2011	48	63.655,58	142	61.915,04	-	-	-	-	142	61.915,04	-	-	-
		2012	23	27.068,29	27	15.059,04	-	-	-	-	27	15.059,04	-	-	-
		Jumlah	185	290.633,13	523	240.988,38	42	11.429,29	56	74.333,16	425	155.225,93	-	-	11.573,64

Halaman 99 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
437	Kab. Buton	2008	36	6.948,29	86	3.721,21	64	2.541,67	21	1.179,54	1	-	-	-	2.541,67
		2009	17	4.383,36	47	190,50	37	99,22	10	91,28	-	-	-	-	99,22
		2010	22	6.128,75	50	1.675,43	26	446,95	20	1.228,48	4	-	-	-	446,95
		2011	20	3.300,08	44	3.166,42	4	37,30	17	3.047,32	23	81,80	-	-	37,30
		2012	17	3.728,93	36	272,44	-	-	-	-	36	272,44	-	-	-
		Jumlah	112	24.489,41	263	9.026,00	131	3.125,14	68	5.546,62	64	354,24	-	-	3.125,14
438	Kab. Buton Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	26	30.565,34	72	5.801,54	30	43,00	7	3.438,46	35	2.320,08	-	-	758,47
		2010	29	24.560,13	92	24.560,12	69	21.815,80	10	1.738,11	13	1.006,21	-	-	21.815,80
		2011	32	6.176,39	70	3.752,85	-	83,16	3	908,58	67	2.761,11	-	-	83,16
		2012	18	5.858,60	35	5.577,99	-	-	-	-	35	5.577,99	-	-	-
		Jumlah	105	67.160,46	269	39.692,50	99	21.941,96	20	6.085,15	150	11.665,39	-	-	22.657,43
439	Kab. Kolaka	2008	79	19.263,51	232	11.641,65	147	5.179,42	50	5.945,59	35	516,64	-	-	4.686,98
		2009	39	16.084,33	76	15.499,20	49	885,60	19	14.129,72	8	483,88	-	-	885,60
		2010	29	20.829,31	73	5.211,28	34	1.452,14	36	3.759,14	3	-	-	-	1.452,14
		2011	31	77.352,30	93	19.426,06	48	477,68	25	18.948,38	20	-	-	-	477,68
		2012	15	3.007,85	26	96,68	-	-	-	-	26	96,68	-	-	19,28
		Jumlah	193	136.537,30	500	51.874,87	278	7.994,84	130	42.782,83	92	1.097,20	-	-	7.521,68
440	Kab. Kolaka Utara	2008	38	18.290,72	124	16.942,96	82	2.993,66	34	9.745,39	8	4.203,91	-	-	3.055,26
		2009	49	19.576,68	152	19.023,87	90	1.442,44	28	4.584,06	34	12.997,37	-	-	1.448,39
		2010	21	1.660,51	54	1.660,50	27	41,56	25	1.512,65	2	106,29	-	-	67,38
		2011	32	28.464,92	97	8.219,26	36	199,22	23	2.364,03	38	5.656,01	-	-	308,24
		2012	16	3.542,96	35	3.495,46	-	-	-	-	35	3.495,46	-	-	-
		Jumlah	156	71.535,79	462	49.342,05	235	4.676,88	110	18.206,13	117	26.459,04	-	-	4.879,27
441	Kab. Konawe	2008	49	39.936,33	157	39.859,14	113	4.265,05	37	33.863,80	7	1.730,29	-	-	4.653,40
		2009	54	94.880,23	126	90.303,04	17	291,16	19	42.329,69	90	47.682,19	-	-	291,16
		2010	34	62.482,72	95	63.152,09	50	3.047,12	35	58.582,62	10	1.522,35	-	-	3.047,12

Halaman 100 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	33	1.606.874,49	98	68.606,92	20	2.471,47	24	64.678,65	54	1.456,80	-	-	2.471,47
		2012	20	5.772,73	49	2.695,48	-	-	-	-	49	2.695,48	-	-	-
		Jumlah	190	1.809.946,50	525	264.616,67	200	10.074,80	115	199.454,76	210	55.087,11	-	-	10.463,15
442	Kab. Konawe Selatan	2008	21	9.440,16	54	8.716,51	34	1.665,53	14	7.035,98	6	15,00	-	-	2.519,54
		2009	52	11.940,81	150	9.594,56	65	1.314,58	29	8.252,40	56	27,58	-	-	1.317,78
		2010	34	8.476,31	97	7.776,77	34	4.446,78	19	3.315,77	44	14,22	-	-	4.815,66
		2011	35	4.325,20	78	1.260,02	31	8,82	10	728,75	37	522,45	-	-	8,82
		2012	16	4.898,88	37	1.605,94	-	-	-	-	37	1.605,94	-	-	-
		Jumlah	158	39.081,36	416	28.953,80	164	7.435,71	72	19.332,90	180	2.185,19	-	-	8.661,80
443	Kab. Konawe Utara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	27	12.899,26	93	10.161,72	6	550,29	26	9.194,88	61	416,55	-	-	550,29
		2010	36	28.732,91	123	24.175,68	18	5.091,17	47	19.084,51	58	-	-	-	5.091,17
		2011	36	23.952,26	143	17.697,19	-	135,92	5	7.213,23	138	10.348,04	-	-	135,92
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	99	65.584,43	359	52.034,59	24	5.777,38	78	35.492,62	257	10.764,59	-	-	5.777,38
444	Kab. Muna	2008	59	17.019,30	147	15.622,61	67	5.396,24	63	6.142,29	17	4.084,08	-	-	4.280,77
		2009	22	17.289,30	63	4.800,67	26	717,51	34	4.083,16	3	-	-	-	800,52
		2010	45	56.003,02	131	55.739,52	45	323,25	23	17.849,57	63	37.566,70	-	-	323,25
		2011	29	2.407,66	91	1.975,28	-	-	-	-	91	1.975,28	-	-	-
		2012	21	2.429,36	52	204,73	-	-	-	-	52	204,73	-	-	-
		Jumlah	176	95.148,64	484	78.342,81	138	6.437,00	120	28.075,02	226	43.830,79	-	-	5.404,54
445	Kab. Wakatobi	2008	16	3.397,90	34	3.397,90	26	868,91	8	2.528,99	-	-	-	-	5.749,23
		2009	15	8.439,54	38	689,04	26	50,10	12	638,94	-	-	-	-	2.637,39
		2010	45	4.287,24	104	3.001,39	41	933,09	16	278,59	47	1.789,71	-	-	933,09
		2011	34	39.949,56	99	20.802,26	32	-	26	2.442,12	41	18.360,14	-	-	117,07
		2012	22	114.143,95	44	1.524,66	-	-	-	-	44	1.524,66	-	-	-
		Jumlah	132	170.218,19	319	29.415,25	125	1.852,10	62	5.888,64	132	21.674,51	-	-	9.436,78

Halaman 101 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
446	Kota Bau-Bau	2008	47	8.962,47	108	5.341,54	49	3.833,62	20	587,39	39	920,53	-	-	2.329,22
		2009	23	2.058,72	50	2.058,71	34	896,29	9	162,42	7	1.000,00	-	-	4.381,50
		2010	21	17.794,44	50	7.849,91	26	2.042,94	16	5.806,97	8	-	-	-	2.018,44
		2011	42	3.474,68	103	3.474,66	28	157,80	44	3.282,46	31	34,40	-	-	164,10
		2012	18	10.083,63	38	8.586,95	-	-	-	-	38	8.586,95	-	-	-
		Jumlah	151	42.373,94	349	27.311,77	137	6.930,65	89	9.839,24	123	10.541,88	-	-	8.893,26
447	Kota Kendari	2008	63	6.692,23	137	5.169,60	93	1.752,41	34	3.367,20	10	49,99	-	-	2.975,45
		2009	40	4.655,65	59	512,31	58	440,20	1	72,11	-	-	-	-	338,35
		2010	39	105.949,24	91	5.215,28	48	955,80	31	2.902,86	12	1.356,62	-	-	955,80
		2011	50	56.444,55	165	2.892,13	21	580,34	13	2.311,79	131	-	-	-	430,34
		2012	8	372.492,88	11	48,13	-	-	-	-	11	48,13	-	-	-
		Jumlah	200	546.234,55	463	13.837,45	220	3.728,75	79	8.653,96	164	1.454,74	-	-	4.699,94
448	Prov. Gorontalo	2008	58	10.049,59	107	10.049,58	54	563,79	25	9.126,43	28	359,36	-	-	563,79
		2009	22	6.246,71	58	6.246,70	25	865,06	6	5.380,19	27	1,45	-	-	865,06
		2010	12	3.496,84	34	3.496,83	6	708,51	5	1.939,37	23	848,95	-	-	708,51
		2011	39	7.939,39	96	7.939,38	-	55,12	-	-	96	7.884,26	-	-	55,12
		2012	19	2.265,88	51	970,52	-	-	51	970,52	-	-	-	-	-
		Jumlah	150	29.998,41	346	28.703,01	85	2.192,48	87	17.416,51	174	9.094,02	-	-	2.192,48
449	Kab. Boalemo	2008	24	2.539,23	66	2.539,22	59	802,35	4	1.632,04	3	104,83	-	-	802,35
		2009	33	163,60	85	163,59	4	121,44	45	42,15	36	-	-	-	121,44
		2010	37	1.557,96	108	1.557,95	18	196,38	68	130,93	22	1.230,64	-	-	196,38
		2011	10	151,91	26	151,91	13	47,53	9	-	4	104,38	-	-	47,53
		2012	18	2.472,96	33	2.320,96	-	-	-	-	33	2.320,96	-	-	-
		Jumlah	122	6.885,66	318	6.733,63	94	1.167,70	126	1.805,12	98	3.760,81	-	-	1.167,70
450	Kab. Bone Bolango	2008	17	226,29	42	226,27	24	75,48	11	142,48	7	8,31	-	-	75,48
		2009	70	9.393,01	189	9.386,85	152	3.976,72	21	4.235,37	16	1.174,76	-	-	3.976,72
		2010	29	10.467,99	76	2.416,61	52	336,47	10	781,14	14	1.299,00	-	-	336,47

Halaman 102 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	11	1.496,15	25	1.496,14	17	125,54	5	1.137,61	3	232,99	-	-	125,54
		2012	20	2.556,63	76	1.866,38	-	-	-	-	76	1.866,38	-	-	-
		Jumlah	147	24.140,07	408	15.392,25	245	4.514,21	47	6.296,60	116	4.581,44	-	-	4.514,21
451	Kab. Gorontalo	2008	14	367,39	32	367,39	23	48,97	9	318,42	-	-	-	-	48,97
		2009	73	4.299,51	179	4.297,10	36	1.169,52	60	2.917,22	83	210,36	-	-	1.171,92
		2010	23	1.445,08	67	1.445,07	22	476,95	4	854,16	41	113,96	-	-	493,14
		2011	71	2.921,64	184	2.921,64	50	434,73	52	1.424,22	82	1.062,69	-	-	434,73
		2012	20	14.334,43	49	13.953,85	-	-	-	-	49	13.953,85	-	-	-
		Jumlah	201	23.368,05	511	22.985,05	131	2.130,17	125	5.514,02	255	15.340,86	-	-	2.148,76
452	Kab. Gorontalo Utara	2008	8	68,50	24	68,50	7	15,00	17	53,50	-	-	-	-	15,00
		2009	22	3.032,59	73	3.032,58	46	783,95	23	1.690,89	4	557,74	-	-	754,05
		2010	26	2.290,85	54	2.290,84	9	504,79	36	1.767,74	9	18,31	-	-	504,79
		2011	13	127,36	29	127,35	18	18,21	8	34,14	3	75,00	-	-	18,21
		2012	18	1.106,08	36	709,08	-	-	-	-	36	709,08	-	-	-
		Jumlah	87	6.625,38	216	6.228,35	80	1.321,95	84	3.546,27	52	1.360,13	-	-	1.292,05
453	Kab. Pohuwato	2008	26	4.022,34	57	4.022,33	45	816,46	8	3.201,37	4	4,50	-	-	816,46
		2009	34	8.414,00	93	8.414,00	65	6.617,73	9	1.183,59	19	612,68	-	-	6.617,73
		2010	18	629,01	49	629,01	37	200,44	10	428,57	2	-	-	-	200,44
		2011	17	5.883,92	50	5.883,91	26	76,32	1	18,06	23	5.789,53	-	-	76,32
		2012	12	4.190,75	29	4.190,75	-	-	-	-	29	4.190,75	-	-	-
		Jumlah	107	23.140,02	278	23.140,00	173	7.710,95	28	4.831,59	77	10.597,46	-	-	7.710,95
454	Kota Gorontalo	2008	56	11.122,60	118	11.122,58	77	1.503,89	21	8.692,47	20	926,22	-	-	1.503,89
		2009	64	2.178,94	130	2.178,94	56	151,59	38	1.099,15	36	928,20	-	-	151,59
		2010	58	2.725,09	136	2.725,08	30	58,28	12	769,09	94	1.897,71	-	-	58,28
		2011	30	3.241,34	103	3.241,33	23	-	6	29,20	74	3.212,13	-	-	-
		2012	18	7.225,62	49	2.929,78	-	-	-	-	49	2.929,78	-	-	-
		Jumlah	226	26.493,59	536	22.197,71	186	1.713,76	77	10.589,91	273	9.894,04	-	-	1.713,76

Halaman 103 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
455	Prov. Sulawesi Barat	2008	51	27.594,51	104	16.577,68	69	10.214,55	33	6.363,13	2	-	-	-	10.214,55
		2009	39	12.756,81	92	10.112,81	13	1.137,78	77	8.975,03	2	-	-	-	1.147,91
		2010	45	16.380,47	97	15.536,70	17	5.307,65	76	10.229,05	4	-	-	-	5.147,15
		2011	34	16.885,44	74	7.839,38	2	321,80	54	7.211,54	18	306,04	-	-	5.890,11
		2012	27	12.500,38	59	10.343,40	-	-	-	-	59	10.343,40	-	-	1.479,24
		Jumlah	196	86.117,61	426	60.409,97	101	16.981,78	240	32.778,75	85	10.649,44	-	-	23.878,96
456	Kab. Majene	2008	33	4.702,59	67	1.350,87	7	285,65	51	1.059,62	9	5,60	-	-	285,65
		2009	31	2.080,26	67	1.475,72	27	457,20	36	1.018,52	4	-	-	-	457,20
		2010	30	3.107,13	65	2.851,13	9	80,72	55	2.770,41	1	-	-	-	80,72
		2011	46	20.308,57	106	1.757,21	9	544,88	68	1.212,33	29	-	-	-	1.901,68
		2012	23	3.435,45	50	1.975,13	-	-	-	-	50	1.975,13	-	-	383,99
		Jumlah	163	33.634,00	355	9.410,06	52	1.368,45	210	6.060,88	93	1.980,73	-	-	3.109,24
457	Kab. Mamasa	2008	32	6.302,01	93	6.302,00	47	1.523,85	44	4.698,61	2	79,54	-	-	1.523,85
		2009	20	5.139,88	50	2.995,50	34	607,14	16	2.388,36	-	-	-	-	607,14
		2010	36	3.715,75	75	3.323,14	38	417,79	36	2.905,35	1	-	-	-	417,79
		2011	40	9.634,66	87	8.580,75	27	1.553,09	59	7.027,66	1	-	-	-	1.553,09
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	128	24.792,30	305	21.201,39	146	4.101,87	155	17.019,98	4	79,54	-	-	4.101,87
458	Kab. Mamuju	2008	19	994,86	47	641,38	5	292,70	39	348,68	3	-	-	-	292,94
		2009	40	10.283,89	80	2.638,28	26	773,17	47	1.865,11	7	-	-	-	767,09
		2010	37	10.722,73	93	10.484,82	13	6.735,03	64	3.738,24	16	11,55	-	-	6.735,03
		2011	36	27.217,31	77	4.483,55	27	404,23	39	4.079,32	11	-	-	-	404,23
		2012	22	2.817,24	53	2.552,72	12	1.394,47	31	1.158,25	10	-	-	-	1.504,89
		Jumlah	154	52.036,03	350	20.800,75	83	9.599,60	220	11.189,60	47	11,55	-	-	9.704,18
459	Kab. Mamuju Utara	2008	27	8.507,58	61	8.248,73	40	4.451,04	21	3.797,69	-	-	-	-	4.451,04
		2009	39	6.224,50	90	6.023,69	34	1.250,97	53	4.649,17	3	123,55	-	-	1.250,97
		2010	31	5.309,58	72	5.309,57	8	155,57	20	3.632,19	44	1.521,81	-	-	238,04

Halaman 104 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	35	8.138,25	75	6.346,99	8	318,31	36	4.621,94	31	1.406,74	-	-	2.188,26
		2012	23	3.660,66	45	2.380,53	-	-	-	-	45	2.380,53	-	-	535,58
		Jumlah	155	31.840,57	343	28.309,51	90	6.175,89	130	16.700,99	123	5.432,63	-	-	8.663,89
460	Kab. Polewali Mandar	2008	26	12.578,92	56	10.186,44	30	3.960,88	25	6.195,08	1	30,48	-	-	3.960,88
		2009	40	8.088,13	86	7.970,77	28	1.128,69	53	6.842,08	5	-	-	-	1.128,69
		2010	46	13.569,80	98	13.569,79	16	1.527,94	56	11.778,76	26	263,09	-	-	1.527,94
		2011	23	3.989,91	51	2.604,82	34	204,45	17	2.400,37	-	-	-	-	711,95
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	135	38.226,76	291	34.331,82	108	6.821,96	151	27.216,29	32	293,57	-	-	7.329,46
461	Prov. Maluku	2008	42	4.935,26	97	4.126,48	41	-	54	4.010,35	2	116,13	-	-	-
		2009	27	10.726,32	67	4.725,14	11	1.950,30	53	2.774,84	3	-	-	-	1.950,30
		2010	19	9.029,56	57	9.029,56	16	-	40	9.029,56	1	-	-	-	-
		2011	29	9.173,50	117	3.707,45	8	-	39	1.348,44	70	2.359,01	-	-	-
		2012	10	7.917,88	31	7.917,88	-	-	-	-	31	7.917,88	-	-	-
		Jumlah	127	41.782,52	369	29.506,51	76	1.950,30	186	17.163,19	107	10.393,02	-	-	1.950,30
462	Kab. Buru	2008	22	1.239,65	59	1.237,45	35	467,50	15	769,95	9	-	-	-	251,50
		2009	29	776,13	75	776,13	38	18,82	21	621,74	16	135,57	-	-	18,82
		2010	26	3.243,23	74	1.485,83	19	-	52	1.485,83	3	-	-	-	-
		2011	42	6.160,02	137	2.799,70	-	-	-	-	137	2.799,70	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	119	11.419,03	345	6.299,11	92	486,32	88	2.877,52	165	2.935,27	-	-	270,32
463	Kab. Buru Selatan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	2.798,52	77	2.800,31	3	-	37	2.745,03	37	55,28	-	-	-
		2011	31	34.109,31	159	34.109,31	-	-	-	-	159	34.109,31	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	57	36.907,83	236	36.909,62	3	-	37	2.745,03	196	34.164,59	-	-	-

Halaman 105 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
464	Kab. Kepulauan Aru	2008	7	705,53	12	705,53	9	-	-	-	3	705,53	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	53	50.974,73	131	49.605,42	75	6,00	42	49.035,52	14	563,90	-	-	6,00
		2011	27	18.814,22	75	18.814,22	-	-	-	-	75	18.814,22	-	-	-
		2012	19	84.707,09	60	53.538,47	-	-	-	-	60	53.538,47	-	-	-
		Jumlah	106	155.201,57	278	122.663,64	84	6,00	42	49.035,52	152	73.622,12	-	-	6,00
465	Kab. Maluku Tengah	2008	38	2.504,91	117	1.862,63	62	83,33	50	1.779,30	5	-	-	-	83,33
		2009	40	5.931,52	95	5.931,51	64	55,68	26	5.875,83	5	-	-	-	55,68
		2010	42	1.734,86	105	1.373,12	39	115,90	35	564,59	31	692,63	-	-	115,90
		2011	25	2.144,14	117	1.814,14	54	-	53	1.814,14	10	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	145	12.315,43	434	10.981,40	219	254,91	164	10.033,86	51	692,63	-	-	254,91
466	Kab. Maluku Tenggara	2008	28	1.976,83	69	1.976,82	44	46,40	22	1.234,97	3	695,45	-	-	46,40
		2009	32	4.524,87	99	4.524,87	54	197,50	40	4.327,37	5	-	-	-	197,50
		2010	49	3.822,53	135	3.822,53	72	478,39	49	3.344,14	14	-	-	-	478,39
		2011	21	2.477,22	88	2.369,22	32	480,85	41	1.179,99	15	708,38	-	-	455,35
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	130	12.801,45	391	12.693,44	202	1.203,14	152	10.086,47	37	1.403,83	-	-	1.177,64
467	Kab. Maluku Tenggara Barat	2008	27	4.046,74	58	4.049,37	30	183,92	18	3.122,35	10	743,10	-	-	183,92
		2009	23	4.752,92	63	4.127,42	22	2.226,27	36	1.526,15	5	375,00	-	-	2.226,27
		2010	17	1.298,42	37	1.298,42	20	281,11	17	1.017,31	-	-	-	-	281,11
		2011	39	2.083,21	116	818,20	36	26,04	44	-	36	792,16	-	-	26,04
		2012	23	6.113,26	87	5.157,68	-	-	-	-	87	5.157,68	-	-	-
		Jumlah	129	18.294,55	361	15.451,09	108	2.717,34	115	5.665,81	138	7.067,94	-	-	2.717,34
468	Kab. Maluku Barat Daya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 106 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	25	1.577,40	64	1.577,40	3	-	57	1.577,40	4	-	-	-	-
		2011	29	3.256,07	165	2.268,95	-	-	-	-	165	2.268,95	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	54	4.833,47	229	3.846,35	3	-	57	1.577,40	169	2.268,95	-	-	-
469	Kab. Seram Bagian Barat	2008	17	2.142,31	34	2.142,31	16	-	8	345,47	10	1.796,84	-	-	-
		2009	40	8.471,06	97	7.310,49	22	-	38	5.517,87	37	1.792,62	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	56	40.713,22	179	26.455,52	1	55,00	-	-	178	26.400,52	-	-	-
		2012	10	11.469,39	36	11.454,83	-	-	-	-	36	11.454,83	-	-	-
		Jumlah	123	62.795,98	346	47.363,15	39	55,00	46	5.863,34	261	41.444,81	-	-	-
470	Kab. Seram Bagian Timur	2008	19	1.168,26	40	1.168,25	12	-	26	1.032,89	2	135,36	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	16.462,57	78	16.279,04	17	1.178,66	52	8.395,08	9	6.705,30	-	-	1.178,66
		2011	37	9.715,69	145	9.715,69	24	-	45	1.048,67	76	8.667,02	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	84	27.346,52	263	27.162,98	53	1.178,66	123	10.476,64	87	15.507,68	-	-	1.178,66
471	Kota Ambon	2008	14	1.088,34	27	1.088,33	12	513,52	14	574,81	1	-	-	-	513,52
		2009	19	1.507,24	45	1.256,54	8	898,53	5	11,80	32	346,21	-	-	898,53
		2010	42	446,68	89	446,68	10	-	4	78,99	75	367,69	-	-	-
		2011	53	4.800,95	184	3.969,95	-	-	-	-	184	3.969,95	-	-	-
		2012	12	2.592,64	34	2.592,64	-	-	-	-	34	2.592,64	-	-	-
		Jumlah	140	10.435,85	379	9.354,14	30	1.412,05	23	665,60	326	7.276,49	-	-	1.412,05
472	Kota Tual	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	1.838,82	60	2.327,21	6	121,13	17	1.539,84	37	666,24	-	-	121,13
		2011	26	6.911,88	95	7.042,10	-	-	-	-	95	7.042,10	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	52	8.750,70	155	9.369,31	6	121,13	17	1.539,84	132	7.708,34	-	-	121,13

Halaman 107 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
473	Prov. Maluku Utara	2008	83	20.332,52	176	16.606,98	24	254,23	57	14.323,34	95	2.029,41	-	-	254,23
		2009	73	5.662,07	113	1.967,80	9	91,80	34	1.085,42	70	790,58	-	-	91,80
		2010	69	8.472,49	154	6.505,28	11	-	26	1.295,52	117	5.209,76	-	-	-
		2011	101	29.647,38	285	27.517,87	44	1.326,83	18	644,89	223	25.546,15	-	-	1.326,83
		2012	36	18.156,99	110	5.501,66	-	1.741,29	-	-	110	3.760,37	-	-	1.741,29
		Jumlah	362	82.271,45	838	58.099,59	88	3.414,15	135	17.349,17	615	37.336,27	-	-	3.414,15
474	Kab. Halmahera Barat	2008	37	19.428,41	93	5.037,73	69	1.062,64	24	3.975,09	-	-	-	-	1.062,64
		2009	49	25.601,08	80	15.624,07	44	7.272,26	35	8.214,46	1	137,35	-	-	6.957,26
		2010	41	12.942,09	122	12.257,44	52	269,86	70	11.987,58	-	-	-	-	269,86
		2011	37	1.417,27	98	1.417,27	39	455,08	44	604,10	15	358,09	-	-	509,78
		2012	22	1.114,06	46	296,76	-	-	-	-	46	296,76	-	-	-
		Jumlah	186	60.502,91	439	34.633,27	204	9.059,84	173	24.781,23	62	792,20	-	-	8.799,54
475	Kab. Halmahera Selatan	2008	17	5.805,79	33	3.442,13	27	346,36	6	3.095,77	-	-	-	-	346,36
		2009	43	10.701,47	103	8.034,24	52	51,75	22	7.159,48	29	823,01	-	-	51,75
		2010	45	22.531,06	80	19.310,26	29	-	32	19.174,11	18	136,15	1	-	-
		2011	66	25.180,72	150	18.760,12	-	-	-	-	150	18.760,12	-	-	-
		2012	28	19.521,59	71	14.378,11	-	-	-	-	71	14.378,11	-	-	-
		Jumlah	199	83.740,63	437	63.924,86	108	398,11	60	29.429,36	268	34.097,39	1	-	398,11
476	Kab. Halmahera Tengah	2008	25	6.751,21	61	4.647,75	42	1.957,85	17	2.581,07	2	108,83	-	-	1.957,85
		2009	50	19.093,86	122	13.585,62	44	97,20	21	3.096,93	57	10.391,49	-	-	97,20
		2010	30	11.922,34	82	9.893,15	27	4.468,38	43	5.397,77	12	27,00	-	-	4.468,38
		2011	43	12.742,62	92	6.748,56	36	757,47	56	5.991,09	-	-	-	-	915,47
		2012	33	24.487,68	103	23.835,45	-	-	-	-	103	23.835,45	-	-	-
		Jumlah	181	74.997,71	460	58.710,53	149	7.280,90	137	17.066,86	174	34.362,77	-	-	7.438,90
477	Kab. Halmahera Timur	2008	18	2.593,30	40	2.593,29	35	1.015,81	5	1.577,48	-	-	-	-	1.015,81
		2009	51	16.470,94	108	14.104,44	67	1.490,16	37	12.614,28	3	-	1	-	1.490,16
		2010	48	19.787,29	116	14.999,17	51	342,99	55	12.478,61	10	2.177,57	-	-	342,99

Halaman 108 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	96	51.264,29	264	33.195,63	10	4.044,74	45	4.163,17	209	24.987,72	-	-	4.044,74
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	213	90.115,82	528	64.892,53	163	6.893,70	142	30.833,54	222	27.165,29	1	-	6.893,70
478	Kab. Halmahera Utara	2008	61	18.764,65	153	11.034,70	55	722,39	42	7.937,02	56	2.375,29	-	-	722,39
		2009	39	11.751,22	76	10.280,11	15	325,52	23	9.357,82	38	596,77	-	-	325,52
		2010	38	7.473,25	78	7.197,85	6	326,77	9	2.108,53	63	4.762,55	-	-	326,77
		2011	54	9.685,93	124	8.670,88	1	94,00	2	453,00	121	8.123,88	-	-	94,00
		2012	44	3.676,68	106	3.646,68	-	-	-	-	106	3.646,68	-	-	-
		Jumlah	236	51.351,73	537	40.830,22	77	1.468,68	76	19.856,37	384	19.505,17	-	-	1.468,68
479	Kab. Kepulauan Sula	2008	49	69.851,83	101	16.825,53	47	6.895,90	42	9.929,63	12	-	-	-	7.001,74
		2009	45	8.324,60	99	4.033,23	19	478,36	25	2.244,07	55	1.310,80	-	-	478,36
		2010	21	461,44	75	461,43	19	48,07	46	413,36	10	-	-	-	48,07
		2011	69	23.717,88	196	15.753,03	8	155,03	90	8.961,16	98	6.636,84	-	-	155,03
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	184	102.355,75	471	37.073,22	93	7.577,36	203	21.548,22	175	7.947,64	-	-	7.683,20
480	Kab. Pulau Morotai	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	968,56	31	968,56	-	-	-	-	31	968,56	-	-	-
		2011	56	9.800,42	161	9.230,66	8	254,00	79	6.839,24	74	2.137,42	-	-	254,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	70	10.768,98	192	10.199,22	8	254,00	79	6.839,24	105	3.105,98	-	-	254,00
481	Kota Ternate	2008	65	13.000,59	123	5.384,68	75	1.439,32	30	3.253,37	18	691,99	-	-	1.439,32
		2009	64	2.312,20	122	1.726,87	78	312,26	40	1.414,61	4	-	-	-	312,26
		2010	41	852,01	64	814,24	29	155,68	35	658,56	-	-	-	-	155,68
		2011	79	38.225,63	239	34.486,60	64	502,21	114	33.984,39	61	-	-	-	502,21
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	249	54.390,43	548	42.412,39	246	2.409,47	219	39.310,93	83	691,99	-	-	2.409,47

Halaman 109 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
482	Kota Tidore Kepulauan	2008	35	5.085,20	84	4.594,72	74	4.467,88	8	126,84	2	-	-	-	4.467,88
		2009	56	12.595,91	104	6.487,41	86	6.403,78	14	83,63	2	-	2	-	6.403,78
		2010	50	15.921,27	115	531,84	85	126,52	24	405,32	6	-	-	-	126,52
		2011	25	5.617,05	48	5.462,45	25	692,26	22	4.770,19	1	-	-	-	692,26
		2012	26	10.277,01	63	4.136,85	-	44,53	-	-	63	4.092,32	-	-	44,53
		Jumlah	192	49.496,44	414	21.213,27	270	11.734,97	68	5.385,98	74	4.092,32	2	-	11.734,97
483	Prov. Papua	2008	45	61.486,48	63	20.030,45	32	4.724,97	31	15.305,48	-	-	-	-	6.706,23
		2009	44	20.500,49	73	20.500,48	31	675,54	42	19.824,94	-	-	-	-	4.503,20
		2010	55	114.815,93	105	105.306,25	46	11.025,98	56	94.280,27	3	-	-	-	11.025,98
		2011	49	27.160,65	146	25.877,40	-	-	-	-	146	25.877,40	-	-	-
		2012	25	115.156,54	80	27.058,35	-	-	-	-	80	27.058,35	-	-	-
		Jumlah	218	339.120,09	467	198.772,93	109	16.426,49	129	129.410,69	229	52.935,75	-	-	22.235,41
484	Kab. Asmat	2008	18	7.461,20	28	3.597,87	21	2.812,56	7	785,31	-	-	-	-	3.812,96
		2009	12	943,42	29	943,42	22	437,59	7	505,83	-	-	-	-	795,05
		2010	15	2.373,92	32	1.122,66	18	354,30	12	768,36	2	-	-	-	666,33
		2011	9	268,05	15	268,05	6	125,71	8	142,34	1	-	-	-	125,71
		2012	15	5.536,80	32	2.095,53	-	-	-	-	32	2.095,53	-	-	-
		Jumlah	69	16.583,39	136	8.027,53	67	3.730,16	34	2.201,84	35	2.095,53	-	-	5.400,05
485	Kab. Biak Numfor	2008	14	254,31	21	174,30	16	129,30	5	45,00	-	-	-	-	18.035,86
		2009	24	6.850,55	51	7.318,30	31	5.935,07	20	1.383,23	-	-	-	-	5.073,64
		2010	17	8.941,99	43	4.956,06	16	587,95	8	3.713,86	19	654,25	-	-	587,95
		2011	44	15.253,65	115	15.375,90	27	7.873,46	28	7.293,74	60	208,70	-	-	7.873,46
		2012	22	4.046,05	52	3.231,46	-	-	-	-	52	3.231,46	-	-	-
		Jumlah	121	35.346,55	282	31.056,02	90	14.525,78	61	12.435,83	131	4.094,41	-	-	31.570,91
486	Kab. Boven Digoel	2008	15	293.464,60	29	22.571,13	17	6.504,28	11	16.066,85	1	-	-	-	3.076,75
		2009	21	40.105,74	44	16.355,74	32	9.487,70	11	6.868,04	1	-	-	-	6.937,78
		2010	12	211.437,82	26	2.888,07	12	1.615,97	13	1.272,10	1	-	-	-	1.615,97

Halaman 110 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	35	109.751,75	57	5.282,87	-	2.140,09	50	3.142,78	7	-	-	-	2.140,09
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	83	654.759,91	156	47.097,81	61	19.748,04	85	27.349,77	10	-	-	-	13.770,59
487	Kab. Dogiyai	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	10.331,56	36	11.876,35	14	3.673,37	17	8.202,98	5	-	-	-	2.963,96
		2011	17	12.135,03	41	2.974,68	-	-	-	-	41	2.974,68	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	34	22.466,59	77	14.851,03	14	3.673,37	17	8.202,98	46	2.974,68	-	-	2.963,96
488	Kab. Deiyai	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	44.977,29	16	38.400,89	6	-	7	-	3	38.400,89	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	44.977,29	16	38.400,89	6	-	7	-	3	38.400,89	-	-	-
489	Kab. Intan Jaya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	19.300,54	25	9.377,38	10	2.827,73	10	737,00	5	5.812,65	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	19.300,54	25	9.377,38	10	2.827,73	10	737,00	5	5.812,65	-	-	-
490	Kab. Jayapura	2008	38	12.454,35	57	10.187,11	45	2.853,87	12	7.333,24	-	-	-	-	2.853,87
		2009	20	6.746,23	23	6.746,22	16	4.352,86	7	2.393,36	-	-	-	-	-
		2010	20	34.963,85	37	3.607,74	9	1.322,30	9	479,22	19	1.806,22	-	-	-
		2011	57	67.399,61	94	51.076,50	-	-	-	-	94	51.076,50	-	-	-
		2012	24	21.550,97	59	11.129,15	-	-	-	-	59	11.129,15	-	-	-
		Jumlah	159	143.115,01	270	82.746,72	70	8.529,03	28	10.205,82	172	64.011,87	-	-	2.853,87

Halaman 111 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
491	Kab. Jayawijaya	2008	17	53.108,45	23	32.423,35	12	2.826,41	11	29.596,94	-	-	-	-	2.954,10
		2009	29	35.400,52	50	186.066,75	29	2.447,89	21	183.618,86	-	-	-	-	2.447,89
		2010	54	8.588,29	102	5.550,98	67	490,51	34	5.060,47	1	-	-	-	490,51
		2011	26	18.637,41	56	3.378,95	26	2.191,98	3	275,95	27	911,02	-	-	2.222,13
		2012	16	27.445,41	45	4.570,38	-	-	-	-	45	4.570,38	-	-	-
		Jumlah	142	143.180,08	276	231.990,41	134	7.956,79	69	218.552,22	73	5.481,40	-	-	8.114,63
492	Kab. Keerom	2008	20	15.252,92	41	15.194,20	26	6.632,48	15	8.561,72	-	-	-	-	12.442,76
		2009	21	13.673,02	42	12.160,24	24	850,12	18	11.310,12	-	-	-	-	97.061,15
		2010	25	5.055,82	50	4.856,35	21	1.080,19	29	3.776,16	-	-	-	-	1.080,19
		2011	21	6.856,76	48	5.015,29	-	-	-	-	48	5.015,29	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	87	40.838,52	181	37.226,08	71	8.562,79	62	23.648,00	48	5.015,29	-	-	110.584,10
493	Kab. Mappi	2008	12	110.315,88	27	104.937,66	20	104.181,08	7	756,58	-	-	-	-	-
		2009	8	522.539,36	23	21.003,20	19	21.000,05	4	3,15	-	-	-	-	-
		2010	22	24.256,47	41	18.589,08	16	14.347,43	25	4.241,65	-	-	-	-	-
		2011	12	9.783,78	31	9.062,00	10	2.943,12	21	6.118,88	-	-	-	-	-
		2012	14	17.357,90	25	4.605,68	-	-	-	-	25	4.605,68	-	-	-
		Jumlah	68	684.253,39	147	158.197,62	65	142.471,68	57	11.120,26	25	4.605,68	-	-	-
494	Kab. Merauke	2008	15	10.510,42	22	8.933,25	16	8.193,23	5	740,02	1	-	-	-	730,55
		2009	51	27.158,74	91	25.692,93	48	4.459,26	42	17.622,08	1	3.611,59	-	-	4.096,61
		2010	18	3.792,96	33	3.192,18	19	656,24	13	2.535,94	1	-	-	-	1,50
		2011	32	4.988,21	68	9.568,80	28	284,49	37	9.284,31	3	-	-	-	284,49
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	116	46.450,33	214	47.387,16	111	13.593,22	97	30.182,35	6	3.611,59	-	-	5.113,15
495	Kab. Mimika	2008	12	49.116,21	30	1.154,12	20	959,91	8	194,21	2	-	-	-	914,00
		2009	21	11.902,82	37	11.567,39	28	4.072,48	9	7.494,91	-	-	-	-	3.109,35
		2010	40	30.533,72	75	21.529,71	29	19.859,42	35	1.599,50	11	70,79	-	-	575,86

Halaman 112 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	9	2.228,73	17	2.467,86	9	997,14	7	1.470,72	1	-	-	-	-
		2012	17	12.207,64	31	3.398,73	-	-	-	-	31	3.398,73	-	-	-
		Jumlah	99	105.989,12	190	40.117,81	86	25.888,95	59	10.759,34	45	3.469,52	-	-	4.599,21
496	Kab. Nabire	2008	11	24.626,26	12	15.323,94	7	12.558,27	5	2.765,67	-	-	-	-	-
		2009	24	632.556,33	46	135.782,66	26	94.275,01	19	40.507,65	1	1.000,00	-	-	-
		2010	44	131.843,10	71	30.612,47	23	877,07	44	29.735,40	4	-	-	-	-
		2011	28	492.462,83	51	489.858,02	1	-	11	3.029,17	39	486.828,85	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	107	1.281.488,52	180	671.577,09	57	107.710,35	79	76.037,89	44	487.828,85	-	-	-
497	Kab. Paniai	2008	19	36.477,27	29	34.985,26	15	19.789,92	10	14.613,32	4	582,02	-	-	19.789,92
		2009	11	9.431,24	22	8.513,63	10	956,99	12	7.556,64	-	-	-	-	956,99
		2010	27	69.118,69	51	56.982,35	20	47.043,87	18	9.862,92	13	75,56	-	-	1.043,87
		2011	17	14.906,11	33	14.476,40	-	-	-	-	33	14.476,40	-	-	-
		2012	20	10.685,78	47	5.728,87	-	-	-	-	47	5.728,87	-	-	-
		Jumlah	94	140.619,09	182	120.686,51	45	67.790,78	40	32.032,88	97	20.862,85	-	-	21.790,78
498	Kab. Pegunungan Bintang	2008	8	-	15	-	13	-	2	-	-	-	-	-	26.410,35
		2009	8	15.216,13	15	10.810,16	10	-	5	10.810,16	-	-	-	-	-
		2010	20	21.043,09	53	1.623,16	24	529,35	24	1.093,81	5	-	-	-	27.125,20
		2011	16	20.904,43	49	185.364,28	21	-	27	185.364,28	1	-	-	-	-
		2012	18	7.293,09	50	4.687,33	-	-	-	-	50	4.687,33	-	-	-
		Jumlah	70	64.456,74	182	202.484,93	68	529,35	58	197.268,25	56	4.687,33	-	-	53.535,55
499	Kab. Puncak	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	10.373,89	25	10.373,89	7	-	8	10.115,34	10	258,55	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	10.373,89	25	10.373,89	7	-	8	10.115,34	10	258,55	-	-	-

Halaman 113 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
500	Kab. Puncak Jaya	2008	12	6.781,88	17	6.781,87	11	1.048,53	6	5.733,34	-	-	-	-	1.048,53
		2009	24	43.014,16	52	40.046,31	31	6.510,82	16	33.083,23	5	452,26	-	-	165.674,31
		2010	26	7.579,71	68	4.551,19	49	4.094,48	19	456,71	-	-	-	-	6.156,90
		2011	8	1.533,90	23	1.533,90	15	1.492,77	8	41,13	-	-	-	-	-
		2012	8	1.523,50	20	1.523,50	5	-	15	1.523,50	-	-	-	-	-
		Jumlah	78	60.433,15	180	54.436,77	111	13.146,60	64	40.837,91	5	452,26	-	-	172.879,74
501	Kab. Sarmi	2008	19	22.311,69	35	12.011,84	23	2.105,16	12	9.906,68	-	-	-	-	2.105,16
		2009	16	39.357,05	32	25.532,50	17	1.956,05	15	23.576,45	-	-	-	-	-
		2010	23	45.148,55	48	45.148,55	-	-	-	-	48	45.148,55	-	-	-
		2011	24	168.616,84	83	83.436,09	-	-	-	-	83	83.436,09	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	82	275.434,13	198	166.128,98	40	4.061,21	27	33.483,13	131	128.584,64	-	-	2.105,16
502	Kab. Supiori	2008	8	8.536,25	14	5.936,23	4	-	5	5.936,23	5	-	-	-	-
		2009	22	8.078,24	53	7.734,26	27	1.623,50	25	6.110,76	1	-	-	-	25,00
		2010	23	5.358,69	55	5.358,69	19	138,84	31	5.219,85	5	-	-	-	138,84
		2011	25	17.001,39	84	16.299,54	21	381,91	22	1.850,79	41	14.066,84	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	78	38.974,57	206	35.328,72	71	2.144,25	83	19.117,63	52	14.066,84	-	-	163,84
503	Kab. Tolikara	2008	33	7.258,35	62	7.014,74	36	177,85	26	6.836,89	-	-	-	-	190,76
		2009	18	17.919,42	32	17.473,02	15	-	17	17.473,02	-	-	-	-	-
		2010	21	35.238,92	43	35.238,92	3	-	18	30.590,12	22	4.648,80	-	-	-
		2011	12	6.435,59	32	6.135,71	-	-	-	-	32	6.135,71	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	84	66.852,28	169	65.862,39	54	177,85	61	54.900,03	54	10.784,51	-	-	190,76
504	Kab. Waropen	2008	20	5.798,03	27	5.798,02	2	3.529,21	8	1.166,16	17	1.102,65	-	-	3.529,21
		2009	33	185.918,11	74	185.870,11	15	751,64	31	156.696,79	28	28.421,68	-	-	865,64
		2010	27	4.833,34	79	4.833,33	11	-	42	4.771,23	26	62,10	-	-	-

Halaman 114 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	15	4.569,18	55	14.493,08	-	-	-	-	55	14.493,08	-	-	-
		Jumlah	95	201.118,66	235	210.994,54	28	4.280,85	81	162.634,18	126	44.079,51	-	-	4.394,85
505	Kab. Yahukimo	2008	11	18.567,74	8	6.055,95	6	-	2	6.055,95	-	-	-	-	-
		2009	45	84.928,58	88	74.611,44	41	8.459,98	47	66.151,46	-	-	-	-	18.159,40
		2010	25	17.390,71	61	15.757,96	13	2.929,10	41	12.828,86	7	-	-	-	7.987,78
		2011	12	233.615,31	29	2.071,65	8	-	21	2.071,65	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	93	354.502,34	186	98.497,00	68	11.389,08	111	87.107,92	7	-	-	-	26.147,18
506	Kab. Kepulauan Yapen	2008	18	5.184,95	30	5.184,95	-	-	-	-	30	5.184,95	-	-	-
		2009	23	47.325,65	46	43.731,23	14	2.491,91	20	29.769,27	12	11.470,05	-	-	535,01
		2010	17	32.458,24	53	25.863,00	28	2.960,51	23	22.902,49	2	-	-	-	1.688,22
		2011	12	13.780,10	31	6.189,24	19	1.011,79	12	4.591,89	-	585,56	-	-	117,28
		2012	13	5.253,16	32	1.516,44	-	-	-	-	32	1.516,44	-	-	-
		Jumlah	83	104.002,10	192	82.484,86	61	6.464,21	55	57.263,65	76	18.757,00	-	-	2.340,51
507	Kab. Mamberamo Raya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	18	46.200,30	34	46.200,29	24	24.078,49	10	22.121,80	-	-	-	-	24.078,49
		2010	25	45.232,79	53	24.137,66	14	-	33	24.137,66	6	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	25	141.037,23	45	26.856,88	-	-	-	-	45	26.856,88	-	-	-
		Jumlah	68	232.470,32	132	97.194,83	38	24.078,49	43	46.259,46	51	26.856,88	-	-	24.078,49
508	Kab. Mamberamo Tengah	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	13.332,65	60	12.899,86	-	-	-	-	60	12.899,86	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	13.332,65	60	12.899,86	-	-	-	-	60	12.899,86	-	-	-

Halaman 115 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
509	Kab. Nduga	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	22.143,42	35	15.917,78	13	5.065,55	20	10.446,01	2	406,22	-	-	889,71
		2011	20	10.713,73	60	10.713,73	-	-	-	-	60	10.713,73	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	32	32.857,15	95	26.631,51	13	5.065,55	20	10.446,01	62	11.119,95	-	-	889,71
510	Kab. Lany Jaya	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	4.555,27	20	4.238,84	-	-	-	-	20	4.238,84	-	-	-
		2011	9	1.866,26	24	1.866,26	-	-	-	-	24	1.866,26	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	6.421,53	44	6.105,10	-	-	-	-	44	6.105,10	-	-	-
511	Kab. Yalimo	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	20.306,00	38	19.057,90	1	-	11	19.040,54	26	17,36	-	-	-
		2011	14	2.060,03	39	2.643,73	-	-	-	-	39	2.643,73	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	22.366,03	77	21.701,63	1	-	11	19.040,54	65	2.661,09	-	-	-
512	Kota Jayapura	2008	45	15.886,39	59	4.684,98	42	260,58	17	4.424,40	-	-	-	-	260,58
		2009	16	3.662,17	29	3.554,45	18	2.823,50	11	730,95	-	-	-	-	2.823,50
		2010	62	9.722,37	94	7.357,70	31	2.835,65	62	4.522,05	1	-	-	-	12.695,52
		2011	59	19.062,42	120	19.224,86	-	-	-	-	120	19.224,86	-	-	-
		2012	22	11.124,93	69	1.495,91	-	-	-	-	69	1.495,91	-	-	-
		Jumlah	204	59.458,28	371	36.317,90	91	5.919,73	90	9.677,40	190	20.720,77	-	-	15.779,60
513	Prov. Papua Barat	2008	39	15.142,59	75	15.142,58	29	-	14	1.875,21	32	13.267,37	-	-	-
		2009	60	24.036,19	155	23.386,49	46	452,29	8	7.585,41	101	15.348,79	-	-	452,29
		2010	43	62.240,94	131	55.561,16	39	611,50	6	262,85	86	54.686,81	-	-	611,50

Halaman 116 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	75	41.378,87	197	27.939,71	2	1.021,75	2	-	193	26.917,96	-	-	1.021,75
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	217	142.798,59	558	122.029,94	116	2.085,54	30	9.723,47	412	110.220,93	-	-	2.085,54
514	Kab. Fakfak	2008	34	2.417,68	66	1.014,62	34	78,47	18	936,15	14	-	-	-	78,47
		2009	51	11.348,66	134	8.001,43	83	966,40	19	6.230,90	32	804,13	-	-	966,40
		2010	28	6.501,73	63	4.376,17	15	63,14	3	140,49	45	4.172,54	-	-	63,14
		2011	52	26.543,44	135	5.533,57	8	-	2	-	125	5.533,57	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	165	46.811,51	398	18.925,79	140	1.108,01	42	7.307,54	216	10.510,24	-	-	1.108,01
515	Kab. Kaimana	2008	49	6.753,97	131	4.560,62	40	1.028,44	9	2.994,99	82	537,19	-	-	1.028,44
		2009	32	4.602,64	79	4.443,57	28	1.879,01	7	1.296,51	44	1.268,05	-	-	1.879,01
		2010	24	3.761,23	57	3.761,23	42	657,50	3	1.228,49	12	1.875,24	-	-	657,50
		2011	49	12.746,73	104	6.459,63	38	943,77	7	2.247,43	59	3.268,43	-	-	943,77
		2012	24	1.866,14	64	1.504,57	-	15,20	1	579,19	63	910,18	-	-	15,20
		Jumlah	178	29.730,71	435	20.729,62	148	4.523,92	27	8.346,61	260	7.859,09	-	-	4.523,92
516	Kab. Manokwari	2008	48	7.553,75	109	3.581,23	5	734,48	31	265,50	73	2.581,25	-	-	734,48
		2009	29	18.712,48	78	5.345,79	-	-	-	-	78	5.345,79	-	-	-
		2010	42	4.204,03	82	4.204,02	16	397,87	-	-	66	3.806,15	-	-	397,87
		2011	60	9.304,37	172	2.066,87	-	-	-	-	172	2.066,87	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	179	39.774,63	441	15.197,91	21	1.132,35	31	265,50	389	13.800,06	-	-	1.132,35
517	Kab. Maybrat	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	28	15.299,82	66	11.339,21	-	0,26	4	5,98	62	11.332,97	-	-	0,26
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	15.299,82	66	11.339,21	-	0,26	4	5,98	62	11.332,97	-	-	0,26

Halaman 117 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
518	Kab. Raja Ampat	2008	42	8.078,54	98	7.949,29	23	2.358,57	24	4.737,07	51	853,65	-	-	2.358,57
		2009	42	9.093,77	140	8.066,81	27	3.776,78	43	2.105,44	70	2.184,59	-	-	3.776,78
		2010	20	6.181,10	62	6.123,94	21	1.351,72	33	4.772,22	8	-	-	-	1.351,72
		2011	50	7.199,52	131	5.157,72	5	170,93	18	955,48	108	4.031,31	-	-	170,93
				USD 87.75		USD 87.75						USD 87.75			
		2012	17	7.655,19	61	4.545,59	-	-	-	-	61	4.545,59	-	-	-
		Jumlah	171	38.208,12	492	31.843,35	76	7.658,00	118	12.570,21	298	11.615,14	-	-	7.658,00
				USD 87.75		USD 87.75						USD 87.75			
519	Kab. Sorong	2008	31	108.414,57	65	1.986,81	39	-	16	1.771,80	10	215,01	-	-	-
		2009	46	5.515,11	114	4.358,62	53	1.183,69	30	2.341,14	31	833,79	-	-	1.183,69
		2010	33	6.344,28	94	5.338,88	60	2.632,85	12	1.437,91	22	1.268,12	-	-	2.632,85
		2011	47	33.182,29	97	16.599,41	19	5,00	43	14.964,61	35	1.629,80	-	-	5,00
				USD 79.58		USD 79.58				USD 79.58					
		2012	19	1.813,22	50	836,36	-	-	-	-	50	836,36	-	-	-
		Jumlah	176	155.269,47	420	29.120,08	171	3.821,54	101	20.515,46	148	4.783,08	-	-	3.821,54
				USD 79.58		USD 79.58				USD 79.58					
520	Kab. Sorong Selatan	2008	31	15.937,77	59	15.099,47	29	7.428,10	8	5.724,96	22	1.946,41	-	-	7.428,10
		2009	31	29.464,62	81	1.928,96	55	196,16	19	1.732,80	7	-	-	-	196,16
		2010	23	2.508,00	55	2.076,79	-	414,02	4	527,90	51	1.134,87	-	-	414,02
		2011	33	9.126,66	98	8.071,42	38	1.314,53	25	5.480,55	35	1.276,34	-	-	1.314,53
		2012	11	2.516,77	37	2.506,76	-	1.042,80	1	114,70	36	1.349,26	-	-	1.052,80
		Jumlah	129	59.553,82	330	29.683,40	122	10.395,61	57	13.580,91	151	5.706,88	-	-	10.405,61
521	Kab. Tambrauw	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	26	5.337,32	66	1.666,40	34	75,78	11	1.120,52	21	470,10	-	-	75,78
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	5.337,32	66	1.666,40	34	75,78	11	1.120,52	21	470,10	-	-	75,78

Halaman 118 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
522	Kab. Teluk Bintuni	2008	32	8.237,26	118	8.237,26	69	2.039,03	48	6.198,23	1	-	-	-	2.039,03
		2009	51	10.142,47	171	10.142,47	81	1.638,53	90	8.503,94	-	-	-	-	1.638,53
		2010	25	10.125,92	66	10.125,91	32	2.756,58	34	2.832,93	-	4.536,40	-	-	2.756,58
		2011	34	8.206,13	95	3.291,97	8	125,37	11	942,18	76	2.224,42	-	-	125,37
				USD 223.92		USD 223.92						USD 223.92			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	142	36.711,78	450	31.797,61	190	6.559,51	183	18.477,28	77	6.760,82	-	-	6.559,51
				USD 223.92		USD 223.92						USD 223.92			
523	Kab. Teluk Wondama	2008	34	15.677,47	71	13.517,71	11	81,45	8	1.784,01	52	11.652,25	-	-	81,45
		2009	58	21.324,02	179	17.628,24	3	122,85	1	-	175	17.505,39	-	-	122,85
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	51	15.910,16	99	11.498,29	-	-	-	-	99	11.498,29	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	143	52.911,65	349	42.644,24	14	204,30	9	1.784,01	326	40.655,93	-	-	204,30
524	Kota Sorong	2008	28	12.713,76	71	12.713,75	31	495,12	4	10.346,60	36	1.872,03	-	-	495,12
		2009	23	9.821,71	66	7.339,93	24	-	7	819,04	35	6.520,89	-	-	-
		2010	34	12.409,33	96	12.168,67	50	-	13	12.168,67	33	-	-	-	-
		2011	30	24.453,57	81	11.908,81	44	560,59	17	9.537,54	20	1.810,68	-	-	560,59
		2012	19	5.273,30	48	804,07	1	70,74	1	733,33	46	-	-	-	70,74
		Jumlah	134	64.671,67	362	44.935,23	150	1.126,45	42	33.605,18	170	10.203,60	-	-	1.126,45
		Total	**68.778**	**46.928.580,80**	**157.439**	**16.539.767,13**	**80.617**	**3.961.109,53**	**37.584**	**7.889.721,07**	**39.150**	**4.492.958,29**	**88**	**195.978,24**	**3.966.354,40**
				USD 12,901.33		**USD 12,592.95**		**USD 1,602.27**		**USD 10,212.10**		**USD 778.58**			**USD 1,602.27**
				SGD 3.57		**SGD 3.57**						**SGD 3.57**			

Halaman 1 - Lampiran 3

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, dan Otorita Tahun 2008 s.d. 2012 (Semester I)

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUMN (Induk Perusahaan)															
1	PT PLN (Persero)	2008	9	5.989,29	15	5.989,29	9	5.989,29	6	-	-	-	-	-	5.989,29
		2009	12	2.791.122,28	20	1.844.357,89	16	1.828.695,34	2	15.662,55	-	-	2	-	1.828.976,06
		2010	20	11.382.154,37	26	19.701,47	17	16.701,47	8	3.000,00	-	-	1	-	16.701,47
			-	USD 37.07	-	USD 37.07	-	USD 37.07	-	-	-	-	-	-	USD 37.07
		2011	82	41.040.706,28	146	243.003,43	24	19.677,11	68	223.326,32	52	-	2	-	16.040,46
		2012	8	155.283,08	8	155.283,08	-	-	-	-	8	155.283,08	-	-	-
			-	USD 2,937.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 248.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	131	55.375.255,30	215	2.268.335,16	66	1.871.063,21	84	241.988,87	60	155.283,08	5	-	1.867.707,28
			-	USD 2,974.13	-	USD 37.07	-	USD 37.07	-	-	-	-	-	-	USD 37.07
			-	EUR 248.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT Bukit Asam (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	16	176.878,82	22	64.392,82	20	64.392,82	2	-	-	-	-	-	72.474,58
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7.79
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	7	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	176.878,82	29	64.392,82	23	64.392,82	6	-	-	-	-	-	72.474,58
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7.79
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	338.370,96	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
			-	USD 2,160.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	338.370,96	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
			-	USD 2,160.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT Sarana Karya (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	825.373,58	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
		2011	2	675,00	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	826.048,58	7	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	11	-	2	-	7	-	2	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	-	11	-	2	-	7	-	2	-	-	-	-
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	205.072,64	23	81.429,15	15	54,00	8	81.375,15	-	-	-	-	54,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	205.072,64	23	81.429,15	15	54,00	8	81.375,15	-	-	-	-	54,00
8	PT Pertamina (Persero)	2008	99	-	120	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	77	187.404,70	177	8.705,40	172	8.705,40	3	-	2	-	-	-	8.705,40
			-	USD 345,572.34	-	USD 32,489.22	-	USD 32,489.22	-	-	-	-	-	-	USD 32,489.22
		2010	83	105.291,13	139	14.771,81	134	2.625,00	4	12.146,81	1	-	-	-	2.625,00
		2011	61	6.472,82	88	-	22	-	-	-	66	-	-	-	-
		2012	80	112.071,61	146	73.779,66	-	-	-	-	146	73.779,66	-	-	-
			-	USD 46,156.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	400	411.240,26	670	97.256,87	448	11.330,40	7	12.146,81	215	73.779,66	-	-	11.330,40
			-	USD 391,728.62	-	USD 32,489.22	-	USD 32,489.22	-	-	-	-	-	-	USD 32,489.22
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	14	-	19	-	12	-	7	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	24	-	9	-	15	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	-	43	-	21	-	22	-	-	-	-	-	-
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	120.162,34	42	91,84	24	91,84	18	-	-	-	-	-	91,84
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	120.162,34	42	91,84	24	91,84	18	-	-	-	-	-	91,84
13	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2008	16	48.300,52	35	477,61	8	128,76	13	348,85	14	-	-	-	128,76
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	144.187,43	43	1.735,97	12	1.735,97	11	-	14	-	6	-	1.735,97
		2011	39	474.814,40	98	110.495,07	1	-	25	30.145,17	72	80.349,90	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	71	667.302,35	176	112.708,65	21	1.864,73	49	30.494,02	100	80.349,90	6	-	1.864,73

Halaman 3 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Perum Damri	2008	5	22.904,47	9	43,64	1	43,64	5	-	3	-	-	-	43,64
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	22.904,47	9	43,64	1	43,64	5	-	3	-	-	-	43,64
15	Perum PPD	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	60.311,07	40	679,22	-	-	-	-	40	679,22	-	-	-
			-	USD 67.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	60.311,07	40	679,22	-	-	-	-	40	679,22	-	-	-
			-	USD 67.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	97.244,79	31	42.030,59	17	25.082,73	10	16.947,86	3	-	1	-	25.059,35
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	97.244,79	31	42.030,59	17	25.082,73	10	16.947,86	3	-	1	-	25.059,35
19	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	31.100,11	23	46,00	-	-	-	-	23	46,00	-	-	-
		Jumlah	11	31.100,11	23	46,00	-	-	-	-	23	46,00	-	-	-
20	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2008	2	17,18	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	21	416.073,26	35	123.452,15	16	3.916,08	11	119.536,07	8	-	-	-	197,50
		2010	16	82.196,12	28	66,00	11	66,00	2	-	15	-	-	-	66,00
			-	USD 1.21	-	USD 1.21	-	USD 1.21	-	-	-	-	-	-	USD 1.21
		2011	16	8.484,47	46	6.376,90	-	-	9	827,41	37	5.549,49	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	55	506.771,03	110	129.895,05	28	3.982,08	22	120.363,48	60	5.549,49	-	-	263,50
			-	USD 1.21	-	USD 1.21	-	USD 1.21	-	-	-	-	-	-	USD 1.21
22	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	11.948,41	21	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-	-	-
			-	USD 8.83	-	USD 8.83	-	-	-	USD 8.83	-	-	-	-	-
			-	CNY 896.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	11.948,41	21	2.500,00	14	-	5	-	2	2.500,00	-	-	-
			-	USD 8.83	-	USD 8.83	-	-	-	USD 8.83	-	-	-	-	-
			-	CNY 896.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT Bina Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT Indah Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT Yodya Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT Indra Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT Virama Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT Amarta Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	361.570,57	30	130.432,49	10	37.183,00	20	93.249,49	-	-	-	-	120.224,05
			-	USD 29,327.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	361.570,57	30	130.432,49	10	37.183,00	20	93.249,49	-	-	-	-	120.224,05
			-	USD 29,327.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT Istaka Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT Nindya Karya (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	142.585,00	22	143.945,87	15	129.506,02	6	5.256,07	1	9.183,78	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	142.585,00	22	143.945,87	15	129.506,02	6	5.256,07	1	9.183,78	-	-	-
34	PT Hutama Karya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	211.647,70	26	121.925,04	16	121.925,04	10	-	-	-	-	-	121.925,04
			-	USD 11,502.93	-	USD 11,498.63	-	USD 11,498.63	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 5 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2011	6	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	211.647,70	34	121.925,04	24	121.925,04	10	-	-	-	-	-	121.925,04
			-	USD 11,502.93	-	USD 11,498.63	-	USD 11,498.63	-	-	-	-	-	-	-
36	Perum Perumnas	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	15	44.059,62	28	12.671,10	5	-	16	5.424,62	7	7.246,48	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	44.059,62	28	12.671,10	5	-	16	5.424,62	7	7.246,48	-	-	-
37	PT Brantas Abipraya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT Waskita Karya (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	71.387,59	24	37.692,71	10	31.663,84	13	6.028,87	1	-	-	-	31.663,84
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	71.387,59	24	37.692,71	10	31.663,84	13	6.028,87	1	-	-	-	31.663,84
39	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	11	618.980,55	18	605.439,69	12	563.231,57	6	42.208,12	-	-	-	-	563.231,57
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	26	-	47	-	7	-	16	-	24	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	37	618.980,55	65	605.439,69	19	563.231,57	22	42.208,12	24	-	-	-	563.231,57
40	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	2	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
41	Perum LKBN Antara	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Perum Produksi Film Negara	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT Hotel Indonesia Natour	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	33.599,00	24	33.599,00	-	-	-	-	24	33.599,00	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	33.599,00	24	33.599,00	-	-	-	-	24	33.599,00	-	-	-
49	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	26.646,73	12	5,60	-	-	-	-	12	5,60	-	-	-
			-	USD 412.07	-	USD 412.07	-	-	-	-	-	USD 412.07	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	26.646,73	12	5,60	-	-	-	-	12	5,60	-	-	-
			-	USD 412.07	-	USD 412.07	-	-	-	-	-	USD 412.07	-	-	-
51	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	6.454.166,44	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	12.570,16
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	6.454.166,44	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	12.570,16
52	PT PAL Indonesia (Persero)	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	16	1.608.366,87	53	237.518,22	-	-	-	-	53	237.518,22	-	-	-
			-	USD 48,315.24	-	USD 1,128.68	-	-	-	-	-	USD 1,128.68	-	-	-
		Jumlah	16	1.608.366,87	53	237.518,22	-	-	-	-	53	237.518,22	-	-	-
			-	USD 48,315.24	-	USD 1,128.68	-	-	-	-	-	USD 1,128.68	-	-	-
53	PT Pindad (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT Dahana (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	PT Industri Kereta Api (Persero)	2008	5	101.156,39	8	-	3	-	4	-	1	-	-	-	-
			-	USD 13,800.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	24.932,17	17	21.215,41	-	-	-	-	17	21.215,41	-	-	-
		Jumlah	12	126.088,56	25	21.215,41	3	-	4	-	18	21.215,41	-	-	-
			-	USD 13,800.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT Barata Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT LEN Industri (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT Batan Teknologi (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	-	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	-	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-
62	PT Bio Farma (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	11.639,37	21	1.995,57	21	1.995,57	-	-	-	-	-	-	1.995,57
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	11.639,37	21	1.995,57	21	1.995,57	-	-	-	-	-	-	1.995,57
63	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	106.316,85	34	3.335,75	14	1.402,84	14	1.932,91	5	-	1	-	1.402,84
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	106.316,85	34	3.335,75	14	1.402,84	14	1.932,91	5	-	1	-	1.402,84
64	PT Indo Farma (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	11	107.568,92	29	2.631,79	9	31,71	7	2.600,08	13	-	-	-	31,71
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	107.568,92	29	2.631,79	9	31,71	7	2.600,08	13	-	-	-	31,71
65	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	93.281,40	24	27.774,43	-	-	-	-	24	27.774,43	-	-	-
		Jumlah	11	93.281,40	24	27.774,43	-	-	-	-	24	27.774,43	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66	PT Semen Baturaja (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	17.059,73	19	7.446,12	13	53,39	3	5.840,31	1	-	2	1.552,42	53,39
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	17.059,73	19	7.446,12	13	53,39	3	5.840,31	1	-	2	1.552,42	53,39
67	PT Semen Kupang (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	14.473,98	25	7.631,67	13	271,41	9	4.728,81	1	-	2	2.631,45	2.430,94
			-	USD 788.28	-	USD 788.28	-	-	-	USD 788.28	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	14.473,98	25	7.631,67	13	271,41	9	4.728,81	1	-	2	2.631,45	2.430,94
			-	USD 788.28	-	USD 788.28	-	-	-	USD 788.28	-	-	-	-	-
69	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	15.722,54	21	4.851,24	3	65,00	15	4.786,24	3	-	-	-	65,00
			-	USD 212,229.81	-	USD 12,229.81	-	-	-	USD 159.13	-	USD 12,070.68	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	15.722,54	21	4.851,24	3	65,00	15	4.786,24	3	-	-	-	65,00
			-	USD 212,229.81	-	USD 12,229.81	-	-	-	USD 159.13	-	USD 12,070.68	-	-	-
71	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT Cambrics Primissima (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT Industri Gelas (Persero)	2008	11	27.690,70	24	15.506,34	18	13.983,06	4	115,72	-	-	2	1.407,56	13.983,06
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	27.690,70	24	15.506,34	18	13.983,06	4	115,72	-	-	2	1.407,56	13.983,06
74	PT Garam (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
76	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	20	1.660,38	30	-	28	-	2	-	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	1.660,38	30	-	28	-	2	-	-	-	-	-	-
77	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	5.257,01	16	2.967,01	9	2.750,74	7	216,27	-	-	-	-	2.750,74
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	5.257,01	16	2.967,01	9	2.750,74	7	216,27	-	-	-	-	2.750,74
78	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	9	119.850,94	9	73.621,54	-	-	7	71.483,09	2	2.138,45	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	119.850,94	9	73.621,54	-	-	7	71.483,09	2	2.138,45	-	-	-
80	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	16	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	-	16	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-
82	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	-	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-
83	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	24	282.799,57	52	1.703,14	25	337,83	7	-	18	1.365,31	2	-	337,83
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	282.799,57	52	1.703,14	25	337,83	7	-	18	1.365,31	2	-	337,83

Halaman 10 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	85.411,65	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	85.411,65	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
85	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	95.252,44	24	2.998,64	-	-	-	-	24	2.998,64	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	95.252,44	24	2.998,64	-	-	-	-	24	2.998,64	-	-	-
86	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	66.938,27	34	66.938,26	31	66.026,80	3	911,46	-	-	-	-	66.026,80
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	24	66.938,27	34	66.938,26	31	66.026,80	3	911,46	-	-	-	-	66.026,80
87	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	121.595,00	31	46.273,03	10	-	17	46.273,03	4	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	121.595,00	31	46.273,03	10	-	17	46.273,03	4	-	-	-	-
89	Perum Perhutani	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	22	115.941,10	41	25.282,94	24	6.398,86	15	18.884,08	2	-	-	-	6.398,86
			-	USD 758.61	-	USD 758.61	-	-	-	USD 758.61	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	209.293,05	39	132.604,15	23	-	13	132.604,15	3	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	53	325.234,15	80	157.887,09	47	6.398,86	28	151.488,23	5	-	-	-	6.398,86
			-	USD 758.61	-	USD 758.61	-	-	-	USD 758.61	-	-	-	-	-
90	PT Inhutani I (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	-	15	-	7	-	7	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	-	15	-	7	-	7	-	1	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
91	PT Inhutani II (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	26	-	20	-	6	-	-	-	-	-	-
		2012	9	-	14	-	2	-	11	-	1	-	-	-	-
		Jumlah	27	-	40	-	22	-	17	-	1	-	-	-	-
92	PT Inhutani III (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT Inhutani IV (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT Inhutani V (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2008	1	185,24	1	185,24	1	185,24	-	-	-	-	-	-	185,24
		2009	11	15.485,88	24	27.827,84	22	25.175,00	1	2.652,84	-	-	1	-	25.175,00
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	40.614,23	16	2.132,76	-	-	-	-	16	2.132,76	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	56.285,35	41	30.145,84	23	25.360,24	1	2.652,84	16	2.132,76	1	-	25.360,24
96	PT Pertani (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	4	7.209,86	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	-	-	1.976,30
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	7.209,86	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	-	-	1.976,30
97	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	20	3.521,13	37	569,51	-	-	36	502,96	1	66,55	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	3.521,13	37	569,51	-	-	36	502,96	1	66,55	-	-	-
98	Perum Prasarana Perikanan Samudra	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	309.661,75	19	3.575,33	13	447,58	2	3.127,75	-	-	4	-	447,58
			-	USD 4,010.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	309.661,75	19	3.575,33	13	447,58	2	3.127,75	-	-	4	-	447,58
			-	USD 4,010.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 8.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 12 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
100	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	402.011,68	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-
			-	USD 440.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 104,915.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	402.011,68	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-
			-	USD 440.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	JPY 104,915.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT Kertas Leces (Persero)	2008	6	258.194,04	6	13.166,40	5	10.698,10	1	2.468,30	-	-	-	-	10.698,10
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	258.194,04	6	13.166,40	5	10.698,10	1	2.468,30	-	-	-	-	10.698,10
103	Perum PNRI	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	29	-	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	-	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
104	Perum Peruri	2008	11	12.541,24	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	12.162,17	32	1.328,83	24	1.328,83	8	-	-	-	-	-	1.126,87
			-	EUR 212.87	-	EUR 24.20	-	EUR 24.20	-	-	-	-	-	-	EUR 24.20
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	24.703,41	50	1.328,83	41	1.328,83	9	-	-	-	-	-	1.126,87
			-	EUR 212.87	-	EUR 24.20	-	EUR 24.20	-	-	-	-	-	-	EUR 24.20
						-									
105	PT Balai Pustaka (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT Pradnya Paramitha (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	17	-	41	-	28	-	9	-	-	-	4	-	-
		2010	4	-	8	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-
		2011	43	-	105	-	41	-	64	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	64	-	154	-	74	-	75	-	-	-	5	-	-

Halaman 13 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
108	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	14	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-
		2011	18	-	31	-	23	-	7	-	-	-	1	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	23	-	45	-	36	-	8	-	-	-	1	-	-
109	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2008	30	1.012.302,00	76	371.855,48	67	371.855,48	9	-	-	-	-	-	562.885,48
			-	-	-	USD 13,125.00	-	USD 13,125.00	-	-	-	-	-	-	USD 13,125.00
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	-	36	-	34	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	47	1.012.302,00	112	371.855,48	101	371.855,48	11	-	-	-	-	-	562.885,48
			-	-	-	USD 13,125.00	-	USD 13,125.00	-	-	-	-	-	-	USD 13,125.00
110	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	2008	14	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	48	-	84	-	40	-	44	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	62	-	102	-	58	-	44	-	-	-	-	-	-
111	PT Jamsostek (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	1.858.989,87	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
		2012	7	7.280.577,43	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
		Jumlah	12	9.139.567,30	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
112	PT Taspen (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	148.233,47	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	1	-	447.896,79
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	148.233,47	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	1	-	447.896,79
113	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	221.378,76	20	1.795,75	14	-	5	1.795,75	-	-	1	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	221.378,76	20	1.795,75	14	-	5	1.795,75	-	-	1	-	-
114	PT Jasaraharja (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	104.289,83	37	-	14	-	2	-	21	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	104.289,83	37	-	14	-	2	-	21	-	-	-	-

Halaman 14 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
115	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2008	28	80.043,42	47	98.658,18	42	8.522,60	4	90.106,73	-	-	1	28,85	8.522,60
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	-	22	-	10	-	12	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	40	80.043,42	69	98.658,18	52	8.522,60	16	90.106,73	-	-	1	28,85	8.522,60
116	PT Jasindo (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	-	12	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	-	12	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-
118	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT ASABRI (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT Bahana PUI (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT Danareksa (Persero)	2008	4	438.247,26	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-	238.590,20
			-	USD 48,464.81	-	USD 51,605.93	-	USD 23,493.68	-	USD 28,112.25	-	-	-	-	USD 20,352.55
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	438.247,26	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-	238.590,20
			-	USD 48,464.81	-	USD 51,605.93	-	USD 23,493.68	-	USD 28,112.25	-	-	-	-	USD 20,352.55
123	Perum Pegadaian (Persero)	2008	5	85.395,54	5	54.579,16	2	5.096,51	3	49.482,65	-	-	-	-	5.096,51
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	85.395,54	17	54.579,16	2	5.096,51	3	49.482,65	12	-	-	-	5.096,51
124	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	4.031,19	12	2.845,14	4	2.845,14	8	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	4.031,19	12	2.845,14	4	2.845,14	8	-	-	-	-	-	-

Halaman 15 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	PT PANN Multi Finance (Persero)	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	16	158.497,09	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	1	-	86.196,29
			-	USD 570,077.23	-	USD 429,924.69	-	USD 429,924.69	-	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	158.497,09	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	1	-	86.196,29
			-	USD 570,077.23	-	USD 429,924.69	-	USD 429,924.69	-	-	-	-	-	-	-
126	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-
127	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	36.388,60	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	36.388,60	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-
128	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Perum Bulog	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	48	354.419,48	77	204.543,90	53	185.658,93	23	18.884,97	-	-	1	-	184.487,28
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	-	12	-	3	-	9	-	-	-	-	-	-
		2012	14	526.942,94	47	89.243,21	-	-	-	-	47	89.243,21	-	-	-
		Jumlah	67	881.362,42	136	293.787,11	56	185.658,93	32	18.884,97	47	89.243,21	1	-	184.487,28

Halaman 16 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
132	PT Survey Udara Penas (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT Pos Indonesia (Persero)	2008	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	14	12.400,72	43	-	41	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	22	8.560,75	49	-	11	-	35	-	3	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	37	20.961,47	95	-	55	-	37	-	3	-	-	-	-
135	PT Sarinah (Persero)	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	6.552,35	15	4.933,50	4	796,82	9	1.403,98	2	2.455,81	-	276,89	568,28
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	6.552,35	15	4.933,50	4	796,82	9	1.403,98	2	2.455,81	-	276,89	568,28
136	PT Sucofindo (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	-	35	-	21	-	14	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	-	35	-	21	-	14	-	-	-	-	-	-
137	PT Berdikari (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	-	21	-	14	-	7	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	-	21	-	14	-	7	-	-	-	-	-	-
140	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Perum Jasa Tirta I	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Perum Jasa Tirta II	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 17 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
144	PT PPA (Persero)	2008	9	1.570,56	9	1.570,56	6	1.570,56	1	-	-	-	2	-	1.570,56
			-	USD 25,000.00	-	USD 25,000.00	-	-	-	USD 25,000.00	-	-	-	-	-
		2009	7	-	10	-	4	-	6	-	-	-	-	-	-
		2010	20	406,22	19	406,22	13	-	1	-	5	406,22	-	-	-
		2011	5	1.877,31	7	172,80	-	-	-	-	7	172,80	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	41	3.854,09	45	2.149,58	23	1.570,56	8	-	12	579,02	2	-	1.570,56
			-	USD 25,000.00	-	USD 25,000.00	-	-	-	USD 25,000.00	-	-	-	-	-
	Total BUMN Induk		**2.020**	**83.450.154,67**	**3.686**	**6.040.748,72**	**1.848**	**4.154.227,76**	**847**	**1.124.913,77**	**952**	**755.710,02**	**39**	**5.897,17**	**4.499.403,80**
			-	**USD 1,362,068.74**	-	**USD 579,008.03**	-	**USD 510,569.50**	-	**USD 54,827.10**	-	**USD 13,611.43**	-	-	**USD 66,012.84**
			-	**EUR 469.83**	-	**EUR 24.20**	-	**EUR 24.20**	-	-	-	-	-	-	**EUR 24.20**
			-	**JPY 104,916.81**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	**CNY 896.89**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANAK PERUSAHAAN															
145	PT Indonesia Power	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	4	28.019.115,68	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	28.019.115,68	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
146	PT Pembangkitan Jawa Bali	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	79.904,01	17	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	79.904,01	17	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-
147	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	2	1.000,00	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.017,14
			-	USD 886.71	-	USD 886.71	-	USD 886.71	-	-	-	-	-	-	USD 886.71
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	2	1.000,00	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.017,14
			-	USD 886.71	-	USD 886.71	-	USD 886.71	-	-	-	-	-	-	USD 886.71
149	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PT ICON+	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 18 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
151	PT PelitaAir Service	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT Pelat Timah Nusantara	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	10.188,86	15	6.870,73	14	6.870,73	-	-	-	-	1	-	6.870,73
			-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	-	-	-	-	-	USD 20.25
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	10.188,86	15	6.870,73	14	6.870,73	-	-	-	-	1	-	6.870,73
			-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	USD 20.25	-	-	-	-	-	-	USD 20.25
153	Dana Pensiun Perkebunan	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero)	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	23.748,90	37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 9.47
		2012	2	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		Jumlah	33	23.748,90	40	-	37	-	-	-	3	-	-	-	-
155	PT Pupuk Kujang	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	30.671,69	19	10.816,49	6	148,84	11	10.667,65	2	-	-	-	148,84
		2012	3	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
		Jumlah	19	30.671,69	28	10.816,49	10	148,84	11	10.667,65	7	-	-	-	148,84
156	PT Petrokimia Gresik	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	17.076,15	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	USD 2,465.54	-	USD 11.62	-	USD 11.62	-	-	-	-	-	-	USD 11.62
		2011	3	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Jumlah	9	17.076,150	12	-	10	-	1	-	1	-	-	-	-
			-	USD 2,465.54	-	USD 11.62	-	USD 11.62	-	-	-	-	-	-	USD 11.62
157	PT Pupuk Kaltim	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	17.069,00	23	-	20	-	3	-	-	-	-	-	-
			-	USD 39.202,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 56,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	2	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
		Jumlah	24	17.069,00	37	-	31	-	3	-	3	-	-	-	-
			-	USD 39,202.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	EUR 56.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 19 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
158	PT PIM	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Jumlah	10	-	12	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-
159	Dapensri	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	7	227.814,91	11	107.690,81	9	107.690,81	2	-	-	-	-	-	107.690,81
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	227.814,91	11	107.690,81	9	107.690,81	2	-	-	-	-	-	107.690,81
160	PT Rekayasa Industri	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	143.775,66	15	744,58	9	744,58	6	-	-	-	-	-	744,58
			-	USD 11,125.91	-	USD 12.61	-	USD 12.61	-	-	-	-	-	-	USD 12.61
			-	EUR 61.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	143.775,66	15	744,58	9	744,58	6	-	-	-	-	-	744,58
			-	USD 11,125.91	-	USD 12.61	-	USD 12.61	-	-	-	-	-	-	USD 12.61
			-	EUR 61.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Dana Pensiun BRI	2008	10	470,46	14	470,46	13	470,46	1	-	-	-	-	-	470,46
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	470,46	14	470,46	13	470,46	1	-	-	-	-	-	470,46
162	PT BNI Cabang London	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	DP BNI	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	PT BNI Multifinance	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	PT BNI Securities	2008	12	18.458,11	18	18.458,10	15	18.085,54	3	372,56	-	-	-	-	18.085,54
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	18.458,11	18	18.458,10	15	18.085,54	3	372,56	-	-	-	-	18.085,54
166	PT Bank Syariah Mandiri	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	PT Mandiri Sekuritas	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
168	DP Mandiri	2008	10	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
169	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total BUMN (Anak Perusahaan)		**166**	**28.589.293,43**	**244**	**146.051,17**	**197**	**135.010,96**	**30**	**11.040,21**	**16**	-	**1**	-	**135.028,10**
			-	**USD 53,701.07**	-	**USD 931.19**	-	**USD 931.19**	-	-	-	-	-	-	**USD 931.19**
			-	**EUR 117.48**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)		**2.186**	**112.039.448,10**	**3.930**	**6.186.799,89**	**2.045**	**4.289.238,72**	**877**	**1.135.953,98**	**968**	**755.710,02**	**40**	**5.897,17**	**4.634.431,90**
			-	**USD 1,415,769.81**	-	**USD 579,939.22**	-	**USD 511,500.69**	-	**USD 54,827.10**	-	**USD 13,611.43**	-	-	**USD 66,944.03**
			-	**EUR 587.31**	-	**EUR 24.20**	-	**EUR 24.20**	-	-	-	-	-	-	**EUR 24.20**
			-	**JPY 104,916.81**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	**CNY 896.89**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BHMN															
170	BP Migas	2008	3	1.942,38	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	USD 11,250.02	12	USD 11,250 .02	3	-	9	USD 11,250.02	-	-	-	-	-
		2011	35	205.170,00	39	-	-	-	4	-	35	-	-	-	-
			-	USD 125,893.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	45	207.112,38	57	-	8	-	14	-	35	-	-	-	-
			-	USD 137,143.74	-	USD 11,250.02	-	-	-	USD 11,250.02	-	-	-	-	-
	Total BHMN		**45**	**207.112,38**	**57**	**-**	**8**	-	**14**	-	**35**	-	-	-	-
			-	**USD 137,143.74**	-	**USD 11,250.02**	-	-	-	**USD 11,250.02**	-	-	-	-	-
KKKS															
171	BOB PT BSP - Pertamina Hulu	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	8	USD 436.03	8	USD 436.03	7	USD 436.03	1	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	USD 436.03	8	USD 436.03	7	USD 436.03	1	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 21 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
172	Chevron Pacific Indonesia Wilayah Kerja (WK) MFK - PSC	2008	6	USD 2,828.70	6	USD 2,828.70	5	USD 2,828.70	1	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	USD 33,878.11	8	USD 13,025.51	2	USD 387.04	-	-	6	USD 12,638.47	-	-	-
		2012	8	USD 538.26	11	USD 538.26	-	-	-	-	11	USD 538.26	-	-	-
		Jumlah	20	USD 37,245.07	25	USD 16,392.47	7	USD 3,215.74	1	-	17	USD 13,176.73	-	-	-
173	Chevron Pacific Indonesia & ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd.	2008	1	USD 45,474.12	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	USD 45,474.12	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
174	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 228,967.16	12	USD 1,211.82	2	USD 36.75	1	USD 11.20	9	USD 1,163.87	-	-	-
		2012	11	USD 38,152.55	11	USD 38,152.55	-	-	-	-	11	USD 38,152.55	-	-	-
		Jumlah	21	USD 267,119.71	23	USD 39,364.37	2	USD 36.75	1	USD 11.20	20	USD 39,316.42	-	-	-
177	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Kalila (Korinci Baru) WK Korinci	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	580,59	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
			-	USD 1,434.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	580,59	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
			-	USD 1,434.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Medco E&P Malaca WK Area "A" North Sumatera	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 22 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
183	Pearl Oil WK Tungkal	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2008	6	USD 2,728.24	10	USD 2,728.24	7	USD 2,728.24	3	-	-	-	-	-	-
		2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	USD 881.53	4	USD 881.53	-	-	-	-	4	USD 881.53	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	USD 3,609.77	14	USD 3,609.77	7	USD 2,728.24	3	-	4	USD 881.53	-	-	-
185	Petroselat Ltd. WK Selat Panjang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	Premier Oil WK Natuna Sea A	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	9	USD 2,650.25	-	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	9	USD 2,650.25	-	-	1	-	-	-	-
187	Star Energy Ltd. WK Kakap	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	6.315,78	14	-	4	-	1	-	9	-	-	-	-
			-	USD 5,787.65	-	USD 2,309.64	-	USD 431.74	-	-	-	USD 1,877.90	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	6.315,78	14	-	4	-	1	-	9	-	-	-	-
			-	USD 5,787.65	-	USD 2,309.64	-	USD 431.74	-	-	-	USD 1,877.90	-	-	-
188	Job (PSC) Costa Igl WK Gebang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	BP West Java Ltd. WK ONWJ	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	Camar Resource Canada WK Bawean	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 23 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
195	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	5	USD 910.33	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	7	288,19	7	288,19	-	-	-	-	7	288,19	-	-	-
			-	USD 2,726.72	-	USD 985.66	-	-	-	-	-	USD 985.66	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	288,19	12	288,19	5	-	-	-	7	288,19	-	-	-
			-	USD 3,637.05	-	USD 985.66	-	-	-	-	-	USD 985.66	-	-	-
196	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	Kangean Energy Indonesia WK Kangean	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	7	USD 150.17	7	USD 150.17	5	USD 38.26	2	USD 111.91	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	USD 150.17	7	USD 150.17	5	USD 38.26	2	USD 111.91	-	-	-	-	-
202	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	Petrochina Ltd. WK Bangko	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 24 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2008-2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	6	USD 10,456.76	10	USD 7,455.80	3	USD 1,557.39	5	USD 5,898.41	2	-	-	-	-
		2011-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	USD 10,456.76	10	USD 7,455.80	3	USD 1,557.39	5	USD 5,898.41	2	-	-	-	-
211	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	USD 8,053.11	6	USD 8,053.11	-	-	-	-	6	USD 8,053.11	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	USD 8,053.11	6	USD 8,053.11	-	-	-	-	6	USD 8,053.11	-	-	-
216	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Seleraya - Merangin Dua	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2008	6	651,22	6	651,22	6	651,22	-	-	-	-	-	-	-
			-	USD 43.98	-	USD 43.98	-	USD 43.98	-	-	-	-	-	-	-
		2009-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	411,94	10	411,94	1	411,94	-	-	9	-	-	-	-
			-	USD 4,994.55	-	USD 4,878.50	-	-	-	-	-	USD 4,878.50	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	1.063,16	16	1.063,16	7	1.063,16	-	-	9	-	-	-	-
			-	USD 5,038.53	-	USD 4,922.48	-	USD 43.98	-	-	-	USD 4,878.50	-	-	-
219	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 25 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
220	Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Energy Equity WK Sengkang	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Inpex WK East Kalimantan	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	10	3.424,75	10	3.424,75	8	676,52	2	2.748,23	-	-	-	-	-
			-	USD 235.53	-	USD 235.53	-	USD 235.53	-	-	-	-	-	-	-
			-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	USD 1,279.46	12	USD 1,279.46	-	-	-	-	12	USD 1,279.46	-	-	-
		2012	8	USD 22,779.66	11	USD 12,779.66	-	-	-	-	11	USD 12,779.66	-	-	-
		Jumlah	29	3.424,75	33	3.424,75	8	676,52	2	2.748,23	23	-	-	-	-
			-	USD 24,294.65	-	USD 14,294.65	-	USD 235.53	-	-	-	USD 14,059.12	-	-	-
			-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	SGD 5.30	-	-	-	-	-	-	-
227	VICO WK Sanga-sanga	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	USD 638.29	10	USD 638.28	7	USD 309.69	-	-	3	USD 328.59	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	USD 638.29	10	USD 638.28	7	USD 309.69	-	-	3	USD 328.59	-	-	-
228	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Toili, Sulawesi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Toili, Sulawesi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 26 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
232	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	PT Pertamina EP	2008	7	USD 1,325,966.29	8	USD 1,325,966.29	5	USD 839,660.29	3	USD 486,306.00	-	-	-	-	-
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	40.091,22	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	USD 61,848.51	-	USD 61,848.51	-	USD 61,848.51	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	USD 6,640.59	10	USD 6,640.59	9	USD 6,640.59	-	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	40.091,22	30	-	26	-	3	-	1	-	-	-	-
			-	USD 1,394,455.39	-	USD 1,394,455.39	-	USD 908,149.39	-	USD 486,306.00	-	-	-	-	-
235	Benuo Taka WK Wailawi Block	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Tangguh - BP Berau	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2009	5	-	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
		2010-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	-	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
237	BP Muturi	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	BP Wiriagar	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total KKKS		**203**	**51.763,69**	**234**	**4.776,10**	**102**	**1.739,68**	**30**	**2.748,23**	**102**	**288,19**	-	-	-
			-	**USD 1,810,481.08**	-	**USD 1,495,718.07**	-	**USD 919,832.99**	-	**USD 492,327.52**	-	**USD 83,557.56**	-	-	-
			-	**SGD 5.30**	-	**SGD 5.30**	-	**SGD 5.30**	-	-	-	-	-	-	-
LEMBAGA															
239	Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia	2008-2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	-	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	-	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-
	Total Lembaga		**16**	-	**35**	**-**	**27**	-	**8**	-	-	-	-	-	-

Halaman 27 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SAHAM PEMERINTAH 50 %															
240	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	2008-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	2.514,51	4	2.514,51	-	-	-	-	4	2.514,51	-	-	-
		Jumlah	3	2.514,51	4	2.514,51	-	-	-	-	4	2.514,51	-	-	-
	Total Saham Pemerintah 50%		**3**	**2.514,51**	**4**	**2.514,51**	**-**	-	**-**	-	**4**	**2.514,51**	**-**	-	-
OTORITA															
242	Otorita Asahan	2008-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Otorita		-	-	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	**-**	-	-	-
	Total BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya		**267**	**261.390,58**	**330**	**7.290,61**	**137**	**1.739,68**	**52**	**2.748,23**	**141**	**2.802,70**	-	-	-
				USD 1,947,624.82		**USD 1,506,968.09**		**USD 919,832.99**		**USD 503,577.54**		**USD 83,557.56**		**-**	**-**
				SGD 5.30		**SGD 5.30**		**SGD 5.30**		**-**		**-**		**-**	**-**

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id